



Pemerintah Kabupaten Tegal



**Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2026**



RKPD 2026



0283-491694



www.tegalkab.go.id



Jl. dr. Soetomo No.1, Slawi



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2026 dan sampai dengan Desember 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026;
- b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah tahun anggaran 2026 dan RKA Perangkat Daerah tahun anggaran 2026; dan

- c. pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : pendahuluan;
- b. Bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Bab III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. Bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. Bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
- g. Bab VII : penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI TEGAL,



ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-5
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD	I-8
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografi	II-1
A. Letak dan Lokasi Geografis	II-2
B. Topografi	II-3
C. Jenis Tanah dan Geologi	II-4
D. Hidrologi	II-5
E. Klimatologi	II-6
F. Wilayah Rawan Bencana	II-7
G. Penggunaan Lahan	II-9
H. Kesesuaian Lahan	II-11
I. Rencana Tata Ruang	II-12
2.1.1.2 Kondisi Demografi	II-17
A. Jumlah Penduduk	II-17
B. Kepadatan dan Persebaran Penduduk	II-19
C. Pertumbuhan Penduduk	II-20
D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II-21
E. Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-23
A. Pertumbuhan Ekonomi	II-23
B. Laju Inflasi	II-27
C. PDRB Per Kapita	II-28
D. Indeks Gini	II-29
E. Penduduk Miskin	II-30
F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-34
G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-36
H. Usia Harapan Hidup (UHH)	II-38
I. Harapan Lama Sekolah (HLS)	II-39
J. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-41
K. Angka Kematian Ibu (AKI)	II-42
L. Angka Kematian Bayi (AKB)	II-44
M. Angka Kematian Balita (AKABA)	II-45
N. Gizi Buruk dan Stunting	II-46
O. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-47
P. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-48
Q. Pemuda dan Olahraga	II-48
R. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II-50
S. Reformasi Birokrasi	II-51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-53
2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar	II-53
A. Pendidikan	II-53
B. Kesehatan	II-63

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-71
D. Perumahan Rakyat dan Permukiman	II-92
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum	II-96
F. Sosial	II-104
2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-109
A. Tenaga Kerja	II-109
B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-116
C. Pangan	II-120
D. Pertanahan	II-122
E. Lingkungan Hidup	II-123
F. Kependudukan dan Catatan Sipil	II-132
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-136
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-146
I. Perhubungan	II-148
J. Komunikasi dan Informatika	II-157
K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-163
L. Penanaman Modal	II-168
M. Kepemudaan dan Olahraga	II-171
N. Statistik	II-173
O. Persandian	II-178
P. Kebudayaan	II-185
Q. Perpustakaan	II-187
R. Kearsipan	II-189
2.1.3.3 Fokus Layanan Pilihan	II-191
A. Pariwisata	II-191
B. Pertanian	II-194
C. Perdagangan	II-226
D. Perindustrian	II-232
E. Transmigrasi	II-236
F. Kelautan dan Perikanan	II-237
2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-242
A. Perencanaan	II-232
B. Keuangan dan Aset Daerah	II-244
C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	II-241
D. Penelitian dan Pengembangan	II-244
E. Pengawasan	II-246
F. Sekretariat Daerah	II-250
G. Sekretariat DPRD	II-255
H. Kecamatan	II-256
I. Kesatuan Bangsa dan Politik	II-258
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-261
A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	II-261
B. Angka Kriminalitas	II-265
C. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	II-266
D. Sumber Daya Manusia	II-267
E. Capaian dan Progress Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal	II-269
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD	II-276
2.2.1 Non Urusan	II-276
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-378
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-378
2.3.1.1 Aspek Demografi	II-378

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-378
3.2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-381
3.2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-399
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
b. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-16
c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-23
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1 Visi.....	IV-2
4.1.2 Misi	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran	IV-5
4.1.4 Program Unggulan.....	IV-19
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-19
4.2.1 Prioritas Nasional Tahun 2026.....	IV-19
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	IV-21
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026	IV-28
4.2.4 Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	IV-75
4.2.5 Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026.....	IV-93
4.2.6 Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-120
4.2.7 Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi	IV-131
4.2.8 Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting	IV-142
4.2.9 Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Kemiskinan Ekstrem	IV-150
4.2.10 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal	IV-161
4.2.11 Inovasi Pembangunan Daerah	IV-171
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-2
5.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	V-6
5.3 Urusan Pilihan	V-14
5.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	V-18
5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	V-19
5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	V-20
5.7 Unsur Pemerintahan Umum.....	V-21
5.8 Unsur Kewilayahan.....	V-21
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-2

6.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Tegal	VI-13

BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026 mendasari dari Rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2025-2026. Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 juga mempedomani peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, beberapa permendagri yang juga dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal adalah bersifat komprehensif melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Tegal serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follows programme* dan *programme follows result* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Sejalan dengan hal tersebut maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 meliputi: 1) penyusunan rancangan RKPD tahun 2026 dan penyusunan surat edaran Bupati Tegal tentang arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; 2) konsultasi publik; 3) musrenbang tingkat Kecamatan 4) forum perangkat daerah; 5) penyusunan rancangan RKPD Tahun 2026; 6) musrenbang tingkat kabupaten; 7) penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2026; 8) Reviu RKPD oleh APIP; 9) Fasilitasi RKPD Tahun 2026 oleh Provinsi; 10) Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada DPRD; dan 11) Penetapan RKPD Tahun 2026.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sehingga RKPD menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD tahun 2025.



RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan rumusan isu strategis rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, maka RKPD Tahun 2026 diarahkan pada **“Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan”**.

RKPD Tahun 2026 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta penyelarasan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah, diperlukan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

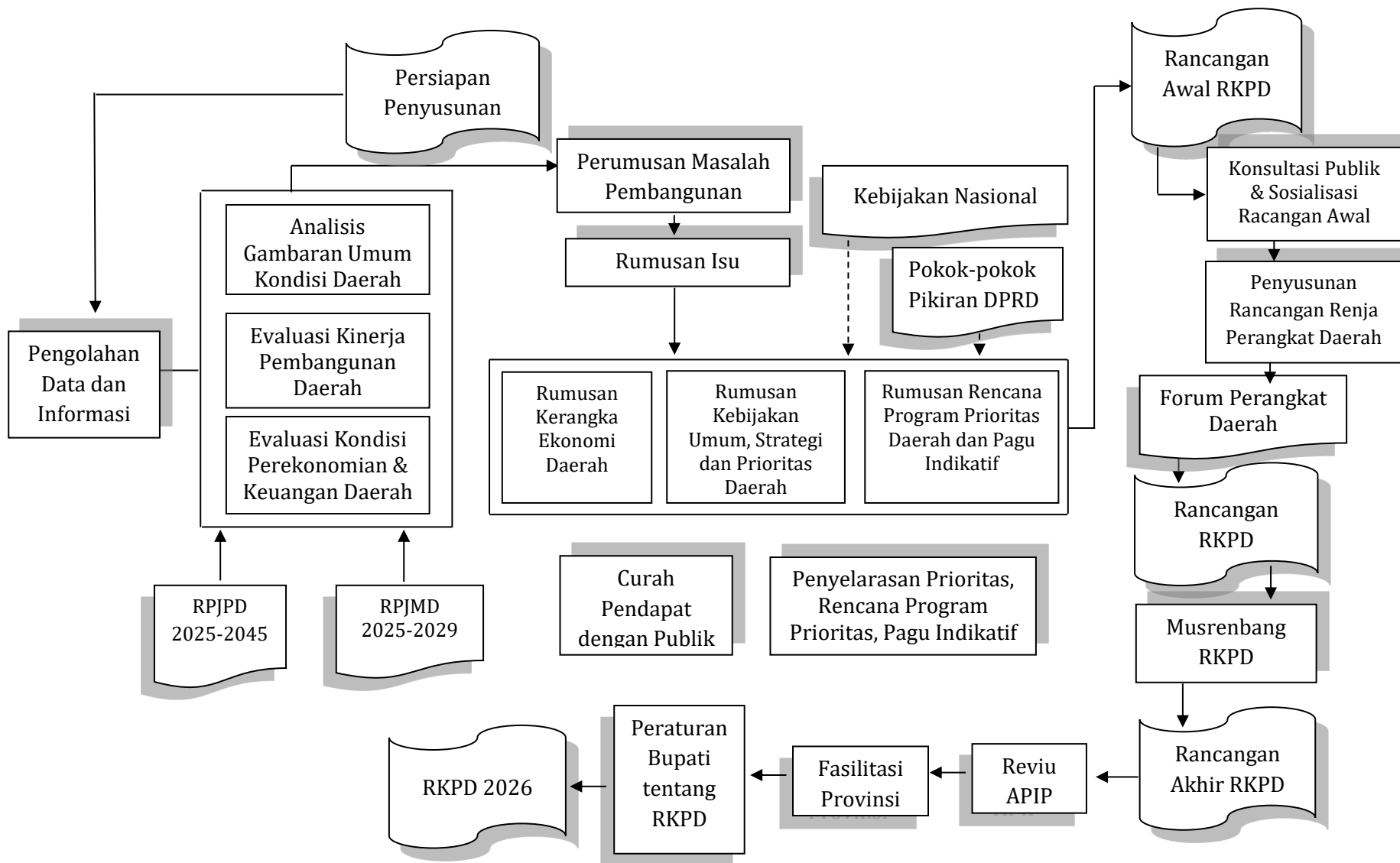
Dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. RKPD Tahun 2026 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang yang terjadi, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang ditetapkan.
2. Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau



pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 disusun sesuai dengan tahapan sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen RKPD disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RTRW Kabupaten Tegal, sekaligus mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/(SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)).

Dokumen RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 disusun dengan menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang tingkat desa dan tingkat kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah yang berpedoman pada arah kebijakan nasional untuk keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka dimungkinkan terdapat beberapa perubahan terkait kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah yang berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran program pembangunan tahun 2026 di Kabupaten Tegal. RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 dirancang untuk dapat mengadopsi perubahan tersebut, dengan kata lain dalam hal terdapat perubahan terhadap peraturan yang berdampak atas dokumen perencanaan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD Tahun 2026 dalam

proses penyusunannya, maka dapat langsung disesuaikan tanpa harus merubah dokumen RKPD tahun 2026 terlebih dahulu.

Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Berkaitan dengan penganggaran daerah maka dokumen RKPD tahun 2026 menjadi acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Tegal tahun 2026. Sedangkan pada saat pertanggungjawaban, maka dokumen RKPD ini akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

1.4 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Tegal 2026 adalah sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target rancangan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal serta bagi para pemangku kepentingan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RKPD adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Landasan arah terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah melalui program dan kegiatan antar Perangkat Daerah di semua tingkatan pemerintahan;
3. Upaya terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Upaya untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Upaya terwujudnya kesinambungan hasil kesepakatan Musrenbang partisipatif dengan rumusan dokumen RKPD Kabupaten Tegal;

6. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
7. Sebagai instrument evaluasi terhadap keterkaitan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian penjelasan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 meliputi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menurut urusan, program, kegiatan, realisasi target kinerja, lokasi dan Perangkat Daerah penanggungjawab. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Menguraikan mengenai telaahan terhadap kerangka ekonomi daerah secara makro di wilayah Kabupaten Tegal menyangkut arah kebijakan keuangan daerah yang tertuang dalam ringkasan anggaran berdasarkan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah untuk tahun 2026.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan target yang direncanakan dalam rancangan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang tertuang dalam program dengan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program / kegiatan / sub kegiatan, rekapitulasi program / kegiatan / sub kegiatan serta rumusan program / kegiatan / sub kegiatan Tahun 2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan pemerintah daerah dalam Tahun 2026 baik yang dikelompokkan dalam Pendapatan dan Belanja maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2026.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km²) secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
1	Margasari	13	100,8
2	Bumijawa	18	109,2
3	Bojong	17	67,7
4	Balapulang	20	86,2
5	Pagerbarang	13	45,8
6	Lebaksiu	15	47,0
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Pangkah	23	37,6
10	Slawi	10	13,8
11	Dukuhwaru	10	26,3
12	Adiwerna	21	27,0
13	Dukuhturi	18	17,1
14	Talang	19	18,9
15	Tarub	20	28,0
16	Kramat	20	43,9
17	Suradadi	11	58,8
18	Warureja	12	63,6
Jumlah		287	983,9

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (88,55 km²), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,63 km²). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

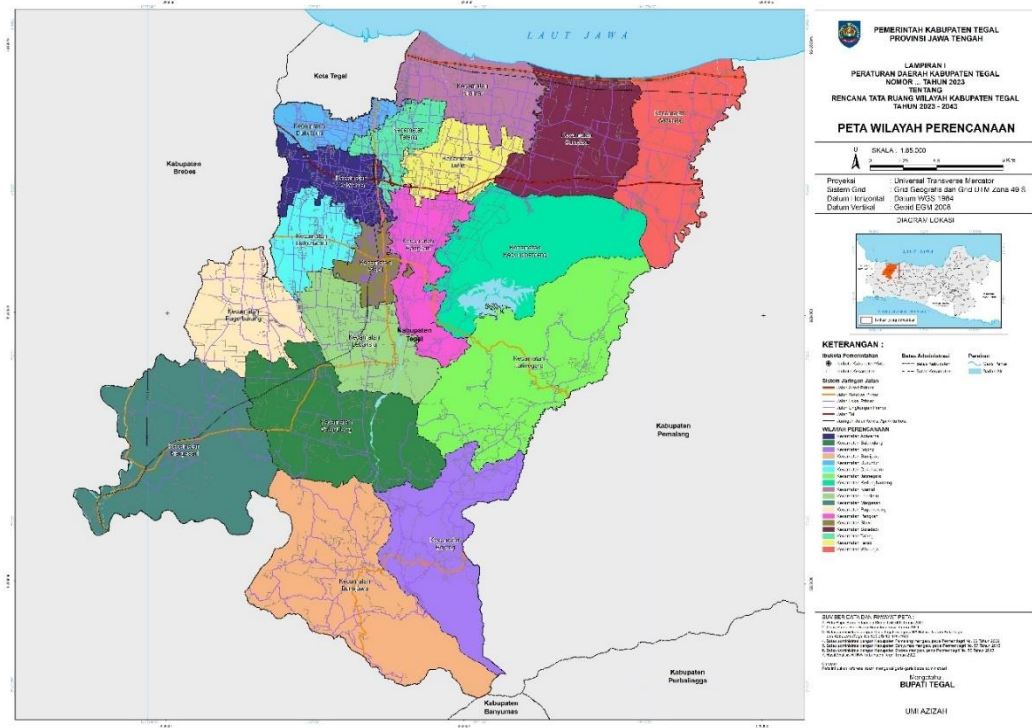
- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

A. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 108⁰57'6" s/d 109⁰21'30" Bujur Timur dan 6⁰50'41" s/d 7⁰15'15'30" Lintang

Selatan. Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 98.389 km². Kabupaten Tegal berada di lokasi yang strategis karena dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan langsung dengan pantai utara jawa.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis dimana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut:

- Jalan Tol Pejagan – Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Tegal – Cirebon di sebelah utara
- Jalan Arteri Primer Tegal – Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan – Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta–Cirebon – Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal – Slawi – Purwokerto– Yogyakarta – Solo

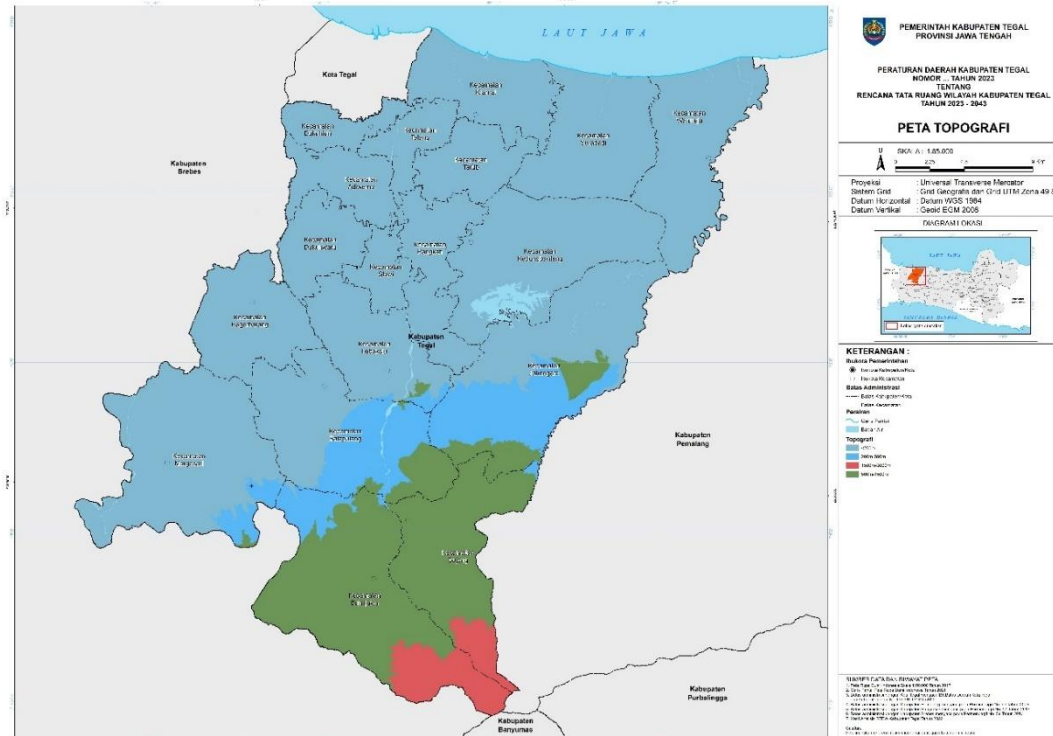
B. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

- Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja.
- Daerah Dataran Rendah : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.

- Daerah Dataran Tinggi : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- Wilayah Kramat sekitarnya : 11 Meter
- Wilayah Slawi sekitarnya : 42 Meter
- Wilayah Lebaksiu sekitarnya : 135 Meter
- Wilayah Bumijawa sekitarnya : 949 Meter

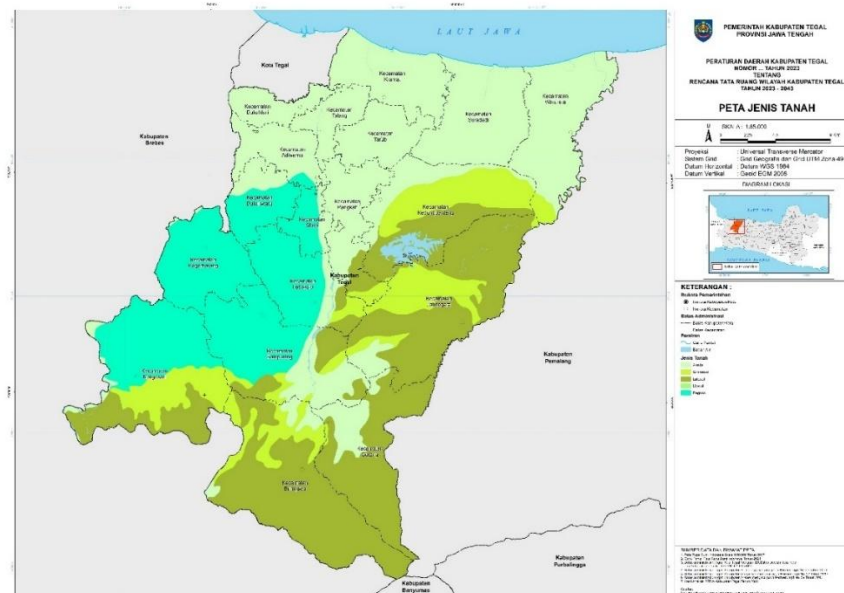
Wilayah daratan mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran (2-150) seluas 35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit (15-400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng). Kondisi dataran tersebut, di antaranya berupa wilayah hutan, persawahan dan ladang yang cukup luas.

C. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69%), Grumosol (9,42%), Andosol (4,29%) dan jenis lain-lain (3,67%). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698,575 Ha yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Gambar 2. 3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal



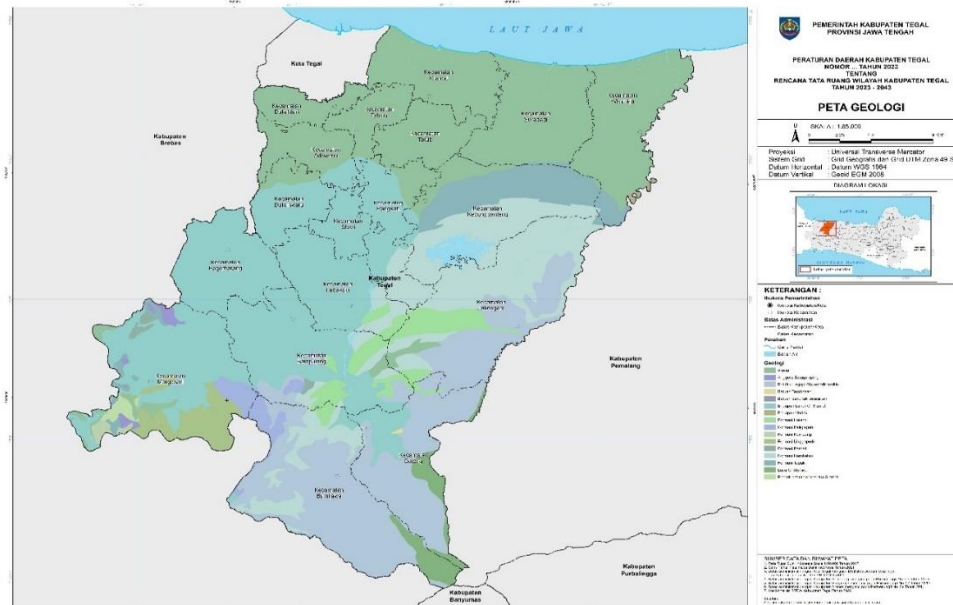
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, *braiding*, *meander*, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, *lungur vulkan*, pegunungan paralel, pegunungan vulkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan vulkan, pesisir pantai, serta teras sungai.

Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

D. Hidrologi

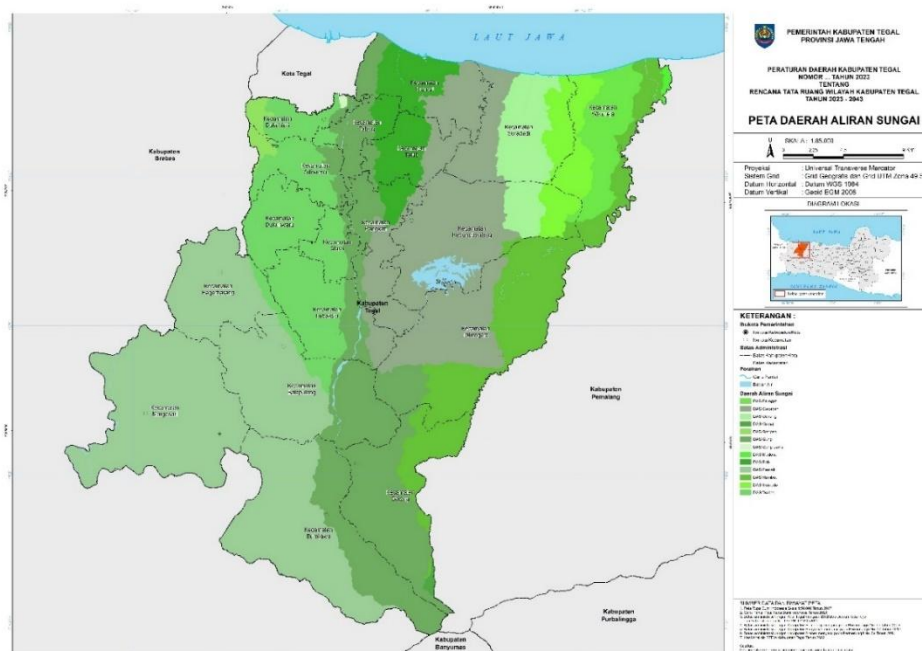
Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi *water storage* di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulung, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulung, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Gambar 2. 5 Peta Daerah Aliran Sungai



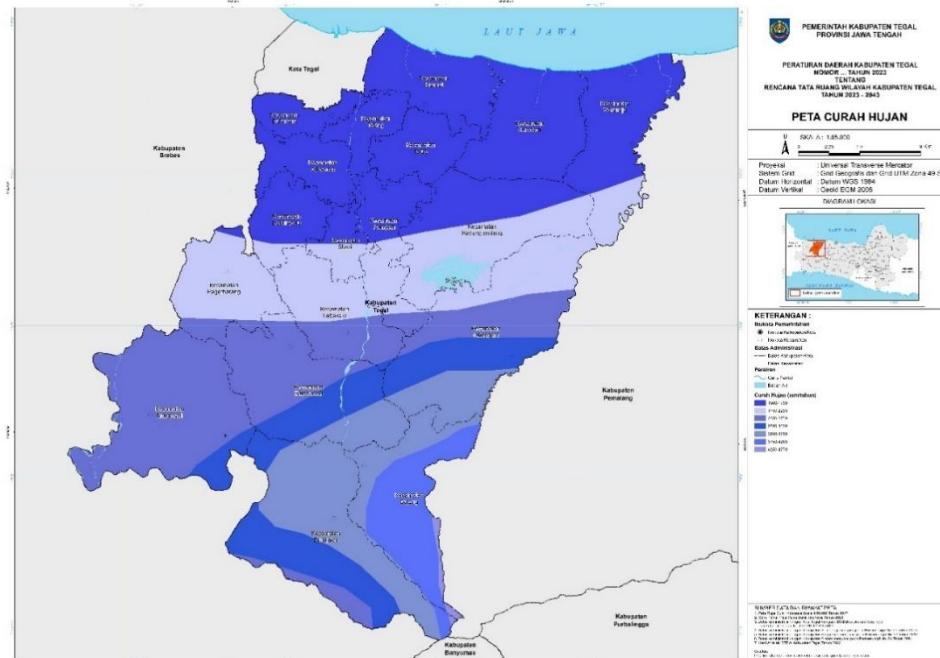
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

E. Klimatologi

Hari hujan yang tinggi di Kabupaten Tegal terdapat pada bulan Januari yaitu sebanyak 21 hari, sedangkan jumlah hari hujan rendah terdapat pada bulan Juni dan September yaitu 0 hari. Kemudian kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban udara rata-rata berjumlah 85% sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan September dan Oktober sebanyak 69% dan untuk tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan September sejumlah 1.012,3 milibar (mb) dan terendah pada bulan April sejumlah 1.009,20 milibar (mb). Di Kabupaten Tegal pada bulan September tidak terdapat hari hujan maupun curah hujan.

Kabupaten Tegal beriklim Tropis, dengan rata-rata pada tahun 2024 curah hujan 140,00 mm³, dimana temperatur pada tahun 2024 maksimum rata-rata 32,8° C. Minimum rata-rata 24,3° C dan suhu rata-rata 26,9° C. Kelembaban di Kabupaten Tegal Tahun 2024 rata-rata 82%. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember 345 mm³ dan terendah bulan Agustus 16,5 mm³. Rata-rata curah hujan 182,03 mm³, dengan tekanan udara rata-rata 1.008,4 hPa serta sinar matahari rata-rata menyinari 113,4 jam dengan rata-rata arah angin maksimal sebesar 200°. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

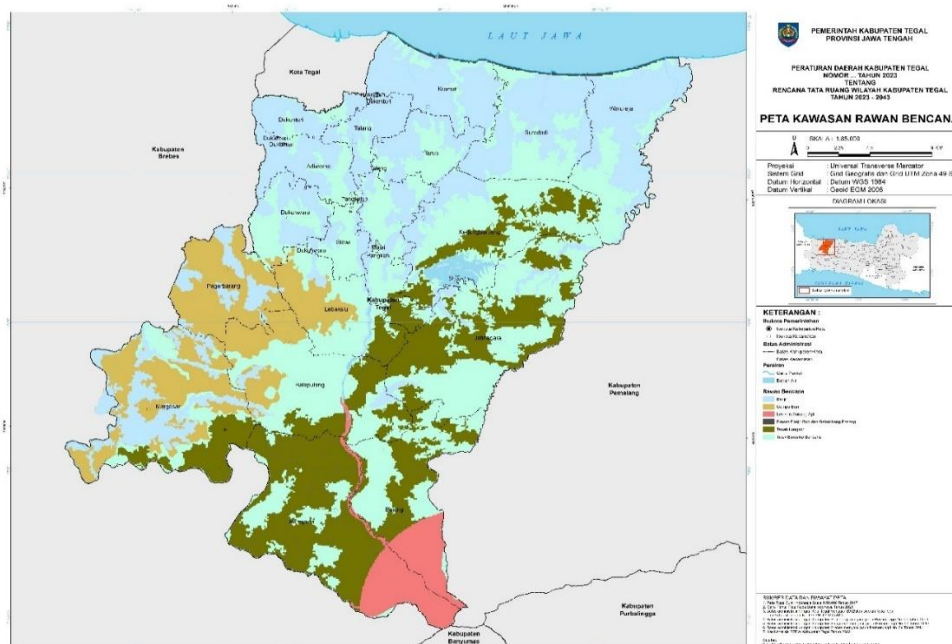


Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

F. Wilayah Rawan Bencana

Apabila dilihat kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Slamet Tegal merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam khususnya bencana erupsi gunung berapi dan gerakan tanah (tanah longsor), abrasi, angin topan dan kebakaran hutan.

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Bencana Alam



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Rawan Longsor; Daerah yang sering terjadi longsor adalah wilayah bagian selatan yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah. Hal ini lebih disebabkan karena secara topografis daerah tersebut merupakan daerah perbukitan dan kaki Gunung Slamet, serta daerah tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi, serta vegetasi tutupan lahan dan merupakan daerah patahan
- b. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupalelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjirbandang, dan longsor material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya di daerah Kaki Gunung Slamet meliputi Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa.
- c. Daerah Rawan Banjir; yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai, serta tidak adanya/tidak berfungsinya drainase utama di wilayah permukiman khususnya di wilayah perkotaan. Daerah yang rawan banjir adalah yang dilalui oleh Sungai Jembangan meliputi : Kecamatan Slawi, Adiwerna, Talang dan Dukuhturi, serta wilayah permukiman yang dilalui oleh Sungai Cacaban khususnya di wilayah Pantura yaitu Kecamatan Suradadi dan Kramat.
- d. Daerah Rawan Abrasi; Kabupaten Tegal memiliki wilayah Pantai Utara sepanjang sekitar 37 km, beberapa tempat khususnya daerah – daerah yang berdekatan dengan muara sungai menjadi salah satu penyebab abrasi pantai. Wilayah yang sering terjadi abrasi meliputi Kelurahan Dampyak Kecamatan Kramat, Desa Maribaya Kecamatan Kramat, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja, Desa Demangharja Kecamatan Suradadi, Desa Suradadi Kecamatan Suradadi, Desa Bojongsana Kecamatan Suradadi, Purwahamba Kecamatan Suradadi;
- e. Daerah Rawan Angin Topan; dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kecamatan Balapulang, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa.
- f. Daerah Rawan Kekeringan; yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam yaitu khususnya pada daerah yang bukan merupakan Cekungan Air Tanah (CAT), meliputi Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Warureja.
- g. Daerah Rawan Gelombang Pasang; Untuk rawan gelombang pasang didasarkan pada jarak dengan pantai, karakteristik lahan (morfologi dan ketinggian wilayah) serta ada tidaknya penghalang baik alam maupun buatan,

meliputi: Kecamatan Kramat (Desa Kramat dan Desa Maribaya), Kecamatan Suradadi (Desa Bojongsana, Desa Purwahamba, dan Desa Suradadi) dan Kecamatan Warureja (Desa Demangharja).

- h. Daerah Rawan Kebakaran Lahan adalah daerah yang merupakan kawasan hutan khususnya yang komoditas tanamannya tanaman jati yaitu meliputi Kecamatan Balapulang, Margasari, Jatinegara, Kedungbanteng dan sebagian Warureja.

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal- Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah. Kawasan terbangun tumbuh seturut kedua jaringan jalan tersebut.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan.

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 lahan Kabupaten Tegal dengan luas sekitar 98.389 hektar (ha) saat ini mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan luasan kurang lebih mencapai 46.320 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan. Tutupan lahan lainnya di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan (17,32%), permukiman (14,72%), tegalan (10,04%), Kebun Campuran (4,63%), Hutan (4,02%), Industri (0,36%) dan tutupan lahan lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Luasan Tutupan Lahan

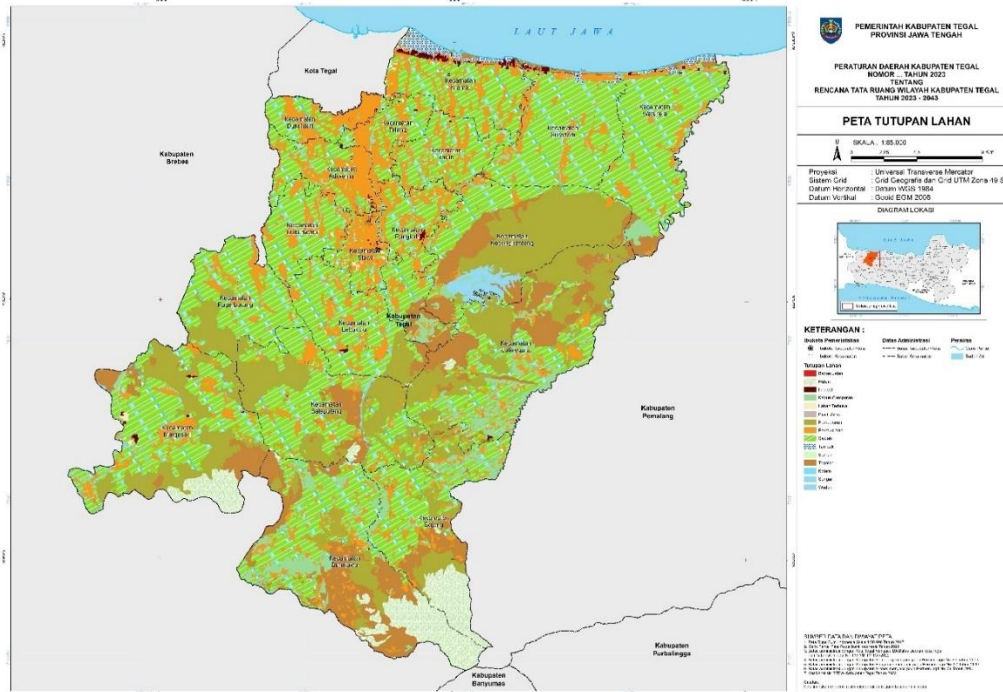
Jenis Tutupan Lahan	Luasan (ha)	Presentase (%)
Badan Jalan	4,09	0,05
Hutan	3.949,61	4,02
Industri	356,74	0,36
Kebun Campuran	4.547,03	4,63
Kolam	1,5	0,00
Lahan Terbuka	195,49	0,20
Pasir Darat	16,26	0,02
Perkebunan	17.007,61	17,32
Permukiman	14.452,65	14,72
Sawah	46.320,92	47,17
Semak Belukar	121,73	0,12
Tambak	648,21	0,66
Tegalan	9.858,25	10,04
Waduk	672,42	0,68

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Peta tutupan lahan menunjukkan adanya berbagai jenis penutup permukaan bumi di suatu wilayah, seperti hutan (hutan lebat, hutan bakau,dll) , sawah, bangunan (perumahan, perkantoran, dll), dan perairan (sungai, danau, laut) dan lahan terbuka

(tanah kosong, padang rumput). Peta ini juga dapat menunjukkan luas setiap jenis tutupan lahan dan pola pemanfaatan ruang di suatu daerah. Pada Gambar 2.9 ditunjukkan Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 8 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tegal



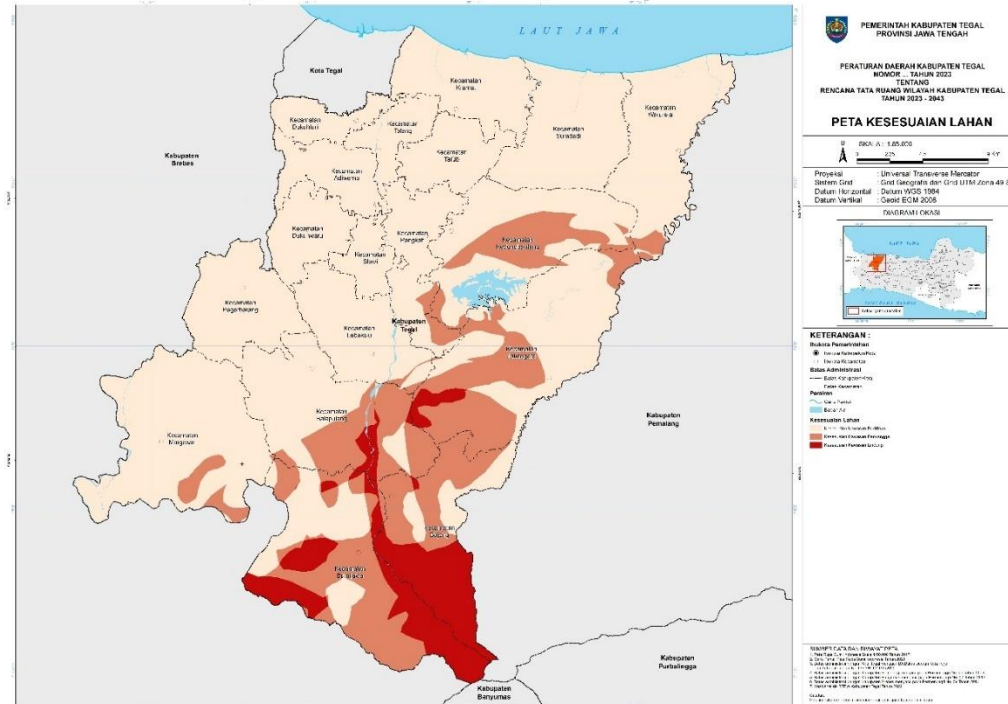
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

H. Kesesuaian Lahan

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, secara fisik kawasan di Kabupaten Tegal terbagi Kawasan Lindung, Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung di Kabupaten Tegal sebagian besar berada di dataran tinggi lereng Gunung Slamet yang berada di Kecamatan Bojong dan Bumijawa. Kawasan ini memiliki jenis tanah latosol dengan tingkat kelerengan yang sangat tinggi dan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan lahan di kawasan ini tidak sesuai untuk kegiatan budidaya pertanian. Sementara Kawasan Penyangga mayoritas berada di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Jatinegara.

Kawasan ini meliputi hutan lindung, daerah aliran sungai dan areal tepi sungai. Kawasan penyangga difungsikan sebagai pelindung kawasan konservasi terhadap gangguan dari luar dan pelindung kawasan konservasi terhadap gangguan kawasan pemukiman. Maka dari itu, kawasan ini diperuntukkan bukan untuk kegiatan pembangunan seperti permukiman, industri maupun kegiatan budidaya terbangun lainnya. Kawasan Budidaya berada di dataran rendah Kabupaten Tegal dengan jenis tanah alluvial dan curah hujan yang cenderung rendah. Kawasan tersebut memiliki fungsi sebagai kawasan permukiman, kawasan budidaya tanaman tahunan maupun kegiatan budidaya terbangun maupun non terbangun lainnya.

Gambar 2. 9 Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

I. Rencana Tata Ruang Kabupaten Tegal

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tegal yaitu mewujudkan ruang Kabupaten Berbasis Pertanian Berkelanjutan yang didukung oleh industri dan Kepariwisata yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Berikut ini penjababaran struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

1. Struktur Ruang Kabupaten Tegal

Pusat Permukiman di Kabupaten Tegal teridentifikasi menjadi 3 kelas, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Tegal berada di kawasan perkotaan Slawi - Adiwerna yang merupakan kawasan perkotaan dengan perkembangan kegiatan paling pesat. Sesuai dengan perannya, PKL Slawi-Adiwerna berperan sebagai pusat yang melayani keseluruhan wilayah kabupaten. Perkotaan Slawi - Adiwerna sebagai Pusat Kegiatan Lokal didukung dengan rencana pengembangan jaringan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan seperti pengembangan stasiun penumpang kereta api, pengembangan terminal tipe B dan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan pelayanan skala kabupaten.

Sebagaimana perannya, Pusat Pelayanan Kawasan Kabupaten Tegal merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan. PPK tersebar di berbagai pusat permukiman perkotaan di berbagai kecamatan meliputi:

- PPK Talang – Dukuhturi, meliputi: Kecamatan Dukuhturi; dan Kecamatan Talang.
- PPK Mejasem – Warureja, meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

- c. PPK Lebaksiu – Balapulang, meliputi: Kecamatan Lebaksiu; dan Kecamatan Balapulang.
- d. PPK Pangkah, meliputi: Kecamatan Pangkah; dan Kecamatan Kedungbanteng.
- e. PPK Dukuhwaru di Kecamatan Dukuhwaru.
- f. PPK Margasari di Kecamatan Margasari.
- g. PPK Bumijawa - Bojong, meliputi: Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong.
- h. PPK Tarub di Kecamatan Tarub.

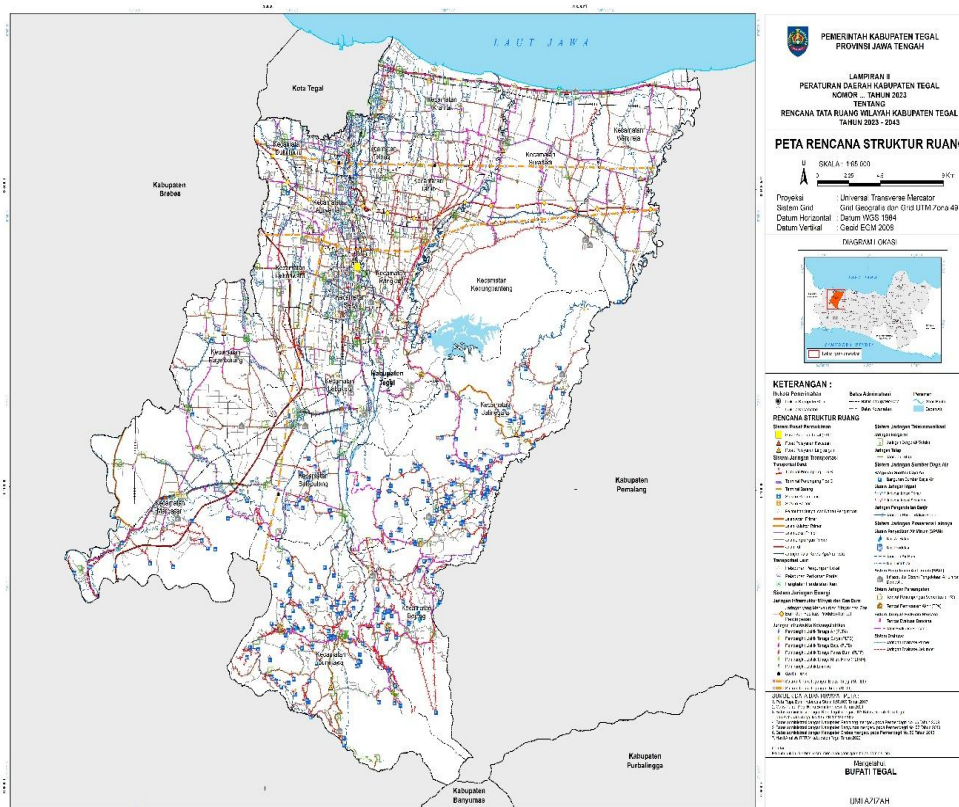
Sementara itu, dalam mendukung pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal, terdapat titik Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi:

- a. PPL Harjowinangun di Kecamatan Balapulang;
- b. PPL Danasari di Kecamatan Bojong;
- c. PPL Kajenengan di Kecamatan Bojong;
- d. PPL Jejeg di Kecamatan Bumijawa;
- e. PPL Batumirah di Kecamatan Bumijawa;
- f. PPL Jatinegara di Kecamatan Jatinegara;
- g. PPL Pagerbarang di Kecamatan Pagerbarang;
- h. PPL Karangdawa di Kecamatan Margasari;
- i. PPL Jatibogor di Kecamatan Suradadi;
- j. PPL Harjasari di Kecamatan Suradadi; dan
- k. PPL Sukareja di Kecamatan Warureja.

Selain rencana pengembangan pusat permukiman, terdapat beberapa isu strategis terkait pengembangan sistem jaringan sarana prasarana dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tegal. Isu strategis rencana pengembangan sistem jaringan transportasi diantaranya adalah pengembangan stasiun dan terminal penumpang, rencana pengembangan jalur double track kereta api, pemeliharaan jalan tol pejalan-pemalang serta rencana pengembangan jalan tol Pejagan Cilacap yang melalui Kabupaten Tegal. Dalam mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi laut, di Kabupaten Tegal terdapat rencana peningkatan pelayanan pelabuhan angkutan laut berupa pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Kramat, Pelabuhan Perikanan Pantai di Kecamatan Kramat dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Suradadi. Selain itu, untuk mendukung pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sekaligus juga untuk menambah daya saing kawasan pariwisata Waduk Cacaban, terdapat rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan berupa dermaga Waduk Cacaban yang berada di Kecamatan Kedungbanteng.

Untuk mendukung tujuan penataan ruang kabupaten, terdapat beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, diantaranya adalah rencana pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) Regional Bregasmalang, proyek nasional pengembangan pelayanan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan dan rencana pengembangan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan. Kabupaten Tegal memiliki rencana pembangunan PLTA yang berlokasi di Waduk Cacaban dan PLTP Guci yang berada di sekitar Kawasan Lereng Gunung Slamet. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tegal secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 10 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2. Pola Ruang Kabupaten Tegal

Ditinjau dari rencana pola ruang, Kabupaten Tegal secara spasial terbagi atas beberapa arahan pengembangan pada tiap-tiap wilayah. Arahan pengembangan pola ruang pada daerah di kawasan utara / pantura adalah sebagai kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kedua, pada kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan sekitarnya didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan, yang didalamnya juga terdapat aktivitas pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Ketiga, pada kawasan perkotaan Balapulang-Lebaksiu dan kawasan perkotaan Margasari memiliki arahan pengembangan sebagai kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan industri.

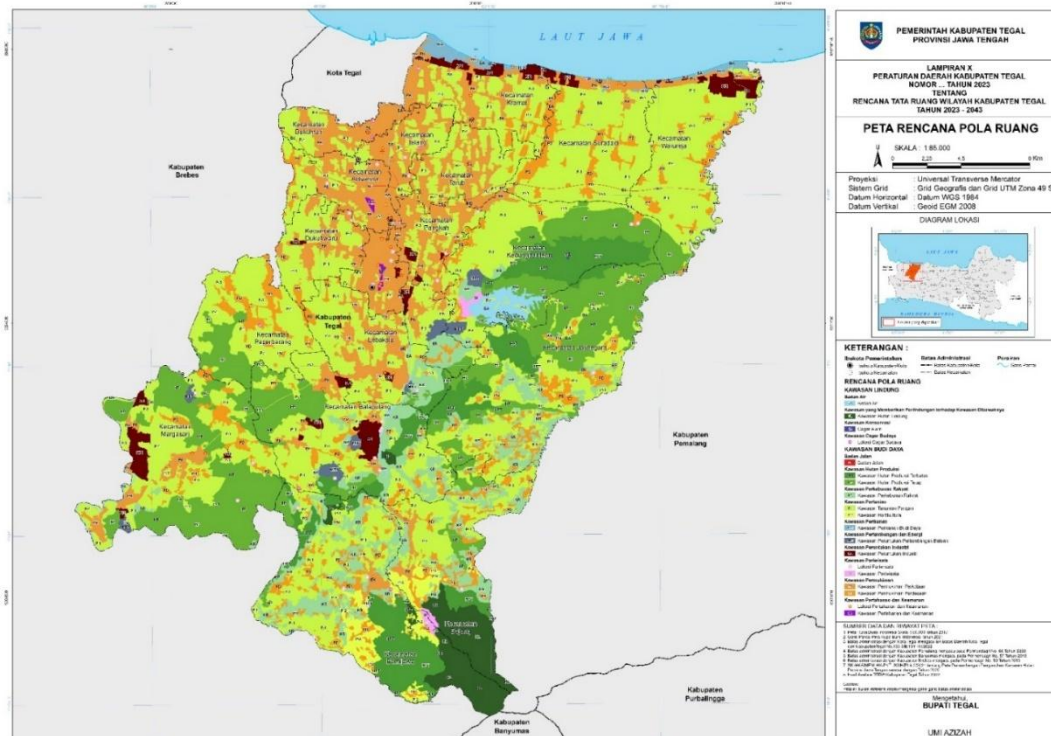
Sementara itu, pada Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng merupakan bagian wilayah yang berperan besar terhadap pemeliharaan kawasan lindung kabupaten, yaitu dengan adanya kawasan konservasi cagar alam, kawasan cagar budaya situs semedo serta berfokus pada perlindungan terhadap kawasan hutan. Pada dua kecamatan ini juga terdapat kawasan badan air yang sangat potensial, yaitu Waduk Cacaban yang dioptimalkan manfaatnya sebagai kawasan pariwisata sekaligus rencana pembangunan PLTA.

Pada dataran tinggi kabupaten, tepatnya di Kecamatan Bumijawa dan Kecamatan Bojong, dengan karakteristik wilayah pegunungan lereng gunung slamet, secara pola ruang wilayah bagian ini diarahkan sebagai kawasan hutan dan cagar alam serta

pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu dengan keindahan alamnya, pada dua kecamatan tersebut juga terdapat rencana pola ruang Kawasan Pariwisata, dengan city branding Pesona Wisata Alam Guci.

Selain beberapa isu strategis tersebut, hal yang penting dalam rencana pola ruang Kabupaten Tegal adalah pemerintah Kabupaten Tegal berupaya secara penuh untuk tetap melestarikan dan mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Pemertahanan Kawasan Pertanian di Kabupaten Tegal dapat ditunjukkan dengan rencana pola ruang Kabupaten Tegal yang didominasi oleh kawasan pertanian. Dalam rencana pola ruang sebagaimana ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa Kabupaten Tegal menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 41.573 hektare ($\pm 42\%$ Luas Wilayah Kabupaten Tegal), yang terdapat di seluruh Kecamatan. Luasan KP2B tersebut meliputi Kawasan Tanaman Pangan dan juga Kawasan Hortikultura yang merupakan komoditas pertanian unggulan kabupaten. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tujuan penataan ruang kabupaten sebagai kabupaten berbasis pertanian pangan berkelanjutan.

Gambar 2. 11 Peta Pola Ruang Kabupaten Tegal



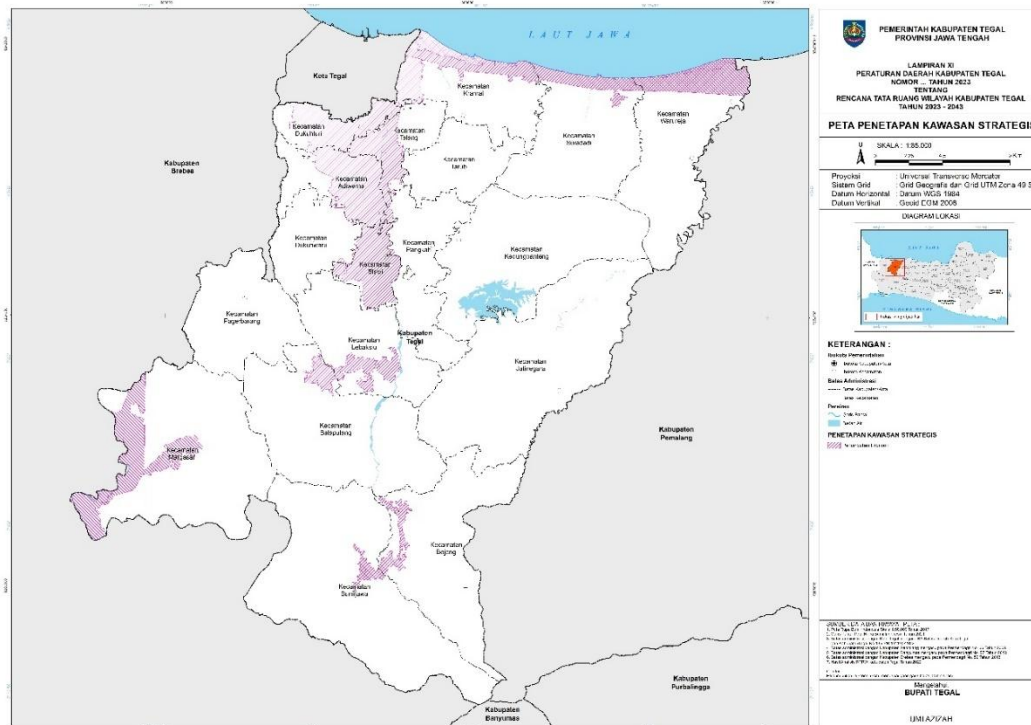
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

3. Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tegal, sebagaimana ditetapkan dalam Perda No 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, berupa Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis tersebut diantaranya adalah Kawasan

Strategis Perkotaan, yang meliputi Kawasan Strategis Perkotaan Slawi-Adiwerna, Kawasan Strategis Perkotaan Mejasem, Kawasan Strategis Perkotaan Lebaksiu-Balapulang dan Kawasan Strategis Perkotaan Margasari. Selain Kawasan Perkotaan, Kawasan Peruntukan Industri Pantura yang meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, dan Kecamatan Warureja merupakan Kawasan Strategis Kabupaten yang berfokus pada pengembangan kawasan peruntukan industri. Dalam mendukung pengembangan perekonomian sektor pertanian dan perikanan, Kabupaten Tegal juga memiliki Kawasan Agropolitan yang berada di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Bumijawa serta Kawasan Minapolitan yang berada di Kecamatan Kramat dan Warureja.

Gambar 2. 12 Peta Penetapan Kawasan Strategis



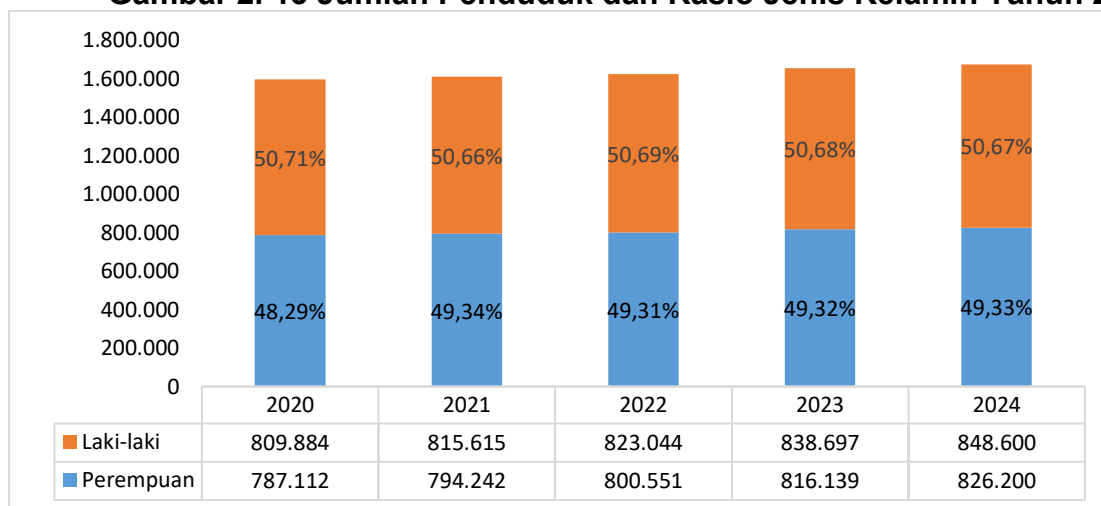
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

2.1.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah 1.674,80 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848,60 ribu jiwa dan perempuan 826,20 ribu jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 102,71 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2024.

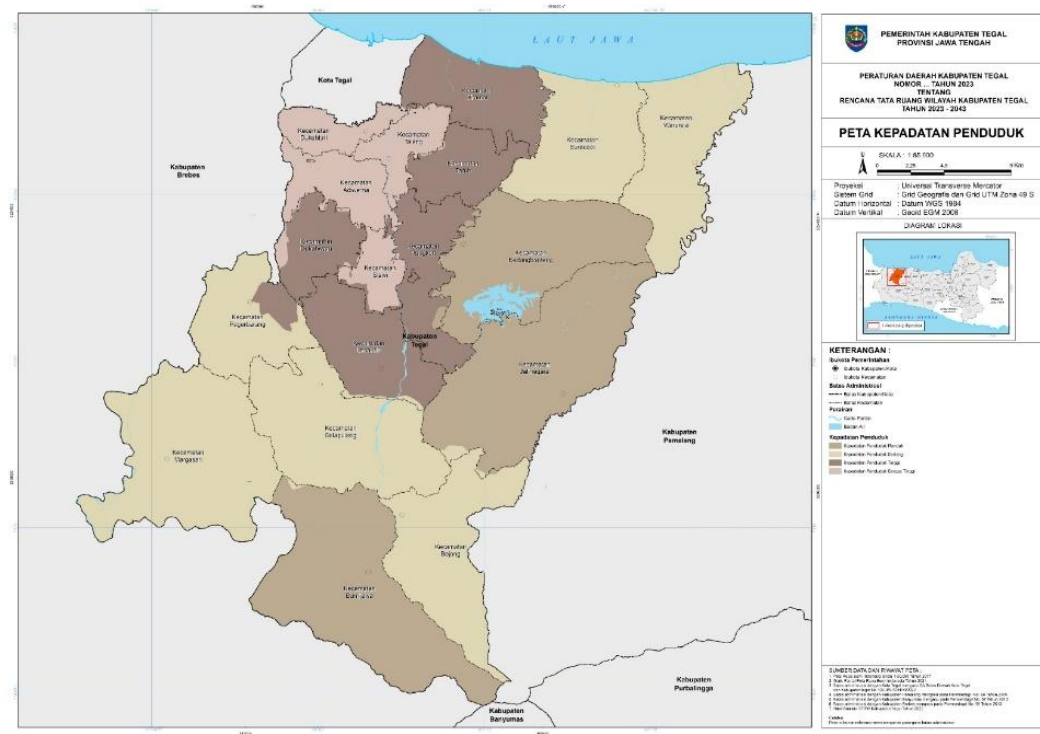
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	57,95	57,31	115,27	101,25
Bumijawa	52,65	49,28	101,93	106,66
Bojong	40,12	38,24	78,36	104,49
Balapulang	48,99	48,26	97,25	101,59
Pagerbarang	33,24	33,09	66,33	100,63
Lebaksiu	48,79	49,19	97,98	99,22
Jatinegara	32,11	30,36	62,47	105,55
Kedungbanteng	23,51	23,10	46,62	102,05
Pangkah	60,86	59,35	120,21	102,69
Slawi	41,56	41,23	82,79	100,78
Dukuhwaru	36,66	35,81	72,47	102,31
Adiwerna	68,43	66,13	134,56	103,64
Dukuhturi	53,32	51,14	104,47	104,40
Talang	56,74	54,33	111,07	104,47
Tarub	45,13	44,58	89,71	101,54
Kramat	62,86	61,95	124,81	101,53
Suradadi	49,95	48,18	98,14	103,70
Warureja	35,75	34,67	70,42	103,24
Tahun 2024	848,60	826,20	1.674,80	102,71
Tahun 2023	838.697	816.139	1.654.836	102,76
Tahun 2022	823.044	800.511	1.623.595	103
Tahun 2021	815.615	794.242	1.609.857	103
Tahun 2020	809.884	787.112	1.596.996	102,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan sebesar 6.040 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Talang. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 558 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Gambar 2. 14 Peta Sebaran Kepadatan Penduduk



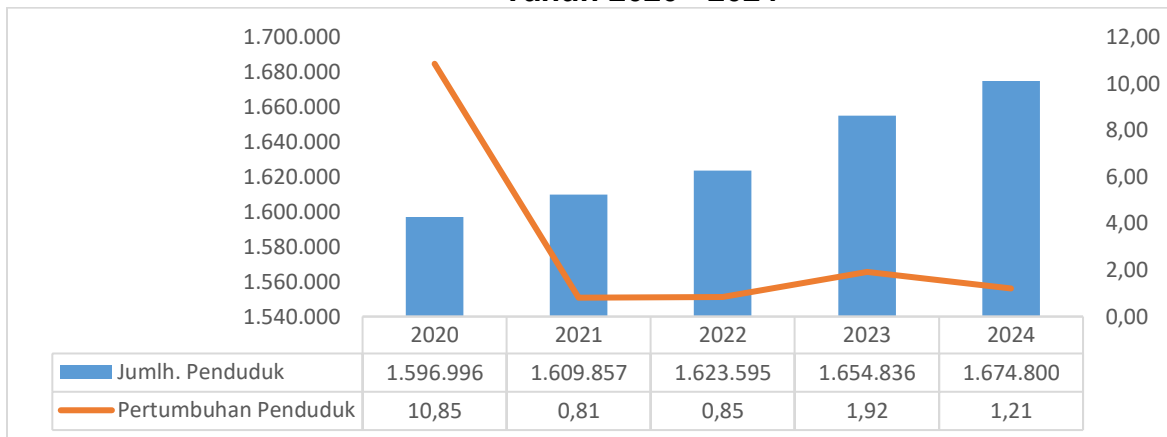
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/km²).

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2024.

**Gambar 2. 15 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal
Tahun 2020 - 2024**



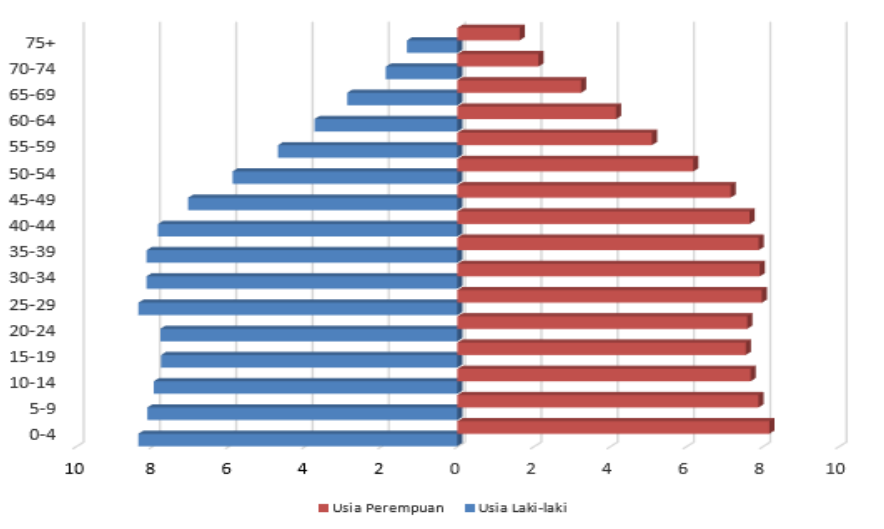
Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ketahun. Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019. Hal ini disebabkan updating data berdasarkan database Dukcapil saat Sensus Penduduk 2020. Pada tahun 2024 persentase pertumbuhan penduduk menjadi 1,92%.

D. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah 1.674.800 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848.600 jiwa dan perempuan 826.200 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 102,73 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2024. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2020-2024 tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2024
Berdasarkan Kelompok Umur



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami bonus demografi. Namun padapenduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal. Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
2. Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit;
3. Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
4. Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

E. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalur regional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasarana yang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.113.731 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 518.267.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

Tabel 2. 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	135.079	135.079	135.079	136.877	136.890
5 – 9	129.254	129.254	129.254	132.619	134.060
10 – 14	130.294	130.294	130.294	129.528	129.120
15 – 19	124.067	124.067	124.067	126.855	128.680
20 – 24	135.207	135.207	135.207	127.339	124.850
25 – 29	133.429	133.429	133.429	135.283	135.550
30 – 34	134.351	134.351	134.351	133.072	132.830
35 – 39	130.961	130.961	130.961	132.807	129.400
40 – 44	123.640	123.640	123.640	128.311	120.480
45 – 49	108.486	108.486	108.486	117.704	103.300
50 – 54	90.117	90.117	90.117	99.891	84.090
55 – 59	73.350	73.350	73.350	81.079	67.220
60 – 64	60.123	60.123	60.123	65.347	52.780
65 +	88.638	101.499	115.237	108.124	115.110
Jumlah	1.596.996	1.609.857	1.623.595	1.654.836	1.674.800

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pertumbuhan Ekonomi

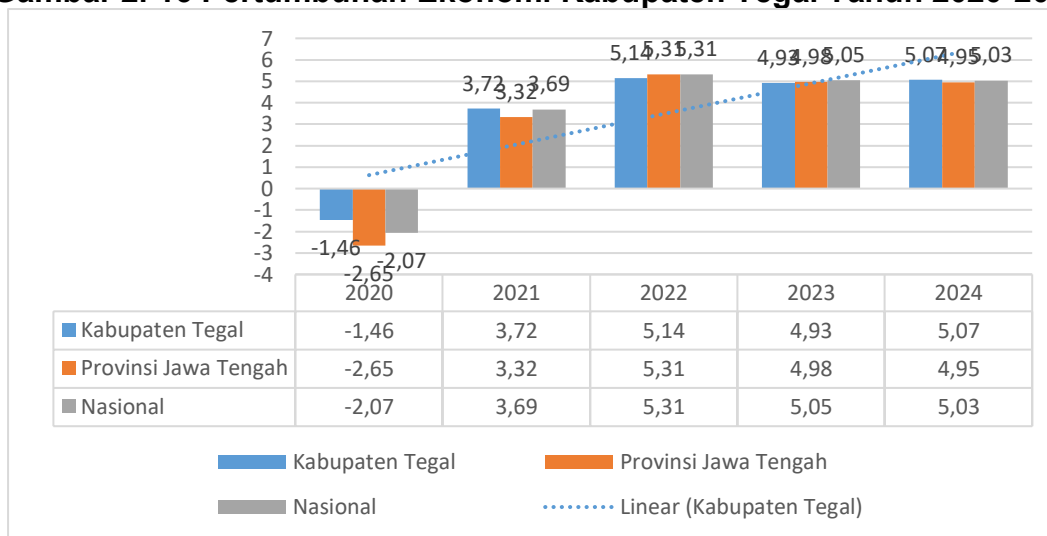
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,46% akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (-2,65%) dan nasional (-2,07%). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik dalam menghadapi dampak pandemi, yang kemungkinan didukung oleh sektor industri pengolahan yang tetap dominan dan aktivitas ekonomi lainnya yang masih berjalan.

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Tegal mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3,72%, sejalan dengan tren pemulihan di tingkat provinsi (3,32%) dan nasional (3,69%). Pertumbuhan ini menandakan adanya pemulihan

aktivitas produksi dan konsumsi setelah penurunan tajam di tahun sebelumnya. Berlanjut ke tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal semakin meningkat menjadi 5,14%, mendekati angka pertumbuhan nasional dan provinsi yang masing-masing mencapai 5,31%. Hal ini mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi berlangsung stabil, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pemulihan sektor industri, serta peningkatan konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sedikit melambat menjadi 4,93%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (4,98%) dan nasional (5,05%) tetap berada di kisaran yang sama. Perlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, kenaikan harga bahan baku, serta dinamika pasar tenaga kerja yang mempengaruhi produksi dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ini masih menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal berada dalam jalur pertumbuhan yang relatif stabil.

Gambar 2. 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal kembali meningkat menjadi 5,07%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan mendekati angka pertumbuhan nasional (5,03%). Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal menunjukkan pola yang positif dengan tren linear yang terus meningkat. Keberlanjutan pertumbuhan ini akan sangat bergantung pada strategi kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sektor industri, memperkuat sektor jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

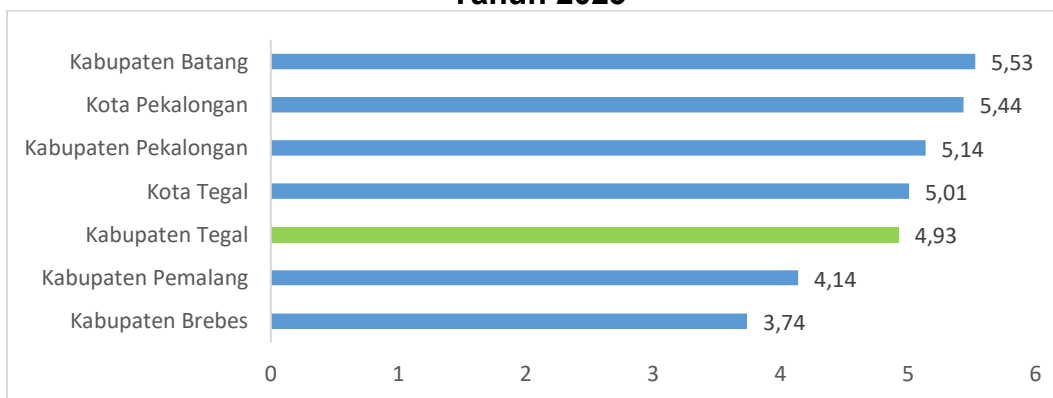
Tabel 2. 6 PDRB Kabupaten Tegal

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	2,80	1,66	-2,04	0,29
B	Pertambangan dan Penggalian	2,05	4,35	-5,49	2,02	3,32

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
C	Industri Pengolahan	-0,46	4,28	4,43	5,10	3,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,77	2,87	5,08	12,62	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,40	6,50	3,60	3,92	0,98
F	Konstruksi	-3,02	4,29	5,64	7,85	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,20	4,07	2,62	5,05	6,62
H	Transportasi dan Pergudangan	-29,97	3,23	74,83	7,61	3,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,45	4,54	11,45	12,06	9,73
J	Informasi dan Komunikasi	14,96	6,87	2,37	10,02	9,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	2,32	1,76	0,95	2,01	0,83
L	Real Estat	-0,73	2,08	3,97	6,09	4,95
M	Jasa Perusahaan	-5,33	2,37	5,25	6,25	9,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,91	-0,10	1,64	2,91	7,31
O	Jasa Pendidikan	-0,42	0,72	4,34	5,21	6,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	1,78	1,29	4,34	5,37
Q	Jasa lainnya	-5,02	0,63	6,06	4,80	5,67
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-1,46	3,72	5,14	4,93	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2023

Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2024 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 9,94 persen. Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,73 persen dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,66 persen.

**Tabel 2. 7 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2020-2024**

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,18	2,80	1,66	-2,04	0,29
B	Pertambangan dan Penggalian	2,05	4,35	-5,49	2,02	3,32
C	Industri Pengolahan	-0,46	4,28	4,43	5,10	3,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,77	2,87	5,08	12,6 2	6,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,40	6,50	3,60	3,92	0,98
F	Konstruksi	-3,02	4,29	5,64	7,85	7,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,20	4,07	2,62	5,05	6,62
H	Transportasi dan Pergudangan	- 29,97	3,23	74,8 3	7,61	3,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,45	4,54	11,4 5	12,0 6	9,73
J	Informasi dan Komunikasi	14,96	6,87	2,37	10,0 2	9,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	2,32	1,76	0,95	2,01	0,83
L	Real Estat	-0,73	2,08	3,97	6,09	4,95
M	Jasa Perusahaan	-5,33	2,37	5,25	6,25	9,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,91	-0,10	1,64	2,91	7,31
O	Jasa Pendidikan	-0,42	0,72	4,34	5,21	6,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02	1,78	1,29	4,34	5,37
Q	Jasa lainnya	-5,02	0,63	6,06	4,80	5,67
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		-1,46	3,72	5,14	4,93	5,07

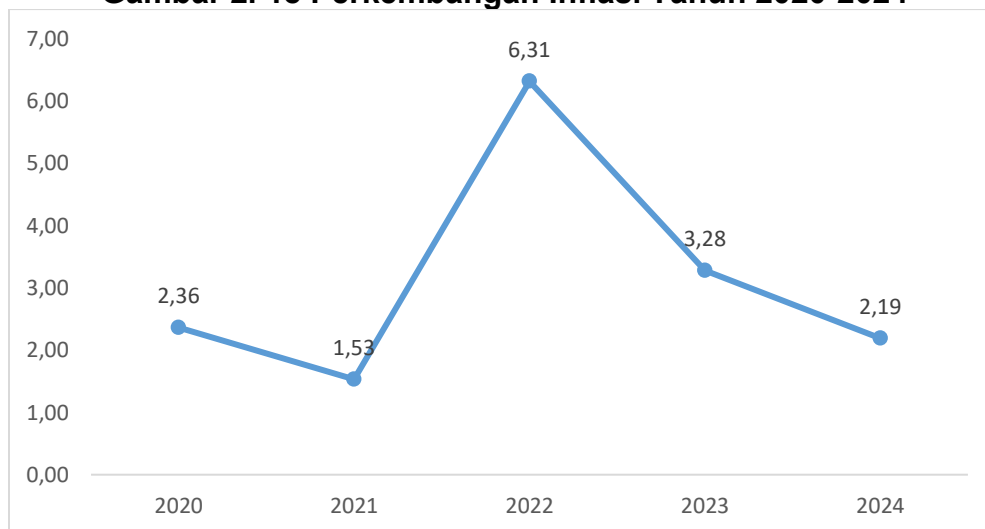
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

B. Laju Inflasi

Selama tahun 2024 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2024 adalah sebesar 2,19 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Tegal secara umum disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh dari sebelas indeks kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34 persem; kelompok perumahan, air, Listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen, kelompok Kesehatan sebesar 9,14 persem; kelompok transportasi sebesar 1,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,28 persen; kelompok Pendidikan sebesar 5,46 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,51 persen. Sedangkan satu kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya nilai indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,90 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y o y pada Desember 2024 antara lain; emas perhiasan, tarif Rumah Sakit, minyak goreng, kopi bubuk, uang kuliah Akademi/Perguruan Tinggi, bahan bakar rumah tangga, Sigaret Kretek Mesin (SKM), beras, daging ayam ras, mobil, bawang merah, Sigaret Putih Mesin (SPM), uang sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas), telur ayam ras, bawang putih, Sigaret Kretek Tangan (SKT), sepeda motor, uang sekolah SD (Sekolah Dasar), tarif dokter umum, tarif dokter spesialis, kemiri, gula pasir, ketimun, dan lada/merica. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi y-on-y, antara lain : cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, papaya, daun bawang, jeruk, popok bayi sekali pakai/diapers, wortel tomat, labu siam/jipang, kol putih/kubis, cabai hijau, susu bubuk untuk balita, buncis, sawi putih/pecay/pitsai, sepeda, dan apel.

Gambar 2. 18 Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2024

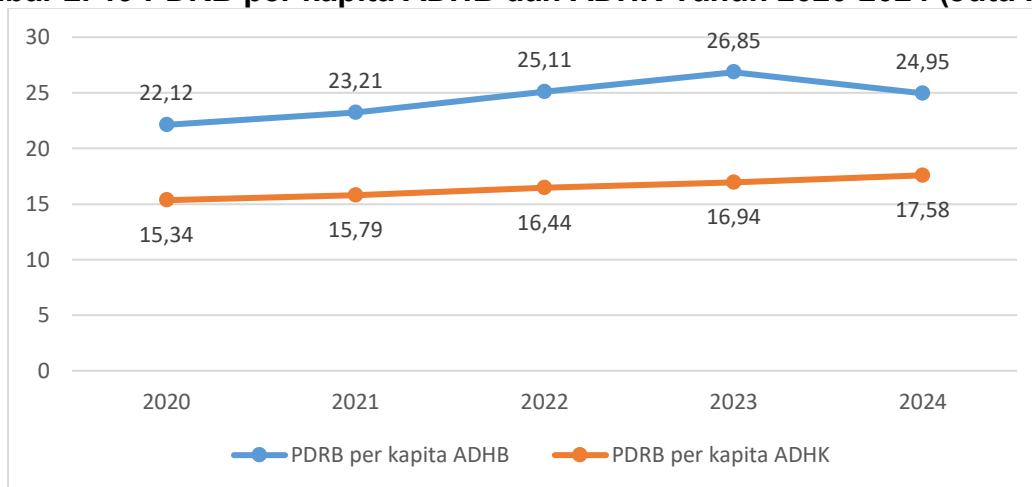
Secara keseluruhan, inflasi IHK Kota Tegal Tahun 2024 adalah berada di bawah sasaran $3,0 \pm 1 \%$ (yoy). Realisasi tersebut mencapai sasaran $3,0 \pm 1\%$, hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dilakukan TPID dalam upaya pengendalian inflasi mampu mendorong perlambatan inflasi Kota Tegal. Inflasi IHK Kota Tegal pada Desember 2024 sebesar 0,48% (mtm) sehingga Inflasi Kota Tegal Tahun 2024 menjadi 2,19% (yoy), menurun dibandingkan dengan IHK Kota Tegal Tahun 2023 sebesar 3,28% (yoy).

C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk per tahun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan angka PDRB per kapita ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Tegal semakin membaik setelah pandemi Covid-19 terlebih dengan didirikannya perusahaan baru yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Pada 2022, PDRB per kapita tercatat sebesar 24,95 juta rupiah. Pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 26,85 juta rupiah dan berlanjut di tahun 2024 menjadi 28,49 juta rupiah.

Gambar 2. 19 PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

D. Indeks Gini

Indeks gini sebagai ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. rafik Gini Ratio Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2024, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, Gini Ratio Kabupaten Tegal relatif

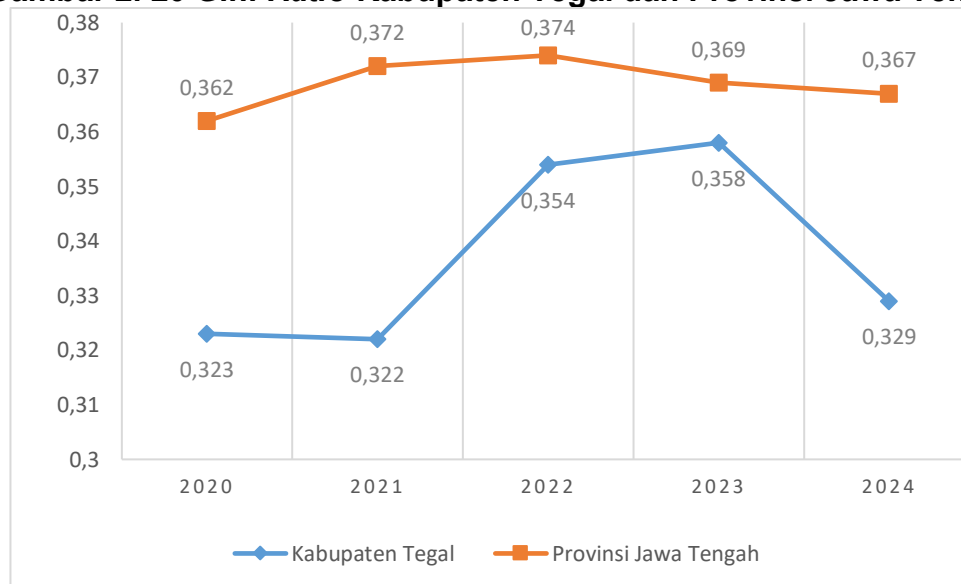
stabil di kisaran 0,323 dan 0,322, menandakan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2022, angka ini meningkat signifikan menjadi 0,354 dan terus naik menjadi 0,358 pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan kesenjangan ekonomi di daerah tersebut. Sementara itu, Gini Ratio Provinsi Jawa Tengah cenderung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal, dengan tren yang lebih stabil di kisaran 0,362 hingga 0,374. Pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Tegal turun menjadi 0,329, yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesempatan kerja, kebijakan pemerataan ekonomi, atau program perlindungan sosial yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 2. 8 Gini Ratio Kabupaten Tegal

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tegal	0,323	0,322	0,354	0,358	0,329

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025

Gambar 2. 20 Gini Ratio Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah



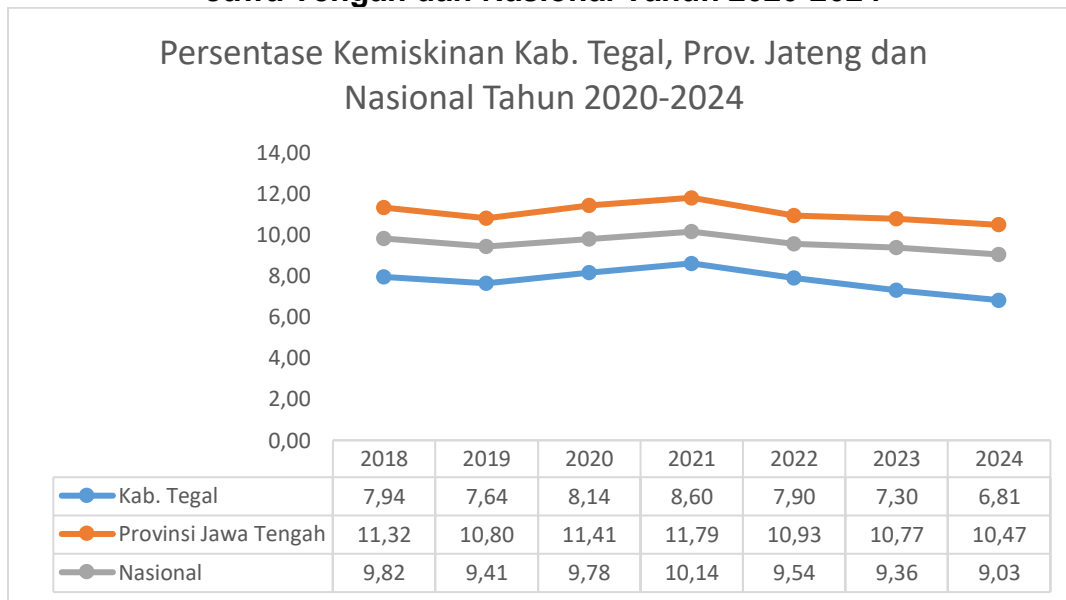
Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2024

E. Penduduk Miskin

Kinerja penurunan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) Kabupaten Tegal pasca pandemic Covid terus mengalami perbaikan, baik secara jumlah dan persentase. Pada tahun 2024 secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan yaitu 7,30 persen pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 7,01 ribu orang yaitu dari 105,03 ribu orang pada tahun 2023 menjadi 98,02 ribu orang pada tahun 2024. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 497.315 per kapita per bulan, angka ini naik 5,65 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2023 yang mencapai Rp 470.728 per kapita per bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,93 persen. Sektor industry pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal sebesar 36,40 persen, dengan laju pertumbuhan 5,10 persen. Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Maret 2024 sebesar -0,8 persen, lebih tinggi dibandingkan IPH pada Maret 2023 sebesar -2,32 perse. Andil komoditi dalam IPH Maret 2024 adalah beras, cabai merah dan telur ayam. UMK Kabupaten Tegal Tahun 2024 diketahui mengalami kenaikan berkisar Rp 84.924. Sehingga kini di tahun 2024 menjadi Rp 2.191.161,- per bulan. Implementasi kebijakan instrument insentif dan kemudahan berusaha di Kabupaten Tegal ini tidak terlepas dari kerja sama banyak pihak dalam membangun kepercayaan investor, baik dalam hal penciptaan kondusifitas wilayah maupun pelayanan perizinan investasi dan usaha yang baik. Adapun realisasi nilai investasi Kabupaten Tegal selama lia tahun terakhir mencapai Rp 6,2 triliun, terdiri atas penanaman modal asing Rp 2,7 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 3,5 triliun. Sampai dengan Maret 2024 bantuan langsung tunai secara umum di Indonesia mencapai 43,4 triliu atau 20,7 persen dibanding tahun sebelumnya (y o y) sebesar 35,9 triliun sampai Maret 2023. Prosentase penduduk miskin Kab. Tegal selama 5 tahun lebih rendah daripada kemiskinan Prov. Jateng dan Nasional.

Gambar 2. 21
Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal,
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2020-2023. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9 Penduduk Miskin Tahun 2020 - 2024

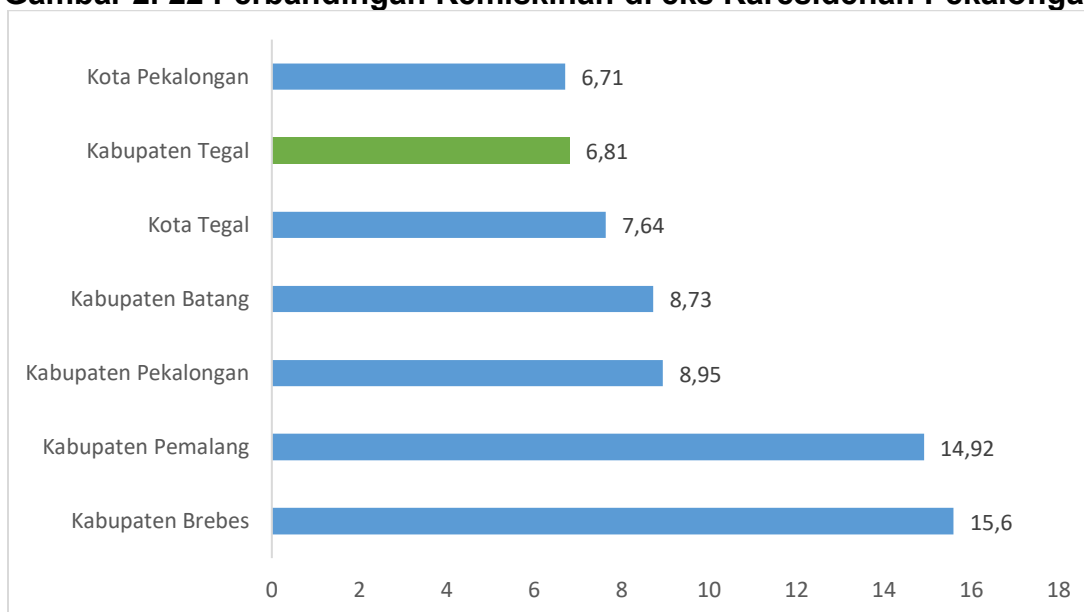
No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	117.500	123.520	113.620	105.030	98.020
2.	Jumlah Penduduk	1.435.147	1.596.996	1.596.996	1.623.595	1.674.800
3.	Persentase (%)	8,14	8,60	7,90	7,30	6,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penanganan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2024 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 22 Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

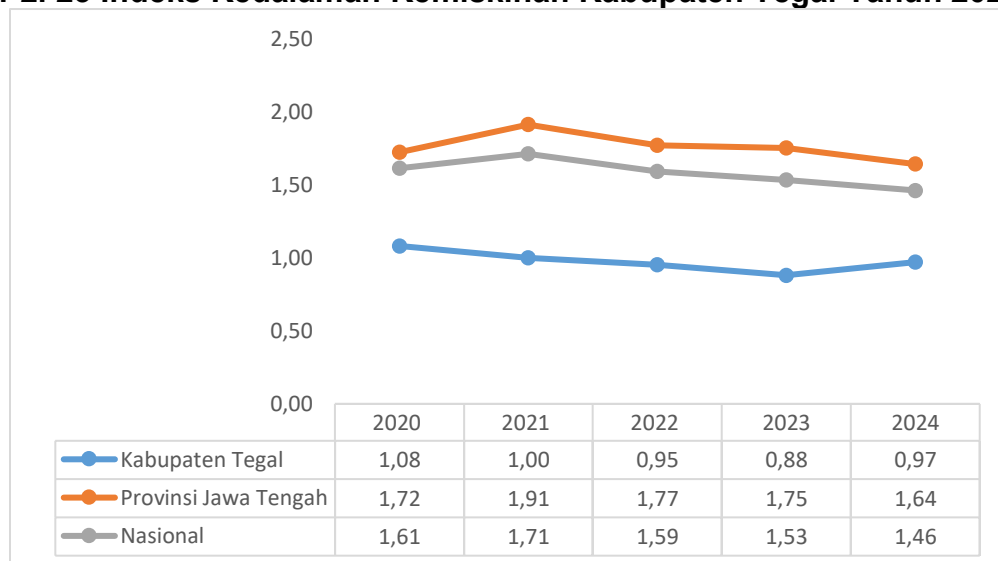
Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2024

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 6,81 % menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (6,71%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (15,60%).

Berdasarkan grafik indeks kedalaman kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren fluktuatif dengan penurunan yang konsisten dari tahun 2020 sebesar

1,08 hingga tahun 2023 sebesar 0,88, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,97. Nilai indeks kedalaman ini tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih dangkal di Kabupaten Tegal dibandingkan wilayah yang lebih luas. Tren penurunan dari 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengurangan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Namun, kenaikan pada tahun 2024 mengindikasikan perlunya perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kedalaman kemiskinan, seperti ketahanan ekonomi lokal dan intervensi program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

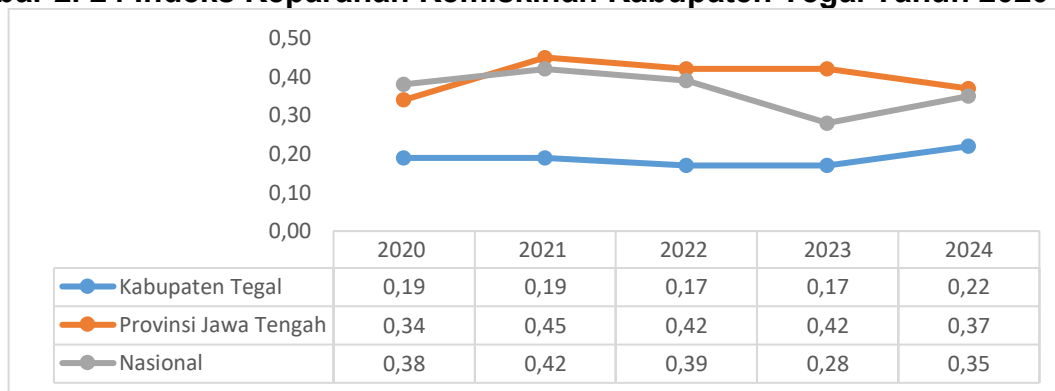
Gambar 2. 23 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2023). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) Kabupaten Tegal pada tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2. 24 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan grafik indeks keparahan kemiskinan, Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang relatif stabil pada kisaran nilai rendah dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu 0,19 (2020-2021) dan 0,17 (2022-2023). Namun, pada tahun 2024, terdapat kenaikan menjadi 0,22. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat termiskin di Kabupaten Tegal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun nilainya masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tren kenaikan ini memerlukan perhatian lebih, terutama pada faktor-faktor yang memengaruhi kondisi masyarakat termiskin, seperti akses terhadap layanan dasar, keberlanjutan pendapatan, dan efektivitas intervensi pengentasan kemiskinan. Upaya strategis diperlukan untuk mencegah keparahan kemiskinan lebih lanjut dan memastikan bahwa program sosial dan ekonomi menjangkau masyarakat yang paling rentan.

Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsidi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Pemerintah melakukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang dikenal dengan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Upaya pemerintah dalam melakukan PPKE mendasari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan kumpulan

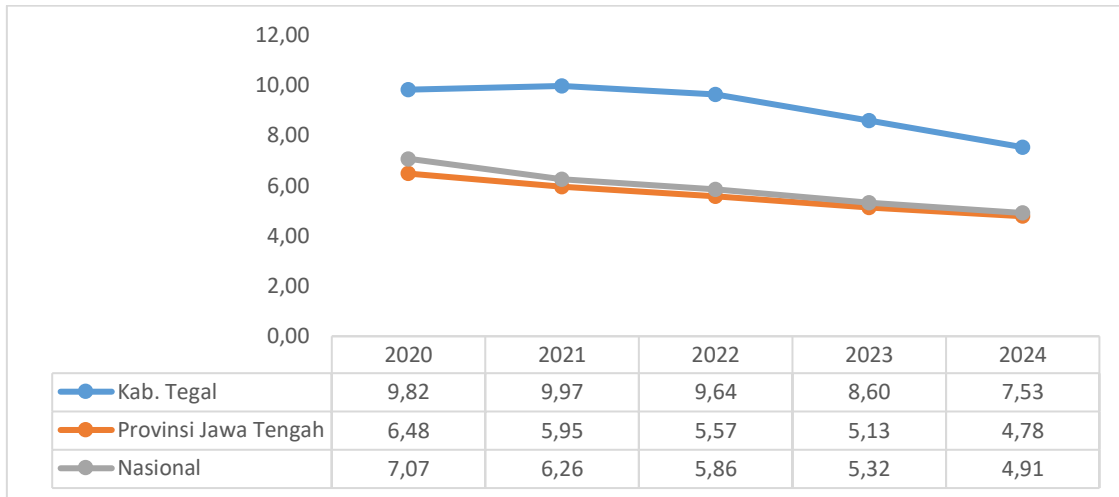
informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Persebaran data kemiskinan ekstrem proporsi individu di Kabupaten Tegal dengan jumlah penduduk Desil 1 terbanyak pada wilayah Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Bumijawa (data P3KE Tahun 2021). Adapun persebaran data kemiskinan ekstrem proporsi keluarga di Kabupaten Tegal dengan jumlah penduduk Desil 1 terbanyak pada wilayah Kecamatan Balapulang, Kecamatan Bojong, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Bumijawa.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan secara bertahap selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, TPT berada pada angka 9,82%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 9,97% pada tahun 2021 yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir, karena dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi perekonomian lokal dan pasar kerja. Namun, setelah itu, TPT terus mengalami penurunan, menjadi 9,64% pada 2022, kemudian turun tajam menjadi 8,60% pada 2023, dan mencapai angka 7,53% pada 2024. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 70,71 ribu orang. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal, yang kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan lapangan kerja di berbagai sektor.

Meskipun tren ini menunjukkan kemajuan, TPT Kabupaten Tegal masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama periode yang sama. Pada tahun 2024, TPT Provinsi Jawa Tengah hanya 4,78% dan Nasional 4,91%, sementara Kabupaten Tegal tetap berada di angka 7,53%. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang perlu diatasi, seperti rendahnya daya serap tenaga kerja, kurangnya keterampilan sesuai kebutuhan pasar, atau dominasi sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih terfokus, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan investasi di sektor ekonomi yang padat karya, untuk menurunkan TPT lebih lanjut dan mendekati rata-rata provinsi maupun nasional. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

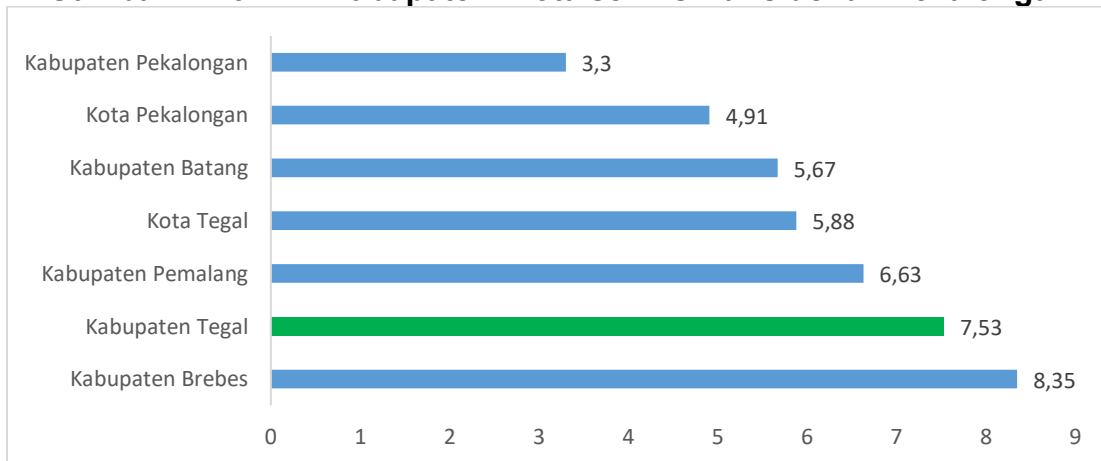
Gambar 2. 25 TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2024 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2024 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 26 TPT Kabupaten /Kota se Eks Karesidenan Pekalongan



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 7,53% merupakan TPT yang cukup tinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Pekalongan (3,30%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian

Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM pada 2020-2023 menggunakan sumber data dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH. Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2024 IPM Kabupaten Tegal masuk dalam kategori tinggi. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2020 – 2024 hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020) untuk indikator UHH adalah sebagai berikut:

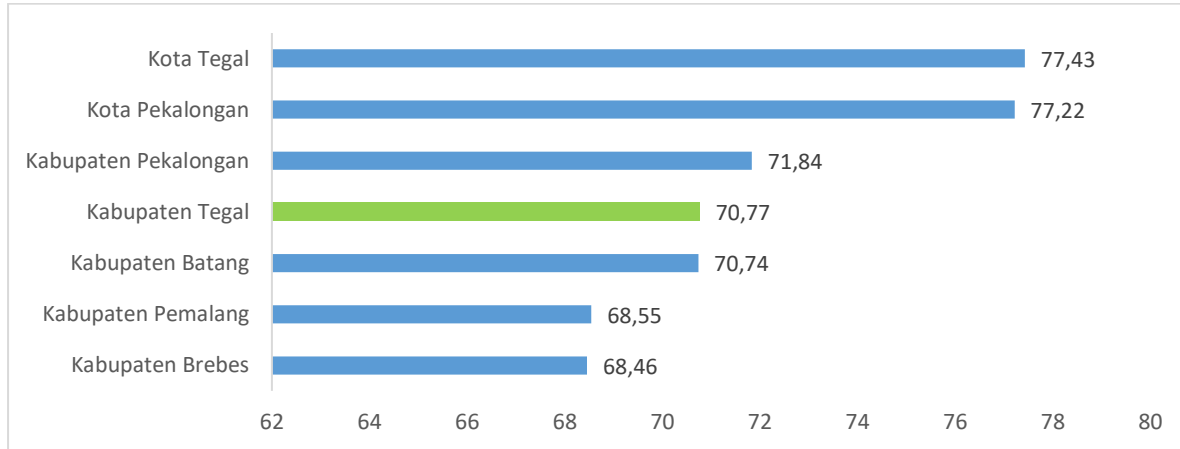
Tabel 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM :	69,28	69,67	70,42	71,12	71,70
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,63	73,74	73,87	74,01	74,25
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,67	12,89	12,91	12,92	12,96
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,98	6,99	7,25	7,34	7,36
Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	9.612	9.700	10.020	10.537	10.972

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Tegal sebesar 71,70 menduduki peringkat kedua tertinggi dari 5 (lima) Kabupaten Se Eks Karesidenan Pekalongan dan dibawah Kota Tegal dan Kota Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (68,46) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (77,43).

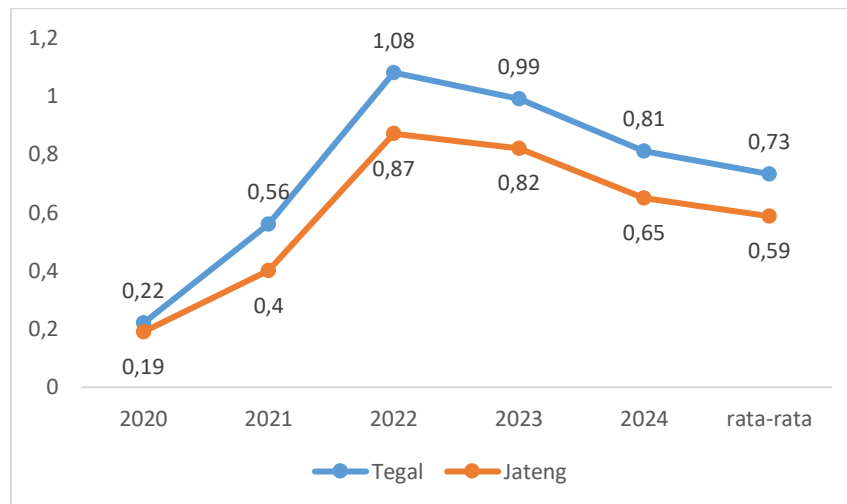
Gambar 2. 27 IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Gambar 2. 28 Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

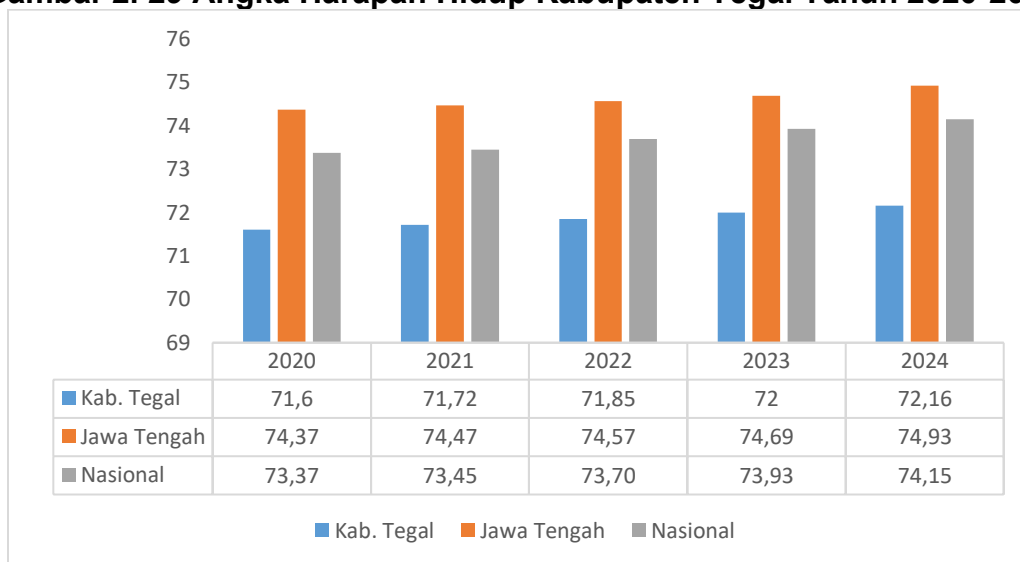


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

H. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH Hasil SP 2020 Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2024 angkanya menunjukkan 74,25 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 74,01 tahun pada tahun 2023 atau 73,87 tahun pada tahun 2022. Tingginya UHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi UHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

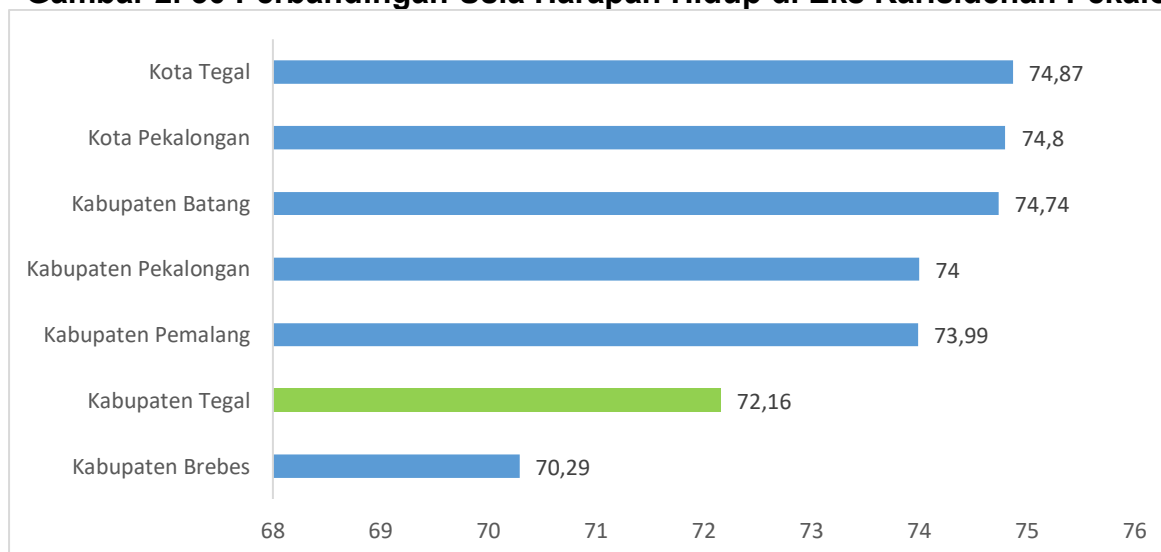
Gambar 2. 29 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, UHH Hasil SP 2020 Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 72,00 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil SP 2020 paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (70,29 tahun) sedangkan Usia Harapan Hidup (UHH) Hasil SP 2020 yang paling tinggi adalah Kota Tegal (74,87 tahun).

Gambar 2. 30 Perbandingan Usia Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan



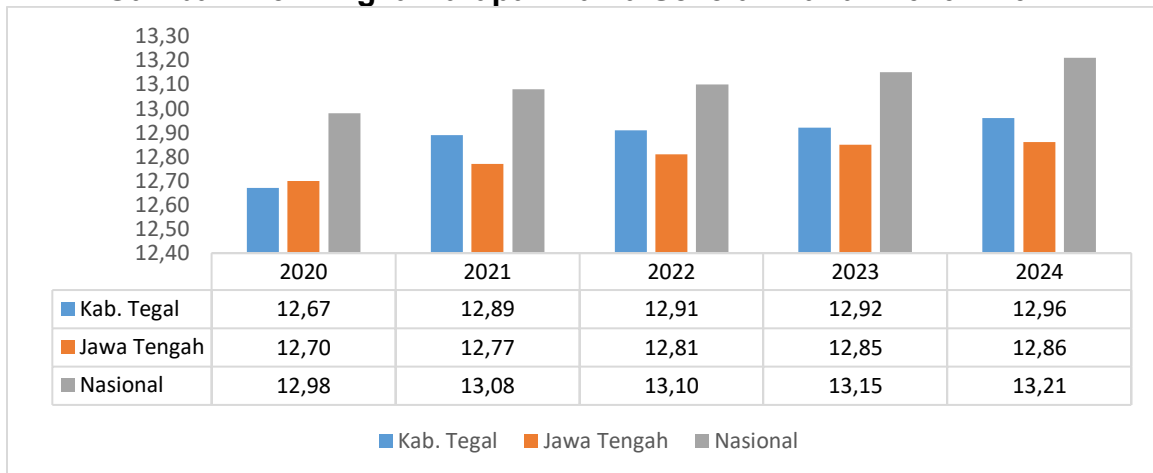
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

I. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang

ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2021 angkanya 12,89 tahun, tahun 2022 telah menjadi 12,91 tahun dan tahun 2023 sebesar 12,92 tahun. Tahun 2024 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal adalah 12,96 tahun.

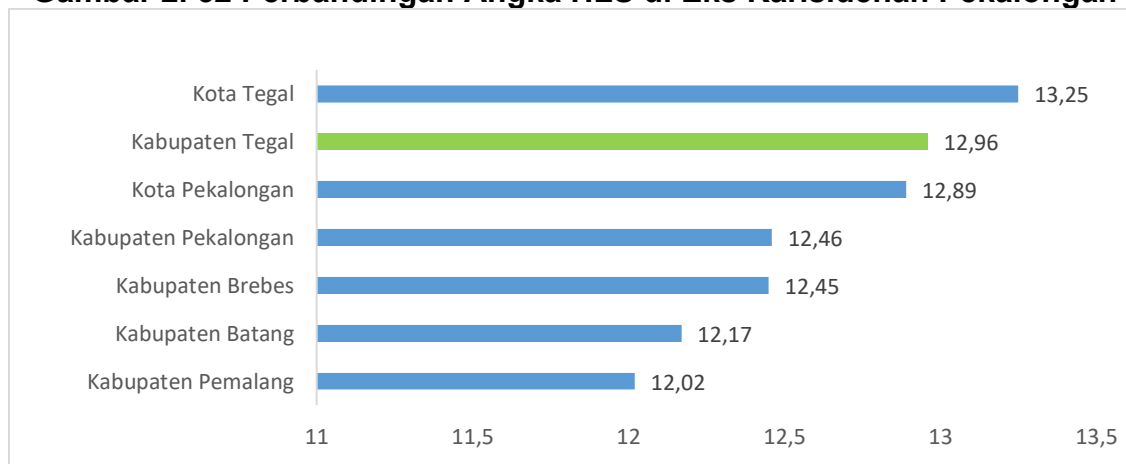
Gambar 2. 31 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 12,92 tahun menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,98 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,25 tahun).

Gambar 2. 32 Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

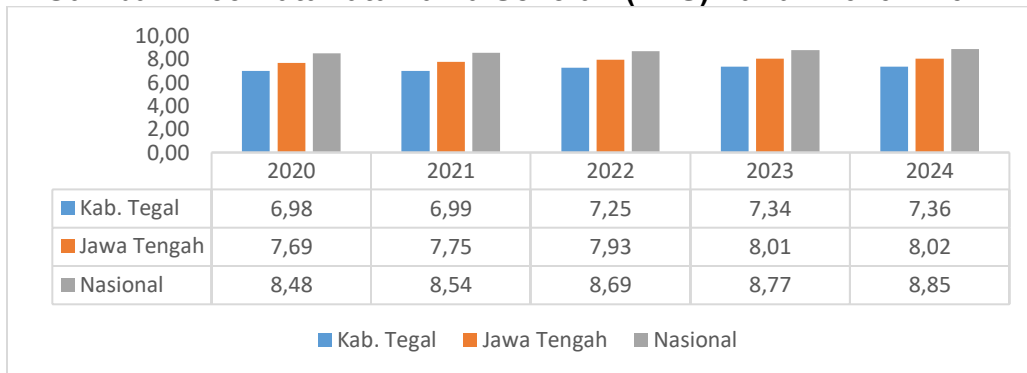


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

J. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2021 menunjukkan angka 6,99 tahun, meningkat menjadi 7,25 tahun pada tahun 2022. Tahun 2023 angkanya menjadi 7,34 tahun. Tahun 2024 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah 7,36 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:

Gambar 2. 33 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020 – 2024

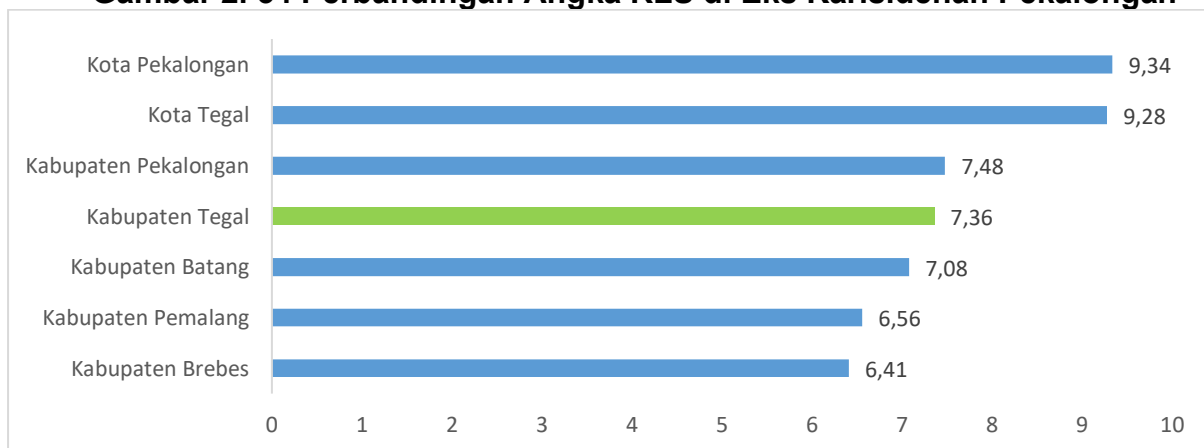


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2018, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khususnya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tegal Tahun 2024 adalah 7,36 tahun menduduki peringkat keempat tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (6,41 tahun) sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang paling tinggi adalah Kota Pekalongan (9,34 tahun).

Gambar 2. 34 Perbandingan Angka RLS di Eks Karisidenan Pekalongan



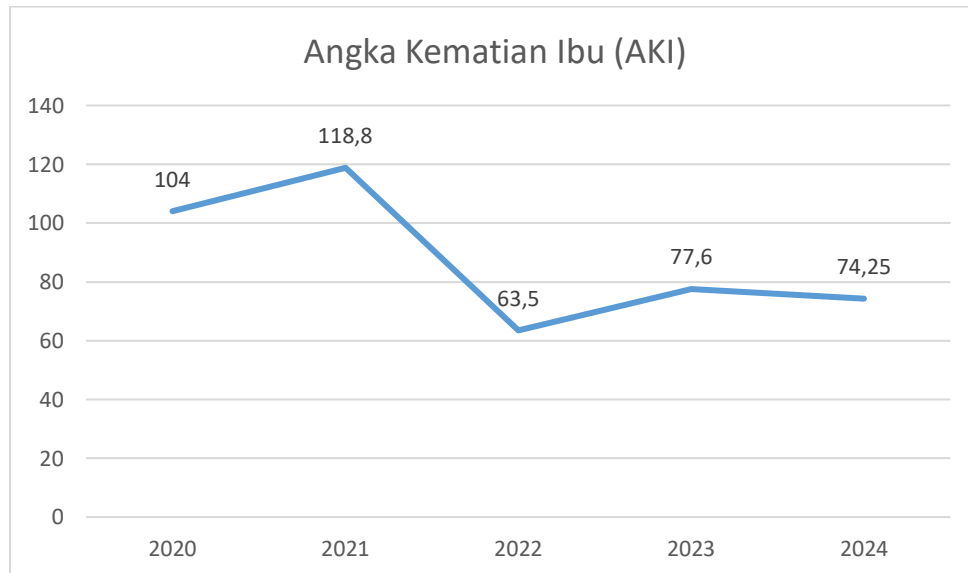
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

K. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi dalam tahun 2020-2024.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan AKI yang cukup tinggi menjadi 104. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu pada tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat pandemi COVID-19 menyebar, pelayanan kesehatan memiliki beban tambahan dalam melakukan skrining, pengujian laboratorium dan perawatan intensif, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI di Kabupaten Tegal meningkat sejak pandemi Covid-19, dari 12 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2021. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2021 sebagian besar karena terinfeksi virus covid 19, dari 30 kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021, sebanyak 14 kasus (46,67%) karena terkonfirmasi Covid 19. Angka kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 63,5 (15 kasus). Tahun 2023 dan 2024 jumlah kematian ibu sama dengan taun sebelumnya yaitu 15 kasus, namun AKI berbeda yaitu 77,6 (2023) dan 74,25 (2024).

Gambar 2. 35 Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 -2024



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Penyebab kematian ibu paling banyak yaitu gangguan hipertensi dan perdarahan. Perlu dilakukan intervensi dalam mengatasi penyebab tersebut berupa kegiatan yang langsung menyasar pada ibu hamil (*Predisposing factor*/ faktor predisposisi) maupun kegiatan yang mengurangi risiko terjadinya penyebab kematian ibu

secara tidak langsung (*Enabling factor*/faktor pendukung dan *Reinforcing factor*/faktor pendorong).

Kegiatan yang dapat menurunkan faktor predisposisi kematian ibu yaitu memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sesuai standar. Semua kegiatan tersebut dapat berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pelayanan antenatal (periksa kehamilan), kelas ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, rujukan ibu bersalin, dan promosi kesehatan ibu hamil dan bersalin.

Selain itu kegiatan yang diperlukan yaitu pemenuhan sarana prasarana termasuk jumlah, kualitas, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, alat, dan perbekalan kesehatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), pengadaan ambulans bagi puskesmas, data ibu hamil yang terintegrasi, puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED.

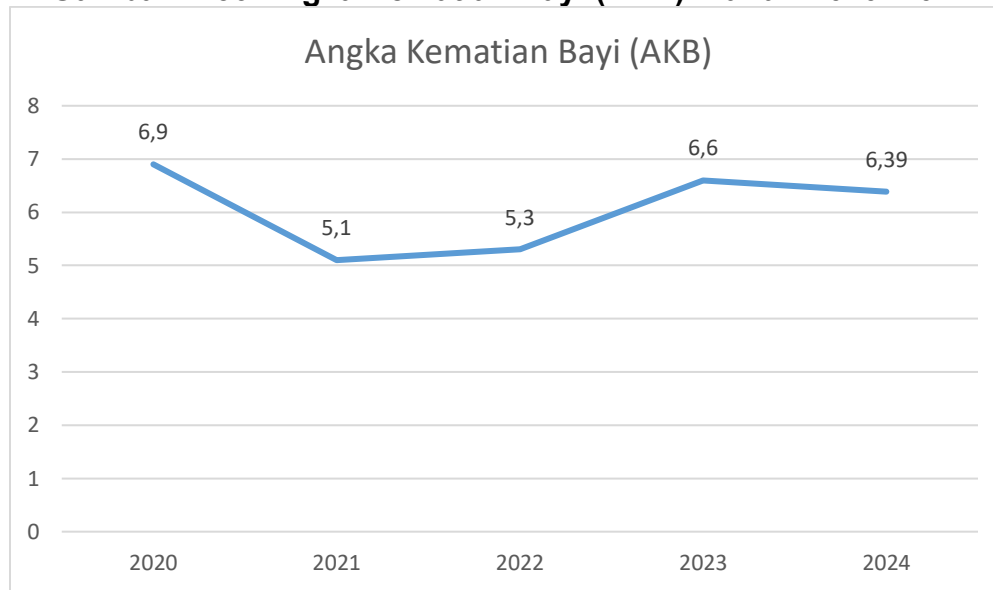
Kegiatan yang dapat menurunkan faktor pendorong kematian ibu berfokus pada sikap sumber daya tenaga kesehatan dan keluarga terhadap kesehatan ibu, serta penyusunan kebijakan/peraturan terkait upaya penurunan kematian ibu. Kegiatan – kegiatan tersebut yaitu pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil bagi ibu hamil dan anggota keluarga lain (suami dan ibu), kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Perangkat Daerah lain).

L. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 sampai tahun ke tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 6,7 pada tahun 2018 menjadi 6,1 pada tahun 2019. AKB mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 6,9 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 5,1. AKB pada tahun 2022 dan 2023 naik kembali menjadi 5,3 dan 6,6, dan kembali turun menjadi 6,39 pada tahun 2024.

Gambar 2. 36 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2020 -2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2025

Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemasangan alat kontrasepsi Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), konseling ASI Eksklusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Pengadaan alkes, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari screening oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dalam penanganan ibu hamil risti.

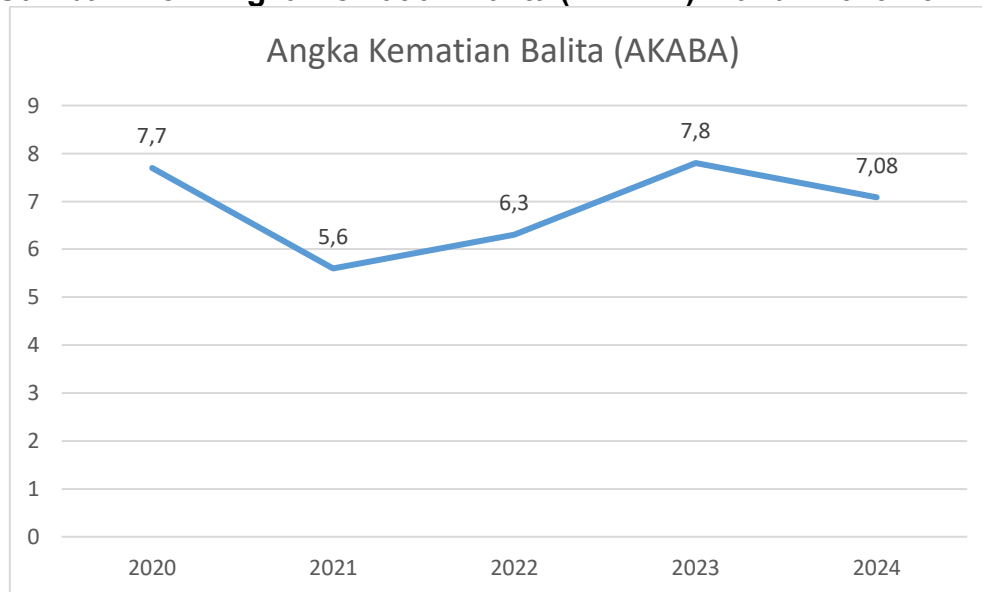
M. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA dapat pula menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan.

Grafik menunjukkan tren Angka Kematian Balita (AKABA) dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat adanya fluktuasi dalam angka kematian, di mana AKABA mengalami penurunan signifikan dari 7,7 pada tahun 2020 menjadi 5,6 pada tahun 2021. Namun, angka tersebut kembali meningkat secara bertahap menjadi 6,3 pada 2022 dan mencapai puncaknya di 7,8 pada 2023. Pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan

menjadi 7,08. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya penurunan angka kematian balita, faktor-faktor tertentu mungkin menyebabkan kenaikan kembali, seperti kondisi kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, atau faktor lingkungan. Evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab kenaikan AKABA pada tahun 2023 dan 2024 diperlukan guna merumuskan intervensi yang lebih efektif.

Gambar 2. 37 Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2020-2024



Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2025

Penyebab kematian balita antara lain infeksi pernafasan, komplikasi bayi prematur, diare, asfiksia, sepsis, cacat bawaan lahir, meningitis, dan kekurangan zat besi. Permasalahan yang terjadi selama tahun 2022, adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya serta kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan kesehatan. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,8 dibandingkan tahun sebelumnya, namun terjadi penurunan di tahun 2024. Tahun 2024 Angka Kematian Bayi mengalami penurunan 0,72 dibandingkan tahun sebelumnya, dapat disebabkan karena mutu layanan Kesehatan mulai meningkat, perbaikan system rujukan, dan kerja sama lintas sektor.

N. Gizi Buruk dan Stunting

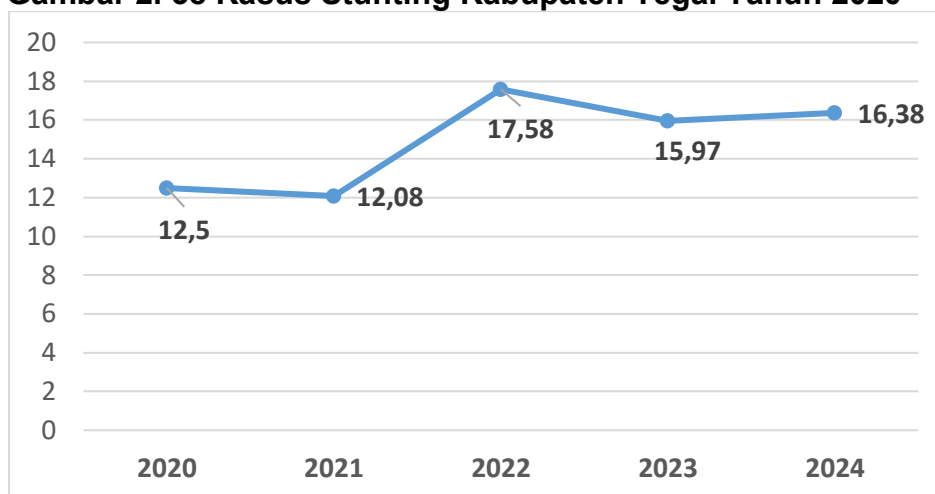
Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 standar deviasi WHO-NCHS dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih kurang.

Sedangkan stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini

menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Intervensi yang dilakukan dalam penurunan kasus stunting ini adalah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik yang dilakukan dalam 1.000 HPK dibagi menjadi 3 tahap, yaitu saat ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi usia 0-23 bulan.

Prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Tegal cenderung fluktuatif. Menurut data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), kasus stunting pada tahun 2020 sebanyak 12,5%, meningkat menjadi 12,08% pada tahun 2021 dan 17,58% pada tahun 2022. Kasus stunting menurun menjadi 15,97% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 16,38% pada tahun 2024. Prevalensi stunting dari tahun 2020 – 2024 tergambar pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 38 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2025

Peningkatan secara signifikan kasus stunting pada tahun 2022 karena meningkatnya kemampuan penemuan kasus. Saat itu Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan pengadaan alat antropometri terstandar dan melatih tenaga kesehatan serta kader kesehatan di seluruh posyandu. Pada Agustus 2022 telah dilaksanakan gebyar posyandu dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Dalam kegiatan tersebut pemerintah bersama lintas sektor menjangkau semua balita agar dibawa ke posyandu untuk dipantau tumbuh kembangnya. Inovasi dalam penurunan stunting yaitu program Rames Saceting (Rame-rame ASN Sekabehe Cegah Stunting) yang digagas melalui Surat Edaran Bupati Tegal sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Kabupaten Tegal. Sedangkan di tahun 2023 terjadi penurunan yang kemudian naik di tahun 2024.

O. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	86,79	87,53	88,22	88,64	88,85

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal dan BPS, 2025

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Pada tahun 2022 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22 naik 0,69 poin dibanding IPG tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

Terdapat indeks lain terkait gender yang dihitung oleh BPS yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini memiliki perbedaan dibandingkan IPG, dimana IPG menunjukkan sejauh mana perempuan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki dari hasil Pembangunan, sedangkan IDG adalah menilai sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi. Sehingga perbedaan indeks ini adalah IPG berfokus pada **hasil pembangunan** yang dinikmati perempuan dibanding laki-laki, sedangkan IDG lebih menekankan pada **peran aktif perempuan** dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya. Nilai indeks pemberdayaan gender di tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Nilai Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Persentase Keterlibatan di parlemen		Persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi		Sumbangan dalam Pendapatan Kerja		IDG
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
2020	76	24	54,59	45,41	70,92	29,08	72,12
2021	76	24	54,36	45,64	70,91	29,09	72,32
2022	76	24	49,13	50,87	70,75	29,25	73,76
2023	76	24	43,04	56,96	69,99	30,01	73,43
2024	74	26	50,12	49,88	69,54	30,46	76,03

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2025

P. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang mengukur ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Berikut Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2018-2024.

Tabel 2. 13 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0.371	0.233	0.312	0,184	0,315

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal dan BPS, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukan selama kurun waktu tahun 2020 – 2024 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tegal dari Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dari 0.425 menjadi 0.233, hal ini menunjukan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tegal menunjukan perbaikan, namun pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 0.079 menjadi 0,312 lalu turun kembali dan naik di tahun 2024 menjadi 0,315.

Q. Pemuda dan Olahraga

Gambaran umum urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Tabel 2. 14 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,099	0,124	0,150	0,176
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,069	0,071	0,073	0,076

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri untuk periode tahun 2021 hingga 2024 tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah dalam pengumpulan data yang menghambat analisis yang akurat. Salah satu kendala utama adalah adanya data ganda (dobel) yang tercatat, yang menyebabkan angka partisipasi yang sebenarnya menjadi tidak jelas dan terekam lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, data yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak menyertakan informasi penting, seperti usia dan alamat, yang sangat diperlukan untuk memverifikasi apakah individu yang tercatat memang termasuk dalam kelompok pemuda yang dimaksud.

Ketiadaan data yang lengkap dan akurat ini menyebabkan perencanaan dan evaluasi kegiatan ekonomi mandiri yang melibatkan pemuda menjadi kurang optimal, serta sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan. Agar target dapat tercapai di tahun-tahun mendatang, perbaikan dalam pengumpulan data, termasuk validasi informasi dan pencatatan yang lebih teliti, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan melibatkan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Tabel 2. 15 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan prestasi olahraga	61	7	9	48	25
2	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	75	77,78	83,33	91,67	100

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tegal dari tahun 2020 hingga 2024, yang tercermin dalam jumlah kumulatif medali yang diraih di tingkat provinsi, nasional, dan internasional, menunjukkan perkembangan yang positif. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kualitas atlet yang semakin meningkat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Tegal. Ke depan, diharapkan prestasi ini terus meningkat dan membawa kebanggaan bagi Kabupaten Tegal, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yaitu POPDA Tingkat Kabupaten, POPDA Tingkat Ex. Karisidenan, POPDA Tingkat Provinsi, PORKAB, PORPROV, PEPARDA, Even-even Kejuaraan Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Tegal, pembinaan cabang olahraga (Cabor) menjadi bagian penting dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Pembinaan ini dilakukan oleh berbagai organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Tegal, yang masing-masing memiliki peran dan cakupan cabang olahraga yang berbeda. Terdapat tiga organisasi utama yang membina cabang olahraga di Kabupaten Tegal, yaitu:

- 1) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia): Merupakan organisasi yang membina 27 cabang olahraga yang mencakup olahraga yang lebih populer dan sering diikuti sertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
- 2) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia): Memiliki 4 cabang olahraga yang lebih fokus pada olahraga rekreasi dan kegiatan fisik yang bersifat lebih santai namun tetap mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- 3) NPC (National Paralympic Committee): Organisasi ini fokus pada pembinaan cabang olahraga untuk atlet disabilitas, meskipun jumlah cabang olahraga yang dibina oleh NPC tidak disebutkan secara spesifik, organisasi ini sangat penting dalam meningkatkan akses dan peluang bagi atlet dengan kebutuhan khusus.

R. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tabel 2. 16 Nilai SAKIP Kabupaten 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Kabupaten	63,28	62,56	63,26	64,25	65,58

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2025

Capaian realisasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2023 sebesar 65,58 telah melampaui target RPJMD tahun 2024 sebesar 65,69 dengan capaian kinerja 99,83%. Tren kenaikan capaian SAKIP dari 2022 hingga 2024 menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui revisi RPJMD, penyempurnaan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART, peningkatan kualitas laporan kinerja berbasis analisis hasil dan efisiensi anggaran, pengembangan aplikasi SAKIP terintegrasi, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan SAKIP, seperti peningkatan perencanaan kinerja dan memastikan kembali penjenjangan kinerja yang telah dimiliki mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan CSF sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja, optimalisasi evaluasi triwulanan dan pemanfaatan aplikasi ESAKIP, serta penerapan mekanisme *reward and punishment* dalam implementasi SAKIP. Untuk mengimbangi tantangan tersebut, perlu dilakukan reviu dokumen perencanaan agar selaras dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, optimalisasi evaluasi dan monitoring melalui ESAKIP, penerapan kebijakan insentif dan sanksi berbasis hasil evaluasi, serta penguatan monitoring tindak lanjut evaluasi AKIP secara berkala.

Hasil ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi lebih baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran. Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal dan tidak berkelanjutan. Efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran pada pertengahan tahun berjalan, sebagaimana praktik yang selama ini terjadi.

S. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 2. 17
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (%)	63,69	64,21	67,41	77,6	77,6

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 (n-1) sebesar 77,6 dengan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi. Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dituangkan dalam bentuk nilai yang dinamakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa pelaksanaan RB adalah guna menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat

menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, Road Map RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dalam road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat 22 Indikator Kinerja Utama untuk RB General dan 4 tema yang diambil untuk RB Tematik.

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 sebesar 77,6 diambil dari tahun n-1 menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah memfasilitasi dan mendampingi proses penerapan RB hingga melampaui target akhir RPJMD Tahun 2024 dengan nilai 65,69. Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.

Reformasi Birokrasi telah memasuki periode akhir Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dan upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Selama hampir lima belas tahun pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi telah banyak perubahan yang dilakukan, namun hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Oleh sebab itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginisiasi perubahan strategi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. Percepatan tersebut diawali dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Perubahan ini mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dua strategi yaitu: 1) Reformasi Birokrasi General; dan 2) Reformasi Birokrasi Tematik. Sebelumnya reformasi birokrasi dilaksanakan secara general dan lebih cenderung kepada proses, perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan tata kelola birokrasi, atau berfokus di problem hulu. Namun dengan adanya strategi Reformasi Tematik pelaksanaan reformasi birokrasi juga berfokus pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dan berkaitan dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional atau problem hilir, seperti penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Digitalisasi Pemerintah dan Pengendalian Inflasi.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama bagi sebuah bangsa untuk terus berkembang maju. Oleh karena itu, agar menjadikan SDM Indonesia berkualitas, diperlukan pemupukan sejak dini. Pendidikan adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan putra dan putri bangsa supaya bisa bersaing di era globalisasi dan digital pada masa mendatang. Oleh karena itu, tentunya peningkatan mutu pendidikan haruslah dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan juga merupakan salah satu pelayanan dasar. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri 59 tahun 2021 yang kemudian juga diterbitkan Permendikbudristek 32 Tahun 2022.

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari potret pendidikan khususnya di Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, program pengelolaan pendidikan memuat indikator-indikator yang dapat mengintervensi akses dan mutu layanan pendidikan. Indikator ini juga merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Akses Pendidikan dapat dilihat dari data angka partisipasi sekolah dari semua jenjang seperti tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 18 Angka Partisipasi per Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	79,86	85,05	96,13	81,12	77,12
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	106,73	86,24	87,58	98,34	98,47
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,25	96,55	96,22	98,36	33,34

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Tahun 2023 jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) mengalami penurunan dari 96,13 menjadi 81,12. Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun

yang berpartisipasi pada pendidikan dasar tahun 2023 adalah 98,34. Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada triwulan ketiga tahun 2023 adalah 98,36. Melihat capaian di tahun 2023 ini berarti angka partisipasi sekolah semakin baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 19 Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77,47	75,63	76	79,1	79,6
2	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	89,67	81,45	81,97	83,55
3	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	58,99	66,05	76,01
4	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	62,39	71,01	77,65
5	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	28,32	45,78	64,98
6	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	38,92	48,72	72,25
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	67,05	55,08	75,34	70,77	74,32
8	Indeks Iklim Keamanan SD	n/a	n/a	65,36	67,1	71,15
9	Indeks Iklim Kebinekaan SD	n/a	n/a	60,33	68,69	72,62
10	Indeks Iklim Inklusivitas SD	n/a	n/a	52,38	55,09	54,21
11	Indeks Iklim Keamanan SMP	n/a	n/a	70	67,22	69,15
12	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	n/a	n/a	60,36	66,98	73,01
13	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	n/a	n/a	52,82	55,52	57,17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Data mengenai literasi dan numerasi baik SD maupun SMP dapat disajikan mulai tahun 2022. Tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena belum rilis ANBK. Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional dan

Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional secara berturut-turut adalah 66,05; 71,01; 45,78 dan 48,72. Berdasarkan hasil tersebut maka Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Di era berkembang sekarang ini pendidikan juga memiliki peran sangat penting terhadap perkembangan seseorang, pendidikan di arahkan dengan berbagai segalah macam kemudahan untuk mengasah pengetahuan setiap peserta didik, artinya bahwa peningkatan mutu pendidikan itu sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, sebagai bagian dari tujuan pendidikan itu sendiri mengedepankan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang diharapkan mengacu pada hasil kelulusan dari setiap peserta didik, untuk mendapatkan hasil lulusan yang baik, diperlukan berbagai macam trobosan baru untuk mengatar peserta didik lebih unggul dalam berbagai pengetahuan. Artinya kemajuan peserta didik harus diwujudkan dengan proses pembelajaran yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, profesional, unggul, berpandangan jauh kedepan (visioner) memiliki percaya dan harga diri yang tinggi. Mutu pendidikan merupakan hasil dari penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8 standar. Kedelapan standar tersebut adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Untuk melihat penerapan SNP masing-masing satuan pendidikan, maka perlu dilakukan akreditasi masing-masing satuan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional baik BAN S/M maupun BAN PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Tabel 2. 20 Peringkat Akreditasi Jenjang Pendidikan Tahun 2020 – 2024

NO.	JENJANG	PERINGKAT	STATUS		JUMLAH	% Ter_Akr	% Akr
			NEGERI	SWASTA			
2020	PAUD	A	2	6	8	10,73	73,30
		B		59	59		
		C		21	21		
		TT		732	732		
	SD	A	222	13	235	99,29	
		B	439	7	446		
		C	13	2	15		
		TT	1	4	5		
	SMP	A	39	7	46	83,19	
		B	6	26	32		
		C	2	14	16		
		TT	2	17	19		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		

NO.	JENJANG	PERINGKAT	STATUS		JUMLAH	% Ter_Akr	% Akr
			NEGERI	SWASTA			
2021	PAUD	A	2	11	13	14,06	75,54
		B		65	65		
		C		40	40		
		TT		721	721		
	SD	A	235	14	249	99,42	
		B	426	6	432		
		C			0		
		TT		4	4		
	SMP	A	41	7	48	88,70	
		B	10	28	38		
		C		16	16		
		TT		13	13		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		
2022	PAUD	A	2	14	16	16,51	78,55
		B		72	72		
		C		51	51		
		TT		703	703		
	SD	A	227	19	246	99,41	
		B	421	8	429		
		C	0	2	2		
		TT	0	4	4		
	SMP	A	41	7	48	98,28	
		B	6	36	42		
		C	2	22	24		
		TT		2	2		
	KESETARAAN	A	1	6	7	100,00	
		B	0	12	12		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		
2023	PAUD	A	3	78	81	96,16	78,55
		B		349	349		
		C		121	121		
		TT		22	22		
	SD	A	190	14	204	99,41	
		B	447	14	461		
		C	11	1	12		
		TT	0	4	4		

NO.	JENJANG	PERINGKAT	STATUS		JUMLAH	% Ter_Akr	% Akr
			NEGERI	SWASTA			
	SMP	A	40	12	52	97,44	
		B	7	33	40		
		C	2	20	22		
		TT		3	3		
	KESETARAAN	A	1	5	6	100,00	
		B	0	13	13		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		
2024	PAUD	A	3	78	81	96,16	78,55
		B		349	349		
		C		121	121		
		TT		22	22		
	SD	A	199	24	223	99,12	
		B	430	11	441		
		C	11	1	12		
		TT	0	6	6		
	SMP	A	40	12	52	97,46	
		B	8	33	41		
		C	2	20	22		
		TT		3	3		
	KESETARAAN	A	1	5	6	100,00	
		B	0	13	13		
		C	0	5	5		
		TT	0	0	0		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel peringkat akreditasi satuan Pendidikan dari tahun 2020-2024 di atas maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun rata-rata satuan Pendidikan untuk semua jenjang yang sudah terakreditasi meningkat. Hal ini berarti dapat di asumsikan mutu Pendidikan juga meningkat secara bertahap. Berbicara satuan Pendidikan dasar memang tidak ada masalah karena hampir 100% sudah terakreditasi baik jenjang SD maupun SMP. Sedangkan yang paling rendah tingkat akreditasinya adalah satuan Pendidikan PAUD. Hal ini terjadi karena berdasarkan survey lapangan terdapat keterbatasan sumber daya yang ada di masing-masing satuan Pendidikan. Utamanya adalah sumber daya manusia dan kemampuan anggaran satuan Pendidikan.

Mutu Pendidikan juga terdapat dalam beberapa indikator dalam program pengelolaan Pendidikan yang juga terdapat dalam aturan Permendagri 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek 32 Tahun 2022 dan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 21 Capaian Indikator Program Pengelolaan Pendidikan Sasaran Mutu Layanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77,47	75,63	76	79,1	79,6

No.	Nama Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70,86	89,67	81,45	81,97	83,55
3	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	58,99	66,05	76,01
4	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	62,39	71,01	77,65
5	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	28,32	45,78	64,98
6	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a	38,92	48,72	72,25
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	67,05	55,08	75,34	70,77	74,32
8	Indeks Iklim Keamanan SD	n/a	n/a	65,36	67,1	71,15
9	Indeks Iklim Kebinekaan SD	n/a	n/a	60,33	68,69	72,62
10	Indeks Iklim Inklusivitas SD	n/a	n/a	52,38	55,09	54,21
11	Indeks Iklim Keamanan SMP	n/a	n/a	70	67,22	69,15
12	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	n/a	n/a	60,36	66,98	73,01
13	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	n/a	n/a	52,82	55,52	57,17

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Rata-rata nilai kelulusan SD maupun SMP terjadi fluktuasi naik dan turun. Akan tetapi pasca Pandemi Covid-19 cenderung naik. Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP merupakan indikator SPM dimana parameteranya adalah hasil dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK dilakukan setahun sekali dengan sasaran siswa kelas 5 Sekolah Dasar dan siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama dengan metode sampling. Penentuan peserta dilakukan secara otomatis oleh Kemendikbudristek secara random. Hasil dari ANBK perhitungannya diolah secara otomatis oleh system di Kemendikbudristek. Hasil itulah sebagai dasar penentuan nilai numerasi dan literasi di atas. Begitu juga dengan indeks iklim keamanan, kebhinnekaan dan inklusivitas baik SD maupun SMP di dapat secara otomatis dari Kemendikbudristek. Indikator-indikator tersebut di atas tersaji dalam Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbudristek.

Data mengenai literasi dan numerasi baik SD maupun SMP dapat disajikan mulai tahun 2022. Tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena belum rilis ANBK. Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional, Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional dan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional secara berturut-turut adalah 66,05; 71,01; 45,78 dan 48,72. Berdasarkan hasil tersebut maka Kemampuan literasi dan numerasi baik SD maupun SMP mengalami peningkatan dr tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini berarti ada peningkatan pemahaman siswa dalam hal literasi dan numerasi. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hanya masih perlu untuk dimaksimalkan lagi. Iklim keamanan, kebhinnekaan dan inklusivitas baru bias terukur mulai tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 baik jenjang SD maupun SMP. Indeks Iklim Keamanan SD, Indeks Iklim Kebinekaan SD, Indeks Iklim Inklusivitas SD, Indeks Iklim Keamanan SMP, Indeks Iklim Kebinekaan SMP, Indeks Iklim Inklusivitas SMP secara berturut-turut pada tahun 2023 adalah 67,1; 68,69; 55,09; 67,22; 66,98 dan 55,52. Walaupun sudah mengalami peningkatan dari tahun 2022 akan tetapi haris tetap dimaksimalkan untuk capaian tahun depannya lagi.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Tabel 2. 22 Persentase Muatan Lokal Tahun 2020 – 2024

No	Uraian Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari satu indicator yaitu Persentase Muatan Lokal dalam KBM. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020 – 2024 mempunyai nilai yang sama yaitu 5,26. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajarn selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran. Pada tahun 2024 menjadi capaiannya juga sama dengan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5,26.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah pendidik atau guru. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada digaris depan berhadapan dengan siswa yang dituntut

memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 28 yaitu:

- a) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
- d) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Berikut tersaji dalam tabel jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 2. 23 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	69,27	70,02	68,79	72,19	82,65
2	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	46,28	45,97	51,91	51,02	37,23
3	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	49,98	48,59	53,36	74,38	64,13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel tersebut Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dari tahun 2019 – 2023 masih perlu ditingkatkan. Satuan Pendidikan jenjang PAUD formal yang berstatus negeri hanya ada tiga yaitu TK Negeri Pembina Slawi, TK Negeri Pembina Tarub dan PAUD milik SKB. Sedangkan sisanya merupakan Satuan Pendidikan PAUD milik swasta dimana kemampuan masing masing satuan Pendidikan tersebut dalam hal finansialnya pun berbeda-beda sehingga mempengaruhi rekrutmen dari sumber daya manusianya. Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar masih perlu ditingkatkan karena masih di angka 51,02. Hasil dari tahun 2019-2023 memang ada peningkatan akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2022 ke 2023. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN juga semakin meningkat. Berdasarkan tabel dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari rekrutmen ASN P3K.

4. Program Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2024 sudah mempunyai izin operasi.

Tabel 2. 24 Perizinan Sekolah Tahun 2020-2024

N O	Jenjang	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nege ri	Swast a	Nege ri	Swast a	Nege ri	Swast a	Nege ri	Swast a	Nege ri	Swast a
1	PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	2	820	3	843	2	820	3	843	3	849
2	SD	675	26	655	33	675	26	655	33	646	36
3	SMP	49	64	49	67	49	64	49	67	49	68
4	Kesetaraan	1	23	1	24	1	23	1	24	1	24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di Jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah.

Tabel 2. 25 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah

No	Jenjang	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5	5.26	5.26	5.26	5.26

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan Tabel di atas maka persentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

B. Kesehatan**1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2020 – 2024:

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	9,02%	9,02%	9,09%	9,09%	9,09%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,9%	88,90%	92%	100%	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,3%	87,38%	89,01%	72,40%	69,1%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,2%	90,05%	88,58%	71,90%	71,43%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99%	91,76%	85,04%	74,60%	74,6%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,7%	74,56%	74,89%	75,60%	110,5%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,9%	69,16%	77,80%	86,40%	475,19%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,4%	65,57%	45,10%	45,20%	181,39%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,6%	95,94%	71,17%	77%	169,79%
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,1%	24,00%	29,80%	31,50%	129,4%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,5%	74,42%	86,9%	81,40%	125,86%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,3%	57,57%	61,20%	63,60%	102,2%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,1%	69,20%	92,3%	86,70%	235,78%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,5%	99,47%	100%	61,90%	100%
15.	Cakupan balita stunting	12,5%	12,08%	17,58%	17,6%	16,38%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	82,8	82,8	86,21	86,22	89,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDMK sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capaian kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain:

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi		100	100	100	100
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal terus berupaya memenuhi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal kuantitas maupun kualitas. Tugas pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan menjadi tugas Dinas Kesehatan, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPTD Gudang Farmasi. Selama ini kebutuhan obat di puskesmas sudah tercukupi. Kendala yang dihadapi adalah pada proses pengadaan yang bersifat teknis. Namun kendala – kendala tersebut dapat diatasi dan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan di puskesmas dapat terpenuhi.

Belum semua makanan dan minuman yang beredar di Kabupaten Tegal memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan form pemeriksaan sarana produksi pangan yang terdiri dari elemen lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, kesehatan dan hygiene karyawan, pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi, serta penyimpanan. Persentase pangan yang tidak memenuhi syarat dalam 5 tahun terakhir semakin naik karena jumlah sarana produksi pangan yang disurvei meningkat. Dinas Kesehatan sebagai salah satu anggota Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) Kabupaten Tegal terus berupaya dalam menjaga kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat. Tim SKPT mengambil sampel makanan di sejumlah tempat kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah terdapat kandungan zat berbahaya di dalamnya. Jika terdapat zat berbahaya pada makanan yang diperiksa, akan dilakukan pembinaan terhadap penjual makanan dan minuman tersebut.

4. **Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Capaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 29 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	92,8	88,70	84,0	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2024

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

PHBS di Rumah Tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga Sehat. Rumah tangga sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif untuk hidup sehat keluarga.

Indikator PHBS di tatanan rumah tangga diantaranya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, pengelolaan air minum dan makan di rumah tangga, menggunakan jamban sehat (Stop Buang Air Besar Sembarangan/Stop BABS), pengelolaan limbah cair di rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, memberantas jentik nyamuk, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah dan lain-lain.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Berikut Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Realisasi Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
A	Mutu Pelayanan						
1	<i>Emergency Respon Time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	4.5 menit	4,5 menit	< 5 menit	< 5 menit	< 5 menit
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,038	0,0032	0,0021	0,0032	0,00069
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0.24 %	3,09	3,77%	2,87%	2,88%	2,88%
4	Jumlah Pasien Rawat Inap yang Dirujuk	-	146 Pasien	252 Pasien	93 Pasien	91 pasien	174 pasien
5	<i>Post Operative Death Rate</i>	≤ 1 %	0	0	0	0	0
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 %	-	-	0,177%	0,177%	0,08%
7	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 menit	42,80 menit	27 menit	23,10 menit	23 menit	26,55 menit
8	Waktu tunggu	≤ 2 hari	1.5 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari	< 2 hari

No	Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
	operasi elektif						
B Kepedulian Masyarakat							
1	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rasio Tempat Tidur Kelas III		0,59	0,57	0,62	0,63	0,61
3	Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III	75-85 %	80,58%	97,72%	113,5%	114%	87,94%
4	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu di rawat jalan	-	25.997	25.165 pasien (25,75 %)	40.682 pasien (33,18 %)	40.682 pasien (33,18 %)	46.565 pasien (32,59 %)
C Kepuasan Pelanggan							
1	Prosentase Komplain		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Lama waktu tunggu di poliklinik	≤ 60 menit	100 menit	96 menit	60,6 menit	60 menit	130 menit
3	Kemudahan Pelayanan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
D Kepedulian Terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan data di atas, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai standar dan sudah mencapai standar. Namun secara umum, nilai kesehatan kinerja RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal pada indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2024 mengalami kenaikan. Dalam pemenuhan pelayanan kepada pasien, RSUD dr. Soeselo berusaha memberikan pelayanan yang prima, namun masih terdapat indikator yang belum tercapai khususnya dalam pelayanan waktu tunggu rawat jalan yang masih diatas 120 menit. RSUD dr. Soeselo akan berupaya untuk menerapkan SIMRS yang didalamnya terdapat Rekam Medis Elektronik untuk menintegrasikan pelayanan dari mulai pasien melakukan pendaftaran hingga pasien selesai dilayani dengan tujuan agar waktu pelayanan semakin efektif.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan Rumah Sakit mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar.

Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
a. Mutu Pelayanan							
1	<i>Emergency respon time</i>	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang (0 >30 menit), 1=16-30 menit, 2=8-15 menit, 3= <8 menit)	2	2	2	2	3
2	Angka Kematian UGD	≤ 2% (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%)	3	3	3	3	3
3	NDR (Angka Kematian Netto)	≤ 0,24 % (jumlah kematian pasien ≥48 jam setelah dirawat / jumlah pasien yang dirawat x 1000 ‰) 0=>65% 1=41-65 2=25-40 3=<25%	3	3	3	3	3
4	Prosentasi pasien rawat inap yg dirujuk	jumlah pasien rawat inap yang dirujuk / jumlah pasien rawat inap x 100% 0=>10% 1=8-10% 2=5-7% 3=<5%	2	2	3	3	3
5	Post operative death rate	≤ 1% (jumlah operasi pasien meninggal / jumlah pasien dioperasi x 100%) 0=>10% 1=6-10% 2=2-7% 3=<2%	3	3	3	3	3
6	Angka Infeksi Nosokomial	< 1.5 % (jumlah psaien dirawat yang terinfeksi nosokomial / jumlah pasien dirawat x 100 0=>15% 1=10-15% 2=2-9% 3=<2%	2	2	3	3	3
7	Kecepatan pelayanan resep obat jadi	≤ 30 menit (rata-rata pelayanan resep obat jadi dalam menit) 0=<60 menit 1=31-60 menit 2=8-30 menit 3=<8 menit	2	2	2	2	3
8	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari (rata rata waktu tunggu sebelum operasi dalam hari) 0=>5 hari 1=3-5 hari 2=2-3 hari 3=< 24 jam	3	3	3	3	3

No	Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
B Kepedulian Masyarakat							
1	Pembinaan Kepada Puskesmas	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	0,5	0,5	0,5	0,5	1
2	PKRS	0 tidak ada program, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	0,5	0,5	0,5	0,5	1
3	Rasio tempat tidur kelas 3	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30, 1= > 30%	1	1	1	1	1
4	Pemanfaatan TT (BOR(kelas) 3	60-80% (Depkes, 2005) 0=>40% 0,25=40-59% 0,5=60-58% 1=<85%	1	1	0,25	0,25	0,25
5	Proporsi pelayanan pasien tidak mampu (Pbi/ total pasien rajal dan ranap)	0 ≤10%, 0,25 =10-20, 0,5 =21-30, 1= > 30%	0,5	0,5	1	1	1
C Kepuasan Pelanggan							
1	Prosentase complain	0 tidak ada program penanganan complain, 0,251 ada tidak dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan sebagian, 1,00 ada dilaksanakan semua	0,5	0,5	1	1	0,5
2	Lama Waktu Tunggu di poliklinik	≤ 60 menit (0 >120 menit, 0,75 61-120 menit, 1,5 30-60 menit 2,00 < 30 menit)	2,0	2,0	1,5	1,5	0,75
3	kemudahan pelayanan	0 = tidak ada petunjuk, 1 = ada petunjuk tidak lengkap, 2 = tidak ada petunjuk	1,0	1,0	1	1	2
D Kepedulian Terhadap Lingkungan							
1	kebersihan lingkungan	0 tidak ada program, 0,75 ada program dan sop, 1,5 sop dilaksanakan sebagian, 2 sop dilaksanakan semua	1,5	1,5	2	2	2,5

No	Indikator	Standar	2020	2021	2022	2023	2024
2	hasil uji AMDAL	0 tidak ada Amdal, 0,75 tidak ada tindaklanjut hasil amdal 1,5 ada tindaklanjut belum selesai 2,00 ada tindaklanjut sampai selesai	0	0	0	0	0
Total Skore Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat			26,0	25,0	30,75	31	34

Sumber : RSUD Suradadi, 2024

RSUD SURADADI terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dengan mempercepat pelayanan emergency untuk memperkecil angka kematian di UGD terbukti di tahun 2023 dan 2024 angka kematian di UGD dibawah 5% dari jumlah pasien IGD Tahun 2023 sebesar 9.464 dan tahun 2024 sebesar 10.470. Total NDR RSUD Suradadi di tahun 2023 11,43% di tahun 2024 sebesar 7,40% itu yang artinya angka kematian pasien rawat inap mengalami penurunan.

Kebersihan lingkungan Suradadi saat ini telah menerapkan seluruh SOP karena syarat lulus dan evaluasi dari badan akreditasi LARSDHP seluruh SOP kebersihan harus diterapkan. Untuk hasil uji AMDAL di RSUD Suradadi belum ada dikarenakan belum memiliki seseorang yang berkompeten di bidang AMDAL, baik secara teknis maupun non teknis. Manajemen sedang berupaya untuk mencari atau menambah pegawai yang berkompeten dalam bidang proses penilaian AMDAL

Berdasarkan data di atas Capaian Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat salah satu dari indikator perhitungan Nilai Kesehatan BLUD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

1) Infrastruktur Bangunan Sumber Daya Air (SDA)

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumber daya air di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Pencapaian Kinerja Pembangunan Irigasi Kabupaten Tegal

NAMA IRIGASI KECAMATAN	DAERAH & KEC.	LUAS D.I. (Ha)	PANJA NG (Km)	KONDISI (Km)							
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
WILAYAH III											
JUMLAH	KEC. JATINEGARA	1.718, 00	67,37	1.196, 03	69, 62	164,5 0	9,5 8	337,4 1	19, 64	20,0 5	1,1 7
WILAYAH V											

NAMA IRIGASI KECAMATAN	DAERAH &	LUAS D.I. (Ha)	PANJA NG (Km)	KONDISI (Km)							
				BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
				(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
JUMLAH BALAPULANG	KEC.	1.108,00	23,53	758,50	68,46	171,24	6,18	146,53	13,22	31,72	12,14
JUMLAH MARGASARI	KEC.	1.089,00	26,81	437,13	40,14	353,73	32,48	212,24	19,49	85,89	7,89
WILAYAH VI											
JUMLAH BUMIJAWA	KEC.	3.010,00	79,16	1.853,71	61,59	482,98	16,05	549,68	18,26	123,63	4,11
JUMLAH KEC. BOJONG		2.356,00	79,15	1.481,31	62,87	364,34	15,46	465,17	19,74	45,17	1,92
TOTAL		9.281,00	276,02	5.726,70	62,07	1.536,80	15,91	1.711,04	18,84	306,46	3,18

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan SK Bupati nomor 050/492 , Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 Ha. Kebutuhan air daerah irigasi kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Sesuai DI kewenangan kabupaten Panjang saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 Km, dengan kondisi jaringan irigasi yang baik 5.726,70 Ha (62,07%).

2) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur penyuplai air yang dapat langsung diminum merupakan kebutuhan utama untuk semua masyarakat khususnya warga di daerah urban/perkotaan. Sejak tahun 1962 Pemerintah telah berinisiasi dengan memberikan izin kepada pemerintah/ pemerintah daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sampai awal tahun 1990 PDAM belum mampu menyediakan air perpipaan yang dapat langsung diminum.

Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing PDAM cukup kompleks. Beberapa permasalahan yang dihadapi PDAM adalah ketersediaan air baku, kurangnya modal, dan formulasi tarif yang menyebabkan tarif berada di bawah ongkos produksi dan pemeliharaan. Ketika tarif berada di bawah ongkos produksi dan pemeliharaan, upaya untuk menghasilkan dan menyalurkan air yang dapat langsung diminum menjadi tidak optimal. Sama halnya yang terjadi di Kabupaten Tegal dimana PDAM belum mampu memproduksi air minum dan baru mampu memproduksi air bersih.

Berikut data layanan air bersih yang terdapat/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dan layanan air bersih lainnya sampai dengan 2024:

Tabel 2. 33 Jumlah Sasaran (pengguna layanan) SR dan Jiwa

No	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Unit (SR)	Jiwa	%	Unit (SR)	Jiwa	%	SR	Jiwa	%
1	Jaringan Perpipaan	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%	99.314	589.428	36,30%
2	Bukan Jaringan Perpipaan (Terlindungi)	132.965	527.336	32,76	153.648	730.236	67,42%			
3	Bukan Jaringan Perpipaan (Tidak Terlindungi)	-	547.275	34,00		547.275	34,00%			
4	Akses Layak	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%	252.962	1.319.664	81,28%
5	Akses Aman	93.195	548.111	34,05	97.299	579.733	35,71%	99.314	589.428	36,30%
6	Akses Perkotaan	183.541	872.897	54,22	231.774	1.039.507	78,21%	231.991	1.040.375	78,27%
7	Akses Perdesaan	42.619	199.327	12,38	43.958	208.726	70,89%	44.286	210.038	71,34%
8	Pelayanan Air Minum	226.160	1.075.447	66,80	250.947	1.309.969	80,68%	252.962	1.319.664	81,28%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Pada Tahun 2024 Jumlah Pelayanan Air Minum di Kabupaten Tegal mencapai 1.319.664 jiwa dengan persentase 81,28%. Rekapitulasi untuk Pamsimas di Kabupaten Tegal terakhir pada tahun 2023 meliputi 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tegal dengan 252.962 Unit.

Tabel 2. 34 Jumlah Pengelola Pamsimas (Unit)

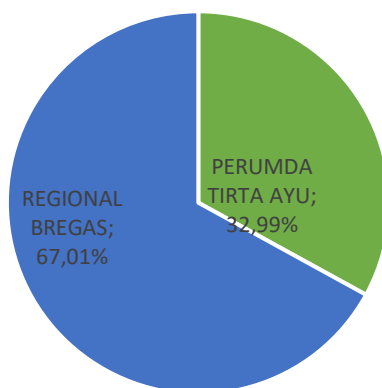
No	Kecamatan	Akses Aman		Perkotaan		Perdesaan	
		Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa
1	Adiwerna	180	1.337	153	1.168	27	169
2	Balapulang	3.166	18.492	670	2.939	2.496	15.553
3	Bojong	6.781	42.061	3.569	22.006	3.212	20.055
4	Bumijawa	8.810	36.754	5.147	22.957	3.663	13.797
5	Dukuhturi	247	1.374	247	1.374	-	-
6	Dukuhwaru	441	1.951	441	1.951	-	-
7	Jatinegara	2.546	13.333	1.214	7.745	1.332	5.588
8	Kedungbanteng	438	2.053	25	141	413	1.912
9	Kramat	724	3.296	724	3.296	-	-
10	Lebaksiu	875	4.147	675	2.701	200	1.446
11	Margasari	817	5.836	402	2.008	415	3.828
12	Pagerbarang	2.951	17.415	2.626	15.668	325	1.747
13	Pangkah	1.076	4.062	531	2.119	545	1.943
14	Slawi	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Akses Aman		Perkotaan		Perdesaan	
		Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa
15	Suradadi	3.003	15.832	2.287	10.868	716	4.964
16	Talang	156	842	156	842	-	-
17	Tarub	699	3.959	699	3.959	-	-
18	Warureja	2.476	12.337	876	4.209	1.600	8.128
	Akses Aman	35.386					
	Jumlah Jiwa	185.081					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tahun 2024 Pelayanan Pamsimas di Kabupaten Tegal meliputi 18 Kecamatan dengan akses aman 35.386 Unit dan jumlah 185.081 Jiwa. Pembinaan dan pengaturan dilakukan dengan intensif terutama ditujukan agar Pemerintah Daerah mampu menjaga keberlanjutan dengan membangun dan mengembangkan secara mandiri infrastruktur permukiman, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pemerintah Daerah didorong untuk menyiapkan instrumen penyelenggaraan infrastruktur permukiman, yang meliputi peraturan perundang-undangan, perencanaan, dan kelembagaan.

Gambar 2. 39 Presentase Supply PDAM dan SPAM REGIONAL



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2023

Pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Tegal, PDAM Kabupaten Tegal menerima pasokan air curah dari SPAM Regional BREGAS sebesar 309,55 lt/detik atau 67,01% sedangkan SPAM Perumda Tirta Ayu sendiri memiliki kapasitas air baku sebesar 152,39 lt/detik atau 32,99%. Total Produksi PDAM Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebesar 12.746.295 m³. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 81,28% dengan realisasi jaringan perpipaan 36,30%, capaian realisasi layak sebesar 81,28% dan capaian realisasi aman 36,30%.

3) Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Dalam penanganan sampah menggunakan pendekatan berbasis 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 105 unit di tahun 2024 ini. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat meningkat, sehingga program pengurangan sampah

plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35 Sarana dan Prasarana Persampahan 2020 – 2024

No.	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bank Sampah (unit)	140	140	105	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk (unit)	140	165	287	287	287
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	100	84,84	36,59	36,59	36,59
4.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	1	1	1	1
5.	Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)	1	2	10	27	28
6.	Tempat Pengolahan Sampah (TPS)	119	119	150	150	151

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPSS (unit)	119	119	150	150	151
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	242,5	208,7	282,0	282,0	308
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267	1.654.860
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,151	0,131	0,168	0,168	0,186

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPS di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebanyak 151 unit. Daya tampung setiap TPS tersebut sebesar 2,04 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 37 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³ /hari)	148,43	427,4	515,7	451,4	468,23
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	58.000	58.000	58.001

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	80,00	82,00	84,21	84,21

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 38 Rumah Berjamban Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Akses (%)					KK yg belum berjamban layak	
			2020	2021	2022	2023	2024	Unit	%
1	Margasari	37.624	100	100	100	100	100	759	2,90
2	Bumijawa	32.722	100	100	100	100	100	1.427	6,05
3	Bojong	24.710	100	100	100	100	100	557	2,85
4	Balapulang	32.705	100	100	100	100	100	2.823	11,10
5	Pagerbarang	21.727	100	100	100	100	100	933	6,13
6	Lebaksiu	32.846	100	100	100	100	100	1.921	8,65
7	Jatinegara	20.897	100	100	100	100	100	910	6,07
8	Kedungbanteng	15.989	100	100	100	100	100	1.575	12,20
9	Pangkah	37.554	100	100	100	100	100	1.876	5,96
10	Slawi	26.082	100	100	100	100	100	46	0,24
11	Adiwarna	44.273	100	100	100	100	100	3.039	10,01
12	Talang	34.264	100	100	100	100	100	2.320	8,64
13	Dukuhturi	33.234	100	100	100	100	100	623	2,91
14	Tarub	28.781	100	100	100	100	100	2.500	11,44
15	Kramat	38.150	100	100	100	100	100	318	1,39
16	Suradadi	30.677	100	100	100	100	100	1.098	5,45
17	Warureja	22.760	100	100	100	100	100	1.852	11,01
18	Dukuhwaru	23.165	100	100	100	100	100	552	3,41
	Total	538.160	100	100	100	100	100	25.130	6,18

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2020 – 2024). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 6,18% KK yang masih belum memiliki akses jamban yang layak.

Tabel 2. 39 Data Akses Air Limbah Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH		BABS	CUBLUK		SPALD-Setempat				SPALD-Terpusat	
		SPALD Kepadatan <25 Jiwa/Ha	Wilayah Pengembangan SPALD T		RUMAH	(%)	Septiktank Individual		Septiktank Komunal		IPALD Permukiman	
							RUMAH	(%)	RUMAH	(%)	RUMAH	(%)
1	Kedungbanteng	12.189	1.354	-	1.533	12,20	11.874	87,80	-	-	-	-
2	Bojong	16.920	3.626	-	542	2,85	17.551	85,55	2.152	11,60	188	0,92
3	Dukuhtwaru	5.101	11.902	-	537	3,41	16.351	96,31	43	0,28	136	0,80
4	Margasari	16.926	10.578	-	739	2,90	26.054	94,87	559	2,25	-	-
5	Slawi	-	20.203	-	45	0,24	20.122	99,74	4	0,02	50	0,25
6	Dukuhturi	2.497	19.979	-	606	2,91	21.736	96,85	53	0,26	-	-
7	Kramat	11.960	11.960	-	309	1,39	23.553	98,61	-	-	-	-
8	Jatinegara	14.809	926	-	886	6,07	12.571	80,01	1.979	13,93	60	0,38
9	Balapulang	21.346	5.336	-	2.746	11,10	23.014	86,38	610	2,53	132	0,49
10	Bumijawa	22.002	2.750	-	1.388	6,05	21.703	87,81	1.377	6,16	-	-
11	Lebaksiu	10.874	12.427	-	1.869	8,65	21.068	90,55	173	0,82	114	0,49
12	Tarub	11.456	11.456	-	2.432	11,44	20.261	88,56	-	-	125	0,55
13	Adiwerna	4.550	27.302	-	2.956	10,01	28.573	89,84	47	0,16	62	0,19
14	Suradadi	13.434	7.676	-	1.068	5,45	19.923	94,51	8	0,04	-	-
15	Pangkajene	5.741	27.268	-	1.825	5,96	29.804	90,42	1.079	3,62	280	0,85
16	Talang	1.483	26.691	-	2.257	8,64	25.705	91,37	-	-	-	-
17	Warureja	14.699	2.940	-	1.802	11,01	15.673	88,98	2	0,01	-	-
18	Pagerbarang	13.502	2.455	-	908	6,13	14.585	91,53	338	2,34	-	-
JUMLAH		199.487	206.829	-	24.447	6,02	370.121	91,09	8.423	2,07	1.147	0,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tabel Data Akses Air Limbah Tahun 2024 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah membangun SPALD-Setempat Individual sejumlah 370.121 Rumah dan untuk Komunal bisa diakses oleh 8.423 Rumah. Untuk SPALD-Terpusat baru terbangun di 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan yang melayani 1.147 Rumah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Perda 6 tahun 2016 tentang air limbah Berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Perda 6 tahun 2016 tentang air limbah domestik "Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikuras secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan lumpurnya diangkut serta diolah di IPLT. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal memberikan pelayanan sedot tinja untuk wilayah Kabupaten Tegal serta. Truk penyedot tinja yang berjumlah 4 unit ini beroperasi mulai dari pagi sampai dengan sore hari. Berdasarkan jumlah pelanggan sedot tinja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, capaian akses sanitasi aman sebesar 1,84% di tahun 2024.

Tabel 2. 40 Data Jumlah Permintaan Sedot Tinja Per Oktober 2024

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Jumlah Dilayani	Volume M³
1	Januari	22	22	46
2	Februari	26	26	53,5
3	Maret	67	67	112
4	April	38	38	77,5
5	Mei	37	37	93,5
6	Juni	38	38	78,5
7	Juli	58	58	120,5
8	Agustus	47	47	96,5
9	September	31	31	65
10	Oktober	38	38	79
11	November	50	50	105
12	Desember	53	53	112

No	Bulan	Jumlah Permintaan	Jumlah Dilayani	Volume M ³
Jumlah		505	505	1.039,0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal, 2024

5) **Infrastruktur Drainase**

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Mendasari Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 050/583/2014 Tentang Jalan Kabupaten seperti tersebut di atas, maka diketahui jumlah/panjang jalan kabupaten yang harus berdrainase, dimana Panjang jalan kabupaten adalah sepanjang 847, 27 Km dan yang harus berdrainase sepanjang 490,15 Km. Capaian atas drainase jalan kabupaten sepanjang 337,46 Km atau 68,85%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 41 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Uraian	Panjang Drainase Jalan Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Km	Km	Km	Km	Km
A	Jalan Kabupaten (a)	847,27	847,27	847,27	847,27	847,27
B	Jalan yg harus berdrainase (b)	490,15	490,15	490,15	490,15	490,15
C	Jalan yg tidak harus berdrainase (c)	357,12	357,12	357,12	357,12	357,12
D	Jalan yang berdrainase (d)	286,35	301,93	314,22	324,58	337,46
	Persentase Jalan berdrainase (d/b)	58,42	61,60	64,11	66,22	68,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

6) **Bangunan Gedung Negara**

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 42 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42

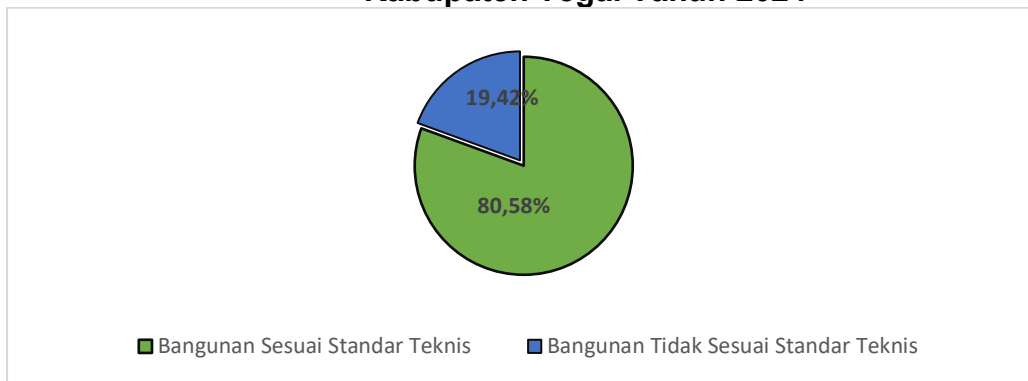
No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
Total Bangunan Gedung Negara		2.677

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, Tahun 2024

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 2. 40 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kabupaten Tegal Tahun 2024



Sumber : Hasil Analisa berbagai Sumber, Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 79,12% atau sebanyak 2.118 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 20,88% atau sebanyak 559 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

7) Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwa fungsi serta klasifikasi bangunan Gedung dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan juga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG).

a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menggunakan istilah IMB atau Izin Mendirikan Bangunan, namun peraturan tersebut telah dicabut sehingga kini istilah IMB tidak lagi digunakan dan diganti dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.

Adapun fungsi dari bangunan Gedung yang terdiri dari 5 jenis diantaranya yaitu fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi social budaya, dan fungsi khusus. Fungsi dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini sendiri adalah agar bangunan-bangunan yang didirikan nantinya tidak menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya itu, seluruh standar teknis harus dipenuhi sebelum dilakukannya pelaksanaan konstruksi.

Selain untuk membangun bangunan baru, PBG ini juga diwajibkan untuk suatu bangunan yang nantinya mengalami perubahan fungsi, atau disebut PBG perubahan. Untuk bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki surat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka terlebih dahulu pemilik Gedung harus mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) baru bisa memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tabel 2. 43 Jumlah Permohonan Perijinan Bangunan Gedung Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN (PBG)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	3	0,005	0	0,00	3	0,005	13	0,011	35	0,019
2	Jenis Permohonan Status Verifikasi Perbaikan Ulang	362	0,558	578	0,54	362	0,558	616	0,517	857	0,471
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	6	0,009	0	0,00	6	0,009	23	0,019	39	0,021
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	278	0,428	497	0,25	278	0,428	540	0,453	888	0,488
5	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	-	-	-	-	222	100	248	-	0	100

NO	URAIAN (PBG)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
JUMLAH		649	1,00	1.075	0,79	649	1,00	1.192	1,00	1.819	1,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

Dari data jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung per Bulan Desember 2024 mencapai 1.819 Permohon terdiri dari permohonan dengan perbaikan ulang sejumlah 857 Permohon dan yang sudah selesai verifikasi sejumlah 888 permohonan dengan rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan adalah 100%.

b. **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

Sertifikat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Secara hukum, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus selalu dalam kondisi kokoh dan laik fungsi. Sebagai bukti legalnya, pemerintah daerah dapat menerbitkan SLF bangunan gedung.

Begitu pentingnya SLF sehingga pengembang yang tidak memiliki sertifikat ini tidak dapat menerbitkan Akta Jual Beli (AJB), tidak dapat membuka cabang bank di gedung tersebut, dan tidak dapat memungut biaya layanan dari penghuni. Dengan kepemilikan SLF, pengembang bisa melakukan proses penyerahan hak milik kepada pembeli, memulihkan masing-masing unit dan membuat akta akuisisi. Selama ini, banyak orang yang beranggapan bahwa dalam proses mendirikan sebuah bangunan gedung (selain rumah tinggal) hingga difungsikan/digunakan cukup dengan mengantongi IMB. Padahal, terdapat dokumen penting lainnya yang perlu diurus kelengkapannya, yaitu SLF (Sertifikat Laik Fungsi).

Secara umum, adapun manfaat penilaian kelaikan bangunan gedung secara umum dan manfaat memiliki SLF bagi pemerintah maupun pengguna/pemilik bangunan gedung adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis sehingga dapat menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kemudahan bagi penggunaanya;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dan operasionalisasi bangunan gedung;
3. Meningkatkan nilai bangunan gedung;
4. Mendorong investasi di daerah, karena persyaratan penerbitan SLF dapat digunakan sebagai:
5. Syarat agar perumahan (formal dan swadaya) dapat dihuni;
6. Syarat pembuatan akta pemisahan (rumah susun dan bangunan gedung dengan konsep strata title/hak milik atas satuan ruman susun);
7. Syarat WTO (*World Trade Organization*) dan ILO (*International Labour Organization*) untuk bangunan industri;
8. Mendorong perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Tabel 2. 44 Jumlah Permohonan Perijinan Sertifikat Laik Fungsi Tahun 2020-2024

N O	URAIAN (SLF)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Verifikasi	-	-	-	-	6	0,06	1	0,005	7	0,021
2	Jenis Permohonan Status Verifikasi Perbaikan Ulang	-	-	-	-	56	0,60	108	0,577	188	0,571
3	Jenis Permohonan Status Verifikasi Ulang	-	-	-	-	5	0,05	12	0,064	32	0,097
4	Jenis Permohonan Status Selesai Verifikasi	-	-	-	-	27	0,29	66	0,353	102	0,310

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

8) Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Ruang menunjang keberhasilan salah satu program unggulan pada RPJMD 2025-2029 yang harus diimplementasikan yaitu: Penataan Kota Slawi. Penataan Kota Slawi harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah sediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan fokus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang publik. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi. Penjelasan indikator dari rasio bangunan dan lingkungan yang tertata pada RPJMD 2025-2029 adalah panjang koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2) dengan Capaian di Tahun 2024 sebesar 91,50%.

Tabel 2. 45 Pentaaan Koridor Jalan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang Tertata				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koridor jalan yang ditata dibagi dengan panjang koridor di wilayah perkotaan Slawi (Koridor 1 dan 2)	N/A	0,00%	91,11%	91,50%	91,50%

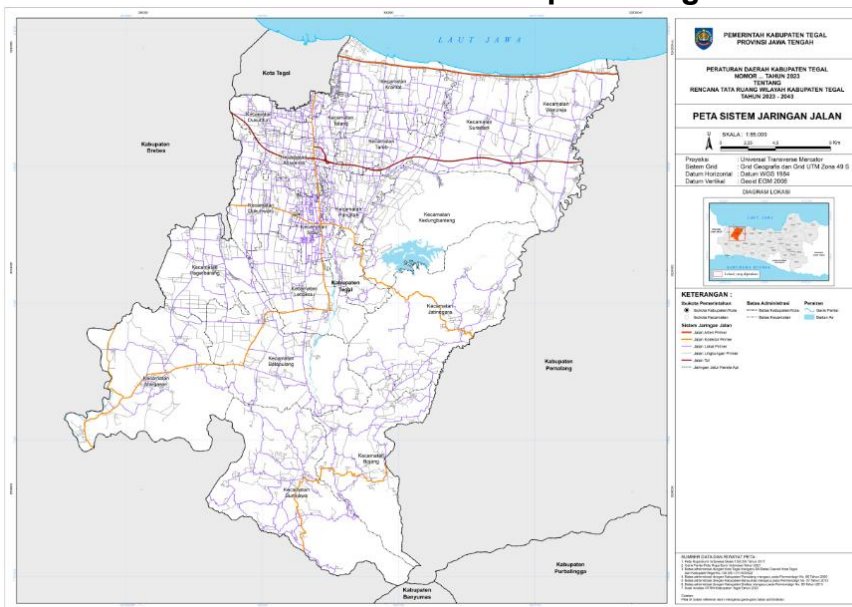
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

9) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlntasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlntasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes). Berikut ini peta jalan Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 41 Peta Jalan Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai DAK, BANPROV dan APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 88,30 Km atau sekitar 10,33%. per bulan Oktober 2024 kondisi Jalan Mantap di

Kabupaten Tegal mencapai 557,86 Km atau 65,3%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang. Berikut ini data kondisi jalan Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan Per Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	528,9	62,42	606,04	71,53	622,23	73,44	524,41	61,89	408,44	47,80
2.	Sedang	118,7	14	97,59	11,52	94,27	11,13	128,89	15,21	149,42	17,49
3.	Rusak Ringan	82,98	9,79	63,12	7,45	54,42	6,42	105,24	12,42	208,38	24,39
4.	Rusak Berat	116,8	13,78	80,52	9,5	76,36	9,01	88,73	10,47	88,30	10,33
	Total	847,3	100	847,27	100	847,27	100	847,27	100,00	854,54	100,00
Mantap										557,86	65,52
Tidak Mantap										296,68	34,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik dan sedang, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Tabel 2. 47 Kondisi dan Ruas Jalan Kabupaten Tegal Tahun 2024

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH RUAS	PANJANG RUAS (Km)	B	S	RR	RB
	UPTD PU WILAYAH I						
1	WARUREJA	14	44,00	33,09	5,24	0,00	5,68
2	SURADADI	15	54,66	46,80	1,63	0,41	5,82
3	KRAMAT	23	55,18	41,00	6,02	0,06	8,10
	UPTD WILAYAH II						
1	ADIWERNA	28	43,40	34,50	4,37	4,03	0,50
2	DUKUHTURI	29	39,57	30,45	6,31	1,15	1,66
3	TALANG	20	39,93	30,74	4,46	1,63	3,11
4	TARUB	20	42,56	31,07	5,47	2,49	3,53
	UPTD WILAYAH III						
1	JATINEGARA	13	51,47	36,02	5,75	1,79	7,91
2	PANGKAH	22	52,76	44,15	5,37	0,76	2,48
3	KEDUNGBANTENG	7	16,73	15,54	0,63	0,56	0,00
	UPTD WILAYAH IV						
1	SLAWI	145	73,01	60,62	5,03	6,11	1,25
2	DUKUHWARU	22	47,21	42,33	2,50	2,38	0,00
3	LEBAKSU	13	29,16	24,06	1,59	1,24	2,27
	UPTD WILAYAH V						
1	MARGASARI	12	36,92	30,13	6,09	0,70	0,00
2	BALAPULANG	20	56,20	40,40	2,40	6,21	7,19

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH RUAS	PANJANG RUAS (Km)	B	S	RR	RB
3	PAGERBARANG	18	48,24	36,97	10,14	1,13	0,00
	UPTD WILAYAH VI						
1	BOJONG	13	45,88	31,85	5,759	4,67	3,605
2	BUMIJAWA	19	70,39	45,23	7,78	7,63	9,75
JUMLAH		453	847,27	654,94	86,53	42,95	62,85
PROSENTASE %				77,30	10,21	5,07	7,42

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

10) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 berjumlah 444 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2024 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terakhir terdapat pembangunan jembatan baru dan pembaruan data jembatan.

Tabel 2. 48 Kondisi dan Jumlah Jembatan Kabupaten Tegal Tahun 2024

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	B	S	RR	RB
	UPTD PU WILAYAH I						
1	WARUREJA	20	196,10	8	4	0	8
2	SURADADI	15	423,42	14	1	0	2
3	KRAMAT	30	382,55	33	1	0	0
	UPTD WILAYAH II						
4	ADIWERNA	28	262,40	28	0	0	0
5	DUKUHTURI	31	190,5	13	3	13	2
6	TALANG	26	342,5	24	0	2	0
7	TARUB	14	74,75	8	5	1	0
	UPTD WILAYAH III						
8	JATINEGARA	29	246,2	17	7	5	0
9	PANGKAH	29	496,2	23	7	1	0
10	KEDUNGBANTENG	13	227,2	12	1	0	0
	UPTD WILAYAH IV						
11	SLAWI	38	296,6	30	4	4	0
12	DUKUHWARU	12	117,2	9	7	0	0
13	LEBAKSU	19	120,4	9	11	0	0
	UPTD WILAYAH V						
14	MARGASARI	22	511,2	17	2	1	2
15	BALAPULANG	50	524,70	45	4	1	0
16	PAGERBARANG	31	586,05	21	6	2	4
	UPTD WILAYAH VI						
17	BOJONG	34	361,2	19	14	0	1

NO.	UPTD/KECAMATAN	JUMLAH JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	B	S	RR	RB
18	BUMIJAWA	19	305,00	17	0	2	0
JUMLAH		460	5624,87	347	77	32	19
PROSENTASE %				75,43	16,74	6,96	4,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Tegal, 2024

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 460 unit (74,78%), sedangkan yang masih dalam kondisi rusak berat sebanyak 20 unit (4,35%) dan sedang adalah 77 unit (16,744%).

Tabel 2. 49 Pencapaian Kinerja Pembangunan Jembatan Kabupaten Tegal

Kondisi Jembatan	Lebar Jembatan (Unit)					Jumlah (Unit)
	1 - 2 m	3 - 5 m	6 - 8 m	9 - 11 m	12 m keatas	
Baik	4	206	113	11	8	342
Sedang	0	45	19	1	1	66
Rusak ringan	1	23	6	0	1	31
Rusak berat	1	20	0	0	0	21
Jumlah	6	294	138	12	10	460

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2024

Sebagaimana infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemantapan jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 telah mencapai 92,17% (75,43% baik ditambah 16,74% sedang).

11) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1999, menyatakan bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi yang terus bertambah, dimana hal ini nampak pada data di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan data base pada Asosiasi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah mencapai lebih dari 200.000 perusahaan dengan serapan tenaga kerja mencapai 8.769.798 tenaga kerja pada tahun 2023. (ris/infoBPIW_Kementrian PUPR).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi harus mempunyai Kinerja yang baik. Perusahaan perlu menilai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja, dan suatu badan usaha dikatakan mempunyai Kinerja yang baik apabila unggul pada indikator profitabilitas, pertumbuhan, berkelanjutan dan daya saing, serta mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Owner dengan pemenuhan pelaporan yang memadai.

Pada sektor pengadaan barang/jasa Pemerintah diketahui jumlah pekerjaan konstruksi lebih dari 1.200 paket pekerjaan rata-rata setiap tahun di Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP-

LKPP), maka tantangan terbesar bagi para penyedia jasa konstruksi adalah kemampuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten pada bidangnya agar kuantitas khususnya kualitas hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, selain permodalan tentunya.

Sampai dengan tahun 2024 tercatat ada 29 asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal dengan lebih dari 350 perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi. Nilai pagu anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal lebih dari satu triliun rupiah, sehingga perlu ada upaya yang konkrit guna mengawal capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi, dimana produk yang dihasilkan pada sector infrastruktur menjadi urat nadi pembangunan daerah.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja para pelaku jasa konstruksi diperlukan sebuah data dan informasi yang valid dan up to date atas kinerja dan kondisi riil para pelaku jasa konstruksi baik dari segi usaha/permodalan, tenaga kerja, maupun administrasinya. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah berupaya menyediakan informasi, dan data yang diperlukan, pengawasan atas usaha yang dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi, serta dengan memberikan pelatihan, guna peningkatan kapasitas para tenaga kerja serta kemampuan perusahaan.

Tabel 2. 50
Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Prosentase Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Tenaga Konstruksi yang Terlatih	N/A	91,25%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2024

12) Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Dokumen tata ruang di Kabupaten Tegal telah disusun dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Fungsi disusunnya dokumen RTRW diantaranya sebagai:

- 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.

- 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
- 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- 7) Acuan dalam administrasi pertanahan, serta
- 8) Sebagai dasar dalam memberikan layanan ITR kepada masyarakat luas.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 51 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2020-2024

No	Dokumen RTR	Target sesuai UU 26/2017	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Sampai 2024
1	RTR Wilayah (RTRW)	1		1	1	1		
2	RTR Kawasan Strategis Kab (KSK)	0	0	0	0			
	KSK Ekonomi	9	0	0	0			
	KSK Sosial Budaya	4	0	0	0			
3	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)							
	Dok RDTR	18	0	0	4		0	
	Perda RDTR	18	0	0	0		0	
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	10	0	0	0		0	

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2023

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang dilegalikan.

b. Pemanfaatan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa nilai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

Tabel 2. 52 Jumlah Pemohon Layanan Informasi Tata Ruang Tahun 2020-2024

N O	URAIAN (ITR)	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%	Pemohon	%
1	Jenis Permohonan Status Belum Sesuai	-	-	-	-	5	0,00	14	1,1	289	0,165
2	Jenis Permohonan Status Sesuai	-	-	-	-	796	67,0	834	65,2	1313	0,750
3	Jenis Permohonan Status Tidak Sesuai	-	-	-	-	384	32,0	432	33,8	148	0,085
JUMLAH						1185	100	1280	100	1750	100

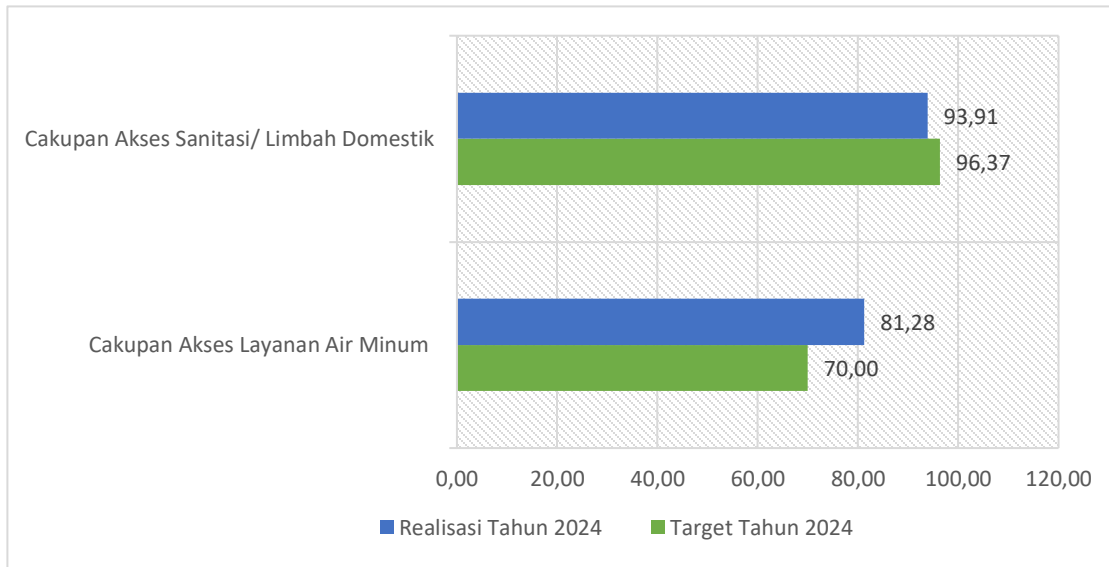
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 87,19% tingkat kesesuaian permohonan status, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan informasi tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 8,46%.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum dan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Target dan realisasi capaian SPM Pekerjaan Umum sampai dengan akhir 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 42 Target dan Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang, 2024

D. Perumahan Rakyat dan Permukiman

1) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana, maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 53 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	11	N/A	117	16	28
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	11	N/A	117	16	28
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100%	N/A	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa dalam penyediaan rumah bagi korban bencana yang merupakan Standar Pelayanan Minimal harusnya mencapai 100%, sehingga pemberian bantuan penyediaan rumah bagi korban bencana berdasarkan pada permintaan atau usulan bantuan dari desa. Sedangkan untuk anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54 Sumber Dana Bantuan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Rumah Yang Tertangani	Lokasi	Sumber Dana
1	2022	13	Padasari	APBD KAB
2	2022	80	Dermasuci	APBD PROV (BTT)
3	2022	21	Dermasuci	CSR (Basnaz, PMI Prov dan Kabupaten, BKK TGR dan masyarakat)
4	2022	3	Kajen	APBD PROV
5	2023	16	Padasari	APBD KAB
6	2024	16	Padasari	APBD KAB
7	2024	12	Dermasuci	APBD PROV
Jumlah		161		

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2020-2024 berdasarkan data pada tabel diatas menjelaskan bahwa penanganan masih banyak bersumber dari luar APBD Kabupaten Tegal, sehingga guna memenuhi penanganan rumah korban bencana perlu peran banyak pihak.

1) Perumahan

Penyediaan perumahan baru untuk masyarakat sangatlah penting, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena dapat mengurangi *backlog* di Kabupaten Tegal. Melalui pembangunan maupun pengembangan perumahan juga dapat meningkatkan lingkungan yang tertata. Data pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Tahun 2020-2024

Uraian	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Setiap Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	62	N/A	17	4	12
Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin pada Tahun n	62	N/A	17	4	15
Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100%	N/A	100%	100%	125 %

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Setelah dilakukan sosialisasi kepada Pengembang, jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang berijin pada tahun 2024 meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan capaian pembangunan dan pengembangan perumahan yang berijin melampaui jumlah target pada tahun 2024. Selanjutnya akan terus dilakukan sosialisasi kepada Pengembang untuk lebih meningkatkan

Pembangunan perumahan di Kabupaten Tegal dan diikuti juga dengan sosialisasi ke Masyarakat agar jumlah.

2) Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sesuai Keputusan Bupati Tegal yang telah dilakukan pembaharuan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/1332 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Pemukiman Kumuh Di Kabupaten Tegal, luas permukiman kumuh di Kabupaten Tegal seluas 314,02 Ha. Luas permukiman kumuh dari tahun ke tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 56 Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tegal sampai 2024

N o	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/201 6	Luas sesuai SK 294/201 9	Luas sesuai SK 1332/202 1	BA Penguranga n Kumuh 2022	BA Penguranga n Kumuh 2023	BA Penguranga n Kumuh 2024
1	Adiwerna	166,5	68,76	45,215	35,345	35.35	28.925
2	Dukuhturi	53,2	51,88	38,759	21,953	21.95	18.74
3	Jatinegara	18,4	18,39	18,167	18,167	18.17	12.59
4	Kedungbanteng	30,4	30,42	58,300	58,3	58.30	48.59
5	Kramat	18,5	11,78	11,905	11,905	2.73	2.36
6	Lebaskiu	68,9	68,90	47,578	34,321	26.41	19,44
7	Slawi	28,5	24,30	12,478	1,425	0.00	0.00
8	Suradadi	48,6	48,60	52,777	38,295	36.95	28.65
9	Talang	32,5	30,30	8,712	0	-	-
10	Tarub	9,88	9,88	9,039	7,11	7.11	5.73
11	Warureja	12,4	12,40	11,089	11,089	11.09	10.06
	Total	487,78	375,61	314,019	237,91	218.05	175.09

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Dari luasan kawasan kumuh 487,78 Ha telah dilakukan penanganan kawasan kumuh dan dilakukan perubahan SK penanganan kumuh di tahun 2021. Penanganan kumuh dilakukan dengan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 175,09 Ha..

3) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebanyak 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT).

Tabel 2. 57 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020-2024

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675
Kumulatif Realisasi RTLH	5.575	6.299	8.424	9.315	10.594

Uraian	Jumlah RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	14,76	19,74	22,31	24,82

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

Hingga saat ini telah dilakukan upaya dalam penanganan RTLH melalui berbagai sumber anggaran bantuan dari pusat (BSPS,DAK), provinsi, kabupaten dan desa sehingga jumlah RTLH yang telah tertangani adalah 10.594 unit. Sedangkan penanganan RTLH dari tahun 2018 sampai dengan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 58 Penanganan RTLH Tahun 2020-2024

Lampiran 2.6.1 Penganggaran APBD Tahun 2020-2024			
NO	TAHUN	JENIS BANTUAN	ALOKASI
1	2020	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	292
2		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	510
1	2021	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	329
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	100
3		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN)	85
1	2022	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	337
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	178
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	1399
4		Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan (APBN= 20jt, APBD=15jt)	75
5		Baznas Provinsi Jawa Tengah	31
1	2023	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	277
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	591
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	15
4		Dana Desa	206
5		Baznas Provinsi Jawa Tengah	8
1	2024	Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Provinsi Jawa Tengah	450
2		Bankeupemdes Rehab RTLH Dana APBD Kab. Tegal	564
3		Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (APBN)	35
4		Dana Desa	14
5		Baznas Kabupaten Tegal	10
TOTAL			8606

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2025

4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, serta akses terhadap jaringan air

minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 413.598 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 59 Capaian Akses PSU Tahun 2020 – 2024

Uraian	Capaian Akses PSU					
	2020		2021	2022	2023	2024
		%		%		%
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	387.253	-	388.479	406316	406316	413.598
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	534.004	-	532687	552111	552111	562.482
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	213.228	55,06	276.198	172839	250947	31.0722
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	379.818	84	363.927	374274	375251	412.136
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	367.421	94,87	437475	437475	437475	437.475
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	77,97	N/A	83,31	87,26	93,52

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga di seluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan, sesuai SPM keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja sama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022 yang semula hanya sebesar 67 % menjadi sebesar 79%, serta peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 88,40 %.

Tabel 2. 60 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	730	730	864	864	968
3.	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	67	67	79	79	88,40

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	82%	82%	83,81 %	84%	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2020 sampai tahun 2021 masih belum mengalami peningkatan, akan tetapi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

2) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2020-2024 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	129	529	525	525	302
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	107	485	450	450	282
	c. Penyelesaian Penegakan Perda (%)	83	91,68	85,72	85,72	93,38
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	1669	1667	1662	1662	353
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	1604	1608	1600	1600	343
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	96	96,46	96,27	96,27	97,16
3	SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali. Dalam penyelesaian Penegakan Perda perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2024 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik, Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043, Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penegakan peraturan perundang-undangan dan patroli dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dari tabel di atas dapat didiskripsikan bahwa antara jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan jumlah warga negara yang akan terlayani dan mendapatkan pelayanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada adalah sama yaitu 100 % (seratus persen).

3) **Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran**

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2022 rasio linmas menurun dibandingkan tahun 2021 yang semula mencapai 1 : 1,06 menjadi 1 : 0,99 di tahun 2022. Rasio ini lebih kecil bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebanyak 702 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 6.818 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 1:10. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada anggaran linmas disebabkan adanya recofusing akibat Covid-19, sehingga tidak ada penambahan jumlah linmas terlatih di tahun 2021. Sedangkan jumlah anggota linmas yang mengalami penurunan diakibatkan adanya yang meninggal dan keluar serta belum ada rekrutmen anggota linmas yang baru. Hingga tahun 2024 jumlah anggota linmas mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi sebanyak 7122 orang. Berikut disajikan data linmas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 2. 62 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	7.295	7.295	6.818	9.368	7122
2.	Jumlah RT	6.889	6.889	6.889	7.453	7453
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,06	1:1,06	1:0,99	1:2,5	1:0,95

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun 2020 ke tahun 2021 cenderung tidak mengalami kenaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dan tahun 2023 mengalami kenaikan, akan tetapi tahun 2024 mengalami penurunan kembali sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 63 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Linmas	7.295	7.295	6.818	9.368	7.122
2.	Jumlah Terlatih	576	576	702	1.100	4.758
3.	Rasio jumlah Linmas Terlatih	1:12	1:12	1:10	1:7	1:2,5

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2024

Rasio jumlah Linmas terlatih mengalami peningkatan pada tahun 2022 akan tetapi pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan kembali, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan, hal ini berkaitan erat dengan jumlah anggaran yang digunakan untuk meningkatkan jumlah linmas terlatih.

Jumlah penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal selalu tertangani sebanyak 100%, akan tetapi terkadang tidak memenuhi waktu respon time. Untuk tahun 2022 terjadi penurunan kejadian kebakaran yang pada tahun 2021 sebanyak 89 kejadian kebakaran dan tahun 2022 sebanyak 81 kejadian kebakaran. Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate 15 Menit*) pun mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 67 kasus kebakaran. Pada tahun 2023 kejadian kebakaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan kemarau yang panjang, jumlah kasus kebakaran menjadi 334 kasus dan yang tertangani sesuai respon time sebanyak 213 kasus. Pada tahun 2024 kejadian kebakaran mengalami penurunan menjadi sebanyak 163 kasus dan yang tertangani sesuai respon time sebanyak 103 kasus kejadian kebakaran. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu di setiap kecamatan terdapat pos pemadam kebakaran yaitu sebanyak 18 pos kebakaran, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang hanya berjumlah 5 unit mobil Damkar. Serta diperlukan juga penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos membutuhkan 18 orang pemadam kebakaran). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. 64 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kebakaran	56	89	81	334	163
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	44	73	67	213	103
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate 15 Menit</i>)	79%	82%	82,71 %	63,7 %	63,6 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2023

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah sarana dan prasarana serta jumlah SDM pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal.

4) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kenaikan sejalan dengan upaya-upaya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah rawan bencana. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi bencana dan upaya-upaya pengurangan risiko bencana secara berkesinambungan.

Tabel 2. 65 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk dikawasan rawan	379.828	399.828	427.628	454.028	478.628

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana					
Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65,00%	68,42%	73,18%	77,70%	81,91%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2023

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana terhadap seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana. Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana sebanyak 478.628 jiwa atau 81,9 persen dari jumlah seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana sebanyak 584.336 jiwa. Informasi diberikan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Sosialisasi, Jambore, Gladi/Apel Kesiapsiagaan, maupun informasi melalui media sosial, spanduk, dan website (internet) dengan harapan mereka yang sudah menerima informasi dapat menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya.

5) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam bentuk pembinaan, pelatihan, simulasi, apel/gladi kesiapsiagaan dan sosialisasi. Kedepan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan khususnya bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Tabel 2. 66 Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7.666	8.470	9.460	10.080	10.960
Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana	584.336	584.336	584.336	584.336	584.336
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,31%	1,45%	1,62%	1,73%	1,88%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang ikut pembinaan terhadap jumlah warga negara di kawasan rawan bencana. Sampai dengan tahun 2024, jumlah warga negara yang sudah pernah ikut pembinaan sebanyak 10.960 jiwa atau 1,88 persen dari jumlah warga negara di kawasan rawan bencana sebanyak 584.336 jiwa. Pembinaan yang dilakukan berupa Pelatihan, Sosialisasi dan Jambore

6) **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pelayanan ini lebih diprioritaskan pada upaya penyelamatan dan pemberian bantuan peralatan dan logistik. Ke depan masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas personil, bantuan material, peralatan dan logistik bagi korban bencana.

Tabel 2. 67 Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Akibat Bencana

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	49.402	66.166	14.101	20.416	20.679
Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	233.597	314.233	57.461	79.224	76.419
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21,15%	21,06%	24,54%	25,77%	27,06%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diperoleh dengan menghitung jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana. Pada tahun 2024, jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi sebanyak 20.679 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas :

- Korban bencana tanah longsor sebanyak 103 jiwa;
- Korban bencana angin kencang/angin puting beliung sebanyak 423 jiwa;
- Korban bencana banjir sebanyak 19.875 jiwa;
- Korban bencana tanah bergerak 15 jiwa.

Target persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2024 adalah sebesar 27,06 persen dikarenakan adanya perbedaan persepsi bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah perkiraan awal semua penduduk yang tinggal di daerah kawasan baik yang menjadi korban bencana secara langsung maupun tidak langsung (terdampak). Namun sesuai anjuran dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana adalah jumlah penduduk yang secara langsung menjadi korban bencana dan perlu mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi yaitu sebesar 100 persen, sehingga pada Laporan ini kami cantumkan baik target maupun realisasi adalah sebesar 100 persen.

7) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diprioritaskan kepada penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti regulasi, perjanjian kerjasama, sistem informasi, SOP, kajian dan sebagainya.

Tabel 2. 68 Persentase Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana yang Tersusun

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun	16	39	42	45	47
Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun	41	47	48	49	49
Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	39,44%	83%	87%	92,44%	97,11%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Kegiatan ini lebih diperoleh dengan menghitung jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2024, jumlah dokumen penanggulangan bencana yang telah disusun sebanyak 47 dokumen atau 97,11 persen dari jumlah dokumen penanggulangan bencana yang seharusnya telah disusun sebanyak 49 dokumen.

Salah satu pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menunjang misi pemerintahan yang salah satunya tertuang dalam tujuan menurunnya risiko bencana, yang didukung oleh 1 (satu) indikator utama. Adapun realisasi capaian tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 69 Capaian Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024

N o.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Level	Ket.	Target 2024	Realisasi 2024	Level	Ket.
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	174,62	126,26	Sedang	Resiko bencana sedang	172,12	113,79	Sedang	Resiko bencana sedang
2.	Indeks Kapasitas Daerah	Angka	0,80	0,75	Sedang	Kapasitas penanggulangan bencana sedang	0,89	0,81	Tinggi	Kapasitas penanggulangan bencana sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2024

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal dengan kondisi topografi yang ada merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana yang lengkap. Hampir semua ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gempa bumi, letusan gunung berapi, kekeringan maupun kebakaran hutan bahkan tsunami bisa terjadi di wilayah Kabupaten Tegal. Namun demikian kapasitas masyarakat maupun kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tegal tergolong masih rendah, yang ditandai dengan angka Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana pada tahun 2023 sebesar 0,75 yang hanya masuk katagori sedang. Hal inilah yang menyebabkan **risiko bencana** di wilayah Kabupaten Tegal tergolong **sedang**.

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 70 Kondisi Kebencanaan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Tangguh Bencana	6	8	10	16	23
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	6,8	6,8	6,2	15,4	17
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	0	2	4	3	1
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	3.202	3.975	830	1.234	1.197

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2023

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Sebagian desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk tahun yang akan datang diharapkan jumlah desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Terkait dengan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum aspek kebencanaan memiliki (3) tiga indikator yaitu pelayanan informasi rawan bencana yang capainya pada tahun 2024 sebesar 81,91% atau sebanyak 478.628 jumlah penduduk telah memperoleh informasi rawan bencana dari 584.336 penduduk yang ada di wilayah rawan bencana. Indikator kedua, yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana capainya 1,88% pada tahun 2024 yaitu baru 10.960 penduduk dari 584.336 penduduk yang berhak mendapat layanan. Indikator ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 27,06% dari 20.679 penduduk yang telah

mendapat atau ditolong dan dievakuasi dari perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 76.419 jiwa.

F. Sosial

1) Pemberdayaan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas).

Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial (emPOWERment) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (power) individu, lembaga dan komunitas.

Pemberdayaan pilar-pilar sosial menyangkut Puskesmas-SLRT, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dapat dilakukan dengan mengadakan bimtek. Setelah itu, mereka harus dapat memberdayakan masyarakat sekitarnya, dengan bekal ilmu yang sudah pilar-pilar dapatkan. Pilar-pilar sosial ini adalah sebagai instrument of change. Dalam program Restorasi Sosial, merujuk pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan kepahlawanan.

Puskesmas-SLRT dan Kewirausahaan Sosial merupakan sebagian contoh konkrit dari pengembangan kebijakan tersebut. Puskesmas-SLRT dalam memberikan layanan kepada masyarakat sangat simpel. Jelas alurnya dan tidak ribet, serta memberikan solusi dari keluhan masyarakat.

Tabel 2. 71 Data PSKS Kabupaten Tegal

NO.	URAIAN	TERDAFTAR	AKTIF
1.	Karang Taruna	175	175
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	25	25
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	41	41
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	18	18
5.	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	30	30
6.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	24	24
7.	Pendamping Sosial (PKH + Sakti Peksos)	215	215
8.	Pekerja Sosial Profesional	3	3
9.	Penyuluh Sosial	6	6
	JUMLAH	537	537

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tegal, 2024

2) **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Kegiatan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, terdiri atas layanan data/pendataan, Penyediaan permakanaan, Penyediaan sandang, Penyediaan alat bantu, Penyediaan perbekalan Kesehatan, Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS, Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan Pendidikan, reunifikasi Keluarga, dan layanan rujukan.

Tabel 2. 72 Data Layanan Anak, Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial

No	Uraian	2024
	Layanan Anak :	
1.	Program Keluarga Harapan (PKH)	72.657
2.	Yatim Piatu	1.986
	Jumlah	74.643
	Layanan Penyandang Disabilitas	
1.	Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	46
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	794
3.	Permakanaan	245
4.	Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS)	94
5.	Cerebral Palsy (CP)	129
6.	Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gergatin)	110
7.	Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI)	37
8.	Mari Belajar (Autis)	43

No	Uraian	2024
9.	Pelatihan DTLS dan Gergatin	26
10.	Pelatihan Wirausaha	44
	Jumlah	1.568

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2. 73 Data Layanan Anak, Disabilitas, Lansia dan Tuna Sosial

No	Uraian	2024
	Lanjut Usia	
1.	Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	90
2.	Program Keluarga Harapan (PKH)	25.851
3.	Permakanan	832
	Jumlah	26.773
	Tuna Sosial (Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar/PGOT)	77
	Jumlah Total	103.061

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Anggaran pelayanan rehabilitasi sosial kepada PPKS bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang sah. Untuk meningkatkan layanan rehabilitasi sosial kepada PPKS, kedepannya Dinas Sosial Kabupaten Tegal berupaya untuk melakukan penjangkauan dan sosialisasi kepada PPKS, juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI.

3) **Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 497.315 per kapita per bulan, angka ini naik 5,65 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan tahun 2023 yang mencapai Rp 470.728 per kapita per bulan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 74 Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal

Tahun	Angka Kemiskinan	Naik/ Turun
2019	7,64	-0,3 %
2020	8,14	+0,50 %
2021	8,60	+ 0,46 %
2022	7,90	- 0,70 %
2023	7,30	- 0,60 %
2024	6,81	- 0,49 %

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran dari berbagai macam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , dengan melalui Program dan Kegiatan di Bidang Ekonomi, social, dan Pembangunan serta adanya peran serta dari Masyarakat .

Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang melaksanakan visi dan misi Bupati Tegal

dengan Tujuan Menekan Laju kemiskinan serta sarasan dengan menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan , dengan melalui Pembangunan di Bidang social dengan melaksanakan Program dan perlindungan dan Jaminan sosial serta peningkatan penanganan Fakir Miskin. Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar, adapun upaya yang akan dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.75 Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	URAIAN	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk)	669.920	677.696	685.237
3.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (KK)	217.506	220.031	222.479
4.	Rencana Penanganan Perlindungan dan jaminan Sosial	217.506	220.031	222.479

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2. 76 Layanan Penanganan Fakir Miskin

NO.	URAIAN	2024	2025	2026
1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa)	1.674.800	1.694.240	1.713.090
2.	Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk) KK	669.920	677.696	685.237
3.	Rencana Pendataan Fakir Miskin Tiap Tahun	669.920	677.696	685.237

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana program perlindungan dan Jaminan Sosial dari Tahun ke Tahun meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, sehingga akses Cakupan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial harus semakin ditingkatkan mengingat masih banyaknya Masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, adapaun Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan sasaran perlindungan dan Jaminan Sosial adalah :

1. Meningkatkan Layanan data mengingat Masih kurangnya SDM IT Operator Data di Tingkat Desa.Kelurahan sehingga proses ekspor Data hasil Verifikasi dan Validasi DTKS ke aplikasi SIKS-NG menjadi terhambat.
2. Meningkatkan sarana/ Prasarana Pengolahan Data sehingga proses pemilahan dan pepadanan Data membutuhkan waktu lama karena Sarana Pengolah Data (Spesifikasi Perangkat *Hardware*) kurang mendukung.
3. Mengurangi terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error* dimana masyarakat yang sudah tidak layak /mampu masih masuk di DTKS sebagai penerima Bansos

sementara masyarakat yang layak mendapatkan Program penanganan Fakir Miskin namun belum Masuk DTKS.

4) **Penanganan Bencana**

Mengutip dari bpbd.bogorkab.go.id, Indonesia adalah negara yang rentan dengan bencana alam, Khususnya di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 terjadi di beberapa tempat seperti Banjir, Longsor, puting beliung, kebakaran, tanah bergerak dan lain-lain dengan jumlah korban bencana kurang lebih sebanyak 1.327 jiwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial, dan pada tahun 2024 per 31 Desember 2024.

Dalam rangka penanganan korban bencana pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan intervensi bagi korban bencana secara multipihak, lintas instansi, Organisasi sosial, PMI, Baznas dan dunia usaha yang dihimpun Forum CSR serta masyarakat, khususnya Dinas sosial dengan melakukan pengerahan Tagana, pendirian Dapur umum lapangan, pemberian bantuan kebutuhan dasar logistik bencana, pendampingan sosial meskipun masih belum optimal dalam menjangkau dan masih tercapai sesuai SPM yang ditetapkan, hal ini dikarenakan masih terkendala baik koordinasi, kondisi lapangan dan anggaran yang belum proporsional dengan prioritas kebutuhan yang perlu disediakan.

Amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa urusan pemerintahan bidang sosial merupakan salah satu urusan yang dibagi kewenangannya dengan pemerintahan daerah. Urusan sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan sosial dasar. Pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut bidang sosial pada sub penanganan bencana kewenangan Kabupaten/kota adalah menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana

5) **Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Taman Makam pahlawan PURA KUSUMA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA juga dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Tabel 2. 77 Persentase Pengelola Taman Makam Pahlawan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	99,1	99,2	99,3	99,9	99,9

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2024

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan

2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Warakawuri dan Veteran Pejuang.

2.1.3.2 Fokus Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1) Perencanaan Tenaga Kerja

Peranan sumber daya manusia dalam pembangunan di berbagai bidang pada suatu negara tidak terbantahkan. Sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan modal/kapital serta teknologi secara bersama-sama dan bersinergi berkontribusi terhadap terbentuknya Produk Domestik/Regional Bruto (PDB/PDRB). Besaran PDB/PDRB merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator makro ekonomi ini sekaligus dipandang sebagai tingkat kesejahteraan suatu wilayah/Negara. SDM secara makro merupakan penduduk suatu negara/wilayah yang sudah memasuki usia kerja, baik yang belum maupun yang sudah bekerja. Berdasarkan definisi menurut BPS, penduduk usia kerja yang siap memproduksi atau melakukan aktivitas ekonomi (*economically active population*) disebut angkatan kerja (labor force). Termasuk dalam penduduk golongan ini adalah mereka yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan pada Pasal 7, bahwa:

- 1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi Perencanaan Tenaga Kerja Makro, dan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.
- 3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja.

Pada prinsipnya pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini karena tenaga kerja selain penting peranannya dalam proses produksi juga merupakan subyek dari objek pembangunan suatu wilayah. Sebagai subyek pembangunan, tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai obyek pembangunan, tenaga kerja merupakan sasaran akhir bagi peningkatan kesejahteraan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan bidang ketenagakerjaan perlu dilakukan secara konsisten dan terarah yang dimaksudkan untuk menurunkan tingkat pengangguran. Salah satunya melalui penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD). RTKD merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi dari kecenderungan pertumbuhan selama periode 5 tahun dari penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesepakatan kerja sektoral, produktivitas tenaga kerja, pengangguran terbuka, pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel 2. 78 Kegiatan Yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90	95	95	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Penyusunan RTKD tentunya sangat penting sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro di Tahun 2024.

2) **Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 2. 79 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai PDRB Kabupaten (milyar rupiah)	24.502,62	25.402,91	26.707,37	28.023,03	29.444,33
2	Total Penduduk yang bekerja	644.978	644.978	644.978	777.759	868.114
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (ribu)	37,99	39,41	41,53	36,03	33,92

Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kondisi fluktuatif, adapun tingkat capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 dimana capaian nilai PDRB Kabupaten Tegal tinggi.

3) **Kompetensi Tenaga Kerja**

Mendasari data pencari kerja dan penempatan tenaga kerja pada tahun 2020-2024, diketahui bahwa pencari kerja di Kabupaten Tegal masih tinggi sedangkan angka penempatan tenaga kerja masih relatif rendah, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Tegal, keterbatasan dalam keahlian (low skilled) dari tingkat pendidikan dan /atau keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dan fasilitasi program pelatihan yang dilaksanakan untuk pencari kerja sangat minim untuk pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Permasalahan ini yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja. Berikut ini data jenis program pelatihan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 di Kabupaten Tegal sesuai kualifikasi KKNI.

Tabel 2. 80 Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Kualifikasi KKNi Kabupaten Tegal Tahun 2024

NO.	JENIS PROGRAM PBK	JUMLAH PESERTA	LOKASI
1	Pembuatan Roti dan Kue	16	UPTD BLK Kab. Tegal
2	Merias Wajah	16	UPTD BLK Kab. Tegal
3	Fillet Welder SMAW 2F PB	16	UPTD BLK Kab. Tegal
4	Desainer Grafis Muda	16	UPTD BLK Kab. Tegal
5	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	16	UPTD BLK Kab. Tegal
6	Mengerjakan Konstruksi (Machining)	16	UPTD BLK Kab. Tegal
7	Manicuris & Pedicuris	16	UPTD BLK Kab. Tegal
8	Teknisi Telepon Seluler Perangkat Lunak	16	UPTD BLK Kab. Tegal
9	Practical Office Advance	16	UPTD BLK Kab. Tegal
10	Service Sepeda Motor Injeksi	16	UPTD BLK Kab. Tegal
11	Plate Welder SMAW 1G/PA	16	UPTD BLK Kab. Tegal
12	Video Editor	16	UPTD BLK Kab. Tegal
13	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	16	UPTD BLK Kab. Tegal
JUMLAH PESERTA PELATIHAN		208	

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

4) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan hal ini karena terdukung adanya kebutuhan tenaga kerja. Persentase penempatan pencaker pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2. 81 Data Rekap Pencari Kerja dan Penempatan Pencari Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pencaker	Penempatan			Total Penempatan	Persentase Penempatan
		AKL	AKAD	AKAN		
2020	15.189	1.493	1.020	193	2.706	17,82 %
2021	20.000	10.192	2.857	172	13.221	66,10 %
2022	20.370	10.581	2.006	896	13.482	66,19%
2023	20.739	10.969	1.155	1.619	13.743	66,27 %
2024	18.558	15.927	833	987	17.747	95.62 %

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Penempatan tenaga kerja dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya melalui AKL, AKAD, AKAN, BKK. Persentase penempatan melalui mekanisme tersebut paling besar pada tahun 2024 yaitu mencapai 95,62% dengan total penempatan 17.747 orang.

5) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja, atau hubungan perburuhan, namun seiring berkembangnya waktu, hubungan industrial memiliki aspek yang sangat luas. Tidak terbatas hanya pada hubungan antara pekerja buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dan stakeholder lainnya.

Tabel 2. 82 Perangkat Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Mediator	3	3	3	3	3
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	181	190	199	200	209
Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	4	5	5	6	6
Jumlah SP/SB	16	18	23	24	29
Jumlah Lembaga Bipartit	25	26	27	28	30
Jumlah perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	58	60	67	68	68
Perusahaan peserta jamsostek aktif	2558	2923	3346	3446	3446
Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	11.306	49.981	53.700	54.700	54.700
Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	24	7	11	12	9
Jumlah kasus hubungan industrial	27	7	11	12	14

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Hubungan Industrial yang harmonis akan tercapai apabila semakin rendahnya kasus perselisihan antar pengusaha/ pemberi kerja dengan pekerja dalam setiap tahunnya, yang mana hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian suatu wilayah, tingkat kepatuhan perusahaan dalam memiliki peraturan perusahaan, pemenuhan hak dan kewajiban yang sesuai, tugas dan fungsi kedua belah pihak beserta peran pemerintah dalam melaksanakan wewenangannya dilaksanakan dengan baik.

Meningkatnya layanan Hubungan Industrial juga tidak lepas dari kesejahteraan sosial tenaga kerja di Kabupaten Tegal, perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 83 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Tahun	UMP	Rata-rata jam kerja pekerja
2020	1.896.000	40 Jam/ Minggu
2021	1.958.000	40 Jam/ Minggu
2022	1.968.446	40 Jam/ Minggu
2023	2.106.237	40 Jam/ Minggu
2024	2.191.161	40 Jam/ Minggu

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Hubungan Industrial yang harmonis akan tercipta apabila Perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak yang mana didalamnya memuat Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB), LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap banyaknya kasus perselisihan antar pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja. Adapun data indikator-indikator yang menjadi parameter ketercapaian presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan total perusahaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 84 Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perusahaan memiliki tata kelola kerja yang layak	181	190	127	63	217
2	Total Perusahaan	2558	2558	1680	801	2558
3	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	7,08	7,43	7,56	7,86	8,48

Sumber : Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

2. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2. 85 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Peraturan Perusahaan di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	186	190	214	208	217
2	Perusahaan Wajib lapor	474	474	474	474	474
3	Presentase Perusahaan yang memiliki PP	39,24	40,08	45,15	43,25	45,78

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Pada tabel diatas menunjukan bahwa meningkatnya pembinaan hubungan industrial terhadap perusahaan, dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam membuat peraturan perusahaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tata kerja karyawan dsb. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya hubungan kerja yang harmonis.

- a. **Tingkat Perjanjian Kerja Bersama**

Merupakan rasio antara Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun berjalan dengan total perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Tabel 2. 86 Perusahaan SP/SB memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	5	5	5	6	6
2	Perusahaan yang memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	16	16	16	20	20
3	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	31,25	31,25	31,25	30	30

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2024 pada total perusahaan yang telah memiliki serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebanyak 6 perusahaan, hal ini masih sangat rendah dari jumlah perusahaan yang ada. Diharapkan dari jumlah perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama dapat meredam tuntutan pekerja yang berlebihan, mendorong produktivitas kerja, mendorong peningkatan daya saing pekerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan pekerjanya.

3. **Tingkat Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur Skala Upah**

Merupakan rasio antara Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah dengan Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB).

Tabel 2. 87 Perusahaan yang Sudah Menyusun Struktur dan Skala Upah Terhadap Jumlah Perusahaan yang Telah Mengatur Syarat Kerja (Dalam PP Atau PKB) Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	29	38	45	54	63
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki peraturan perusahaan	186	190	214	208	217
3	Presentase Perusahaan yang memiliki Struktur skala Upah	15,59	20,00	21,03	25,96	29,03

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

4. **Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial**

Tingkat perselisihan hubungan indstutrial merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan wajib lapor.

Tabel 2. 88 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2020 -2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	27	7	17	15	14
2	Jumlah Perusahaan	2558	2558	801	2558	2558

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,05	0,27	2,12	0,59	0,55

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Tingkat perselisihan hubungan industrial merupakan gambaran kualitas hubungan industrial di suatu wilayah, pada tahun 2024 di Kabupaten Tegal jumlah perselisihan hubungan industrial sejumlah 14 kasus, dapat diselesaikan dengan anjuran sebanyak 5 kasus, dan 9 kasus lainnya diselesaikan dengan PKB (perjanjian kerja bersama).

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2020-2024. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020 -2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/PPE (Pengnugrahan Parahita Ekapraya)	940	960	960	739	925
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	4.859	4.247	4.608	4.365	6.196
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	12	12	12	12	13
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	24	24	24	24	26

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 90 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	28,83	36,49	2,92	3,80	2,76

Sumber: Kabupaten Tegal Dalam Angka,BPS Kab. Tegal 2025

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi, dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.91 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Persentase ARG				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD	491.396.436.000	106.332.316.500	420.441.175.328	170.203.760.394	1.507.231.417.700
2.	Belanja operasi APBD	1.830.927.981.000	2.961.886.307.000	2.919.093.286.800	3.029.811.293.000	2.615.606.638.900
3.	Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD	26,84	3,59	14,41	5,62	57,62

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

1) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran di dalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. 92 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kasus KDRT				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	40	54	73	63	22
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	774.913	816.986	824.163	843.211	622.334
3.	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	5,16	6,61	11,29	7,48	3,54

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

2) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan

menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan berisiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 93 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	203	331	510	183	472
2.	Jumlah keluarga	538.160	538.085	538.085	562.482	562.482
3.	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	0.0947	0,092	0.084

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

3) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 94 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah lembaga/instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/instansi	48	48	48	48	48
3.	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

4) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut:

Tabel 2. 95 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	570	610	686	700	700
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	20,64	22,65	23,34	23,34	23,34

No	Uraian	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	4,88	5,58	5.58	5,58	5,58
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	9	9	29	48	40
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	75	60	40	40	40
6	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	27,8	27,8	55.4	70,00	70,00

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

5) **Perlindungan Khusus Anak**

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 96 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anak yang mengalami kekerasan	36	44	58	48	40
Jumlah Anak seluruhnya	474.291	526.807	529.032	479.858	486.610
Persentase kekerasan terhadap anak	0,0076	0,0084	0.011	0,01	0,008

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2024

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penanganan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2022 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

C. **Pangan**

1) **Ketersediaan Pangan Utama**

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 97 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama(ton)	223.568	392.578	239.521	238.339	200.140
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.596.996	1.664.588	1.609.857	1.623.595	1.674.803
3.	Jumlah Konsumsi Pangan Utama(ton)	136.481	148.839	161.629	115.898	120.318
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton) terhadap Jumlah Komsumsi Pangan Utama	163,80	263,77	148,19	205,81	166,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, 2025

Ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal selalu berada di atas kebutuhan penduduk apabila dilihat data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, sesuai hasil perhitungan Kerangka Sampling Area (KSA) yang dilaksanakan oleh BPS, diperkirakan produksi padi sebesar 312.720 ton GKG atau setara dengan 200.140 ton beras. Apabila mengacu standar kebutuhan konsumsi pangan sebesar 81 kg/kapita (tahun 2022 digunakan standar provinsi sebesar 100.3 kg/kapita) dan jumlah penduduk 1.623.595 Jiwa, maka kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Tegal sebesar 120.318 ton, atau ketersediaan pangan utama mencapai 166,34 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (*demand*) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (*supply*) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

2) **Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal**

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut menjelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 98 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	105,23	69,49	100	100	100
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	93,52	68,01	62,03	60	92,65
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	80,4,	91,7	87,5	88,2	87,4
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	-	61,5	84,37	92,86
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	11	3	100	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Tegal, 2025

3) **Regulasi Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

D. **Pertanahan**

1) **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Aset Lahan Milik Pemerintah Daerah Yang Bersertifikat**

Urusan pertanahan berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta memfasilitasi kegiatan pemetaan dan identifikasi penggunaan bidang–bidang yang dimiliki oleh masyarakat, serta identifikasi/pemetaan bidang tanah milik pemerintah dan pengurusan sertifikasi tanah tersebut.

Tabel 2. 99 Sertifikat Tanah Pemerintah Darah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan bidang tanah (penggunaan lahannya)	0	0	0	-	-
2	Jumlah Bidang tanah masyarakat yang difasilitasi Pemerintah untuk sertifikat / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	28.000	28.000	31.000	43.000	-
3	Jumlah Kecamatan yang telah diidentifikasi dan dipetakan tanah asset milik pemerintah	3	3	3	-	-
4	Jumlah Bidang Tanah Milik Kabupaten	1.925	1.925	3.153	5.311	5.311
	a. Bersertifikat	1.077	1.077	3.151	3.354	4.946
	b. Belum Bersertifikat	848	848	2	1.957	365
	Persentase Tanah Milik Kabupaten yang bersertifikat	55,95	55,95	99,9	63,15	93,13
5	Persentase Penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%	-	-

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2024

Pemerintah Kabupaten Tegal bekerjasama dengan BPN/ATR Kabupaten Tegal untuk memetakan semua bidang tanah yang ada di Kabupaten Tegal hal ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan dan nilai zona masing – masing bidang tanah.

Selanjutnya bidang – bidang tanah tersebut difasilitasi oleh BPN/ATR untuk proses sertifikat kepemilikannya melalui program PTSL. Selain itu juga memetakan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. khusus untuk tanah milik pemerintah kabupaten akan dilakukan percepatan dalam pengurusan sertifikat kekanya. Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2023 mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tegal dengan jumlah 4.002 bidang atau sekitar 75,35 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Urusan penyelesaian ganti rugi / santunan tanah untuk pembangunan atau untuk kepentingan umum. Dari hasil identifikasi paling dibutuhkan tanah untuk pembangunan jalan baru, pasar, tempat pembuangan sampah, fasilitas kesehatan dan balai benih ikan dengan luasan sekitar 5,9 hektar. Belum optimalnya persertifikatan tanah milik kabupaten dikarenakan pada tahun 2024 baru mencapai 93,13% atau masih ada 365 bidang tanah yang belum bersertifikat yang perlu segera dilakukan sertifikasi.

2) **Redistribusi tanah**

Pelaksanaan pertanahan lainnya adalah program redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten tegal dan penataan tanah. Data untuk kedua hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 100 Persentase Redistribusi Tanah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi redistribusi tanah (jumlah tahapan implementasi redistribusi tanah dibanding jumlah tahapan)	0	99	29	29	50
2	Persentase Tanah yang tertata (Teridentifikasi kepemilikan, nilai, penggunaan)	16,67	29	32	32	32

Sumber : BPN dan Dinas Perkim Kab. Tegal, 2024

E. **Lingkungan Hidup**

1) **Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup**

Sampai dengan tahun 2024 dokumen pengendalian dan perencanaan lingkungan hidup sudah tersusun 20 dokumen diantaranya adalah Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kab.Tegal Tahun 2019-2024; Pengukuran IKLH tahun 2020, Dokumen Daya Dukung Daya tampung sektor Sumber Daya Air; Dokumen RPPLH; Dokumen Pengukuran IKLH tahun 2021; Dokumen IKPLHD tahun 2021; Dokumen Profil Keanekaragaman HAYATI Kab. Tegal; Naskah akademik/draf Raperda RPPLH; Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022; Dokumen IKPLHD Tahun 2022; Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023; Dokumen IKPLHD tahun 2023; Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045; Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029; Neraca Sumber Daya Air; Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024; Dokumen IKPLHD Kabupaten Tegal Tahun 2024; Dokumen KLHS RDTR Slawi-Adiwerna dan Dokumen KLHS RDTR Talang-Dukuhturi sehingga persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan secara kumulatif mencapai 100%.

Tabel 2. 101 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Kumulatif
1.	Dokumen perencanaan	3	3	2	3	4	17
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	-	11,11	55,56	66,67	100	100
	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan						100

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

2) Penataan Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 pada tahun 2021 juga telah menyusun dokumen neraca sumber daya alam dan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai data utama pembuatan dokumen rencana RPPLH. Sesuai amanat Undang-undang 32 tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana setiap kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perda RPPLH. Maka pada tahun 2021 DLH kab Tegal telah menyusun dokumen RPPLH sebagai dasar acuan Perda tentang RPPLH. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 102 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)	57	29	13	11	11
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	506	406	308	186	186
3	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	-	-	64,25	38,46	38,46

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

Kondisi tersebut diatas diharapkan telah dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 38,46 pada tahun 2023, menjadi 38,46 pada tahun 2024. Adapun nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dan komponennya dari tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 103 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	55,05	60,67	64,25	66,80	61,94
2.	IKA (Indeks Kualitas Air)	31,11	44,09	51,58	58,82	49,41
3.	IKU (Indeks Kualitas Udara)	84,99	85,13	87,03	88,33	85,21
4.	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) berubah (Indeks Kualitas Lahan/ IKL)	55,55	43,89	43,90	40,68	40,42

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) target Tahun 2023 sebesar 66,80 namun realisasi Tahun 2024 sebesar 61,94. IKA (Indeks Kualitas Air) target Tahun 2023 sebesar 58,82 namun realisasi Tahun 2024 sebesar 49,41. IKU (Indeks Kualitas Udara) target Tahun 2023 sebesar 88,33 namun realisasi Tahun 2024 sebesar 85,21. IKATL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) target Tahun 2023 sebesar 40,68 namun realisasi Tahun 2024 sebesar 40,42.

3) **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain: Kegiatan Konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, serta penanaman pohon pada daerah lahan kritis. Data penambahan ruang terbuka hijau sebagai berikut :

Tabel 2. 104 Persentase Penambahan Luas RTH di Kabupaten Tegal

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	33,33	33,33	34,72	37,50%	38,89%

Sumber : Bidang Penataan Lingkungan Tahun, 2024

4) **Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 di Kabupaten Tegal dilakukan dengan langkah-langkah strategis, termasuk di Desa Pesarean dan Desa Karangdawa. Beberapa kegiatan pemulihan yang dilakukan antara lain:

a) Desa Pesarean:

- 1) Pemulihan lahan terkontaminasi di SMK NU Penawaja pada tahun 2018.
- 2) Pemulihan di Area Selatan II pada tahun 2021 dengan volume limbah mencapai 1.574,07 m³ dan berat 3.239,2 ton.
- 3) Pemulihan lanjutan di Area Selatan I pada tahun 2022 dengan volume limbah mencapai 4.408,3 m³ dan berat 8.653 ton.
- 4) Pemulihan di Area Utara pada Tahun 2023 dengan volume limbah mencapai 3.041,3 m³ dan berat 6.127 ton.
- 5) Pemulihan di Area Non Dumpsite sebagian grid 9 Desa Pesarean dengan volume limbah mencapai 128,061 m³ dan berat 150,034 ton.

b) Desa Karangdawa:

Pemulihan lahan terkontaminasi di 3 kawasan perusahaan, yaitu PT. Karisma Jaya Mandiri seluas 1.652 m², area PT. Sido Urip seluas 3.325 m² dan area PT. Putro Sido Bisu dengan luas 7.136 m².

Langkah-langkah pemulihan ini mencakup upaya detoksifikasi, penghilangan bahan berbahaya, dan restorasi lahan untuk memastikan lingkungan menjadi aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang melibatkan sejumlah perusahaan dan wilayah desa menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan inklusif dalam menangani masalah kontaminasi limbah B3. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam

menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi lokal.

Luasnya lahan terkontaminasi ini sehingga perlu adanya perencanaan yang baik untuk penanganan kawasan terkontaminasi maupun industri penghasil limbah. Perencanaan yang dilakukan diantaranya adalah adanya dokumen rencana teknis penyimpanan LB3 untuk perusahaan – perusahaan yang menghasilkan limbah B3.

Tabel 2. 105 Persentase Progres Penyusunan Dokumen Rincian Teknis

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis	60	60	84,10	81,30	85,20

Sumber : DLH Kabupaten Tegal, 2024

Belum optimalnya penyusunan dokumen rincian teknis yang disusun oleh Perusahaan yang menghasilkan limbah B3, dengan angka persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis pada tahun 2024 baru mencapai 85,20%

5) Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejatinya sudah ada jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem- sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Pengakuan kepada Masyarakat Hukum Adat dan areal Hutan Adatnya merupakan bentuk pengakuan negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat hukum adat serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tegal perlu diketahui keberadaanya dan dikembangkan melalui berbagai upaya, agar nilai-nilai asli yang ada dalam kearifan lokal dan pengetahuan lokal dapat dilestarikan. Langkah tersebut dapat dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi potensi Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan berbagai pihak terkait. Koordinasi dan komunikasi antar pihak yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai obyek yang sama, yaitu MHA, akan dapat mewujudkan MHA di Kabupaten Tegal yang mampu melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan lebih baik.

6) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk

mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota ; Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; Pengisolasian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; Pengehentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian sumber pencemar; Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap pelaku, pegiat dan penyelamat lingkungan sehingga menimbulkan motivasi pada masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota demi tercapainya pengendalian kualitas dan kuantitas pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Kontribusi Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator kerja dalam upaya mitigasi perubahan iklim, yang mengukur jumlah emisi GRK per unit PDRB. Dengan kata lain, intensitas GRK menunjukkan seberapa efisien suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi dengan emisi karbon yang minimal. Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-13 pada tahun 2030, Kabupaten Tegal telah mulai melaksanakan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi difokuskan pada pembangunan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), sedangkan adaptasi diarahkan pada pengembangan pola pembangunan yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Dalam periode 2019 hingga 2023, emisi GRK di Kabupaten Tegal mengalami peningkatan signifikan sebesar 55,03%, atau setara dengan 873.350 ton CO₂eq. Hingga tahun 2023, total emisi GRK yang tercatat mencapai 2.460.520 ton CO₂eq, dengan sektor limbah cair industri menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 288,27% dari total kenaikan atau sekitar 387.810 ton CO₂eq.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Kabupaten Tegal telah melaksanakan 198 kegiatan aksi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang menunjukkan potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 49.930,59 ton CO₂eq. Upaya ini mencerminkan komitmen daerah dalam menekan laju peningkatan emisi serta menjadi fondasi penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meski demikian, dengan tingginya kontribusi emisi dari sektor industri, diperlukan kebijakan dan inovasi yang lebih agresif, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, serta penguatan regulasi lingkungan agar target pengurangan emisi GRK pada 2030 dapat tercapai secara optimal.

Sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian perubahan iklim dan

pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, Kabupaten Tegal mengukur capaian Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (TonCO₂eq). Indikator ini menggantikan indikator sebelumnya berupa Penurunan Intensitas GRK, untuk menyesuaikan metode pelaporan yang digunakan secara nasional. Penghitungan capaian menggunakan basis data dari Aplikasi Aksara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merekam potensi penurunan emisi dari berbagai sektor, seperti energi, limbah, pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan lainnya. Capaian kumulatif Kontribusi Penurunan GRK Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.956.284.930. Berdasarkan data Aplikasi Aksara Kementerian PPN/Bappenas, kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Tegal tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian dengan capaian sebesar 99,98% atau setara dengan 2.955.731,20 ton CO₂eq. Kontribusi dari sektor lain masih sangat kecil, di antaranya sektor transportasi hanya sebesar 0,02% atau sekitar 500.009,75 ton CO₂eq, sementara sektor energi, hutan dan lahan, persampahan, pesisir laut, serta industri tercatat 0,00% (tidak signifikan). Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, penurunan emisi GRK Kabupaten Tegal masih bertumpu pada sektor pertanian, terutama melalui penerapan praktik budidaya ramah lingkungan, efisiensi lahan, serta upaya pengurangan emisi metana dari lahan pertanian. Namun, kontribusi sektor energi, transportasi, persampahan, dan pengelolaan hutan belum memberikan hasil berarti dalam pengurangan emisi.

Sedangkan data emisi GRK di kabupaten tegal berdasarkan pada aplikasi Sign Smart adalah sumber penghasil emisi GRK di kabupaten tegal pada tahun 2019-2023 adalah :

Tabel 2. 106 Sumber Penghasil Emisi GRK di Kabupaten Tegal pada Tahun 2019-2023

Sektor	Sumber Emisi
Industri	1) 1A2 Industri Pengolahan &Konstruksi 2) 1A3 Transportasi 3) 1A4 Residential
Proses Industri dan Penggunaan Produk	4) 2D Produk Non Energi & Penggunaan Pelarut
AFOLU	5) 3A Peternakan 6) 3B Lahan 7) 3C Agregat (3C1 Pembakaran Biomasa, 3C2 Aplikasi Kapur, 3C3 Aplikasi Urea, 3C4 N2O Langsung dari Pengolahan Tanah, 3C5 N2O Tak Langsung dari Pengolahan Tanah, 3C6 N2O tak langsung dari Pengolahan Kotoran Ternak, 3C7 Pengelolaan Sawah)
Limbah	8) 4A Pembuangan TPA 9) 4B Biologi 10) 4C Pembakaran 11) 4D Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair Industri

Sumber : Laporan Akhir IGRK, 2024

Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tegal tahun 2023 mencapai 2.460,52 Gg CO₂eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor AFOLU mencapai 58,93% atau setara dengan 1.449,99 Gg CO₂eq, sektor limbah sebesar 21,23% setara dengan 522,34

Gg CO₂eq, dan sektor pengadaan dan penggunaan energi sebesar 18,02% setara dengan 443,40 Gg CO₂eq. Sementara itu untuk sektor IPPU kontribusinya paling kecil hanya mencapai 1,82% untuk sektor IPPU setara dengan 44,79 Gg CO₂eq. Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2023 mengalami tren naik sebesar 55,03% atau 873,35 Gg CO₂eq. Tren peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sektor IPPU dengan peningkatan sebesar 20,37% atau setara dengan 7,58 Gg CO₂eq. Selain itu peningkatan tersebut juga disebabkan oleh sektor AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use), terjadi peningkatan pada kegiatan pertanian dan peningkatan lahan hortikultura sebesar 51,39% atau setara dengan 492,23 Gg CO₂eq. Sektor yang paling berkontribusi terhadap peningkatan emisi adalah sektor limbah pada kegiatan limbah cair industri yang mengalami peningkatan sebesar 288,27% atau setara dengan 387,81 Gg CO₂eq. Hal ini karena pendataan riil industri yang belum lengkap setiap tahunnya. Sedangkan untuk sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi terjadi tren penurunan sebesar 3,12% atau setara dengan 14,27 Gg CO₂eq. Dalam kurun waktu 2019-2023, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 2.460,52 Gg CO₂eq, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemic COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat maka terjadi penurunan emisi menjadi 1.533,25 Gg CO₂eq di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kebijakan perubahan penggunaan BBM dengan tidak menggunakan bahan bakar premium dan beralih ke pertalite dan pertamax.

Tabel 2. 107 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemantauan lingkungan	36	104	86	18	54
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair (Persetujuan Teknis)	8	8	8	22	24
3	Jumlah Pembinaan usaha	80	150	16	60	60
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	9	9	5	6	6

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Perhitungan dari keempat jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal. Sedangkan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 memiliki sub kegiatan yang mendukung adalah Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota dengan aktivitas adalah pelaksanaan remediasi yaitu di lahan terkena limbah B3 dan juga peningkatan status mutu air sungai yang ada di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 108 Indikator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	3,70	7,41	18,51	18,51
2.	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	1,08	9,76	17,69	18,60

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

7) Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

Pentingnya edukasi regulasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, dan dalam hal terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan kurang terawasi, dan kurang terkontrol oleh pemerintah maka diperlukan adanya pengawasan lingkungan.

Penaatan Hukum Lingkungan untuk ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tabel 2. 109 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata - Tingkat Nasional - Tingkat Provinsi - Tingkat Kabupaten Denominator : Sekolah potensi minat adiwiyata (dikali %)				2 2 12 34,00	5 9 18 15,38
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	60,80% (152 dari 250)		66,67 % (8 dari 12)	70% (14 dari 20)	71% (20 dari 28)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi Administrasi Denominator: Hasil mapping sanksi administrasi (dikali %)	7	9	12	20	28
4	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	NA	NA	15%	17%	20%
5	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	NA	NA	54	15,39	44,79

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	NA	100	100	100	100

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Pada indikator Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengawasan, pada tahun 2021 sudah tidak dilaksanakan kembali karena sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Indikator tersebut, diganti dengan indikator baru yakni jumlah perusahaan yang taat dibandingkan jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan. Dari indikator yang diperoleh, pada tahun 2024 didapatkan 20 dari 28 perusahaan sudah taat dengan aturan perundang-undangan yang ada. Persentase pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan pada tahun 2024 mencapai 100% dan perlu dipertahankan.

8) **Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup**

Masyarakat peduli lingkungan merupakan salah satu pendukung untuk keberhasilan penjagaan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal, sehingga keberadaan mereka sangat penting. Keberadaan mereka juga perlu dilakukan penghargaan untuk mengapresiasi komitmen mereka menjaga lingkungan hidup. Berikut data tahun 2020 – 2024:

Tabel 2. 110 Data Penghargaan Lingkungan Hidup dan Penambahan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	NA	NA	15	17	20
2	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	NA	NA	54	38,46	44,79

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2024

Berdasarkan pada data yang ada, terlihat bahwa terjadi penurunan angka persentase penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan penghargaan yang di dapatkan tentunya angka yang tidak bisa terprediksi. Masih rendahnya penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang peduli dengan Lingkungan Hidup dengan angka persentase penambahan kelompok Masyarakat/Lembaga yang peduli dengan lingkungan hidup di tahun 2024 sebesar 20% dan masih rendahnya penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh oleh masyarakat, dengan angka persentase di tahun 2024 sebesar 44,79%.

9) **Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Penujah per hari di Kabupaten Tegal terjadi peningkatan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 111 Volume Sampah Terangkut per Hari Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	404,60	299,17	361,00	316,00	332,71
2	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (ton)	408,65	373,79	839,63	705,29	661,94
3	Persentase Sampah terangkut (%)	99,01	80,04	43,00	44,43	50,27
4	Persentase Sampah yang tertangani	32,40	63,69	42,99	51,65	50,27
5	Persentase Pengurangan Sampah	4,36	17,25	15,24	18,55	17,94

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Dengan populasi penduduk sekitar 1.654.860 jiwa hingga tahun 2024, Kabupaten Tegal memperkirakan bahwa total sampah yang dihasilkan mencapai sekitar 661,94 ton setiap harinya. Dari jumlah ini, sekitar 332,71 ton berhasil diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal ke TPA Penujah, mencapai persentase sebesar 50,27% dari total volume sampah yang dihasilkan. Sementara sisanya, sekitar 49,73%, mungkin merupakan sampah yang belum terkelola atau belum diangkut ke TPA. Dengan harapan agar Program Desa Merdeka Sampah dapat berlanjut, Kabupaten Tegal berupaya untuk terus meningkatkan persentase sampah yang terkelola dan terangkut setiap harinya, sehingga dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat dapat semakin berkurang. Dukungan penuh dari pemerintah, stakeholders, dan komunitas lokal sangat penting dalam menjaga kesinambungan program ini dan mencapai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Tegal.

Pendekatan 3R dan pembentukan Bank Sampah ini merupakan langkah-langkah penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan di sumbernya, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, serta mendaur ulang material sampah. Dengan demikian, Kabupaten Tegal tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang efisien tetapi juga pada pengurangan dan pemanfaatan kembali sumber daya, yang merupakan langkah kunci dalam menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi dampak harian dari penumpukan sampah serta mencapai pengelolaan yang lebih berkelanjutan, Kabupaten Tegal telah menerapkan Program Desa Merdeka Sampah. Program ini difokuskan pada pengurangan jumlah sampah yang akhirnya mencapai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Penujah setiap hari. Hingga tahun 2023, sebanyak 121 dari total 281 desa di Kabupaten Tegal telah terlibat dalam program ini, menciptakan perubahan positif dalam pengurangan sampah dengan lebih efisien di tingkat harian. Saat ini Dinas LH juga bekerjasama dengan InSWA untuk mendampingi 7 desa piloting dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 112 Bank Sampah Tahun 2020-2024

No.	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Bank Sampah (unit)	140	140	105	105	105
2.	Potensi Bank Sampah yang dibentuk (unit)	140	165	287	287	287
3.	Bank Sampah yang dibentuk (%)	100	84,84	36,59	36,59	36,59

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 113 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi TPS				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPSS (unit)	129	111	150	150	151
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	242,5	208,7	282,0	282,0	308,0
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.599.432	1.596.996	1.679.267	1.679.267	1.654.860
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0,151	0,131	0,168	0,168	0,186

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2024

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebanyak 150 unit (berlokasi di pasar dan pabrik). Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem *controlled landfill* sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 114 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi TPA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Volume Sampah (m ³ /hari)	148,43	427,4	515,7	451,4	475,3
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	58.000	58.000	58.000
4.	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan (%)	0,00	80,00	82,00	83,00	85,00

Sumber: DLH & DPUPR Kabupaten Tegal, 2024

F. Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan terlihat dari bertambahnya angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Dukungan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas. Data jumlah kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115 Kepemilikan KTP el, KK dan KIA Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kartu Keluarga (KK)	91,67	95,30	94,58	99,96	98,81
2.	Kepemilikan KTP el	99,68	99,69	99,32	99,40	100
3.	Kepemilikan KIA	21,80	31,00	44,41	50,30	34,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dalam tabel dapat diketahui bahwa angka kepemilikan dokumen kependudukan hampir setiap tahunnya meningkat baik KK, KTPel maupun KIA. Namun Tahun 2024 angka kepemilikan KK dan KIA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Angka kepemilikan KK mengalami penurunan namun masih di atas angka target yaitu 98,00. Sedangkan kepemilikan KIA dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sampai 15,31. Beberapa penyebab penurunan angka KIA tersebut antara lain : 1) masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan KIA 2) kurangnya kompetensi dan jumlah personil petugas pelayanan 3) kurang maksimalnya sinergi dengan stakeholder (lembaga pendidikan tingkat pra sekolah, dasar dan menengah pertama).

Perlu diketahui juga bahwa target kepemilikan/perekaman dokumen kependudukan tahun 2024 yang ditargetkan oleh Pemerintah adalah perekaman KTPel sebesar 99,40% dan kepemilikan KIA sebesar 60%. Berdasarkan angka tersebut maka pada tahun 2024 untuk kepemilikan KTPel telah melampaui target sedangkan kepemilikan KIA belum mencapai angka yang ditargetkan oleh Pemerintah. Demikian pula target Pemerintah lainnya berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk tahun 2024 sebesar 30% dari jumlah penduduk wajib KTPel belum dapat terpenuhi. Adapun realisasi capaian sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 7%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kemauan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD karena belum diwajibkan oleh Pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan IKD untuk kepentingan pelayanan publik.

Meskipun angka kenaikan perekaman KTPel, kepemilikan KIA dan aktivasi IKD yang ditetapkan oleh Pemerintah kecil namun pada praktiknya jumlah penduduk yang

harus dilayani jauh lebih besar dari angka kenaikan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk. Guna menjangkau capaian target yang ditetapkan Pemerintah maka perlu dukungan sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang memadai.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil. Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 116 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	93,10	94,88	97,00	97,02	96,85
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	68,54	69,87	71,40	71,41	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah angka kepemilikan akta kelahiran tahun 2024 mengalami sedikit penurunan yaitu 0,17 dari tahun sebelumnya sedangkan angka akta kepemilikan akta kematian naik menjadi 100. Salah satu penyebab penurunan angka kepemilikan akta kelahiran adalah adanya perubahan kebijakan pelayanan berupa digitalisasi arsip atas dokumen/kelengkapan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan termasuk akta pencatatan sipil. Meskipun pelaksanaan digitalisasi arsip saat ini sedikit menghambat/mengurangi kuantitas pelayanan namun secara kualitas lebih meningkat. Hal ini karena keamanan arsip lebih terjamin dan terkelola dengan baik.

Berdasarkan tabel di atas maka tingkat kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian adalah sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan inovasi pelayanan *online* dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK+ (Lahir Olih Akta Kelahiran, KK dan KIA) serta mengadakan sosialisasi akte kelahiran di desa-desa dan jemput bola ke sekolah-sekolah.

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mempertahankan capaian kepemilikan akta kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi pelaporan buku pokok pemakaman

kepada petugas registrasi/operator di masing masing desa yang ditindaklanjuti dengan pembuatan akta kematian dan menjadi buku pokok pemakaman di desa.

3) **Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.**

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu didukung oleh sarana dan prasarana penduduk yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 117 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Layanan SIAK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	7	7	3	3	3
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	4	4	0	0	0
3.	Jaringan SIAK (unit)	26	26	27	27	27
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	72	72	80	80	80
5.	SDM IT SIAK (org)	4	4	5	5	5

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung lainnya. Perlu diketahui juga di bulan April tahun 2022 telah dilakukan proses migrasi sistem dari SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat. Akibat dari proses tersebut terdapat penyederhaan aplikasi pokok SIAK agar menjadi satu kesatuan dan juga aplikasi pendukung SIAK tidak dapat digunakan lagi karena harus disesuaikan dengan proses bisnis dari SIAK Terpusat. Jaringan SIAK sudah terhubung untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi di atas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2018 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 118 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah OPD pemanfaat data	20	20	20	20	20
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	14	16	18	18	18
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	4	6	2	2	2
4.	Jumlah OPD pemanfaat data berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS)	3	2	6	6	10
5.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15%	10 %	60%	60%	100%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2024

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Jumlah OPD yang sudah melaksanakan PKS sesuai permendagri tersebut sebanyak 6 OPD dimana target OPD dari pusat sebanyak 10 OPD. Untuk perjanjian kerjasama yang lainnya berupa kerjasama dalam bentuk pelayanan seperti pada program LOAKK+ (Lair olah akte, KK plus KIA).

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Administrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 – 115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 119 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Alokasi DD Dan ADD (X Rp 1.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	DD – APBN	358.311.953	359.311.953	359.781.317	308.281.385	308.435.961
2.	ADD – APBD	125.000.000	113.076.784	125.000.000	125.000.000	128.200.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 120 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	RKPDes;					
	1.Desember s/d Januari	281	281	281	281	281
	2.Pebruari s/d Maret	0	0	0	0	0
2.	APBDes					
	1.Januari s/d Pebruari	278	281	281	281	281
	2.Maret s/d April	3	1	0	0	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. APBDes merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. APBDes juga merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJMDES).

Adanya peningkatan jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun dan menetapkan APBDES karena adanya peningkatan kualitas dan komitmen pemerintah desa dan BPD, sinergi, dan kolaborasi kerja sama antar OPD pengampu desa dan para pendamping desa. Pelembagaan perencanaan desa secara konsisten sesuai tahapan dan tata Kelola waktu serta peran kelembagaan desa secara optimal, dirsakan sangat berpengaruh langsung terhadap penyusunan dan penetapan APBDES tepat waktu.

Sebagai refleksi dari bobot pencapaian kegiatan pemerintahan desa selama 1 tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD). LPPD ini juga sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Dasar penyusunan LPPD ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa. LPPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

Tabel 2. 121 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/LPPD Januari –Maret > Maret	276 5	279 2	281 0	281 0	281 0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Pengelolaan Aset Desa diatur oleh Permendagri No. 1 Tahun 2016. Setiap tahunnya ada peningkatan dalam pengelolaan Aset Desa. Seperti data pada Tabel 2.107 setiap tahun ada kenaikan jumlah desa yang menyusun Neraca Aset dan KIB/KIR. Di tahun 2024, seluruh desa di Kabupaten Tegal telah menyusun Neraca Aset dan KIB/KIR, hal ini karena mulai berjalannya aplikasi SISKEUDES dan SIPADES, yang memudahkan desa dalam menjalankan keuangan desanya.

Tabel 2. 122 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Neraca Aset	20	26	281	281	281
2	KIB/KIR	75	81	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2018 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 6 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 123 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Kapasitas Aparatur Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	56,25	76,60	76,60	76,60	80
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	34,00	56,00	56,00	60	65
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	1.780	1.870	1.870	2510	1124
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	2.439	2.510	2.510	2510	2341

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2020 sebesar 50,15 % semakin meningkat hingga pada tahun 2024 sebesar 76,60 %.

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2020 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

Tabel 2. 124 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemlihan Kepala Desa

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	0	0	100	0
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	0	0	0	47	0
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	0	0	0	47	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan kepala desa pada setiap desa. Di tahun 2023 dilaksanakan Pilkades Serentak Gelombang I. Disahkannya kebijakan tentang perpanjangan masa jabatan kades selama 2 (dua) tahun (Undang-Undang No. 3 Tahun 2024) berakibat di tahun 2024 Dispermasdes tidak melaksakan Pilkades Serentak Gelombang II.

Tabel 2. 125 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	96	24	50	100	100
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	20	24	40	17	28
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	20	24	80	17	28

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2020 sebanyak 20 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang SOTK Desa, tahun 2020 sebanyak 20 desa, tahun 2021 sebanyak 24 desa, tahun 2022 sebanyak 80 desa, tahun 2023 sebanyak 17 desa, dan tahun 2024 sebanyak 28 desa yang dilaksanakan dalam

rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

Tabel 2. 126 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	11,15	89,00	89,00	100	100
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	35	252	252	281	281
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 6 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 127 Jumlah Desa Yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	98,93	100	100	47,68	50
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	278	281	281	134	141
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	134	141

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan tren yang semakin baik.

Tabel 2. 128 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	81,25	83,63	83,63	155	25
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	26	200	213	28	31
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	32	31	26	44	58

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan trend yang semakin

baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembirakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan

Tabel 2. 129 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	-	-	47	0
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa (org)	-	-	-	2.510	1.124
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	20	24	49	17	28

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana dengan baik. Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan. Kondisi data jumlah Bumdes. Jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel di bawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2. 130 Kondisi BUM Desa Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Kondisi BUM Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	60,12	73,31	63,53	64,53	53,73
	Jumlah BUMDES	168	206	255	265	268
1.	Status Bumdes Dasar	67	80	95	84	49
2.	Status Bumdes Tumbuh	69	88	142	141	57
3.	Status Bumdes Berkembang	32	34	20	30	87
4.	Status Bumdes Maju	0	4	8	10	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Pada akhir tahun 2022, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 255 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2019. Berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyak 49, BUMDesa tumbuh sebanyak 57 dan BUMDesa berkembang sebanyak 87, dan BUMDesa Maju sebanyak 8.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan masyarakat merupakan pemberian sumberdaya. Kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk mencapai sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa fisik, ekonomi maupun social yang tentunya diikuti dengan adanya partisipasi masyarakat untuk mau berkembang. Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dibuat atas dasar kebutuhan masyarakat untuk tujuan tertentu. Dalam mewujudkan tujuan kelembagaan masyarakat, maka diperlukan pemberian daya dan pengetahuan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang ada berupa peningkatan kapasitas, pendampingan kelembagaan, sosialisasi dsb. pemberdayaan kelembagaan yang dilakukan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarkatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat berfokus pada pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa (LKD) dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada didesa di Kabupaten Tegal. Adapun tingkat keberhasilannya ditandai dengan Lembaga Kemasyarakatan Aktif dan Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya.

Tabel 2. 131 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat					
	UED-SP	41	41	41	7	8
	Kelompok UP2K PKK	287	287	287	57	541
	CPPD	5	5	5	10	9
	Pasar Desa	24	21	30	32	27
	TTG	46	46	45	23	23
	KUB	8	8	8	39	36
	Posyantek	3	3	3	4	4
2.	Lembaga Kemasyarakatan Desa					
	LPMD	281	281	281	281	212
	Posyandu	1329	1368	1368	1416	1534
	Karang Taruna	107	107	107	252	252
	RT	6955	6955	6955	6977	6977
	RW	1870	1870	1870	1755	1755
	PKK Desa	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari table diatas dapat dilihat jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2020-2024, pada Uraian Lembaga Ekonomi Masyarakat dijabarkan lembaga-lembaga ekonomi yang masih ada di desa yang sebageian adalah program pemerintah yang masih dipertahankan didesa seperti EUD-SP dan CPPD. Dari tabel diatas dilihat bahwa eksistensi dari lembaga-lembaga ekonomi didesa menurun, hal ini disebabkan oleh kesulitan desa dalam mengelola lembaga, ketidaktahuan desa tentang lembaga tersebut, tidak ada regenerasi, dan kesulitan dalam mendapatkan modal. Hal ini dinyatakan oleh pemerintah desa ketika dilakukan pendataan pada TA. 2023-2024 oleh Dispermasdes Kab. Tegal. Pada uraian Lembaga

Kemasyarakatan Desa diuraikan lembaga-lembaga yang ada di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dari Tahun 2019-2024 yang aktif cenderung tidak mengalami perubahan karena lembaga kemasyarakatan diatas merupakan lembaga yang wajib ada di desa dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan didesa/musyawarah desa. Ditahun 2024, jumlah LPMD yang aktif mengalami penurunan dikarenakan kurangnya pemahaman fungsi dan tugas dari LPMD oleh Pemerintah Desa. Disinilah peran pemerintah daerah dalam pendampingan Pemerintah Desa kepada lembaga-lembaga didesa agar tetap aktif dan berhasil mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan masyarakat yang mandiri,partisipatif.

Tabel 2. 132 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1329	1368	1368	1416	1358
	b. Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1329	1368	1368	1416	1358
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	90	90
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,74	11,74	11,74	32	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga dengan mengacu pada 10 Program Pokok PKK. PKK berdiri secara berjenjang mulai dari PKK Pusat, PKK Daerah (Provinsi dan Kabupaten), PKK Kecamatan dan PKK Desa. Kegiatan Pembinaan PKK dilakukan oleh Pemerintah dan PKK Kecamatan dan Kabupaten, pembinaan yang dilakukan antara lain: Pembinaan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK beserta administrasinya serta peninjauan lapangan seperti Kelompok Pengajian, Bina Keluarga Balita (BKB), Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA PKK), Rumah Sehat, dan Posyandu. Dari data di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah desa binaan oleh Pemda Kabupaten Tegal bersama TP-PKK Kab. Tegal sejumlah 57 desa ditahun 2023 dan 2024, 32% dari jumlah desa yang ada di Kab. Tegal.

3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah. Tidak terdapat Perdes Tata Ruang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 133 Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang baik serta Desa yang Telah melakukan Kerjasama Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Jumlah Perdes Kewenangan Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	81.88	81.92	82.23	82.77	92,57
3	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	69.23	70	70	70	90

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Kewenangan Desa sudah ada sejak 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2. 134 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Infrastruktur Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	TMMD & Karya Bhakti	9	8	8	8	9
2	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	96.06	96.13	96.22	96.25	96,55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas menunjukan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2020 hingga 2024 kegiatan TMMD dan Karya Bhakti sebanyak 8 desa. Untuk tahun 2024 TMMD 4 Desa, Karya Bhakti Perdesaan 2 Desa dan Karya Bhakti Perkotaan 3 Desa.

4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 135 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah Desa Tertinggal				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Tertinggal	31	26	22	12	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2024

Dari data tersebut diatas menunjukan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2020 dan 2024, yang menunjukan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 31 desa di tahun 2020 menjadi 26 desa di tahun 2021. Di tahun 2022 jumlah desa tertinggal sebanyak 22 desa, tahun 2023 sebanyak 12 desa Dn tahun 2024 sebanyak 5 desa.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel di bawah. Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 1,20 bisa tercapai.

Tabel 2. 136 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	1.579.432	1.608.611	1.623.595	1.654.836	1,674.803
2.	LPP	0,12	0,970	0,93	1,32	1,28

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Tegal dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam tingkat pertumbuhan. Pada tahun 2020, LPP tercatat sebesar 0,12%, kemudian meningkat signifikan menjadi 0,97% pada 2021 dan sedikit menurun menjadi 0,93% pada 2022. Namun, pada tahun 2023, LPP kembali mengalami lonjakan menjadi 1,32%, sebelum sedikit melambat menjadi 1,28% pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang cukup konsisten setiap tahunnya menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika demografi di Kabupaten Tegal, seperti angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Lonjakan LPP pada 2023 dan 2024 dapat mengindikasikan peningkatan angka kelahiran atau migrasi masuk yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang terjadi sejalan dengan kapasitas pembangunan daerah dalam menyediakan layanan dasar dan infrastruktur yang memadai.

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel di sebagai berikut.

Tabel 2. 137 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2020-2024

No	Tahun	TFR
1	2020	2,28
2	2021	2,23
3	2022	2,34
4	2023	2,21
5	2024	2,16

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal tahun 2020-2024, terlihat adanya tren penurunan tingkat fertilitas penduduk. Pada tahun 2020, TFR tercatat sebesar 2,28 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,23 pada 2021. Meskipun sempat meningkat ke angka 2,34 pada 2022, TFR kembali mengalami penurunan dalam dua tahun berikutnya, yakni 2,21 pada 2023 dan 2,16 pada 2024. Penurunan TFR ini dapat mengindikasikan keberhasilan program keluarga berencana

(KB) dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian jumlah kelahiran. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa tren penurunan ini tidak berdampak negatif pada struktur demografi, terutama dalam jangka panjang terkait dengan potensi penurunan angka ketergantungan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada 2024 sebanyak 162.035 peserta dari 250.200 pasangan usia subur. Persentase pemakaian alat kontrasepsi pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 64,76% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 70,11%. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2020-2024 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 138 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	186.867	188.121	193.675	199.134	162.035
2.	Jumlah PUS	275.625	277.573	279.765	284.040	250.200
3.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	67.80	67,77	69.22	70,11	64,76

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2025

Kepesertaan KB Aktif di tahun 2022 mengalami kenaikan dan diikuti dengan penurunan angka *unmet need*. *Unmet need* KB merupakan kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi. Artinya bahwa PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin menunda/menjarangkan kehamilan tetapi tidak memakai alat kontrasepsi (tidak ber-KB). Berikut ditampilkan persentase unmeet need KB di Kabupaten Tegal tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 139 Persentase Unmeet Need KB Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Persentase <i>Unmeet need</i>				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PUS <i>Unmetneed</i>	42.095	40.883	32.435	30.742	19.447
2.	Jumlah PUS	275.625	277.573	279.768	284.040	250.200
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	15,27	14,73	11.59	10,82	7,77

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2024

Berdasar tabel di atas, persentase *Unmet Need* dari tahun 2020-2024 bersifat fluktuatif dan perlu mendapatkan perhatian. Tingginya angka unmet need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Tingginya

angka unmet need berpengaruh pada rapatnya jarak kelahiran dan banyaknya anak yang dilahirkan sehingga berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan bayi. Kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu terjadinya aborsi yang juga meningkatkan risiko kematian pada ibu.

I. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

a) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan adanya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2. 140 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	16.958	17.190	17.190	17.207	17.207
Persentasi Rambu (%)		41,95	42,51	42,51	42,56	42,56

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Tabel 2. 141 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2019-2024

No	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Guardrail	167	258	260	260	260
2	Marka	5.052	5.742	5.742	5.742	5742
3.	Rambu Lalu Lintas	696	928	928	928	928
5.	APILL	21	21	21	22	24
6.	Warninglight	41	41	42	43	44
7.	RPPJ	121	121	121	121	121

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Untuk tahun 2020-2024 APILL ada 24 yang datanya sebagai berikut:

DATA APILL / TRAFFIC LIGHT TERPASANG
DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

NO	NAMA SIMPANG	KONTRUKSI JENIS TIANG	TAHUN PEMBUATAN	NAMA SIMPANG JALAN	JUMLAH SIMPANG	JUMLAH TIANG	LBR JLN M	KONSTRUKSI	STATUS JALAN	WILAYAH JALAN DAERAH			KET.
										KAB	PROV	NAS	
1	simpang 4 suradadi	Tiang Octagonal	1/1/2022	Pasar Suradadi	4	(6 T), 4 Kecil, 2 Besar	16	Beton	Nasional	-	-	suradadi	
2	simpang 3 Munjungagung	Tiang Octagonal	10/1/2023	Larangan	3	(6 T), 3 Kecil, 3 Besar	16	Beton	Nasional	-	-	larangan	
3	simpang 3 Kemantran	Tiang Octagonal		Kemantran	3	(6 T), 3 Kecil, 3 Besar	10	Aspal	Kabupaten	Kemantran	-	-	
4	simpang 4 Balamoa	Tiang Bulat	9/1/2023	Balamoa	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	10	Aspal	Kabupaten	Balamoa	-	-	
5	simpang 4 Curug	Tiang Octagonal		Pasar Curug	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	10	Aspal	Kabupaten	Pasar Curug	-	-	
6	simpang 4 Dukuhturi	Tiang Bulat		Dukuhturi Jl. 2	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Dukuhturi Jl. 2	-	-	
7	simpang 4 Singkil	Tiang Bulat		Singkil Jl.2	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Singkil Jl.2	-	-	
8	simpang 4 Trayeman	Tiang Bulat		Trayeman Jl.2	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Trayeman Jl.2	-	-	
9	simpang 4 Brigif	Tiang Octagonal		Brigif 4	4	(8 T), 5 Kecil, 5 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Brigif 4	-	-	
10	simpang 4 Pakembaran	Tiang Octagonal		Pakembaran	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Pakembaran	-	-	
11	simpang 3 Butak	Tiang Bulat		Butak Pagongan	3	(6 T), 4 Kecil, 2 Besar	15	Aspal	Nasional	-	-	Butak Pagongan	
12	simpang 4 Exit Tol Adiwerna	Tiang Octagonal		Exit Tol Adiwerna	4	(8 T), 5 Kosong, 3 Besar	16	Aspal	Nasional	-	-	Exit Adiwerna	
13	simpang 4 Adiwerna	Tiang Bulat		Adiwerna Jl. 1	4	(6 T), 2 Kosong, 3 K, 3 B	15	Aspal	Nasional	-	-	Adiwerna Jl. 1	
14	simpang 3 Banjaran Sentral	Tiang Bulat		Pasar Bawang Jl. 1	3	(6 T), 4 Kecil, 2 Besar	15	Aspal	Nasional	-	-	Pasar Bawang Jl. 1	
15	simpang 4 Procot	Tiang Bulat		Procot Pili kita	4	(8 T), 5 Kecil, 3 Besar	16	Aspal	Nasional	-	-	Procot Pili kita	
16	simpang 4 Koramil	Tiang Bulat		Koramil Slawi Jl. 1	4	(6 T), 4 Kecil, 2 Besar	15	Aspal	Nasional	-	-	Koramil Slawi Jl. 1	
17	simpang 4 PLN	Tiang Octagonal		PLN Slawi	4	(8 T), 5 Kecil, 3 Besar	15	Aspal	Nasional	-	-	PLN Slawi	
18	simpang 4 Rama	Tiang Octagonal		Bioskop Rama	4	(8 T), 4 Kecil, 4 Besar	15	Aspal	Nasional	-	-	Bioskop Rama	
19	simpang 4 Slawi Pos	Tiang Bulat		Slawi Pos	4	(8 T), 5 Kecil, 3 Besar	15	Beton	Nasional	-	-	Slawi Pos	
20	simpang 4 Margasari	Tiang Octagonal	9/1/2018	Pasar Margasari	4	(8 T), 5 Kecil, 3 Besar	16	Beton	Nasional	-	-	Pasar Margasari	
21	simpang 3 X-Nyamat Dukuhturi	Tiang Bulat		Kalinyamat	3	(6 T), 3 Kecil, 3 Besar	12	Aspal	Kabupaten	Kalinyamat	-	-	
22	simpang 3 Mejasem	Tiang Bulat	10/1/2023	Mejasem/sulang	3	(6 T), 3 Kecil, 3 Besar	10	Beton	Kabupaten	Mejasem/sulang	-	-	
23	simpang 3 Dukuhsalam	Tiang Octagonal	4/9/2024	Dukuhsalam	3	6 TIK	12	Aspal	Nasional	-	-	Yomani Gucci	APBN
24	simpang 3 Yomani Gucci	Tiang Octagonal	4/9/2024	Yomani Gucci	3	6 TIK	12	Aspal	Nasional	-	-	Dukuhsalam	APBN
JUMLAH TIANG APILL										86 Tiang Kecil + 71 Tiang Besar = 157 Tiang APILL			

Untuk tahun 2024 terdapat penambahan di beberapa perlengkapan jalan yang merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan (BPTD) yaitu sebagai berikut :

- Warning Light 12 unit
 - 2 unit Warning light di Pantura (simpang teksin)
 - 2 unit Warning light di masjid Jami(masjid Agung)
 - 2 unit warning light di Polsek Adiwerna
 - 2 unit warning light di simpang SMP N 1 Adiwerna
 - 2 unit warning light di simpang SMK NU Talang
 - 2 unit warning light di Simpang Purwahamba (maribaya)
- Guardrail 2 paket
 - Kalipasir margasari 500 meter
 - Jalan nasional balapulang 250 meter
- APILL 2 paket
 - APILL Yomani simpang tiga
 - APILL Dukuhsalam

Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan lalu lintas yang tertib dan teratur. Rambu lalu lintas telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, terdapat 4 jenis rambu-rambu lalu lintas yaitu rambu larangan, rambu peringatan, rambu perintah dan rambu petunjuk.

Berdasarkan data ketersediaan jumlah rambu lalu lintas selama kurun waktu lima tahun, terjadi peningkatan kuantitas. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perhubungan telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan lalu lintas dan keamanan dari pengguna jalan.

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai

penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU enam tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 142 Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah Sampai dengan Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebutuhan LPJU	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
2	LPJU Terpasang	10.142	11.140	11.634	12.652	13.650
Persentasi LPJU (%)		59,82	65,70	68,62	74,62	80,51

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Sampai dengan Tahun 2024 jumlah LPJU sebanyak 13.650 titik (80,51%) dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal (16.954 titik).

b) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 143 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	350	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	269	282	347	323	350
Persentasi lokasi parkir (%)		89,67	94,00	99,14	107,6	117

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 117%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

Tabel 2. 144 Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	%
1	2020	174	35	20,11
2	2021	0	0	NA
3	2022	0	0	NA
4	2023	0	0	NA

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	%
5	2024	0	0	NA

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2024 tidak dilaksanakan pemeriksaan kendaraan sehingga data jumlah kendaraan yang melakukan pelanggaran tidak tersedia hal tersebut dikarenakan tidak adanya PPNS yang bertugas dalam penindakan pelanggaran kendaraan.

d) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2. 145 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi	12	12	12	20	30
2	Jumlah andalin yang disetujui	5	9	9	17	24
	Persentase jumlah Andalalin (%)	41,67	75,00	75,00	68	80

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Kebijakan implementasi Andalalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalalin pada tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya system transportasi.

Menurut peraturan terbaru yaitu PP 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan PM 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisi dampak lalu lintas bahwa andalalin terbagi ke dalam 3 kategori yaitu andalalin tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Untuk Kategori tinggi diprediksi sejumlah 4, kategori sedang sejumlah 8 dan kategori rendah sejumlah 12.

e) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 32 unit.

Tabel 2. 146 Jumlah Terminal/Shelter dan Halte Tahun 2020– 2024

No	Uraian	Jumlah sampai Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	KebutuhanTerminal/ ShelterdanHalte	102	102	102	102	102
2	Halte	30	30	32	32	35
3	Terminal/Shelter	5	5	5	5	5
4	Rest Area/Shelter	3	3	3	3	3
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	37,25	37,25	39,21	39,21	39,02

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2024

Guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum, maka diperlukan proram untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan angkutan umum. Hal ini penting untuk mendukung program pengurangan emisi, konsumsi energi, kemacetan dan keselamatan lalu lintas.

Tabel 2. 147 Persentase Jumlah Penumpang di Terminal yang Terawasi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penumpang di terminal yang diawasi	-	-	133.593	130.271	112.825
2	Total jumlah penumpang di terminal dalam satu tahun	-	-	133.593	130.271	112.825
3	Persentase jumlah penumpang di terminal yang terawasi	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2024

f) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2020 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun -tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebanyak 91 sedangkan jumlah angkutan umum pada tahun 2024 adalah sebanyak 280 unit.

Tabel 2. 148 Jumlah Trayek Lalu Lintas dan Dokumen Perencanaan Angkutan

No.	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Angkutan Umum	904	485	485	311	280
2	Jumlah Ijin Trayek	384	343	343	275	91
3	Rasio Ijin Trayek	0,42	0,71	0,71	88,42	0,32
4	Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	-	-	-	0	0
5	Dokumen Perencanaan angkutan	-	-	-	0	3

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Dokumen perencanaan lalu lintas dan perencanaan angkutan merupakan dokumen yang menjadi target untuk dapat dihasilkan di tahun 2025 – 2026, namun di

tahun 2023 dan sebelumnya belum pernah dilakukan penyusunan dokumen. Penyebab penurunan dan stagnansi angkutan umum terjadi karena banyak angkutan yang tidak aktif. Faktor yang menyebabkan banyaknya angkutan yang tidak beroperasi antara lain yaitu di masa pandemi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum, Sistem pembelajaran dengan pertemuan jarak jauh pada sekolah di masa pandemic membuat anak-anak sekolah yang biasanya menggunakan jasa angkutan umum menjadi tidak menggunakan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, kedua yaitu masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan misalnya umur kendaraan, sudah tidak layak jalan, serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan yang terakhir karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online dan ojek online. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin angkutan umum. Izin angkutan umum sendiri dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, dalam hal ini Dinas Perhubungan hanya melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi angkutan.
- b. Perlu dilakukan langkah atau upaya penyusunan kembali rencana umum jaringan trayek angkutan pedesaan dan perbatasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sehingga diperoleh riil kebutuhan jumlah angkutan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Perlu kami informasikan data tersebut terakhir disusun pada tahun 1996 dan sampai sekarang tidak tersedia anggaran, sebagai diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
- c. Perlu adanya inovasi dalam hal pemberian subsidi angkutan, kemudahan dalam melakukan perizinan angkutan serta perbaikan dalam kualitas pelayanan.

g) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang telah melakukan uji KIR pada tahun 2024 sebanyak 6.221 unit kendaraan dari 7.114 unit kendaraan bermotor wajib uji Kabupaten Tegal. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 149 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KB Wajib Uji	9.837	8.538	8.050	7.589	7.114
2	Jumlah KB yang melakukan Wajib Uji	8.104	7.320	7.215	6.269	6.221

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	1.733	1.218	835	1.320	893
4	% Kendaraan Bermotor Wajib Uji	82,38	85,73	89,62	82,60	87,44
5	Persentase pemenuhan alat uji terstandar	-	-	-	100	100
6	persentase jumlah ramp check angkutan umum				0	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Adanya selisih angka jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, dan melakukan uji KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota lain. Perhitungan capaian untuk uji kelayakan di tahun 2023 dilakukan perubahan indikator penilaian dari yang dihitung adalah jumlah kendaraan yang dilakukan uji kelayakan menjadi jumlah alat uji terstandar yang berjumlah 13 alat. Sedangkan untuk jumlah ramp check belum tersedia dikarenakan merupakan indikator baru untuk tahun 2025-2026 menyesuaikan dengan kepmendagri yang baru.

h) **Perlindungan Sebidang**

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerto di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerto di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

Tabel 2. 150 Jumlah Perlindungan Sebidang Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah sampai tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perlindungan Tidak Sebidang	8	8	8	8	8
2	Jumlah Perlindungan Sebidang	45	45	45	45	45
3	Jumlah Gardu Pengaman	18	18	18	19	19
4	Persentase Gardu Pengaman (%)	33,96	33,96	33,96	35,84	35,84

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Tegal sebanyak 53 lokasi. Terdiri dari 8 perlintasan tidak sebidang dan 45 perlintasan sebidang. 8 perlintasan tidak sebidang berada pada 2 jalur flyover dan 6 jalur underpass yang berada di Kecamatan Kramat, Margasari dan Lebaksiu. Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 33,96%. Tidak ada perlintasan di jalan nasional dan provinsi, karena yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal hanya menangani perlintasan yang ada di jalan kabupaten dan jalan desa.

Data pada tabel diatas bahwa prosentase jumlah perlintasan sebidang yang sudah dilengkapi pengaman sangat rendah, 35,84 % sehingga pada tahun berikutnya perlu ditambah gardu pengamannya.

i) **Fatalitas Korban Kecelakaan**

Tabel 2. 151 Angka Kecelakaan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban			Penurunan
		MD	LB	LR	
2020	500	134	0	506	19,22
2021	603	140	3	642	-20,60
2022	594	129	4	636	1,49
2023	421	137	0	612	29,12
2024	696	159	0	824	-41,56

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2024

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

Penurunan = $\frac{\text{Jumlah kejadian } n+1 - \text{jumlah kejadian } n}{\text{Jumlah Kejadian } n} \times 100 \%$

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi fluktuatif angka kecelakaan. Pada tahun 2024 jumlah kejadian kecelakaan meningkat dari 421 kejadian menjadi 696 Kejadian atau peningkatan sekitar 41,56%. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas. Harapannya angka kecelakaan ini akan menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan:

1. Memprioritaskan aspek keselamatan dalam berlalu lintas yaitu kondisi dimana selalu berperilaku baik dan menghindari dari munculnya resiko kecelakaan dalam bentuk apapun.
2. Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya utama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obat-obatan atau alkohol serta pengalihan perhatian,
3. Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungsi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
4. Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang dan benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, dan pencahayaan yang tidak memadai karena lingkungan atau cuaca. Cuaca yang buruk seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Informasi dan Komunikasi Publik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka untuk masyarakat karena setiap orang berhak memperoleh informasi. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel 2. 152 Data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Badan Publik Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai KIP Badan Publik	83,96	65	83,29	83,30	88,75
2.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	51,60%	67,13%	72,19%	72,19%	79,38%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Penilaian KIP Award Tahun 2024 Nilai KIP Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal meningkat (88,75) dibandingkan dengan tahun 2023, penilaian KIP Award tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik dapat meraih Penanugerahan KIP Award yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Predikat kategori MENUJU INFORMATIF dengan nilai 88,75. Kategori penilaian KIP Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

Nilai	Kategori
90 – 100	Informatif
80 - 89.99	Menuju Informatif
70 - 79.99	Cukup Informatif
60 - 69.99	Kurang Informatif
≤ 59.99	Tidak Informatif
Nilai	Kategori
90 – 100	Informatif
80 - 89.99	Menuju Informatif
70 - 79.99	Cukup Informatif
60 - 69.99	Kurang Informatif
≤ 59.99	Tidak Informatif

Saluran komunikasi program-program pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat melalui :

- Banner/spanduk
- Radio
- Televisi
- Media Cetak
- Media Online
- Media Sosial
- Tatap Muka Langsung
- Kelurahan/RT/RW/Tokoh Masyarakat

- Mushola/masjid/Gereja/Tokoh Agama
 - Pertunjukan Rakyat
- Kendala yang dihadapi kurang dukungan anggaran, Strategi komunikasi dan Agenda setting komunikasi.

2) Aplikasi Informatika

Berdasarkan Lampiran Huruf P Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Aplikasi Informatika.

Sub urusan Aplikasi Informatika ini terbagi atas Pengelolaan Domain/Sub Domain dan Pengelolaan *e-Government* lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks pengelolaan *e-Government*, maka pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Indeks SPBE terbagi atas 4 (empat) domain, yaitu pertama, Domain Kebijakan Internal SPBE. Kedua, Domain Tata Kelola SPBE. Ketiga, Domain Manajemen SPBE dan keempat, Domain Layanan SPBE.

**Tabel 2. 153 Program Aplikasi Informatika dan Indeks SPBE
Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,19	NA	NA	NA	NA
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2,55	3,07	3,07	3,16
2	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,53	NA	NA	NA	NA
	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2,70	3,50	3,30	3,40
3	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	2,29	NA	NA	NA	NA
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	2	2,50	2,50	2,30
4	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	NA	NA	NA	NA	NA

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Domain Manajemen SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	1	1,73	1,73	2,18
5	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018	3,55	NA	NA	NA	NA
	Indeks Domain Layanan SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020	NA	3,37	3,75	3,81	3,92
6	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	16,67%	50%	100%	100%	100%
7	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67%	20,8 %	31,25 %	31,25 %	62,5%
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00%	35,60 % (17/48)	19,15 % (9/47)	19,15 % (9/47)	66,12% (246/372)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel di atas, Indeks SPBE tahun 2024 sesuai Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 telah melampaui target kinerja yang ditetapkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2014-2024. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Diundangkannya sejumlah peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal.
2. Seluruh OPD sudah terlibat dalam pengelolaan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui: Implementasi Gerakan Menuju Smart City, Penerapan SMKI melalui Agen CSIRT, dll.
3. Disusunnya sejumlah dokumen pelaksanaan pada Domain Manajemen SPBE, seperti dokumen Manajemen Data, Manajemen SDM, Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Layanan dan Manajemen Aset.
4. Melaksanakan reviu berkala terhadap layanan yang ada serta mengintegrasikan layanan dengan layanan daerah/pusat dan melakukan perbaikan/peningkatan secara berkala pada semua layanan.
5. Terdokumentasikannya bukti dukung yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan Tim Evaluator Eksternal dalam mencari bukti dukung yang dibutuhkan.

Sementara itu, persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan tercatat sebesar 100%. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hasil dari program SPBE yang berupa layanan pusat data yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang dimiliki perangkat daerah, serta bertambahnya cakupan koneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa belum seluruh perangkat daerah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dikarenakan keterbatasan anggaran internet yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Persentase perangkat daerah yang terhubung sebanyak 62,5% atau 30 OPD antara lain:

1. Dinas Kominfo

2. Satpol PP
3. BKPSDM
4. BPKAD
5. Bappeda dan Litbang
6. Sekretariat Daerah
7. Sekretariat Dewan
8. Dinas Perpusip
9. Dinas Dikbud
10. Dinas Permasdes
11. BPBD
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Perintransnaker
14. Dinas Dukcapil
15. Dinas Porapar
16. Dinas PUPR
17. Dinas Perkim
18. RSUD dr. Soeselo
19. Dinas PMPTSP
20. Dinas Perikanan
21. Dinas KPTan
22. Dinas Sosial
23. Dinas P3AP2KB
24. Kecamatan Slawi
25. Inspektorat
26. Badan Kesbangpol
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
29. Dinas LH
30. Bapenda

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sudah mencapai 66,12%, dimana dari 372 layanan yang ada 246 diantaranya telah online dan terintegrasi /terpusat melalui pusat data.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugas-tugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/e-Government akan berkembang menjadi *Smart City* yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankan Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sudah memiliki sebanyak 66 fungsional Pranata Komputer yang terdiri dari 27 PNS dan 39 PPPK. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah peserta baik ASN maupun Masyarakat Kabupaten Tegal yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 154 Jumlah Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	100	100	100	100	100
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	100	0	100	100	100
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	100	0	0	0	188
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	50	0	0	0	0
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	60	60	0

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagaimana di atas, merupakan salah satu yang terpenting dalam menciptakan ekosistem Kota Cerdas (Smart City). Selain berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, Pelatihan TIK juga masuk kedalam salah satu parameter pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada urusan Komunikasi dan Informatika.

Dari tabel di atas, Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit sudah tidak dilaksanakan karena sudah tidak diterapkan lagi penilaian angka kredit bagi fungsional. Selain itu, Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City juga sudah tidak dilakukan dikarenakan pada tahun 2024 Kabupaten Tegal sudah masuk ke dalam tahap Implementasi Smart City.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pengembangan Sumber Daya TIK diantaranya adalah keterbatasan anggaran Bimtek TIK yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika serta kurangnya kesadaran akan pentingnya TIK dalam mendukung pekerjaan baik pimpinan maupun peserta pelatihan.

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Rekomendasi Izin Usaha Koperasi

Izin Usaha Koperasi merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap Koperasi sebelum menjalankan Usahanya. Dalam Pelayanan Fasilitas Izin Usaha, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal selalu memberikan rekomendasi Izin Usaha Koperasi kepada setiap Koperasi yang mengajukan Berkas Permohonan untuk Izin Usaha selama Berkas Permohonan yang diajukan sesuai dengan Aturan. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, persentase pemberian rekomendasi izin usaha dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 155 Rekomendasi Izin Usaha Koperasi

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Permohonan	16	3	4	8	10
2	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diberikan	16	3	4	8	10
3	Persentase Rekomendasi dengan jumlah permohonan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

2. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2. 156 Koperasi Aktif Tahun 2020-2024

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah koperasi aktif	256	264	274	282	300
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	182	188	189	190	164
3	Jumlah Koperasi yang akan dibubarkan	207	201	201	202	
4.	Jumlah koperasi	645	653	664	674	464
Koperasi Aktif (%)		39,68	40,42	41,26	42,37	48,42

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Kriteria Koperasi Aktif adalah Koperasi yang masih bisa diakses dan telah mengadakan RAT setiap tahun atau maksimal 2 (dua) tahun mampu melaksanakan RAT. Perkembangan jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan Koperasi sebanyak 10 Koperasi baru. Sehingga Persentase Jumlah Koperasi Aktif ini meningkat menjadi 48,42 % pada Tahun 2024.

3. Koperasi Sehat

Disamping adanya koperasi aktif, koperasi juga mempunyai kondisi dimana koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam mempunyai tingkat kesehatan bagi semua koperasi aktif yang terdiri dari Sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa setiap koperasi dilihat dari kesehatan koperasi berbeda-beda setelah diadakannya Penilaian Kesehatan bagi Koperasi.

Karena setiap koperasi sehat dan cukup sehat mesti aktif, akan tetapi belum tentu Koperasi aktif itu sehat dan cukup sehat. Dalam Perkembangan dari tahun 2020 – 2024, perkembangan Tingkat Kesehatan Koperasi sebagai berikut :

Tabel 2. 157 Koperasi Sehat Tahun 2020-2024

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sehat	11	14	25	35	29
2	Cukup Sehat	60	66	88	79	79
3	Dalam Pengawasan	28	7	10	8	11

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Dalam Pengawasan Khusus	4	2	0	0	1
5	Jumlah Koperasi(Aktif & Tidak Aktif)	438	452	463	472	464
	Persentase Koperasi DP & DPK	7,30	1,99	2,15	1,69	2,58
	Persentase Koperasi Sehat	2,51	2,65	5,39	7,41	6,25
	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,21	16,81	24,41	24,15	23,27

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari tingkat kesehatan, Jumlah Koperasi Sehat dari Koperasi yang dinilai pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebanyak 108 Koperasi atau sebesar 6,25 % jika dibandingkan dengan seluruh Jumlah Koperasi (aktif dan tidak aktif). Pencapaian ini diperoleh setelah dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi pada tahun 2024. Pencapaian Jumlah Koperasi Berpredikat SEHAT ini lebih tinggi dari Pencapaian tahun sebelumnya (25 Koperasi berpredikat SEHAT pada tahun 2022). Peningkatan capaian ini tidak lepas dari pendampingan Koperasi secara rutin dan pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal.

4. Kemitraan Koperasi

Kemitraan koperasi merupakan jalinan kerjasama usaha koperasi yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan. Berikut data kemitraan koperasi di Kabupaten Tegal :

Tabel 2. 158 Daftar Kemitraan Koperasi terhadap Jumlah Koperasi Non KSP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi Non KSP	385	385	394	402	416
2	Koperasi yang bermitra	4	6	15	16	20
3	Persentase Koperasi Bermitra	1,04	1,56	3,81	3,98	4,80

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dari data menunjukan perkembangan koperasi bermitra dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 ada penambahan jumlah Koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2024, menjadi 20 Koperasi, Koperasi yang bermitra usaha pada tahun 2024 diantaranya adalah KSU An Nisa dan Koperasi TMI yang bermitra dengan UMKM Makanan Minuman dalam fasilitasi kemasan/packaging Produk melalui Program Layanan Kemasan, Koperasi Konsumen ART Bersama, KUD Talang, Koperasi Gapoktan Budi Luhur yang ikut Program Makan Bergizi Gratis .

5. Koperasi yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan.

Dalam meningkatkan koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Tegal maka setiap tahunnya harus melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan perkoperasian dengan tujuan koperasi akan lebih baik dalam hal manajemen, kesehatan, pengelolaan dan pelayanan kepada anggota sehingga diharapkan adanya peningkatan asset dan omsetnya juga kesejahteraan bagi anggotanya. Dalam kurun waktu 2020– 2024, perkembangan jumlah koperasi yang telah dibina dan dilatih oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kab. Tegal sebagai berikut :

Tabel 2. 159 Koperasi Yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2020-2024

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Mengikuti Pelatihan	165	280	120	120	120
2	Jumlah Koperasi Tidak Mengikuti Pelatihan	273	166	343	352	344
3	Jumlah Koperasi (Aktif & Tidak Aktif)	438	446	463	472	464
Persentase Koperasi ikut Pelatihan		37,67	62,78	25,91	25,42	25,86

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari jumlah koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2024 tidak ada perubahan disbanding tahun 2023, yaitu sebanyak 120 Koperasi, namun persentase Pencapaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2023 capaian persentasenya sebesar 25,86 %, hal ini terjadi karena pembandingan data berupa Jumlah seluruh Koperasi mengalami pada tahun 2024 mengalami penurunan disbanding tahun 2023, sehingga meningkatkan persentase capaian di tahun 2024, meskipun jumlah Koperasi yang mengikuti Diklat tidak ada perubahan. Diklat yang dilaksanakan diantaranya Pelatihan Digital Koperasi berbasis TI, Pelatihan Perpajakan Koperasi, dan Pelatihan Prinsip-prinsip Perkoperasian bagi Wirausaha Muda/Milenial.

6. Jumlah Anggota Koperasi yang Kompeten

Dari jumlah Koperasi yang telah dibina dan dilatih, jumlah SDM atau Anggota Koperasi yang dibina dan dilatih sehingga berkompeten selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 160 Data Anggota Koperasi yang sudah Mengikuti Diklat dan Pembinaan Tahun 2020-2024

No	Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peserta Diklat / Pembinaan Perkoperasian	275	280	360	240	310
2	Jumlah Seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi	3.066	2.207	2.086	2.134	2.784
Persentase SDM Koperasi yang Kompetensi		8,96	12,68	17,25	11,24	11,13

Sumber : Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal, 2024

Dilihat dari Jumlah SDM Koperasi yang sudah mengikuti Diklat atau Pembinaan, pada tahun 2022, jumlah peserta yang ikut diklat jika dibandingkan dengan tahun 2023, jumlahnya mengalami peningkatan, yaotu sebanyak 310 Orang, namun Persentasenya mengalami penurunan dari tahun 2023, Dimana pada tahun 2023, persentase peserta yang ikut diklat sebesar 11,24 %, sedangkan persentase jumlah SDM Koperasi yang dilatih pada tahun 2024 sebesar 11,13% ,hal ini disebabkan jumlah seluruh Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga berpengaruh pada capaian persentase Peserta Diklat.

7. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UMKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UMKM.

Agar keberadaan UMKM dapat diakui dan dikembangkan, salah satunya adalah status legalitas usaha, dimana legalitas usaha akan menentukan bentuk UMKM menjadi formal atau non formal, dengan adanya legalitas usaha akan mempermudah UMKM Formal untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha, dikarenakan sumber-sumber pembiayaan yang ada sekarang ini cenderung menysasar target UMKM formal yang memiliki legalitas.

Dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2023, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2022 jumlah seluruh UMKM sejumlah 117.225. dan sejumlah 10.259 UMKM merupakan UMKM formal yang memiliki profil seperti NIK, NIB (OSS), IUMK, SIUP dll. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 161 Jumlah UMKM Non BPR/LKM Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Jumlah per tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah seluruh UMKM	172.761	113.000	117.225	132.225	132.225
2	UMKM formal	7.368	9.916	10.259	20.037	37.447
3	UMKM non Formal	165.393	103.084	106.966	112.188	94.778
4	UMKM yang dibina	951	1.814	13.025	20.037	37.447
5	UMKM yang bermitra	25	38.662	43.455	43.502	43.773
6	UMKM yang naik kelas	5	7	12.141	1.660	10.325
7	Persentase Usaha Mikro berizin dan bersertifikasi	4,26%	8,78%	8,75%	15,15%	28,32 %
8	Persentase UMKM menjadi wirausaha	0,01 %	34,21%	37,06 %	32,89 %	33,10 %
9	Persentase UMKM Naik Kelas	0,002 %	0,007	10,35 %	8,28 %	27,57 %
10	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	0,00%	99,97%	7,69%	0,11%	0,62 %

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

Setelah dilakukan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM pada tahun 2024 sebanyak 37.447 UMKM dari 132.225 UMKM telah dibina dengan hasil kepemilikan NIB, kemudian sebanyak 43.502 UMKM telah menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder terkait seperti BI, BRI, Bank Jateng, Bank TGR dan beberapa Toko modern berjejaring. Hasil dari Pemberdayaan, Pengembangan, Inkubasi, dan fasilitasi sertifikasi perizinan maupun kemitraan, sebanyak 10.325 UMKM pada tahun 2024 telah diasumsikan NAIK KELAS dengan memenuhi standar Perizinan seperti NIB hingga sertifikasi Produk baik PIRT hingga Sertifikasi Halal. Diharapkan dengan Pembinaan dan Pendampingan Usaha bagi UMKM ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

L. Penanaman Modal Daerah

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 162 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2020 – 2024

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi	Jumlah Investor	Nilai Investasi
2020	11.457	1.505.752.522.252	5	295.414.417.735
2021	10.457	768.665.669.374	4	883.975.831.657
2022	7.973	940.302.377.858	3	935.645.690.000
2023	13.125	680.813.329.238	22	1.358.754.020.000
2024	20.015	1.257.483.173.471	45	1.533.061.437.279

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan pada Jumlah Investor PMA dari Tahun 2023 sejumlah 22 Investor meningkat pada Tahun 2024 dengan jumlah investor 45, dan capaian Relaisasi Investasi Rp. 2.790.545.995.174. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMA mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) Peningkatan Calon Investor

Tabel 2. 163 Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Calon Investor Berkomitmen	31	32	36,43	40,00	50

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada tahun 2024 adanya investor yang masuk ke Kabupaten Tegal, tahun selanjutnya hanya melanjutkan dari tahun 2022 yang belum berkomitmen.

3) Nilai Investasi

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2024 ada peningkatan realisasi Investasi dengan capaian realisasi Investasi Rp. 2.790.545.995.174 dari target Rp. 1.600.000.000.000 capaian 182%. Dengan demikian realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus dan terus semakin ditingkatkan.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Ketepatan waktu Perizinan

Ketepatan waktu perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) mengacu pada Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko. Untuk ketepatan waktu perizinan berusaha dan nonperizinan diluar OSS RBA mengacu pada SK Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, dengan mendasari ketentuan dari Kementerian/ Lembaga masing – masing. Sehingga Ketepatan waktu pelayanan perizinan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, terkait ketepatan waktu perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 164 Ketepatan waktu Perizinan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketepatan waktu Perizinan	N/A	89	89	96,69	91,92

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Dengan melihat tabel di atas pada tahun 2021 – 2024 Ketepatan waktu Perizinan sama karena adanya beberapa faktor yang menjadikan tidak tepat waktu antara lain:

- Pemohon yang tidak segera melengkapi kekurangan berkas sebagai syarat permohonan perizinan.
- Terjadi Maintenance aplikasi OSS dan Si Cantik.

b. Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 165 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan Masyarakat perizinan	78,08	88,86	89,77	90,75	91,92

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang tersedia berdasarkan dengan regulasi yang sudah diubah, sehingga pemohon belum menyesuaikan dengan persyaratan pelayanan dengan regulasi yang baru.

Dengan melihat tabel di atas pada tahun 2020 – 2024 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik. Kurangnya komunikasi antara petugas dan pemohon pengajuan perizinan dan non perizinan baik melalui media sosial maupun media elektronik lainnya (website), brosur/leaflet agar pemohon mengerti betul persyaratan pelayanan dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

5) Program Pengendalian

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melalui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 166 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan berizin	771	10.457	7.263	22.187	20.065
2	Jumlah Perusahaan	1258	16.087	7.972	22.187	20.065
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	61,28	65	68.33	95,40	75,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Dengan kesempurnaan Aplikasi System OSS yang sudah Update, secara otomatis Perusahaan yang muncul pada Aplikasi OSS hanya perusahaan yang sudah berizin/melengkapi pemenuhan komitmen. Sehingga Jumlah Perusahaan yang sudah berizin dan Jumlah Perusahaan adalah sama. Persentase kepatuhan Perusahaan terealisasi 75,00% dari target 73,28, hal ini karena adanya dukungan pengawasan, fasilitasi pada pelaku usaha dalam pemenuhan administrasi perusahaan.

6) Program Pengelolaan Data

Tabel 2. 167 Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Data Layanan yang Termanfaatkan	6,29	8,81	10,71	15,28	14,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2024

Dengan adanya aplikasi OSS-RBA para pemohon dapat memanfaatkan data sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk persentase data layanan hanya dari dinas/instansi/Badan/Organisasi yang membutuhkan data layanan yang dihitung.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudatan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Tabel 2. 168 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,099	0,124	0,150	0,176
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,069	0,071	0,073	0,076

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri untuk periode tahun 2021 hingga 2024 tidak tercapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah dalam pengumpulan data yang menghambat analisis yang akurat.

Salah satu kendala utama adalah adanya data ganda (dobel) yang tercatat, yang menyebabkan angka partisipasi yang sebenarnya menjadi tidak jelas dan terekam lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, data yang diterima dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tidak menyertakan informasi penting, seperti usia dan alamat, yang sangat diperlukan untuk memverifikasi apakah individu yang tercatat memang termasuk dalam kelompok pemuda yang dimaksud.

Ketiadaan data yang lengkap dan akurat ini menyebabkan perencanaan dan evaluasi kegiatan ekonomi mandiri yang melibatkan pemuda menjadi kurang optimal, serta sulitnya mencapai target yang sudah ditetapkan. Agar target dapat tercapai di tahun-tahun mendatang, perbaikan dalam pengumpulan data, termasuk validasi informasi dan pencatatan yang lebih teliti, sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program-program yang bertujuan melibatkan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Tabel 2. 169 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan prestasi olahraga	61	7	9	48	25
2	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	75	77,78	83,33	91,67	100

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal 2024

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Tegal dari tahun 2020 hingga 2024, yang tercermin dalam jumlah kumulatif medali yang diraih di tingkat provinsi, nasional, dan internasional, menunjukkan perkembangan yang positif. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kualitas atlet yang semakin meningkat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Tegal. Ke depan, diharapkan prestasi ini terus meningkat dan membawa kebanggaan bagi Kabupaten Tegal, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yaitu POPDA Tingkat Kabupaten, POPDA Tingkat Ex. Karisidenan, POPDA Tingkat Provinsi, PORKAB, PORPROV, PEPARDA, Even-even Kejuaraan Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Tegal, pembinaan cabang olahraga (Cabor) menjadi bagian penting dalam meningkatkan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Pembinaan ini dilakukan oleh berbagai organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Tegal, yang masing-masing memiliki peran dan cakupan cabang olahraga yang berbeda.

Terdapat tiga organisasi utama yang membina cabang olahraga di Kabupaten Tegal, yaitu:

- 1) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia): Merupakan organisasi yang membina 27 cabang olahraga yang mencakup olahraga yang lebih populer dan sering diikuti sertakan dalam kompetisi tingkat provinsi dan nasional.
- 2) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia): Memiliki 4 cabang olahraga yang lebih fokus pada olahraga rekreasi dan kegiatan fisik yang bersifat lebih santai namun tetap mendukung kesehatan dan kebugaran masyarakat.

- 3) NPC (National Paralympic Committee): Organisasi ini fokus pada pembinaan cabang olahraga untuk atlet disabilitas, meskipun jumlah cabang olahraga yang dibina oleh NPC tidak disebutkan secara spesifik, organisasi ini sangat penting dalam meningkatkan akses dan peluang bagi atlet dengan kebutuhan khusus.

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal dengan menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi data statistik sektoral pada pusat data yang terintegrasi dari setiap perangkat daerah dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Data Statistik Sektoral yang reliable, up to date dan relevan memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Secara umum, pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data, OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta kebutuhan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 170 Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral Pada SIM Open Data, OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Kebutuhan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pemanfaat Data Statistik Sektoral pada SIM Open Data	10.000	18.000	37.919	149.949	337.304
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	38,15%	45,38%	87,2%	87,2%	87,54%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2023

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2020 sampai 2024 jumlah pemanfaat data statistik sektoral dan persentase kebutuhan data statistik tidak memiliki nilai, dikarenakan regulasi untuk melakukan kegiatan statistik sektoral belum ada. Perpres yang mengatur segala sesuatu tentang kegiatan statistik sektoral baru dikeluarkan pada tahun 2019 yakni Prepres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Jumlah pemanfaat dan kebutuhan data statistik teridentifikasi setelah tahun 2019 dimana sudah tersedianya sistem informasi yang memuat kebutuhan data-data statistik sektoral yakni aplikasi Open Data.

Dari tabel di atas terlihat pada Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah terisi nilai 100% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hal ini dikarenakan seluruh perangkat daerah pada hakekatnya pasti menggunakan data statistik dari tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, meskipun masih sebatas data statistik internal.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dipahami bahwa persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2024 mengalami peningkatan 0,34% dari tahun 2023. Tahun 2022 (87,2%) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan persentase kebutuhan data statistik yang tersedia di tahun 2021 (45,38%). Peningkatan tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Forum Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal sehingga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Perangkat Daerah akan ketersediaan data.
- Bimbingan Teknis Operator Open Data. Yang mana Operator masing-masing Perangkat Daerah diberikan bimbingan mengenai bagaimana standar format data yang baik dan benar hingga cara mengupload/mengunggah data pada SIM Open Data.
- Sosialisasi Perbup Tegal No.62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal. Yang mana setelah adanya sosialisasi tersebut, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal paham mengenai Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal. Namun tersedianya data pada SIM Open Data Kabupaten Tegal saat ini belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh Walidata, dimana beberapa hal yang mempengaruhi belum terlaksananya verifikasi dan validasi data tersebut antara lain:
- Keterbatasan atau tidak tersedianya SDM pengelola data pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Statistik, terutama dalam penyediaan statistik sektoral.
- Operator Open Data yang dipindah tugaskan ke Dinas lain sehingga meninggalkan tugasnya sebagai Operator Open Data pada Dinas sebelumnya dan kegiatan pengelolaan data pada Dinas tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, sejumlah agenda percepatan peningkatan kebutuhan data statistik secara masif tengah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan bintek operator open data secara rutin. Sedangkan untuk jumlah pemanfaatan data statistik sektoral sendiri meskipun belum memenuhi angka yang diharapkan namun sudah adanya peningkatan



yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2022 yang mana pada akhir tahun 2022 kurang lebih sekitar 37.919 pemanfaatan hal ini juga didasari oleh adanya kegiatan *Statistic Coaching Clinic (SCC)* dan Bimtek Operator Open Data dimana kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah pengunjung pada SIM Open Data.

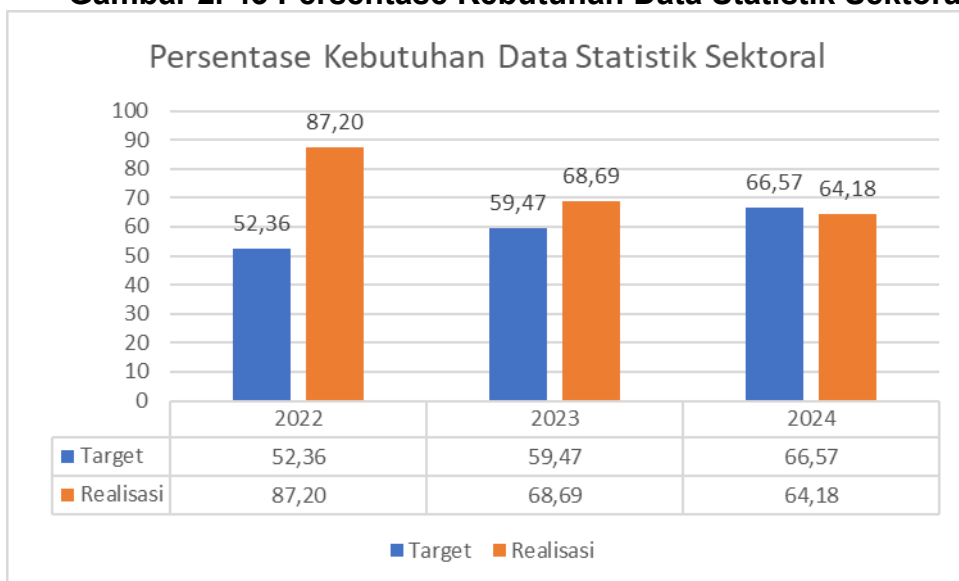
Pada tahun 2022, realisasi persentase kebutuhan data statistik yang tersedia melebihi target yang telah ditentukan, yaitu mencapai 87,2 (delapan puluh tujuh koma dua persen). Tercapainya realisasi persentase kebutuhan data statistik yang tersedia karena organisasi perangkat daerah (OPD) selaku produsen data telah diberikan bimbingan teknis dalam mengelola data sektoral dan mempublikasinya melalui portal open data Kabupaten Tegal (data.tegalkab.go.id).

Pada tahun 2023, realisasinya mengalami penurunan karena Pemerintah Kabupaten Tegal sudah menetapkan daftar data prioritas yang harus dipenuhi oleh semua Produsen Data. Penetapan Data Prioritas Tahun 2023 berdampak terhadap perhitungan prosentase kebutuhan data statistik yang tersedia karena perhitungan nilai pembilang dan penyebutnya juga berbeda. Nilai penyebutnya cenderung meningkat, sehingga berimplikasi terhadap turunnya nilai realisasi meskipun secara target melampaui.

Selama kurun waktu tahun 2022 dan 2023, realisasi dari indikator persentase kebutuhan data statistik yang tersedia melampaui dari target yang ditentukan. Capaian realisasi ini tentunya melebihi dari ekspektasi target yang dipasang. Terpenuhinya target tahun 2022 dan 2023 tidak terlepas dari penyelenggara satu data Kabupaten Tegal yaitu Pembina Data, Sekretariat Data, Walidata, dan Produsen Data. Namun demikian, persentase kebutuhan data statistik sektoral masih dibawah 70% (tujuh puluh persen) yang tentunya harus masih ditingkatkan.

Pada tahun 2024, dari indikator persentase kebutuhan data statistik yang tersedia adalah 66,57% dengan capaian realisasi sebesar 64,18%. Meskipun tidak tercapai seperti dua tahun sebelumnya, tetapi realisasi tahun 2024 hanya terpaut sedikit dari target yang ditentukan. Jika dilihat dari prosentase capaian dari target, maka prosentasenya adalah 96,41%, artinya kendati belum tercapai 100% namun demikian sudah mencapai 95% dari target yang disepakati. Secara umum, dari tiga tahun terakhir grafik capaian kinerja pada indikator indikator persentase kebutuhan data statistik yang tersedia dapat di lihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2. 43 Persentase Kebutuhan Data Statistik Sektor



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Data statistik sektoral memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan di instansi pemerintah. Ketersediaan data yang akurat dan terkini dapat membantu meningkatkan efektivitas program serta transparansi dalam pelayanan publik. Namun, tidak semua kebutuhan data statistik sektoral dapat terpenuhi secara optimal. Ketersediaan data statistik sektoral sering kali bergantung pada faktor-faktor berikut:

- Sistem Pengumpulan Data
- Keberlanjutan dalam survei dan sensus sangat menentukan cakupan data.
- Regulasi dan Kebijakan
- Kebijakan keterbukaan data serta standar pengelolaan data sangat memengaruhi aksesibilitas.
- Teknologi dan Digitalisasi
- Pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data dapat meningkatkan cakupan dan akurasi data yang tersedia.
- Koordinasi Antarinstansi
- Kerja sama yang baik antar instansi pemerintah dalam berbagi data sektoral dapat meningkatkan ketersediaan informasi.

Beberapa tantangan utama dalam ketersediaan data statistik sektoral bagi instansi pemerintah meliputi:

- Kurangnya komitmen Kepala OPD
- Kepala OPD selaku Walidata Pendukung belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal
- Akses Data yang Terbatas
- Beberapa data sektoral bersifat terbatas atau hanya tersedia untuk instansi tertentu.
- Inkonsistensi dalam Metode Pengumpulan Data
- Perbedaan metode pengumpulan antar sektor dapat menyebabkan ketidaksesuaian data.

- Masih minimnya penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang terdiri dari standar data, meta data, interoperabilitas data dan kode referensi

Untuk Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral, dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- Meningkatkan komitmen penyelenggara satu data khususnya Walidata Pendukung dan Produsen Data
- Meningkatkan Investasi dalam Infrastruktur Data
- Mendorong Kebijakan dan Tata Kelola Data.
- Memperkuat Kolaborasi Antarinstansi
- Menggunakan Teknologi Big Data dan AI Untuk mempercepat pengumpulan, analisis, dan penyajian data sektoral.
- Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan dalam bidang statistik serta manajemen data.

Ketersediaan data statistik sektoral yang memadai sangat penting bagi instansi pemerintah dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan meningkatkan investasi dalam infrastruktur data, memperkuat regulasi keterbukaan data, serta meningkatkan koordinasi antarinstansi, persentase kebutuhan data statistik sektoral yang tersedia dapat meningkat secara signifikan. Pemanfaatan teknologi juga akan menjadi faktor kunci dalam memastikan aksesibilitas dan kualitas data yang lebih baik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

O. Persandian

Urusan persandian merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada keamanan informasi dan perlindungan data. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, perlindungan terhadap informasi pemerintah menjadi krusial untuk mencegah ancaman siber, kebocoran data, dan akses tidak sah terhadap informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Tegal bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Urusan persandian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk:

1. Menjamin keamanan informasi pemerintahan dengan penerapan sistem persandian yang andal.
2. Meningkatkan perlindungan data dan komunikasi pemerintah dari ancaman kebocoran dan serangan siber.
3. Meningkatkan kapasitas SDM persandian dalam mengelola keamanan informasi secara profesional.
4. Mengembangkan infrastruktur keamanan informasi yang modern dan sesuai standar nasional.

Dalam penyelenggaraan urusan persandian salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah tingkat keamanan informasi dari perhitungan penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan

informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui.

Prosentase Tingkat keamanan informasi menjadi Indikator urusan persandian yang masuk pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Acuan Tingkat Keamanan Informasi berpedoman pada Indeks Keamanan Informasi Versi 4 yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) adalah alat evaluasi yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di berbagai organisasi, termasuk instansi pemerintah dan sektor industri. Alat ini dirancang untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi, sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Pada Maret 2019, BSSN merilis Indeks KAMI versi 4.0, yang kemudian diperbarui menjadi versi 4.1. Versi ini menawarkan alat evaluasi yang lebih komprehensif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menilai kesesuaian persyaratan terkait penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indeks KAMI terdiri dari beberapa area penilaian yang mencakup berbagai aspek keamanan informasi, antara lain:

1. Kebijakan Keamanan Informasi: Menilai keberadaan dan implementasi kebijakan keamanan informasi dalam organisasi.
2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi: Mengevaluasi proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko terkait keamanan informasi.
3. Kerangka Kerja Manajemen Keamanan Informasi: Menilai struktur dan tanggung jawab dalam pengelolaan keamanan informasi.
4. Pengelolaan Aset Informasi: Mengevaluasi pengelolaan aset informasi yang dimiliki oleh organisasi.
5. Teknologi dan Keamanan Informasi: Menilai penerapan kontrol teknis untuk melindungi informasi.

Setiap area penilaian memiliki serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat kematangan dan kesiapan organisasi dalam menerapkan praktik keamanan informasi. Hasil evaluasi ini memberikan wawasan bagi organisasi mengenai area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai standar keamanan informasi yang optimal. Dengan menggunakan Indeks KAMI versi 4, organisasi dapat secara mandiri menilai dan meningkatkan posture keamanan informasi mereka, sehingga mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam. Nilai maksimal Indeks KAMI Versi 4 adalah 645. Perhitungan Prosentase Nilai Tingkat Keamanan Informasi adalah Nilai dari Indeks KAMI dibagi Nilai Maksimal Indeks KAMI dikalikan 100% (seratus persen), yang secara detail rumus perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 2. 171 Indeks Keamanan Informasi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keamanan Informasi	262	294	335	440	440
2	Tingkat Keamanan Informasi	40,62%	45,58 %	52,56 %	68,22 %	68,22 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

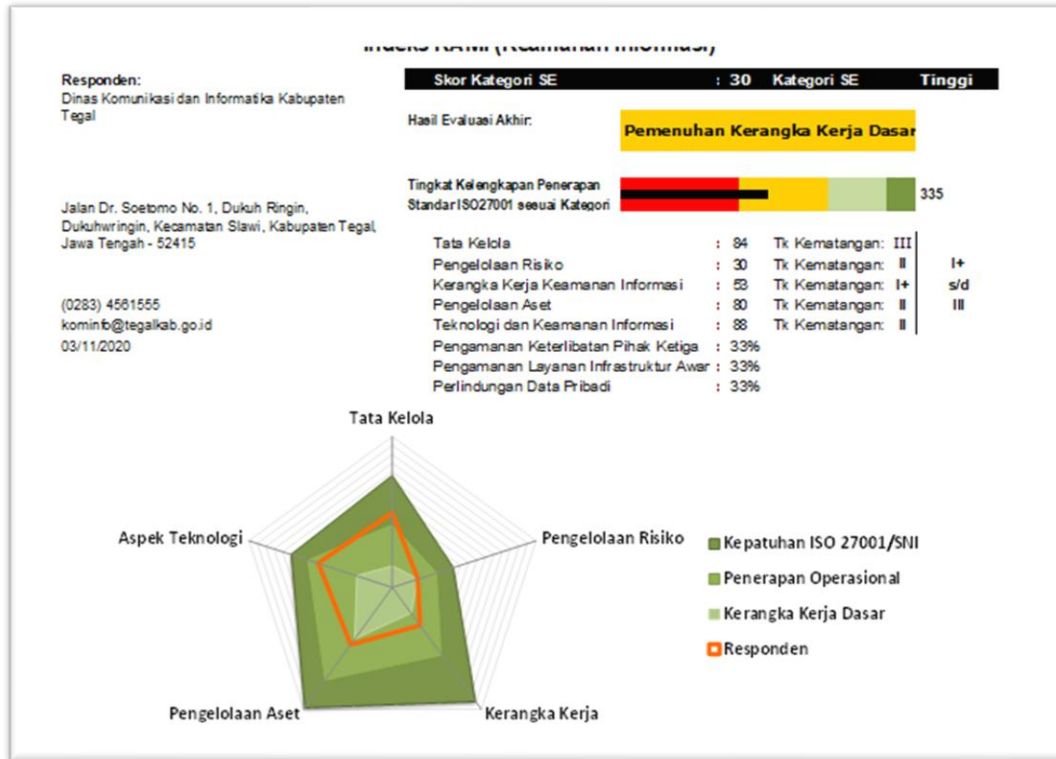
Pada tahun 2019, Framework Indeks KAMI diampu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sebelumnya menjadi tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Hasil penilaian Indeks KAMI 2019 sama dengan hasil penilaian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian KOMINFO karena tidak ada perubahan pada setiap area.

Pada Tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal mencoba melakukan self assessment dengan konsultan dengan hasil penilaian adalah 262 dari nilai maksimal sebesar 645. Dari nilai ini tingkat keamanan informasi baru didapatkan sebesar 40,62%, yang artinya masih dibawah 50% (lima puluh persen. Pendampingan dari Konsultan dapat berdampak positif dengan melakukan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan nilai indeks KAMI. Alhasil, pada tahun 2021, nilai Indeks KAMI meningkat menjadi 294 meskipun dilakukan melalui metode *self assessment*. Nilai pada tahun 2021, lebih baik daripada tahun sebelumnya karena hasil rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dilengkapi bukti dukung yang dapat dijadikan evidence untuk penilaian. Pada saat mengajukan penilaian Indeks KAMI ke BSSN terjadi pandemic COVID-19 dan anggaran dilakukan refocusing sehingga pengajuan penilaian oleh Tim BSSN gagal dilakukan.

Pada Tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal memasang target Prosentase Tingkat Keamanan Informasi senilai 50% (lima puluh persen) atau senilai Indeks KAMI sebesar 323. Hasil penilaian Indeks KAMI diperoleh sebesar 335, sehingga Prosentase Tingkat Keamanan Informasinya sebesar 51,94% (lima puluh satu koma sembilan puluh empat persen). Area Kerangka Kerja Keamanan Informasi menjadi area dengan tingkat kematang terendah yaitu masuk pada tingkat keamanan I+. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal perlu melakukan evaluasi pada area ini agar pada tahun selanjutnya dapat ditingkatkan. Area Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Aset dan Teknologi & Keamanan Informasi masuk dalam kategori tingkat kematangan II yang tentunya juga perlu diperhatikan agar kelak dapat diperbaiki. Area Tata Kelola menjadi area dengan tingkat keamanan tertinggi yaitu

masuk dalam tingkat kematangan III. Nilai tingkat kematangan III pada area ini tidak terlepas dari beberapa kebijakan dan prosedur yang sudah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Grafik nilai Indeks KAMI Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 44 Nilai Indeks KAMI Tahun 2022



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2024

Pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam melakukan penilaian Indeks KAMI menggunakan Jasa Konsultan yang harapannya beberapa kekurangan dokumen dapat dibantu oleh Tenaga Ahli untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI. Instrumen evaluasi diberikan dalam bentuk kuesioner. Kuesioner didapatkan dari Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal untuk kemudian direkapitulasi dan dianalisis untuk mendapatkan hasil berupa gambaran kesiapan penerapan SMPI di lingkungan Diskominfo Kabupaten Tegal.

Penilaian yang pertama berkaitan dengan kategorisasi sistem elektronik yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Tegal. Hasil pengkategorian sistem elektronik untuk Diskominfo Kabupaten Tegal diperoleh nilai sebesar 34 dengan tingkat ketergantungan tinggi. Implikasinya adalah Dinas komunikasi informatika Kabupaten Tegal harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001; serta wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Indeks keamanan Informasi beserta Tingkat Keamanan Informasi pada tahun 2020 – 2024 selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 tingkat keamanan informasi di Kabupaten Tegal memiliki presentase sebesar 68,22% atau 27,60% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020.

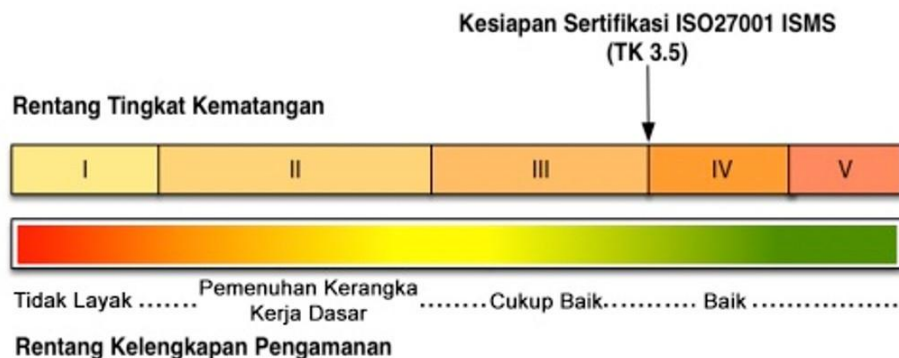
Untuk penilaian lima area utama Indeks KAMI yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan Informasi, rekapitulasi skor disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 172 Rekapitulasi Penilaian Lima Area Utama

NO	DOMAIN	SKOR KELENGKAPAN	TINGKAT KEMATANGAN
1.	Tata Kelola	86	II+
2.	Risiko	25	I+
3.	Kerangka Kerja	100	II
4.	Pengelolaan Aset	127	II
5.	Teknologi	102	II+
Total		440	I+ sampai dengan II+
Kategori Sistem Elektronik : Tinggi (34)			
Hasil Evaluasi Akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar			

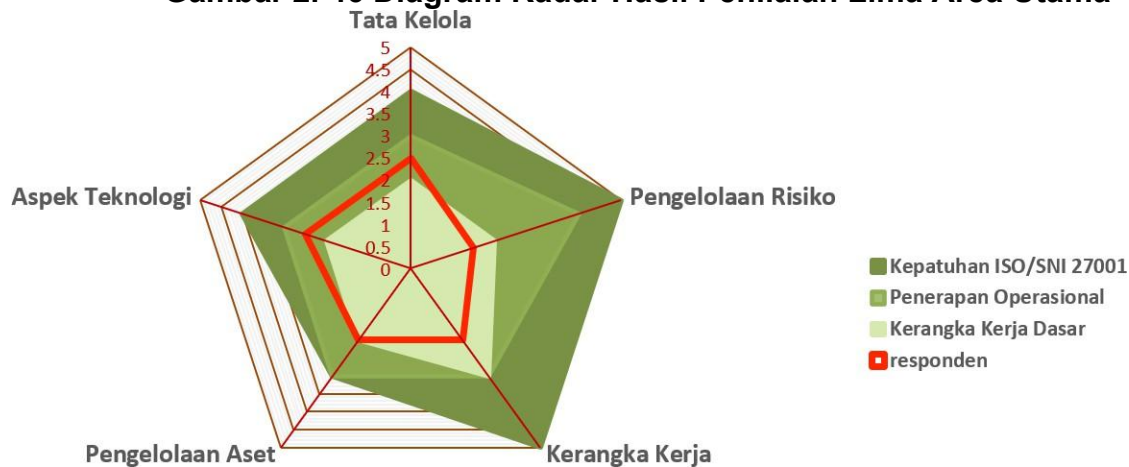
Dari tabel 2.170 dapat dilihat bahwa untuk hasil penilaian kelengkapan, Diskominfo Kabupaten Tegal mendapatkan skor 440 dengan status Sistem Elektronik “tinggi”. Dengan memperhatikan skor kelengkapan dan status sistem elektronik, diperoleh status kesiapan Indeks KAMI untuk Diskominfo Kabupaten Tegal yaitu “Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar”. Adapun status kesiapan ini masih di bawah status kesiapan berikutnya yaitu “Cukup baik” dan “Baik” (gambar 2). Jika dilihat dari level kematangan setiap area, belum ada area yang mencapai level kematangan III+. Sebagai padanan untuk dapat memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001, minimal harus mendapatkan level kematangan III+ pada semua area.

Gambar 2. 45 Acuan untuk Kesiapan Sertifikasi ISO 27001



Skor untuk area Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset, serta Teknologi dan Keamanan Informasi berturut-turut adalah: 86, 25, 100, 127, 102. Skor ini kemudian akan dibandingkan dengan skor acuan untuk Kerangka Kerja Dasar, Penerapan Operasional, dan Kepatuhan ISO 27001/SNI. Hasil dari perbandingan skor yang didapatkan dengan skor acuan disajikan dengan diagram radar lima area utama Indeks KAMI pada Gambar 2.46.

Gambar 2. 46 Diagram Radar Hasil Penilaian Lima Area Utama



Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa area Pengelolaan Risiko, area Kerangka Kerja, dan area Pengelolaan Aset masih berada dalam tahap Kerangka Kerja Dasar. Area Teknologi dan area Tata Kelola sudah berada dalam tahapan Penerapan Operasional. Dengan demikian masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pada kelima area untuk menuju ke Kepatuhan ISO 27001/SNI.

Rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk lima area utama dan suplemen merupakan rekomendasi teknis yang menyesuaikan dengan persyaratan pengamanan informasi berdasarkan Indeks KAMI. Untuk mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi tersebut dan mengatur langkah bagi penerapan SMPI, diperlukan peta jalan (roadmap) untuk perbaikan dalam rangka menuju ISO 27001. Roadmap penerapan (SMPI) ini dirancang guna memberikan arahan bagi Diskominfo Kabupaten Tegal dalam upaya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Tegal untuk periode dua tahun pertama (2024-2025).

Fokus kegiatan pada tahun pertama adalah: (1) penguatan organisasi pengelola keamanan informasi, (2) pembuatan/pemutakhiran dokumen-dokumen berkaitan dengan keamanan informasi, dan (3) pelaksanaan kegiatan pengamanan informasi. Penguatan organisasi pengelola keamanan informasi dapat dilakukan dengan cara:

- Menegaskan kembali tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dalam pengamanan informasi.
- Membentuk tim-tim terkait pengamanan informasi yang dibutuhkan, misalnya: tim perancang, pengelola, dan pelaksana Business continuity plan (BCP) & Disaster recovery plan (DRP).
- Meningkatkan kompetensi tim pengelola keamanan informasi.

Fokus pada tahun ke dua lebih diarahkan pada kegiatan pemantauan, evaluasi dan peningkatan pengamanan informasi. Diharapkan pada akhir tahun ke dua (2025), Diskominfo Kabupaten Tegal telah berhasil mencapai level kematangan Indeks KAMI III+ sebagai persyaratan untuk dapat menerapkan ISO 27001. Roadmap penerapan SMPI ini disusun dengan memperhatikan area-area utama yang paling membutuhkan perbaikan.

Dari hasil pendampingan Tenaga Ahli didapatkan nilai prosentase Tingkat Keamanan Informasi pada tahun 2023 didapatkan sebesar 68,22% dan pada tahun 2024 juga memperoleh hal yang sama karena tidak ada perubahan lagi yang terbentur dengan ketersediaan anggaran untuk membuat Dokumen Risk Register, Manajemen Risiko TIK, Bussiness Contiunity Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DRP) dan perangkat keras serta lunak keamanan informasi. Nilai Indeks KAMI dari tahun 2019-2024 baru sebatas penilaian self assessment mandiri Dinas KOMINFO dan Konsultan, belum pernah langsung dinilai oleh BSSN RI.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana didalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dimiliki oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahan-perubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel 2. 173 Kondisi Budaya Tahun 2020– 2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tradisi yang dikembangkan	50	60	71,43	85,71	86,54
2	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	79,96	80,81	77,34	87,14	100
3	Persentase Sumber Sejarah yang terdokumentasi	76,47	70,59	82,35	88,23	87,5
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	45,83	14,67	51,51	66,66	61,54
5	Persentase Museum yang dikelola	65	100	100	100	100
6	Pertumbuhan Ekosistem Perfilman Warisan Budaya Daerah	N/A	N/A	N/A	37,5	37,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Secara umum, terjadi peningkatan dalam persentase tradisi yang dikembangkan, yang naik dari 50% pada tahun 2020 menjadi 86,54% pada tahun 2024. Persentase seni dan kesenian yang dibina juga mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024, mencerminkan keberhasilan dalam pembinaan seni daerah. Persentase sumber sejarah yang terdokumentasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Sementara itu, terlestarinya cagar budaya mengalami fluktuasi, dengan penurunan

pada 2021 dan sedikit penurunan kembali pada 2024 setelah peningkatan di tahun 2023. Persentase museum yang terkelola tetap konsisten di angka 100% sejak 2021, menunjukkan pengelolaan yang optimal. Indikator baru, yaitu pertumbuhan ekosistem perfilman warisan budaya daerah, mulai tercatat pada tahun 2023 dengan angka 37,5%, yang stagnan pada 2024. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam beberapa indikator, tren kondisi budaya di Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan yang positif, terutama dalam aspek pengembangan seni dan dokumentasi sejarah.

Berdasarkan hasil inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi, pada Tahun 2020 telah dilakukan penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Tegal yang memuat jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagai berikut :

Tabel 2. 174 Jumlah Obyek Kebudayaan Kabupaten Tegal

No	Obyek Kebudayaan	Jumlah
1	Bahasa	4
2	Manuskrip	1
3	Adat Istiadat	12
4	Ritus	11
5	Tradisi Lisan	75
6	Pengetahuan Tradisional	73
7	Teknologi Tradisional	10
8	Kebudayaan Seni	36
9	Permainan Rakyat	26
10	Olahraga Tradisional	10
11	Cagar Budaya	21
	Jumlah	279

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2024

Obyek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Tegal sebanyak 279. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) merupakan warisan hidup yang dipraktikan dan diekspresikan oleh para pelaku kebudayaan dalam bentuk tradisi lisan, tembang/kidung, seni pertunjukan, ritual, keahlian kriya dan seni. Berikut daftar WBTB Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan antara lain Tari Topeng Endel dan Buka Kitab Rembang. Dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjadi energi semangat bersama untuk melestarikan, tidak hanya masyarakat saja selaku pelaku akan tetapi Pemerintah Daerah juga harus mendukung adanya pelestarian kebudayaan di Kabupaten Tegal agar nilai-nilai budaya dan kearifian lokal tetap terjaga, sehingga sangat dibutuhkan prioritas pengelolaan, penguatan, dan perlindungan untuk pemajuan kebudayaan, agar mampu menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi manusia.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator

Perpustakaan selama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 175 Indikator Perpustakaan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan pemustaka	20.898	33.162	170.233	401.661	260.141
2.	Peningkatan koleksi judul	2.401	4.589	1.458	383.751	282.197
3.	Peningkatan perpustakaan berbasis TIK	20	28	51	52	53
4.	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	n/a	72,63	66.22	70.22	70.00
5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	21,70	48.87	30.88	48,08

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2024 diukur melalui survey secara online dan mengisi formulir kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 1.765 orang dengan skor 70,00 (kategori tinggi), dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan, dikarenakan pada variabel Durasi Membaca dan Jumlah Buku Dibaca mengalami penurunan skor.

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) diperoleh dari metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan Aspek masyarakat (AM). Di tahun 2024 memiliki skor 48,08 (Rendah), dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, tetapi masih dalam kategori rendah, hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyaratan. Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perkembangan. Perkembangan perpustakaan pada tahun 2019-2024 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 176 Jumlah Perpustakaan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah (milik Pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah mobil perpustakaan keliling	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	63	63	64	98	98
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat Ibadah	21	21	21	21	21
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	26	26	26	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	10	12	12	25	25
	Total Perpustakaan	124	126	127	174	174

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah

pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung dan koleksi buku Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 177 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	16.741	12.264	15.478	3.198	7.266
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	4.157	0	9.119	9.119	2.087
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	51.864	53.822	55.522	56.514	56.542

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Tahun 2024 jumlah pengunjung di Perpustakaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengalami kenaikan, sedangkan Perpustakaan Keliling mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi menurunnya pengunjung ke Perpustakaan Keliling. Di samping itu juga kegiatan perpustakaan keliling lokasi yang dikunjungi sedikit karena anggarannya juga sedikit. Jumlah koleksi buku perpustakaan seluruh Kabupaten Tegal setelah dilakukan pendataan, ada kurang lebih 564.197 koleksi buku dan 282.197 judul buku, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mana dalam perhitungan 1.745.278 jiwa orang dan setiap orang paling tidak membaca 3 judul buku, koleksi buku perpustakaan se Kabupaten Tegal masih sangat kurang.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai dari 2 aspek, yaitu kualitas pengelolaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah (dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dan kualitas pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Guna mengukur tingkat kualitas pengelolaan kearsipan dimaksud, ANRI telah mengeluarkan Instrumen Audit Kearsipan Internal dan Instrumen Audit Kearsipan Eksternal. Dan hasil dari pengukuran tingkat kualitas tersebut akan menghasilkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE). Secara umum kualitas pengelolaan kearsipan Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai kedua aspek tersebut dengan proporsi 60% nilai LAKE ditambah 40% nilai

LAKI. Berikut data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 178 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	73	73	78	69.02	69,06
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan Nilai LAKI Cukup	Belum dilakukan penilaian	1 OPD	12 OPD	23 OPD	40 OPD

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2024

Pada tahun 2024, ANRI melakukan perubahan instrumen Audit Kearsipan Eksternal bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dampak dari perubahan tersebut, nilai LAKE LKD menurun dengan berdasarkan standar penilaian yang baru. Di Tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten selaku Lembaga Kearsipan Daerah belum melaksanakan Audit Kearsipan Internal. Sejak tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan Audit Kearsipan Internal dengan hasil yang secara umum terjadi perubahan signifikan pada pengelolaan kearsipan Perangkat Daerah. Terdapat 2 (dua) hal yang sangat mempengaruhi perkembangan kualitas tata kelola kearsipan di Perangkat Daerah maupun LKD, yaitu adanya komitmen dan dukungan pimpinan terhadap program-program kearsipan dan tercukupinya Sumber Daya Manusia Kearsipan. Nilai LAKI merupakan cerminan kedua hal tersebut.

1) **Pembinaan Pengelolaan Arsip**

Arsip semua jenis rekaman yang dihasilkan dari proses pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik. Rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan tidak lepas dari kurangnya pengetahuan para pejabat dan pelaksana tentang pengelolaan kearsipan. Untuk itu, Pembinaan Kearsipan bagi lembaga-lembaga pemerintahan merupakan suatu syarat mutlak agar pengelolaan kearsipan menjadi semakin baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah mendapat pembinaan pengelolaan kearsipan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 179 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Satuan Kerja yang telah mendapatkan pembinaan pengelola kearsipan.	30	30	30	77	77
2.	Persentase jumlah OPD yang telah mengelola kearsipan dengan (sekurang-kurangnya) Cukup.	0	1	12	21	21
3.	Jumlah Desa yang telah mendapatkan pembinaan pengelola kearsipan.	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2024

Mendasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik, tetapi belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja untuk meningkatkan nilai LAKE LKD. Sedangkan untuk jumlah Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik masih tetap, dikarenakan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, tidak ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi pengelolaan arsip di desa-desa.

1) **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Arsip hasil dari pembubaran/penggabungan Perangkat Daerah, hasil dari kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19, serta hasil dari masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo I (periode 2014 2019) telah ditetapkan sebagai arsip yang harus dilindungi dan diselamatkan. Merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan dan perlindungan arsip-arsip tersebut guna menghindari resiko hilang atau rusaknya fisik arsip dan/atau informasinya. LKD harus menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan arsip-arsip tersebut sebagai Arsip yang dilindungi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang relevan serta penguatan jaringan kerja dengan semua Perangkat Daerah. Untuk itu LKD wajib untuk melakukan akuisisi, pengolahan, alih media, penyelamatan arsip-arsip tersebut.

2.1.3.3. **Fokus Layanan Pilihan**

A. **Pariwisata**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup:

- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota;
- Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan : Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

1) **Jumlah Kunjungan Wisata**

Tabel 2. 180 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah obyek wisata(obyek)	60	60	60	60	60
2.	Jumlah Usaha Pariwisata memiliki TDUP	138	148	158	168	178
3.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	466.668	483.642	1.095.734	980.319	1.007.595
	Wisatawan Manca Negara	137	0	2	4	19
	Wisatawan Nusantara	466.531	483.642	1.095.734	980.315	1.007.576
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi baik	25%	25 %	30 %	55	50
5.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	155.556	161.214	219.147	163.370	251.899
6.	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
7.	Jumlah Daerah Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	60	80	85	93	95,00
8.	Persentase DTW yang dipromosikan	75	80,00	85,00	93,33	95,00
9.	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	55	60	65	69,57	225,00

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016-2019 sebanyak 37 DTW dan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sebanyak 60 DTW mengalami peningkatan 162,16 % dipicu adanya perkembangan Destinasi baru yang ada di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2024, sektor pariwisata mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan data yang tercatat, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 mencapai 19 orang, sementara wisatawan nusantara (wisnus) tercatat sebanyak 1.007.576 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana kunjungan wisman hanya 4 orang dan wisnus tercatat 980.315 orang, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga, terdapat kenaikan 375% pada kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2024 dan kunjungan wisatawan nusantara meningkat sebesar sekitar 2,78% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, sektor pariwisata menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang cukup baik, terutama pada kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami lonjakan tajam.

2) PAD Sektor Pariwisata

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 181 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2020	1,85
2	2021	2,24
3	2022	4,50
4	2023	13,77
5	2024	4,91

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Pada tahun 2024, sektor pariwisata menunjukkan kenaikan yang cukup positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 tercatat sebesar 26.824.712.000,00 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 29.486.444.624,00 yang berarti terjadi kenaikan sebesar 9,9%. Namun, meskipun PAD sektor pariwisata mengalami peningkatan, jika dilihat dalam konteks keseluruhan PAD Kabupaten, rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten tercatat sebesar 13,77%, sedangkan pada tahun 2024 hanya tercapai 4,91%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan target yang cukup tinggi pada tahun 2024, dari 2,33% menjadi 12,50%. Kenaikan target ini membuat kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten tidak sebanding dengan peningkatan total PAD yang sangat signifikan.

Secara keseluruhan, meskipun sektor pariwisata memberikan kontribusi yang lebih besar dalam jumlah nominal PAD, rasio kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten menurun, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam pencapaian target yang lebih ambisius pada tahun 2024.

6) Destinasi Pariwisata

Tabel 2. 182 Persentase Destinasi Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif	61,67	62,40	85,00	90,00	95,00

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	(DTW) yang dipromosikan					

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Pada sektor pariwisata, promosi menjadi salah satu kunci utama dalam menarik minat wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di tengah persaingan yang semakin ketat antar destinasi wisata, upaya promosi yang efektif bisa membuat suatu destinasi menonjol dan menjadi pilihan utama wisatawan. Dalam konteks ini, ada fenomena menarik yang terjadi pada sejumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang ada, yaitu 57 dari 60 DTW telah dipromosikan. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian besar destinasi wisata di suatu daerah telah mendapatkan perhatian dalam hal promosi. Namun, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa 57 dari 60 DTW dipromosikan, sementara 3 DTW lainnya tidak.

Dari total 60 DTW, 57 destinasi dipilih untuk dipromosikan karena dianggap memiliki potensi ekonomi yang besar dan daya tarik yang dapat menarik banyak wisatawan. Destinasi-destinasi ini merupakan Daerah Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan, seperti keindahan alam, warisan budaya, atau event-event besar yang dapat mendorong sektor pariwisata dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, promosi difokuskan pada destinasi yang sudah dianggap produktif, baik dalam hal kunjungan wisatawan maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan.

7) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata

Tabel 2. 183 Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah SDM Pariwisata yang dibina	100	100	100	250	450

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, 2024

Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah, dan salah satu elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan kualitas industri pariwisata adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Dalam hal ini, ada perkembangan yang signifikan terkait dengan pembinaan SDM pariwisata. Jumlah SDM yang dibina mengalami kenaikan yang luar biasa dari target semula sebanyak 200 orang menjadi 450 orang, sebuah pencapaian yang sangat menggembirakan. Peningkatan jumlah SDM ini bukan hanya terjadi karena faktor fisik atau peningkatan jumlah fasilitas pelatihan, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-fisik yang mendukung pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan SDM di sektor pariwisata melibatkan berbagai pendekatan, adanya dana DAK Non Fisik dari kemenparekraf, mulai dari peningkatan keterampilan, pengembangan soft skills, hingga penguatan motivasi dan kesadaran akan pentingnya pariwisata sebagai sektor ekonomi yang strategis.

B. Pertanian

Hampir 45 % wilayah Kabupaten Tegal berupa persawahan. Menurut data BPS Tahun 2018, luas lahan sawah Kabupaten Tegal adalah 39.488 Ha, yang tersebar terutama pada daerah-daerah dataran rendah dengan kemiringan datar hingga landai. Untuk wilayah perbukitan lahan pertanian diperuntukkan untuk tanaman hortikultura.

Berikut adalah penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian di Kabupaten Tegal Tahun 2018.

Tabel 2. 184 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian

No.	Penggunaan Lahan	Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		1 Kali	2 Kali	3 Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1.	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
a.	Irigasi	5,570	19,090	5,405	1,945	26	32,036
b.	Tadah Hujan	5,990	1,059		317	86	7,452
c.	Rawa Pasang Surut						
d.	Rawa Lebak						
	Jumlah Lahan Sawah	11,560	20,149	5,405	2,262	112	39,488
No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan					
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah						
a.	Tegal /Kebun	8,352					
b.	Ladang / Huma						
c.	Perkebunan	194					
d.	Ditanami Pohon /Hutan Rakyat	2,038					
e.	Padang penggembalaan / Rumput						
f.	Sementara Tidak Diusahakan						
g.	Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	10,463					
	Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah	21,047					
2.	LAHAN BUKAN PERTANIAN (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dll)	27,344					
	TOTAL WILAYAH KABUPATEN	87,879					

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Sedangkan Luas Lahan Sawah masing- masing kecamatan sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 185 Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Irigasi					Jumlah	Tadah hujan					Jumlah	Jumlah Luas Lahan Sawah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lain nya	Tidak ditanami apapun		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lain nya	Tidak ditanami apapun		
Margasari	301.000	2.021.000	174.000			2.496	1.168.000					1.168	3.664

Kecamatan	Irigasi					Jumlah	Tadah hujan					Jumlah	Jumlah Luas Lahan Sawah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
Bumijawa		165.275	60.000			225	507.015	391.676		2.000	1.041.034	1.942	2.167
Bojong	310.000	829.000	403.000			1.542						0	1.542
Balapulang			2.088.400	1.018.600		3.107						0	3.107
Pagerbarang	2.645.000	335.000				2.980						0	2.980
Lebaksiu		1.368.000	790.000	444.000		2.602	22.000					22	2.624
Jatinegara		120.000	412.000			532	1.322.000			379.000		1.701	2.233
Kedungbanteng		934.500	48.000	136.500		1.119	37.000			383.000		420	1.539
Pangkajene	589.000	469.000	454.000			1.512				111.000		111	1.623
Slawi	32.000	106.000	160.000	30.000	2.000	330	93.000					93	423
Dukuhwaru		872.000	861.000	66.000		1.799						0	1.799
Adiwerana	136.000	341.000	229.000	286.000	1.000	993	112.000					112	1.105
Dukuhturi	192.000	295.000	31.000	192.000		710						0	710
Talang	137.000	449.000	227.000	121.000		934						0	934
Tarub	403.000	936.000	26.000	336.000		1.701				14.000		14	1.715
Kramat		1.670.000	232.000	176.000	5.000	2.083					14.000	14	2.097
Surodadi	1.169.000	2.257.000	91.000	583.000		4.100	142.000					142	4.242
Warurejo	713.000	2.610.000	162.000	514.000		3.999	69.000	142.000	11.000	240.000		462	4.461

Kecamatan	Irigasi					Jumlah	Tadah hujan					Jumlah	Jumlah Luas Lahan Sawah
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
JUMLAH	6.627.000	15.777.75	6.448.400	3.903.100	8.000	32.764.275	3.475	533.676	11.000	1.129.000	1.055.034	6.200.725	38.965.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

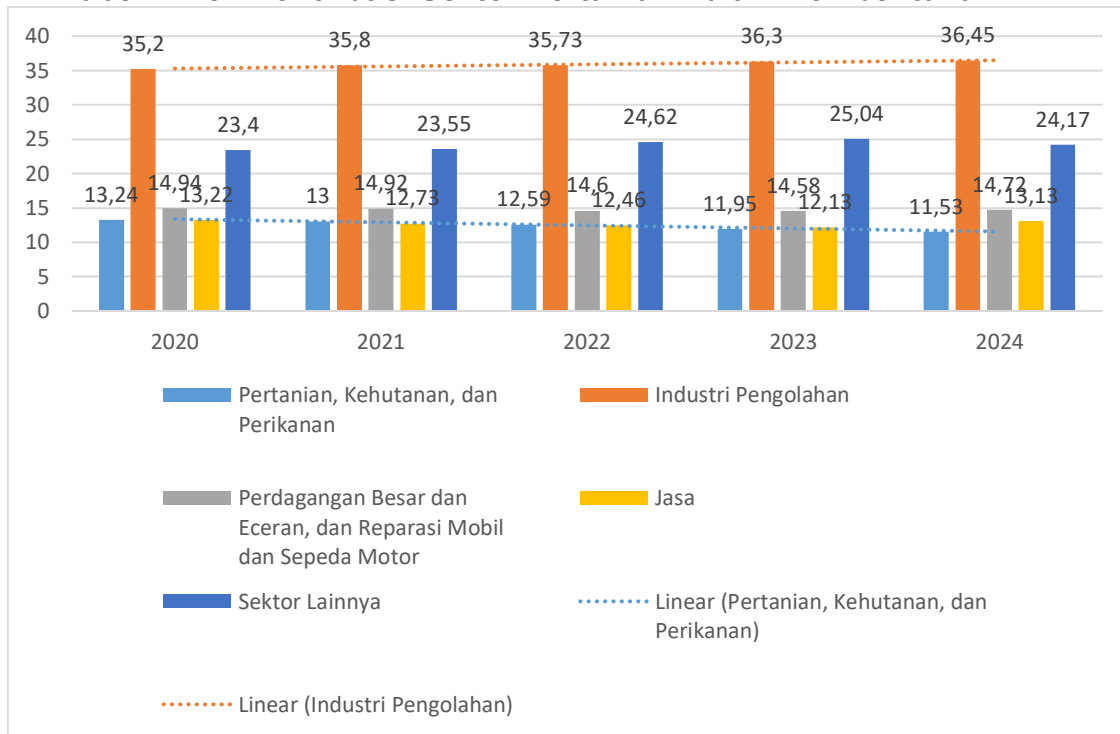
Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 11,53 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 186 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:					
	- ADH Berlaku	4.674,13	4.854,10	5.134,41	5.312,63	5.502,77
	- ADH Konstan	3.077,10	3.162,83	3.214,75	3.148,99	3.158,19
2.	Jumlah PDRB:					
	- ADH Berlaku	35.299,98	37.334,99	40.770,33	44.440,02	47.721,31
	- ADH Konstan	24.492,62	25.401,91	26.705,27	28.022,85	29.444,38
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB					
	- ADH Berlaku	13,24	13,00	12,59	11,95	11,53

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

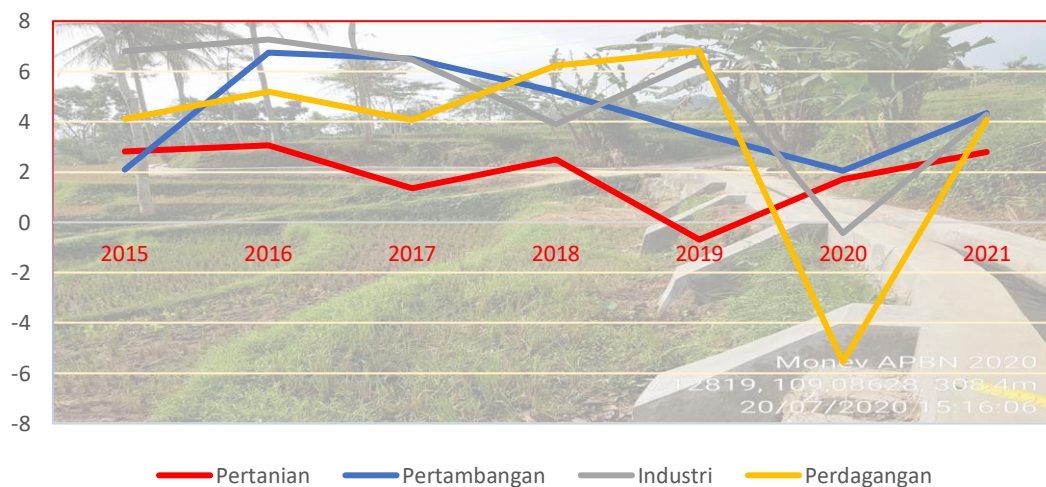
Tabel 2. 187 Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, 2024

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa sektor pertanian mengalami kecenderungan menurun dalam hal kontribusinya dalam pembentukan PDRB. Namun demikian apabila dilihat dari pertumbuhannya, maka laju pertumbuhan sektor pertanian sangat fluktuatif sebagaimana grafik berikut :

Gambar 2. 47 Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Sektor Kabupaten Tegal Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

Pada tahun 2020, hampir semua sektor mengalami penurunan laju pertumbuhan, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 | BAB II -181

kecuali sektor pertanian. Pada saat itu terjadi wabah covid-19, yang menyebabkan produksi semua sektor terhenti akibat pembatasan-pembatasan yang ada. Gambaran ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi global. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, pengaruh dari badai el nino, yang menyebabkan kurangnya curah hujan di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Tegal. Pada saat itu kebutuhan air irigasi kurang mencukupi dan berkembangnya beberapa OPT yang menyebabkan gagal panen. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketergantungan iklim masih menjadi faktor dominan di sektor pertanian.

Meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis, namun melihat gambaran di atas, terlihat bahwa sektor pertanian mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Beberapa penyebab menurunnya kinerja sektor pertanian adalah sebagai berikut :

1. Usia produktif di Kab. Tegal kurang tertarik untuk berkontribusi di sektor pertanian.

Fenomena *aging farmer* atau penuaan petani sudah menjadi perhatian serius dan menjadi isu global. Banyak alasan yang mendasari generasi muda tidak mau bekerja di sektor pertanian, di antaranya adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan imbalan memadai dan cara pandang tenaga kerja muda telah berubah di era perkembangan masyarakat post modern.

2. Daya saing produk pertanian yang masih rendah.

Sektor pertanian saat ini masih memiliki masalah produktivitas sehingga komoditas pertanian belum mampu menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing dengan komoditas pertanian dari negara – negara lain. Masih tingginya impor produk pertanian mengindikasikan harga komoditas pertanian di Indonesia masih kalah bersaing dari negara lain.

3. Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian

Permintaan pangan berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, serta ramah terhadap lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Peluang pasar baik domestik maupun manca negara masih sangat terbuka untuk produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi.

Pertanian organik adalah salah satu upaya budidaya yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan sangat ramah lingkungan. Penerapannya di Kabupaten Tegal masih belum meluas karena memang untuk saat ini biaya produksi pertanian organik lebih tinggi dibandingkan budidaya pertanian konvensional.

Dari beberapa definisi tentang Pertanian Organik salah satu badan dunia yang mengatur regulasi Produk organik yang berpusat di Eropa yaitu, International Federation Organic Association (IFOAM) mendefinisikan sebagai suatu proses produksi makanan dan serat yang dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima secara sosial, menguntungkan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara agro-ekosistem.

Di dalam SNI 6729 : 2013, Sistem Pertanian Organik melarang penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam budidaya tanaman pangan dan perkebunan, serta penggunaan pakan dan hormon sintetis untuk budidaya ternak (BSN, 2013). Untuk menghindari pengaruh akibat penggunaan pengubahan materi genetik yang tidak alami. Sistem Pertanian Organik juga melarang penggunaan benih yang berasal dari organisme hasil modifikasi genetik atau genetic modified organism/GMO (Kementerian Pertanian, 2013).

Selain menghasilkan produk yang bermutu tinggi, Sistem Pertanian Organik bersifat ramah lingkungan dengan mencegah segala bentuk pencemaran kimia baik melalui air maupun udara. Dalam berbudidaya organik, para pelaku usaha atau produsen organik dilarang melakukan pembakaran lahan yang umum terjadi pada sistem ladang berpindah, serta wajib mengendalikan erosi pada lahan yang berlereng bertanam dengan sistem kontur, penggunaan tanggul dan pengolahan tanah secara minimal dan terbatas.

Kabupaten Tegal yang memiliki lahan pertanian baik pada dataran tinggi, sedang dan rendah sangat potensial untuk mengembangkan pertanian organik. Sampai saat ini sudah ada kelompok-kelompok yang berinovasi berbudidaya pertanian organik baik yang sudah bersertifikat maupun kelompok yang mengembangkan pertanian non pestisida atau pertanian sehat terutama untuk komoditas padi.

Kelompok-kelompok ini perlu terus didorong agar dapat mengembangkan budidaya organik dalam kawasan-kawasan potensial. Pertanian organik berbasis kawasan selain mampu mengurangi biaya produksi juga mampu menyediakan stok yang cukup bila ada permintaan dalam skala besar.

Ada banyak faktor yang menyebabkan inefisiensi produk pertanian :

- Masih rendahnya teknologi yang digunakan.
- Masih minimnya penggunaan alat dan mesin pertanian baik pra panen maupun pasca panen.
- Belum optimalnya layanan irigasi, sehingga petani harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencukupi kebutuhan air irigasi.
- Budiaya pertanian masih diusahakan dalam skala kecil. Menurut BPS, rata-rata petani hanya memiliki luas lahan pertanian 0,3 ha. Oleh karenanya perlu didorong agar pertanian dibudidayakan dalam bentuk korporasi untuk menekan biaya produksi dan memperkuat posisi tawar petani.
- Tuntutan pasar yang belum sepenuhnya mampu dipenuhi sektor ini :
 - tuntutan standarisasi produk dan proses;
 - tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan rendah residu bahan kimia;
 - tuntutan integrasi pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*); dan
 - peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan

Penggunaan alat dan mesin pertanian yang masih rendah umumnya disebabkan harga dari peralatan tersebut yang masih tidak terjangkau oleh petani. Hingga akhir 2019, rasio penggunaan alat pra panen di Kabupaten Tegal baru mencapai 62,72 % sedangkan untuk pasca panen hanya 15,51 %.

4. Alih fungsi lahan

- a. Pertumbuhan Penduduk
- b. Lahan pertanian mempunyai nilai lahan yang rendah dibanding peruntukan lahan lain (non pertanian) / rasio output dan input pertanian kalah jauh dibanding sektor lain.
- c. Kebutuhan pembangunan.

5. Kualitas SDM Pertanian yang masih rendah.

6. Infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi, jalan usaha tani yang masih belum optimal, dan terus mengalami degradasi akibat sedimentasi (Kerusakan lingkungan di bagian hulu). Rendahnya layanan infrastruktur pertanian menyebabkan efisiensi sektor ini juga sangat rendah. Prasarana pertanian masih menjadi persoalan utama

di Kabupaten Tegal. Prasarana pertanian berupa layanan irigasi dan jalan usaha tani masih sangat minim dan pembangunannya diperlukan anggaran yang cukup besar. Untuk layanan air irigasi hingga saat ini belum mampu menjangkau seluruh areal lahan baku sawah yang ada di Kabupaten Tegal. Bila menengok luas tanam padi sebagai indikator utama sebagai indikasi ketersediaan air irigasi, maka Indeks Pertanaman lahan sawah belum mencapai angka 2. Artinya dalam 1 tahun rata-rata sawah belum mampu ditanamai 2 kali dalam 3 kali musim tanam.

7. Ancaman serangan OPT yang semakin beragam.
8. Harga komoditas pertanian cenderung tidak stabil sebagai akibat dari karakteristik komoditas ini:
 - a. Produk musiman
 - b. Produk mudah rusak (perishibel) dan memakan tempat.
 - c. Perlakuan pascapanennya untuk meningkatkan nilai tambah sangat minim dilakukan.
 - d. Harga produk relatif murah _ produsen sebagai price taker dan efek dari asimetri informasi, bargaining position yang rendah di produsen.
 - e. Fluktuasi harga relatif tajam.
9. Masih Belum Maksimalnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 Pola pangan masyarakat diukur melalui nilai Pola Pangan Harapan yang menggambarkan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya agama dan cita rasa. Permasalahan utama dalam pemantapan ketahanan pangan rumah tangga adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab. Permasalahan dalam konsumsi antara lain adalah (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah, (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi, (iii) masih dominannya konsumsi energi karbohidrat yang berasal dari beras, (iv) rendahnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga serta (v) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Tabel 2. 188 Data Skore Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	897,5	52,0	41,7	0.5	26,0	20,9	25,0	20,9
2.	Umbi-umbian	71,3	4,1	3,3	0.5	2,1	1,7	2,5	1,7

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
3.	Pangan Hewani	196,2	11,4	9,1	2,0	22,8	18,3	24,0	18.3
4.	Minyak dan Lemak	244,4	14,2	11,4	0,5	7,1	5,7	5,0	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	26,6	1,5	1,2	0,5	0,8	0,6	1,0	0.6
6.	Kacang-kacangan	137,7	8,0	6,4	2,0	16,0	12,8	100	10.0
7.	Gula	30,7	1,8	1,4	0,5	0,9	0,7	2,5	0.7
8.	Sayur dan Buah	105,1	6,1	4,9	5,0	30,5	24,4	30,0	24.4
9.	Lain-lain	15,0	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0
	Total	1724,6	100	80,2	11,5	106,0	85,1	100,0	81,56

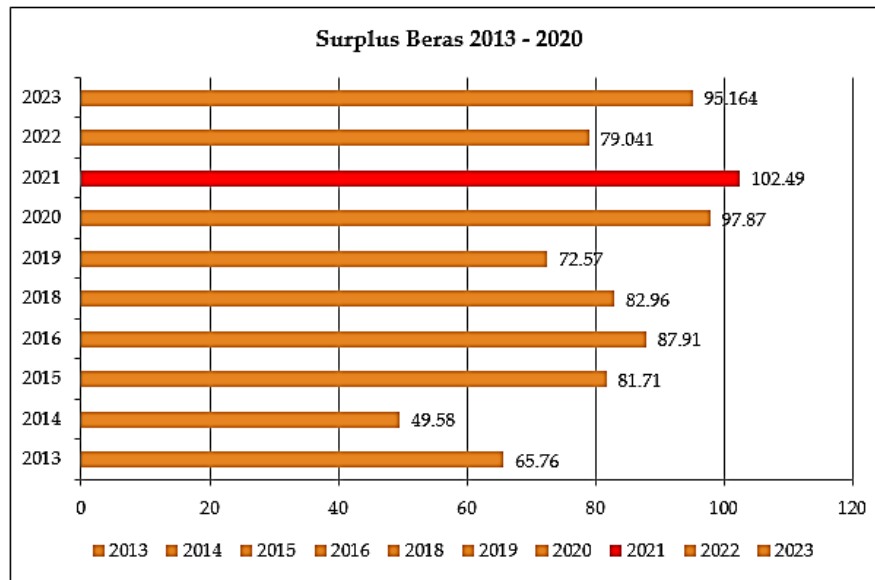
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Bila ditelaah kedalaman Skore PPH Kabupaten Tegal, maka konsumsi pangan hewani merupakan penyumbang terbesar masih belum maksimalnya pencapaian skore PPH. Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Tegal adalah wilayah pesisir pantai utara jawa, ada kemungkinan faktor budaya menjadi salah satu penyebab masih belum maksimalnya skore pph.

10. Masih belum Maksimalnya Cadangan Pangan Daerah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang surplus pangan di Provinsi Jawa Tengah. Apabila dibandingkan produksi tanaman pangan pokok padi dengan kebutuhan konsumsi perkapita penduduk Kabupaten tegal, maka setiap tahun terjadi surplus produksi sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Gambar 2. 48 Surplus Produksi Beras Tahun 2013-2023



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Akhir tahun 2023, dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa dan rata-rata konsumsi beras turun dari tahun sebelumnya namun ketersediaan beras naik. Maka surplus beras s.d bulan Desember 2023 sebesar 95,164 ribu ton beras. Meskipun terjadi surplus beras pada setiap tahunnya, namun situasi pangan di Kabupaten Tegal masih menghadapi beberapa isu sebagai berikut :

- Masih rendahnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

Surplus pangan yang terjadi seharusnya dapat dikelola secara baik dan mampu mendukung kewajiban pemenuhan cadangan pangan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018. Dalam Permentan tersebut menargetkan cadangan pangan daerah yang ideal sebesar 80% dari jumlah cadangan beras provinsi yang dikalikan rasio jumlah penduduk kabupaten dan provinsi. Dalam hal pemenuhan cadangan pangan, masyarakat juga dilibatkan dalam pencadangan pangan daerah dengan membentuk Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Saat ini LPM yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 23 lumbung dengan kondisi yang masih perlu terus dibina. Keberadaan LPM dirasa penting dalam menyelesaikan masalah pada saat terjadi keadaan darurat seperti bencana, kelangkaan pangan dan kondisi harga pangan yang tinggi dan mengancam akses pangan bagi masyarakat kecil. Pada saat masyarakat membutuhkan, cadangan pangan yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat dapat langsung diakses, tanpa menunggu dari CPPD Pemprov.

- Distribusi dan Harga Pangan.

Distribusi dan akses pangan merupakan bagian dari keterjangkauan pangan, dimana pada pasal 46 Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok. Dalam rangka stabilisasi harga keberadaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat peranannya sangat penting dan perlu terus dibina dan dikembangkan. Keberadaan LDPM terutama untuk mensuplai

agen-agen penjualan komoditas pangan seperti Toko Tani Indonesia untuk menjamin stabilitas harga terutama gabah dan jagung relatif stabil dan umumnya tidak pernah dibawah HDPP/HPP meskipun di beberapa wilayah pada saat-saat tertentu masih dijumpai harga gabah di bawah HDPP/HPP. Selain itu keberadaan LDPM diharapkan mampu memotong rantai distribusi dari produsen ke konsumen yang berimbas pada harga yang diperoleh konsumen lebih terjangkau.

- **Keamanan Pangan.**

Permasalahan keamanan pangan perlu terus dipantau untuk menjamin masyarakat mendapatkan konsumsi pangan yang aman dan sehat. Merujuk pada pembagian wewenang pengawasan keamanan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004, Kementerian Pertanian mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian sedangkan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

- **Pangan Segar Asal Tumbuhan**

Pendaftaran PSAT merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pendaftaran PSAT selain menjamin peredaran makanan sehat produk pertanian, jaminan mutu yang diberikan merupakan salah satu faktor penentu daya saing produk selain kontinuitas produk dan jaminan harga. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya fasilitasi registrasi Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tingkat perekonomian anggota poktan akan meningkat. Branding pada produk kemasan dapat memperluas akses pasar dari produk yang dihasilkannya.

Dengan semua kondisi yang ada di sektor pertanian, berikut adalah gambaran pencapaian masing-masing komoditas pertanian :

1) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produksi susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 189 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2020– 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Daging					
	Produksi (kg)	11.284.734	12.817.246	13.434.166	13.764.171	12.205.885
2.	Telur					
	Produksi (kg)	10.760.493	9.734.385	7.671.875	10.679.373	10.736.318
3.	Susu					
	Produksi (kg)	604.664	655.741	487.408	659.175	718.394

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 12.205.885 Kg. Produksi daging ini cenderung turun dibanding tahun sebelumnya (2018-2022). Fenomena kenaikan produksi daging ini disumbang oleh besarnya produksi daging ayam di Kab. Tegal, sekitar 75 % dari total produksi daging. Produksi telur terjadi pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 39,2 % dibanding tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena selama tahun 2023 ini tidak terjadi kasus yang menyebabkan penurunan produksi. Untuk produksi susu pada tahun 2023 hanya mencapai 659.175 Kg. Terjadi kenaikan produksi sebesar 35,24 % dibanding tahun 2022. Upaya untuk menjaga kesehatan hewan melalui berbagai kegiatan baik yang didanai anggaran APBD II maupun DAK dapat terselenggara dengan baik, meskipun terjadi serangan PMK yang mengancam populasi ternak.

1) **Pengendalian Kesehatan Ternak dan Produk Hasil Ternak yang ASUH**

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kab. Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal cenderung meningkat. Persentase ternak terkendali status kesehatannya tahun 2024 untuk ternak besar sebesar 10 %, dan ternak kecil sebesar 90 %. Pada tahun 2024 Kabupaten Tegal mendapat alokasi untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan tertangani sebanyak 1.470 ekor ternak.

Dalam rangka terlaksananya pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal). Pada Tahun 2024, pemeriksaaan kualitas air susu mulai dilaksanakan, dikarenakan ketidakterersediaan bahan-bahan dalam proses pemeriksaaan, terutama reagen yang sudah expired.

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 190 Jumlah Ternak Yang Dipotong Di RPH Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	1.653	1.587	1.322	1.335	1.482
2	Kerbau	26	13	0	0	0
3	Kambing	377	441	1.112	1.203	?
4	Domba	668	799	2.255	2.344	?
	Jumlah Total	2.724	2.840	4.689	4.882	?

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2024 pemotongan di RPH hanya melayani ternak besar karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, sehingga potensi pemotongan ternak yang ada di wilayah Kabupaten Tegal sebagian besar tidak dapat dilayani di RPH. Data

jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2020-2024 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 191 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No.	Jenis Air Susu	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	10	1,2	0	0	3
2	Kambing	25	3,6	0	0	8
	Jumlah Total	35	4,8	0	0	11

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2025

Pada tahun 2024, tidak ada sampel air susu yang diperiksa. Ada penurunan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena beberapa bahan yang digunakan untuk uji kualitas susu seperti misalnya reagen kimia sudah expired. Bahan-bahan tersebut belum bisa diadakan karena alokasi penganggaran ditujukan untuk mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

2) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 192 Jumlah Penyuluh Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyuluh PNS/ASN :					
	a. Pertanian	108	108	106	106	90
	b. Perikanan	-	18	11	11	-
	c. Kehutanan	-	-	10	10	-
2.	Penyuluh THL – TBPP	49	-	-	-	-
		81	-	-	-	-
3.	Penyuluh Swadaya :					
	a. Pertanian	-	141	141	141	226
	b. Perikanan	-	-	-	-	-
	c. Kehutanan	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2025

Jumlah penyuluh PNS/ASN pertanian di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2020 sebanyak 108 orang penyuluh, maka di Tahun 2024 jumlah penyuluh pertanian tinggal 90 petugas. Apabila dibandingkan dengan jumlah desa yang ada, maka rasio penyuluh dengan jumlah desa hanya sebesar 1:3,1, atau 1 orang penyuluh bertugas pada 3-4 wilayah binaan desa. Kondisi seperti ini

tentu masih belum mencapai angka ideal, agar penyuluh dapat melayani kelompok-kelompok tani dengan ideal, seharusnya rasio tersebut adalah 1:1. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka sejak tahun 2021 sudah dibina 141 penyuluh swadaya yang kemampuannya terus ditingkatkan dan dibina oleh bidang penyuluhan. Jumlah penyuluh swadaya ini meningkat di tahun 2024 menjadi 226 orang.

3) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam, luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 193 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2020–2024

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	73.189	63.325	60.972	53.268	66.792
	Luas Panen (ha)	62.575	64.475	62.740	59.084	59.980
	Produksi (ton)	402.312	414.549	395.074	373.885	381.292
	Produktivitas (ton/ha)	64,29	6,4	62,97	63,28	63,57
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	22.180	20.576	20.741	14.159	18.878
	Luas Panen (ha)	20.461	19.961	20.516	15.594	16.223
	Produksi (ton)	129.564	128.533	132.951	101.831	68.468
	Produktivitas (ton/ha)	63,32	6,43	6,48	6,53	6,68
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	6	53	-	10	-
	Luas Panen (ha)	3	73	-	8	1
	Produksi (ton)	4	108	-	12	15
	Produktivitas (ton/ha)	15	4,80	-	15	1
4.	Ketela Pohon					
	Luas Tanam (ha)	528	328	561	283	195
	Luas Panen (ha)	292	281	485	321	132
	Produksi (ton)	6000	6.190	10.110	5.509	2380
	Produktivitas (ton/ha)	205,32	22,05	20,8	17,15	180,15
5.	Ketela Rambat					
	Luas Tanam (ha)	359	917	865	118	316
	Luas Panen (ha)	305	831	365	115	219
	Produksi (ton)	3.966	11.450	4.293	1.162	3.548
	Produktivitas (ton/ha)	130,07	13,78	11,77	10,26	12,19
6.	Kacang Tanah					
	Luas Tanam (ha)	136	156	142	63	48
	Luas Panen (ha)	99	181	165	67	47
	Produksi (ton)	85	322	298	120	85
	Produktivitas (ton/ha)	8,56	1,78	1,8	18	18
7.	Kacang Hijau					
	Luas Tanam (ha)	78	55	29	243	13
	Luas Panen (ha)	74	46	68	6	37

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Produksi (ton)	87	56	82	2	44
	Produktivitas (ton/ha)	11,69	1,2	1,2	4	12
	Sayuran dan Buah Semusim					
1.	Bawang Merah					
	Luas Tanam (ha)	1.666	453	811	1.116	1.676
	Luas Panen (ha)	1.741	342	907	1.279	1.371
	Produksi (ku)	168.797	2,007	8,271	113.989	188.112
	Produktivitas (ton/ha)	72,27	5,88	9,12	89,09	81,39
2.	Cabe					
	Luas Tanam (ha)	592	509	946	218	784
	Luas Panen (ha)	628	397	853	231	643
	Produksi (ku)	41.827	2.660	4.624	17.609	26.877
	Produktivitas (ton/ha)	79,39	7,75	5,42	76	4.48
3.	Kentang					
	Luas Tanam (ha)	1.950	369	358	345	344
	Luas Panen (ha)	413	371	369	362	340
	Produksi (ku)	96.540	4.979	3,845	44.900	59.500
	Produktivitas (ton/ha)	79,39	13.4	10,42	124,03	175
4.	Kubis					
	Luas Tanam (ha)	1.950	476	359	343	369
	Luas Panen (ha)	761	516	355	342	412
	Produksi ku)	99.982	52.026	35,602	46.350	79.420
	Produktivitas (ton/ha)	131,38	101,22	100.29	135,53	192,77
5.	Semangka					
	Luas Tanam (ha)	135	41	48	-	-
	Luas Panen (ha)	113	24	29	-	-
	Produksi (Ku)	19.358	3.870	2205	-	-
	Produktivitas (ton/ha)	171.31	161,25	77	-	-
	Tanaman Hias					
1.	Melati					
	Luas Tanam (m2)	2.000	30,000	80.005	50.000	10.000
	Luas Panen (m2)	2.182.390	20,002,390	5.689.295	1.786.575	4.732.085
	Produksi (Kg)	3.142.270	2.898.390	1.280.722	1.190.015	687.605
	Produktivitas (ton/ha)	3,04	0,07	0.23	0,67	0,15
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	2.198,2	1.109,8	1.079	1.072,4	1.001,9
	Luas Panen (ha)	1.006,9	663,9	650	648	605,3
	Produksi (ton)	882,787	708	640,31	622,45	1.056
	Produktivitas (ton/ha)	0,876	1.066	0,984	0,959	1,774
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.877,1	1.865,5	1.723,7	1.714,7	1.564,2
	Luas Panen (ha)	732,5	704,1	636,7	641,2	465,6
	Produksi (ton)	80,620	56,31	55,831	51,92	70,83
	Produktivitas (ton/ha)	0,110	0,080	0,087	0,081	0,052
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	174,6	61,1	61,1	63,1	59,6
	Luas Panen (ha)	144,3	36,1	41,1	48,1	46,6
	Produksi (ton)	35,439	47,12	47,12	36,21	36,01
	Produktivitas (ton/ha)	0,245	1,305	1,146	0,759	0,772
4.	Kopi					

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Luas Tanam (ha)	215,4	161,3	153,3	160,3	178,6
	Luas Panen (ha)	76,7	61,4	64,3	69,3	68,4
	Produksi (ton)	34,84	18,32	22,59	36,94	38,03
	Produktivitas (ton/ha)	0,91	0,61	0,72	1,07	1,11
5.	Tembakau					
	Luas Tanam (ha)	80	81	75	85,6	119,6
	Luas Panen (ha)	80	80	71,5	84	115,3
	Produksi (ton)	46,35	55,20	49,08	73,62	101,9
	Produktivitas (ton/ha)	0,57	0,69	0,68	0,87	0,88
6.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	2021,29	986,47	817,13	889,80	820,71
	Luas Panen (ha)	1.184,76	725,62	791,33	877,31	820,5
	Produksi (ton)	5.634	3.081	3.524	4.039	3.392
	Produktivitas (ton/ha)	4,756	4,246	4,454	4,604	4,134

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2025

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2020–2024 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2021 ini produktivitas tanaman pangan utama (padi) mencapai mencapai 6,43 ton/ha, paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2024 cenderung mengalami penurunan di semua sektor tanaman perkebunan. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan di banyak komoditas perkebunan.

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buah-buahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2020 - 2024 pergerakannya tidak stabil. Di tahun 2024 ini produktivitas tanaman pangan utama (padi) mencapai mencapai 63,57 ton/ha, paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk produktivitas tanaman perkebunan pada tahun 2024 beberapa tanaman seperti kedelai, bawang merah, cabai, kentang mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan adanya alih fungsi lahan di banyak komoditas perkebunan. Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\sum (P_i \times H_i)$).

Tabel 2. 194 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi Kuantum 2012 (Pi)	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2021

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2018 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2018 adalah sebesar 215.027, 25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa :

- Untuk Tahun 2018 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L , (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

Untuk dapat mengangkat kinerja sektor pertanian, maka rencana kerja sektor ini diarahkan pada :

1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, maka perlu menaikkan produksi baik komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan terutama padi dan jagung hingga saat ini masih menjadi komoditas andalan petani. Meskipun harga komoditas ini fluktuatif, petani sebagian besar masih mengandalkan padi dan jagung menjadi tanaman pokoknya. Terdapat dua alasan pokok bagi pemerintah untuk tetap mempertahankan pertanian sebagai sektor yang perlu ditingkatkan :

- Bahwa Indonesia adalah negara agraris, sebagian besar wilayah dan penduduknya menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Demikian juga di Kabupaten Tegal, Hampir 44 % wilayah kabupaten adalah wilayah pertanian dan penduduk yang menggeluti sektor ini mencapai lebih dari 25 %.
- Pertanian menjadi salah satu unsur ketahanan nasional. Industri pangan bukan lagi sekedar pencapaian swasembada tetapi harus menuju kepada kedaulatan pangan. Apalagi mengingat persaingan global yang ketat dalam industri pangan belakangan ini yang menggunakan teknologi tinggi yang secara langsung telah menghantam industri pangan lokal yang masih tradisional.

Upaya mempertahankan dan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. Oleh karenanya semua faktor yang mendukung peningkatan produksi terus diupayakan dan faktor-faktor penghambat diminimalisir. Berikut kebijakan yang perlu akan diambil dalam rangka peningkatan produksi pertanian :

- Peningkatan Prasarana Pertanian
- Peningkatkan Sarana pertanian
- Pengembangan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dan meningkatkan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
- Fasilitas penyediaan sarana prasarana usaha peternakan.
- Penggunaan bibit unggul
- Penerapan teknologi pertanian
- Pengembangan Komoditas Hortikultura Andalan
- Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Potensial.
- Pertanian Ramah Lingkungan

2) Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Pertanian serta Pemasarannya

Peningkatan daya saing komoditas dan produk sektor pertanian selayaknya menjadi arus utama kebijakan pemerintah dan perhatian dunia usaha dan industri. Upaya-upaya yang berkaitan dengan peningkatan daya saing harus menjadi bagian transformasi sektor pertanian guna mendukung transformasi ekonomi daerah secara berencana, bertahap dan berjenjang.

Keunggulan kompetitif dan kreatif adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan daya saing sektor pertanian. Daya saing juga menggambarkan kemampuan melakukan terobosan-terobosan dan juga berkaitan erat dengan daya saing daerah yang didukung oleh komoditas pertanian unggulan. Tantangan besar yang dihadapi dalam perdagangan global adalah berbagai regulasi yang harus dipenuhi terkait kualitas, proses produksi keamanan lingkungan dan lain-lain. Pembatasan – pembatasan yang diberlakukan pada berbagai regulasi perdagangan tersebut memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku produksi serta pelaksanaan kegiatan industri pertanian sekaligus dengan dampaknya terhadap kualitas lingkungan dan sumberdaya alam.

Komoditas pertanian terutama tanaman pangan mempunyai sifat harga yang inelastis. Kenaikan harga komoditas tidak serta merta dapat diikuti dengan penambahan produksi. Disamping hal itu, komoditas pertanian juga memiliki sifat yang berproduksi secara bersamaan, hal ini sangat mempengaruhi harga yang sangat fluktuatif. Mengingat kedua sifat tersebut, maka pengolahan hasil pertanian memegang peranan sangat strategis untuk dapat menaikkan nilai tambah komoditas pertanian. Kegiatan mengolah hasil-hasil pertanian lebih dikenal sebagai agroindustri. Definisi agroindustri dapat dijabarkan sebagai kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian agroindustri meliputi industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa sektor pertanian. Apabila dilihat dari sistem agribisnis, agroindustri merupakan bagian (subsistem) agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan-bahan hasil pertanian (bahan makanan, kayu dan serat) menjadi barang-barang setengah jadi yang langsung dapat dikonsumsi dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian dan lain-lain.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025-2026 masih menitikberatkan pada kegiatan agribisnis di tingkat petani. Upaya ini diharapkan dapat memicu tumbuhkembangnya industri pengolahan hasil pertanian terutama pada kalangan milenial. Pemasaran hasil-hasil pertanian juga menjadi perhatian. Seperti umumnya petani di Indonesia, petani di Kabupaten Tegal juga memiliki kemampuan yang sangat terbatas terutama dalam membangun jejaring pemasaran baik di tingkat regional, nasional maupun orientasi global. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat belum sepenuhnya dimanfaatkan para petani dalam mendekatkan konsumen kepada produknya. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai kewajiban membina dan mengarahkan petani dan industri pengolahan hasil pertanian untuk dapat memanfaatkan era industri 4.0 untuk dapat meningkatkan daya saing yang lebih kompetitif. Dengan demikian kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- Pengembangan Pertanian Organik.

- Pengembangan Sistem Informasi Pemasaran Produk Pertanian untuk Membuka Akses Pasar Global.

3) **Penguatan Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Permasalahan Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan. Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan, pengembangan ketersediaan pangan, pengembangan distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan dituntut untuk mampu untuk meminimalisir dan mengkoordinasikan permasalahan pangan baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal.

Strategi penguatan ketahanan pangan akan ditempuh melalui kebijakan baik pada tataran kebijakan reguler sesuai standar pelayanan minimal maupun kebijakan-kebijakan untuk memicu percepatan penguatan ketahanan pangan, antara lain :

- Penguatan Cadangan Pangan.
- Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
- Peningkatan Ketersediaan Informasi Pangan.
- Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan.

4) **Pemenuhan Infrastruktur Dasar Sektor Pertanian**

Air irigasi adalah komponen pokok dalam budidaya pertanian, terutama komoditas pangan. Apabila dilihat dari luas tanam komoditas pangan utama dalam hal ini padi, maka sepanjang tahun 2022 luas tanam di Kabupaten Tegal baru mencapai 60.972 Ha, sedangkan luas lahan baku sawah adalah 38.625, atau rata-rata baru 1,57 kali tanam. Hitungan rata-rata kali tanam dalam satu tahun tersebut sering disebut **Indeks Pertanaman (IP)**. IP menggambarkan kemampuan lahan terutama sawah untuk ditanami dalam 1 tahun berkaitan dengan ketersediaan air irigasi. Jika suatu lahan sawah berada pada lingkungan dengan ketersediaan air yang melimpah atau mencukupi sepanjang tahun maka kegiatan tanam (dan panen) bisa sampai 3 kali dalam setahun. Namun jika lingkungan lahan sawah tersebut kurang mendukung pada ketersediaan air maka kegiatan tanam bisa 1 atau 2 kali dalam setahun. IP yang tinggi tentu akan meningkatkan kemampuan lahan untuk berproduksi, sehingga dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, IP menjadi salah satu indikator kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Hingga akhir 2022, IP Kabupaten Tegal masih dibawah 2, artinya rata-rata lahan sawah sepanjang tahun baru ditanam 1,66 x, akibat kurangnya air irigasi dan mengandalkan curah hujan yang ada. Untuk meningkatkan IP, maka dilaksanakan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi, yang didalamnya ada pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani, pembangunan Irigasi Tanah Dangkal dan pembangunan Dam Parit.

Selain pemenuhan air irigasi, infrastruktur yang sangat diperlukan oleh petani, adalah ketersediaan jaringan jalan untuk mempermudah akses ke sawah. Keberadaan jalan usaha yang baik tentu akan sangat berdampak pada efisiensi baik pra panen maupun pasca panen.

Manfaat jalan usaha tani, antara lain :

- Peningkatan akses pasar bagi petani
- Transportasi yang lebih baik untuk barang-barang pertanian
- Peningkatan produktivitas pertanian
- Mendorong pembangunan ekonomi pedesaan
- Meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa.

Apabila diasumsikan panjang ruas jut per km mampu melayani area seluas 30 Ha, maka kondisi rasio panjang jut yang ada dibandingkan luas baku sawah yang ada di Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Hingga akhir tahun 2022, rasio tersebut baru mencapai angka 2.6%. Rasio panjang jalan usaha dibandingkan luas area yang dilayani dapat disebut Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha) dan berikut target serta pencapaiannya dalam beberapa tahun terakhir.

5) Pencegahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) atau hama dan penyakit berdasarkan konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dapat dilakukan secara preventif atau kuratif.

- Pengendalian secara preventif

Upaya untuk pengendalian OPT secara preventif dapat dilakukan dengan cara modifikasi lingkungan, seperti pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pengapuran, solarisasi, memodifikasi iklim mikro, pemupukan dan penggunaan agens pengendali hayati untuk menekan laju pertumbuhan OPT.

Salah satu upaya dalam pengendalian OPT secara preventif adalah pengembangan Agen Pengendali Hayati (APH). Upaya untuk pengendalian OPT secara preventif dapat dilakukan dengan cara modifikasi lingkungan, seperti pengaturan pola tanam, pengaturan sistem tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pengapuran, solarisasi, memodifikasi iklim mikro, pemupukan dan penggunaan agens pengendali hayati untuk menekan laju pertumbuhan OPT. Indikator yang digunakan dalam upaya preventif ini adalah Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi.

- Pengendalian secara kuratif

Pengendalian OPT secara kuratif dapat dilakukan jika populasi hama atau intensitas serangannya telah mencapai nilai ambang pengendalian. Penanganan secara kuratif umumnya dilakukan melalui penggunaan obat dan bahan kimia untuk diaplikasikan pada area yang terkena serangan OPT.

Melalui pengendalian OPT secara preventif diharapkan serangan OPT tidak melebihi ambang batas yang ditentukan yang dapat menyebabkan gangguan pada panen dan menurunkan produksi secara signifikan. Selama ini gangguan OPT yang terjadi di Kabupaten Tegal memang masih cukup terkendali. Selama 3 tahun terakhir gangguan OPT masih cukup rendah yaitu 0,55% pada tahun 2020, 0,12% pada tahun 2021 dan terakhir 0,90 pada tahun 2022. Namun demikian gangguan ini tetap harus dipertahankan dibawah 2,5% dan kedepan akan lebih banyak digunakan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan dalam pengendalian OPT.

Tabel 2. 195 Rasio Serangan dan Prosentase Penanganan OPT Tahun 2022

Bulan	Rasio serangan			Prosentase penanganan OPT		
	pb	Wbc	tikus	Pb	wbc	tikus
Jan	-	-	-	100	100	100
	0,18	0,03	0,07	100	100	100
Feb	0,07	0,05	0,05	100	100	100
	0,12	0,14	0,06	100	100	100
Mar	0,06	0,56	0,03	100	100	100
	0,09	0,48	-	100	100	100
Apr	0,12	0,07	-	100	100	100
	0,09	0,04	0,02	100	100	100
Mei	0	0	0	100	100	100
	0,20	0,07	0,08	100	100	100
Juni	0,04	0,00	-	100	100	100
	0,19	0,12	-	100	100	100
Juli	0,26	0,84	0,01	100	100	100
	0,19	4,88	0,06	100	98,60	100
Ags	0,15	2,21	0,06	100	94,64	100
	0,27	1,95	0,07	100	90,87	100
Sept	0,50	0,09	-	100	60,61	100
	0,54	0,01	-	100	100	100
Okt	1,61	0,01	0,13	100	100	100
	1,79	0,03	0,12	100	100	100
Nop	0,69	0,07	-	100	100	100
	1,29	0,06	0,01	100	100	100
Des	0,37	0,02	0,01	100	100	100
	0,20	0,04	0,04	100	100	100
Rata2	0,38	0,49	0,03	100	97,60	100
		rasio serangan	0,90		% penanganan OPT	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2023

6) Peningkatan Kualitas Produk Pertanian

Permintaan pangan berkualitas, sehat dan aman dikonsumsi, serta ramah terhadap lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Peluang pasar baik domestik maupun manca negara masih sangat terbuka untuk produk-produk pertanian yang berkualitas tinggi.

Pertanian organik adalah salah satu upaya budidaya yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan sangat ramah lingkungan. Penerapannya di Kabupaten Tegal masih belum meluas karena memang untuk saat ini biaya produksi pertanian organik lebih tinggi dibandingkan budidaya pertanian konvensional.

Sejak beberapa tahun terakhir, pertanian organik terus dikembangkan di Kabupaten Tegal. Upaya pengembangan pertanian organik menemui berbagai kendala, terutama minat petani yang kurang karena proses budidaya organik yang tidak semudah budidaya pertanian konvensional, meskipun di pasaran, komoditas organik memiliki harga yang lebih menjanjikan. Pengembangan pertanian organik memerlukan proses, dan pada masa transisi tersebut biasanya terjadi penurunan provitas, hal inilah yang juga menjadi penyebab petani enggan beralih ke pertanian organik. Beberapa manfaat pertanian organik yaitu :

- Kualitas tinggi produk pertanian
- Perlindungan lingkungan
- Kesehatan dan keselamatan bagi petani dan konsumen
- Kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang
- Peningkatan biodiversitas dan keseimbangan ekosistem
- Ketergantungan pada pestisida dan bahan kimia berkurang.

Hingga saat ini lahan pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi pertanian organik di Kabupaten Tegal seluas 5 Ha dan sampai dengan tahun 2024 ditargetkan akan ada minimal 15 ha lahan pertanian yang sudah mendapatkan sertifikasi organik.

7) Peningkatan SDM Pertanian

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya di bidang pertanian dimulai dari proses pengolahan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan sampai pemanenan. Dalam pembangunan pertanian, petani merupakan subyek yang memegang peranan sangat penting. Namun demikian, sebagaimana umumnya, petani di Kabupaten Tegal didominasi oleh masyarakat usia lanjut dengan kemampuan yang rendah, sulit untuk menerima perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan provitas usaha pertanian. Peningkatan kemampuan Sumberdaya manusia di sektor pertanian dapat menjamin pembangunan pertanian, dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk pemberdayaan petani adalah membentuk kelompok-kelompok tani. Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk berkomunikasi dalam mengembangkan budidaya pertanian. Kelompok tani dibentuk dengan fungsi :

- Menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada.
- Sebagai media atau alat pembangunan.
- Membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok.

Saat ini kondisi sebagian besar kelompok tani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan

stasioner bahkan menurun. Secara empiris gambaran dari kelompok tani tersebut sebagai berikut:

- sebagian kelas kelompoknya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, status kelasnya lebih tinggi namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya rendah, dan
- sebagian kelompok tani sudah “bubar” namun masih terdaftar.

Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi dan produktivitas usaha tani rendah. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya.

Mengingat peran penting keberadaan kelompok tani dalam membangun desa melalui sektor pertanian, maka pendampingan dan pembinaan yang terus menerus menjadi tugas pokok pemerintah. Pada saat ini jumlah kelompok tani di Kabupaten Tegal sebanyak 1.377 kelompok dengan rincian :

Tabel 2. 196 Kelompok Tani Sektor Pertanian periode 2020-2024

No.	Kelompok Usaha Tani	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemula	593	627	646	665	665
2.	Usia Lanjut	647	657	640	623	623
3.	Madya	124	93	93	93	93
4.	Utama	12	-	-	-	-
	Total	1.376	1.377	1.379	1.381	1.381

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2024

Keterangan :

- Pada Tahun 2020 terdapat 1.376 kelompok tani, dengan kelompok pemula ada 593 kelompok, 647 kelompok usia lanjut, 124 kelompok madya, dan 12 kelompok utama;
- Tahun 2021 terdapat 1.377 kelompok tani, dengan kelompok pemula ada 627 kelompok, 657 kelompok usia lanjut, 93 kelompok madya, dan tidak terdapat kelompok utama;
- Tahun 2022 terdapat 1.379 kelompok tani, dengan kelompok pemula ada 646 kelompok, 640 kelompok usia lanjut, 93 kelompok madya, dan tidak ada kelompok utama;
- Tahun 2023 terdapat 1.381 kelompok tani, dengan kelompok pemula ada 665 kelompok, 623 kelompok usia lanjut, 93 kelompok madya, tidak ada kelompok utama;
- Tahun 2024 terdapat 1.381 kelompok tani, dengan kelompok pemula ada 665 kelompok, 623 kelompok usia lanjut, 93 kelompok madya, tidak ada kelompok utama.

Untuk dapat meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani, maka diperlukan program penyuluhan pertanian dengan sasaran utama :

- Sumberdaya manusia pertanian
- Kelembagaan penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan pemerintah di Kabupaten Tegal telah ada dan telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, namun untuk lebih mendekatkan proses penyuluhan kepada para petani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong pembentukan Posluhdes.

Pos Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Posluhdes memiliki fungsi yang sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian dalam memberikan pelayanan kepada petani dan masyarakat. Posluhdes sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan penyuluhan yang berada di tingkat paling dasar, memiliki arti penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian yang perlu terus didorong dan dikembangkan keberadaannya. Sampai akhir tahun 2024 Posluhdes yang terbentuk baru 37,98 % atau 109 dari 287 Desa di wilayah Kabupaten Tegal. Dari Posluhdes yang sudah terbentuk tercatat hanya 31 posluhdes yang aktif, sedangkan sisanya perlu upaya pembinaan yang lebih intensif. Diharapkan hingga akhir periode perencanaan, minimal 45 % desa di wilayah Kabupaten Tegal memiliki kelembagaan Posluhdes.

Kelas kelompok tani kondisinya sangat dinamis. Jenjang kelas kelompok dapat naik maupun turun tergantung dari penilaian pada akhir tahun. Meskipun sangat tidak diharapkan, penurunan kelas kelompok dapat saja terjadi. Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah tidak aktifnya pengurus poktan dan anggota yang tidak peduli dengan eksistensi kelompok serta minimnya kemampuan manajemen pengurus.

8) Peningkatan Efisiensi Usaha Pertanian Melalui Mekanisasi Pertanian

Mekanisasi pertanian adalah proses penggunaan mesin dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha pertanian. Tujuan dari mekanisasi pertanian adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses pertanian, seperti menanam, menyiangi, mengumpulkan hasil, dan memproses bahan baku. Mekanisasi pertanian juga bertujuan untuk mengurangi kerja manual yang memerlukan tenaga manusia dan meminimalkan risiko kerugian karena faktor-faktor seperti cuaca buruk atau kegagalan panen. Beberapa contoh mesin pertanian yang digunakan dalam mekanisasi pertanian adalah traktor, mesin penanam, mesin pemotong rumput, mesin pemindah tanah, dan mesin pengolah hasil pertanian. Mekanisasi pertanian memiliki dampak positif pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup petani, meskipun juga memiliki beberapa masalah seperti biaya tinggi dan ketergantungan pada teknologi.

Upaya peningkatan efisiensi usaha pertanian melalui mekanisasi pertanian dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya:

- Penggunaan alat pertanian yang modern dan efisien.
- Penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil.
- Penerapan teknologi dan sistem informasi pertanian yang mutakhir.
- Penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.
- Peningkatan kerjasama antar pelaku usaha pertanian.
- Perlindungan dan pengembangan pasar bagi produk pertanian.
- Pengembangan sistem pembiayaan yang kondusif bagi usaha pertanian.

- Peningkatan kualitas produk melalui penerapan standar dan sertifikasi.

Secara umum mekanisasi pertanian dibagi menjadi 2 kelompok, pra panen dan pasca panen.

9) Perlindungan Lahan Pertanian.

Perlindungan terhadap lahan pertanian dan perkebunan sangat penting untuk mencegah krisis pangan. Alih fungsi lahan pertanian ke lahan bangunan menjadi faktor utama yang memicu penyusutan lahan pertanian di berbagai daerah.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berupaya untuk mencegah penyusutan lahan pertanian dan krisis pangan melalui pemetaan dan penetapan lahan pangan berkelanjutan (LP2B) yang difasilitasi lewat pendanaan APBN 2021 mendapatkan apresiasi penghargaan dari Kementerian Pertanian RI.

Sebagaimana disebutkan dalam SK Bupati Tegal Nomor : 050/1374 Tahun 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 :

Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan Kabupaten Tegal Tahun 2021 seluas 41.573 Hektar, yang terdiri atas :

- a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 36.088 Hektar (yang tersebar di 18 wilayah kecamatan), dan
- b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 5.485 Hektar.

Upaya perlindungan lahan tersebut telah disepakati oleh kelompok kerja LP2B dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan penetapan pada November 2021. Tidak hanya itu, perlindungan LP2B juga telah ditetapkan dalam revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Keterkaitan antara Visi, Misi Dan Isu Strategis, keterkaitan hal dalam mensejahterakan para petani seperti tertuang dalam visi dan isu strategis butir ketiga “Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan” dengan isu yang mengedepankan “Pemulihan Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan” merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai keberlanjutan pertanian dan pangan. Di sisi lain juga, mengingat para generasi muda Milenial Gen Y lebih memilih pekerjaan bidang non pertanian. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan para petani :

1) Akses ke Sumber Daya Utama.

Meningkatkan akses para petani ke sumber daya yang dianggap prioritas, seperti lahan yang subur, air irigasi, benih berkualitas, pupuk, dan teknologi pertanian yang modern. Ini dapat dilakukan melalui program subsidi, pembiayaan yang terjangkau, dan pengembangan infrastruktur pertanian;

2) Alokasi Sektor Pendidikan dan Pelatihan.

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan (Sustainable), teknik pengelolaan tanaman, manajemen risiko, dan keahlian bisnis. Ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka dalam mengelola usaha pertanian;

3) Aksesstabilitas ke Pasar.

Membantu petani mengakses pasar yang lebih luas dengan memperkuat jaringan distribusi, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur transportasi. Pendampingan dalam hal pemasaran, negosiasi harga yang adil, dan promosi

produk pertanian lokal juga dapat membantu petani meningkatkan pendapatan mereka;

4) Intervensi Perbankan dan Asuransi Pertanian.

Sektor Perbankan dalam perluasan rancah bisnisnya dapat menjadikan Pertanian sebagai Mitra Kerja dalam meningkatkan akses petani ke layanan keuangan, termasuk kredit mikro dan asuransi pertanian. Hal ini akan membantu melindungi mereka dari risiko bencana alam, gangguan pasar, atau kegagalan panen, serta memberikan modal untuk investasi dan ekspansi usaha pertanian;

5) Memperkuat Eksistensi Koperasi Pertanian.

Mendorong pembentukan dan penguatan koperasi pertanian untuk memperkuat posisi tawar petani, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memfasilitasi akses ke input pertanian dan pasar. Koperasi juga dapat memberikan layanan tambahan seperti penyuluhan, penyimpanan, dan pemrosesan hasil pertanian;

6) Penelitian dan Inovasi unsur (Kelitbangan).

Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang relevan bagi petani, seperti pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim, serta teknologi irigasi yang efisien. Inovasi juga dapat mencakup penggunaan teknologi digital dan analitik untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik;

7) Dukungan Kebijakan Pada Sektor Pertanian.

Mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung petani, termasuk perlindungan harga, subsidi input pertanian yang adil, regulasi yang jelas, dan pengadaan pangan dari petani lokal untuk program pemerintah;

Selain itu, partisipasi aktif petani dalam pengambilan keputusan dan forum dialog dengan Pimpinan Kepala Daerah dan Jajaran Kepemerintahan, organisasi pertanian (GAPOKTAN), dan para pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk memastikan kebijakan dan program yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam melengkapi program dan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan menambah nilai produk pertanian diperlukan beberapa langkah dan strategi. Adapun strategi kedepan yang sekiranya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, antara lain :

1) Program Pelatihan dan Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya semaksimal mungkin dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada para petani yang tersebar di 18 Kecamatan dan terdiri atas 281 desa dan 6 kelurahan tentang praktik pertanian yang inovatif, pengelolaan usaha pertanian, teknik pemasaran, manajemen keuangan, dan penggunaan teknologi pertanian. Hal ini akan membantu petani meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

2) Pengembangan Keterampilan Nilai Tambah.

Strategi yang kedua ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengembangkan keterampilan nilai tambah, contohnya seperti : pengolahan dan pengemasan produk pertanian (melalui Rumah Kemasan) yang di inisiasi oleh UPTD. (LIK-TAKARU Dampyak) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan

(DISPERINNAKER). Tidak lain bertujuan agar mereka dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai dan siap untuk pasar yang lebih luas. Ini dapat melibatkan pelatihan dalam pengolahan makanan, pengawetan, pengemasan, dan pembuatan produk olahan;

3) Strategi Pemasaran dan Promosi.

Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap para petani dalam memasarkan hasil produk komoditas pertanian mereka menggunakan strategi saluran pemasaran yang lebih luas. Contohnya seperti pasar lokal/tradisional, pasar online, kerjasama dengan restoran atau hotel, dan partisipasi dalam pameran pertanian. Penekanan pada unsur promosi yang efektif, seperti halnya branding produk, pemasaran digital, dan penggunaan media sosial, juga dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk pertanian;

4) Program Sertifikasi dan Labeling.

Upaya legalitas dalam mendorong petani untuk mendapatkan bukti sertifikasi produk pertanian yang pada umumnya relevan dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Adapun contohnya seperti : sertifikasi organik, sertifikasi fair trade, atau sertifikasi keberlanjutan. Hal ini akan memberikan nilai tambah (added-value) pada produk mereka dan dapat membuka akses ke pasar yang lebih spesifik dan premium.

5) Program Kemitraan dengan Pihak Swasta.

Mengembangkan kemitraan strategis antara petani dan pihak swasta, seperti perusahaan pengolahan makanan, distributor, atau rantai supermarket. Perikatan kerjasama bersifat kemitraan ini sebagai salah satu contoh komitmen bersama dan teknisnya mencakup kontrak jangka panjang, pelatihan teknis, Perjanjian Kerjasama (PKS/MoU) dan dukungan teknologi. Tujuannya adalah agar petani dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan pasar dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih stabil;

6) Program Penggunaan dan Penerapan Teknologi Digital.

Kesadaran Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pentingnya beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital patut ditularkan dalam konteks Sister Cities, kurang lebih dalam halnya dengan “Smart Cities and Smart Government for Smart Citizens” dari 4.0 ke 5.0” sampai seterusnya. Contoh tersebut dapat diaplikasikan tentunya kearah yang aplikatif. Seperti : sensor pertanian, pemantauan berbasis sensor, analitik data, dan aplikasi pertanian cerdas. Kesemua itu bertujuan untuk membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi mereka. Teknologi digital juga dapat mendukung pelacakan dan jaminan mutu produk pertanian.

7) Program Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi.

Pendekatan program ini bertujuan mendorong petani untuk berkolaborasi dan membentuk jaringan, seperti contoh : pendirian Koperasi pertanian, asosiasi petani, atau kelompok tani. Kolaborasi ini dapat memungkinkan mereka untuk membagi sumber daya, memperoleh kekuatan tawar-menawar (bargaining positions), dan mendapatkan manfaat bersama dalam hal pemasaran, pengadaan input, dan pelatihan.

8) Program Peningkatan Aksesibilitas Literasi Keuangan Rakyat.

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mencerdaskan warganya untuk meningkatkan pengetahuan dan akses apa saja yang dapat dipergunakan oleh petani khususnya layanan keuangan, seperti kredit pertanian via online, asuransi pertanian, dan tabungan. Tentu harapannya akan membantu mereka dalam mengatasi tantangan keuangan dan risiko dalam usaha pertanian, serta memberikan modal untuk investasi dan pengembangan usaha via Perbankan Daerah yang ditunjuk.

Penerapan strategi-strategi ini memerlukan kerja sama antara Instansi Pemerintah melalui Jaringan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi pertanian, lembaga keuangan, sektor swasta, dan petani itu sendiri

C. Perdagangan

1) Pemberian / Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan

Dalam usaha pelayanan di bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, setiap tahun selalu memfasilitasi Pedagang di Kab. Tegal, khususnya Pedagang yang berjualan di Pasar Rakyat Kab. Tegal dengan pemberian Surat Izin Menempati Kios atau Loos (SIMK / SIML) bagi Pedagang di Pasar Rakyat Kabupaten Tegal. Selain pemberian SIMK / SIML, Dinas juga memberikan Rekomendasi Subsidi BBM bagi UMKM / Pedagang yang proses usahanya membutuhkan BBM sehingga dengan adanya Subsidi BBM akan meringankan Beban UMKM / Pedagang.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Persentase pemberian Izin Usaha dengan SIMK atau SIML dan Rekomendasi Subsidi BBM digambarkan pada Tabel.

Tabel 2. 197 Pemberian Izin Usaha dan Rekomendasi Subsidi BBM

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengajuan SIMK / SIML	9.013	9.240	9.385	9.641	9.551
2	Jumlah Pengajuan Bantuan Subsidi BBM	N/A	N/A	131	277	221
3	Jumlah SIMK / SIML yang diterbitkan	9.013	9.240	9.385	9.641	9.551
4	Jumlah Rekomendasi Bantuan Subsidi BBM yang diberikan	N/A	N/A	131	277	221
5	Persentase Penerbitan Izin Usaha SIMK / SIML (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase Rekomendasi Subsidi BBM (%)	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

2) Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana dan Prasarana Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal ada 26 Pasar, dengan kondisi Sarana dan Prasarana yang Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat. Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar yang baik dan berfungsi baik mendorong pembeli di pasar meningkat.

Tabel 2. 198 Kondisi Pasar Kabupaten Tegal Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar Kondisi Baik	4	8	N/A	N/A	7
2	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Ringan	4	2	5	5	9
3	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Sedang	5	7	N/A	3	6
4	Jumlah Pasar Kondisi Rusak Berat	13	9	20	17	3
5	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25	25
	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	15,38	30,76 %	0	0	28%
	Persentase Pasar dalam Kondisi Tidak Rusak Berat	34,6%	34,6%	20%	32%	88 %

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Pada Tahun 2024, jumlah Pasar dalam Kondisi Baik sebanyak 7 Pasar, meningkat dari tahun 2023, dimana pada tahun 2023 tidak ada Pasar dalam kondisi Baik, sedangkan yang mengalami kerusakan ringan sebanyak 9 unit, dalam kondisi Rusak Sedang sebanyak 6 unit, kemudian Jumlah Pasar yang kondisinya Rusak Berat sebanyak 3 Unit, jumlah Pasar yang Rusak Berat pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan jumlah Pasar Rusak Berat pada tahun 2023. Masih adanya Kondisi Pasar yang Rusak disebabkan kondisi cuaca yang ekstrem seperti Hujan lebat yang terus menerus, angin kencang, sehingga menyebabkan kerusakan berat pada atap (bocor), dinding kios, saluran air, lantai pasar yang masih becek, dan sarana lainnya. Upaya untuk melakukan perbaikan sarana pasar dengan rehabilitasi pasar sudah dilakukan dengan ditunjukan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 199 Jumlah Rehab Pasar Selama Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang di Rehab	14	16	11	4	14
2	Jumlah seluruh Pasar	26	26	25	25	25
3	Persentase Pasar yang direhab	53,84	61,53	44	16	56

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Meskipun Sarana Pasar masih banyak yang mengalami kerusakan, upaya untuk pengelolaan Pasar juga terus dilakukan setiap waktu. Pengelolaan ini meliputi Pembinaan Petugas Pasar untuk Pelayanan izin usaha, pelayanan penarikan retribusi, dan pengelolaan pelaporan harga barang di pasar. Jumlah Pasar yang dikelola selama tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 200 Jumlah Pasar yang Dikelola Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang dikelola	25	25	25	25	25
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	26	25	25
3	Persentase Sarana dan Prasaran Pendistribusian yang dikelola dengan baik	96,15	96,15	96,15	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui penarikan Retribusi dengan aplikasi E-Retribusi terus dilakukan. Saat ini Penerapan e-Retribusi pada pasar rakyat yang

diterapkan hingga tahun 2024 sudah diterapkan pada seluruh Pasar. Perkembangan Pasar yang sudah menerapkan E-Retribusi secara akumulatif dari tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 201 Pasar yang menerapkan E-Retribusi

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pasar yang menerapkan E-Retribusi	2	7	12	18	25
2	Jumlah Seluruh Pasar	26	26	25	25	25
3	Persentase Pasar yang sudah E-Retribusi	7,69	26,92	40	72	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Tujuan dari penerapan *e-Retribusi* pada Pasar Rakyat adalah untuk mengoptimalkan penerapan transaksi non tunai dalam penarikan retribusi. Ke depan, setelah semua pasar menerapkan E-Retribusi, ke depan penerapan E-Retribusi akan dilakukan monitoring untuk peningkatan kualitas penerapan di Pasar Rakyat.

3) Stabilisasi Harga dan Operasi Pasar

Operasi Pasar dilakukan untuk menekan / mempengaruhi harga pasar khususnya komoditi yang mengalami kenaikan harga. Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditempatkan di Wilayah Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 202 Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Tahun 2019–2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Operasi Pasar oleh Pemerintah Kabupaten	18	18	1	18	5	31
2	Operasi Pasar Oleh Pemerintah Provinsi	18	0	0	3	0	0
	Jumlah Operasi Pasar	36	18	1	21	5	31

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Operasi Pasar di 31 lokasi yang tersebar di 17 kecamatan. Operasi Pasar ini dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi dengan distribusi paket barang kebutuhan masyarakat yang terdiri dari minyak goreng, beras, dan gula.

Upaya untuk menjaga laju inflasi agar terkendali dapat dilihat dari standar deviasi dari koefisien harga antar waktu, dimana semakin kecil persentase standar deviasinya, maka semakin terkendali laju inflasinya, selama kurun waktu tahun 2021 – 2024 standar deviasi koefisien harga antar waktu ditargetkan dibawah 15% dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 203 Rekap Data Standar Deviasi Koefisien Harga Antar Waktu

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Standar Deviasi Koefisien Harga (Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil)	8,52	12,06	10	4,72
2.	Persentase koefisien Harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil Tahunan	91,48	87,94	90	95,28

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

4) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih merupakan salah satu indikator agar Pertumbuhan Ekonomi bergerak positif. Nilai Ekspor bersih didapat dari selisih antara Nilai Ekspor dengan Nilai Impor.

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal Pada tahun 2024 sebesar 9% meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2023, dimana nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 3,89 % dari tahun 2022. Adapun Laju Nilai Ekspor pada tahun 2023 memang lebih kecil daripada Tahun 2022, dengan Persentase Laju Nilai Ekspor sebesar 3,89 %, penurunan laju nilai Ekspor ini dikarenakan pada tahun 2023 belum ada penambahan jumlah perusahaan Eksportir seperti yang terjadi pada tahun 2022, namun begitu, Laju nilai Ekspor pada tahun 2023 tetap menunjukkan angka positif, hal ini karena ada penambahan volume ekspor dari Perusahaan Eksportir yang ada di Kabupaten Tegal. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana Tabel di bawah:

Tabel 2. 204 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2019– 2023

No	Uraian	Kondisi Per Tahun(Dalam Ribuan)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor	205.000.000.000	144.000.000.000	473.775.479.538	882.253.259.005	849.805.846.130	926.365.921.900
2	Persentase Laju Nilai Ekspor	20,76 %	-29,76%	229,01 %	86,21 %	3,89%	9 %

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal, 2024

Tabel 2. 205 Jumlah Pelaku Ekspor Tahun 2019– 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaku Ekspor	9	11	11	12	12	14

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

5) Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mencapai terwujudnya perlindungan terhadap konsumen, dunia usaha dan masyarakat dalam hal kebenaran pengukuran dan penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), menciptakan persaingan usaha yang sehat

dalam industri dan perdagangan, meningkatkan daya saing produk daerah dalam negeri maupun luar negeri, serta terciptanya tertib ukur di berbagai bidang, maka perlu peningkatan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, kegiatan metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada bulan Oktober tahun 2016 telah membagi kewenangan urusan pilihan perdagangan pada sub urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen khususnya penyelenggaraan metrologi legal dimana setiap Kota/Kabupaten diberi kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi akan diserahkan ke Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Tegal mendirikan UPTD di akhir tahun 2016.

UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal mulai operasional sejak tahun 2017. Namun dikarenakan belum memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU) dari Kementerian Perdagangan maka di dua tahun pertama (2017 -2018) kegiatan metrologi legal dilaksanakan melalui kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal. Pada tahun 2019 akhirnya UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal dapat beroperasi secara mandiri setelah mendapatkan SKKPTTU di awal tahun 2019.

Persentase UTTP yang ditera/tera ulang meningkat pesat sejak UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tegal operasional secara mandiri. Pada tahun 2017 dan 2018 pada saat masih kerja sama dengan Metrologi Kota Tegal persentase UTTP yang ditera/tera ulang masih berkisar 30% namun di tahun 2019 naik signifikan ke 73,05%, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024.

Pada tahun 2024, potensi alat UTTP yang dimiliki sebanyak 12.010 Unit, dari jumlah tersebut, Alat UTTP yang telah ditera/tera ulang sebanyak 10.193 Unit atau sebesar 84,87 %. Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran para Pelaku Usaha untuk menstandarkan peralatan UTTP yang dimiliki sebagai wujud perlindungan pada konsumen.

Tabel 2. 206 Jumlah Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang ditera Tahun 2019 - 2024

No.	Uraian	Jumlah per Unit					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	5.509	2.108	5.771	6.701	10.135	10.193
2.	Jumlah UTTP yang tidak ditera/tera ulang	2.032	5.433	3.669	2.739	1.875	1.817
3.	Jumlah total UTTP	7.541	7.541	9.440	9.440	12.010	12.010
	Persentase Alat UTTP yang Ditera	73,05	27,95	61,13	70,98	84	84,87
	Persentase Pelaku Usaha Tertib Ukur	73,05	27,95	61,13	70,98	80,99	84,87

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

6) Pemasaran Produk Dalam Negeri

Agar Produk Dalam Negeri dapat dikenal dan dipasarkan secara luas, perlu adanya Sarana Promosi, diantaranya adalah keikutsertaan pada Ajang Pameran, baik dalam level pameran tingkat nasional hingga lokal, selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2024, keikutsertaan dalam pameran sebagai berikut :

Tabel 2. 207 Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pameran Tk. Nasional	2	-	NA	-	1	
2	Pameran Tk. Regional	1	-	NA	-	1	
3	Pameran Tk. Lokal	1	-	NA	1	1	1
4	Jumlah seluruh Pameran yang diikuti	4	-	NA	1	3	1

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

Pada tahun 2024, telah diadakan Pameran tingkat Lokal (Slawi Ageng) yang diikuti oleh beberapa Pelaku UMKM sebagai sarana untuk Promosi Produk UMKM, khususnya UMKM lokal. Berdasarkan Inpres No 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pencapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 208 Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)

OPD	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan				
- Komitmen Penggunaan PDN	NA	Rp. 1.600.152.790	Rp. 2.100.000.000	Rp. 4.396.313.940
- Realisasi Penggunaan PDN	NA	Rp. 1.126.219.854	Rp. 1.800.000.000	Rp. 4.336.218.510
Persentase Penggunaan PDN	NA	70,38 %	85,71 %	98,63 %
Persentase Laju	NA	NA	59,82%	140,90%

OPD	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Penggunaan PDN				

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2024

D. Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain :

a. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

Tabel 2. 209 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Adiwerna; Kecamatan Balapulang; Kecamatan Dukuhwaru; Kecamatan Kramat; Kecamatan Lebaksiu; Kecamatan Margasari; Kecamatan Pangkah; Kecamatan Slawi; Kecamatan Suradadi; Kecamatan Talang; Kecamatan Tarub; dan Kecamatan Warureja.

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa pembangunan industri tidak hanya dilakukan dengan pendekatan sektoral yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri dan berdaya saing saja, tetapi juga perlu pendekatan spasial yang dimuat dalam Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

Tabel 2. 210 Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIK	57	59	64	80	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

a. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri. Berikut pelayanan peningkatan mutu produk yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium yang merupakan bagian dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah peningkatan kualitas (quality) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesinan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregristrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC17025;2017) LP-396-IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendisain, fabrikasi, serta kualitas.

Tabel 2. 211 Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024
Kab. Tegal	300	417	278	279
Luar Kab .Tegal	136	209	78	79
Pendidikan	100	60	25	26
Total/Tahun	536	686	381	384

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 2. 212 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Ikm Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	Uji Nutrisi	39	2	-	2019-2020
2	Uji Kadaluarsa	7	-	-	2018-2019
3	PIRT	187	-	-	2018-2024
4	Halal	40	11	-	2018-2021
5	Pendaftaran Merk	166	3	-	2015-2024
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI	-	-	2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasiltasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih

lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 213 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

No.	Jenis Standarisasi	Jumlah IKM Terfasilitasi			Tahun
		APBD I	APBD II	APBN	
1	DOKUMEN MUTU	9	3	-	2018-2022
2	Good Manufacturing Practice (GMP)	25	-	-	2022
2	ISO 9001 : 2000	-	-	1	2008
3	ISO 9001 : 2008	-	-	1	2011
4	ISO 9001 : 2015	-	-	6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015	-	1	-	2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2022 terdapat 46 IKM yang telah mengikuti standarisasi yang dibiayai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Standarisasi yang paling banyak diikuti oleh para IKM yaitu pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP) 25 IKM pada tahun 2022.

S. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri, dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui Berita acara pemeriksaan verifikasi Teknis IUI yang mana pada Januari – Agustus 2022 Berita Acara dibuat Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal sesuai ajuan IKM yang akan memproses Izin Usahanya sehingga dapat terdata perusahaan maupun IKM mana yang mengajukan, tetapi adanya perubahan peraturan yang mana pengajuan verifikasi IUI dapat terbit otomatis melalui OSS (*Online Single Submission*) mulai Agustus 2021, sehingga ada beberapa IKM yang pengajuannya tidak dapat tercatat pada data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Untuk daftar perusahaan yang diverifikasi sesuai data yang Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 214 Data Perusahaan Yang Telah Dilaksanakan Pengawasan Dan Verifikasi Teknis Atas Pengajuan Proses Izin Usaha Industri (IUI).

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	TANGGAL PELAKSANAAN
1	PT Puspita Sari Utama	Dampyak, Kramat	22 Februari 2024
2	KUBPalapa Desa Kepandean	Kepandean, Dukuhturi	27 Februari 2024
3	CV Kepala Jengki	Kagok Slawi	18 Maret 2024
4	PT Karyapaduyasa	Lebaksiu	19 Maret 2024
5	CV Buana Batu Srikandi	Dukuhsalam, Slawi	20 Maret 2024
6	PT Piellot Indonesia Raya	Kramat	22 Maret 2024
7	PT Tri Sukses Packaging	Lebaksiu	26 Maret 2024
8	CV Surya Jaya Abadi	Kramat	13 Agustus 2024
9	CV Buana Beton Srikandi	Kramat	15 Agustus 2024
10	CV. Tirta Waluyo	Pagerbarang	19 Agustus 2024
11	KUB Palapa Dukuhturi	Dukuhturi	22 Agustus 2024
12	PT Gaya Teknik Logam	Talang	01 Oktober 2024
13	CV Setia Kawan Indonesia	Talang	15 Oktober 2024
14	IKM Kasan Kusen	Talang	17 Oktober 2024
15	IKM Ali Maskur	Adiwarna	29 Oktober 2024

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Pelaksanaan penerbitan berita acara verifikasi teknis IUI oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal dimulai pada Tahun 2020-2024, ada 65 dokumen yang telah diterbitkan dari 65 Perusahaan/IKM yang mengajukan melalui Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal. Berikut data Industri yang mengajukan Pemeriksaan Verifikasi Teknis IUI dan telah diterbitkan :

Tabel 2. 215 Verifikasi Teknis Penerbitan IUI di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengajuan Verifikasi Teknis Ijin Usaha Industri	4	19	39	40	15
2	Persentase Remkotek IUI	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

T. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pengelolaan sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengaturan, pembinaan dan pengembangan

industry yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut data perusahaan yang telah terdaftar dalam SiiNas.

Tabel 2. 216 Perusahaan SIINas dan IUI

No.	Uraian	Jumlah IKM	Keterangan
1.	Perusahaan yang sudah memiliki akun SIINas	279	Pelaporan rutin berkala masih belum optimal
2.	Perusahaan yang sudah mengajukan Permohonan Verifikasi Teknis IUI	15	Perusahaan yang terdata hanya yang melakukan pengajuan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Tegal
3.	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	49,10%	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2025

Dari jumlah perusahaan yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal Tahun 2024 terdapat 279 perusahaan yang telah memiliki akun SIINas dan 15 perusahaan yang telah mengajukan permohonan verifikasi teknis IUI dan terbit dokumen berita acaranya.

U. Transmigrasi

Salah satu upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Tegal, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja melaksanakan Program Transmigrasi dalam rangka penyerapan lapangan kerja, namun penyerapan lapangan kerja melalui transmigrasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan pelatihan, pengiriman dan penempatan transmigran merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam memberikan kuota calon transmigran dari Kabupaten Tegal. Berikut ini data rekapitulasi transmigran dari Kabupaten Tegal yang diberangkatkan pada tahun 2014 – 2022 :

Tabel 2. 217 Rekapitulasi Transmigran Dari Kabupaten Tegal yang Diberangkatkan pada Tahun 2014 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
1	2014	4	15	Padalere Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
2	2015	6	23	Jebus Kab. Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung
3	2016	3	8	Sandalan Kab. Pahuwoto Provinsi Gorontalo
		4	14	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	2017	2	13	Tangaona Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	8	Bukit Aren Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo
5	2018	3	13	Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
6	2019	3	16	Desa Tanjung Buka Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara
7	2020	0	0	-
8	2021	0	0	-

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga	Jumlah Jiwa	Tujuan
9	2022	1	2	Satuan Permukiman Watutinawu, Kawasan Transmigrasi Asinua/Routa, Kec. Latoma, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
Jumlah		28	112	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2023-2024 tidak terdapat data transmigran karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal tidak mendapatkan kuota transmigran dari Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak melaksanakan fasilitasi pengiriman transmigran dari Kabupaten Tegal.

V. Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari *destructive fishing* dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2. 218 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perikanan Tangkap					
	Produksi (kg)	1.964.378	1.964.378	2.093.862	2.177.602	2.207.297
	Nilai (Rp 000)	13.608.184	13.701.114	32.034.962,8	57.424.365	62.526.296
2.	Perikanan Budidaya					
	Produksi(kg)	2.730.262	2.404.195	2.854.973	3.078.972	2.861.551
	Nilai (Rp 000)	145.642.227	134.134.340	181.690.211	150.527.870	153.224.195

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sebesar 2.093.361 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2021), Jumlah produksi di tahun 2023 tercapai 2.177.602 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 baik Baik jumlah maupun nilai produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 2.207.297 kg Sedangkan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp. 62.526.295.672. Pencapaian produksi perikanan tangkap pada Tahun 2024 ini disebabkan karena adanya optimalisasi pendataan produksi perikanan tangkap khususnya untuk produksi non pelabuhan. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya bersifat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor diantaranya adalah faktor regulasi kebijakan dan juga cuaca.

Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2024 lebih kecil daripada tahun 2023 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adanya petak-petak tambak/kolam yang off (tidak beroperasi penuh dalam satu tahun karena maintenance menyeluruh) untuk persiapan kegiatan budidaya selanjutnya. Ketersediaan air yang terbatas karena musim kemarau panjang pada tahun 2024 juga menjadi salah satu banyaknya tambak/kolam yang tidak dioperasikan seperti biasanya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari resiko

gagal panen pada proses budidaya dan kerugian yang lebih besar. Banyaknya stok indukan yang sudah afkir (habis masa produktivitas ekonomisnya) pada UPR (Unit Pembenih Rakyat) menyebabkan stok dan pasokan benih kecil sehingga berimbas pada produksi pada kegiatan pembesaran ikan menjadi sedikit.

Jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 3.078.972 kg, pada tahun 2022 sebesar 2.854.973 Kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021), hanya saja ada penurunan produksi antara tahun 2020 ke tahun 2021, disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak memproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Isu strategis dan permasalahan beserta dampak potensialnya yang dihadapi oleh perikanan budidaya sehingga menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pertama yaitu besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan, Sebagian besar bahan baku pakan masih harus didatangkan dari negara lain (import), Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik, Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan, Industri penyediaan bahan baku pakan lokal masih sangat terbatas, sehingga akan berdampak pada ongkos produksi meningkat sehingga membutuhkan modal usaha yang lebih besar, usaha budidaya ikan skala kecil akan mengalami degradasi hingga menuju kebangkrutan. Kedua, skala usaha pembudidaya ikan didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar sehingga biaya produksi menjadi tidak efisien sedangkan akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas berdampak pada daya saing produk rendah. Ketiga, Sistem logistic kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien sehingga kualitas produk dan harga jual tidak menentu. Kemudian tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang dan umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan atau sistem semi-intensif.

Tabel 2. 219 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengolahan hasil perikanan					
1.	Produksi (kg)	5.478.639	5.774.642	5.783.955	5.804.704	5.820.304
2.	Nilai (Rp.000)	131.189.142	132.159.154	136.075.196	150.368.554	150.368.554

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2024 sebesar 5.820.304 Kg, mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun 2023 ini dikarenakan kestabilan produksi para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dari tahun 2023, sehingga tidak adanya peningkatan yang signifikan. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2023 sebesar 5.804.704 kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.783.955 Kg. Jumlah produksi ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2021) disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya. Dan juga di tahun 2022 nilai produksi pengolahan menurun, selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang

diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

Kurang optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan disebabkan oleh beberapa hal Antara lain; kurangnya sarana pendukung pengolahan (dalam hal ini peralatan pengolahan yang masih kurang); penguasaan teknologi bagi pengolah masih kurang; tingkat serapan usaha masih rendah.

Tabel 2. 220 Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* di Kabupaten Tegal Tahun 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Tegal	11,11	38,89	55,56	83,33	100

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, 2024

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tegal mulai tahun 2015 yang pada saat itu berfokus pada sumberdaya perikanan laut, adapun perubahan fokus dan lokasi pengawasan dari perairan laut ke perairan daratan terjadi pada tahun 2020. Perubahan fokus dan lokasi pengawasan terjadi karena perubahan kewenangan pengawasan sebagaimana yg tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, capaian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 11,11% dengan titik lokasi sejumlah 2 yaitu Kecamatan Jatinegara dan Kedungbanteng. Kemudian pada tahun 2021, capaian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan sebesar 38,89% dengan titik lokasi sejumlah 6 lokasi yaitu Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, dan Slawi. Capaian kegiatan pengawasan sumber daya perikanan juga meningkat pada tahun 2022 yaitu sebesar 55,56% dimana kegiatan dilaksanakan di 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Slawi, dan Talang. Selain target capaian yang meningkat setiap tahunnya, target lokasi yang berdasarkan kecamatan juga meningkat pada setiap tahunnya. Kegiatan pengawasan dan pembinaan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) pada Tahun 2023 dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tarub, Kec. Dukuhturi, Kec. Dukuhturi, Kec. Bojong dan Kec. Bumijawa sehingga akumulasi sampai dengan Tahun 2023 jumlah kecamatan yang telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebanyak 15 Kecamatan dengan prosentase 83,33%.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2024 ada peningkatan sekitar 16,67% dibandingkan tahun 2023 pada Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas dari Kegiatan *Destructive Fishing* di Kabupaten Tegal Berdasarkan data lokasi Kecamatan yang telah dilakukan Kegiatan pengawasan dan pembinaan aktivitas penangkapan ikan di Perairan Umum Daratan (PUD), terdapat 3 lokasi yang belum dilakukan kegiatan dimaksud yaitu Kec. Warureja, Kec. Suradadi dan Kec. Pangkah. Oleh karena itu, untuk mencapai target IKU tersebut pada Tahun 2024 ini lokasi kegiatan dilakukan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhturi, Kec. Warureja, Kec. Suradadi, Kec. Pangkah dan Kec. Kedungbanteng. Kegiatan pengawasan dilakukan di

Kec.Dukuhturi merupakan tindak lanjut terhadap laporan/aduan masyarakat sedangkan Kec.Kedungbanteng (Waduk Cacaban) merupakan agenda rutin kegiatan pengawasan dimana Waduk Cacaban merupakan salah satu perairan umum daratan yang cukup besar dan merupakan lokasi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan. Berdasarkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penangkapan ikan di PUD diperoleh hasil kondisi lapangan yang kondusif, belum ditemukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (Destructive Fishing).

Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) bertujuan untuk mengatasi kegiatan destructive fishing (penggunaan racun atau setrum) maupun pelepas-liaran ikan-ikan invasif di perairan umum daratan. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan maupun yang tidak sesuai penggunaannya di perairan umum daratan (PUD) juga merupakan salah satu aspek yang merugikan dalam kegiatan penangkapan ikan maupun ketersediaan sumber daya perikanan yang ada. Kegiatan yang merugikan tersebut apabila tidak mendapat tindakan dengan tepat akan merusak ekosistem dan akan memengaruhi tingkat produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan. Maka dari itu, kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di perairan umum daratan (PUD) merupakan salah satu gabungan dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha penangkapan ikan yang ada di perairan umum daratan, sedangkan tindakan represif dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan pengawasan ditemukan pelaku usaha penangkapan ikan yang menggunakan setrum atau racun maka kan diberikan pembinaan dan lain sebagainya.

Kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku juga menjadi salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang merugikan. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Sosialisasi perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan PERMEN KP No. 18 Tahun 2018 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Maka, kegiatan pengawasan sumber daya ikan di perairan umum daratan (PUD) diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang dapat menjaga keberlangsungan ekosistem perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries).

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017. sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU Fishing). Kegiatan *destructive fishing* menjadi permasalahan yang muncul di PUD Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di PUD. Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan *destructive fishing* yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD). Kemudian maraknya praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan listrik/setrum), hal ini terjadi karena kurangnya kegiatan pengawasan penangkapan ikan

di PUD, masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu faktor rendahnya kesadaran masyarakat akan kegiatan penangkapan ikan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (menggunakan racun dan listrik/setrum).

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di mana perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah digunakan untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian pembangunan daerah meliputi pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sedangkan evaluasi pembangunan daerah meliputi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah.

Adapun capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 221 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100	100	100	100	100
2.	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75	83	80	80	80

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan

adanya peningkatan di masa mendatang. Sedangkan hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti masih perlu ditingkatkan lagi.

1) **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, rumpun bidang perekonomian dan SDA, serta rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi stakeholder dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 222 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	91,22	76,24	81,49	81,49
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	NA	92,88	67,92	84,55	84,55
2.	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	93,02	75,89	78,77	78,77

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

Capaian kinerja Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu diangka 81,49%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2024 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidaksielarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) Masih terdapat gap kompetensi SDM pengampu perencanaan pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup koordinasi, (2) Koordinasi internal antara Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Bidang Pemerintahan Pembangunan manusia yang belum optimal

Capaian tingkat seselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan perlu ditingkatkan karena masih berada di angka 78,77%, hal tersebut dihitung berdasarkan instrument kesesuaian antara dokumen Renja Tahun 2024 dengan Renstra perangkat daerah, dimana paling besar penyumbang ketidaksielarasan adalah pada indikator kinerja, baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta perbedaan besaran pagu anggarannya. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut : (1) Kompetensi penyusun Renstra dan Renja dari masing-masing

perangkat daerah yang tidak sama, (2) Koordinasi internal perencanaan yang kurang optimal di 4 (empat) OPD yang berada dibawah koordinasi rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai target, Dari 6 (enam) OPD yang berada di bawah rumpun bidang perekonomian dan SDA, yaitu : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu; Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja; Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian; dan Dinas Perikanan. Rata-rata tingkat keselarasan Renja-Renstra untuk OPD rumpun bidang perekonomian dan SDA adalah 84,55% . Ketidakselarasan indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran paling banyak ditemukan pada OPD, hal itu menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas perencana di masing2 OPD dan komitmen dukungan anggaran untuk OPD rumpun Perekonomian dan SDA yang notabene banyak berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan Penyusunan Anggaran Daerah. Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Berikut data capaian 5 tahun terakhir dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Tabel 2. 223 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2020-2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2022	2022	2023	2024
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Keterangan : *WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan

Pengendalian, dari 11 komponen tersebut maka menjadi indikator Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu berikut capaian 6 tahun terakhir.

Tabel 2. 224 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2020 – 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah OPD yang telah menyusun Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	30	32	34	34	41
Jumlah seluruh OPD	48	48	48	48	48
Persentase Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	62,5	66	70	70	85

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2024

Dalam 5 tahun terakhir, PD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 85%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik/aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

2) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 6 tahun terakhir.

Tabel 2. 225 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2020 - 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834	570.994.815.000	600.647.900.955
Jumlah APBD	2.608.654.078.059	2.351.735.092.640	2.505.690.543.424	2.800.120.966.000	2.990.773.922.861
Rasio PAD	16,80%	25,10%	21,10%	19,62%	20,08%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Rasio PAD terhadap APBD cenderung meningkat dan melebihi 20% dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal semakin baik dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu. Walaupun jumlah PAD di tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021, namun penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melainkan karena penurunan Lain-lain PAD yang sah. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 19,62% dan kembali naik sebesar 20,08% pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah APBD dan jumlah PAD pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan

namun dengan prosentase yang berbeda. Secara lebih detail, informasi tersebut diterangkan pada penjelasan di bawah.

Tabel 2. 226 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2020 – 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	531.219.878.834	570.994.815.000	600.647.900.955
Target PAD	408.838.286.000	469.765.165.000	458.043.751.000	569.098.496.200	560.723.789.011
Deviasi PAD	106,98%	125,66%	115,44%	100,33%	107,12%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Penerimaan PAD selama lima tahun terakhir berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh optimalisasi PAD, yang dilakukan dengan cara pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah. Selain itu, dijalin juga kerjasama dengan pihak swasta dan melakukan sosialisasi untuk peningkatan penerimaan pendapatan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hal lain yang menunjang keberhasilan pelampauan target PAD adalah meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat yang menjadikan basis penarikan pajak dan retribusi daerah semakin banyak dan ketersediaan sarpras penunjang penarikan pajak dan retribusi daerah.

Capaian Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya dapat melebihi target, walaupun secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan pendapatan Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, tetapi berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2021-2024, pada tahun 2021 realisasi pajak daerah sebesar Rp. 143.159.178.165,- , realisasi pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp. 173.244.165.906, realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp. 193.217.970.934 dan realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp. 207.849.187.922.
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan yang signifikan disebabkan adanya adanya perpindahan rekening layanan BLUD yang termasuk dalam rekening Lain-lain PAD yang Sah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal ini diatur dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD. Pada tahun 2021 realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 20.892.419.417, realisasi retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp. 27.138.540.204, realisasi retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp. 30.178.600.521, dan realisasi retribusi daerah tahun 2024 sebesar Rp. 355.439.134.835.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2021-2024; pada tahun 2021 realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 15.467.023.399, realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar

Rp. 16.815.509.083; realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp. 17.103.936.253,- dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 sebesar Rp. 19.597.159.894.

4. Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan selama kurun waktu 2022-2024, pada tahun 2021 realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 410.809.785.320, sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp. 314.021.663.641, pada tahun 2023 realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 310.463.216.337 dan tahun 2024 realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 19.597.159.894, walaupun secara presentase tahun 2021-2024 sudah mencapai target masing-masing tahun 2021 sebesar 137,46%, tahun 2022 sebesar 110,71%, tahun 2023 100% dan tahun 2024 sebesar 102,2% Penurunan realisasi Lain-lain PAD yang Sah ini karena ada beberapa komponen yang sudah mencapai target secara maksimal 2021, sehingga mengalami penurunan ditahun 2022 hingga . Di sisi lain, terdapat juga komponen Lain-lain PAD yang Sah yang tidak ditetapkan targetnya. Komponen yang tidak ditetapkan targetnya ini mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022. Secara umum, PAD dari komponen Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen pendapatan yang susah diprediksi realisasi pendapatannya.

5. Pengelolaan Pajak

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 227 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2020 – 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pajak daerah	125.228.966.875	143.159.178.165	173.244.116.606	193.217.970.934	207.849.187.922
Jumlah PAD	437.357.317.115	590.328.406.301	528.761.759.499	570.994.815.000	600.647.900.955
Rasio Pajak	29%	24%	32,76%	33,83%	34,57%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa tren penerimaan pajak daerah selalu meningkat setiap tahun dan rasio pajak daerah terhadap PAD berhasil menembus 30% di tahun 2022 sampai tahun 2024. Hal ini terjadi karena pendataan ulang objek pajak, pemutakhiran data, penagihan pajak secara maksimal, evaluasi, pengendalian, pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah secara intens. Selain itu, dengan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah salah satunya dengan pengembangan digitalisasi pembayaran pajak sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal lain yang juga dilakukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan capaian pajak daerah serta inovasi pengelolaan pajak daerah melalui layanan *online* seperti e-PBB-P2, e-BPHTB, dan e-SPTPD yang dikembangkan terintegrasi dalam satu *platform* transaksi

digital menjadi Bapenda Satu Genggaman (BSG) yang sudah menggunakan *Single Sign On* (SSO) untuk memudahkan layanan pajak daerah.

6. Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan. Secara umum, piutang pajak Kabupaten Tegal dibedakan menjadi piutang pajak non PBB dan piutang pajak PBB. Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, nomor obyek pajak ganda, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak beralih fungsi dan kepemilikan, serta masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Situasi rasio piutang pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 228 Piutang Pajak Daerah yang Tertagih Tahun 2020 – 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih	5.876.261.179	7.230.297.075	8.371.388.713	9.300.876.224	14.128.590.830
Jumlah piutang	13.452.467.766	16.314.058.127	17.079.094.692	18.539.186.405	21.035.169.172
Rasio piutang pajak	43,68%	44,32%	49,01%	50,17%	67,17%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Walaupun secara agregat rasio piutang pajak masih relatif rendah, tetapi rasio piutang pajak non PBB sudah sangat baik. Hal ini karena adanya penggalan potensi pajak daerah dengan cara optimalisasi melalui penagihan piutang pajak, pemutakhiran data, pengendalian dan evaluasi pajak daerah pengawasan, dan pemeriksaan pajak daerah untuk objek pajak yang pemenuhan kewajiban perpajakannya belum maksimal atau dirasa masih kurang wajar dalam melakukan pembayaran pajak, seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 229 Piutang Pajak non PBB yang Tertagih Tahun 2020 – 2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih non PBB	3.960.709.603	4.717.820.267	5.315.181.906	6.101.483.916	6.090.738.316
Jumlah piutang non PBB	4.010.011.558	4.760.701.022	5.367.941.811	6.162.735.821	7.244.616.620
Rasio Piutang pajak	98,77%	99,10%	99,01%	99,01%	84,07%

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal, 2024

Keterangan : Bapenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

Sementara, hasil pajak PBB-P2 yang tertagih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penagihan piutang PBB-P2 berupa pangihan mandiri oleh petugas pajak, kerjasama dengan Desa melalui RT dan RW, dan kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal melalui penagihan oleh mahasiswa. Selain itu, optimalisasi penagihan piutang dengan cara pemutakhiran data secara menyeluruh seperti pemutakhiran berbasis *fiscal cadaster*, verifikasi dan validasi data, dan penilaian individu.

Tabel 2. 230 Capaian Kinerja Hasil Piutang Pajak PBB yang tertagih Tahun 2020–2024

Indikator	Realisasi Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah piutang tertagih PBB	1.915.551.576	2.512.476.808	3.056.702.407	3.199.392.308	N/A (data belum tersedia)
Jumlah piutang PBB	9.442.456.208	11.553.357.105	11.754.033.636	12.429.210.486	13.790.552.552
Rasio Piutang pajak	20,29%	21,75%	26,00%	25,74	N/A (data belum tersedia)

Sumber : Bapenda Kabupaten Tegal tahun 2024

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, jabatan manajerial dan jabatan fungsional non guru/non Kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya, pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penggajian, penghargaan dan pengembangan karier pegawai akan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai dengan menerapkan sistem merit. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKPSDM Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

Tabel 2. 231 Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0,12	0,25	0,04	0,07	0,04
2	Persentase jabatan struktural/manajerial yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	87,97	93,15	89,04	94,35	84,80
3	Persentase jabatan fungsional non guru non kesehatan terisi sesuai dengan kompetensinya	79,46	71,94	69,56	34,67	34,06
4	Rasio pegawai (ASN) (berpendidikan perguruan tinggi)	110,04	96,38	136,59	810,18	911,17

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Rasio pegawai (ASN) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	9,47	16,87	18,46	65,55	68,96
6.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan	44,62	42,09	67,09	78,95	84,82
7.	Indeks sistem merit	N/A	0,24	0,58	0,66	0,66

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tegal, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil yaitu sejumlah 0.04% atau 4 orang dari 6 kasus kepegawaian yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal sejatinya telah meningkat kedisiplinannya terhadap peraturan-peraturan dibidang kepegawaian. Selain itu juga pelanggaran disiplin telah dapat diselesaikan oleh atasan langsungnya.

Persentase jabatan struktural/manajerial terisi pada tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan kepada daerah secara langsung sehingga terdapat larangan mutasi dan promosi. Pada tahun 2021 capaiannya mengalami kenaikan yaitu sejumlah 93,13% setelah dihilangkannya beberapa jabatan administrator dan pengawas. Sampai dengan akhir tahun 2024 masih terdapat 78 formasi jabatan struktural yang belum terisi dari 513 formasi jabatan struktural.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/jumlahnya masih rendah. Adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional pada tahun 2022 turut meningkatkan capaian persentase jumlah jabatan fungsional non guru/kesehatan. Selain itu pengadaan CPNS dan PPPK sejak tahun 2021 formasi yang dibuka adalah formasi jabatan fungsional guru, fungsional kesehatan dan formasi jabatan fungsional teknis lainnya. Namun sampai dengan tahun 2024, persentase jabatan fungsional selain guru dan tenaga kesehatan jumlahnya masih rendah yaitu 34,06%.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain tingginya minat PNS untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal, pengadaan CPNS mempersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.

Pegawai fungsional di luar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya untuk tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional dan seleksi ASN untuk formasi tenaga teknis lainnya.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya relatif tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linear sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Saat ini pengangkatan pertama kedalam jabatan fungsional melalui jalur formasi seleksi ASN tidak lagi mempersyaratkan uji kompetensi melainkan paling lambat

1 (atu) tahun harus dilantik kedalam jabatan fungsional, hal ini menjadikan tidak semua jabatan fungsional harus melalui uji kompetensi terlebih dahulu.

Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki itikad positif untuk menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN. Dari rentang indeks 0,00 – 1,00 setiap tahun indeks Sistem Merit selalu meningkat, dilakukan penilaian sejak tahun 2021 dengan indeks 0,27 dalam kategori Buruk, tahun 2022 menjadi 0,58 dalam kategori kurang dan di semester pertama tahun 2023 dalam kategori baik dengan indeks 0,68. Pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian karena dengan berlakunya UU nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga penilai atas pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah kelembagaannya dihapus dan kewenangannya di serahkan kepada Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Inisiasi manajemen talenta ASN sebagai salah satu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dilakukan mulai tahun 2018 dengan melakukan pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas melalui talent pool sebagaimana amanat Perbup nomor 75 tahun 2017 tentang penelusuran kader potensial (*talent scouting*) dan mekanisme pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Kabupaten Tegal. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tegal mulai menerapkan manajemen talenta berdasarkan Permen PANRB nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN dan Perbup nomor 22 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta ASN.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase ASN mengikuti pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah akan meningkat. Adanya kewajiban ASN mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi maka Pemerintah daerah harus memberikan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya. Data pengembangan sumber daya manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2. 232 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PNS yang mengikuti diklat 20 jam dalam setahun	26.74	29.29	31.83	76.28	80,51
2	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33.40	42.20	53.63	56.97	88,87
3	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	N/A	44,76	67,87	80,76

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tegal, 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami penambahan secara signifikan. Dimensi kompetensi dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki bobot yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah melalui kegiatan “Kamis Belajar”. Program kamis belajar merupakan upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ASN minimal 20 jam dalam setahun. Kamis Belajar yang mulai dilaksanakan tahun 2023 turut meningkatkan Indeks

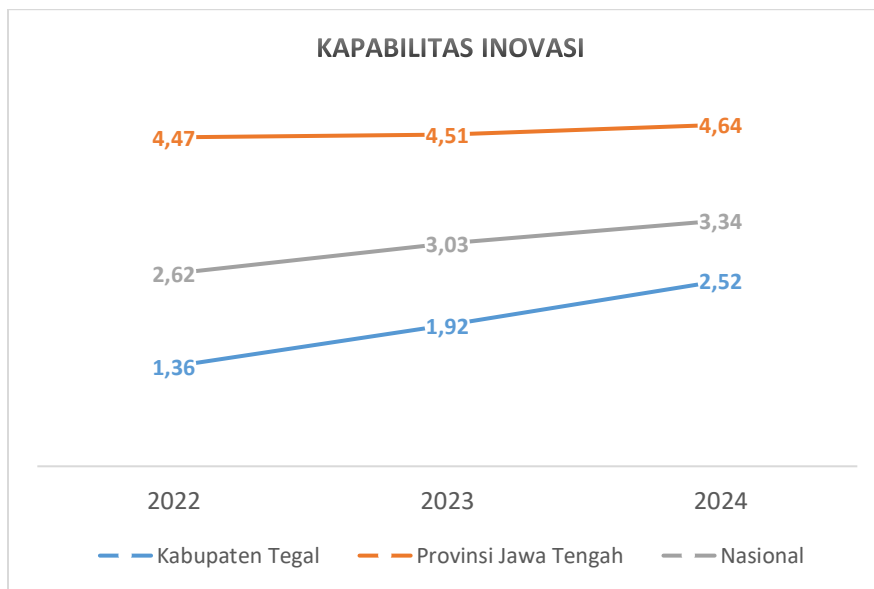
Profesionalitas ASN sehingga nilai IP ASN yang mulai dilakukan pengukurannya oleh BKN sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 indeksinya meningkat cukup signifikan dengan kategori Baik.

D. Penelitian dan Pengembangan

Dalam konsep pembangunan yang berdaya saing, urusan penelitian dan pengembangan memiliki peran krusial dalam membangun ekosistem inovasi khususnya pada komponen pilar kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Dalam tiga tahun terakhir pilar kapabilitas inovasi baik Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Meskipun capainnya selalu lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, Kapabilitas Inovasi Kabupaten Tegal menunjukkan peningkatan yang paling signifikan dari 1,36 (2022) menjadi 2,52 (2024) atau menunjukkan peningkatan sebesar 85,3% dalam dua tahun terakhir. Sementara Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat sebesar 3,8% dari 4,47 (2022) menjadi 4,64 (2024), sedangkan Nasional mengalami peningkatan 27,5% dari 2,62 (2022) menjadi 3,34 (2024). Tren pertumbuhan kapabilitas inovasi Kabupaten Tegal yang lebih tinggi menunjukkan potensi besar dalam peningkatan inovasi. Jika pertumbuhan ini berlanjut, Kabupaten Tegal dapat mengejar rata-rata nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Gambar 2. 49 Kapabilitas Inovasi



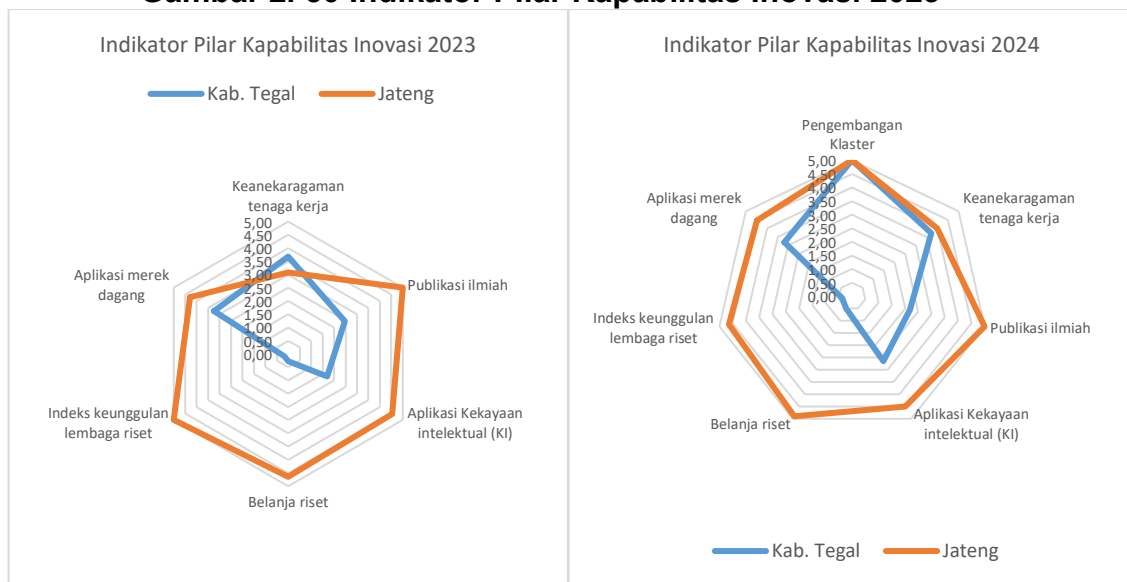
Sumber: Metadata IDSD BRIN, 2024 (diolah)

Jika dilihat performa indikator pada pilar Kapabilitas Inovasi antara Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah pada dua tahun terakhir, hampir semua indikator pada pilar ini menunjukkan gap/kesenjangan capaian yang cukup besar jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah terutama pada aspek Belanja Riset, Indeks Keunggulan Lembaga Riset, Aplikasi Kekayaan Intelektual dan Publikasi Ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal masih sangat minim dalam investasi dan kualitas penelitian

dibandingkan Provinsi Jawa Tengah serta menandakan bahwa jumlah paten atau hak kekayaan intelektual serta publikasi akademik dari Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Untuk itu tantangan Kabupaten Tegal ke depan adalah untuk:

- Meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi, khususnya dalam mendukung lembaga riset dan publikasi ilmiah;
- Peningkatan ekosistem inovasi diperlukan dengan memperkuat pengembangan klaster dan diversifikasi tenaga kerja;
- Mendorong aplikasi kekayaan intelektual (KI) dan merek dagang dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Tegal.

Gambar 2. 50 Indikator Pilar Kapabilitas Inovasi 2023



Sumber: Metadata IDSD BRIN, 2024 (diolah)

Dalam cakupan yang lebih sempit, kinerja inovasi pemerintah daerah dapat digambarkan melalui capaian indeks inovasi daerah (IID). Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024) capaian IID Kabupaten Tegal selalu masuk kategori Kabupaten Sangat Inovatif. Meskipun begitu skor IID Kabupaten Tegal masih belum konsisten bahkan dalam 3 (tiga) tahun (2021-2023) capaiannya selalu menurun dimana secara berurutan dari 62,06 menjadi 61,81 dan menurun Kembali menjadi 60,33. Adapun tahun 2024 meningkat cukup signifikan menjadi 67,80. Meskipun pada tahun 2024 telah meningkat secara signifikan namun akselerasinya masih tertinggal dibandingkan kab/kota lainnya yang dalam lingkup Jawa Tengah seperti Klaten, Temanggung, Pati, Blora, Boyolali, Wonogiri dan Sragen yang beberapa kabupaten diantaranya pada tahun-tahun sebelumnya capaiannya di bawah Kabupaten Tegal. Tertinggalnya akselerasi IID Kabupaten Tegal tersebut sangat dipengaruhi oleh relatif masih rendahnya produksi inovasi dengan kematangan yang tinggi dimana pada tahun 2024 Kabupaten Tegal hanya memiliki 89 inovasi yang dilaporkan dengan rata-rata kematangan sebesar 79,65 poin. Untuk itu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan produksi inovasi daerah dengan kematangan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Tabel 2. 233 Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Skor Inovasi (Indeks Inovasi Daerah)	4.027 (Metode Lama)	62,06 (Metode Baru)	61,81 (Metode Baru)	60,33 (Metode Baru)	67,80 (Metode Baru)

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2024

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut :

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Renstra tahun 2021-2024 dengan indikator program yaitu Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI . Sebagai ilustrasi capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal (APIP) mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 234 Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100%	100%	100%	60%	100%
2	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02%	100%	100%	71,25%	45,27
3	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,67%	91,98%	92,29%	91,56%	92,28%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dengan indikator persentase tindak lanjut hasil

pengawasan Inspektorat Provinsi tercapai sesuai target kecuali capaian pada tahun 2023 belum tercapai 100% dikarenakan masih adanya temuan atas Monitoring capaian SPM yang belum dapat ditindaklanjuti karena dokumen yang diminta adalah dokumen Renstra dan Renja OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar yang memuat target indikator SPM nya 100%. Indikator Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten pada tahun 2024 tercapai 45.27%, belum tercapai 100% dikarenakan masih adanya temuan atas evaluasi AKIP OPD Tahun 2024 pada 48 OPD di Kabupaten Tegal yang tindaklanjuti pada evaluasi AKIP di Tahun selanjutnya yaitu di tahun 2025 dan masih adanya rekomendasi kasus yang belum selesai ditindaklanjuti. Indikator Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI tahun 2024 semester II hasil penetapan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) sampai dengan Februari belum kami terima, data yang ada di tabel adalah hasil penetapan pada semester I 2024, dengan capaian 92.28% dari total 751 rekomendasi, 693 rekomendasi sudah selesai ditindaklanjuti, dan masih menyisakan 58 rekomendasi yang sebagian besar adalah temuan lama dengan berbagai kompleks permasalahannya sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.

Renstra tahun 2025-2026 Inspektorat Kabupaten Tegal Indikator pada program penyelenggaraan pengawasan mengalami perubahan yaitu:

1. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan;
Pengukuran menggunakan meta data jumlah rekomendasi atas hasil pengawasan Inspektorat Provinsi, Hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten dan hasil pengawasan BPK RI yang sudah selesai ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan.
2. Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel;
Pengukuran menggunakan meta data Jumlah OPD yang menjadi Obyek pengawasan keuangan daerah berbanding jumlah seluruh OPD
3. Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel
Pengukuran menggunakan metadata Jumlah desa yang dapat menyajikan laporan keuangan secara akuntabel (LKMD,LRA,CALK, Inventaris asset) berbanding jumlah seluruh desa di Kabupaten Tegal,
4. Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengukuran menggunakan jumlah laporan evaluasi kinerja yang sudah diselesaikan.

Perubahan indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah dan Desa maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauh mana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Kegiatan Pengawasan Desa didalamnya terdapat

pengawasan keuangan Desa melalui aplikasi siswakeudes dan bekerjasama dengan KAP (kantor Akuntan Publik) agar Desa bisa melakukan penyajian pelaporan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan yang berlaku dan tertib administrasi Desa dan adanya monitoring kinerja pemerintahan Desa. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana.

Program Penyelenggaraan Pengawasan mendukung tercapainya IKU Inspektorat pada Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-674/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tegal memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3.026.

Tabel 2. 235 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan (SPIP)	3,0375	3,0375	3.032	3	3.026

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP mengalami penurunan mulai Tahun 2022 dan Tahun 2023, hal ini disebabkan penilaian SPIP menggunakan SPIP terintegrasi, yang didalamnya terdapat penilaian SPIP, Penilaian MRI, Penilaian IEPK dan Penilaian Kapabilitas APIP. Dalam melaksanakan maturitas penyelenggaraan SPIP dan manajemen resiko pada seluruh OPD perlu memperhatikan substansi pengendalian intern dengan memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP, Sub unsur penilaian MRI, Sub unsur penilaian IEPK dan Sub Unsur penilaian Kapabilitas APIP, dengan melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi dan kebijakan pada seluruh unsur OPD.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Renstra tahun 2021-2024 dengan indikator program, yaitu : Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal, Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah, Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel. Indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang akan datang sesuai draf hasil perubahan kelembagaan Inspektorat, dengan nomenklatur masing masing Inspektur Pembantu secara jelas berdasarkan bidang tugas, dan tidak lagi berdasarkan wilayah /audit. Nomenklatur Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus.

Sebagai ilustrasi tersaji capaian indikator program sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 236 Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal			100%	100%	100%
2	Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah			80%	93.15%	93.15%
3	Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2024

Data pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2024 indikator Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal tercapai 100%. Tahun 2024 sudah dilakukan evaluasi pada 4 OPD yaitu Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil, RSUD dr Soeselo, dan RSUD Surodadi, namun hanya satu OPD yaitu RSUD dr Soeselo yang lolos diajukan ke Tim TPN (Tim Penilai Nasional) KemenPAN-RB, namun tidak lolos pada tahap administrasi. Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 masih menggunakan data capaian tahun 2023. Indikator Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel tercapai 100%, pengukuran menggunakan bahwa seluruh OPD sudah dapat menyelesaikan laporan LKPD.

Renstra tahun 2025-2026 Inspektorat Kabupaten Tegal Indikator pada program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mengalami perubahan yaitu Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi. Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi kegiatan yang dilakukan adalah Pendampingan dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait

Pengukuran capaian Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi yaitu pada terselenggaranya pendampingan, pengawasan dan asistensi pada 48 perangkat Daerah di Kabupaten Tegal yang pelaksanaannya meliputi sosialisasi LHKAN, pelaksanaan kegiatan Hakordia, pelaksanaan monitoring saber pungli, pemenuhan penilaian MCP KPK, Penilaian SPI, Penilaian IEPK,

pendampingan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, SPIP Perangkat Daerah, serta pendampingan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi mendukung tercapainya IKU Inspektorat yaitu Meningkatnya Level Kapabilitas APIP. Dengan capaian selama 5 Tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 tercapai pada Level 3 Penuh atau pada tingkat *Integrated* dimana APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 2. 237 Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Terintegrasi Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2024

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Upaya pemerintah mengoptimalkan tugas Perangkat Daerah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dengan Reformasi Birokrasi.

Dari tabel capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Tegal capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Tegal telah berusaha keras untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik. SAKIP dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya yang dibagi dalam 3 (tiga) rumpun koordinasi. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara tupoksional adalah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, hukum, dan perundang-undangan serta Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu fungsi pengkoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan, tugas pembantuan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, kerjasama daerah, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pertanahan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pembinaan mental, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga,

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 238 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	15,62	58,06	65,83	51,52
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	75	84,37	90,32	100	100
3	Persentase Indek RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	N/A	63.69	64,21	64,69	65,18	N/A
4	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100	64
5	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	99	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tergambar melalui beberapa indikator utama, yaitu nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Reformasi Birokrasi (RB). Selain itu, aspek hukum dan perundang-undangan juga menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja.

Pada tahun 2024, **Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra dengan nilai SAKIP B (Baik)** mencapai **51,52%**, yang menunjukkan bahwa **17 dari 33 OPD** dalam rumpun ini telah memenuhi standar penilaian yang ditetapkan. Meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam peningkatan akuntabilitas di beberapa OPD yang belum mencapai target.

Kinerja pelayanan diukur melalui **Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra yang sesuai standar (IKM Baik)**. Pada tahun 2024, indikator ini mencapai **100%**, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan masyarakat di seluruh OPD Kabupaten Tegal.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024, **penilaian Reformasi Birokrasi (RB) tidak dilakukan terhadap seluruh OPD**, melainkan menggunakan pendekatan tematik dengan **melibatkan sampel OPD** tertentu. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat dinilai secara terpisah. Reformasi Birokrasi merupakan penilaian yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada Kabupaten Tegal sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah.

Selain indikator tersebut, di Sekretariat Daerah, terdapat unit kerja yang berperan dalam koordinasi bidang hukum dan perundang-undangan. Kinerja unit ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu:

1. **Persentase pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang terselesaikan**, yang pada tahun 2024 mencapai **64%**. Capaian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa rancangan peraturan yang belum terselesaikan sesuai target.
2. **Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi**, yang pada tahun 2024 berhasil mencapai **100%**, menunjukkan efektivitas fasilitasi hukum yang diberikan kepada perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja perangkat daerah di bawah rumpun koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan tren peningkatan, terutama dalam aspek pelayanan publik. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam capaian SAKIP dan pembentukan Perda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas implementasi kebijakan guna mencapai target yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

2) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;. Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM dan pasar, badan usaha milik daerah dan perbankan, penanaman modal dan PTSP, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, transmigrasi, sumber daya kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Perekonomian dan Pembangunan memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2. 239 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	N/A	N/A	70	75	75	55,56
2	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	N/A	72.72	63.63	81.81	81.81	100,00
3	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan nilai B (Cukup Baik)	N/A	63.69	64.21	64.69	64.69	N/A
4	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	100	100	100	100	100	100
5	Level Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	1	1	1	2	2	3

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	11	12	12	17	17	17

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2024

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan tergambar melalui beberapa indikator utama, yaitu nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Reformasi Birokrasi (RB), serta aspek pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2024, Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai SAKIP B (Baik) mengalami penurunan menjadi 55,56% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 75%. Penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan strategi dan evaluasi dalam pelaksanaan program kerja OPD dalam rumpun ini.

Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik) menunjukkan tren peningkatan signifikan, mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh OPD di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Sementara itu, Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai B (Cukup Baik) tidak tersedia untuk tahun 2024 (n.a.), mengingat adanya perubahan dalam mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Sebelumnya, capaian indeks ini cenderung stabil dalam kisaran 63,69% hingga 64,69% selama periode 2020-2023.

Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa yang mencapai kategori BAIK tetap 100% secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan keberlanjutan dalam penerapan prosedur pengadaan yang efektif dan transparan.

Pada aspek kapasitas kelembagaan, Level Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi mengalami peningkatan dari 1,00 pada tahun 2021 menjadi 3,00 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan.

Selain itu, Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi menunjukkan sejak tahun 2022 hingga 2024 Pengadaan Barjas di Kabupaten Tegal telah berhasil betah pada level 17. Sekretariat Daerah melalui bagian pengadaan barang jasa telah melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pada kinerja pengadaan barang dan jasa dan upaya memperthankan standarisasi dalam hal pengadaan barang jasa.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan pencapaian yang baik dalam aspek pelayanan publik dan pengadaan barang/jasa. Namun, terdapat tantangan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, terutama dalam pencapaian nilai SAKIP.

3) Capaian Kinerja Rumpun Koordinasi Administrasi Umum

Rumpun Koordinasi Asisten Administrasi umum secara tupoksional membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan umum dan teknis urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, komunikasi pimpinan, pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan komunikasi pimpinan, pembinaan

pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan sekretariat daerah. Disamping itu juga menjalankan fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset, kearsipan, dan perpustakaan, persandian, komunikasi dan informatika. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Rumpun Administrasi Umum memiliki beberapa indikator sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 240 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Rumpun Koordinasi Administrasi Umum**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor dan rumah jabatan sesuai standar dan administrasi pelayanan kepegawaian tepat waktu	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Komponen	78,36	80,83	82,20	82,20	82,40	86,38
4	Predikat Nilai SAKIP Komponen	60,10	61,36	63,28	62,19	62,51	65,58
5	Nilai Reformasi Birokrasi Komponen	45,25	63,69	64,21	64,62	64,87	77,6
6	Persentase Kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
7	Persentase kegiatan seremonial pimpinan daerah yang terfasilitasi layanan keprotokolan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum nilai SAKIP B (Baik)	N/A	N/A	83,33	66,66	73,47	100
9	Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun koordinasi Administrasi Umum yang sesuai standard (IKM Baik)	N/A	83,33	85,71	83,33	84,72	100
10	Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Administrasi Umum dengan nilai CC (Cukup Baik)	N/A	63,69	64,21	64,90	65,08	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tegal 2024

Capaian kinerja pada rumpun Administrasi Umum menunjukkan tren peningkatan dalam berbagai indikator utama. Pemenuhan layanan keuangan dan perencanaan perangkat daerah, serta pemenuhan sarana prasarana dan administrasi kepegawaian, telah mencapai 100% secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan dari 78,36 pada 2019 menjadi 86,38 pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, predikat nilai SAKIP Komponen menunjukkan perbaikan bertahap dari 60,1 di 2019 menjadi 65,58 di 2024, sementara nilai Reformasi Birokrasi Komponen meningkat signifikan dari 45,25 di 2019 menjadi 77,6 di 2024.

Indikator kinerja Perangkat Daerah dalam rumpun Koordinasi Administrasi Umum juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai SAKIP meningkat hingga mencapai 100 pada 2024, sementara persentase pelayanan publik dengan standar IKM Baik juga mencapai 100% pada tahun yang sama. Persentase kebijakan strategis dan kegiatan pimpinan yang diinformasikan ke masyarakat, serta kegiatan seremonial yang difasilitasi sesuai SOP, tetap konsisten di angka 100% setiap tahunnya. Namun, indeks Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah rumpun Administrasi Umum yang sebelumnya dinilai dengan predikat CC (Cukup Baik) tidak tercatat pada 2024, sehingga perlu evaluasi lebih lanjut terhadap tren reformasi birokrasi ke depan.

Indeks Reformasi Birokrasi pada rumpun Administrasi Umum tidak terdeteksi pada tahun 2024 akibat adanya perubahan metode penilaian, yaitu penerapan RB Tematik. Dengan metode ini, objek penilaian tidak lagi mencakup seluruh OPD secara menyeluruh, melainkan dipilih dari beberapa OPD tertentu sesuai dengan fokus evaluasi reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan ini berdampak pada tidak tercatatnya nilai indeks Reformasi Birokrasi untuk rumpun Administrasi Umum pada tahun tersebut.

Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan, terutama dalam pemenuhan layanan keuangan dan perencanaan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta administrasi pelayanan kepegawaian yang secara konsisten mencapai 100% setiap tahun. Selain itu, peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP, dan Nilai Reformasi Birokrasi Komponen mengindikasikan adanya perbaikan dalam efektivitas dan efisiensi birokrasi. Dengan adanya perubahan metode penilaian RB Tematik, diperlukan strategi yang adaptif agar reformasi birokrasi di rumpun Administrasi Umum tetap dapat terukur dan terus mengalami peningkatan.

G. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 6 tahun dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 241 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2024

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 242 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda/Propemperda, dan Perda yang di Tetapkan dari Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	5	4	4	4	4
2.	Jumlah Prolegda/ Propemperda	12	5	4	6	9
3.	Jumlah Perda ditetapkan	17	10	3	3	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2024

1) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 243 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan	90	90	96	96	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2024

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran..

H. Kecamatan

Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan. Dari kedudukan tersebut terdapat beberapa kondisi yang menggambarkan kinerja kecamatan dari mulai tingkat kepuasan layanan publik, sampai dengan fungsinya sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa, sejak tahun 2021 yang semula menggunakan model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas dan dalam perkembangannya menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, PDT

dan Transmigrasi. Dari beberapakondisi kinerja di wilayah kecamatan pada tahun 2023 dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 244 Kondisi Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	IKM	Persentase Jml Lkd Terfasilitasi	Persentase Gangguan Trantibum Terselesaikan	Persentase Terselenggaranya Fasilitasi,Koordinasi Dan Pembinaan	Persentase sede sa Tertib Administrasi
Kecamatan Adiwerna	78,87	N/A	80	90	68
Kecamatan Balapulang	82	N/A	100	100	0
Kecamatan Bojong	86,25	N/A	100	100	68
Kecamatan Bumijawa	86,21	N/A	100	100	0
Kecamatan Dukuhturi	83	N/A	100	100	0
Kecamatan Dukuhwaru	79,94	N/A	100	100	68
Kecamatan Jatinegara	82,94	N/A	100	81,1	68,63
Kecamatan Kedungbanteng	84	N/A	82	82	88
Kecamatan Kramat	82,85	N/A	100	100	0
Kecamatan Lebaksiu	87,66	N/A	75	100	68
Kecamatan Margasari	81,9	N/A	100	100	0
Kecamatan Pagerbarang	82,58	N/A	100	100	0
Kecamatan Pangkah	89	N/A	100	100	89
Kecamatan Slawi	85,61	N/A	100	100	80
Kecamatan Suradadi	79,01	N/A	100	100	65
Kecamatan Talang	88,47	N/A	0	75	0
Kecamatan Tarub	76	N/A	0	100	40
Kecamatan Warureja	80,98	N/A	84	100	79
RATA RATA	83,18	N/A	84,5	96,01	43,42

Sumber: 18 Kecamatan Kabupaten Tegal 2023 dan <https://idm.kemendesa.go.id/>

Kondisi kinerja kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan melalui indikator pelayanan publiknya, melalui capaian nilai IKM tahun 2022 rata-ratanya mengalami peningkatan yaitu diangka 83,18 dari tahun 2021 dengan rata-rata angka IKM 82,75 dan memiliki predikat baik secara keseluruhan. Data tersebut diambil dari sistem informasi terakait dengan survey kepuasan masyarakat <http://sepakat.tegalkab.go.id/>. Peningkatan

kinerja kecamatan juga ditandai dengan kondisi kinerja persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pemerintahan umum seluruhnya dapat diselesaikan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai IKM, memerlukan upaya perbaikan secara terus menerus mengingat level kepuasan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat.

Terkait kondisi kinerja dari cerminan fungsi koordinator, asistensi dan fasilitasi desa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan diantaranya kondisi kinerja desa yang tertib administrasi, persentase gangguan trantibum yang terselesaikan, dan persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM untuk desa tertib administrasi rata-rata diangka 43,42% menurun dari kondisi tahun sebelumnya pada angka 67,83%. Kemudian untuk persentase gangguan trantibum yang terselesaikan di rata rata 84,5% menurun dari kondisi di tahun sebelumnya yaitu 100% yang terakhir persentase terselenggaranya fasilitasi koordinasi dan pembinaan PUM di rata rata 96,01% menurun dari kondisi sebelumnya di 100%.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari tahun 2020-2024. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2. 245 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah LSM Aktif	80	80	170	190	190
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	2	2	2	2	2
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2024

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argumen bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2022 dilaksanakan aktivitas FKUB GO TO SCHOOL yang melibatkan sekolah setingkat SMA dengan jumlah peserta sebanyak 350 peserta dan terselenggaranya Rakerda FKUB Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa. Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2022 terdapat 170 organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam sistem database ormas Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 2022 terdapat 170 organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 246 Persentase Masyarakat Paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Kondisi Trantibum				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	NA	80,42%	84,66%	86,66 %	86,66 %
2.	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	0%	0%	17,7%	90%	90%
4.	Persentase Ormas yang Terbina	NA	80%	90%	90%	90%
5.	Persentase Konflik yang tertangani	100%	97%	100%	100%	100%
6.	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	100%	85%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2024

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan indikator persentase masyarakat yang memahami ideology pancasila dan karakter kebangsaan, pada tahun 2021 sebesar 84,66% meningkat di tahun 2022 sebesar 86,66%. Melalui survei kepada masyarakat dengan mengambil sample golongan masyarakat yang telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan indicator yang pertama yaitu Persentase partai politik yang melaksanakan pendidikan politik. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan (yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Tegal pada periode pemilu legislatif 2019-2024) berjumlah 11 partai, dimana 60% bantuan keuangan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dipergunakan untuk kegiatan pendidikan politik terhadap anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
3. Meningkatkan kemandirian, kematangan, dan membangun jiwa nasional untuk menjaga persatuan nasional.

Indikator yang kedua yaitu persentase lembaga pendidikan SMA/ SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik. Jumlah lembaga pendidikan SMA/SMK dan PT di Kabupaten Tegal pada akhir tahun 2022 adalah 97. Persentase lembaga pendidikan SMA/ SMK dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik s.d. tahun 2022 sebesar 90% yaitu 88 SMA/SMK dan 4 Perguruan Tinggi. Pendidikan politik memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indicator Persentase Ormas yang Terbina. Data perkembangan organisasi masyarakat yang sudah terdaftar dalam data base ormas di Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 162 Ormas. Selama tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap 54 ormas.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan indikator Persentase Konflik yang tertangani. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator persentase konflik yang tertangani sebesar 100%. Selama tahun 2022, ada 4 kasus konflik yang terjadi, secara umum tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, sparatisme yang berdampak signifikan terhadap kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal. SARA adalah akronim dari Suku Agama Ras dan Antar Golongan. SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya.

Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator persentase gangguan KANTIBMAS yang tertangani sebesar 100%. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

perlu ditingkatkan untuk menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2022 sebanyak 13 kasus gangguan KANTIBMAS yang telah tertangani.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

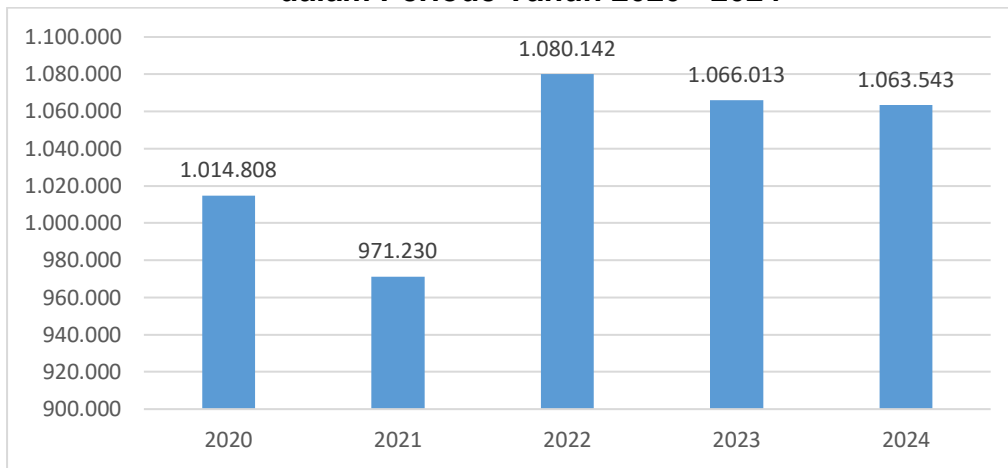
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

A. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Berdasarkan grafik rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Tegal dalam periode 2020-2024, terdapat fluktuasi dalam tren pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran mencapai Rp1.014.808, kemudian menurun cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp971.230. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan pengeluaran yang cukup tajam hingga Rp1.080.142, yang dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Setelah itu, pengeluaran mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp1.066.013 dan kembali turun tipis pada tahun 2024 sebesar Rp1.063.543. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor inflasi, perubahan pola konsumsi, atau adanya kebijakan ekonomi yang memengaruhi pengeluaran masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, tren pengeluaran cenderung stabil dalam dua tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya keseimbangan dalam pola konsumsi penduduk Kabupaten Tegal.

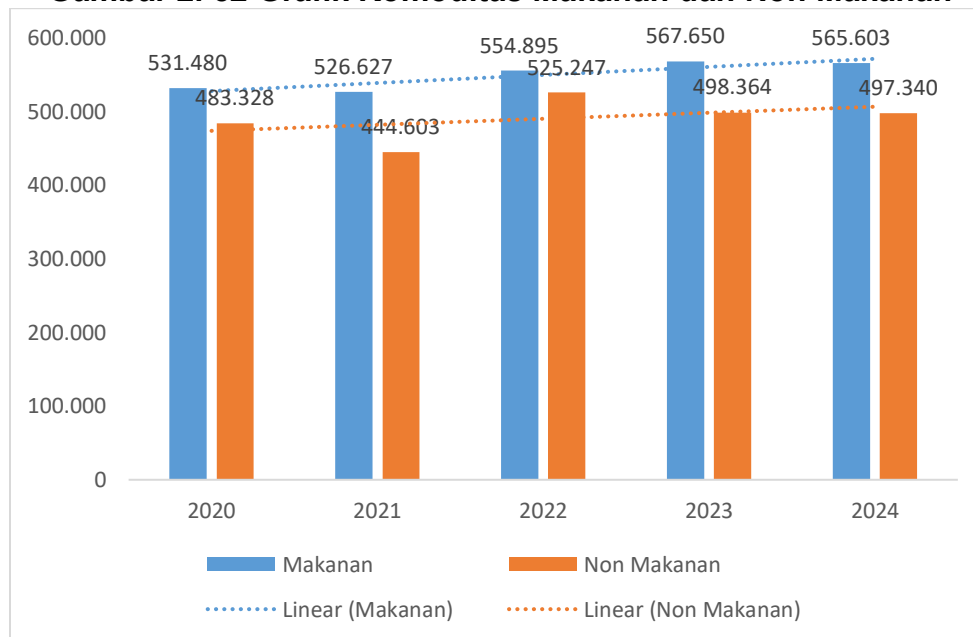
Gambar 2. 51 Grafik Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Tegal dalam Periode Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Jika dilihat komposisi pengeluarannya, baik untuk komoditas makanan dan non makanan telah menunjukkan peningkatan yang juga sangat signifikan. Pengeluaran untuk komoditas makanan menurun dari Rp. 280.568/perbulan/perkapita di tahun 2012 menjadi Rp. 554.895 / bulan/perkapita. Sedangkan pengeluaran untuk komoditas non makanan meningkat dari Rp. 211.827/perbulan/perkapita di tahun 2012 menjadi Rp. 525.247/perbulan/perkapita di tahun 2022. Adapun gangguan Covid-19 paling berpengaruh terhadap besaran pengeluaran masyarakat pada komoditas non makanan yang terjadi di tahun 2021.

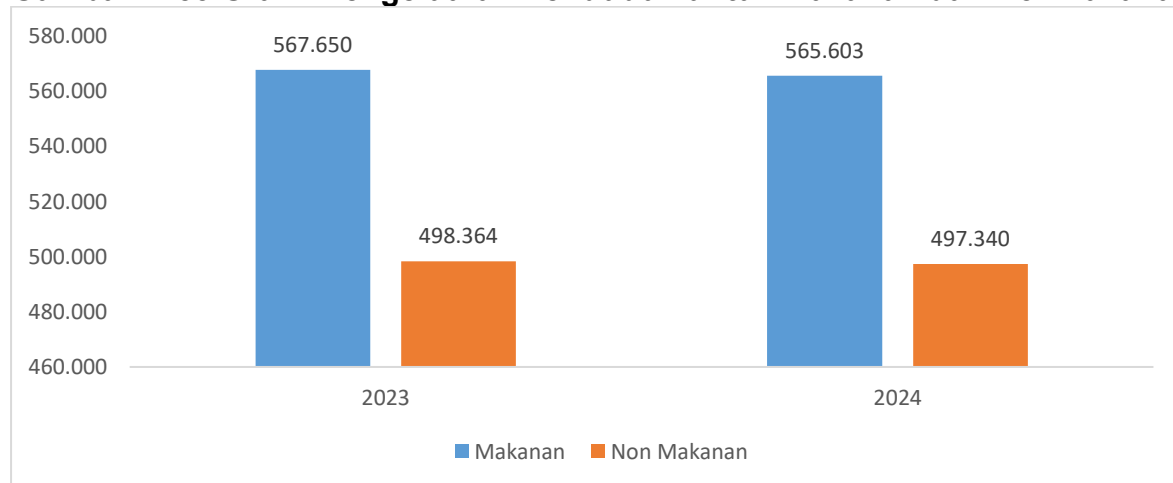
Gambar 2. 52 Grafik Komoditas Makanan dan Non Makanan



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

Pada Gambar 2.45 terdapat Grafik Komoditas Makanan dan Non Makanan. Grafik komoditas makanan dan non-makanan di Kabupaten Tegal menunjukkan tren pengeluaran yang berbeda dalam periode 2020-2024. Secara umum, pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari Rp531.480 pada tahun 2020 menjadi Rp565.603 pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan cenderung fluktuatif, dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp525.247 dan kembali turun menjadi Rp497.340 pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan cenderung stabil dan meningkat seiring dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan pengeluaran untuk non-makanan lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti daya beli masyarakat, inflasi, serta perubahan prioritas konsumsi. Garis tren linier menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat dalam jangka panjang, sedangkan pengeluaran untuk non-makanan relatif stagnan dengan sedikit kecenderungan menurun. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih fokus pada kebutuhan primer dibandingkan sekunder.

Gambar 2. 53 Grafik Pengeluaran Penduduk untuk Makanan dan Nonmakanan



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2025 (diolah)

Pengeluaran makanan dan non makanan pada dasarnya dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah pendapatan penduduk maka alokasi pengeluaran sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebaliknya semakin tinggi pendapatan penduduk maka Sebagian alokasi pengeluarannya juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Jika dilihat dari komposisinya memang pengeluaran untuk makanan masih mendominasi. Hal tersebut karena kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun tahun 2024 komposisinya mulai bergeser ke pengeluaran non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Tegal semakin meningkat dimana pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Tegal tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya sedikit penurunan total pengeluaran dari Rp1.066.013 pada 2023 menjadi Rp1.062.943 pada 2024.

Pengeluaran untuk makanan mengalami sedikit penurunan dari Rp567.650 menjadi Rp565.603, terutama disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran untuk bahan makanan seperti umbi-umbian, minyak kelapa, bumbu-bumbuan, serta makanan dan minuman jadi. Namun, beberapa komoditas seperti padi-padian, ikan/udang, serta sayur-sayuran justru mengalami peningkatan. Di sisi lain, pengeluaran non-makanan juga mengalami sedikit penurunan dari Rp498.364 pada 2023 menjadi Rp497.340 pada 2024, meskipun terdapat peningkatan pada kategori aneka barang dan jasa serta keperluan pesta dan upacara. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor ekonomi seperti inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat, perubahan pola konsumsi, atau adanya penyesuaian prioritas pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, tren ini perlu dicermati lebih lanjut untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan kebijakan ekonomi daerah.

Tabel 2. 247 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan 2024

Kelompok Komoditas/ <i>Commodity Group</i>	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi—padian/ <i>Cereals</i>	64.161	80.791
Umbi—umbian/ <i>Tubers</i>	4.214	2.560
Ikan/udang/cumi/kerang/ <i>Fish/shrimp/common squid/shells</i>	17.807	18.523
Daging/ <i>Meat</i>	19.697	19.144
Telur dan susu/ <i>Eggs and milk</i>	26.834	25.485
Sayur—sayuran/ <i>Vegetables</i>	38.393	42.766
Kacang—kacangan/ <i>Legumes</i>	15.674	15.277
Buah—buahan/ <i>Fruits</i>	24.115	23.920
Minyak dan kelapa/ <i>Oil and coconut</i>	12.836	11.863
Bahan minuman/ <i>Beverage stuffs</i>	19.500	18.263
Bumbu—bumbuan/ <i>Spices</i>	14.456	13.988
Konsumsi lainnya/ <i>Miscellaneous food items</i>	11.000	9.713
Makanan dan minuman jadi/ <i>Prepared food and beverages</i>	229.300	209.553
Rokok/ <i>Cigarettes</i>	69.664	73.757
Jumlah makanan/<i>Total food</i>	567.650	565.603
Bukan makanan/<i>Non—food</i>		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ <i>Housing and household facilities</i>	250.839	238.176
Aneka barang dan jasa/ <i>Goods and services</i>	115.829	131.213
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ <i>Clothing, footwear, and headgear</i>	22.270	22.313
Barang tahan lama/ <i>Durable goods</i>	45.451	35.943
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i>	37.539	38.103
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/ <i>Parties and ceremonies</i>	26.436	31.591
Jumlah bukan makanan/<i>Total non—food</i>	498.364	497.340
Jumlah/<i>Total</i>	1.066.013	1.062.943

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel distribusi pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah memiliki rata-

rata pengeluaran sebesar Rp565.031 per bulan, sedangkan kelompok 40% berpendapatan menengah mencapai Rp969.948, hampir dua kali lipat dari kelompok rendah. Sementara itu, kelompok 20% berpendapatan tinggi memiliki pengeluaran rata-rata Rp2.238.836 per bulan, lebih dari empat kali lipat dibandingkan kelompok pendapatan rendah. Ketimpangan ini menunjukkan adanya perbedaan daya beli yang cukup besar di masyarakat Kabupaten Tegal. Faktor-faktor seperti akses terhadap pekerjaan dengan upah layak, tingkat pendidikan, serta pola konsumsi dapat menjadi penyebab utama ketimpangan pengeluaran ini. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli kelompok berpendapatan rendah, seperti program subsidi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini.

Tabel 2. 248 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran di Kabupaten Tegal Tahun 2024

Rata–Pengeluaran per Kapita Sebulan <i>Monthly Average Expenditure Per Capita</i>	2024
(1)	(2)
40 persen penduduk berpendapatan rendah / 40 percent of the population is low income	565.031
40 persen penduduk berpendapatan menengah / 40 percent of the population is middle income	969.948
20 persen penduduk berpendapatan tinggi / 20 percent of the population is high income	2.238.836
Jumlah/Total	1.062.943

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2023

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan dari jumlah penduduk usia tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia non produktif berada di usia kurang dari 15 tahun dan yang berusia lebih dari 64 tahun. Sedangkan untuk penduduk usia produktif berada di rentang usia 15 sampai 64 tahun. Angka rasio ketergantungan menunjukkan banyak nya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan rasio yang semakin tinggi mengartikan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif juga semakin tinggi dan begitupun sebaliknya. Tanggungan beban oleh penduduk usia produktif disini merupakan tanggungan untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif. Tinggi rendahnya suatu angka ketergantungan rasio dipengaruhi oleh perubahan struktur umur antara penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur umur tersebut dipengaruhi juga oleh 3 faktor demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Berdasarkan data tingkat ketergantungan Kabupaten Tegal tahun 2020-2024, terlihat adanya perubahan dalam komposisi penduduk produktif dan non-produktif. Penduduk

produktif (usia 15-64 tahun) mengalami peningkatan dari 1.113.809 jiwa pada 2020 menjadi 1.159.633 jiwa pada 2024. Sementara itu, penduduk non-produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) juga mengalami kenaikan dari 483.265 jiwa pada 2020 menjadi 515.170 jiwa pada 2024. Rasio ketergantungan, yang menunjukkan jumlah penduduk non-produktif per 100 penduduk produktif, mengalami fluktuasi dengan peningkatan dari 43,39 pada 2020 menjadi 45,78 pada 2022, sebelum turun menjadi 44,19 pada 2023 dan sedikit meningkat menjadi 44,43 pada 2024. Meskipun rasio ketergantungan masih relatif stabil, peningkatan jumlah penduduk non-produktif mengindikasikan perlunya strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan ketenagakerjaan agar beban ekonomi terhadap kelompok usia produktif dapat diminimalkan dan keberlanjutan pembangunan tetap terjaga.

Tabel 2. 249 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk Produktif	1.113.809	1.113.731	1.113.731	1.147.688	1.159.633
2.	Penduduk Non Produktif	483.265	496.126	509.864	507.148	515.170
3.	Rasio Ketergantungan	43,39	44,55	45,78	44,19	44,43

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2025

C. Sumber Daya Manusia

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Tegal relatif cukup tinggi dan terakhir di tahun 2024 mencapai 44,43%. Untuk itu kebijakan dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi penduduk usia produktif menjadi penting untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut maka kualitas tenaga kerja perlu juga mendapatkan perhatian. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerjanya.

Berdasarkan data rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Tegal, terlihat bahwa mayoritas pekerja berasal dari kelompok dengan pendidikan SD atau lebih rendah, yang meningkat dari 385.988 jiwa pada 2023 menjadi 398.900 jiwa pada 2024 dengan persentase yang juga naik dari 94,11% menjadi 95,29%. Peningkatan serupa juga terjadi pada lulusan SMP/ sederajat dari 88,88% menjadi 95,03%. Sementara itu, lulusan SMA mengalami penurunan jumlah pekerja dari 193.842 jiwa pada 2023 menjadi 36.029 jiwa pada 2024, dengan persentase turun dari 88,08% menjadi 86,39%. Di sisi lain, lulusan perguruan tinggi (PT) mengalami sedikit peningkatan persentase dari 91,73% menjadi 91,78%, meskipun jumlahnya turun dari 57.425 jiwa menjadi 5.761 jiwa. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi tenaga kerja dengan pendidikan rendah masih dominan, ada kecenderungan fluktuasi dalam jumlah pekerja berpendidikan menengah dan tinggi, yang dapat berimplikasi pada kualitas tenaga kerja serta kebutuhan akan peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 250 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023-2024

N o	Tingkat Pendidikan	2020 Jumlah (Jiwa)	%	2021 Jumlah (Jiwa)	%	2022 Jumlah (Jiwa)	%	2023 Jumlah (Jiwa)	%	2024 Jumlah (Jiwa)	(%)
1	SD/lebih rendah	343.025	53,18	326.698	50,69	319.650	49,71	385.988	94,11	398.900	95,29
2	SMP/ sederajat	113.806	17,64	114.302	17,73	118.768	18,47	140.504	88,88	9.207	95,03
3	SMA	145.142	22,5	154.109	23,91	162.365	25,25	193.842	88,08	36.029	86,39
4	Perguruan Tinggi (PT)	43.005	6,67	49.390	7,77	42.247	6,57	57.425	91,73	5.761	91,78
	J U M L A H							777.759	100	868.114	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2023 (diolah)

* Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Berdasarkan lapangan pekerjaannya di tahun 2024, mayoritas tenaga kerja yang ada mencapai 48,81% terserap dilapangan pekerjaan sektor jasa, berikutnya sektor manufaktur (29,10%) dan terakhir sektor pertanian (22,10%). Melihat struktur ekonomi Kabupaten Tegal yang kontribusinya didominasi sektor industri pengolahan sementara sebagian tenaga kerja yang ada terserap di sektor jasa, maka dapat mengindikasikan bahwa sektor usaha jasa yang dominan dan perlu mendapat perhatian adalah sektor jasa pendukung aktivitas industri manufaktur. Untuk itu kebijakan pengembangan lapangan usaha sektor jasa yang mendukung industri manufaktur masih perlu didorong ke depan.

Selain itu untuk mengantisipasi isu ketahanan pangan, dimana sektor pertanian mulai ditinggalkan perlu juga mendapatkan perhatian. Ditinggalkannya sektor lapangan usaha pertanian dikarenakan sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda karena factor produktivitasnya yang rendah. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian sekaligus mampu memberikan kesejahteraan kepada petani.

Tabel 2. 251 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan	2022 Jumlah (Jiwa)*	%
1	Jasa	423.720	48,81
2	Manufaktur	252.621	29,10
3	Pertanian	191.853	22,10
	JUMLAH	868.114	100

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2023 (diolah)

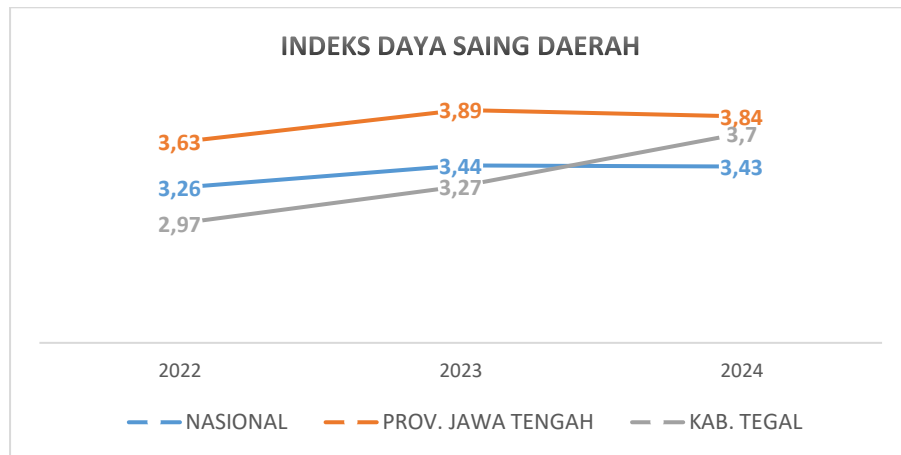
*Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

D. Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal (PDSD)

Daya saing daerah Kabupaten Tegal dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penguatan secara konsisten. Penguatan tersebut ditandai oleh meningkatnya indeks daya saing daerah (IDSD) Kabupaten Tegal dari 2,97 poin di tahun 2022 meningkat menjadi 3,27 di tahun 2023 dan terakhir meningkat menjadi 3,7 poin di tahun 2024.

Konsistensi tren peningkatan tersebut menunjukkan capaian yang paling signifikan dibandingkan tren Jawa Tengah maupun Nasional yang justru mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan kondisi 2023. Konsistensi peningkatan IDSD Kabupaten Tegal menunjukkan adanya perbaikan dalam faktor-faktor yang mendukung daya saing daerah, seperti Lingkungan Pendukung, SDM, dan Pasar dan Ekosistem Inovasi.

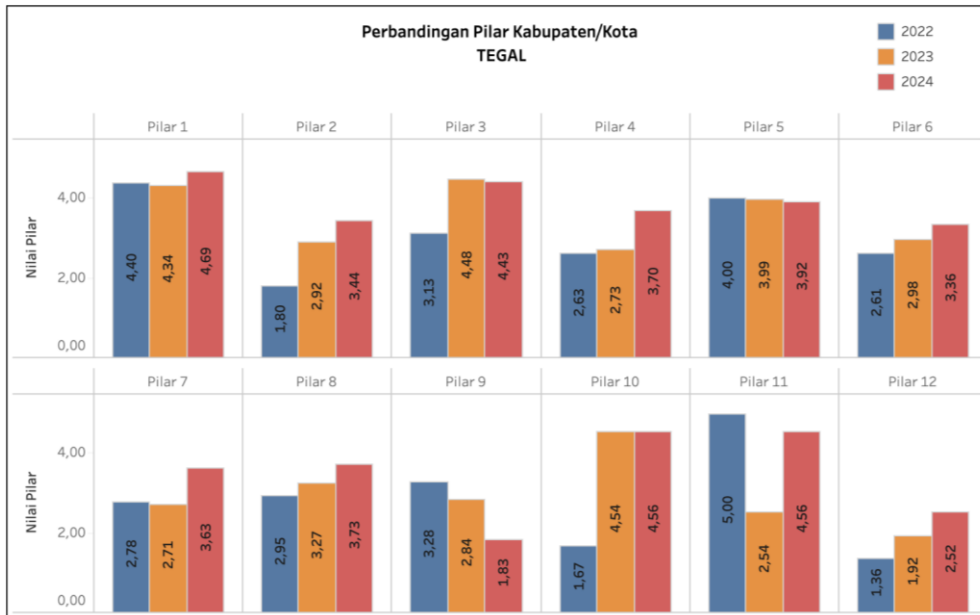
Gambar 2. 54 Indeks Daya Saing Daerah



Sumber: Metadata IDSD BRIN, 2024 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam, hampir semua pilar mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Adapun pilar daya saing daerah yang justru mengalami penurunan antara lain Pilar Sistem Keuangan yang terutama didorong oleh rendahnya kinerja kredit usaha rakyat dan premi asuransi jiwa dan non-jiwa. Dengan memperhatikan tren pertumbuhan dan kondisi capaian terakhir masing-masing pilar daya saing daerah, terdapat dua pilar yang nilai capaiannya di bawah 3 yaitu Pilar Sistem Keuangan Daerah (1,83) dan Pilar Kapabilitas Inovasi (2,52).

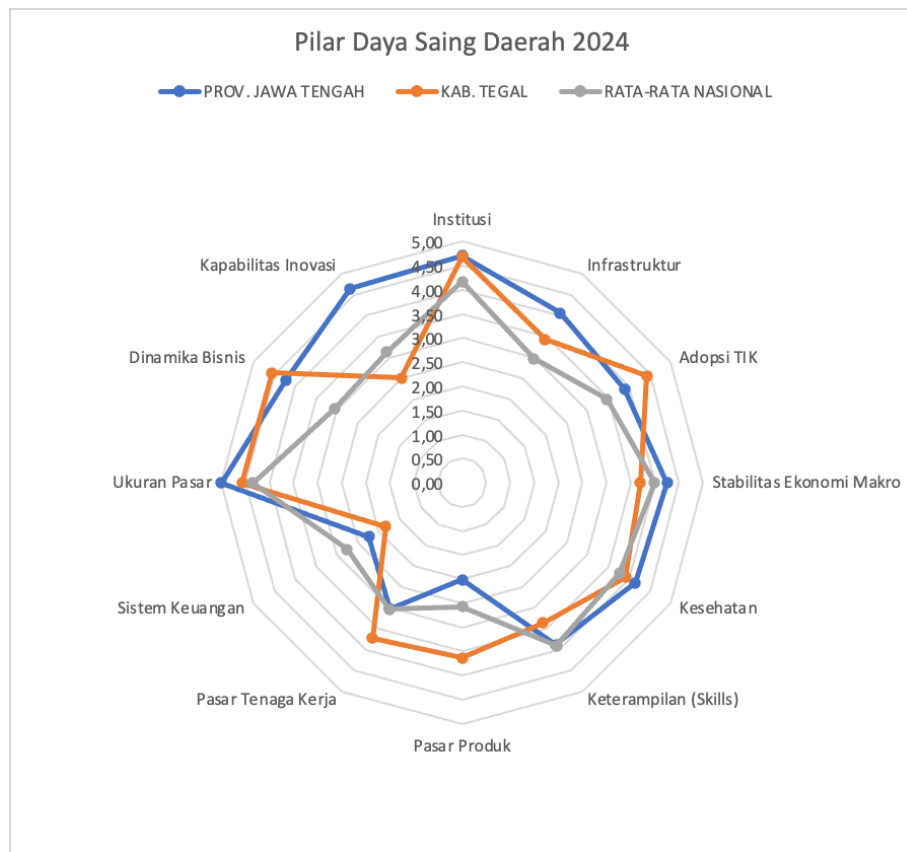
Gambar 2. 55 Perbandingan Pilar Kabupaten/Kota Tegal



Sumber: Metadata IDSD BRIN, 2024 (diolah)

Meskipun secara tren pertumbuhan 3 (tiga) tahun terakhir kondisi IDSD Kabupaten Tegal terus mengalami peningkatan, namun secara capaian, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal masih relatif di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Relatif rendahnya capaian IDSD Kabupaten Tegal tersebut khususnya tahun 2024 terutama disebabkan oleh rendahnya tertinggalnya kinerja pada 4 Pilar daya saing daerah yaitu Stabilitas Ekonomi Makro, Keterampilan (Skills), Sistem Keuangan dan Kapabilitas Inovasi. Adapun pilar daya saing daerah yang capaiannya relatif lebih baik secara komparatif yaitu Institusi, Adopsi TIK, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja dan Dinamika Bisnis. Sedangkan 3 (tiga) pilar lainnya capaiannya berada diantara Provinsi dan Nasional yaitu Infrastruktur, Kesehatan dan Ukuran Pasar. Untuk itu tantangannya ke depan adalah bagaimana memanfaatkan pilar-pilar daya saing yang memiliki kinerja baik untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Selain itu bagaimana terus menguatkan pilar-pilar daya saing yang masih relatif tertinggal.

Gambar 2. 56 Pilar Daya Saing Daerah



Sumber: Metadata IDSD BRIN, 2024 (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Non Urusan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Non Urusan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 252 Capaian Kinerja Program (outcome) Non Urusan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NON URUSAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	%	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	Grade	90 (AA)	0,00	84,6 (AA)	84,6 (AA)	94,00	
		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	%	100,00	49,00	100,00	100,00	100,00	
		Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	Grade	78,36 (A)	63,88 (B)	78,50 (A)	78,50 (A)	100,18	

Sumber: RSUD dr. Soeselo; RSUD Suradadi; Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2023

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 253 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,90	81,12	81,45	81,45	101,94	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	97,29	98,36	96,71	96,71	99,40	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	99,32	99,54	99,54	99,54	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	100,00	97,18	96,57	96,57	96,57	
		Rata-rata Nilai Kelulusan SD	%	78,00	79,10	78,00	78,00	100,00	
		Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	%	75,75	81,97	81,97	81,97	108,21	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
		Persentase Muatan Lokal dalam KBM	%	5,00	5,26	5,26	5,26	105,20	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
		Rasio Guru Kelas PAUD	Rasio	16,00	15,00	0,96	0,96	194,00	
		Rasio Guru Kelas TK	Rasio	7,03	5,99	0,95	0,95	186,49	
		Rasio Guru Kelas SD	Rasio	1,20	1,30	1,17	1,17	102,50	
		Guru Mapel PAI	Rasio	1,40	1,90	1,90	1,90	64,29	
		Guru Mapel PJOK	Rasio	1,40	1,80	1,23	1,23	112,14	
		Rasio Guru Mapel SMP	Rasio	24,17	26,44	23,90	23,90	101,12	
		Rasio Guru Mapel Paket A	Rasio	1,26	1,26	0,68	0,68	146,03	
		Rasio Guru Mapel Paket B	Rasio	0,95	0,78	0,78	0,78	117,89	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio Guru Mapel Paket C	Rasio	1,01	0,68	1,26	1,26	75,25	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN								
		Persentase Satuan Pendidikan Berizin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								
		Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	%	70,00	65,00	70,00	70,00	100,00	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan table capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak 18 indikator diketahui bahwa 18 indikator berstatus Sangat Tinggi.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 254 Capaian Kinerja Program (*outcome*) Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,10	0,10	0,098	98	Sangat Tinggi	
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	69,1	69,1	Sangat Tinggi	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	71,43	71,43	Sangat Tinggi	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	74,6	74,6	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	93,00	93,00	110,5	118,82	Sangat Tinggi	
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	65,00	65,00	475,19	731,06	Sangat Tinggi	
		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	40,00	40,00	181,39	453,48	Sangat Tinggi	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	80,00	80,00	169,79	212,24	Sangat Tinggi	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	40,00	40,00	129,4	323,5	Sangat Tinggi	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	81,00	81,00	125,86	155,38	Sangat Tinggi	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	80,00	80,00	102,2	127,75	Sangat Tinggi	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	80,00	80,00	235,78	294,73	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	98,00	98,00	100	102,04	Sangat Tinggi	
		Cakupan balita stunting	%	12,00	12,0	16,38	136,5	Sangat Tinggi	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
		Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	%	100,00	100,00	477,00	477	Sangat Tinggi	
		Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	%	100,00	100	89,7	89,7	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
		Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	42,00	42,00	100,00	238,1	Sangat Tinggi	
		Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sarana pelayanan kefarmasian							
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
		Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	95,80	95,80	95	99,16	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas Kesehatan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak dua puluh satu indikator diketahui bahwa dua puluh satu indikator berstatus Sangat Tinggi.

3. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 255 Capaian Kinerja Program (*outcome*) Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
		Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	%	63,80	63,80	62,07	97,29	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
		Cakupan Akses Layanan Air Minum	%	70,00	70,00	81,28	116,11	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
		Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Jumlah	85,00	85,00	84,21	99,07	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
		Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	%	96,37	96,37	93,91	97,45	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE								
		Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	%	62,52	62,52	68,85	110,12	Sangat Tinggi	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
		Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	%	81,36	81,36	80,58	99,04	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio bangunan yang memiliki IMB	%	9,15	9,15	8,40	91,79	Sangat Tinggi	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								
		Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	%	100,00	100,00	91,50	91,50	Sangat Tinggi	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	87,50	87,50	87,51	100,01	Sangat Tinggi	
		Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	93,50	93,50	92,17	98,58	Sangat Tinggi	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
		Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	%	80,00	80,00	100,00	125,00	Sangat Tinggi	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	%	90,00	90,00	87,19	96,88	Sangat Tinggi	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan table capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak dua belas indikator diketahui bahwa dua belas indikator berstatus Sangat Tinggi.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIMAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 256 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKUMIMAN								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	%	100,00	100,00	125,00	125,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
		Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Hektar	55,97	55,97	64,11	114,54	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
		Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	%	23,60	23,60	24,82	105,17	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
		Persentase ketersediaan PSU perumahan	%	85,70	85,70	95,19	111,07	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak lima indikator diketahui bahwa lima indikator berstatus Sangat Tinggi.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 257 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertebian Umum Serta Perlindungan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN								
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Presentase gangguan trantibun yang tertangani	%	90,00	90,00	92,59	102,88	Sangat Tinggi	
		Presentase pelanggaran perda dan perkada yg diselesaikan	%	90,00	90,00	93,38	103,76	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	79,01	79,01	81,91	103,67	Sangat Tinggi	
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	%	1,68	1,68	1,88	111,90	Sangat Tinggi	
		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	27,06	27,06	27,06	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100,00	100,00	100	100	Sangat Tinggi	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja; BPBD; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2023

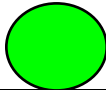
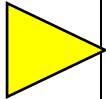
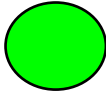
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa semua indikator berstatus Sangat Tinggi.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 258 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Sosial RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								
		Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebutuhan dasarnya diluar panti .							
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
		Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100,00	100,00	89,14	89,14	Tinggi	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								
		Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	90,75	90,75	100,00	110,19	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Sosial; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan table capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak lima indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi dan satu indikator berstatus Tinggi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 259
Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio	44.326	44.326	45.130	101,81	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	6,70	6,70	18,48	275,82	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	%	40,00	40,00	95,63	239,08	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,48	8,48	8,48	100,00	Sangat Tinggi	

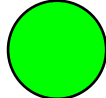
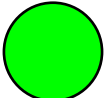
Sumber : Dinas PERINTRANSNAKER; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

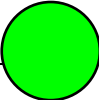
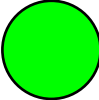
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tiga indikator diketahui bahwa tiga indikator berstatus Sangat Tinggi.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 260 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	%	30,00	30,00	42,45	141,50	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,32	6,32	2,56	159,49	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
		Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	%	0,08	0,08	0,09	111,25	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								
		Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	%	60,00	60,00	70,00	116,67	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
		Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	%	70,00	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,014	0,014	0,008	142,86	Sangat Tinggi	

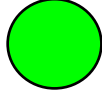
Sumber : Dinas P3AP2KB; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa semua indikator berstatus Sangat Tinggi.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 261 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
		Persentase penguatan cadangan pangan	%	32,50	32,50	17,48	53,78	Rendah	
		Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	%	52,00	52,00	52,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	90,00	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
		Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85,00	85,00	92,86	109,25	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa tiga indikator berstatus Sangat Tinggi dan satu indikator berstatus Rendah. Satu indikator berstatus Rendah akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 262 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								
		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Prosentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	%	97,00	97,00	93,13	96,01	Sedang	
2	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								
		Persentase implementasi redistribusi tanah	%	100,00	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	

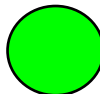
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tiga indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sedang dan dua indikator berstatus Sangat Rendah. Tiga indikator berstatus Sedang dan Sangat Rendah akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

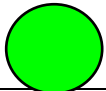
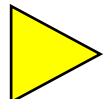
Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 263 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								
		Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
		Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	%	18,51	18,51	18,51	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	%	18,60	18,60	18,60	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	%	38,89	38,89	38,89	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
		Persentase Penanganan Limbah B3	%	67,00	67,00	85,20	127,16	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	%	71,00	71,00	71,00	100,00	Sangat Tinggi	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
		Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup	%	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
		Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	%	40,00	24,00	44,79	186,62	%	
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	%	90,00	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
		Persentase Sampah yang Tertangani	%	71,00	71,00	50,27	70,80	Sedang	
		Persentase Pengurangan Sampah	%	29,00	29,00	17,94	61,86	Sedang	

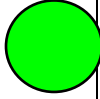
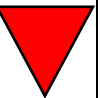
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

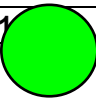
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak sebelas indikator diketahui bahwa sembilan indikator berstatus Sangat Tinggi dan dua indikator berstatus Tinggi. Dua indikator berstatus Tinggi akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 264 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								
		Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	%	98,00	96,00	98,81	100,83	Sangat Tinggi	
		Perekaman KTP elektronik	%	99,80	99,74	100	100,20	Sangat Tinggi	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	80,00	70,00	34,70	49,57	Rendah	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								
		Kepemilikan akta kelahiran	%	96,50	97,00	96,85	99,84	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penduduk berakta kematian	%	71,54	72	100	138,89	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	50,00	40,00	120,00	300,00	Sangat Tinggi	

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa lima indikator berstatus Sangat Tinggi dan satu indikator berstatus Rendah. Satu indikator berstatus Rendah akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 265 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	PROGRAM PENATAAN DESA								
		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	%	80,23	80,23	100,00	124,64	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								
		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	72,24	72,24	100,00	138,42	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Tertib dan Baik Administrasi Keuangan dan Asset Desa	%	100,00	100,00	90,00	90,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
		Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 266 Capaian Kinerja Program (*outcome*) Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
		TFR (Angka kelahiran Total)	Dok	2,22	2,22	2,16	102,70	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence Rate</i>) CPR	%	69,54	69,54	64,76	93,13	Sangat Tinggi	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	%	14,47	14,47	7,77	146,30	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
		Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	%	22,00	22,00	41,32	187,82	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas P3AP2KB; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 267 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan RKPD Tahun 2024 Triwulan II

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								
		Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase Rekomendasi Andalalin	%	100,00	100,00	116,60	116,60	Sangat Tinggi	
		Persentase perlintasan KA yang telah di lakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	38,00	38,00	35,84	94,32	Tinggi	
		Persentase Simpang APILL Standar	%	100,00	100,00	66,67	66,67	Sedang	
		Persentase Pengamanan Pengaturan Lalu Lintas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase Lokasi Titik Parkir Berizin	%	100,00	100,00	129,60	129,60	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Juru Parkir Berizin	%	100,00	100,00	101,60	101,60	Sangat Tinggi	
		Rasio fasilitasi penerbitan ijin trayek	Rasio	90,00	90,00	91,24	101,38	Sangat Tinggi	
		Persentase Pelanggaran Perizinan, Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Angkutan	%	20,00	20,00	20,11	100,55	Sangat Tinggi	
		Persentase layanan terminal angkutan jalan	%	39,00	39,00	42,51	109,00	Sangat Tinggi	
		Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	%	87,00	87,00	84,62	97,26	Tinggi	
		Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Jalan	%	90,00	90,00	42,63	47,37	Sangat Rendah	
		Persentase Prasarana Jalan (Lampu Penerangan Jalan Umum)	%	100,00	100,00	80,52	80,52	Tinggi	

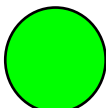
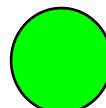
Sumber : Dinas Perhubungan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

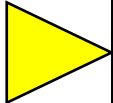
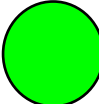
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tiga belas indikator diketahui bahwa delapan indikator berstatus Sangat Tinggi, tiga indikator berstatus Tinggi, satu indikator berstatus Sedang dan satu indikator berstatus Sangat Rendah .

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 268 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	80,00	80,00	79,78	99,73	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA								
		Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	%	100,00	100,00	64,58	64,58	Sedang	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	85,00	85,00	77,79	91,52	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa tiga indikator berstatus Sangat Tinggi, satu indikator berstatus Sedang. Dua indikator yang berstatus Sedang akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 269 Capaian Kinerja Program (*outcome*) Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								
		Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	%	18,22	17,77	24,00	135,06	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								
		Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	%	35,18	26,07	44,00	168,78	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
		Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	%	5,26	4,73	32,89	695,35	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								
		Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	%	4,21	2,63	15,15	576,05	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi.

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 270 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
		Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	%	71,43	71,43	71,43	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								
		Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	%	20,00	20,00	50,00	250,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
		Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	%	100,00	100,00	91,92	91,92	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
		Persentase Kepatuhan Perusahaan	%	73,28	73,28	75,00	102,35	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
		Persentase data layanan yang termanfaatkan	%	13,54	13,54	14,00	103,40	Sangat Tinggi	

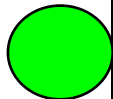
Sumber : Dinas PMPTSP; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

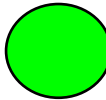
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak lima indikator diketahui bahwa lima indikator berstatus Sangat Tinggi.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 271 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
RKPD Tahun 2024 Triwulan IV**

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,19	0,19	0,18	94,12	Sangat Tinggi	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	0,08	0,08	0,08	105,26	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	80,00	80,00	118,00	147,50	Sangat Tinggi	
		Persentase Cabang Olahraga yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas PORAPAR; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

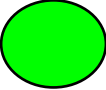
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Statistik sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 272 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Statistik RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
		Persentase Kebutuhan data Statistik yang tersedia	%	66,57	66,57	64,18	96,41	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

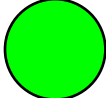
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Tinggi.

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Persandian sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 273 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Persandian RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
		Tingkat keamanan Informasi	%	75,00	75,00	68,22	90,96	Tinggi	

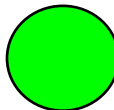
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2023

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Tinggi.

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 274 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan
RKPD Tahun 2024 Triwulan IV**

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								
		Persentase tradisi yang dikembangkan	%	69,11	67,11	86,54	125,22	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								
		Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	%	100,00	87,88	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	%	78,76	78,43	87,50	111,10	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								
		Terlestarikannya Cagar Budaya	%	53,83	51,83	61,54	114,32	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								
		Persentase museum yang dikelola	%	70,00	68,75	100,00	142,86	Sangat Tinggi	

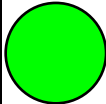
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak lima indikator diketahui bahwa lima indikator berstatus Sangat Tinggi.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 275 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 – 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka/Skor	56,00	56,00	70,00	125,00	Sangat Tinggi	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka/Skor	12,00	12,00	48,08	400,67	Sangat Tinggi	

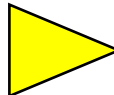
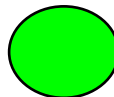
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak dua indikator diketahui bahwa dua indikator berstatus Sangat Tinggi.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 276 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
RKPD Tahun 2024 Triwulan IV**

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
		Peningkatan nilai LAKE LKD	%	91,00	91,00	54,10	59,45	Rendah	
		Persentase Perangkat Daerah yang bernilai LAKI Cukup	%	29,17	29,17	29,16	99,98	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

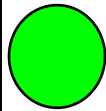
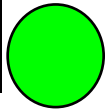
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Tinggi dan satu indikator berstatus Tinggi. Satu indikator berstatus Tinggi akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

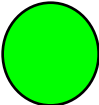
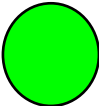
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 277 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
		Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kg	2.044.139	2.044.139	2.207.297	107,98	Sangat Tinggi	
		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Rp	14.160.730	14.160.730	62.526.296	441,55	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
		Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kg	2.825.643	2.825.643	2.861.551	101,27	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Rp	153.024.735	153.024.735	153.224.195	100,13	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
		Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari <i>destructive fishing</i>	%	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kg	5.517.087	5.517.087	5.820.304	105,50	Sangat Tinggi	
		Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Rp	132.109.798	132.109.798	150.368.554	113,82	Sangat Tinggi	

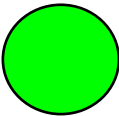
Sumber : Dinas Perikanan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tujuh indikator diketahui bahwa tujuh indikator berstatus Sangat Tinggi.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 278 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
		Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	%	95,00	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	89,00	89,00	117,42	131,93	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
		Persentase DTW yang dipromosikan	%	95,00	95,00	95,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
		Persentase SDM Pariwisata yang dibina	%	95,00	95,00	225,00	236,84	Sangat Tinggi	

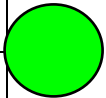
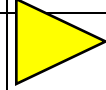
Sumber : Dinas PORAPAR; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak empat indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi.

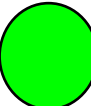
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pertanian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 279 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
RKPD Tahun 2024 Triwulan IV**

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
		Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	90,00	90,00	92,00	102,22	Sangat Tinggi	
		Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	%	70,00	70,00	80,54	115,06	Sangat Tinggi	
		Luas Lahan Pertanian Organik	%	5,00	5,00	7,80	156,00	Sangat Tinggi	
		Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	%	63,50	63,50	65,00	102,36	Sangat Tinggi	
		Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	%	22,01	22,01	19,45	88,37	Tinggi	
		Produksi daging (kg)	Kg	11.742.939	11.742.939	12.205.885	103,94	Sangat Tinggi	
		Produksi Telur (kg.)	Kg	11.197.412	11.197.412	10.736.318	95,88	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi Susu (kg.)	Kg	629.216	629.216	718.394	114,17	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
		Indeks pertanaman	Indeks	1,70	1,70	1,68	98,82	Sangat Tinggi	
		Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	%	4,11	4,11	3,34	81,27	Tinggi	
		Luas Lahan Sawah Lestari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
		Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	%	5,60	5,60	5,60	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
		Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	<2,5	<2,5	<0,633	174,80	Sangat Tinggi	
		Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	%	2,50	2,50	1,25	150,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
		Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	%	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	%	2,64	2,64	3,01	114,02	Sangat Tinggi	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

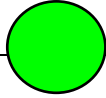
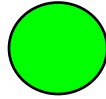
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tujuh belas indikator diketahui bahwa empat belas indikator berstatus Sangat Tinggi, dua indikator berstatus Tinggi, dan satu indikator berstatus Sedang. Tiga indikator yang berstatus Tinggi dan Sedang akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

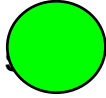
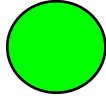
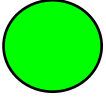
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 280 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								
		Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
		Persentase Pasar direhabilitasi	%	88,46	88,46	88,46	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase pasar e-ritribusi	%	84,62	84,62	84,62	100,01	Sangat Tinggi	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang dikelola dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								
		Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	%	<9%	<9%	4,72%	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Laju Nilai Ekspor	%	1,00	1,00	3,89	389,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								
		Persentase Pedagang Tertib Ukur	%	60,01	60,01	85,00	141,65	Sangat Tinggi	

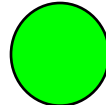
Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan; dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak delapan indikator diketahui bahwa delapan indikator berstatus Sangat Tinggi.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 281 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								
		Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	%	100,00	100,00	49,00	49,00	Sangat Rendah	

Sumber : Dinas PERINTRANSNAKER; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak dua indikator diketahui bahwa tiga indikator berstatus Sangat Tinggi dan satu indikator berstatus Sangat Rendah.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 282 Capaian Kinerja Program (outcome) Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi RKPD Tahun 2023 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								
		Transmigran yang ditempatkan	%	100,00	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	

Sumber : Dinas PERINTRANSNAKER; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Rendah. Satu indikator berstatus Sangat Rendah akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

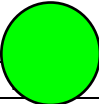
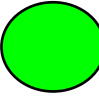
1. SEKRETARIAT DAERAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 283 Capaian Kinerja Program (outcome) Sekretariat Daerah RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DAERAH								
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	%	85,00	85,00	40,00	47,06	Sangat Rendah	
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	%	94,00	94,00	100,00	106,38	Sangat Tinggi	
		Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	%	75,00	75,00	N/A	N/A	N/A	
		Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	%	100,00	100,00	64,00	64,00	Sedang	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi dan Pembangunan SAKIP dengan nilai B (Baik)	%	87,50	87,50	81,81	93,50	Sangat Tinggi	
		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi dan Pembangunan yang sesuai standar (IKM Baik)	Nilai	100,00	100,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi	
		Persentase Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi dan Pembangunan dengan nilai CC (Cukup Baik)	Nilai	75,00	75,00	N/A	N/A	N/A	
		Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	%	100,00	100,00	93,00	93,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Level Tingkat Maruritas UKPBJ terpenuhi	Level	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	%	16,00	16,00	17,00	113,33	Sangat Tinggi	

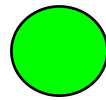
Sumber : Sekretariat Daerah; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak sebelas indikator diketahui bahwa tujuh target indikator berstatus Sangat Tinggi, satu indikator berstatus Sedang, dan Tiga indikator berstatus atau Sangat Rendah. Tiga indikator yang Sangat Rendah tersebut akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

2. SEKRETARIAT DPRD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 284 Capaian Kinerja Program (outcome) Sekretariat DPRD RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
	SEKRETARIAT DPRD								
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								
		Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	%	100,00	100,00	98	98	Sangat Tinggi	

Sumber : Sekretariat DPRD; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2023

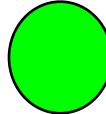
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Tinggi.

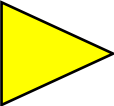
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Perencanaan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 285 Capaian Kinerja Program (outcome) Perencanaan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	%	85,00	80,00	85,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	91,98	91,77	91,77	99,77	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2023		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	%	93,23	93,17	84,55	90,69	Tinggi	
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93,59	93,45	79,27	84,70	Tinggi	

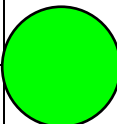
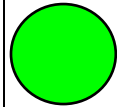
Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2023

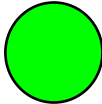
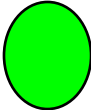
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak lima indikator diketahui bahwa tiga indikator berstatus Sangat Tinggi, dan dua indikator berstatus Tinggi. Dua indikator yang Tinggi tersebut akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

2. KEUANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Keuangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 286 Capaian Kinerja Program (outcome) Keuangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEUANGAN								
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
		Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
		Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	%	80,00	80,00	95,00	118,75	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM PENGELOLAAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN DAERAH								
		Rasio PAD	%	15,27	15,27	20,08	131,51	Sangat Tinggi	
		Rasio Piutang Pajak Daerah	%	99,10	99,10	11,00	11,10	Sangat Rendah	
		Rasio Pajak Daerah	%	31,00	31,00	34,60	111,62	Sangat Tinggi	

Sumber : BPKAD; BAPPENDA; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak tujuh indikator diketahui bahwa enam indikator berstatus Sangat Tinggi, dan satu indikator berstatus Sangat Rendah. Satu indikator yang Sangat Rendah tersebut akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

3. KEPEGAWAIAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kepegawaian tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 287 Capaian Kinerja Program (outcome) Kepegawaian RKPD Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	KEPEGAWAIAN								
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
		Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	%	0,11	0,11	0,04	163,68	Sangat Tinggi	
		Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	%	96,08	62,10	84,80	88,26	Tinggi	
		Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	%	47,88	62,10	34,06	71,14	Tinggi	
		Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	%	318,87	293,12	911,17	285,75	Sangat Tinggi	
		Rasio pegawai fungsional tidaktermasuk guru/kesehatan (%)	%	16,23	16,23	23,49	144,73	Sangat Tinggi	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	93,05	93,05	84,82	91,16	Sangat Tinggi	

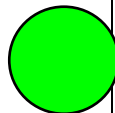
Sumber : BKPSDM; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa empat indikator berstatus Sangat Tinggi, dan dua indikator berstatus Tinggi. Dua indikator yang Tinggi tersebut akan dioptimalkan pada tahun berikutnya

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 288 Capaian Kinerja Program (outcome) Pendidikan dan Pelatihan RKPD Tahun 2024

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
		Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	%	80,00	80,00	80,51	100,64	Sangat Tinggi	
		Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	%	50,00	50,00	88,87	177,74	Sangat Tinggi	

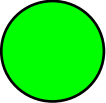
Sumber : BKPSDM; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan tahun 2024, dari sebanyak dua indikator diketahui bahwa dua indikator berstatus Sangat

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 289 Capaian Kinerja Program (outcome) Penelitian dan Pengembangan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
		Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	92,50	92,50	87,50	94,59	Sangat Tinggi	

Sumber : BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

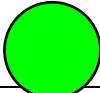
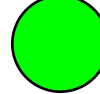
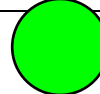
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak satu indikator diketahui bahwa satu indikator berstatus Sangat Tinggi.

G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. INSPEKTORAT DAERAH

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 290 Capaian Kinerja Program (*outcome*) Inspektorat Daerah RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P - RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	%	92,00	92,00	91,56	99,52	Sangat Tinggi	
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	%	100,00	100,00	60,00	60,00	Rendah	
		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	%	80,00	70,00	71,25	101,79	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
		Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	%	12,50	8,30	8,30	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2023 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	%	90,00	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	%	100,00	93,75	94,00	100,27	Sangat Tinggi	

Sumber : Inspektorat; dan Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024

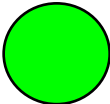
Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa lima indikator berstatus Sangat Tinggi, dan satu indikator berstatus Rendah. Satu indikator yang Rendah tersebut akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

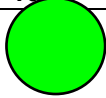
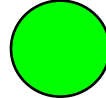
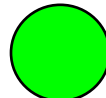
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

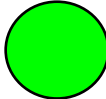
1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 291 Capaian Kinerja Program (outcome) Kesatuan Bangsa dan Politik RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								
		Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	90,66	90,66	93,66	103,31	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
		Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase lembaga penddiikan sma/smk dan PT yang	%	70,80	70,80	72,60	102,54	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		menyelenggarakan pendidikan politik							
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
		Persentase Ormas yang Terbina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								
		Persentase Konflik yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

Sumber : Badan KESBANGPOL; BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari sebanyak enam indikator diketahui bahwa enam indikator berstatus Sangat Tinggi.

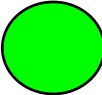
I. UNSUR KEWILAYAHAN

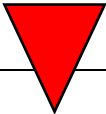
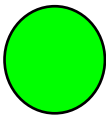
1. KECAMATAN

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Kecamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 292 Capaian Kinerja Program (outcome) Kecamatan RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

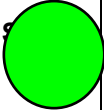
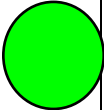
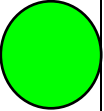
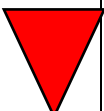
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN								

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
		IKM Kecamatan Adiwerna	Nilai	80,87	80,87	81,00	100,16	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Balapulang	Nilai	83,79	83,79	94,10	112,30	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Bojong	Nilai	84,12	84,12	81,70	97,12	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Bumijawa	Nilai	92,03	92,03	88,59	96,26	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Dukuwaru	Nilai	83,87	83,87	88,00	104,92	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Dukuhturi	Nilai	81,94	81,94	89,20	108,86	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Jatinegara	Nilai	84,20	84,20	85,39	101,41	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Kedungbanteng	Nilai	86,00	86,00	87,87	102,17	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Kramat	Nilai	83,48	83,48	83,71	100,28	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Lebaksiu	Nilai	83,25	83,25	87,66	105,30	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Margasari	Nilai	81,90	81,90	83,17	101,55	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Pagerbarang	Nilai	82,13	82,13	82,13	100,00	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Pangkah	Nilai	83,24	83,24	82,13	98,67	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Slawi	Nilai	84,17	84,17	89,44	106,26	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Suradadi	Nilai	84,26	84,26	89,86	106,65	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Talang	Nilai	77,70	77,70	100,00	128,70	Sangat Tinggi	

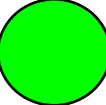
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKM Kecamatan Tarub	Nilai	85,05	85,05	85,57	100,61	Sangat Tinggi	
		IKM Kecamatan Warureja	Nilai	81,90	81,90	84,56	103,25	Sangat Tinggi	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
		Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna		4,76	4,76	0,00	0,00	Sangat Rendah	 
		Persentase Desa Maju Kecamatan Adiwerna		14,29	14,29	49,00	342,90	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang		9,52	9,52	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Balapulang		15,00	15,00	20,00	133,33	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong		18,00	18,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Bojong		35,00	35,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa		11,11	11,11	11,11	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa		27,78	27,78	22,22	79,99	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru		10,00	10,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru		20,00	20,00	30,00	150,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi		5,56	5,56	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi		16,67	16,67	22,22	133,29	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara		6,00	6,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara		12,00	12,00	11,76	98,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng		10,00	10,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng		10,00	10,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	

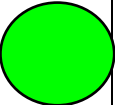
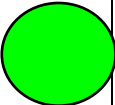


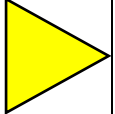
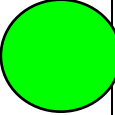
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat		5,26	5,26	5,26	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat		26,00	26,00	26,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan lebaksu		15,38	15,38	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa Maju Kecamatan lebaksu		23,00	23,00	21,00	91,30	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari		8,00	8,00	7,69	96,13	Sangat Tinggi	
		Persentase desa maju Kecamatan Margasari		62,00	62,00	69,23	111,66	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang		8,00	8,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang		30,00	30,00	8,00	26,67	Sangat Rendah	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah		4,00	4,00	4,43	110,75	Sangat Rendah	
		Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah		9,00	9,00	9,13	101,44	Sangat Rendah	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi		40,00	40,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Slawi		80,00	80,00	100,00	125,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi		9,00	9,00	0,00	0,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa maju Kecamatan Suradadi		18,00	18,00	9,00	50,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Talang		5,26	5,26	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa maju Kecamatan Talang		11,00	11,00	84,21	765,55	Sangat Tinggi	
		Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub		5,00	5,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	

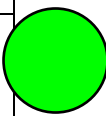
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa maju Kecamatan Tarub		25,00	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja		17,00	17,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	
		Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja		33,00	20,00	33,00	100,00	Sangat Tinggi	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Adiwerna	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Balapulang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

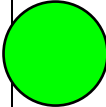
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Bojong	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Bumijawa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhwaru	%	90,00	90,00	100,00	111,11	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhuturi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Jatinegara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Kedungbanteng	%	84,00	84,00	100,00	119,05	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Kramat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Lebaksiu	%	85,00	85,00	75,00	93,75	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Margasari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Pagerbarang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

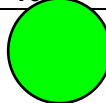
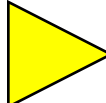
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Pangkah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Slawi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Suradadi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Talang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Tarub	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Presentase Penurunan Gangguan Trantibum Kecamatan Warureja	%	85,00	85,00	90,00	105,88	Sangat Tinggi	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek,	%	100,00	100,00	95,09	95,09	Sangat Tinggi	

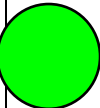
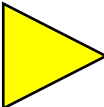
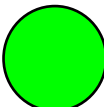
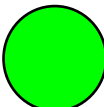
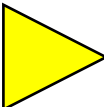
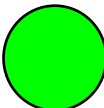
No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna							
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	 
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPd	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKP	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	%	100,00	100,00	54,43	61,16	Rendah	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	%	100,00	100,00	40,00	44,44	Sangat Rendah	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	%	100,00	100,00	89,00	100,00	Sangat Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	%	100,00	100,00	77,77	92,58	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	%	70,00	70,00	60,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	%	100,00	100,00	79,92	79,92	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	%	100,00	100,00	68,63	77,11	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	%	100,00	100,00	88,00	98,88	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	%	100,00	100,00	79,00	88,76	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	%	95,00	95,00	68,00	76,40	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	%	100,00	100,00	78,15	78,15	Tinggi	

No	Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD 2019 - 2024	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2024 (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program (Outcome)	Status
					Target P RKPD	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	%	100,00	100,00	77,00	86,52	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	%	100,00	100,00	89,00	100,00	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	%	100,00	100,00	80,00	89,89	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	%	100,00	100,00	90,00	101,12	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	%	100,00	100,00	84,20	94,61	Sangat Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	%	100,00	100,00	71,47	80,30	Tinggi	
		Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	%	100,00	100,00	92,00	103,37	Sangat Tinggi	

Sumber: 18 Kecamatan; dan Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2024



Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II tahun 2024, dari sebanyak seratus delapan indikator diketahui bahwa tujuh puluh tujuh target indikator berstatus sangat tinggi, sepuluh indikator berstatus Tinggi, dua indikator berstatus Sedang, dua indikator berstatus Rendah, dan tujuh belas indikator berstatus sangat rendah. tiga puluh satu indikator yang berstatus Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sanga Rendah akan dioptimalkan pada tahun berikutnya.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka permasalahan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.3.1.1 Aspek Demografi

- a. Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km² karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti pemerataan infrastruktur tiap kecamatan;
- b. Komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.113.731 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 518.267. Komposisi tersebut membentuk piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami bonus demografi. Tingginya usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang.
- c. Beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif. Sehingga peningkatan produktifitas ekonomi penduduk usia produktif perlu mendapatkan perhatian.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal Tegal pada tahun 2020 mengalami kontraksi yaitu -1,46. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Tegal. Saat ini, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal berada dalam laju positif, seiring dengan berlalunya pandemi. Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu 4,93% (*y-on-y*), walaupun pertumbuhan ini melambat dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh 5,13%.

Kontribusi PDRB di Kabupaten Tegal selama tahun 2018 – 2024 berturut-turut didominasi oleh Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari hasil overlay antara aspek keunggulan komparatif (SLQ) dan aspek kontribusi, dapat disimpulkan bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan komoditas sektor primer di Kabupaten Tegal (hasil pertanian, peternakan, dan perikanan) agar dapat menjadi input bagi sektor industri pengolahan; dalam bahasa lain adalah hilirisasi dan industrialisasi pertanian.

b. Laju Inflasi

Angka inflasi Tahun 2024 adalah sebesar 2,19% menurun dibandingkan tahun 2023 dengan angka inflasi 3,28% adalah berada di atas sasaran $3,0 \pm 1 \%$ (yoy). Inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan nilai indeks pada enam kelompok pengeluaran, seperti Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,99%, dan Kelompok Transportasi sebesar 1,18%, yang menunjukkan tekanan harga yang signifikan pada kebutuhan dasar masyarakat. Seiring adanya pandemi covid 19, harga komoditas mengalami deflasi yang disebabkan oleh menurunnya permintaan agregat karena adanya pembatasan aktivitas. Mulai awal 2022, harga komoditas mulai mengalami inflasi, berbarengan dengan mulai pulihnya ekonomi. Pergerakan harga perlu dimonitor secara kontinyu agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau. Pada dasarnya, inflasi adalah hal yang dibutuhkan sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Hal yang perlu dilaksanakan adalah pengendalian inflasi agar tidak bergejolak, utamanya dengan mengupayakan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif.

c. PDRB Per Kapita vs Indeks Gini

PDRB Distribusi pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Tegal, meskipun nilainya berada pada rentang $0 < x < 0,4$ yang masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Indeks Gini Kabupaten pada tahun 2020 adalah 0,323 sedangkan di akhir periode tahun 2024 0,367; naik 0,044 poin dibandingkan kondisi awal. Pendapatan perkapita disesuaikan 5 tahun terakhir sampai dengan 2023 meningkat 12,7% namun indeks gini tahun 2023 mencapai 0,358 justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu 44,65% distribusi pengeluaran berasal dari 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Pada dasarnya, kenaikan ketimpangan merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang sedang mengalami perkembangan ekonomi, mengikuti Hipotesis Kuznets. Hal ini akan terjadi hingga titik turning point, ketika kondisi pertumbuhan ekonomi sudah mencapai potensialnya. Pada saat tersebut, ketimpangan akan berangsur menurun dan secara umum akan membentuk kurva U terbalik. Walaupun demikian, tren naiknya ketimpangan ini perlu diwaspadai agar tidak terlalu tinggi dan menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan

d. Penduduk Miskin

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir capaian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2021 persentase kemiskinan Kabupaten Tegal meningkat 0.46 menjadi 8.6 %. Namun setelah itu, pada kurun waktu 2022-2024 cenderung menurun dengan besarnya persentase mencapai 6.81 % pada tahun 2024. Persentase persebaran kemiskinan sebagian besar berada di Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Margasari. Oleh karena itu, wilayah tersebut ditetapkan sebagai Lokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

e. Pengangguran

Dalam kurun waktu 2020-2024 angka pengangguran di Kabupaten Tegal selalu di atas Provinsi maupun Nasional. Karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal Sebagian besar relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan pengangguran masih relative belum berhasil mempertemukan lapangan kerja yang ada dengan profil tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Pada tahun 2024 TPT Kabupaten Tegal masih tinggi diantara 35 Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Kondisi TPT tahun 2020 adalah 9,82%. Akhir periode tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 7,53%.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Tegal dalam 6 tahun terakhir (2019-2024) selalu di bawah Provinsi. Beberapa aspek yang capaian masih di bawah Provinsi maupun Nasional antara lain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS). Untuk itu intervensi kebijakan ke depan perlu menekankan pada upaya peningkatan RLS, UHH dan HLS agar mampu mendekatai bahkan lebih baik daripada rata-rata Provinsi maupun Nasional.

g. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Pertumbuhan RLS di Kabupaten Tegal yang lambat atau rendah dapat mencerminkan kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan. Tingkat pertumbuhan RLS Kabupaten Tegal cenderung berfluktuasi dari tahun ketahun. Hal ini dapat mencerminkan instabilitas dalam sistem pendidikan yang seringkali berubah sesuai kebijakan pusat, sehingga dengan kondisi pendidikan dan kebutuhan pendidikan di daerah memiliki tantangan lebih untuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat. Terdapat peningkatan dari 7,25 tahun pada tahun 2022 menjadi 7,36 tahun pada tahun 2024, angka ini masih menunjukkan bahwa Sebagian besar penduduk hanya menyelesaikan Pendidikan hingga setara dengan kelas 7 atau 8. Hal ini mengindikasikan perlunya Upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan agar penduduk dapat menyelesaikan Pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

h. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS Kabupaten Tegal terus meningkat dari 12,34 tahun di tahun 2020 menjadi 12,96 di tahun 2024. Semakin tingginya nilai HLS maka semakin besar kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tegal. Dalam

kurun waktu 20 tahun kedepan lulusan perguruan tinggi (PT) dengan lulusan D3/S1 masih ada kesenjangan untuk meningkatkan nilai HLS 2-3 tahun lebih lama agar anak yang lahir ditahun 2022 dapat memiliki minimal ijazah D3;

- i. Angka Kematian Ibu
Angka kematian ibu (AKI) dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami tren fluktuatif puncaknya di tahun 2021 mencapai 118,8 dimana tahun 2020 hanya sebesar 104. AKI menurun pada tahun 2022 (63,5), namun kembali naik pada tahun 2023 (77,6) dan menurun kembali di tahun 2024 (74,25). Untuk itu intervensi kebijakan untuk menurunkan AKI ke depan masih menjadi prioritas.
- j. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian Bayi dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024) berada di antara angka 5 – 6 per seribu kelahiran hidup dimana capaian terakhir sebesar 6,39 per seribu kelahiran hidup. Hal tersebut menunjukkan kinerja Kesehatan dalam menurunkan AKB belum terlalu efektif.
- k. Angka Kematian Balita (AKABA)
AKABA sejak Tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren fluktuatif. AKABA Angka Kematian Balita (AKABA) dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat adanya fluktuasi dalam angka kematian, di mana AKABA mengalami penurunan signifikan dari 7,7 pada tahun 2020 menjadi 5,6 pada tahun 2021. Namun, angka tersebut kembali meningkat secara bertahap menjadi 6,3 pada 2022 dan mencapai puncaknya di 7,8 pada 2023. Pada tahun 2024, terjadi sedikit penurunan menjadi 7,08. Oleh karena itu intervensi dalam menurunkan AKABA masih perlu diefektifkan.
- l. Stunting
Kasus Stunting dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuatif dengan puncaknya di tahun 2022 mencapai 17,58 dimana sebelumnya di tahun 2021 hanya sebesar 12,08%. Sampai akhirnya berada di angka 16,38 di tahun 2024. Untuk itu intervensi kebijakan untuk menurunkan stunting ke depan masih menjadi prioritas.
- m. Pembangunan Gender
Tren Indeks Pembangunan Gender dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan tren meningkat. Kondisi terakhir pada tahun 2022 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 88,22 naik 0,69 poin dibanding IPG tahun 2021. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.
- n. Ketimpangan Gender
Tren indeks ketimpangan gender (IKG) dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang menurun dari 0,371 menjadi 0,315. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tegal menunjukkan perbaikan, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 0,079 menjadi 0,312. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas/kesetaraan gender. Namun demikian masih diperlukan kesetaraan gender yang lebih baik lagi kedepannya.

- o. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Nilai SAKIP dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2024) menunjukkan tren meningkat dari 64,25 menjadi 65,58. Meskipun sudah meningkat namun predikatnya masih B dan jika dibandingkan target tahun 2024 dalam RPJMD 2019-2024 yang sebesar 73,61 masih cukup jauh. Untuk itu penguatan SAKIP ke depan masih menjadi prioritas khususnya perbaikan dalam ranah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja.

2.3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

- a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan
Meskipun rata-rata pengeluaran Per Kapita mengalami tren meningkat namun sebagian besar (44,59%) berasal atau didominasi dari 20% kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi. Sedangkan 35,17% dari seluruh rupiah pengeluaran yang ada di Kabupaten Tegal berasal dari 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah, dan sisanya sebesar 20,24% pengeluaran yang ada berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini sedikit dapat menunjukkan bahwa meskipun secara agregat pengeluaran rata-rata di Kabupaten Tegal sudah mengalami peningkatan namun didominasi dari kelompok penduduk yang berpendapatan tinggi saja. Dengan kata lain ketimpangan yang ada di Kabupaten Tegal masih cukup tinggi.
- b. Angka Kriminalitas
Dalam kurun waktu 2016-2022 frekuensi rata-rata tindak kriminal yang terjadi dalam setahun berjumlah antara 103-128 kejadian. Yang perlu diwaspadai adalah adanya peningkatan kasus Narkoba dari 13 kasus di tahun 2016 menjadi 37 kasus di tahun 2022. Peningkatan kasus narkoba yang cukup signifikan ini cukup membahayakan kualitas generasi muda kita khususnya pemuda yang menjadi bagian dari bonus demografi Kabupaten Tegal.
- c. Tingkat Ketergantungan
Terakhir angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tahun 2024 berada diangka 44,43%. Angka ketergantungan di Kabupaten Tegal tersebut dengan kata lain 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal tahun 2024 harus menanggung 45-46 penduduk usia nonproduktif. Angka ketergantungan yang cukup tinggi ini bisa menjadi faktor eksponensial penyebab kemiskinan jika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pekerjaan yang layak atau bahkan tidak bekerja.
- d. SDM
 - Tenaga kerja di Kabupaten Tegal baik tahun 2024 didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Di tahun 2024 tenaga kerja mayoritas (49,63%) hanya berpendidikan SD dan 18,10% berpendidikan SMP sederajat, dan hanya sedikit menurun di tahun 2023 namun tetap mendominasi tenaga kerja yang ada yaitu sebesar 49,71% tenaga kerja berpendidikan SD/lebih rendah dan 18,47% tenaga kerja berpendidikan SMP/sederajat.
 - Berdasarkan lapangan pekerjaannya di tahun 2024, mayoritas tenaga kerja yang ada mencapai 46,9% terserap di lapangan pekerjaan sektor jasa, berikutnya sektor manufaktur (33,5%) dan terakhir sektor pertanian (19,6%). Melihat struktur ekonomi Kabupaten Tegal yang kontribusinya didominasi sektor industri pengolahan sementara sebagian tenaga kerja yang ada terserap di sektor jasa, maka dapat mengindikasikan bahwa sektor usaha jasa yang

dominan dan perlu mendapat perhatian adalah sektor jasa pendukung aktivitas industri manufaktur. Untuk itu kebijakan pengembangan lapangan usaha sektor jasa yang mendukung industri manufaktur masih perlu didorong ke depan.

e. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Dalam tiga tahun terakhir daya saing daerah Kabupaten Tegal menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Daya Saing Daerah yang juga mengalami peningkatan dari 2,97 (2022) menjadi 3,7 (2024) atau mengalami peningkatan 24,6% dalam 2 (dua) tahun terakhir. Meskipun mengalami peningkatan yang paling signifikan dibandingkan Provinsi maupun Nasional, namun secara nominal capaian IDSD Kabupaten Tegal masih relatif lebih rendah jika dibandingkan rata-rata Provinsi maupun Nasional dalam kurun waktu yang sama. Hanya pada tahun 2024 saja capaian Kabupaten Tegal bisa melebihi rata-rata Nasional yang hanya sebesar 3,43 di tahun 2024.

Jika dikaji lebih dalam peningkatan IDSD Kabupaten Tegal tersebut terutama didorong oleh pilar infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, pasar produk dan dinamisme bisnis yang meningkat signifikan dibandingkan pilar lainnya. Meskipun secara keseluruhan hampir semua pilar mengalami peningkatan namun terdapat beberapa pilar yang mengalami penurunan terutama pilar Sistem Keuangan yang menurun dari 3,28 di tahun 2022 menjadi 1,83 di tahun 2024. Penurunan tersebut terutama di dorong oleh semakin melemahnya nilai akad kredit usaha rakyat dan premi asuransi jiwa dan non-jiwa di Kabupaten Tegal yang semakin tertekan.

2.3.2 Permasalahan Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan dari analisis gambaran aspek pelayanan umum yang meliputi urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan urusan pemerintah daerah untuk tahun 2026 sebagai berikut :

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

- a. Belum tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) sebesar 100 % pada Anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi pendidikan anak usia dini yang pada tahun 2024 hanya sebesar 77.12 %, anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar yang pada tahun 2024 hanya sebesar 98.47%, serta warga masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2024 hanya mencapai 33.34%.
- b. Masih rendahnya penguasaan dan pemahaman siswa SD dan SMP terhadap materi yang diterima, hal ini ditunjukkan dari capaian rata-rata nilai kelulusan SD dan SMP dalam kurun 5 tahun terakhir yang belum mencapai nilai 100, rata-rata nilai kelulusan SD hanya sebesar 79,6 pada tahun 2024, begitu juga pada SMP yang juga mengalami penurunan menjadi 83.55 pada tahun 2024.
- c. Belum optimalnya Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B 100%, karena pada tahun 2024 hanya mencapai 60.91%. Hal ini berarti untuk dapat mencapai standar pelayanan minimal maka masih perlu peningkatan capaian di tahun mendatang.

- d. Belum optimalnya capaian kinerja standar pelayanan minimal raport pendidikan sebesar 100 % yang meliputi Indeks Iklim Keamanan, Indeks Iklim Kebinekaan dan Indeks Iklim Inklusivitas pada jenjang SD dan SMP yang mengalami kenaikan pada Tahun 2024 kecuali indeks Iklim Inklusivitas SD yang mengalami penurunan sebesar menjadi 54.21% dari 55.09% pada Tahun 2023.
- e. Perlunya peningkatan penggunaan muatan lokal dalam KBM dalam upaya melestarikan kekayaan kearifan lokal dan menjaga potensi seni-budaya di Kabupaten Tegal yang perlu untuk didifusikan dalam KBM di sekolah walaupun capaian sudah mencapai 100%.
- f. Masih rendahnya capaian SPM sebesar 100% untuk pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Berdasarkan data lima tahun terakhir yakni tahun 2020-2024 maka terjadi kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,23%. Namun ditahun 2023 kembali mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2024 yang mencapai 82.65%
- g. Masih rendahnya kegiatan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan yang telah berizin. Dalam kurun 5 tahun terakhir (2020 – 2024) satuan pendidikan yang berizin telah mencapai 100% artinya semua satuan Pendidikan telah berizin namun masih perlu kegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemennya .
- h. Belum optimalnya Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah dalam 6 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata hanya sebesar 5-6 jam pelajaran. Untuk melestarikan Bahasa daerah maka jumlah jam pelajaran masih perlu ditingkatkan. Akan tetapi di tahun 2024 ini terjadi perbedaan perhitungan yaitu berapa persen penggunaan bahasa daerah tegal digunakan di sekolah. Walaupun hasilnya sudah 100% akan tetapi harus terus dijaga dan dilestarikan agar tetap terjaga kelestariannya.

B. Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk di tahun 2024 baru mencapai 9,09%. Kondisi ini relatif masih sangat rendah sehingga diperlukan perluasan tambahan layanan RS yang ada.
- b. Perlunya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan seperti ketersediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan antenatal (prenatal) yang memadai dan merata di Kabupaten Tegal meskipun presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di tahun 2024 sudah mencapai 69,1%. Untuk itu peningkatan layanan Kesehatan ibu hamil perlu dipertahankan.
- c. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan di tahun 2024 telah mencapai 71,43% perlu dioptimalkan, fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Kabupaten Tegal perlu pemerataan dan ditingkatkan.
- d. Optimalisasi penanganan masalah neonatal akibat infeksi (pneumonia, tetans, dan diare) pada bayi baru lahir di Kabupaten Tegal diperlukan, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di tahun 2024 mencapai 74,6%.

- e. Peningkatan skrining status gizi pada balita dan upaya peningkatan kehadiran balita di Posyandu masih diperlukan di Kabupaten Tegal meskipun cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di tahun 2024 sudah mencapai 110,5%.
- f. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di tahun 2024 sudah mencapai 475,19%, meskipun demikian optimalisasi persebaran informasi perilaku hidup sehat di sekolah diperlukan di Kabupaten Tegal untuk mencegah penyakit degenartif pada anak.
- g. Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 181,39% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah untuk penguatan advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) agar kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal meningkat.
- h. Penguatan advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Tegal perlu dioptimalkan meskipun persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sudah mencapai 169,79%.
- i. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 125,86% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah kuantitas SDM yang kurang, minimnya peran kader, dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian hipertensi di Kabupaten Tegal belum optimal.
- j. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai paada tahun 2024 mencapai 125,86%. Namun tantangannya adalah untuk penguatan advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) agar kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal meningkat.
- k. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 102,2% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah kondisi akses pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Tegal masih belum memenuhi kebutuhan akan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau sebagai upaya preventif dan promotif dalam peningkatan kesehatan jiwa.
- l. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 235,78% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah peran Pengawas Minum Obat (PMO) yang perlu dioptimalkan untuk memantau penderita TB paru minum obat secara teratur agar pasien tuberculosis resisten obat (TB RO) di Kabupaten Tegal tidak meningkat.
- m. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2024 mencapai 235,78% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah untuk peningkatan advokasi terkait HIV agar stigma masyarakat serta diskriminasi pada penderita HIV tidak membuat setiap mengidap HIV menghindari pemeriksaan
- n. Cakupan balita stunting di Kabupaten Tegal masih memerlukan perhatian khusus, meskipun pada tahun 2024 penurunannya telah mencapai angka 16,38%.

- o. Cakupan Pembinaan dan Dukungan Akreditasi Fasyankes pada tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan. Namun tantangannya adalah mempertahankan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa fasyankes di Kabupaten Tegal terus memenuhi standar mutu yang ditetapkan..

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik masih perlu dioptimalkan. Capaian target Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) di tahun 2024 mencapai 62,07% atau panjang saluran irigasi kewenangan kabupaten yang dalam kondisi baik baru 276,02 km dari total 276,03 km.
- b. Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak hingga tahun 2024 baru mencapai 81,28%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan hingga 100%.
- c. Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman hingga tahun 2024 baru mencapai 36,30%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target capaian air minum aman RPJMN.
- d. Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik Layak telah mencapai 100% ditahun 2024 sehingga perlu dipertahankan.
- e. Cakupan Akses Sanitasi/Limbah Domestik Aman hingga tahun 2023 baru mencapai 1,36%. Untuk itu masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target RPJMN.
- f. Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten hingga tahun 2024 masih 337,46 km dari total jalan kabupaten yang harus berdrainase sepanjang 490,15 pada tahun 2024.
- g. Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.
- h. Panjang jalan mantap (kondisi Baik dan Sedang) di kabupaten tegal masih perlu dioptimalkan, panjang jalan mantap (kondisi Baik dan Sedang) di kabupaten tegal masih baru 557.86 km dari total 854,54 km mendasari SK Bupati Tegal Nomor 600/528/2022 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal.
- i. Jumlah jembatan kondisi mantap (kondisi Baik dan Sedang) di kabupaten tegal masih perlu dioptimalkan, capaian target proporsi jembatan dalam kondisi mantap di tahun 2024 mencapai 92,17% atau masih terdapat 52 unit jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.
- j. Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih masih perlu ditingkatkan.
- k. Jumlah ajuan permohonan ITR yang sesuai dengan peruntukan ruang masih perlu ditingkatkan. Capaian target rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan di tahun 2024 baru 87,19%.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Prosentase Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Namun melihat potensi bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Tegal perlu upaya mitigasi dalam mengurangi dampak bencana terhadap permukiman warga.
- b. Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Namun dengan pesatnya dan

tidak terkontrolnya tanah kaplingan yang dijadikan perumahan maka perlu pengawasan yang lebih intens ke depan.

- c. Masih belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh, dikarenakan luas Kawasan Kumuh telah mengalami penurunan hingga tahun 2024 masih seluas 218,05 Ha.
- d. Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni hingga tahun 2024 karena baru mencapai 9.315 unit (21,83%) dari total 42.675 unit.
- e. Belum optimalnya ketersediaan PSU perumahan dikarenakan pada tahun 2024 baru mencapai 87,26% yaitu ketersediaan PSU air minum, sanitasi dan listrik di setiap unit rumah.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Presentase gangguan trantibun yang tertangani mengalami tren meningkat namun hingga tahun 2024 sudah 100% yang bisa tertangani
- b. Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan dalam 5 tahun terakhir cukup berfluktuatif namun hingga tahun 2024 baru 93,38% dan 97,16%.
- c. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran terakhir pada tahun 2024 mencapai 63,60% dan perlu dioptimalkan.

F. Urusan Sosial

- a. Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan hingga tahun 2024 baru mencapai 20,81%.
- b. Persentase Cakupan Fasilitasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100% dan perlu dijaga keberlanjutannya.
- c. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti terus mengalami peningkatan dan hingga tahun 2024 kinerjanya telah mencapai 100%.
- d. Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial hingga tahun 2024 baru mencapai 29,66%.
- e. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di tahun 2024 baru mencapai 95,21%.
- f. Persentase pengelolaan taman makam pahlawan trennya terus meningkat hingga pada tahun 2024 telah mencapai 99,9%.

2.3.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

- a. Rata-rata produktivitas tenaga kerja Kabupaten Tegal dimana mengalami tren penurunan setelah tahun 2022. Pada tahun 2022, produktivitas tenaga kerja mencapai 41,53 ribu, namun turun menjadi 36,03 ribu pada tahun 2023 dan 33,92 ribu pada 2024. Produktivitas tenaga kerja provinsi dimana pada tahun 2023 mencapai 55,16 juta..
- b. Skill tenaga kerja yang relatif rendah dimana 49,63% berpendidikan SD ke bawah dan 18,07% lulusan SMP.

- c. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah hingga tahun 2022 baru mencapai 66,27%.
- d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) hingga tahun 2022 baru mencapai 7,86% dari total 801 perusahaan.
- e. Tingkat pengangguran di Kabupaten Tegal tahun 2024 mencapai 7,53% menurun sebesar 1,07% dari tahun sebelumnya, namun angka ini masih berada di posisi lebih tinggi dibandingkan rata – rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
- f. Pengangguran terdidik yang relatif tinggi dimana 31,71% adalah lulusan SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

B. Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja operasi APBD hingga tahun 2024 baru mencapai 42,45%
- b. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) hingga tahun 2024 mencapai 9-10 orang per 100.00 penduduk perempuan.
- c. Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling hingga tahun 2024 rasionya masih sangat kecil baru mencapai 0,097%.
- d. Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia hingga tahun 2024 rasionya masih sangat kecil baru mencapai 70,00%.
- e. Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak meskipun telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir namun capainnya di tahun 2024 baru sebesar 70,00%
- f. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani hingga tahun 2024 baru mencapai 0,008%.

C. Urusan Pangan

- a. Persentase penguatan cadangan pangan dalam beberapa tahun terakhir telah melebihi 100% bahkan di tahun 2023 mencapai 238.339 ton. Sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 200.140 ton. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 38.199 ton atau sekitar 16% dari total Cadangan sebelumnya. Tantangannya ke depan terkait dengan berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan dan serangan hama atau penyakit tanaman yang mengurangi hasil panen.
- b. Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan pada tahun 2024 telah mencapai 100% namun tantangannya adalah untuk menyediakan informasi tersebut secara merata ke seluruh pihak yang membutuhkan secara tepat dan valid.
- c. Persentase penanganan daerah rawan pangan di tahun 2024 telah mencapai 100%. Namun tantangannya adalah bagaimana menciptakan diversifikasi pangan agar tidak tergantung pada salah satu jenis pangan saja.

D. Urusan Pertanian

- a. Presentase tanah milik kabupaten yang bersertifikat sampai dengan tahun 2024 baru mencapai 63,15% atau masih ada 1957 bidang tanah yang belum bersertifikat yang perlu segera dilakukan sertifikasi.
- b. Persentase implementasi redistribusi tanah pada beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan bahkan pada tahun 2024 baru mencapai 29%.
- c. Persentase Tanah yang tertata meskipun mengalami peningkatan namun hingga tahun 2024 capaiannya baru sebesar 32%.

E. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pemanfaatan Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan sudah mencapai 100%.
- b. Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai meskipun mengalami tren meningkat namun indeksinya hingga tahun 2024 baru mencapai 18,51 atau sudah mencapai 100%.
- c. Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3 hingga tahun 2024 mencapai 18,60% atau 100%.
- d. Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH hingga tahun 2024 sudah mencapai 38,89%.
- e. Persentase progres penyusunan dokumen rincian teknis hingga tahun 2024 melampaui target sebesar 113,60 %.
- f. Persentase Penambahan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli dengan Lingkungan Hidup hingga tahun 2024 sudah mencapai 20% atau 100%.
- g. Jumlah pengaduan lingkungan yang dilakukan penanganan dibagi dengan jumlah aduan masyarakat hingga tahun 2024 mencapai 100 %.
- h. Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan hingga tahun 2024 mencapai 111,11%.
- i. Volume sampah dalam beberapa tahun terakhir justru terus meningkat dari 451,4 m3 tahun 2023 menjadi 475,3 m3 di tahun 2024. Dari volume sampah yang ada hingga tahun 2024 baru 121.457 m3 yang dapat tertangani atau baru 50,27 % sampah tertangani.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga hingga tahun 2024 baru mencapai 98,81%.
- b. Presentase Penduduk ber KTP el hingga tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan.
- c. Presentase Anak Memiliki KIA hingga tahun 2024 baru mencapai 34,70% masih rendah.
- d. Meskipun rasio penduduk yang nemiliki akta kelahiran terus meningkat, pada tahun 2024 mencapai 96,85% sehingga perlu dioptimalkan.
- e. Prosentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman pada tahun 2024 sebesar 100% sehingga perlu dipertahankan.
- f. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama hingag tahun 2024 mencapai 100% sehingga perlu dipertahankan.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase Desa yang melakukan kerjasama hingga tahun 2024 baru mencapai 82,77%.
- b. Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa hingga tahun 2024 baru mencapai 90%
- c. Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa hingga tahun 2024 mencapai 100% sehingga dapat dipertahankan.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. TFR Kabupaten Tegal sejak tahun 2019-2021 cenderung menurun. Namun di tahun 2024 TFR Kabupaten Tegal mengalami kenaikan 2,16. Artinya, bahwa rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya mengalami penambahan. Hal ini disebabkan putus pakai kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) yang bekerja sebagai perantau
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR hingga tahun 2024 baru mencapai 64,76%
- c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) hingga tahun 2024 masih mencapai 7,77%.

I. Urusan Perhubungan

- a. Persentase dokumen andalin lalu lintas yang disusun pada tahun 2024 mencapai 100% perlu dipertahankan.
- b. Persentase pemenuhan alat uji terstandar Persentase kendaraan bermotor wajib uji dalam 6 (enam) tahun terakhir mencapai 100% sehingga perlu dipertahankan.
- c. persentase jumlah rampcheck angkutan umum hingga tahun 2024 masih rendah, sebesar 5%.
- d. Dalam 6 (enam) tahun terakhir kelengkapan rambu lalu lintas terus terus meningkat dan terakhir tahun 2024 mencapai 42,56%. Hal ini diperkuat dari angka kecelakaan yang meskipun sedikit menurun namun secara jumlah masih cukup banyak yaitu sebesar 421 kejadian yang menelan korban jiwa sebanyak 137 orang. Oleh karena itu masih banyak ruas jalan yang perlu dilengkapi rambu lalu lintasnya;
- e. Meskipun terus meningkat ruas jalan yang memiliki penerangan jalan, namun terakhir tahun 2024 baru mencapai 74,5%. Masih ada 24,5% ruas jalan yang belum memiliki penerangan jalan;
- f. Pemenuhan kebutuhan terminal/shelter masih rendah, hingga tahun 2024 pemenuh kebutuhannya baru mencapai 39,02%. Dari kebutuhan sebesar 102 unit baru tersedia 42 unit terminal/shelter dan halte.
- g. Rasio ijin trayek meskipun terus meningkat dalam 6 (enam) tahun terakhir namun capaian tahun 2023 baru sebesar 88,42%. Masih ada 11,58% angkutan yang belum memiliki ijin trayek;

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Penyebarluasan informasi publik belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hingga tahun 2024 akses masyarakat terhadap informasi publik baru mencapai 79,38%. Masih 20,62% penduduk yang belum terakses informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan terus mengalami peningkatan bahkan telah mencapai 100% pada tahun 2024.
- c. Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 31,25 % atau sebanyak 15 OPD;
- d. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 19,15%. Parameter ini sulit dicapai karena layanan publik yang digunakan oleh OPD merupakan aplikasi pusat yang tidak disediakan API (Application Programming Interface) nya, sehingga tidak memungkinkan untuk diintegrasikan.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha koperasi untuk mengurus perizinan usaha koperasinya. Meskipun persentase rekomendasi permohonan izin usaha yang diberikan selalu mencapai 100%, namun secara absolut jumlah permohonannya relative kecil bahkan selalu menurun dari 28 permohonan di tahun 2019 menjadi 10 permohonan di tahun 2024.
- b. Masih rendahnya rasio koperasi yang aktif di Kabupaten Tegal hingga tahun 2024 baru mencapai 48,42%.
- c. Masih rendahnya koperasi sehat di kabupaten Tegal dimana pada tahun 2024 baru mencapai 6,25%. Selain itu rasio koperasi sehat dan cukup sehat juga relatif masih rendah baru mencapai 23,27% pada tahun 2024. Untuk itu pengawasan, pembinaan, dan penyehatan koperasi masih perlu dilakukan;
- d. Masih rendahnya Kompetensi SDM Koperasi yang baru mencapai 11,13 % pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kompetensi SDM Koperasi melalui pelatihan/diklat.
- e. Masih sedikitnya persentase koperasi yang bermitra hingga tahun 2024 baru 4,80% atau sebanyak 20 koperasi saja dari 416 koperasi.
- f. Masih rendahnya persentase usaha mikro yang berizin dan bersertifikasi hingga tahun 2024 baru mencapai 28,32%. Padahal dengan adanya legalitas usaha akan mempermudah UMKM Formal untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan untuk pengembangan usaha.

L. Urusan Penanaman Modal

- a. Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi belum seluruhnya dapat dilakukan kajian.
- b. Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen hingga tahun 2024 sudah mencapai 50%.
- c. Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan pada tahun 2024 sebesar

- 91,92%, adanya ketidaklengkapan syarat administratif dan gangguan sistem informasi (OSS dan Si Cantik). Untuk itu sosialisasi, diseminasi kemudahan syarat administrasi dan skema pelayanan manual dirasa perlu untuk disiapkan;
- d. Persentase Kepatuhan Perusahaan masih kurang dimana hingga tahun 2024 baru mencapai 75,00%. Untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal maka pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan para investor masih diperlukan.
 - e. Persentase data layanan yang termanfaatkan masih cukup rendah dimana hingga tahun 2024 baru tercapai 14%.
 - f. Jumlah investor PMDN meskipun mengalami tren relative menurun dari 11.457 investor di tahun 2020 menjadi 7.973 investor di tahun 2022, dan mengalami peningkatan di tahun 2023 dan 2024. Namun demikian masih harus ditingkatkan dalam peningkatan realisasi baik jumlah investor maupun nilai investasi.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih sangat rendah baru mencapai 0,161% ditahun 2023.
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan masih sangat rendah baru mencapai 0,073% di tahun 2023.
- c. Peningkatan prestasi olahraga menunjukkan tren menurun dari 65 prestasi ditahun 2022 menjadi 12 prestasi di tahun 2023. Jumlah tersebut terbilang relatif masih sangat rendah.
- d. Persentase Cabang Olahraga yang dibina masih belum maksimal hingga tahun 2023 mencapai 91,67% .

N. Urusan Statistik

Ketersediaan kebutuhan data statistic untuk pembangunan Daerah meskipun dari tahun-ketahun terus meningkat namun capaian tahun 2023 baru sebesar 87,2%. Masih ada 12,8% kebuthan data statistik pembangunan yang perlu disediakan.

O. Urusan Persandian

Meskipun tiap tahun tingkat keamanan informasi terus meningkat namun cakupannya masih relative kecil baru sebesar 45,58% di tahun 2023. Untuk menyongsong digitalisasi pemerintahan maka tingkat keamanan informasi masih perlu di tingkatkan.

P. Urusan Kebudayaan

- a. Persentase tradisi yang dikembangkan masih belum maksimal meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 71,42%
- b. Persentase Seni dan Kesenian yang dibina masih belum maksimal meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 66,67%
- c. Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan belum maksimal dimana tahun 2023 baru mencapai 76,47%
- d. Terlestarikannya Cagar Budaya masih rendah meskipun terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 48,48%%

Q. Urusan Perpustakaan

- a. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mengalami tren menurun hingga tahun 2023 mencapai 66,25%.
- b. Tingkat literasi masih rendah. Ditahun 2022 memiliki skor 48,91 (Rendah), dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2023 turun kembali di angka 21. Hal ini disebabkan koleksi judul buku dan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) masih kurang dari persyarakatan;

R. Urusan Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya Arsip keuangan dan asset. Nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) LKD baru mencapai skor 78 pada tahun 2023 dengan kategori baik;
- b. Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai kategori/ bernilai cukup dalam Laporan Audit Internal Kearsipan (LAKI) di tahun 2023 baru 12 OPD dari total 48 OPD.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Jumlah Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 sebesar 2.207.297 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya (2020 – 2023).
- b. Produksi Perikanan Budidaya terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2024 sebesar 2.861.551 kg. Kondisi ini menurun dari tahun 2023 dengan total produksinya sebesar 3.078.972 kg. Hal ini disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak berproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.
- c. Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing di tahun 2024 kondisi lapangan yang kondusif, belum ditemukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
- d. Produksi pengolahan hasil perikanan Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2024 sebesar 5.820.304 kg naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5.804.704 kg.
- e. Melihat nilai produksi pengolahan hasil perikanan di tahun 2024 kurang adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2023. Selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

B. Urusan Pariwisata

- a. Pariwisata Adanya peningkatan pengembangan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang telah ditetapkan, hingga tahun 2024 persentase DTW yang ditetapkan telah mencapai 162,12%.

- b. Belum semua DTW telah dipromosikan. Persentase DTW yang dipromosikan hingga tahun 2024 baru mencapai 95%.
- c. Belum semua usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Persentase usaha pariwisata memiliki TDUP hingga tahun 2024 baru mencapai 89,45%.
- d. Cakupan SDM pariwisata yang dibina sudah lebih baik. Hingga tahun 2023 Persentase SDM Pariwisata yang dibina baru mencapai 69,57%, namun meningkat pesat di tahun 2024 menjadi 225%.

C. Urusan Pertanian

- a. Rata-rata Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hingga tahun 2023 sebesar 0,9% atau masih relatif terkendali. Dari semua serangan OPT tersebut semuanya atau 100% dapat ditangani.
- b. Hingga tahun 2023 lahan pertanian organik yang telah mendapatkan sertifikasi pertanian organik di Kabupaten Tegal baru seluas 5 Ha masih relative kecil dan bahkan masih dibawah target tahun 2024 seluas 15 ha.
- c. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang masih rendah umumnya disebabkan harga dari peralatan tersebut yang masih tidak terjangkau oleh petani. Hingga akhir 2022, rasio penggunaan alat pra panen di Kabupaten Tegal baru mencapai 62,72 % sedangkan untuk pasca panen hanya 15,51 %.
- d. Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 12.205.885 Kg. Produksi daging ini cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya (2018-2022). Fenomena penurunan produksi daging ini disumbang oleh besarnya penurunan produksi daging ayam di Kab. Tegal. Meskipun demikian, produksi telur relatif masih belum mencukupi. Sementara, sebagian besar daging sapi yang dikonsumsi masih berasal dari luar wilayah Kabupaten Tegal.
- e. Luas Lahan Sawah Lestari sebesar 41.573 Ha. Tantangannya ke depan potensi akan semakin berkurang dan beralih fungsi menjadi non pertanian khususnya lahan terbangun/perumahan. Perlu antisipasi dan mitigasi laih fungsi lahan pertanian tersebut dengan kebijakan insentif dan disinsentif.
- f. Selain cakupannya masih kecil, persentase Ternak terkendali status kesehatannya dalam 5 tahun terakhir menurun dari 16,61% di tahun 2019 menjadi 5,6% di tahun 2023.
- g. Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH telah mencapai 100%. Meskipun telah mencapai 100% namun pengawasannya perlu terus dijaga cakupannya.

D. Urusan Perdagangan

- a. Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Kondisi ini perlu terus dijaga agar semua pengajuan ijin ke depan dapat terfasilitasi.
- b. Persentase pasar yang telah direhabilitasi tahun 2024 baru mencapai 56%. Masih ada 19 pasar dari 25 pasar yang ada yang memerlukan rehabilitasi sesuai dengan kondisinya masing-masing.

- c. Persentase pasar e-retribusi hingga tahun 2024 telah mencapai 100% atau terdapat 25 pasar yang telah menerapkan e-retribusi.
- d. Persentase Laju Nilai Ekspor tahun 2024 menunjukkan kinerja yang positif dengan laju 9%. Namun melihat ke belakang trennya masih belum stabil.
- e. Persentase Pedagang Tertib Ukur masih belum maksimal baru mencapai 84,87% hingga tahun 2024.
- f. Penggunaan produk dalam negeri hingga tahun 2024 baru mencapai 98,63% dari nilai komitmen yang ada yang sebesar Rp. 4.396.313.940.

E. Urusan Perindustrian

- a. Masih rendahnya industri yang mengajukan ijin usaha industri dikarenakan kesadaran pelaku usaha untuk mengajukan permohonan;
- b. Belum optimalnya pengawasan terkait perijinan industri dikarenakan perusahaan yang terdata adalah perusahaan yang mengajukan verifikasi melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab Tegal. Berita acara verifikasi teknis ijin usaha industri yang dikeluarkan oleh Disperinaker adalah pada tahun 2024 mencapai 15 perusahaan, namun secara total hanya 117 perusahaan saja yang mengajukan dari tahun 2020 – 2024.
- c. Masih banyaknya IKM dan produk IKM yang belum bersertifikasi. Sertifikasi produk IKM di Kabupaten Tegal dilakukan dengan sumber anggaran yang terdiri dari APBD I, APBD II, dan APBN dengan yang difasilitasi oleh kabupaten hanya 261 perusahaan saja yaitu uji nutrisi, halal, dan pendaftaran merk, sedangkan yang paling banyak adalah anggaran dari provinsi dengan jumlah 299 perusahaan dari tahun 2018 - 2020 dengan kegiatan uji nutrisi, uji kadaluarsa, PIRT, Halal, pendaftaran merk, BKL dan SNI dengan paling banyak adalah PIRT (pangan industri rumah tangga);
- d. Pelaporan rutin di dalam SIINas masih belum optimal dilakukan oleh perusahaan padahal sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan industry. Terdapat 125 perusahaan yang teregister di SIINas dengan 15 perusahaan yang sudah melaporkan data secara berkala;
- e. Berdasarkan Perda RTRW No.2 Tahun 2023, terdapat 7 Program Utama yang diikuti dengan Lokasi, Alokasi Sumber Pendanaan, Instansi Pelaksana dan Rentang Waktu Pelaksanaan di tahun 2023 dan 2024 yang belum sesuai dengan potensi dan nilai jual hasil produk lokal daerah yang berada di kawasan Kabupaten Tegal yang seharusnya dapat dijadikan komoditas pertanian sebagai industri (Besar dan Menengah) berbasis nilai tambah (added-value), seperti contoh Agro Industri;
- f. Menurunnya Pelayanan Peningkatan Kualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024, khususnya pada perbandingan antara tahun 2023 sebanyak 433 dan 2024 sebanyak 603 layanan. Perbedaan Gap sebesar sebesar 230 layanan mutu produk menjadi gambaran bahwasanya sudah ada peningkatan pelayanan mutu yang efisien dan efektif serta kemudahan administrasi birokrasi;
- g. Terjadinya penurunan sertifikasi produk IKM di Kabupaten Tegal pada Tahun 2022 melalui dana alokasi anggaran APBD I dan II serta APBN yang sejatinya

dapat didukung dengan upaya fasilitasi pada pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya: sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Fasilitas jemput bola dan sosialisasi langsung ke pelaku usaha adalah salah satu solusi kedepan. Selain daripada itu adalah strategi lobbying dan sinergi serta kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam me-replace anggaran dari APBN ke APBD.

F. Urusan Transmigrasi

Sejak tahun 2014-2022 sudah terdapat 112 penduduk (28 KK) yang berhasil ditempatkan. Tahun 2023 – 2024 Kabupaten Tegal tidak mendapatkan kuota transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah.

2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

- a. Presentase Indeks Reformasi Birokrasi hingga tahun 2024 yang baru mencapai 67,41%. Masih perlu kerja keras Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas kinerja, dan budaya antikorupsi agar semakin baik.
- b. Persentase nilai SAKIP Kabupaten Tegal tahun 2024 baru mencapai 64,250%. Maka perlunya meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- c. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik karena presentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Tegal pada tahun 2024 mencapai 81,27%, yang terdiri dari IKM perizinan, Rumah Sakit, dan pelayanan kecamatan.

B. Sekretariat DPRD

- a. Rencana kerja tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawaasan, pembentukan perda dan anggaran pada setiap alat kelengkapan DPRD baru mencapai 62% pada tahun 2023.
- b. Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Untuk itu ke depan perlu untuk dijaga keberlanjutannya.

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

- a. Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan beberapa tahun terakhir telah mencapai 100%. Selain perlu tetap dijaga konsistensinya ke depan, yang perlu diperkuat adalah ada aspek kualitasnya
- b. Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti masih belum maksimal. Terakhir pada tahun 2024 baru mencapai 80%.

- c. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 81,49%.
- d. Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 84,55%
- e. Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan masih belum maksimal terakhir tahun 2024 baru mencapai 78,77%.

B. Unsur Keuangan

- a. Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan agar tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D beberapa tahun terakhir hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan.
- c. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD beberapa tahun terakhir hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Namun ke depan masih tetap perlu dipertahankan.
- d. Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu baru mencapai 70% di tahun 2024. Selain itu Dalam 6 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 34 OPD dari 48 OPD.
- e. Pengelolaan pendapatan daerah belum optimal di mana tahun 2024 kontribusi pajak terhadap PAD baru mencapai 19,62%.
- f. Belum Optimalnya Rasio Piutang Pajak Daerah dimana pada tahun 2024 baru mencapai 40,65%.
- g. Rasio Pajak Daerah di Kabupaten Tegal meskipun trennya meningkat namun belum optimal, dimana capaiannya pada tahun 2024 baru 3276%.

C. Unsur Kepegawaian

- a. Tingkat kedisiplinan ASN perlu ditingkatkan di mana di tahun 2024 masih ada 0,12% ASN yang mendapat hukuman disiplin.
- b. Rasio pegawai (PNS) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan hingga tahun 2024 baru mencapai 35,76%. Untuk meningkatkan profesionalitas dan memangkas birokrasi maka pegawai fungsional masih perlu ditingkatkan ke depan.
- c. Jabatan fungsional yang diisi sesuai kompetensi dan kaulifikasi sudah optimal, namun Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya di mana persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi baru mencapai 89,04%;
- d. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan sudah mencapai 93,50% perlu dipertahankan.

D. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun baru sekitar 47,49% ASN yang telah mengikuti diklat 20 jam dalam setahun.
- b. Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan baru sekitar 33,4% ASN yang telah mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan.

E. Unsur Penelitian dan Pengembangan

- a. Indeks inovasi daerah Kabupaten Tegal dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020 – 2024) meskipun masih masuk kategori sangat inovatif namun masih belum meningkat secara konsisten dan akselerasinya relative tertinggal dari segi produktifitas dan Tingkat kematangannya.
- b. Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah meskipun sudah meningkat hingga 93,33% ditahun 2023 namun masih ada hasil kelitbangan yang belum dapat termanfaatkan.

F. Unsur Pengawasan

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan di mana tahun 2024 baru mencapai 91,56% penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu pertahankan di mana tahun 2024 baru mencapai 60% temuan yang ditindaklanjuti
- c. Tindak lanjut hasil pengawasan ItKab perlu dipertahankan di mana pada tahun 2024 telah mencapai 71,25% temuan yang terselesaikan.
- d. Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi dalam rangka menuju WBK/WMMB hingga tahun 2024 masih rendah hanya sebesar 8,33% (4 OPD)

G. Unsur Pemerintahan Umum

- a. Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang di mana persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru 86,66%
- b. Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik hingga tahun 2023 baru mencapai 90%
- c. Presentase ormas yang terbina belum optimal, dimana pada tahun 2023 baru 90% capaiannya.
- d. Persentase Konflik yang tertangani dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Mendekati tahun politik maka potensi konflik SARA perlu diantisipasi.
- e. Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2024 telah mencapai 100%. Mendekati tahun politik maka potensi gangguan KANTIBMAS perlu diantisipasi.

2.3.3 Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu lokal Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2025-2029. Isu strategis Kabupaten Tegal didesain dengan

mempertimbangkan isu strategis provinsi, nasional dan global. Dengan demikian, pelaksanaan isu strategis dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis yang ada. Berikut disajikan keterkaitan isu strategis dan isu strategis provinsi dan isu strategis nasional dan isu strategis global.

Tabel 2. 289
Keterkaitan Isu Strategis Daerah, Isu Strategis Provinsi, Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Global

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Daerah Provinsi	Isu RPJPD	Isu Daerah Kabupaten Tegal
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air Bersih dan Sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan 12. Perubahan Iklim 13. Sumberdaya Kelautan 14. Ekosistem Daratan 15. Masyarakat Inklusif dan Damai, Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan 16. Kemitraan Global	1. Stabilitas Politik dan Keamanan 2. Tata Kelola Birokrasi Efektif dan Efisien 3. Pemberantasan Korupsi 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Percepatan Pemerataan dan Keadilan 6. Keberlanjutan Pembangunan 7. Peningkatan Kualitas SDM 8. Kesenjangan antar Wilayah 9. Percepatan Pembangunan Kelautan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM 3. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha 4. Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber daya Alam 5. Kedaulatan Pangan dan Energi 6. Kesenjangan Wilayah 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah	1. Reformasi Birokrasi 2. Ekonomi Kreatif Masyarakat 3. Pembangunan Gender 4. Kelestarian Lingkungan Hidup 5. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah 6. Kesenjangan Kesejahteraan, Infrastruktur Dasar dan Kualitas SDM	1. Menekan Kemiskinan dan Pengangguran 2. Kualitas Sumber Daya Manusia • Kualitas Tenaga Kerja • Kualitas Pendidikan Masyarakat • Kualitas Kesehatan • Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender 3. Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan 4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup • Pemerataan Infrastruktur Dasar • Kualitas Lingkungan Hidup 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi • Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik • Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi • Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah • Mitigasi Risiko Pembangunan

Penentuan isu strategis Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu local Kabupaten Tegal sendiri yang mempengaruhi pembangunan pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menekan Kemiskinan dan Pengangguran

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal dalam 11 (sebelas) tahun terakhir mengalami tren menurun dan selalu berada di bawah Provinsi maupun Nasional. Adapun angka kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2012 mencapai 10,75% menjadi 7,3% di tahun 2023.

Jika dilihat dalam dua tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal berkurang sebanyak 8,59 ribu orang yaitu dari 113,62 ribu orang pada tahun 2022 menjadi 105,03 ribu orang pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan namun jika dilihat secara absolut jumlah penduduk miskin tersebut masih relative besar, karena itu intervensi kebijakan kemiskinan perlu menekan juga angka kemiskinan secara absolut.

Jika dilihat berdasarkan garis kemiskinannya, angka garis kemiskinan Kabupaten Tegal mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir dari Rp.434.638 per kapita per bulan menjadi Rp.470.728 per kapita per bulan atau naik 8,3%. Kenaikan angka garis kemiskinan ini perlu diperhatikan agar tidak semakin banyak penduduk rentan miskin yang jatuh jada jurang kemiskinan. Untuk itu kearifan lokal gotong royong, jaring pengaman sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berkesinambungan dan masuknya investasi yang masuk ke Kabupaten Tegal perlu diakselerasi agar dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat sehingga tidak terjun semakin dalam dalam jurang kemiskinan.

Berkaitan dengan pengangguran, TPT di Kabupaten Tegal bersifat fluktuatif, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun, perlu dicatat bahwa TPT Kabupaten Tegal pada tahun 2023 telah turun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 9,64 (2022) menjadi 8,60 (2023). Meskipun sudah turun namun jika dilihat secara kewilayan angka pengangguran Kabupaten Tegal masih di atas provinsi maupun nasional. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan masih memerlukan akselerasi dalam tahun-tahun ke depan.

Dalam hal kepemudaan, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi cukup besar, ini terlihat dari tingginya persentase pemuda yang berstatus bekerja. Lebih dari separuh pemuda telah bekerja. Pemuda laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding pemuda perempuan, namun pemuda laki-laki juga lebih banyak yang menganggur. Lebih rendahnya persentase pemuda perempuan yang bekerja erat kaitannya dengan tugas perempuan mengurus rumah tangga. Dilihat dari tempat tinggal, pemuda pengangguran di perkotaan juga lebih tinggi dibanding perdesaan. Kondisi lingkungan perdesaan yang dominan sektor pertanian erat kaitannya dengan lebih rendahnya pengangguran di perdesaan.

Jika dilihat dari karakteristiknya, pengangguran di Kabupaten Tegal tahun 2023 didominasi oleh pengangguran terdidik terutama lulusan SMA/Kejuruan. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2022 TPT semua kategori pendidikan mulai dari SMP, SMA Umum, SMA Kejuruan, maupun Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 6,80 persen poin. Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 3,97 persen poin. Ini menunjukkan adanya peningkatan pengangguran terdidik di Kabupaten Tegal. Untuk itu bagaimana memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan karakter pendidikan Angkatan kerja menjadi prioritas ke depan.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Tenaga Kerja

Tantangan isu ketenagakerjaan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, untuk mengantisipasi isu SDM sektor tenaga kerja kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus

memiliki konsep dan pembentukan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan. Selain itu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tantangan pengembangan tenaga kerja kedepan ialah bagaimana tenaga kerja harus memiliki 10 soft skill era Revolusi Industri Generasi Keempat selain juga memiliki hard skill penguasaan teknologi.

Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan angkatan kerja di tahun 2023, sebanyak 67,7% Angkatan kerja di Kabupaten Tegal berpendidikan tidak lebih dari SMP. Ini menunjukkan bahwa kompetensi dan daya saing Angkatan kerja di Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja ke depan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja penting dilakukan mengingat peran sertanya dalam pembangunan nasional. Informasi ketenagakerjaan diperlukan dalam proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sehingga semakin lengkap dan akurat informasi ketenagakerjaan yang tersedia, maka perencanaan pembangunan akan semakin jelas dan tepat sasaran.

a. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Jika dilihat dari tren harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Tegal yang semakin meningkat dari 12,34 tahun di tahun 2018 menjadi 12,92 tahun di tahun 2023, menunjukkan program pendidikan telah berjalan positif. Namun jika dibandingkan angka nasional, HLS Kabupaten Tegal selalu di bawahnya dimana tahun terakhir HLS nasional tahun 2013 sebesar 13,15 tahun. Sedangkan secara kewilayahan di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2023 telah menduduki peringkat kedua tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Namun jika dilihat dari aspek rata-rata sekolah (RLS) khususnya di tahun 2023, capaian Kabupaten Tegal (7,34 tahun) selalu dibawah Provinsi (8,01 tahun) maupun Nasional (8,77 tahun). Artinya bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tegal tahun 2023 masih menyenjam Pendidikan pada tingkat kelas 1 semester II jenjang SMP/ sederajat. Hal ini tentu saja menunjukkan meksipun potensi harapan lama sekolah Kabupaten tegal relative tinggi namun tidak banyak yang memanfaatkan itu sehingga rata-rata kualitas Pendidikan kita masih rendah. Ke depan perlu intervensi kebijakan agar peluang/harapan sekolah yang tinggi bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh penduduk Kabupaten Tegal.

b. Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tingkat kualitas Kesehatan masyarakat dapat ditunjukkan dari kondisi Kesehatan Ibu dan Anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan Kesehatan. Angka kematian Ibu dalam lima tahun terakhir (2018-2023) mengalami tren relative meningkat dari 6,58 ditahun 2018 menjadi 17 ditahun 2023. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan AKI khususnya upaya preventif melalui posyandu, menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED),

Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan, Penyediaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Pengadaan alat kesehatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Pearangkat Daerah lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng *Gayeng Nginceng Wong Meteng*), namun hasilnya masih belum maksimal. Untuk itu ke depan masih perlu dievaluasi dan diidentifikasi penyebab utama meningkatnya AKI agar bisa diberikan solusi kebijakan yang tepat sasaran.

Jika dilihat dari angka kematian bayinya (AKB), dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi penurunan namun tidak signifikan. Sedangkan angka kematian balita menunjukkan tren yang stagnan datar. Melihat angka absolutnya tingkat kematian bayi dan balita di Kabupaten Tegal ke depan masih perlu di tekan.

Berkaitan dengan bonus demografi, diperlukan generasi yang berkualitas. Untuk itu perlu diciptakan peluang generasi berkualitas sejak dini. Untuk mengantisipasinya, bisa dilihat berdasarkan prevalensi kasus stunting yang memiliki tren meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir dari 6,58 di tahun 2018 menjadi 17 di tahun 2023. Untuk meyongsong bonus demografi kita, maka angka prevalensi stunting ini masih perlu ditekan sebesar mungkin.

Selain AKI, AKB, AKABA dan stunting, perkembangan Covid-19 juga masih perlu diantisipasi ke depan. Kasus COVID-19 dilaporkan kembali meningkat di sejumlah negara di ASEAN, termasuk Indonesia dengan rata-rata kasus harian bertambah 35-40 kasus. Sementara, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tercatat antara 60-131 orang per 6 Desember, dengan tingkat keterisian rumah sakit saat ini sebesar 0.06% dan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain varian XBB, Indonesia juga sudah mendeteksi adanya subvarian EG2 dan EG5. Melihat ada kenaikan (kasus) yang cukup signifikan, diperlukan kembali vaksinasi, dosis lengkap maupun booster. Selain itu layanan pemerintah dan aktivitas social-ekonomi non tatap muka berpotensi terjadi Kembali.

c. Kesetaraan dan Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender di Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan begitu juga dengan pemberdayaan gendernya. Namun yang masih perlu diintervensi adalah berkaitan dengan pemberdayaan gendernya. Meskipun meningkat capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tertinggi masih diangka 73,76 (2022). Untuk itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih perlu didorong.

2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal menunjukkan capaian yang menggembirakan bahkan dari tahun 2018-2021 selalu berada di atas Provinsi dan Nasional. Adapun di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal (5,14%) sedikit berada di bawah Provinsi dan Nasional yang capaiannya sama-sama sebesar 5,31%. Jika dilihat berdasarkan strukturnya terlihat adanya perubahan menuju masyarakat industri (sektor sekunder) sehingga perlu disiapkan potensi dan masalah yang akan ditimbulkan pada proses transisi struktur tersebut. Jika dilihat dari sisi lain, peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Tegal juga diikuti dengan tren peningkatan ketimpangan pendapatan. Untuk itu tantangan ke depan ialah bagaimana memberikan pemerataan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian yang tumbuh positif ini. Dari pandangan keunggulan komparatif menggunakan metode Symmetric Location Quotient (SLQ), Sektor basis Kabupaten Tegal ditunjukkan pada nilai rerata SLQ yang lebih dari yaitu:

- Pertambangan dan Penggalian;
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
- Jasa Pendidikan; dan
- Jasa Lainnya.

Sementara dari aspek Kontribusi PDRB di Kabupaten Tegal selama tahun 2018 – 2022 berturut-turut didominasi oleh Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari hasil overlay antara aspek komparatif (SLQ) dan aspek kontribusi dapat dikerucutkan bahwa sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya.

Untuk sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan diseluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke system online. Selain dapat meningkatkan manfaat ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme system online tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar. Misalnya dalam pendidikan, kita bisa menjual jasa mengajar online melalui *Skype*, *Zoom*, *Microsoft Teams*, dll. Juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing, dan lain sebagainya. Untuk itu tantangannya ialah bagaimana menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industri kreatif itu sendiri.

Untuk sektor pertanian khususnya dalam rangka menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan. Ketersediaan pangan saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal dan masih memiliki cadangan. Namun ada

kecenderungan penurunan daya dukung dan kemandirian pangan sampai 2026. Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran dan tingginya penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir yang didukung dengan perlindungan bahkan perluasan lahan pertanian produktif.

Potensi local lainnya yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya local untuk menjadi atraksi baru;
- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam potensi covid-19 yang di tahun 2023 kembali meningkat, syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan kembali. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan standard Clean Health Safety Environment (CHSE).

Dalam era digital yang makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat, tantangannya ialah bagaimana menciptakan kolaborasi dan mengintegrasikan sektor-sektor ekonomi dengan ekonomi kreatif dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globalisasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Paling sederhana, Kabupaten Tegal mempunyai sejarah dan

warna yang kuat dalam budaya perwayangan dan keagamaan. Namun lambat laun budaya tersebut mulai ditinggalkan khususnya oleh generasi muda yang lebih condong kebarat-baratan. Bahkan persepsi anak muda sekarang bahwa jika ada orang terutama generasi muda menyukai wayang dianggap kampungan. Padahal seni budaya wayang justru dihargai bahkan dikembangkan di negara barat seperti Belanda dan Perancis. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan lokal agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

3. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup

a. Pemerataan Infrastruktur Dasar

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemeritnah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan. Untuk SPAM PDAM capaian kinerja layanan air minum tahun 2022 baru mencapai 66,8%. Itu artinya masih ada 33,2% rumah tangga wilayah perkotaan yang belum terakses layanan air minum. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini cakupan layanannya masih sebesar 78,20%. Yang artinya di wilayah perdesaan masih ada 21,8% penduduk yang tidak terlayani jaringan air bersih PAMSIMAS. Sehingga masih perlu intervensi percepatan pemerataan layanan air minum di Kabupaten Tegal ke depan baik untuk wilayah perdesaan maupun perkotaan

Selain layanan air minum, infrastuktur jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang investasi dan perkembangan wilayah. Berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, Jalan Desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km. Secara agregat, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Sementara kondisi jalan rusak berat masih mencapai 69,13 km atau sekitar 8,16%. Kondisi jalan rusak berat ini menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Selain itu per bulan Oktober 2023 kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Tegal mencapai 728,89 Km atau 86,03% dan sisanya 118,38km (13,97%) kondisi tidak mantap. Untuk itu isu pemerataan jalan yang berkualitas dalam menarik investasi masih perlu mendapat perhatian pembangunan ke depan.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini,

perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung sporadic (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang ter-*design* dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota Slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang *representative*, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Berkaitan dengan sampah, kemampuan daerah dalam mengangkut sampah mengalami tren menurun bahkan di tahun 2023 hanya 44,8% sampah rumah tangga yang bisa terangkut. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak masalah mulai dari Kesehatan, keindahan dan kenyamanan, dan lingkungan. Untuk itu isu kedepan adalah tentang bagaimana menurunkan produksi sampah dari level keluarga dan mengolah sampah agar dapat bernilai ekonomis. Untuk infrastruktur sanitasi juga masih menjadi isu kedepan. Hingga tahun 2023 masih terdapat 25.130 rumah yang belum memiliki jamban yang layak. Hal ini tentu saja masih perlu intervensi pemerintah Daerah untuk menuntaskan 100 rumah memiliki sanitasi yang layak. Begitu juga dengan luas kawasan kumuh yang meksipun dalam beberapa tahun terakhir telah menurun namun masih terdapat 237,91 Ha Kawasan kumuh yang perlu ditangani.

b. Kualitas Lingkungan Hidup

Dilihat dari indeks kualitas lingkungan hidupnya (IKLH) meskipun mulai meningkat secara bertahap namun capaian terakhir tahun 2022 sebesar 64,25 masih tergolong belum baik. Faktor-faktor lingkungan yang perlu ditangani terutama berkaitan pencemaran air dan menurunnya tutupan hutan di Kabupaten Tegal terutama berkaitan dengan ekosistem Hutan DAS. Kerusakan ekosistem hutan di DAS merupakan ancamannya bencana kembar, musim hujan di muara dan pantai akan didominasi freshwater, artinya salinitas sangat rendah (hypohaline) dan pada musim kemarau kondisi (hyperhaline) pengalaman saya di hutan bakau Segara Anakan perairannya didominasi sekitar 3 bulan air tawar (banjir) dan hypohaline, dan terjadi peledakan populasi ikan kating yang masuk dari Sungai Citanduy dan 7 sungai lainnya. Ikan ini merupakan ikan omnivoroos, artinya ikan tersebut memakan semua larva udang dan ikan sedangkan pada musim kemarau, tidak cukup air sungai (freshwater) sehingga salinitasnya menjadi sangat tinggi, 39-40 ppt. (hypohaline). Semua larva ikan udang ikan dan udang mati. Karena terjadi peledakan fitoplankton noxious (HABs), fitoplankton noxious tsb tidak disukai zooplankton dan larva udang. Zooplankton merupakan pakan udang dan ikan. Akibatnya di kedua musim masyarakat nelayan paceklik. Saat ini banyak tutupan hutan kita yang dibuka untuk pertanian kentang (pertanian semusim/cash crop). Hal ini dapat mengancam ekosistem alam secara keseluruhan. Pada musim hujan akan terjadi banjir besar, dan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Kedua kejadian ini menyebabkan gagal panen maupun aktivitas ekonomi wilayah lainnya.

Isu lingkungan lainnya adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh banyak factor namun yang cukup nyata adalah

berkurangnya hutan dan tingginya emisi. Kerusakan hutan hujan tropika dan ekosistem biru bersamaan dengan meningkatnya emis CO₂ secara bersama sama mempercepat efek rumah kaca yang mempengaruhi pemanasan global. Untuk itu isu ke depan yang penting nilainya adalah bagaimana mengurangi pencemaran air dan menekan konversi tutupan lahan dan meningkatkan tutupan lahan di Kabupaten Tegal serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

a. Tata kelola pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Pemerintah dihadapkan pada tantangan baru menghadapi perubahan era industry 4.0 untuk menjadi pemerintahan yang dinamis. Pemerintahan yang dinamis adalah pendekatan tata kelola yang menekankan kemampuan beradaptasi, inovasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal ini ditandai dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembelajaran berkelanjutan, eksperimen, dan perbaikan. Untuk itu sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang dinamis membutuhkan pendekatan yang komprehensif yang mencakup berbagai faktor, antara lain:

- 1) Budaya: Budaya yang mendukung dan memungkinkan sangat penting untuk pemerintahan yang dinamis. Ini berarti menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa diberdayakan untuk mengambil risiko, bereksperimen, dan menantang status quo. Terdapat dua budaya yang penting untuk diterapkan oleh pemerintah: can-do attitude.²
- 2) Kepemimpinan: Kepemimpinan yang kuat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat penting untuk menumbuhkan budaya inovasi dan perubahan. Para pemimpin harus dapat mengemukakan visi yang jelas untuk masa depan dan memotivasi tim mereka untuk merangkul ide-ide dan pendekatan baru.
- 3) Struktur: Struktur pemerintahan harus dirancang untuk memfasilitasi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Ini mungkin melibatkan beberapa keputusan yang masih dalam koridor regulasi, menciptakan tim lintas fungsional, dan memberdayakan pengambilan keputusan di tingkat yang lebih rendah.
- 4) Proses: Proses pemerintahan harus disederhanakan dan efisien untuk memungkinkan respons cepat terhadap keadaan yang berubah. Ini termasuk menghilangkan birokrasi yang tidak perlu dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi.
- 5) Data: Pemerintah harus mengumpulkan dan menganalisis data untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan melacak kemajuan. Data ini harus tersedia untuk pembuat kebijakan dan publik.
- 6) Partisipatif dan Akuntabel: Pemerintah harus melibatkan warga, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengumpulkan umpan balik dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti survei, dengar pendapat publik, dan forum online. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan hasilnya. Ini berarti transparan, terbuka untuk pemeriksaan, dan bersedia belajar dari kesalahan.

Selain beberapa penjelasan sebelumnya, fungsi pemerintahan juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita *hoax* yang dapat memunculkan gesekan dimasyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

b. Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi local. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan (*research based policy*). Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*,

juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Perananan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan direspon saat ini ialah berkaitan dengan pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*. Untuk itu infrastruktur TI harus disiapkan berkaitan dengan pengembangan dan penguatan tersebut.

c. Kerjasama dan Kondusifitas Wilayah

Kerjasama dan kondusifitas menjadi salah satu pintu keberhasilan pembangunan disuatu daerah. Berbagai aktifitas pembangunan dapat mencapai tujuannya jika dilakukan atas dasar kerjasama yang efektif dari seluruh *stakeholder*. Apalagi dalam perspektif pembangunan yang sifatnya kawasan maka kerjasama yang baik mutlak menjadi kunci keberhasilannya. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan kawasan Bregasmalang, kabupaten tegal beserta seluruh kabupaten/kota yang tergabung didalamnya harus bekerjasama secara simultan, efektif dan sinergi satu dengan yang lainnya. Ada beberapa isu pembangunan Kabupaten Tegal terkait pembangunan kawasan bregasmalang yang memerlukan kerjasama dengan kabupaten/kota sekitarnya antara lain Kerjasama SPAM Bregas, Kerjasama TPA Regional, Kerjasama Kawasan Industri Brebes. Dengan adanya kerjasama yang efektif dan sinergi yang baik diharapkan seluruh kabupaten/kota dalam kawasan Bregasmalang dapat mendapatkan manfaat tumbuhnya ekonomi wilayah.

Selain kerjasama yang baik, untuk mewujudkan tujuan pembangunan maka harus didukung oleh kondusifitas wilayah yang baik. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat diantisipasi dan dimimalisir agar tidak mengganggu jalannya pembangunan yang ada. Apalagi dengan pesatnya teknologi informasi yang ada, maka arus informasi semakin cepat menyebar tanpa terfilter terlebih dahulu. Informasi-informasi *hoax* menjadi ancaman yang mampu menggerakkan masa dan menciptakan gangguan keamanan wilayah. Apalagi dalam beberapa tahun kedepan akan dilaksanakan pesta demokrasi Pilkada dan Pilpres yang berdasarkan pengalaman yang telah lalu mampu menimbulkan perpecahan dan friksi dimasyarakat yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Untuk itu kondusifitas wilayah menjadi isu penting kedepan.

d. Mitigasi Risiko Pembangunan

Setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan suatu pembangunan tidak tercapai. Untuk itu setiap aktifitas pembangunan khususnya yang prioritas harus dapat mengenali risiko yang mungkin dihadapi serta mencari alternatif atas



suatu risiko yang mungkin muncul. Jika suatu risiko atas suatu aktivitas pembangun dapat dinilai dan diantisipasi secara dini maka dapat mengakselerasi tingkat capaian target suatu pembangunan. Untuk itu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengkoordinasikan, mengidentifikasi, dan mengelola risiko menjadi kunci penting. Oleh karena itu mitigasi risiko pembangunan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi isu umum pembangunan di Kabupaten Tegal. Setiap Perangkat Daerah perlu melakukan mitigasi risikonya masing-masing agar kinerja pembangunan dapat tercapai.

BAB III

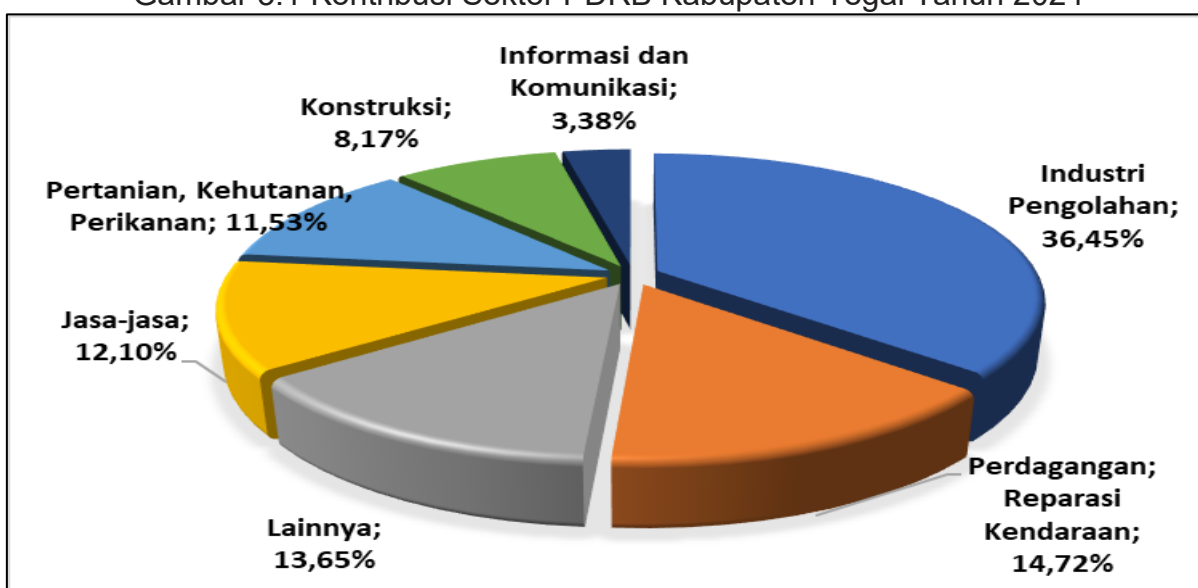
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Situasi Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kabupaten Tegal, diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 tercatat sebesar 47.721,31 milyar rupiah. Dari besaran PDRB tersebut, sektor-sektor yang paling berpengaruh adalah Industri Pengolahan; Perdagangan, Reparasi Kendaraan; serta Pertanian, Kehutanan Perikanan, dimana ketiga sektor tersebut berkontribusi lebih dari 62% perekonomian Kabupaten Tegal, seperti tercantum pada Gambar 3.1 dan Tabel 3.1 di bawah.

Gambar 3.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel 3.1 Tren Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026

Lapangan Usaha PDRB	Share PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)							
	2010	2011	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Pertanian, Kehutanan Perikanan	17,72	17,09	13,24	13,00	12,59	11,95	11,53	10,49
Industri Pengolahan	26,82	29,53	35,20	35,80	35,73	36,30	36,45	37,16
Konstruksi	8,51	7,82	7,58	7,72	7,89	8,05	8,17	8,18
Perdagangan; Reparasi Kendaraan	18,23	17,89	14,94	14,92	14,60	14,58	14,72	15,15
Informasi dan Komunikasi	2,99	2,85	3,41	3,45	3,24	3,28	3,38	4,06
Jasa-jasa	11,90	11,96	13,21	12,72	12,47	12,14	12,10	12,90
Lainnya	13,83	12,86	12,41	12,38	13,48	13,70	13,65	12,04

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel di atas mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal mengalami transformasi struktural dari wilayah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang sedang mengalami perkembangan. Di awal pertumbuhan, daerah akan bergantung pada sektor agraris. Dengan semakin majunya perekonomian, maka sektor yang dominan akan bergeser ke industri pengolahan. Selanjutnya, kawasan yang sudah maju dan menjadi pusat layanan bagi kawasan belakangnya akan banyak ditopang oleh sektor jasa.

Struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2026 diperkirakan akan sama dengan situasi saat ini, dimana perekonomian didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang tumbuh pesat, seiring dengan implementasi Industry 4.0 yang sudah lebih baik. Sementara, sektor jasa yang berkontribusi signifikan adalah Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya, khususnya pariwisata, yang akan dapat mendorong tumbuhnya sektor Akomodasi Makan Minum.

Menyikapi situasi tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan sektor industri dan jasa agar perkembangannya mengakomodir sektor pertanian; dalam kata lain adalah hilirisasi pertanian. Selain itu, calon pekerja yang ada (karena adanya bonus demografi) juga perlu diwadahi melalui sektor perdagangan dan jasa agar tingkat pengangguran terbuka semakin menurun. Terakhir, sektor pertanian juga perlu ditingkatkan nilai tambahnya agar pelaku usaha pertanian semakin sejahtera.

Sementara, pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 dan Perkiraan Tahun 2026

Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Pertanian, Kehutanan Perikanan	2,18%	2,77%	1,66%	-2,05%	0,29%	2,95%
Pertambangan dan Penggalan	2,05%	4,35%	-5,49%	2,02%	3,32%	2,82%
Industri Pengolahan	-0,66%	4,28%	4,41%	5,10%	3,87%	4,42%

Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2026
Pengadaan Listrik dan Gas	0,54%	3,09%	5,10%	12,61%	6,18%	3,94%
Air, Sampah, Limbah, Daur Ulang	2,43%	6,49%	3,61%	3,89%	0,96%	1,61%
Konstruksi	-2,68%	4,29%	5,64%	7,85%	7,99%	4,21%
Perdagangan; Reparasi Kendaraan	-4,20%	4,07%	2,62%	5,05%	6,62%	5,85%
Transportasi dan Pergudangan	-29,18%	3,23%	74,83%	7,61%	3,74%	3,68%
Akomodasi dan Makan Minum	-5,45%	4,54%	11,45%	12,06%	9,74%	8,53%
Informasi dan Komunikasi	14,96%	6,87%	2,37%	10,02%	9,94%	7,86%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32%	1,76%	0,95%	2,02%	0,83%	2,74%
Real Estat	-0,73%	2,08%	3,97%	6,09%	4,95%	3,34%
Jasa Perusahaan	-6,69%	2,36%	5,25%	6,25%	9,66%	3,85%
Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	-0,91%	-0,10%	1,64%	2,91%	7,31%	4,32%
Jasa Pendidikan	-0,42%	0,72%	4,34%	5,21%	6,42%	4,60%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,02%	1,78%	1,29%	4,34%	5,37%	3,78%
Jasa lainnya	-5,02%	0,63%	6,06%	4,80%	5,67%	3,38%
Produk Domestik Regional Bruto	-1,48%	3,71%	5,13%	4,93%	5,07%	4,76%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Keterangan: data ter-highlight adalah sektor dengan pertumbuhan tertinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pasca-covid menunjukkan tren stabil dengan tingkat pertumbuhan sekitar 5% pertahun, dan diperkirakan tumbuh sekitar 4,76% pada tahun 2026. Jika dilihat lebih detail, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan tumbuh relatif stagnan pasca-covid. Sementara, sektor dengan pertumbuhan paling progresif adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan; Jasa Pendidikan; Industri Pengolahan; Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos; serta Konstruksi. Sebagian besar sektor tersebut adalah sektor sekunder dan tersier, yang mengkonfirmasi terjadinya transformasi struktural di Kabupaten Tegal. Di sisi lain, sektor dominan di Kabupaten Tegal (Industri Pengolahan; Perdagangan dan Reparasi Kendaraan) tumbuh stabil, dengan sektor Perdagangan menjadi salahsatu sektor yang tumbuh dengan sangat baik.

Selanjutnya, jika dilihat dari data PDRB berdasarkan pengeluaran, dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Tegal didominasi oleh aktivitas konsumsi masyarakat, seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Tegal Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2020-2024 dan Proyeksi Tahun 2026

Kategori Pengeluaran	PDRB Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2026
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	82,70%	81,32%	81,53%	81,57%	82,04%	80,62%
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,47%	1,46%	1,51%	1,54%	1,72%	1,73%
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,55%	6,41%	5,92%	5,73%	5,53%	5,54%
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,49%	24,21%	23,48%	22,81%	23,07%	23,73%
5. Perubahan Inventori	0,79%	0,74%	0,88%	0,89%	0,31%	0,11%
6. Net Ekspor Barang Jasa	-15,00%	-14,14%	-13,32%	-12,54%	-12,66%	-11,72%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi menyumbangkan lebih dari 80% perekonomian Kabupaten Tegal, dengan proyeksi pada tahun 2026 masih relatif sama, walaupun tren-nya menunjukkan angka yang menurun. Situasi ini menunjukkan hal yang bagus, dimana ekonomi wilayah mulai berkurang ketergantungannya pada konsumsi. Hal yang perlu dilakukan adalah percepatan pengurangan kontribusi konsumsi, karena idealnya ekonomi juga lebih baik ketika ditopang oleh investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Pada dasarnya, perekonomian yang terlalu bergantung pada konsumsi relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen).

Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Investasi di Kabupaten Tegal menyumbangkan proporsi yang stabil, yaitu sekitar 23%, dan diperkirakan pada tahun 2026 juga relatif sama. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah, agar proporsi investasi yang masuk semakin bertambah. Terakhir, net ekspor Kabupaten Tegal tercatat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Tegal masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari meng"impor" barang dan jasa dari daerah lain. Menyikapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu untuk melakukan hilirisasi pertanian dan mendorong pengembangan industri pengolahan agar produksi internal wilayah dapat meningkat dan memberikan nilai tambah. Selain itu, hilirisasi dan pengembangan industri juga akan dapat meningkatkan proporsi investasi di Kabupaten Tegal.

Dari penjelasan tentang situasi ekonomi makro daerah di atas, maka target indikator ekonomi makro Kabupaten Tegal ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Tegal

Indikator	Realisasi 2024	Target	
		2025	2026
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,07	5,67	5,75
Share net ekspor dalam PDRB (%)	-12,66	-12,05	-11,72
Inflasi (%)	2,19	2,5±1	2,5±1
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	28.493.737	30.046.445	31.591.372
Nilai investasi PMA (milyar rupiah)	1.533,06	1.973,48	1.998,63
Nilai investasi PMDN (milyar rupiah)	1.257,48	1.789,42	1.808,37
Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,53	7,34	7,12
Angka kemiskinan (%)	6,81	6,63	6,42

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.2 Isu Strategis yang Berkaitan dengan Situasi Ekonomi Makro Daerah

Guna mencapai target indikator ekonomi di atas, perlu dilakukan identifikasi isu strategis ekonomi makro daerah yang berfungsi sebagai dasar pijakan perencanaan pembangunan. Isu strategis ekonomi makro Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sektor yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Tegal, ditinjau dari kontribusinya, adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Selain itu, sektor jasa (termasuk di dalamnya pariwisata dan informasi) tumbuh dengan pesat. Tren kontribusi sektoral PDRB menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal sedang mengalami transformasi struktural dari daerah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang mengalami perkembangan. Untuk itu, kawasan perdesaan di Kabupaten Tegal juga perlu diperhatikan, karena tekanan besar pembangunan akan menyasar pada kawasan perdesaan untuk mewujudkan melubernya pertumbuhan fisik kawasan.

2. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah memiliki keterkaitan erat dengan iklim berusaha, stabilitas ekonomi makro, dan kapabilitas inovasi. Iklim berusaha yang kondusif sangat bergantung pada daya saing daerah, yang mencakup penerimaan masyarakat terhadap investasi, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Daya saing daerah juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi makro yang mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan fiskal. Selanjutnya, daya saing daerah juga berkaitan erat dengan kapabilitas inovasi. Melalui riset dan pengembangan, daerah dapat menghasilkan inovasi yang relevan dan berdampak, yang akan memungkinkan terciptanya produk dan layanan berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.

3. Lapangan Pekerjaan yang Luas

Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas berkaitan erat dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT), produktivitas pekerja, infrastruktur, kebijakan

pemerintah, pengembangan wirausaha, dan kesejahteraan pekerja. TPT hingga saat ini masih menjadi masalah besar yang dihadapi oleh Kabupaten Tegal; dan di tahun 2023 TPT Kabupaten Tegal berada pada urutan ke 33 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Walaupun investasi yang masuk (dan membuka lapangan kerja) di Kabupaten Tegal relatif banyak seiring dengan naiknya UMK Jabodetabek dan dibukanya exit tol Adiwerna, namun akselerasi penurunan TPT masih relatif lambat. Di sisi lain, skill pekerja di Kabupaten Tegal juga relatif rendah dibandingkan dengan skill pekerja Jabodetabek. Penciptaan lapangan kerja yang luas juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang memadai, terutama konektivitas, aksesibilitas, dan energi. Infrastruktur yang baik akan memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang serta jasa, sehingga mendukung pertumbuhan industri. Hal terakhir yang terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan adalah wirausaha. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha, angkatan kerja di Kabupaten Tegal akan lebih banyak memiliki pilihan kerja, apakah akan bekerja di sektor formal ataupun mendukung wirausaha (baik sebagai pemilik ataupun pekerja).

4. Kemiskinan

Dalam kurun 5 tahun terakhir capaian angka kemiskinan di Kabupaten Tegal selalu lebih baik dibandingkan capaian Provinsi maupun Nasional. Meskipun begitu jika dilihat dari kacamata lokal jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Tegal tahun 2023 masih cukup banyak mencapai 105.030 jiwa dan Sebagian besar berada di Kecamatan Balapulang, Bumijawa, Pangkah, Margasari, dan Tarub. Untuk itu prioritas penanggulangan kemiskinan secara kewilayahan perlu menekankan pada 5 kecamatan tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan yang mengintervensi masyarakat miskin yang meliputi peningkatan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi wilayah kantong kemiskinan serta penanganan kemiskinan ekstrem.

5. Infrastruktur Publik dan Pengembangan Wilayah

Tantangan dalam mewujudkan wilayah yang terkoneksi dengan baik adalah aksesibilitas jalan, sarana transportasi, pemajuan desa tertinggal dan desa berkembang serta disparitas wilayah yang masih tinggi. Selanjutnya, layanan infrastruktur dasar juga perlu untuk lebih ditingkatkan, karena penyediaan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur perekonomian dan infrastruktur digital masih dirasa kurang optimal.

3.1.3 Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dengan berpijak pada isu strategis yang ada dan target indikator ekonomi makro yang sudah ditentukan, kebijakan ekonomi makro Kabupaten Tegal pada tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan berfokus pada sektor dengan kontribusi signifikan dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Menurunkan kemiskinan
Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.
4. Menurunkan angka pengangguran
Hal ini dilaksanakan dengan pelaksanaan pelatihan teknis, link and match tenaga kerja, business matching, mental building untuk pencari kerja, optimalisasi teknologi informasi dalam pengembangan sistem penawaran ketenagakerjaan, mempermudah proses perijinan dalam rangka menarik investasi, advokasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas, dan optimalisasi hubungan industrial.
5. Mewujudkan iklim investasi yang sehat
Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.
6. Menumbuhkan kewirausahaan pemuda
Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.
7. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar guna menunjang perekonomian wilayah
Infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan prasyarat agar ekonomi dapat tumbuh secara optimal, utamanya dalam mendukung kelancaran distribusi. Untuk itu, pembangunan akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan jalan; dengan tidak meninggalkan Upaya pemenuhan standar pelayanan minimal untuk infrastruktur lain seperti drainase, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, energi, dan persampahan.
8. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi lokal (Parwisata, Pertanian, Perdagangan)
Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.
9. Meningkatkan promosi potensi daerah
Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.
10. Mengendalikan inflasi
Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

11. Meningkatkan investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah disusun dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2026 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2026 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal

Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dengan arah kebijakan dalam rangka

pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PAD Tahun 2026 dapat meningkatkan target penerimaan. Adapun arah kebijakan PAD sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
 - d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - g. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.
 - i. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pendapatan opsen pajak daerah;
 - j. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - k. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)
- Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):
- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
 - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin

- 
- dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
 - d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 Proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar Rp3.028.586.747.600,00 yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp742.004.972.600,00;
Target PAD tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dari PAD tahun 2025. Adanya perubahan komponen pada pajak daerah dan retribusi daerah antara lain tambahan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya merupakan pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Provinsi. Selain itu, target retribusi daerah mengalami kenaikan dikarenakan adanya pendapatan BLUD yang semula masuk dalam lain-lain PAD yang sah menjadi target retribusi daerah pada pelayanan Kesehatan. Begitu juga dengan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dari target tahun 2025.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.286.581.775.000,00 dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.129.710.423.000,00 dan pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp156.871.352.000,00.
Alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan jika dibandingkan pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 yang mendasari rincian alokasi TKD tahun 2025 setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp39.442.862.000,00;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.269.645.138.000,00;
 - c. DAK terpasang sebesar Rp510.436.651.000,00 yang terdiri dari DAK Non Fisik sebesar Rp510.436.651.000 sedangkan DAK Fisik dalam RKPD Tahun 2026 belum dialokasikan; dan
 - d. Dana Desa sebesar Rp310.185.772.000,00.



Pendapatan transfer antar daerah tahun 2026 diproyeksikan hanya bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp156.871.352.000,00. Proyeksi tersebut sama dengan alokasi tahun 2025. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi tidak tercantum dalam proyeksi pendapatan tahun 2026 dikarenakan belum jelasnya program dan alokasi dari Pemerintah Provinsi.

3. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2026 tidak tercantum dikarenakan mulai tahun 2025 tidak mendapatkan alokasi pendapatan hibah air minum berbasis kinerja seperti tahun sebelumnya.

Adapun kinerja keuangan dari sektor pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal APBD tahun 2023 dan 2024 serta APBD tahun 2025 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2025 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2026 - 2027

No	Uraian	Tahun				
		R 2023	R 2024	APBD 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
1	PENDAPATAN	2.812.588.545.848,44	2.992.635.231.435,47	2.879.683.239.000	3.028.586.747.600	3.104.728.076.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.338.257.851,44	601.770.176.129,47	706.445.652.000	742.004.972.600	771.993.541.000
1.1.1	Pajak Daerah	193.217.970.934	208.049.338.295	370.066.609.000	364.441.592.000	382.663.672.000
1.1.2	Retribusi Daerah	31.469.473.639	355.466.664.052,47	309.707.181.000	352.395.276.600	362.903.359.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.927.282.193	19.597.159.894	17.530.000.000	19.161.104.000	20.119.160.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	311.723.531.085,44	18.657.013.888	9.141.862.000	6.007.000.000	6.307.350.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.249.792.292.997	2.387.793.407.306	2.173.237.587.000	2.286.581.775.000	2.332.734.535.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.017.836.678.026	2.138.296.363.120	2.022.277.997.000	2.129.710.423.000	2.182.796.335.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.038.115.356	38.009.124.000	32.546.001.000	39.442.862.000	39.837.291.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.146.028.561.807	1.235.995.119.000	1.202.998.957.000	1.269.645.138.000	1.272.241.590.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	518.975.056.263	535.122.192.120	478.297.078.000	510.436.651.000	554.327.966.000
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	5.841.384.000	12.930.103.000	0	0	0
1.2.1.5	Dana Desa	307.953.560.600	316.239.825.000	308.435.961.000	310.185.772.000	316.389.488.000
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	231.955.614.971	249.497.044.186	150.959.590.000	156.871.352.000	149.938.200.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	221.534.261.871	226.314.945.686	150.959.590.000	156.871.352.000	149.938.200.000
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.421.353.100	23.182.098.500	0	0	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.457.995.000	3.071.648.000	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.457.995.0000	3.071.648.000	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Proporsi realisasi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Sedangkan pada PAD realisasi cenderung mengalami kenaikan karena adanya perubahan nomenklatur PAD. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang di rinci dalam TKD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah sekaligus mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik. Proporsi pendapatan transfer dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2027 masih diatas angka 70%. Dengan besarnya alokasi tersebut, diharapkan ketimpangan antardaerah dalam hal ketimpangan fiskal dan ketimpangan pelayanan dapat teratasi sekaligus mendorong tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif dan disiplin kepada masyarakat.

**Tabel 3.5 Proporsi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2023 – 2027**

No	Uraian	R.2023 (%)	R 2024 (%)	APBD 2025 (%)	Proyeksi Tahun 2026 (%)	Proyeksi Tahun 2027 (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	19,67	20,10	24,53	24,50	24,87
2	Pendapatan Transfer	79,99	79,80	75,47	75,50	75,13
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,34	0,10	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,44%, dan 4,02% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 28,04%.

**Tabel 3.6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2.743.700.525.563	2.812.588.545.848,44	2.992.635.231.435,47	4,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	531.150.278.017	553.338.257.851,44	601.770.176.129,47	6,44
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	173.244.165.906	193.217.970.934	208.049.338.295	9,59
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.253.704.944	31.469.473.639	355.466.664.052,47	261,15
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.815.509.083	16.927.282.193	19.597.159.894	7,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	313.836.898.084	311.723.531.085,44	18.657.013.888	(75,62)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.206.619.044.546	2.249.792.292.997	2.387.793.407.306	4,02
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.625.199.145.190	2.017.836.678.026	2.138.296.363.120	14,70
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.882.244.174	39.038.115.356	38.009.124.000	(2,38)
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.072.103.946.393	1.146.028.561.807	1.2035.995.119.000	7,37
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	513.212.954.623	518.975.056.263	535.122.192.120	2,11
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	5.841.384.000	12.930.103.000	0
1.2.1.5	Dana Desa	359.312.887.800	307.953.560.600	316.239.825.000	(6,19)

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	222.107.011.556	231.955.614.971	249.497.044.186	5,99
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	211.566.275.761	221.534.261.871	226.314.945.686	3,43
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10.540.735.795	10.421.353.100	23.182.098.500	48,30
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.931.203.000	9.457.995.000	3.071.648.000	(28,04)
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.931.203.000	9.457.995.000	3.071.648.000	(28,04)
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan	0	0	0	0

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Struktur belanja daerah tahun 2026 pada RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Struktur belanja daerah tahun 2026 terdiri dari:

- Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan abarang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, dianggarkan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa, pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan, pembiayaan program-program prioritas bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja barang jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akutabilitas.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2026 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah.
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Perumahan dan Permukiman.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.
4. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
6. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
7. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi infrastruktur dan fungsi pengawasan (APIP). Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap

memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;

9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2026 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Dalam menyusun kebutuhan belanja pada RKPD tahun 2026 telah mempedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Instruksi Bupati Tegal Nomor 100.3.4/139-1/1-25 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100.3.4/188-1/25 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025. Dimana pada beberapa belanja diprogram penunjang maupun program non penunjang dilakukan efisiensi untuk dialihkan pada program prioritas baik nasional maupun daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2026 telah mengakomodir belanja pada perangkat daerah yang bersifat rutin dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan belanja program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Adapun belanja daerah pada RKPD Tahun 2026 mencakup:

1. Pagu anggaran perangkat daerah telah dihitung untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah telah menghitung alokasi gaji Kepala Daerah, gaji DPRD dan gaji ASN. Untuk kegiatan rutin seperti jasa untuk tenaga harian/outsourcing, operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan ataupun lapangan, jasa listrik, air, serta BPJS untuk tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap dan dibayarkan selama satu tahun anggaran.
2. Pagu anggaran untuk program lainnya yang telah dialokasikan untuk setiap perangkat daerah baik yang bersifat mandatory maupun prioritas pembangunan. Dimana tahun 2026 salah satu prioritas pembangunan pada infrastruktur dasar dalam hal ini peningkatan infrastruktur jalan.
3. Pagu anggaran untuk mengakomodir kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Usulan Masyarakat Langsung.
4. Pagu anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi.

Belanja daerah Kabupaten Tegal tahun 2026 pada RKPD diproyeksikan sebesar Rp3.143.586.747.600,00 dengan proporsi belanja operasi paling besar. Alokasi belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai yang terdiri dari alokasi gaji KDH, DPRD dan ASN sebesar Rp1.266.483.795.152,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp937.351.196.093,00, belanja modal sebesar Rp299.172.023.855,00 dan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00.



Belanja daerah pada RKPD tahun 2026 telah dilakukan efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target dan indikator kinerja perangkat daerah dan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja rutin yang wajib dianggarkan selama satu tahun anggaran serta mengakomodir belanja prioritas tahun 2026. Belanja pegawai tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan skema pembayaran tunjangan penghasilan bagi ASN.

Kinerja keuangan dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan APBD tahun 2025 serta proyeksi belanja daerah tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027

NO	URAIAN	Tahun				
		R. 2023	R. 2024	APBD 2025	Proyeksi/Target 2026	Proyeksi/Target 2027
2	BELANJA	2.845.915.030.703	3.091.455.662.213,80	3.080.300.038.200	3.143.586.747.600	3.167.228.076.000
2.1	BELANJA OPERASI	1.987.002.149.754	2.228.380.487.328,80	2.261.622.487.612	2.334.590.098.745	2.125.209.531.000
2.1.1	Belanja Pegawai	1.024.291.899.517	1.165.882.185.148	1.248.330.340.753	1.266.483.795.152	1.252.638.908.500
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	858.043.557.237	902.845.841.346,80	918.732.491.359	937.351.196.093	997.972.110.040
2.1.3	Belanja Hibah	103.035.193.000	130.417.060.834	72.279.255.500	87.257.595.500	50.706.485.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.163.500.000	29.235.400.000	22.280.400.000	43.497.512.000	13.500.000.000
2.2	BELANJA MODAL	358.320.634.457	364.288.585.185	312.820.309.788	299.172.023.855	343.063.338.855
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	433.019.605	1.706.027.596	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	500.159.226.887	497.080.562.104	495.857.240.800	499.824.625.000	495.776.612.100
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	18.187.210.287	23.589.737.104	40.192.149.300	39.459.958.000	41.679.236.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	481.972.016.600	473.490.825.000	455.665.091.500	460.364.667.000	454.097.376.100

Sumber: Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

**Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024(%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	Belanja	2.722.064.917.511	2.845.915.030.703	3.091.455.662.213,80	6,57
2.1	Belanja Operasi	1.893.724.406.872	1.987.002.149.754	2.228.380.487.328,80	8,48
2.2	Belanja Modal	313.682.560.331	358.320.634.457	364.228.585.185	7,77
2.3	Belanja Tidak Terduga	521.274.034	433.019.605	1.706.027.596	80,91
2.4	Belanja Transfer	514.136.676.274	500.159.226.887	497.080.562.104	(1,67)

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Secara umum, belanja pada RKPD Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp3.143.586.747.600,00 berbeda dengan proyeksi belanja pada dokumen Rancangan AKhir RPJMD Tahun 2025-2029 dikarenakan belanja yang bersumber dari DAK Fisik tidak dialokasikan pada RKPD Tahun 2026. Disamping belanja, pengeluaran pembiayaan termasuk dalam komponen pengeluaran daerah. Pengeluaran pembiayaan tahun 2026 terdiri dari penyertaan modal pada BUMD dan Pemberian Pinjaman Daerah.

**Tabel 3.9 Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2026**

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2026	Proyeksi RKPD Tahun 2026	Selisih(Tambah/ Kurang)
A	Belanja	3.181.989.666.600	3.143.586.747.600	(38.402.919.000)
	BELANJA OPERASI	2.334.590.098.745	2.334.590.098.745	0
	Belanja Pegawai	1.266.483.795.152	1.266.483.795.152	0
	Belanja Barang dan Jasa	937.351.196.093	937.351.196.093	0
	Belanja Hibah	87.257.595.500	87.257.595.500	0
	Belanja Bantuan Sosial	43.497.512.000	43.497.512.000	0
	BELANJA MODAL	337.574.942.855	299.172.023.855	(38.402.919.000)
	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	BELANJA TRANSFER	499.824.625.000	499.824.625.000	0
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	39.459.958.000	39.459.958.000	0
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	460.364.667.000	460.364.667.000	0
B	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	6.000.000.000	0
	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2026 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA PT BPR Bank Tegal.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026 adalah:

1. Penyertaan modal PT Bank Jawa Tengah dan PT BPR Bank Tegal sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Jawa Tengah dan BUMD
2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT BPR Bank Tegal untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat.

Selain penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kinerja keuangan dari sektor pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dan APBD tahun 2025 serta proyeksi pembiayaan tahun 2026 dan tahun 2027 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2027

NO	URAIAN					
		R. 2023	R. 2024	APBD 2025	Proyeksi/Target 2026	Proyeksi/Target 2027
3	PEMBIAYAAN DAERAH	269.458.460.889,52	266.541.022.597	200.616.799.200	115.000.000.000	62.500.000.000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	307.458.460.889,52	272.541.022.597	214.116.799.200	121.000.000.000	111.000.000.000
3.1.1	Penggunaan SILPA	281.204.116.830,52	236.131.976.034	212.616.799.200	120.000.000.000	110.000.000.000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	26.200.000.000	33.800.000.000	0	0	0
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	54.344.059	2.609.046.563	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.1.4	Penerimaan Kembali Piutang	0	0	0	0	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.000.000.000	6.000.000.000	13.500.000.000	6.000.000.000	48.500.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	0	0	0	40.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000	5.000.000.000	12.500.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.2.4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	269.458.460.889,52	266.541.022.597	200.616.799.200	115.00.000.000	62.500.000.000

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan terkait belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, sedangkan belanja hibah ataupun belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Tabel 3.11 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersifat Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2026
1.	BELANJA OPERASI	1.397.238.902.652
1.1	Belanja Pegawai	1.266.483.795.152
1.2	Belanja Hibah	87.257.595.500
1.3	Belanja Bantuan Sosial	43.497.512.000
2.	BELANJA TRANSFER	499.824.625.000
2.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	39.459.958.000
2.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	460.364.667.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000
4.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000
4.2	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA BELANJA (1+2+3+4)		1.913.063.527.652

Sumber : Bappedalitbang dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

Selanjutnya berdasarkan dari proyeksi penerimaan daerah dan perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat maka dapat ditentukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	Proyeksi Tahun 2026
1	PENERIMAAN DAERAH	3.149.586.747.600
1.1	PENDAPATAN DAERAH	3.028.586.747.600
1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	742.004.972.600
1.1.2	Pendapatan Transfer	2.286.581.775.000
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0
1.2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.000.000.000
1.2.1	SiLPA	120.000.000.000
1.2.2	Pencairan Dana Cadangan	0
1.2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
2	BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.913.063.527.652
2.1	Belanja Operasi	1.397.238.902.652
2.2	Belanja Transfer	499.824.625.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
2.4	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH (1-2)	1.236.523.219.948

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Berdasarkan perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah tahun 2026 sebesar Rp.1.236.523.219.948,00 selanjutnya akan dialokasikan untuk membiayai Belanja Perangkat Daerah dalam RKPD tahun 2026 dengan prioritas I sampai dengan prioritas II.

Tabel 3.14 Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2026
1	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I	
1.1	Belanja Pemenuhan Visi dan Misi KD dan Program PrioritasDiluar Belanja Mengikat dan Prioritas Utama	927.392.414.961
2	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II	
2.1	Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya	309.130.804.987
	Kapasitas Riil Keuangan Daerah (1+2)	1.236.523.219.948

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka disusun sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan bersifat strategis yang dilaksanakan pada tahun berkenaan sebagai satu kesatuan tahapan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan pada tahun berkenaan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam suatu rangkaian kebijakan jangka menengah.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dengan juga memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah. Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dalam mencapai visi dan misi Kepala daerah melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mepedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis RKPD Provinsi Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dan Prioritas Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2026;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2026 di Kabupaten Tegal; serta
4. Pengembangan sektor atau bidang potensial yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1.1. Visi

Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 terdapat Visi Misi bupati dan wakil bupati tegal yang diinternalisasi menjadi visi misi Pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah :

“Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh”

Arti Visi :

Maju : Kondisi Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang **Inovatif, Adil dan Inklusif**. Inovasi adalah diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan terus berinovasi secara aktif mendorong, mendukung dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Sedangkan adil adalah menjadikan Kabupaten Tegal mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama serta menjadi inklusif dengan melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi.

Tangguh : Tangguh dalam pembangunan yang dimaksud adalah **Berketahanan, Konsisten, Berintegras, Religius Dan Berbudaya**. Berketahanan yaitu Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai risiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau masalah-masalah lain yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah. Konsisten adalah terus tetap bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan melewati tantangan-tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat.

Berintegritas yaitu berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan kejujuran. Religius dimana Kabupaten Tegal

berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. Serta Berbudaya yaitu memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya.

4.1.2. Misi

Misi adalah bagian dari visi dan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Misi Kabupaten Tegal tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas

Misi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, aman, dan berstandar tinggi, diharapkan tercipta konektivitas yang lebih baik antarwilayah, aksesibilitas layanan publik yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Misi ini juga mencakup pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, serta penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman

2. Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal

Misi ini bertujuan untuk membangun struktur perekonomian yang kuat, berkeadilan, dan mandiri dengan memanfaatkan secara optimal potensi lokal. Melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Selain itu, misi ini juga berfokus pada penciptaan peluang kerja baru dan pemberdayaan ekonomi lokal, guna mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perekonomian yang dihasilkan tidak

hanya tangguh menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan dilakukan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misi ini berfokus pada terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tangguh menghadapi bencana juga menjadi prioritas, guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta faktor kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mendorong produktivitas dan profesionalisme, serta adanya kesehatan dan perekonomian yang baik diharapkan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, etika, dan moral dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkarakter. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, serta pembangunan sosial yang inklusif, misi ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu dan komunitas. Ketahanan sosial diwujudkan melalui peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, ketahanan budaya difokuskan pada



pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai identitas dan aset bangsa. Penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta membangun karakter keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

6. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif

Misi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, bersih, dan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, misi ini mengedepankan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sementara kecepatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode pembangunan daerah. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Mendasari pada RPJMD tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah **Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemiskinan.

B. Sasaran

Sasaran untuk mencapai tujuan dalam RPJMD 2025 -2029 adalah sejumlah 10 sasaran dengan indikator kinerja sejumlah 14 indikator, dengan penjelasan rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur Dan Sarana Prasarana Berkualitas

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing.

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja :

- a. laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
- b. laju PDRB sektor industri pengolahan
- c. laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
- d. laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

3. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran

Sasaran ini diukur dengan indikator presentase tingkat pengangguran terbuka

4. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Sasaran ini diukur dengan indikator kualitas lingkungan hidup dan indeks risiko bencana

5. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan

6. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan

Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja persentase pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

7. Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas.

Sasaran ini dapat diukur dengan indikator indeks Pembangunan keluarga.

8. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama

Sasaran ini dapat diukur dengan indikator indeks kerukunan umat beragama.

9. Terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan

Sasaran ini diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Berikut ini tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029

Visi : Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	REALISASI 2024	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)
Visi: Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh	Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	5,07	5,0-5,60	5,62-6,42	6,10-7,10	6,50-7,50	6,90-7,90	7,30-8,10	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin; Tahunan	71,7	71,78	72,06	72,34	72,62	72,90	73,18	
			Tingkat Kemiskinan	Persen; Tahunan	6,81	6,70-6,40	6,60-6,30	6,50-6,20	6,45-6,10	6,41-6,00	6,41-6,00	
Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Persen; Kumulatif	60,97	61,81	64,29	66,78	69,10	71,41	71,64	
Misi 2: Mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen; Tahunan	0,29	0,35	0,84	1,23	1,89	1,95	2,01	
			Laju PDRB sektor industri pengolahan	Persen; tahunan	3,87	3,95	4,12	4,23	4,35	4,45	4,55	
			Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Persen; Tahunan	5,21	5,25	5,43	5,61	5,73	5,86	5,98	
			Laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	Persen; Tahunan	9,73	5,8	6,16	6,56	7,02	7,55	7,97	
		Menurunkan Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	7,53	7,52-7,22	7,41-7,11	7,13-6,82	6,92-6,62	6,72-6,42	6,88-6,42	
Misi 3: Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup		Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen; Tahunan	61,94	75,43	75,48	75,53	75,58	75,65	75,65	
			Indeks Risiko Bencana	Poin; Tahunan	113,79	110,38	107,07	103,85	100,74	97,72	94,78	
Misi 4:			Indeks Pendidikan	Poin; Tahunan	0,611	0,611	0,612	0,613	0,614	0,615	0,616	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	REALISASI 2024	TARGET						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Kesehatan	Poin; Tahunan	0,835	0,836	0,838	0,840	0,842	0,844	0,846	
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga		Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persen; Tahunan	83,93	84,03	84,44	84,81	85,11	85,54	85,97	
		Meningkatkan pembangunan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Persen; Tahunan	62,74	64,23	64,63	64,93	66,33	67,33	68,1	
		Meningkatkan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin;Tahunan	83,69	83,2	83,66	84,12	84,58	85,05	85,53	
Misi 6: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif		Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin; Tahunan	83,06	84,56	86,06	87,56	89,06	90,56	92,06	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

4.1.4. Program Unggulan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029

Mendasari dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029, Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur yang merata, dengan aktivitas :
 - a. Penanganan Jalan Bebas Lubang (Sah Lapor Sah Alus)
 - b. Penerangan Jalan Umum
 - c. Penataan Kota Slawi dan Pembangunan Saranan Prasarana Publik
2. Penanganan rumah tidak layak huni warga miskin, dengan aktivitas :
Pelaksanaan Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Layak Huni
3. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi, pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas, serta bantuan bagi petani dan nelayan, dengan aktivitas :
 - a. Pembangunan Jaringan irigasi
 - b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
 - c. Hilirisasi Produk Pertanian Tegal
 - d. Bantuan Beras Paceklik untuk Nelayan
 - e. BPJS Tenaga Kerja Rentan bagi Nelayan dan Tenaga Kerja Rentan Lainnya
 - f. Asuransi Pertanian
 - g. Pupuk Hayati
4. Penumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal, diantaranya industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, dengan aktivitas:
 - a. Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
 - b. Revitalisasi pasar rakyat
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata dan wisata berbasis aktivitas (perbaikan infrastruktur dan *medical/wellness*)
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pemajuan wirausaha serta *Link and match* tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan, dengan aktivitas :
 - a. Wirausaha Pemuda
 - b. Program Layanan Pengembangan Usaha (PLPU)

- 
- c. Bursa Kerja
 - d. Pelatihan Link and Match untuk Pencari Kerja
 - e. Revitalisasi BLK
 - f. Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa)
6. Konservasi lingkungan hidup, khususnya daerah resapan air, dan pengelolaan sampah yang terpadu dengan aktivitas :
 - a. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sampah secara Terpadu
 7. Peningkatan kualitas masyarakat dengan penguatan pendidikan dan keterampilan, dengan aktivitas :
 - a. Penyediaan sarana prasarana pendidikan
 - b. Beasiswa Miskin (Kartu Cerdas)
 - c. Literasi Numerasi
 8. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan aktivitas :
 - a. Cek Kesehatan Gratis
 - b. Pemberian Makanan Tambahan untuk Cegah Stunting
 - c. Sosialisasi PHBS
 - d. Sosialisasi Napza
 - e. Integrasi Layanan Primer
 9. Adanya Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Keluarga Miskin dengan aktivitas :
 - a. Bantuan Sosial bagi Masyarakat
 - b. Satu Desa Satu Sarjana
 10. Pemajuan desa bangga budaya dengan aktivitas :
 - a. Pelestarian, Pembinaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - b. Desa Bangga Budaya
 11. Digitalisasi layanan publik pemerintahan dengan aktivitas :
 - a. Pengembangan Layanan Publik TIK (hardware dan software)
 - b. Diseminasi program-program pembangunan pemerintahan

12. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan aktivitas :

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Database Riset dan Inovasi
- b. Pembentukan dan/atau Aktivasi Program Forum Kolaborasi Riset dan Inovasi sebagai Enabler Kebijakan Berbasis Bukti
- c. Peningkatan Produksi dan Kolaborasi Riset/Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah dan Isu Strategis
- d. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi
- e. Perluasan Fasilitas HKI yang mendorong Ekonomi Lokal

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2026

Arah Pembangunan nasional tahun 2026 berdasarkan pada RPJMN tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Sasaran utama dalam prioritas nasional ini adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Sedangkan indikator sasaran adalah indeks demokrasi Indonesia, dan indeks HAM. Sedangkan arah kebijakan adalah :

- a. penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
- b. penguatan komunikasi publik dan media
- c. penguatan lembaga demokrasi
- d. pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan HAM

2. Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.

Sasaran utama pada prioritas nasional 2 adalah :

- a. terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator Asia Power Index (military capability), Asia Power Index (diplomatic

influence), proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, global cybersecurity index, indeks keamanan laut nasional.

- b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus) dengan indikator indeks ketahanan pangan, pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)
- c. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi, dan air (FEW Nexus)
- d. Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan dengan indikator Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat), Indonesia Blue Economy Index (IBEI), Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)
- e. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan indikator dengan indikator Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS), Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%), Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%), Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sedangkan arah kebijakan adalah Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan

3. Prioritas Nasional 3

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Sasaran utama pada prioritas nasional 3 adalah:

- a. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan indikator Stok Infrastruktur terhadap PDB,

- b. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB dengan indikator Total Aset Sektor Keuangan/PDB, Aset Perbankan/PDB (%), Aset Dana Pensiun/PDB (%), Aset Asuransi/PDB (%), Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%), Total Kredit/PDB (%), Inklusi Keuangan (%)
- c. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas dengan indikator Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%), Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%), proporsi jumlah usaha kecil dan menengah, dan rasio kewirausahaan
- d. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dengan indikator Rasio PDB Pariwisata (%), Devisa Pariwisata (miliar USD)
- e. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif dengan indikator Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

Sedangkan arah kebijakan pada prioritas nasional ini adalah :

- a. Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
 - b. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan.
 - c. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi.
 - d. Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
 - e. Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
4. Prioritas Nasional 4
- Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas.** Sasaran utama pada prioritas nasional 4 adalah :
- a. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah, rata-rata nilai PISA, rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi

- membaca numerasi, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi (%), proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%), dan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
- b. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua dengan indikator usia harapan hidup (UHH), angka kelahiran total (total fertility) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun), angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup); Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%); Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk); dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
 - c. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Ketimpangan Gender; Indeks Pembangunan Gender; Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%); Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)
 - d. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Peringkat Indeks Inovasi Global, Tingkat Pengangguran Terbuka (%), Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
 - e. Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat dengan indikator Peringkat pada Asian Games, Peringkat pada Asian Para Games, Peringkat pada ASEAN Para Games.

Sedangkan arah kebijakan yang dilaksanakan adalah

- a. Pendidikan Berkualitas yang Merata
- b. Kesehatan untuk Semua
- c. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- d. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
- e. Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

5. Prioritas Nasional 5

Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Sasaran utama pada prioritas nasional 5 adalah :

- a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan dengan indikator rasio PDRB industri pengolahan (%)
- b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan indikator biaya logistik (%PDB), pembentukan modal tetap bruto (%PDB), dan ekspor barang dan jasa (% PDB)

Arah kebijakan pada prioritas ini adalah

- a. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
- c. Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

6. Prioritas Nasional 6

Membangun Dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Pada prioritas ini memiliki sasaran utama yaitu :

- a. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan dengan indikator Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%), Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%), Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%), dan Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)
- b. Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
- c. Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan indikator Persentase Desa Mandiri (%)
- d. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional.

Sedangkan arah kebijakan pada prioritas ini adalah :

- a. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan
- b. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

- c. Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah
- d. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

7. Prioritas Nasional 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. Sasaran utama dalam prioritas nasional ke 7 adalah :

- a. Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional dengan indikator indeks pembangunan hukum, indeks persepsi korupsi, dan indeks integritas partai politik
- b. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, dan Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
- c. Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba dengan indikator Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)
- d. Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan dengan indikator Return on Asset (RoA) BUMN
- e. Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan dengan indikator Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB dan Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)
- f. Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan indikator tingkat inflasi

Sedangkan arah kebijakan dalam prioritas nasional ke tujuh ini adalah :

- a. Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak, serta Sistem Politik yang Fungsional
- b. Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani
- c. Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba
- d. Tata Kelola BUMN yang Baik

- e. Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal
- f. Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil

8. Prioritas Nasional 8

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur. Sasaran utama dalam prioritas nasional ke 8 ini adalah :

- a. Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
- b. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim dengan indikator proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Sedangkan arah kebijakan dalam prioritas nasional ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju akan dilaksanakan melalui penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat serta pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa
- b. Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim akan dilaksanakan melalui pembangunan berketahanan iklim serta pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

Tema RKP Nasional pada ketahun 2026 adalah “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif**”. Pada tahun ini terdapat 5 direktif presiden yaitu : pengelolaan sampah, sekolah rakyat, digitalisasi pendidikan, percepatan pengentasan kemiskinan dan koperasi desa/kelurahan merah putih. Sedangkan RKP tahun 2026 diarahkan untuk :

A. Swasembada pangan, energi dan air

Swasembada pangan diarahkan salah satunya pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional (food estate) dan pangan akuatik serta optimalisasi BULOG, sedangkan swasembada energi

diarahkan untuk melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dari hulu ke hilir, selain itu juga dalam swasembada pangan, energi dan air ini juga diarahkan untuk pengelolaan sampah.

B. Menciptakan ekonomi yang Produktif dan Inklusif:

Arah pembangunan kedua pada RKP tahun 2026 adalah menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Fokus pada arah pembangunan ini adalah mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

- a. Pendidikan dan Kesehatan: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, dan percepatan pembangunan rumah sakit daerah, serta digitalisasi pendidikan.
- b. Deregulasi dan Kepastian Hukum: Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik investasi.
- c. Pertahanan Semesta: Memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.
- d. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong hilirisasi sumber daya alam dan adopsi teknologi serta inovasi.
- e. Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Melalui berbagai program, termasuk penyediaan rumah layak huni dan pemberdayaan koperasi.
- f. Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi: Menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal negara.

Sedangkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026:

A. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan :

- Laju pertumbuhan ekonomi: 5,80% - 6,30%.
- Penurunan intensitas emisi GRK (%) : 37,14
- PDRB per Kapita (juta): Rp 5.870 GNI per kapita (US\$)
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) : 76,67

B. Penurunan kemiskinan

- Tingkat kemiskinan (%): 6,5% - 7,5%.

- Rasio gini (indeks) : 0,377 - 0,380
- Tingkat pengangguran terbuka (%): 4,44% - 4,96%.
- Kemiskinan Ekstrem (%) : 0,0 – 0,50

C. Sumber Daya Manusia Berkualitas

- Indeks modal manusia (indeks): 0,57.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 memiliki tema **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”**.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut meliputi :

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Tahun 2026 juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”**. Penjabaran prioritas daerah Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis**, difokuskan pada :
 - a. pelayanan publik yang merata dan inklusif
 - b. penguatan kualitas perencanaan berbasis Satu Data Indonesia, berorientasi kinerja, serta berbasis risiko dan riset;

- c. penguatan meritokrasi melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
- d. penguatan pengembangan kompetensi dan integritas melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
- e. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal akan menjadi prioritas serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi serta peningkatan kapabilitas APIP;
- f. pelaksanaan analisis evaluasi produk hukum yang diimplementasikan pada penyusunan kebijakan daerah, pengawasan produk hukum serta penguatan jaringan dokumentasi informasi hukum;
- g. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
- h. kelembagaan pangan efektif;
- i. pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
- j. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
- k. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
- l. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
- m. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
- n. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
- o. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas;
- p. penguatan kelembagaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Penguatan landasan perekonomian yang Berdaya Saing, inklusif dan berkelanjutan. Pada prioritas ini berfokus pada :

- a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;

- b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
- c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
- d. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- e. peningkatan produksi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- f. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
- g. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- h. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
- i. peningkatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana;
- k. peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
- l. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
- m. mendorong produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
- n. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
- o. mendorong kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
- p. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan termasuk integrasi kegiatan Posyandu untuk mendukung SPM; serta
- q. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa

3. **Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**, fokus pada prioritas ini adalah:

- a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerja sama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
- b. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun dengan pemerataan akses layanan pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta evaluasi dan pelaksanaan SMK Boarding dan Semi Boarding;

- c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi sarpras pendidikan;
- d. penguatan pendidikan karakter dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan bullying;
- e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perijinan penyelenggaraan pendidikan;
- f. pemerataan akses layanan kesehatan melalui identifikasi perencanaan pengembangan layanan kesehatan lanjutan dan primer;
- g. pengembangan program rekrutmen dan seleksi untuk SDM kesehatan;
- h. pemetaan dan penyempurnaan regulasi dan atau kebijakan daerah;
- i. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
- j. pemetaan dan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan;
- k. pemetaan regulasi terkait tata kelola sumber daya finansial;
- l. pemetaan dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah;
- m. penyediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat;
- n. peningkatan perlindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- o. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
- p. pemetaan kerjasama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
- q. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan; mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan sarpras olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
- r. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar stakeholder; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat;
- s. peningkatan kapasitas SDM perpustakaan; peningkatan sarpras perpustakaan;
- t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip

- u. peningkatan penyadaran, partisipasi dan penguatan kewirausahaan pemuda pada sektor pertanian;
- v. peningkatan pemerataan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
- w. peningkatan pembangunan berbasis gender;
- x. peningkatan ketahanan keluarga;
- y. peningkatan produktivitas tenaga kerja

Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
2. Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00-6,00 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47-4,37 persen;
4. Persentase penduduk miskin sebesar 8,70 – 8,53 persen.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 disusun berdasarkan isu strategis aktual yang kemungkinan terjadi ditahun 2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2026 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 disusun dengan:

1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2025;
8. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2025;
9. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam RPD Kabupaten Tegal 2025-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023;
10. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) Tahun 2016-2030;
12. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur;
13. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
14. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender.

B. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Pada dasarnya RKPD Kabupaten Tegal tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2026 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan RKPD ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
1	Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas (Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, daya saing daerah, lapangan pekerjaan yang luas)	• Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, • Ketahanan pangan yang berkelanjutan

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
2	Infrastuktur Publik Dan Pengembangan Wilayah (konektivitas wilayah, infrastruktur pokok masyarakat, hunian layak, penataan ruang kabupaten tegal, infrastruktur inklusif)	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
3	Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup (pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, degradasi lingkungan hidup, global warming (pemanasan global), berbasis masyarakat)	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana
4	Sumber Daya Manusia yang Produktif (mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, kesejahteraan rakyat, keterampilan dan penguasaan teknologi)	• Penurunan tingkat kemiskinan • Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
5	Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan (keluarga berkualitas, perlindungan perempuan dan anak, ketimpangan gender, pemajuan budaya, wawasan kebangsaan, nilai keagamaan)	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, budaya kerja, profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), digitalisasi pemerintahan, penegakan hukum, ketenteraman dan ketertiban umum)	Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 diarahkan untuk **“Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan guna mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 ditujukan untuk :

- 1) Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
 - b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
 - c. Fasilitasi penyediaan hunian layak
 - d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
 - e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
 - f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
 - g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur
- 2) Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan, fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan produksi pertanian
 - b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
 - c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
 - d. Revitalisasi pasar rakyat
 - e. Pengembangan destinasi wisata
- 3) Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, fokus kebijakan pada :
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
 - b. Penciptaan lapangan kerja baru
 - c. Peningkatan investasi
 - d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah
- 4) Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana, fokus kebijakan pada :

- 
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
 - c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
- 5) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
 - b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
 - c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
 - e. Peningkatan Prestasi Olahraga
- 6) Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal, dengan fokus kebijakan pada:
- a. Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan
 - b. Pemajuan desa bangga budaya
- 7) Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga, fokus kebijakan pada :
- a. Meningkatnya Pemberdayaan Gender
 - b. Menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak
 - c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
 - d. Terkendalinya jumlah penduduk
 - e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
 - f. Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat
- 8) Optimalisasi stabilitas wilayah, fokus kebijakan pada:
- a. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
- 9) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi, dengan fokus kebijakan pada :
- a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
- 

- d. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan
- f. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
- i. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah
- j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
- k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

D. Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029, prioritas sasaran pembangunan daerah adalah :

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas sebesar 64,29 persen
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan indikator kinerja:
 - a. Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sebesar 0,84 persen
 - b. Laju PDRB sektor industri pengolahan sebesar 4,12 persen
 - c. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,43 persen
 - d. Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,16 persen
- 3) Memperluas lapangan kerja dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,51 persen
- 4) Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 75,48 persen dan indeks risiko bencana sebesar 107,07 persen
- 5) Mewujudkan SDM yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 0,612 dan indikator kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0,838 persen
- 6) Menurunkan kemiskinan dengan indikator prosentase penduduk miskin sebesar 6,40 persen
- 7) Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar 84,44 persen

- 8) Meningkatkan pembangunan keluarga berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 64,63 persen
- 9) Meningkatkan kerukunan umat beragama dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 83,66 persen
- 10) Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86,06 persen

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata, terjangkau, dan konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Perluasan akses infrastruktur dasar, dan konektivitas wilayah yang berkualitas pada wilayah pendukung aktivitas pemerintahan dan daerah tertinggal 2. Pengembangan penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta sarana publik 3. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan 4. Pemerataan Penerangan Jalan Umum yang berkelanjutan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	1. Pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi dan mekanisasi, 2. Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran 3. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat 4. peningkatan produksi pertanian, 5. peningkatan ketahanan petani dan nelayan. 6. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan 7. Pengembangan sektor industri pengolahan melalui pemajuan sentra industri, business matching 8. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi 9. Pengembangan sektor perdagangan melalui penyediaan sarpras yang representatif, pembinaan koperasi, perluasan akses pemasaran, dan inkubasi bisnis. 10. Penciptaan iklim makro ekonomi daerah yang kondusif untuk melakukan usaha.

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
		11. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi 12. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan dukungan sarpras pariwisata, kolaborasi layanan pariwisata dengan sektor lain, dan peningkatan level layanan pariwisata. 13. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi
Memperluas lapangan kerja	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	1. penyiapan daya saing tenaga kerja terampil 2. perluasan lapangan kerja 3. link match tenaga kerja lokal dan lapangan kerja 4. pemajuan wirausaha.
Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	1. Penguatan pengendalian, monitoring konservasi lingkungan hidup strategis 2. Pengelolaan sampah secara terpadu dan holistik 3. Penguatan tatakelola lingkungan hidup 4. penguatan daerah untuk tangguh bencana
Mewujudkan SDM yang berkualitas	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan masyarakat serta ketersediaan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah atas. 3. Mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan terpencil. 4. Meningkatkan kualitas guru, tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan kearifan dan potensi lokal. 5. Memperkuat tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 6. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses dan mutu, tetapi juga mendorong keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.
Menurunkan kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	1. Peningkatan akses layanan perlindungan dan jaminan sosial 2. pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisas Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya 2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatkan pembangunan keluarga berkualitas	Penguatan Pembangunan Gender	1. Pemberdayaan dan perlindungan gender 2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan 3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda
Meningkatkan kerukunan umat beragama	Optimalisasi Stabilitas Wilayah	1. Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, dan diseminasi program pembangunan	1. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
		2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
		3. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
		4. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
	Penguatan kualitas supervisi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan keuangan dan kapasitas SDM yang inovatif serta berorientasi riset.	1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah
		2. Peningkatan nilai maturitas SPIP
		3. Peningkatan level kapabilitas APIP
		4. Perbaikan dan penguatan database perencanaan pembangunan
		5. Penguatan riset dalam perencanaan pembangunan daerah
		6. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		7. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah
		8. Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah
		9. Mewujudkan ketepatan waktu penyusunan dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan
		10. Terlaksananya pengelolaan BMD yang optimal
		11. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
		12. penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 4

Sasaran, Prioritas Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata, terjangkau, dan konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Perluasan akses infrastruktur dasar, dan konektivitas wilayah yang berkualitas pada wilayah pendukung aktivitas pemerintahan dan daerah tertinggal 2. Pengembangan hunian layak dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta sarana publik 3. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan 2. Pemerataan Penerangan Jalan Umum yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif;	62,07	65,62	1.792.290.000	DPUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen; Kumulatif	87,51	89	189.925.000.000	DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen; Kumulatif	80,68	100	150.000.000	DPUPR
					Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen; Kumulatif	35,71	35,73		DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen; Kumulatif	100	100	70.000.000	DPUPR
					Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen; Kumulatif	1,36	1,38	500.000.000	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga konstruksi yang terlatih	Persen; Tahunan	100	80		DPUPR

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	87,19	95	250.000.000	DPUPR
				Program Pengembangan Perumahan	penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Persen; Tahunan	100	100	153.089.500	DISPERKIM
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persen; Tahunan	125	100		DISPERKIM
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Persentase ketersediaan PSU perumahan	Persen; Kumulatif	95,19	86,9	91.853.700	DISPERKIM
				Program Kawasan Permukiman	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	Persen; Kumulatif	64,11	53,86	1.550.000.000	DISPERKIM
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Persen; Kumulatif	24,82	27,23	18.150.000.000	DISPERKIM

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaed	Persen; Tahunan	34	100	61.235.800	DISPERKIM
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Persen; Kumulatif	100	100	73.538.863.000	DISHUB
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	1. Penyiapan sumberdaya pertanian dan peternakan serta akses pemasaran keduanya 2. Pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi dan mekanisasi, 3. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat 4. peningkatan produksi pertanian, 5. peningkatan ketahanan petani dan nelayan.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan	100	90	1.010.000.000	DINAS KPTAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Kumulatif	92	100	2.255.000.000	DINAS KPTAN
					Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahunan	80,54	76,8		DINAS KPTAN
					Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Kumulatif	7,8	4		DINAS KPTAN
					Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Kumulatif	65	67		DINAS KPTAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Kumulatif	19,45	17,66		DINAS KPTAN
					Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan	12.205.885	13.454.166		DINAS KPTAN
					Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan	10.736.318	7.673.875		DINAS KPTAN
					Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan	718.394	489.408		DINAS KPTAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks pertanaman	Indeks, Tahunan	1,68	1,83	4.012.500.000	DINAS KPTAN
					Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Persen;Kumulatif	3,34	4,7		DINAS KPTAN
					Luas Lahan Sawah Lestari	Persen;Kumulatif	100	100		DINAS KPTAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen; Tahunan	5,6	5,6	155.000.000	DINAS KPTAN
					Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KPTAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Laju PDRB sektor industri pengolahan		1. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi 2. Pengembangan sektor industri pengolahan melalui pemajuan sentra industri, business matching 3. Pengembangan sektor industri pengolahan melalui pemajuan sentra industri, business matching	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	Persen;Kumulatif	100	66	3.656.500.000	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen; Tahunan	100	100	20.000.000	DISPERINTRANSNAKER
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	Persen;Kumulatif	49	85	50.000.000	DISPERINTRANSNAKER

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		1. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi 2. Penciptaan iklim makro ekonomi daerah yang kondusif untuk melakukan usaha. 3. Pengembangan sektor perdagangan melalui penyediaan sarpras yang representatif, pembinaan koperasi, perluasan akses pemasaran, dan inkubasi bisnis.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Persen;Kumulatif	22	27,52	55.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Persen;Kumulatif	52	20,32	280.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen;Kumulatif	10	5,26	340.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Pengembangan Umkm	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen;Kumulatif	10	4,21	150.000.000	DINAS KOP,UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemberian rekomendasi izin yang diterbitkan	Persen; Tahunan	100	100	100.000.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar dalam kondisi tidak rusak berat	Persen; Tahunan	32	32	3.700.000.000	DINAS KOP, UKM DAN PERDAGANGAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Laju PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum		1. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi 2. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan dukungan sarpras pariwisata, kolaborasi layanan pariwisata dengan sektor lain, dan peningkatan level layanan pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen;Kumulatif	95	95,33	4.095.000.000	DISPORAPAR
					Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen;Kumulatif	117,42	84,83		DISPORAPAR
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen;Kumulatif	95	94,33	84.750.000	DISPORAPAR
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	Persen;Kumulatif	225	70,57	188.000.000	DISPORAPAR
Menurunkan Angka Tingkat Pengangguran	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	1. penyiapan daya saing tenaga kerja terampil 2. perluasan lapangan kerja 3. link match tenaga kerja lokal dan lapangan kerja 4. pemajuan wirausaha.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen; Tahunan	100	100	5.000.000	DISPERINTRANSNAKER

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio; Kumulatif	45.130	44.326	585.541.800	DISPERINTRANSNAKER
					Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen; Kumulatif	18,48	6,7		DISPERINTRANSNAKER
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen; Kumulatif	95,63	72,5	55.000.000	DISPERINTRANSNAKER
				Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen; Kumulatif	8,48		55.262.000	DISPERINTRANSNAKER

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen;Kumulatif	8,13	10,01		DISPERINTRANSNAKER
Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	1. Penguatan pengendalian, monitoring perlindungan lingkungan hidup strategis 2. pengelolaan sampah secara terpadu dan holistik 3. penguatan tata kelola lingkungan hidup 4. penguatan daerah untuk tangguh bencana	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Nilai;Tahunan	18,51	22,21	1.023.700.000	DLH
				Hidup	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen;Kumulatif	17,69	20,31		DLH
				2. Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang tertangani	Persen; Tahunan	50,27	67	7.446.512.200	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan luas RTH kewenangan pemerintah Kabupaten Tegal dibagi dengan luas area RTH	Persen;Kumulatif	37,5	25	947.000.000	DLH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Indeks Risiko Bencana			4. Program Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen; Tahunan	81,91	100	754.632.000	BPBD
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan	1,88	100		BPBD
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan	27,06	100		BPBD
					Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen; Tahunan	92,44	100		BPBD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan masyarakat serta ketersediaan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah atas. 3. Mendorong pemerataan akses Pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan terpencil. 4. Meningkatkan kualitas guru, tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan kearifan dan potensi lokal. 5. Memperkuat tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. 6. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen; Tahunan	81,12	100	249.706.877.000	DIKBUD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			perluasan akses dan mutu, tetapi juga mendorong keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	Persen; Tahunan	72,19	73,5	30.219.000.000	DIKBUD
					Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	Persen; Tahunan	51,02	52		DIKBUD
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Persen; Tahunan	74,38	76		DIKBUD
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan	100	100		DIKBUD
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan	100	100	43.000.000	DIKBUD
				Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan	100	100	33.000.000	DIKBUD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen; Tahunan	0,1	0,909	125.105.004.400	DINKES
	Indeks Kesehatan									

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Upaya Kesehatan Masyarakat					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan	69,1	100		DINKES
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan	71,4	100		DINKES
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan	74,6	100		DINKES
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan	110,5	100		DINKES
					Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	475,2	100		DINKES
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	181,4	100		DINKES

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	169,8	100		DINKES
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	129,4	100		DINKES
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	125,9	100		DINKES
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan	102,2	100		DINKES
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan	235,8	100		DINKES

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINKES
					Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persen; Tahunan	100	100		DINKES
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan	477	100	7.440.635.500	DINKES
					Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan	89,7	93,1		DINKES

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persen; Tahunan	45	69	896.314.000	DINKES
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan	95	87	2.101.329.500	DINKES
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Persen; Tahunan	100	100	244.430.424.000	RSUD DR SOESELO
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	Persen; Tahunan	84,6 (AA)	84 (AA)		RSUD DR SOESELO

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen; Tahunan	100	100	50.702.799.000	RSUD SURADADI
					Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	Persen; Tahunan	78,50 (A)	78,36 (A)		RSUD SURADADI
Menurunkan Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	1. Peningkatan akses layanan perlindungan dan jaminan sosial 2. pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan	100	20,86	138.650.000	DINAS SOSIAL
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan	100	100	1.924.403.350	DINAS SOSIAL

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan	100	29,83	1.895.750.000	DINAS SOSIAL
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya 2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan	85,71	91,71	1.528.665.000	DINAS DIKBUD
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Seni dan Kesenian yang dibina	Persen; Tahunan	88,23	92,23	50.000.000	DINAS DIKBUD
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen; Tahunan	82,35	84,35	40.000.000	DINAS DIKBUD
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan	60,6	64,6	232.026.000	DINAS DIKBUD
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang dikelola	Persen; Tahunan	100	100	21.000.000	DINAS DIKBUD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatkan pembangunan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Penguatan Pembangunan Gender	1. Pemberdayaan dan perlindungan gender 2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan 3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kecamatan	Persen; Tahunan	16,67	66,67	8.716.960.000	DINAS P3AP2KB
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen; Tahunan	42,45	10	40.047.000	DINAS P3AP2KB
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen;Kumulatif	0,176	0,128	1.225.000.000	DINAS PORAPAR
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Persen;Kumulatif	0,08	0,835		DINAS PORAPAR
Meningkatkan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	80	100	10.000.000	SATPOL PP

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	Persen; Tahunan	92,59	100	234.193.000	SATPOL PP
					Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	Persen; Tahunan	93,38	100		SATPOL PP
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan	100	100	65.000.000	BADAN KESBANGPOL
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase Konflik yang tertangani	Persen; Tahunan	100	100	75.000.000	BADAN KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Gangguan Kantibmas yang tertangani	Persen; Tahunan	100	100	1.225.000.000	BADAN KESBANGPOL

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan digitalisasi mendukung tata kelola, supervisi, dan diseminasi program pembangunan	1. Digitalisasi layanan publik pemerintahan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 4. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	100	100	150.000.000	DINAS KOMINFO
					Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan	64,58	100		DINAS KOMINFO
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	77,79	85		DINAS KOMINFO
	Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kualitas supervisi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan keuangan dan kapasitas SDM yang inovatif serta	1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah 2. Peningkatan nilai maturitas SPIP 3. Peningkatan level kapabilitas APIP 4. Perbaikan dan penguatan database perencanaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kinerja Perangkat Daerah Rumpun Koordinasi Pemerintahan dan Kesra nilai SAKIP B (Baik)	Persen; Tahunan	70	73,78	33.663.475.000	SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
		berorientasi riset.	pembangunan 5. Penguatan riset dalam perencanaan pembangunan daerah 6. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 7. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah 8. Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah 9. Mewujudkan ketepatan waktu penyusunan dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan 10. Terlaksananya pengelolaan BMD yang optimal 11. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah 12. penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN		Persentase Pelayanan Publik Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM Baik)	Persen; Tahunan	100	100		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Indeks RB Perangkat Daerah rumpun Koordinasi Pemerintahan dan kesra nilai B (Cukup Baik)	Persen; Tahunan	0	75		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan	100	100		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Persen; Tahunan	100	100		SEKRETARIAT DAERAH
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kinerja perangkat daerah rumpun koordinasi perekonomian pembangunan nilai SAKIP B	Nilai; Tahunan	100	100	915.806.000	SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan	98,81	98	123.276.000	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Penduduk ber KTP el	Persen; Tahunan	100	99		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan	34,7	50		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Aktivasi IKD Penduduk ber KTP El	Persen; Tahunan	0	15		SEKRETARIAT DAERAH
				Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan	96,85	98	105.000.000	DISDUKCAPIL
					Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan	100	75		DISDUKCAPIL
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan	100	100	451.909.000	BAPPEDALITBANG
					Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan	85	85		BAPPEDALITBANG

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan	91,98	92,4	948.130.000	BAPPEDALITBANG
					Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan	89,65	82		BAPPEDALITBANG
					Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan	82,21	93,65		BAPPEDALITBANG
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; Tahunan	100	100	509.092.240.000	BPKAD
					Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawabannya APBD	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	Persen; Tahunan	95	80	2.935.000.000	BPKAD
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persen; Tahunan	91,56	93	2.560.000.000	INSPEKTORAT
					Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan	75	90		INSPEKTORAT
					Persentase Desa Menyajikan Laporan Keuangan secara Akuntabel	Persen; Tahunan	10	20		INSPEKTORAT
					Persentase Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan	80	90		INSPEKTORAT

SASARAN DAERAH	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN; SIFAT DATA; REFERENSI	KONDISI AWAL REALISASI 2024	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Meningkatnya Kualitas pendampingan, pengawasan dan asistensi	Persen; Tahunan	100	100	1.095.000.000	INSPEKTORAT
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	Persen; Kumulatif;	80,51		1.500.000.000	BKPSDM
					Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	Persen; Kumulatif;	88,87	65,75		BKPSDM
Meningkatnya inovasi daerah	Kapabilitas Inovasi			Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan	87,5	87,71	1.100.000.000	BAPPEDALITBANG

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2024



4.2.4. Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Berikut disajikan keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Provinsi dengan Prioritas Daerah, fokus kebijakan dan kabupaten dan program pembangunan prioritas tahun 2026.

Tabel 4. 5

**Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Melalui Prioritas Pembangunan Daerah,
Fokus Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026**

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
				2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
					Program Pembinaan Sejarah
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
					Program Pengelolaan Permuseuman
			Penguatan Pembangunan Gender	1. Pemberdayaan dan perlindungan gender	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
				2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
					Program Penanganan Kerawanan Pangan
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Penguatan landasan perekonomian yang Berdaya Saing, inklusif dan berkelanjutan	Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	1. Pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi dan mekanisasi,	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				2. Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				3. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
				4. peningkatan produksi pertanian,	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				5. peningkatan ketahanan petani dan nelayan.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
				6. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				7. Pengembangan sektor industri pengolahan melalui pemajuan sentra industri, business matching	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				8. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				9. Pengembangan sektor perdagangan melalui penyediaan sarpras yang representatif, pembinaan koperasi, perluasan akses pemasaran, dan inkubasi bisnis.	

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
				10. Penciptaan iklim makro ekonomi daerah yang kondusif untuk melakukan usaha.	Program Pemberdayaan Umkm
				11. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi	Program Pengembangan Umkm
				12. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan dukungan sarpras pariwisata, kolaborasi layanan pariwisata dengan sektor lain, dan peningkatan level layanan pariwisata.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				13. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
					Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan	Penguatan landasan perekonomian yang Berdaya Saing, inklusif dan berkelanjutan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang berkualitas	1. Perluasan akses infrastruktur dasar, dan konektivitas wilayah yang berkualitas pada wilayah pendukung aktivitas pemerintahan dan daerah tertinggal	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
	Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.			2. Pengembangan penyediaan hunian layak dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta sarana publik	Program Penyelenggaraan Jalan
				3. Optimalisasi pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				4. Pemerataan Penerangan Jalan Umum yang berkelanjutan	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Perumahan
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
					Program Kawasan Permukiman
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan akses dan mutu pendidikan serta kesehatan masyarakat serta ketersediaan sarana prasarana pendukung	Program Pengelolaan Pendidikan
				2. Meningkatkan pemenuhan Wajib Belajar 13 tahun, mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan menengah atas.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				3. Mendorong pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan di seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan terpencil.	Program Pengembangan Kurikulum
				4. Meningkatkan kualitas guru, tenaga kependidikan, serta pengembangan kurikulum yang kontekstual dengan kearifan dan potensi lokal.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				5. Memperkuat tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
				6. Mengembangkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses dan mutu, tetapi juga mendorong keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan landasan perekonomian yang Berdaya Saing, inklusif dan berkelanjutan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
					Program Pembredayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				1. Peningkatan akses layanan perlindungan dan jaminan sosial	Program Pemberdayaan Sosial
				2. pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Program Rehabilitasi Sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				1. Pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi dan mekanisasi,	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				2. Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
			Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	3. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
				4. peningkatan produksi pertanian,	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
				5. peningkatan ketahanan petani dan nelayan.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
				6. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan	Program Pemberdayaan Umkm
				7. Pengembangan sektor industri pengolahan melalui pemajuan sentra industri, business matching	Program Pengembangan Umkm

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
6	Membangun Dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.			8. Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				9. Pengembangan sektor perdagangan melalui penyediaan sarpras yang representatif, pembinaan koperasi, perluasan akses pemasaran, dan inkubasi bisnis.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				10. Penciptaan iklim makro ekonomi daerah yang kondusif untuk melakukan usaha.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				11. Penyiapan sumberdaya perdagangan, koperasi, UKM, dan investasi	Program Pemasaran Pariwisata
				12. Pengembangan sektor pariwisata melalui penyediaan dukungan sarpras pariwisata, kolaborasi layanan pariwisata dengan sektor lain, dan peningkatan level layanan pariwisata.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				13. Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
					Program Pemberdayaan Umkm
					Program Pengembangan Umkm
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
					Program Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja
					Program Hubungan Industrial
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis	Penguatan kualitas supervisi, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengelolaan keuangan dan kapasitas SDM yang inovatif serta berorientasi riset.	1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				2. Peningkatan nilai maturitas SPIP	Program Perekonomian Dan Pembangunan
				3. Peningkatan level kapabilitas APIP	Program Pendaftaran Penduduk
				4. Perbaikan dan penguatan database perencanaan pembangunan	Program Pencatatan Sipil

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
				5. Penguatan riset dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				6. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				7. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				8. Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				9. Mewujudkan ketepatan waktu penyusunan dan keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				10. Terlaksananya pengelolaan BMD yang optimal	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				11. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi
				12. penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Riset Dan Inovasi Daerah
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	1. Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
				2. Perlindungan dan pemanfaatan ekonomi produk seni budaya lokal	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
					Program Pembinaan Sejarah
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
					Program Pengelolaan Permuseuman

NO	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Fokus Kebijakan	PROGRAM PRIORITAS
			Penguatan Pembangunan Gender	1. Pemberdayaan dan perlindungan gender	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
				2. Penguatan dan perluasan akses gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				3. Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan masyarakat dalam penegakan hukum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		Penguatan landasan perekonomian yang Berdaya Saing, inklusif dan berkelanjutan	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	1. Penguatan pengendalian, monitoring konservasi lingkungan hidup strategis	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
				2. Pengelolaan sampah secara terpadu dan holistik	Hidup
				3. Penguatan tatakelola lingkungan hidup	2. Program Pengelolaan Persampahan
				4. penguatan daerah untuk tangguh bencana	3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
					4. Program Penanggulangan Bencana

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

4.2.5. Pelaksanaan Program Unggulan

Mendasari dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 didapatkan program unggulan yang akan diusung oleh Bupati dan wakil Bupati menjadi program unggulan daerah. Pembangunan Strategis Daerah sebagai kelanjutan program unggulan antara lain:

Tabel 4. 6
Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2026

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM RKPD	AKTIVITAS
1	Pembangunan Infrastruktur yang Merata	Program Penyelenggaraan Jalan	Penanganan Jalan Bebas Lubang (Sah Lapor Sah Alus)
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerangan Jalan Umum
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penataan Kota Slawi dan Pembangunan Sarana Prasarana Publik
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
2	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Warga Miskin	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Layak Huni
3	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pertanian Melalui Hilirisasi, Pembangunan Infrastruktur Irigasi yang Berkualitas, Serta Bantuan Bagi Petani dan Nelayan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pembangunan Jaringan Irigasi 2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 3. Hilirisasi Produk Pertanian Tegal 4. Bantuan Beras Paceklik untuk Nelayan 5. BPJS Tenaga Kerja Rentan bagi Nelayan dan Tenaga Kerja Rentan Lainnya 6. Asuransi Pertanian 7. Pupuk Hayati
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
4	Penumbuhan Ekonomi Berbasis potensi lokal, di antaranya industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemajuan Wirausaha Serta <i>Link and Match</i> Tenaga Kerja dan Lapangan Pekerjaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Wirausaha Pemuda 2. Program Layanan Pengembangan Usaha (PLPU) 3. Bursa Kerja 4. <i>Pelatihan Link and Match</i> untuk Pencari Kerja 5. Revitalisasi BLK 6. Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa)
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
6	Konservasi Lingkungan Hidup, Khususnya Daerah Resapan Air, dan Pengelolaan Sampah yang Terpadu	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Sampah secara Terpadu
		Program Pengelolaan Persampahan	
7	Peningkatan Kualitas Masyarakat Dengan Penguatan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM RKPD	AKTIVITAS
	dan Keterampilan serta Adanya Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Keluarga Miskin		2. Beasiswa Miskin (Kartu Cerdas) 3. Literasi Numerasi 4. Satu Desa Satu Sarjana
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Sosial bagi Masyarakat Miskin
8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Cek Kesehatan Gratis 2. Pemberian Makanan Tambahan untuk Cegah Stunting 3. Sosialisasi PHBS 4. Sosialisasi NAPZA 5. Integrasi Layanan Primer
9	Pemajuan Desa Bangga Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pelestarian, Pembinaan, Perlindungan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2. Desa Bangga Budaya
10	Digitalisasi Layanan Publik Pemerintahan	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penunjang Urusan Pemerintah	1. Pengembangan Layanan Publik TIK (Hardware dan Software) 2. Diseminasi program – program pembangunan pemerintah
11	Peningkatan Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Pembangunan dan Pengelolaan Database Riset dan Inovasi 2. Pembentukan dan/atau Aktivasi Program Forum Kolaborasi Riset dan Inovasi sebagai <i>Enabler</i> Kebijakan Berbasis Bukti 3. Peningkatan Produksi dan Kolaborasi Riset/Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah dan Isu Strategis 4. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi 5. Perluasan Fasilitas HKI yang mendorong Ekonomi Lokal

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

4.2.6. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tujuan dan sasaran Global. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tegal menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan komitmen internasional dan nasional tersebut, maka bentuk integrasinya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7

Integrasi Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian TPB/SDG's

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Tujuan 1. Mengurangi Kemiskinan									
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	Satgas P3KE	%	0.24	0.22	0.24	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	7.3	7.1	6,81	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan	Persentase laki-laki, perempuan	Persentase laki-laki, perempuan	BPS (tidak ada rincian menurut	%			6,81	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	penduduk miskin, jadi penyebutnya Penduduk/Rumah tangga kab.tegal)					
	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan		%	51.92	PM	BCG = 95,92 DPT = 91,36 Polio = 95,24 Campak = 79,74 Hepatitis B = 95,39	
	(b) Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi)	(b) Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi)	(b) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan		%	14.18	PM	32,99	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	(c) Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	(c) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan	(c) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP		%	46.86	PM	7,36	Rentang Usia 25 +
	(d) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	(d) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 – 60 tahun yang tidak tamat SMP	(d) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah		%	0.77	PM	0	Rentang usia 7-23
	(e) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	(e) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	(e) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik		%	0	PM	0	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	(f) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	(f) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	(f) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih		%	81.69	PM	89,68	
	(g) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	(g) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	(g) Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)		%	1.41	PM	1,41	
	(h) 8. Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak	(h) 8. Sanitasi: Persentase rumah tangga tidak mempunyai WC layak	(h) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah		%	4.3	PM	3,14	
	(i) Lantai: Persentase rumah tangga	(i) Lantai: Persentase rumah tangga	(i) Bahan bakar memasak: Persentase		%	97	98	98	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m ²	dengan jenis lantai terluas adalah tanah	rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji						
	(j) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg	(j) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji	(j) Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif		%	3.06	PM	Tidak punya rumah = 18,14 Tidak punya tabung gas 5,5 kg atau lebih = 96,9 Tidak punya motor = 18,52 Tidak punya Lemari es = 30,72 Tidak punya AC = 96,71 Tidak punya Emas = 87,84 Tidak punya mobil = 94,11 Tidak punya TV layar data min 30	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
								inci = 81,96 Tidak punya tanah = 21,75	
	(k) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif	(k) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya aset produktif	(k) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran		%	96.92	PM	3,05%	
	(l) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak	(l) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang	(l) Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak		%	36.81	PM	1,12	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kot a	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	memiliki akta kelahiran	tidak memiliki akta kelahiran	punya akses internet						
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial: a. PKH b. PBI c. Sembako d. Hari tua e. Pensiun	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial: a. PKH b. PBI c. Sembako	BPJS Kesehatan; Dinkes, Dinsos	Jiwa	PKH 18.8%, PBI 40%, Sembako 11.53%	PKH 18.8%, PBI 40%, Sembako 11.53%	100%	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	<i>miskin dan rentan.</i>								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan; Dinkes	%	87,30	95	97	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS ; perinaker	%	a). BPJS Ketenagakerjaan (pembilang) : 76.394 orang b). BPS (penyebut) Buruh/Pegawai : 301.962 orang	25.30%	b. 90,36 ribu	
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan									
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah	Proporsi penduduk/rumah	Proporsi penduduk/rumah	BPS	%				

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	h tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	h tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar						
	(a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum	(a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum	(a) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan air minum layak			98.17 (air minum layak)	98.25	89,68	
	(b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	(b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar	(b) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi layak			88.87 (sanitasi dasar)	89	Luas lantai per kapita = 4,84 Dinding tidak tembok = 3,36 Lantai tanah = 3,14	
	(c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas	(c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas	(c) Persentase penduduk/rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas			87.1	87.5		Tidak ada data

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kotora	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	Kesehatan Dasar	Kesehatan Dasar	Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)						
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS	%				
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri			80.29	80.4	81,86	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak			1.39	1.4	0,88	
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	SET. BPBD	Jiwa	0.20416	0.20679	0.20679	
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat provinsi dan kab/kota	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kab/kota	SET. BPBD	Dokumen	1 KRB; 1 RPB; 7 Rencana Kontijensi	1 KRB; 1 RPB; 8 Rencana Kontijensi	1 KRB; 1 RPB; 8 Rencana Kontijensi	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	Reduction 2015–2030								
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan									
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Prevalensi stunting	Prevalensi stunting	DINKES	%	16.1	16	16,38	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada balita	Prevalensi wasting	Prevalensi wasting	DINKES	%	8,3	7,5	8,7	
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca									
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan	Luas kawasan pertanian	a) Luas Lahan Pertanian Pangan	DINAS PERTANIAN;	Hektar	LP2b 36088 LCP2B 5484	LP2b 36088 LCP2B 5485	LP2b 36088 LCP2B 5485	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (untuk lahan baku sawah)	pangan berkelanjutan	Berkelanjutan b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DINAS PUPR (PERDA RTRW)					
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk									
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DISKPTAN	Indeks	0.055	0.057	0.059	Anggaran KPTAN: 21.153.941.900/APBD: 3.131.815.965.300
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera									
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Jumlah kasus kematian ibu	Jumlah kasus kematian ibu (AKI)	DINKES	Kasus	15	37	15	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	a). 100 b). 100	a). 100 b). 100	a). 99,9 b). 99,9	
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Kasus baru per 100.000	304	300	115	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
					penduduk				
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	DINKES	Orang	20	10	5	
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.		Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu	DINKES	Orang	221	205	205	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta	DINKES	Orang	a) 0 ; b) 213	a) 0 ; b) 195	a) 0 ; b) 195	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	26.92	26.5	23,18	Umur 5 tahun ke atas
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Jumlah kasus hipertensi	Jumlah kasus hipertensi	DINKES	Kasus	153,005	126,334	163,472	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Jumlah kasus obesitas	Jumlah kasus obesitas (diabetes)	DINKES	Kasus	27,100	28,455	28,455	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	6.5	6.2	7.77	Jml 19.447, jml PUS : 250.200
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinkes	%	87,30	95	97	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat									
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	26.92	26.5	23,18	
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Persentase	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di	DINKES	Orang	80 32 82 340	82 32 82 340	80 32 82 340	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar; Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Puskesmas): a. Dokter b. Dokter gigi c. Tenaga kefarmasian d. Perawat e. Bidan f. Nutrisi g. Sanitarian h. Promosi Kesehatan i. Ahli Teknik Laboratorium Medik Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. a. Apoteker b. Bidan c. Dokter Gigi d. Dokter	Puskesmas): a. Dokter b. Dokter gigi c. Tenaga kefarmasian d. Perawat e. Bidan f. Nutrisi g. Sanitarian h. Promosi Kesehatan i. Ahli Teknik Laboratorium Medik Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. a. Apoteker b. Bidan c. Dokter Gigi d. Dokter			799 52 40 62 64	799 53 40 62 64	799 52 40 62 64	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kot a	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
		<i>Spesialis</i> <i>e. Dokter</i> <i>Umum</i> <i>f. Perawat</i> <i>g. Tenaga Gizi</i> <i>h. Tenaga</i> <i>Kesehatan</i> <i>Lingkungan</i> <i>i. Tenaga</i> <i>Kesehatan</i> <i>Masyarakat</i> <i>j. Tenaga</i> <i>Keteknisian</i> <i>Medis</i> <i>k. Tenaga</i> <i>Keterapian Fisik</i> <i>l. Tenaga</i> <i>Psikolog Klinik</i> <i>m. Tenaga</i> <i>Teknik</i> <i>Biomedika</i>	<i>Spesialis</i> <i>e. Dokter</i> <i>Umum</i> <i>f. Perawat</i> <i>g. Tenaga Gizi</i> <i>h. Tenaga</i> <i>Kesehatan</i> <i>Lingkungan</i> <i>i. Tenaga</i> <i>Kesehatan</i> <i>Masyarakat</i> <i>j. Tenaga</i> <i>Keteknisian</i> <i>Medis</i> <i>k. Tenaga</i> <i>Keterapian Fisik</i> <i>l. Tenaga</i> <i>Psikolog Klinik</i> <i>m. Tenaga</i> <i>Teknik</i> <i>Biomedika</i>						
Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1 (a)	Proporsi anak-anak dan remaja di : (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja di : (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi	KEMDIKBUD (Rapor Pendidikan)	%	*Literasi SD : 60,14 *Literasi SMP : 70,00 *Numerasi SD : 46,36 *Numerasi SMP : 61,72	*Literasi SD : 58,64 *Literasi SMP : 71,76 *Numerasi SD : 41,83 *Numerasi SMP : 67,85	*Literasi SD : 61,84 *Literasi SMP : 73,00 *Numerasi SD : 53,60 *Numerasi SMP : 63,68	
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat,	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat,	Angka melanjutkan SD/ sederajat Angka	DINDIKBUD; KEMENAG	Angka	*Angka Melanjutkan SD : 93,62 *Angka Melanjutkan SMP : 87,46	*Angka Melanjutkan SD : 93,78 *Angka Melanjutkan SMP : 88,32	*Angka Melanjutkan SD : 94,12 *Angka Melanjutkan SMP : 88,32	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	melanjutkan SMP/ sederajat						
4.1.2 (a)	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th	DINDIKBUD; BAPPEDA	Orang	2977	982		
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar)	Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/ sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	BPS	%	67,31	100	77	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal.	DINDIKBUD; DISNAKER; KEMENAG; BPS	%	*Pembilang (Dikbud: SMP 47.636, SMA 11.913, SMK 39.488, LKP 316, PAKET 7.142) disnaker 952) *BPS hanya penyebut: 1.147.688 (usia 15-64)	* Dikbud : 106.783 *Disperintransnaker 650 orang	*Dikbud (SMP 48.082, SMA 12.041, SMK 40.881, LKP 1.461, PKBM 7.412)*Disperintransnaker: 787 Orang (PIK 420, AMT 367)	
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	25,46	26	23,23	
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1 (a)	Proporsi remaja (usia 15-24	Proporsi remaja (usia 15-24	Persentase penduduk	BPS	%	9.01	10	10,67	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir.						
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	BPS	%	a) APM SD/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 98,75; b) APM SD/ Sederajat Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan	a) APM SD/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 98,75; b) APM SD/ Sederajat Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan	*APM SD/ sederajat : 93,78 *APM SMP/ sederajat : 82,11 *APK SD/ sederajat : 101,68 APK SMP/ sederajat : 108,29	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan,	SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan,			100%= 104,35; c) APK SMP/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 95,24; d) APK SMA/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 119,71; e) APK Perguruan Tinggi Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 112,85; f) APK SMP/ Sederajat, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=98,19;	100%= 104,35; c) APK SMP/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 95,24; d) APK SMA/ Sederajat Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 119,71; e) APK Perguruan Tinggi Perempuan terhadap Laki-laki dikalikan 100%= 112,85; f) APK SMP/ Sederajat, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=98,19;		

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
						g) APK SMA/Sederajat, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=92,20; h) APK Perguruan Tinggi, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=116,63	g) APK SMA/Sederajat, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=92,20; h) APK Perguruan Tinggi, Perdesaan terhadap Perkotaan dikalikan 100%=116,63		
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf	BPS	%	94.83	95	94.83	
Tujuan 5. Kesenjangan Gender									
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintahan daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	SETWAN	%	26	26	26	Dari 50 anggota DPRD keterwakilan perempuan ada 13 orang, maka presentase 26%
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil) b) Proporsi perempuan yang menempati	BKPSDM	%	0.11	0.14	a. 0 b. 0.10	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
			jabatan eselon II						
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta									
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan ,informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dokumen	3	3	3	
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	BPS	%	75.07	75.4	98,82	
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak									
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak.	BPS	%	98.17	98.25	95,51	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	dikelola secara aman.	dikelola secara aman.							
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS	%				
	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		%	87.1	87.3	76.05	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		%	85.87 (sanitasi dasar)	86.01	Luas lantai per kapita = 4,84 Dinding tidak tembok = 3,36 Lantai tanah = 3,14	
	(c) Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	(c) Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar		%	1.41	1.3	1,41	
	(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T dan sistem pengelolaan lumpur tinja	(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	DPUPR	%	0,32	0.35	42.08	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat									
6.3.1	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman	Jumlah limbah cair industri yang dikelola (yang dilaporkan)	Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DINAS LH; KLHK	%	15	17	20	berdasarkan data ajuan persetujuan teknis pemenuhan BMAL dan Data Pengawasan Lingkungan Hidup Tahun 2024
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau									
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi.	BPS	%	100	100	100	
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	97	98	98	
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi									
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	7.65	7.65	6,11	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	PDRB per kapita.	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	26.85 juta/tahun	26.85 juta/tahun	28,29 juta/tahun	
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	N/A	N/A	N/A	
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur									
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata									
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan KabKota	DPU BMCK	%	86.04	87,50	87,51	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang	DISHUB	Orang	133593/130271	135,000	112,825	
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi									
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	5.1	5.2	3.8	
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan									
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	7.3	7.1	6,81	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	kelamin dan kelompok umur.								
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal.	Jumlah desa tertinggal.	KEMENDES; DINAS PMD	Desa	12	93	5	Data diambil dari Pengisian SDGs Tahun 2024
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri.	KEMENDES; DINAS PMD	Desa	3	0	5	
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DINAS P3A PPKB; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	0	0	0	tidak ada Kebijakan diskriminatif pelarangan diskriminasi menurut HAM Internasional

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kot a	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaa n.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaa n.	BPJS KETENAGAKERJ AAN; BPS	%	a). BPJS Ketenagakerjaan (pembilang) : 76.394 orang b). BPS (penyebut) Buruh/Pegawai : 301.962 orang	25.30%	76,57%	
Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan									
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	SET. BPBD	Jiwa	0.20416	0.20679	0.20679	
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat	SET. BPBD; BPS	%	0.035	0.038	0.042	Kerugian ekonomi : 12.034.210.166 ; PDRB :

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	bencana relatif terhadap PDB	bencana relatif terhadap PDRB	bencana relatif terhadap PDRB						28.490.000.000.000
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota									
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	Persentase sampah yang terkelola	Persentase sampah yang terkelola	DINAS PERKIM; DINAS LH	%	70.19	93	67,23	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	KLHK; DINAS LH	Indeks	86.24	86,66	85,21	Hasil diambil dari website IKLH
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Proporsi Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Perkotaan	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	OPD yang menangani urusan lingkungan atau permukiman atau PU	%	37.5	38,89	38,90	
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab									
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Persentase sisa makanan	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK	%	37	35	52,54	
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah									
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	(a) Limbah B3 yang dilaporkan; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan	KLHK; DINAS LH					
	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita		(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	KLHK; DINAS LH	ton	18,071	20,000	629,6	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kot a	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah sampah yang dikelola	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK	Ton	155,000	155,000	162.429,15	
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DINAS LH	Unit	239	243	207	
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	SET. BPBD	Jiwa	0.20416	0.20679	0.20679	
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh									
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL	Kasus	3	0	4	
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	0	0	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	KEPOLISIAN; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	%	0.01108699478	0	0.005099474124	
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua									
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM SETDA	%	100%	100%	100%	target : 20 Kasus Realisasi : 20 Kasus
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	INSPEKTORAT	Nilai	75.99	76.1	73,09	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Persentase opini pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat opini WTP.	Nilai Opini BPK	INSPEKTORAT; BPKPAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq B$	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq B$	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq B$	BAG.ORGANISASI SETDA; INSPEKTORAT	%	64,25	70,61	65,58	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq B$	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq B$	Nilai RB Kabupaten/Kota	BAG.ORGANISASI SETDA	Nilai	77,6	67,91	83,06	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA	Instansi	48	48	48	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kotora	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
		publik kategori baik.	baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan									
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	SETWAN	%	26	26	26	Dari 50 anggota DPRD keterwakilan perempuan ada 13 orang, maka presentase 26%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di	BKD	%	0.11	0.14	0.10	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	lembaga eksekutif (Eselon II).						
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Persentase Penduduk Berumur 0-4 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil	DISDUKCAPIL	%	91.78	92	95,87	Mengapa Indikator Kab/Kota (0-4 tahun) berbeda dengan Nasional dan Provinsi (<5 tahun). Ada selisih usia 1 tahun yang tidak dihitung
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	95.47	95.6	94,54	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	96.92	97	96,12	Referensi data Disdukcapil 96,95%
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	KIP; DISKOMINFO	Nilai	87	90	88.75	
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum	DINAS P3A PPKB; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	0	0	0	tidak ada Kebijakan diskriminatif pelarangan diskriminasi menurut HAM Internasional

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
		HAM Internasional.	HAM Internasional.						
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan									
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB.	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	6.33	6.25	10,17	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB.	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0.43	0.48	0,71	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang	Proporsi anggaran domestik yang	Proporsi anggaran domestik	BPKAD	%	22.57	17.89	23.2	

Kode Indikator	Nama Indikator Nasional	Nama Indikator Provinsi	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2022/2023)	2024		Keterangan
							Target	Realisasi	
	didanai oleh pajak domestik.	didanai oleh pajak domestik.	daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah						
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi									
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	Persentase rumah tangga yang mengakses internet	Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	BPS	%	66.13	66.2	98,88	
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama									
17.17.1. (a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAPPEDA	Dokumen	0	0	0	Tidak ada rencana Proyek KPBU



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025



4.2.7. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Isu-isu pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui program pembangunan prioritas daerah dan prioritas program daerah sebagaimana table berikut:

Tabel 4. 8

Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pendidikan Anak Usia Dini	11	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,12	100	249.706.877.000	DINAS DIKBUD
Pendidikan Dasar	12a	Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100		DINAS DIKBUD

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
	12b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100		DINAS DIKBUD
		berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs						

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pendidikan Kesetaraan	13	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	33,34	100		DINAS DIKBUD
Pelayanan kesehatan ibu hamil	21	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	69,1	100	125.105.004.400	DINAS KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	22	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	71,4	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	74,6	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan balita	24	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	110,5	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	475,2	100		DINAS KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	26	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	181,4	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	169,8	100		DINAS KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	129,4	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	29	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	125,9	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	210	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	102,2	100		DINAS KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	211	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	235,8	100		DINAS KESEHATAN
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	212	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100		DINAS KESEHATAN

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	31	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	80,68	100	150.000.000	DPUPR
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	34,54	34,71	70.000.000	DPUPR
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	33	37	153.089.500	DINAS PERKIM

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	42	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	93,38	100	1.648.279.600	SATPOL PP

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan informasi rawan bencana	52	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	27,06	100	754.632.000	SATPOL PP
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	53	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	81,91	100		BPBD

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,88	100		BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	31,8	100	234.193.000	SATPOL PP

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti	56	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	100	100	1.924.403.350	DINAS SOSIAL
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	57	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	58	Jumlah warga negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						
Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	59	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti						

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2026		
						Target	Rp. (000)	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	510	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	100	1.895.750.000	DINAS SOSIAL

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

4.2.8. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Tahun 2026 ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Berikut disajikan tabel prioritas pembangunan daerah pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. 7

Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	767.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Perdagangan		Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	399.970.000	DAGKOP-UKM

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	DAGKOP-UKM
3.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran dan Investasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	490.000.000	Dinas Perintransnaker
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	75.000.000	Dinas Perintransnaker

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	75.000.000	Dinas Perintransnake r
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	10.000.000	Dinas Perintransnake r
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standa r kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	50.000.000	Dinas Perintransnake r
				Program Pengelolaan Sistem		

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Informasi Industri Nasional		
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60.430.000	Dinas Perintransnaker
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	16.000.000	Dinas Perintransnaker
4.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian		Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2	Rp93.360.000	Dinas KPTan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Rp320.000.000	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Rp450.000.000	

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Jaringan Irigasi Usaha Tani		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp237.800.000	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp258.000.000	
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp20.000.000	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp1.000.000.00 0	
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp486.640.000	
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp200.000.000	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp35.000.000	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2026 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar pada pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Sektor yang menjadi prioritas adalah sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan



pertanian. Sementara, usaha khusus untuk menurunkan angka pengangguran juga akan menjadi perhatian.

Sektor pariwisata di Kabupaten Tegal cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, beberapa obyek wisata sudah menjadi ikon kabupaten seperti Guci, Pantai Purwahamba, dan Museum Semedo. Pariwisata juga menyumbangkan PAD yang cukup besar. Usaha yang akan dilakukan Pemkab Tegal di tahun 2026 adalah peningkatan layanan kualitas obyek wisata, perbaikan fasilitas obyek wisata, dan finalisasi obyek wisata baru yaitu hidroterapi di kawasan Guci. Pemkab Tegal juga akan tetap mendorong perkembangan obyek wisata yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa untuk mendorong kemandirian desa.

Perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar pada PDRB, hampir mencapai 17%. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja, memiliki efek pengganda pendapatan yang cukup besar (1,07), serta menghasilkan daya ungkit yang kuat (1,82). Pada tahun 2024, Pemkab Tegal akan melaksanakan upaya pemulihan UMKM pasca pandemi, rehabilitasi pasar rakyat, dan stabilisasi harga komoditas melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Industri pengolahan adalah sektor dengan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Tegal dengan share lebih dari 32%. Berdasarkan tabel input-output, komoditas pada sektor ini juga memiliki daya ungkit dan daya dorong yang besar pada perekonomian. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri logam, dan memiliki akses pada perusahaan besar multinasional (Astra, Komatsu, dsb). Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, Pemkab Tegal pada tahun 2024 akan memfokuskan upaya untuk mempermudah kegiatan usaha industri kecil dan menengah yang berbasis masyarakat (komunal). Hal ini dilaksanakan dengan fasilitasi industri logam dengan perusahaan tier 1 dan tier 2, serta dukungan pengembangan layanan klinik industri (bantuan pengurusan PIRT, merk, ijin berusaha, dan SNI). Sementara, untuk menarik investor baru, Pemkab Tegal berupaya untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, karena sistem bertani di Kabupaten Tegal sebagian besar masih dilaksanakan



secara manual (*labor intensive*). Sektor ini merupakan satu-satunya sektor dominan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di masa pandemi dan menjadi bantalan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian dengan beberapa cara di tahun 2026. Secara langsung, Pemkab akan meningkatkan layanan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tata usaha tani, serta memberikan bantuan sarpras pertanian pada petani, termasuk pengembangan Klinik Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian (TTP). Di sisi pengembangan teknologi, Pemkab akan melanjutkan kerjasama dengan IPB, utamanya dengan pelaksanaan KKN Tematik pertanian dan kolaborasi pengembangan produk unggulan (saat ini masih berfokus pada bawang putih dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia serta pengembangan padi organik, namun diharapkan akan dapat semakin meluas pada produk lain). Pemerintah kabupaten juga akan menginisiasi matching fund dengan perguruan tinggi, sebagai komitmen difusi inovasi teknologi pertanian. Pada komoditas ternak, Pemkab akan mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dengan mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal juga akan mendapat perhatian khusus, mengingat tren yang semakin meningkat. Bonus demografi yang dialami Kabupaten Tegal belum termanfaatkan secara optimal, sehingga angka pengangguran bertambah meskipun beberapa investasi yang masuk membutuhkan belasan ribu tenaga kerja. Upaya tercepat yang dapat dilakukan adalah mengarahkan pencari kerja yang ada untuk dapat diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu, Pemkab Tegal akan melakukan *link and match* pelatihan. Usulan kegiatan pelatihan yang berasal dari pagu indikatif kecamatan akan diarahkan agar tema pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, juga melobi pada investor agar mau menyerap tenaga kerja peserta pelatihan. Dengan demikian, peserta pelatihan akan dapat langsung bekerja.

Pemerintah kabupaten juga akan memfasilitasi *link and match* dengan sekolah vokasi (khususnya SMK) yang ada di Kabupaten Tegal, sesuai dengan amanat Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sedangkan di sisi demand pasar tenaga kerja, Pemkab akan mendorong



kemudahan perijinan untuk menarik investasi baru. Selanjutnya, wirausaha juga akan dikembangkan. Pemkab berkomitmen untuk melanjutkan program Wirausaha Pemuda (WP) dan Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) sebagai inkubator alumni WP untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan, para alumni WP akan mandiri dalam berusaha dan dapat membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, semua usaha yang dilakukan Pemkab bermuara pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

4.2.9. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menuntaskan kasus stunting. Pembangunan daerah tahun 2026 ditargetkan untuk mengurangi kasus stunting melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8

Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	125.105.004.400,00	Dinas Kesehatan
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	90.930.610.400,00	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.612.388.000,00	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.659.345.000,00	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.588.298.000,00	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.248.283.400,00	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sosialisasi dan Pemicuan STBM Stunting		Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.005.000,00	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.196.730.000,00	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	766.000.000,00	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Bimwin Catin Tk. Kabupaten		Dinas Kesehatan

				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.280.000.000,00	Dinas Permasdes
				Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.280.000.000,00	Dinas Permasdes
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	450.000.000,00	Dinas Permasdes
			Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	30.000.000,00	Dinas P3AP2KB
2.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	25.000.000,00	Dinas Kominfo
			Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	15.000.000,00	Dinas PUPR
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	25.000.000,00	Dinas PUPR
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	25.000.000,00	Dinas PUPR
3.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	1.725.000.000,00	Dinas Sosial
4.	Menurunnya Ketimpangan Gender	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Program Pengelolaan Pendidikan	249.706.877.000,00	Dinas Dikbud

				Pengelolaan Dana BOP PAUD	23.197.752.000,00	Dinas Dikbud
5			Pemberdayaan dan Perlindungan Gender	Orientasi dan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK Remaja dan PEK/UPPKS)	30.000.000,00	Dinas P3AP2KB

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui skema 5 Pilar dan 8 Aksi konvergensi stunting. 5 pilar percepatan penurunan stunting meliputi komitmen pimpinan, pengarusutamaan perubahan perilaku, aksi spesifik dan sensitif, kecukupan pangan dan gizi serta pengelolaan sistem data dan informasi. Sementara 8 aksi konvergensi meliputi analisis situasi, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rembug stunting, penyusunan regulasi daerah, pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), manajemen data, dan evaluasi pelaporan.

Pada tahun 2025 mendasari analisis situasi yang dilakukan, ditetapkan 20 desa lokus intervensi stunting. Lokus intervensi stunting ini mendasari prevalensi stunting serta keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tegal. Desa-desanya lokus stunting pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9

Tabel Desa Lokus Stunting Tahun 2025

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Tahun Awal Penetapan
1	Balapulang	Balapulang	Balapulang Wetan	2024
2	Balapulang	Kalibakung	Banjar Anyar	2024
3	Balapulang	Kalibakung	Bukateja	2024
4	Balapulang	Kalibakung	Danareja	2024
5	Bojong	Bojong	Karangmulyo	2024
6	Bojong	Bojong	Tuwel	2024
7	Bumijawa	Bumijawa	Bumijawa	2024
8	Bumijawa	Bumijawa	Muncanglarang	2024
9	Bumijawa	Bumijawa	Sokasari	2024

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Tahun Awal Penetapan
10	Dukuhturi	Kupu	Sidakaton	2024
11	Jatinegara	Jatinegara	Gantungan	2024
12	Jatinegara	Jatinegara	Luwijawa	2024
13	Lebaksiu	Lebaksiu	Yamansari	2024
14	Margasari	Margasari	Karangdawa	2024
15	Suradadi	Jatibogor	Gembongdadi	2024
16	Suradadi	Jatibogor	Jatibogor	2024
17	Suradadi	Suradadi	Jatimulya	2024
18	Suradadi	Suradadi	Kertasari	2024
19	Warureja	Warureja	Banjar Agung	2024
20	Warureja	Warureja	Demangharjo	2024

Sumber: Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2025

4.2.10. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan daerah tahun 2026 ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 10

Prioritas Pembangunan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
1.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	Perluasan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Warga Miskin dan Rentan Miskin	Program Rehabilitasi Sosial		
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia		

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
				Terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial		
				Penyediaan Permakanan	2.153.000.0 00	Dinas Sosial
			Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pemberian layanan rujukan	10.000.000	Dinas Sosial
2.	Meningkatny a Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.400.000.0 00	Dinas Perkim
				RTLH (Musrenbangcam 2022)	3.900.000.0 00	Dinas Perkim
				RTLH (Musrenbangcam 2022)	3.900.000.0 00	Dinas Perkim
				Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022)	2.400.000.0 00	Dinas LH
				Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022)	2.400.000.0 00	Dinas LH

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
3.	Meningkatny a Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK	Program pengelolaan pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	2.200.000.0 00	Dinas Dikbud
4.	Meningkatny a Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan , Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Pemberdayaa n petani	Program Penyuluhan Pertanian		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.000.000	Dinas KPTan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	40.000.000	Dinas KPTan
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	50.000.000	Dinas KPTan
			Pemberdayaa n Pembudidaya an Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000	Dinas Perikana n
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000	Dinas Perikana n
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250.000.000	Dinas Perikana n
5.	Meningkatny a Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan , Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	876.229.000	Dinas Perinake r
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	836.229.000	Dinas Perinake r
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	Dinas Perinake r
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	Dinas Perinake r
				Program Penempatan Tenaga Kerja	60.000.000	Dinas Perinake r

N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Perinaker
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.000.000	Dinas Perinaker
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perinaker
6.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Pemulihan dan Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.000.000	Dinas Kop UKM Dag
7.	Meningkatnya pemberdayaan gender	Peningkatan produktivitas pemuda dan olah raga	Pengendalian Kelahiran dan Peningkatan Kualitas	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera		



N o	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangk at Daerah
		berbasis gender	Keluarga Berencana			
				Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	7.510.950.0 00	Dinas P3AP2K B

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Strategi percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran dilakukan antara lain melalui jaminan sosial, bantuan sosial, sifatnya *Charity* pada sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim. Sementara meningkatkan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi pada sasaran dan Lokus Kemiskinan Ekstrim.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah metode Pemberdayaan yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diasesmen berdasarkan penyebab kemiskinannya. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui pemberdayaan ekonomi

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah metode *Charity*, yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diklaster berdasarkan ciri fisik kemiskinan. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui program *Charity*.

Pedoman Pemberdayaan Ekonomi (Inovasi penanggulangan kemiskinan OPD) antara lain:

- a. Kegiatan bersifat lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan)
- b. Dianggarkan secara cukup tuntas
- c. Kelompok sasaran diberdayakan tuntas (jumlah peserta tidak harus banyak, antara 50-100 orang)
- d. Kelompok sasaran harus warga miskin ekstrim sesuai data DTKS Dinsos (kluster 1.169 orang)
- e. Desain program dapat pemberdayaan kelompok, diutamakan pemberdayaan individu/keluarga
- f. Setiap sasaran menerima layanan program secara lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan) hingga terentaskan dari kemiskinan ekstrim
- g. Nomenklatur resmi kegiatan inovasi mengikuti Sub Kegiatan yang relevan dalam Renstra/Renja
- h. Nomenklatur Publik kegiatan inovasi ditetapkan OPD dalam bahasa yang mudah diingat publik

- i. Anggaran kegiatan inovasi bersumber dari anggaran Pagu Reguler OPD dan atau Pagu Kegiatan Strategis Kepala Daerah
- j. Dilakukan asistensi kematangan inovasi oleh Bidang Kelitbang Bappedalitbang
- k. Dilakukan asistensi penyusunan Renja oleh Bidang Perekonomian SDA Bappedalitbang

Pedoman *Charity* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim:

- a. Dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin ekstrim
- b. Dilakukan untuk mengintervensi program:
 - 1. RTLH (Disperkim)
 - 2. Jamban (Disperkim)
 - 3. Listrik
 - 4. BST (Dinsos)
 - 5. PKH (Dinsos)
 - 6. BLT DD (Dinsos)
 - 7. KIS (Dinsos)
 - 8. KIP (Dinsos)
 - 9. Desa Merdeka Sampah (DLH)
 - 10. Yuh Sekolah Maning (DisDikbud)
- c. Kegiatan yang sudah ada, diarahkan dilakukan dengan kelompok sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim.

Untuk mengetahui kebutuhan pemberdayaan terhadap kelompok sasaran kemiskinan ekstrem telah dilakukan asesment oleh TKPKD Kab. Tegal dengan pelaksana Dinsos dan pelaksana lapangan pendamping PKH di masing-masing kecamatan. Hasil asesmen pemberdayaan meliputi jenis-jenis kebutuhan kelompok sasaran sebagai berikut.

Tabel 4. 11
Kebutuhan Pemberdayaan Kelompok Sasaran Kemiskinan Ekstrem

KEBUTUHAN	JML	%
PELATIHAN UEP DAN MODAL USAHA	360	43.64
PELATIHAN , PERALATAN (GEROBAK,ETALASI,DAGANG) DAN MODAL KERJA	20	2.42
PELATIHAN DAN MODAL USAHA PETERNAKAN (KAMBING, SAPI, UNGGAS)	168	20.36
ALAT BENGKEL DAN MODAL USAHA	2	0.24
ALAT PERTUKANAN DAN MODAL USAHA	11	1.33
ALAT BANTU PENDENGARAN	1	0.12
MODAL DAN PERALATAN PERTANIAN	60	7.27
BANTUAN UANG UNTUK PENGobatan	3	0.36
BIAYA SEWA TEMPAT USAHA PIJAT	2	0.24
GEROBAK UNTUK CARI RONGSOKAN	1	0.12
MESIN JAHIT BESERTA PERLENGKAPANNYA	15	1.82
MODAL USAHA, PELATIHAN TATA BOGA	34	4.12
MODAL DAN PELATIHAN ONLINE	2	0.24
MODAL DAN PERALATAN ANYAMAN BAMBU	1	0.12
PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA ARANG, MODAL KERJA	1	0.12
PENGUATAN (MOTIVASI)	17	2.06
PENGEMBANGAN USAHA LAS	1	0.12
PERALATAN LOUNDRY	1	0.12
PERALATAN SERVIS ELEKTRONIK	1	0.12
PERALATAN SOUNDSYSTEM	1	0.12
PERLENGKAPAN USAHA LAYOS	1	0.12
TIDAK DITEMUKAN	2	0.24
PENAMPINGAN LANSIA	120	14.55
TOTAL JUMLAH	825	100.00

Sumber: TKPKD, 2023

Adapun desa lokus kemiskinan ekstrem adalah:

Tabel 4. 12
Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem

No.	Kecamatan	Desa
1	Balapulang	Balapulang Wetan
		Danareja
		Danawarih
		Harjowinangun
		Kaliwungu
		Karangjambu
		Pamiritan
		Tembongwah
2	Bojong	Cikura
		Kajenengan
		Karangmulya

No.	Kecamatan	Desa
		Lengkong
		Puncangluwuk
		Suniarsih
3	Bumijawa	Begawat
		Cintamanik
		Dukuhbenda
		Traju
		Gunungagung
		Muncanglarang
		Sokatengah
		Sokasari
4	Lebaksiu	Slarangkidul
		Lebakgowah
		Dukuhlo
5	Margasari	Jatilabar

Sumber: SK Bupati Penetapan Lokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, 2025

4.2.11. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal

Sebagai penyelaras program program kegiatan Perangkat Daerah yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding yaitu:

1. **Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;
 - b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
 - c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- 1) Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah/ pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 2) Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan/ Pemberdayaan Kelurahan/ Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan.
- 3) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik / Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa/ peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan.

2. **Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, dengan fokus kebijakan pada Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan. Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- 1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota/ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
- 4) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Berkala Jalan
- 5) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Rekonstruksi Jalan
- 6) Penyelenggaraan Jalan/Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota/ Pelebaran Jalan Menuju Standar

- 
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan/ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan/ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - 3) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - 4) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Pembangunan Prasarana Pertanian/ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Pembangunan Prasarana Pertanian/ Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - 6) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional/ Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota/ Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
 - 7) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri/ Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri/ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
 - 8) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 9) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan/ Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - 10) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga/ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- 1) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pengadaan Mebel Sekolah
- 2) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD
- 3) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD
- 4) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pembangunan Ruang Kelas Baru
- 5) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 6) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 7) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 8) Pengelolaan Pendidikan/ Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pengadaan perlengkapan paud
- 9) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP
- 10) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pembangunan Fasilitas Parkir
- 11) Pengembangan Kurikulum/Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- 12) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar
- 13) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP
- 14) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Mebel Sekolah
- 15) Pengelolaan Pendidikan/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP
- 16) Pengelolaan Pendidikan/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/ Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 17) Pengembangan Kurikulum/ Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar/Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- 18) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 19) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 20) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 21) Perlindungan Perempuan/Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 22) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan/Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan

Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 23) Perlindungan Perempuan/ Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota/ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

5. **Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja**, dengan fokus kebijakan pada :

- c. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
- d. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
- e. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- 1) Pemberdayaan Sosial/ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
- 2) Pemberdayaan Sosial/ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan/ Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

6. **Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal**, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
- c. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya.

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- 1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- 2) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik/Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 3) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan/Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 4) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya/Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota/Pengembangan Cagar Budaya
- 5) Pengembangan Kebudayaan/ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasi.

4.2.12. Inovasi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Berikut disajikan tabel inovasi kebijakan pembangunan yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Tabel 4. 13
Inovasi Kebijakan Pembangunan

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi			
		DIGITALISASI ARSIP LAPORAN KEUANGAN (GITARAN)	Mewujudkan pengelolaan arsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin	Manfaat dari Digitalisasi Arsip Dokumen Laporan Keuangan ini antara lain sebagai berikut: Dengan adanya back up arsip secara digital, membuat arsip dan dokumen-dokumen lain menjadi lebih aman. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, terdapat salinan atau back up arsip secara digital. Sehingga kemungkinan hilang atau rusaknya arsip dapat diminimalisir Penyimpanan arsip secara digital mempermudah dalam penataan arsip. Digitalisasi arsip dapat mempermudah pencarian arsip apabila arsip akan digunakan oleh stakeholder sesuai kepentingannya.
		DOI (Dhateng Olih Izin) DPMPTSP	Memudahkan pemohon khususnya untuk usaha mikro mendapatkan izin yang dibutuhkan / IUMK.	Kecepatan pelayanan perizinan khususnya untuk usaha mikro; & minus; Jangkauan pelayanan yang lebih luas karena langsung dapat menjangkau wilayah kecamatan yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten (Slawi).

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		LAPOR BUPATI [versi Android]	Meningkatkan peran pemerintah melalui membuka akses komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan laporan, keluhan dan lainnya.	Upaya reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik, dengan menyediakan kanal pengaduan
		ALAT PERLENGKAPAN PARKIR PERMBAYARAN ONLINE	1. Untuk menyederhanakan proses pembayaran retribusi parkir, yang dahulu melibatkan banyak pihak menjadi lebih sederhana karena menggunakan metode pembayaran online; 2. Memangkas waktu pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan 1 x 24 jam; 3. Sebagai salah satu sarana dan prasarana yang dapat memberikan segala kemudahan baik dalam hal pembayaran retribusi parkir , program ini juga mampu menyajikan data base kondisi parkir yang ada di Kabupaten Tegal , serta secara real time mampu menyajikan data pendapatan /retribusi parkir yang sudah dibayarkan ;	Manfaat dari inovasi SINGKEREN diantaranya Program ini mampu menyederhanakan mekanisme pembayaran retribusi parkir , menjadi lebih efektif , efisien , transparan dan akuntabel. Kendala lamanya waktu pembayaran retribusi parkir dapat teratasi melalui program ini. Setiap harinya program akan menerbitkan kode id billing , sebagai dasar pembayaran retribusi parkir yang menjadi tanggungan juru parkir. Kode id billing pada setiap juru parkir berbeda beda. Apabila juru parkir pada hari tersebut belum melakukan pembayaran maka akan muncul notifikasi pada program APIKEPOL bahwa tagihan belum terbayarkan. Sedangkan apabila retribusi parkir sudah dibayarkan maka akan muncul notifikasi pada program APIKEPOL bahwa tagihan sudah terbayarkan. Juru parkir akan mendapatkan struk pembayaran dari sistem, sebagai bukti bahwa tagihan sudah dibayarkan.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		ANTOR (ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH)	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat jalan	1. Berkurangnya antrian tunggu obat di instalasi farmasi 2. Meningkatnya standard mutu nasional pelayanan kesehatan (minimal waktu tunggu pelayanan) 3. Meningkatnya kualitas kinerja petugas dalam pelayanan kefarmasian 4. Meningkatnya kepuasan pasien/masyarakat
		APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL I-PUSDAKAB TEGAL	Tersedianya layanan perpustakaan digital yang bisa diakses secara online selama 24 jam melalui smartphone.	Masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan bahan bacaan / referensi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke gedung layanan perpustakaan daerah.
		E-PENDAPATAN	Kemudahan dalam mengirimkan laporan pendapatan dari OPD pemungut pendapatan ke pengelola pendapatan. Percepatan dalam penyajian laporan bagi pengelola pendapatan.	OPD pemungut pendapatan dapat mengirimkan data pendapatan dengan cepat dan mudah. Pengelola pendapatan dapat menyajikan data pendapatan dengan cepat dan akurat.
		E-Retribusi V2	Menyelenggarakan tertib administrasi pengelolaan retribusi dengan cara pemungutan dan pembayaran retribusi secara elektronik; Meningkatkan kepercayaan pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam bidang pelayanan; Efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar;	1. Juru Pungut tidak lagi membawa uang tunai hasil Pungutan; 2. Data pembayaran langsung masuk ke database Aplikasi; 3. Pelaporan sesuai data yang masuk pada Bank Pengampu; 4. Mempermudah Pengawasan; 5. Mempermudah Pelayanan ; 6. Meminimalisir resiko keuangan / mengurangi Kebocoran Pungutan;

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				7. Menyajikan laporan yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel karena tercatat by sistem.
		EPBB - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ELEKTRONIK	Mempermudah monitoring dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Desa/Kelurahan Mempermudah pelayanan mutasi PBBP2 di tingkat Desa/Kelurahan Mempermudah pembayaran PBBP2 di tingkat Desa/ Kelurahan	Monitoring dan pengelolaan PBBP2 lebih mudah di tingkat Desa/Kelurahan. Pelayanan mutasi PBBP2 lebih mudah di tingkat Desa/Kelurahan. Pembayaran lebih mudah di tingkat Desa/Kelurahan.
		INOVASI FORDIS SADEWA (Forum Diskusi Antar Desa Se Kecamatan Warureja)	1. Bertukar informasi tentang Program dan kabar antar pemerintah desa serta koordinasi penyelesaian pekerjaan / permasalahan yang dihadapi oleh masing - masing Desa. 2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan (edukasi) serta pemahaman terhadap realitas tertentu pada pekerjaan yang dihadapi oleh masing- masing desa. 3. Menghasilkan pemahaman yang sama dan benar setelah diadakan forum diskusi untuk Keberhasilan Suatu Kegiatan / kerja.	1. Terciptanya koordinasi kinerja yang baik antara Perangkat Desa dengan kecamatan. 2. Komunikasi dan sharing pekerjaan - pekerjaan yang masih dalam proses dan pertanggungjawaban untuk dapat diselesaikan bersama. 3. Menyatukan visi dan misi untuk menghasilkan pemahaman yang sama dan benar setelah diadakan forum diskusi Fordis sadewa guna menindaklanjuti setiap program.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		INSENTIF PENELITIAN TERAPAN TEMATIK DOSEN	Menciptakan harmonisasi stakeholder (Pemerintah Daerah dan Lembaga akademisi dalam kegiatan riset terapan untuk memecahkan isu/permasalahan pembangunan.	Meningkatkan capaian kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
		Layanan Antar Izin Gratis (LARIS)	Tujuan dari inovasi mesin antrian terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik "Satya Dahayu" adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa tujuan khusus dari inovasi ini adalah: Mengurangi Waktu Tunggu: Salah satu tujuan utama inovasi ini adalah mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam proses antrian. Dengan penerapan sistem antrian terintegrasi, diharapkan pemohon izin atau layanan publik lainnya dapat lebih cepat dilayani, menghindari pemborosan waktu dan meningkatkan produktivitas. Memberikan Informasi	Inovasi Mesin Antrian Terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik "Satya Dahayu" akan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak berwenang yang terlibat dalam proses pelayanan publik. Beberapa manfaat dari inovasi ini adalah: 1. Efisiensi Antrian: Dengan sistem antrian terintegrasi, waktu tunggu masyarakat akan berkurang secara signifikan. Hal ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan publik di "Satya Dahayu". 2. Pengalaman Antrian yang Lebih Nyaman: Proses antrian yang teratur dan terkendali akan menciptakan pengalaman antrian yang lebih nyaman bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik. 3. Informasi yang Jelas dan Akurat: Sistem antrian terintegrasi akan memberikan informasi yang jelas dan

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			yang Jelas dan Akurat: Inovasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang nomor antrian, perkiraan waktu tunggu, dan jenis layanan yang tersedia. Hal ini akan memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang proses antrian yang mereka hadapi. Meningkatkan Kenyamanan Pemohon: Dengan mengoptimalkan proses antrian, diharapkan masyarakat akan mengalami pengalaman antrian yang lebih nyaman dan teratur. Kekacauan dalam antrian dapat dihindari, sehingga memberikan kesan positif terhadap mal pelayanan publik "Satya Dahayu". Meningkatkan Pengawasan dan Monitoring: Inovasi mesin antrian terintegrasi memungkinkan pengawasan dan monitoring yang lebih baik oleh pihak berwenang. Data real-time tentang antrian dan kinerja layanan dapat diakses,	akurat tentang nomor antrian dan estimasi waktu tunggu. Hal ini akan menghindari kebingungan dan memudahkan masyarakat dalam menentukan kapan mereka akan dilayani. 4. Peningkatan Transparansi: Informasi tentang nomor antrian dan status layanan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan publik di "Satya Dahayu". 5. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Baik: Sistem antrian terintegrasi memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara real-time. Data ini akan membantu dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan. 6. Penghematan Waktu dan Biaya: Proses antrian yang lebih efisien akan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. 7. Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Dengan memberikan pelayanan yang lebih efisien, nyaman, dan transparan, kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di "Satya Dahayu" akan meningkat. 8. Peningkatan Citra dan

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			sehingga memungkinkan evaluasi dan perbaikan sistem secara cepat. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan efisiensi antrian dan kenyamanan pemohon yang dihadirkan oleh inovasi ini, mal pelayanan publik "Satya Dahayu" dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meningkatkan Citra dan Reputasi: Implementasi inovasi yang modern dan efisien ini akan membantu meningkatkan citra dan reputasi mal pelayanan publik "Satya Dahayu". Mal ini akan dikenal sebagai tempat yang ramah dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik Lainnya: Keberhasilan inovasi ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pelayanan publik lainnya untuk mengadopsi teknologi informasi dalam	Reputasi: Implementasi inovasi ini akan meningkatkan citra dan reputasi "Satya Dahayu" sebagai mal pelayanan publik yang modern, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 9. Meningkatkan Daya Saing: Dengan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, "Satya Dahayu" akan menjadi lebih kompetitif dalam menarik penggunaan layanan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 10. Inovasi bagi Sektor Pelayanan Publik: Kesuksesan inovasi ini dapat menjadi contoh bagi sektor pelayanan publik lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			meningkatkan kualitas pelayanan.	
		LOAKK (LAIR OLIH AKTA KELAHIRAN KARO KARTU KELUARGA PLUS KIA)	Mempercepat pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Tegal. Meningkatkan efektifitas dan koordinasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan baik bagi Petugas selaku pengelola dan pemberi layanan maupun masyarakat selaku penerima layanan.	Dengan layanan melalui Program LOAKK, manfaat yang diterima masyarakat yaitu lebih mudah dan cepat dalam memperoleh dokumen kependudukan setelah peristiwa kelahiran. Sedangkan bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan angka capaian kepemilikan dokumen kependudukan.
		Pembayaran Retribusi PBG Secara Elektronik (ePBG)	Inovasi ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendorong implementasi inovasi pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung secara elektronik (ePBG). Adapun tujuan spesifik dari inovasi ini adalah sebagai berikut: 1) Mempercepat proses pembayaran: Tujuan utama dari ePBG adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung. Dengan mengadopsi sistem pembayaran elektronik, pemohon dapat melakukan pembayaran secara	Inovasi ini memiliki manfaat yang signifikan dalam pengimplementasian inovasi pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung secara elektronik (ePBG). Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penerapan ePBG: Kemudahan Akses: Penerapan ePBG akan memberikan kemudahan akses kepada pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi. Mereka dapat melakukan pembayaran melalui platform elektronik yang dapat diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi loket pembayaran fisik dan mengurangi keterbatasan geografis atau waktu.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			online dengan cepat dan tanpa harus mengunjungi loket pembayaran fisik. 2) Meningkatkan efisiensi administrasi: Dengan ePBG, proses administrasi terkait dengan pembayaran retribusi dapat diotomatisasi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar, sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan tenaga kerja. 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sistem ePBG dapat mencatat secara otomatis setiap transaksi pembayaran retribusi yang terjadi. Hal ini akan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembayaran dan mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi. 4) Meningkatkan pelayanan kepada pemohon: Dengan adopsi ePBG, pemohon akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat dalam	Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan ePBG, pemohon tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan perjalanan ke loket pembayaran fisik. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien melalui platform elektronik. Ini mengurangi biaya transportasi, biaya parkir, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pembayaran retribusi. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ePBG akan mencatat setiap transaksi pembayaran secara otomatis dan menyediakan catatan digital yang terverifikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembayaran retribusi dan memungkinkan pemohon serta pihak berwenang untuk melacak dan memverifikasi pembayaran dengan mudah. Ini juga mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi dalam proses pembayaran. Peningkatan Efisiensi Administrasi: Implementasi ePBG akan mengurangi beban administratif yang terkait dengan proses pembayaran retribusi. Proses administrasi yang terkait dengan pengolahan dan pencatatan pembayaran dapat diotomatisasi, mengurangi kebutuhan untuk pekerjaan

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			melakukan pembayaran retribusi. Mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan biaya untuk datang ke loket pembayaran fisik, sehingga meningkatkan kepuasan pemohon dalam proses perizinan bangunan. 5) Meminimalkan kesalahan dan keterlambatan: Dengan adopsi ePBG, kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam proses pembayaran dapat dikurangi. Selain itu, proses pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. 6) Mendukung transformasi digital: Implementasi ePBG merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital dalam sektor perizinan dan pembangunan gedung. Hal ini akan membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkannya	manual yang memakan waktu. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengalokasikan sumber daya mereka pada tugas-tugas yang lebih penting dan strategis

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.	
		REMPEYEK (REKAM MEDIK PELAYANAN ELEKTRONIK) RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL	Inovasi Rempeyek (Rekam Medik Pelayanan Elektronik Rawat Jalan) dikembangkan karena untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, mengefisiensi penambahan ruang penyimpanan dokumen rekam medik pasien serta mempermudah laporan administrasi. Tujuan penerapan inovasi Rempeyek sebagai berikut: - Peningkatan kepuasan masyarakat - Efisiensi anggaran - Kecepatan pelaporan administrasi - Penurunan waktu tunggu pasien di rawat jalan	Manfaat dari kegiatan Rempeyek di antara lain sebagai berikut: - Penghematan biaya karena rekam medik elektronik pengelolaannya tanpa kertas dan tidak membutuhkan ruang yang besar dan semakin bertambah untuk pengelolaan berkas dokumen rekam medik kertas. - Mendorong profesionalisme tenaga kesehatan untuk bekerja lebih taat standard dan kompetensi. Dengan rekam medik elektronik sistem rekam medis dapat terstandarisasi. - Mengurangi kesalahan dan kelalaian dalam pencatatan dalam rekam medis. Dengan rekam medis elektronik validasi data dapat dilakukan dengan sistem elektronik. - Mendorong rumah sakit digital berkualitas tinggi menuju e-hospital. Sehingga dapat mempercepat tersedianya data medik untuk pelayanan pasien ataupun dalam pengambilan keputusan manajemen. - Memiliki barang bukti hukum yang valid dan akurat dengan rekam medik elektronik yang terstandarisasi. - Untuk dokter rekam medik elektronik dapat membuat catatan medis yang jelas, rapi, standar sehingga menghindari

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				bahaya medis tersembunyi karena tulisan tangan yang potensial keliru terbaca oleh tenaga kesehatan lainnya.
		Si Pentol (Sistem Pendaftaran Online) RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien rawat jalan	Berkurangnya antrian Pendaftaran Meningkatnya standard mutu nasional pelayanan kesehatan (minimal waktu tunggu pelayanan) Meningkatnya kualitas kinerja petugas Meningkatnya kepuasan pasien/masyarakat Meminimalisir terjadinya kerumunan
		SIMANTAPBAJ A (Sistem Informasi Pemantauan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa)	Tujuan pembuatan aplikasi, sebagai berikut: Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui elektronik (e-procurement) ditinjau dari Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahan-perubahan turunannya. Menjelaskan dan menganalisis hambatan apa saja yang timbul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di Kantor Setda Kabupaten Tegal. Menganalisis upaya	Manfaat yang diperoleh, antara lain: Dapat melengkapi hasil-hasil aplikasi yang lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menambah pengetahuan di bidang hukum, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunan peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tujuan pengadaan dapat tercapai.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			apa saja yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui elektronik (e-procurement) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran belanja pemerintah.	
		SISTEM INFORMASI PENYIMPANAN DOKUMEN ELEKTRONIK PERKANTORAN (PENDEKAR)	Tersedianya aplikasi penyimpanan dokumen/arsip perkantoran secara online dan penyajian dokumen/arsip lebih mudah dan cepat karena sudah dilakukan secara elektronik.	Sistem Informasi Penyimpanan Dokumen Elektronik Perkantoran bisa menghemat anggaran dan ruangan/sarana penyimpanan dokumen manual, dan bisa diakses secara online selama 24 jam dari mana saja dan kapan saja tanpa harus ke kantor untuk mencari dokumen/arsip.
2	Pemerataan Infrastruktur Dasar			
		DATABASE PERUMAHAN FASOS FASUM DI KABUPATEN TEGAL	Tersedianya database fasum dan fasos perumahan secara akuntabel, terpadu, bersifat interaktif dan realistis.b. Sebagai acuan untuk keperluan perencanaan, pemantauan dan pengembangan fasum dan fasos di Kabupaten Tegal	Untuk membantu dalam perencanaan maupun pemantauan kegiatan yang berhubungan dengan fasum dan fasos perumahan agar semakin akuntabel, informatif dan uptodate
		Digitalisasi Geospasial Data Kawasan	Inovasi dibangun dengan tujuan untuk : Mempermudah dalam	Perencana di bappedalitbang baik bidang yang mengampu ataupun bidang lain dapat

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		Permukiman (SPADA)	menginput data kawasan permukiman Mempermudah penyediaan data agar mudah diakses oleh seluruh perencana dan pembuat perencanaan dan kebijakan Menjadikan perencanaan yang lebih efisien Pengambilan keputusan berbasis bukti: Keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkelanjutan Pemantauan dan pengendalian yang lebih baik	menjadikan data kawasan permukiman sebagai data pertimbangan pembuatan kebijakan mempermudah mengetahui kebutuhan penanganan atau perencanaan program yang perlu dilakukan dengan lokasi tepat sasaran
		MATARAM (INFORMASI DIGITAL PEMELIHARAAN JALAN KECAMATAN)	Inovasi Mataram, sebuah aplikasi informasi digital pemeliharaan jalan yang dikembangkan untuk Kecamatan Kramat di Kabupaten Tegal, memiliki berbagai tujuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemeliharaan jalan di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi	A.Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah: 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi SOP pelayanan bidang pekerjaan umum; 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan; 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan UPTD bidang pekerjaan umum; 4) Meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan; 5) Meningkatkan capaian

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			yang lebih proaktif dan partisipatif dalam menghadapi tantangan pemeliharaan infrastruktur jalan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari Inovasi Mataram: 1. Pemeliharaan Jalan yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran: Tujuan utama dari Inovasi Mataram adalah meningkatkan efisiensi pemeliharaan jalan di Kecamatan Kramat. Dengan menggunakan teknologi sensor dan sistem pemantauan yang terintegrasi, aplikasi ini memungkinkan pendeteksian dini kerusakan dan masalah jalan secara otomatis. Informasi ini akan langsung masuk ke dalam sistem, memungkinkan pihak terkait untuk merespons dengan cepat dan melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan proaktif ini, perawatan rutin dan perbaikan jalan darurat dapat dilakukan sebelum masalah memburuk, mengurangi biaya dan upaya yang diperlukan dalam perbaikan.	Renja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. B.Bagi masyarakat adalah : 1.Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengadakan jalan yang rusak; 2.Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses jadwal pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, 3.Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum; 4.Memperlancar moda transportasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat. C.Bagi pemangku kepentingan/stakeholders pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebagai data atau bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan berbasis Geografic Information System (GIS) D.Bagi Pemerintah Daerah Turut berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			2. Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan: Salah satu tujuan krusial dari Inovasi Mataram adalah meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan di Kecamatan Kramat. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan jalan secara cepat, risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat dikurangi secara signifikan. Jalan yang terawat dengan baik juga akan memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan, termasuk pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Inovasi Mataram berusaha mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Aplikasi ini menyediakan fitur pelaporan dari masyarakat, di mana penduduk setempat dapat dengan mudah melaporkan masalah jalan yang mereka	

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			temui. Dengan adanya saluran pelaporan yang mudah diakses dan terintegrasi, masyarakat menjadi bagian dari proses pemeliharaan jalan dan berperan dalam memberikan informasi penting tentang kondisi jalan di lingkungannya. Partisipasi masyarakat ini juga membantu menciptakan iklim kerjasama antara pemerintah dan warga, sehingga meningkatkan tanggung jawab bersama dalam merawat infrastruktur jalan. 4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Inovasi Mataram menyediakan platform informasi yang transparan tentang kondisi jalan, proyek pemeliharaan, dan alokasi anggaran. Data mengenai proyek pemeliharaan dan kemajuan pekerjaan dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui aplikasi ini. Dengan demikian, aplikasi ini memperkuat akuntabilitas pemerintah dan pihak terkait dalam pengelolaan dan	

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			penggunaan dana pemeliharaan jalan. Transparansi ini juga membantu masyarakat untuk lebih memahami alokasi anggaran dan prioritas proyek pemeliharaan, menciptakan kepercayaan dan pengertian yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. 5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Inovasi Mataram bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara keseluruhan di Kecamatan Kramat. Dengan pemeliharaan yang teratur dan efisien, kualitas jalan akan terjaga dan memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di wilayah ini. Jalan yang baik dan terawat juga berkontribusi pada meningkatnya aksesibilitas ke berbagai tempat, memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta membuka peluang investasi dan pariwisata yang lebih	

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			besar. Dengan mewujudkan berbagai tujuan tersebut, Inovasi Mataram berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih terhubung bagi masyarakat di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Inovasi ini dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam upaya menghadapi tantangan pemeliharaan jalan secara lebih efisien dan berkelanjutan di era digital.	
		PEMBUATAN DATABASE JALAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TEGAL	Ada kemampuan menjelaskan pengelolaan data perumahan Penyusunan dan penyediaan basis data mendukung kebijakan	Pemerintah menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman secara lebih baik
		DATABASE PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL	Tersedianya data atau informasi terkait perumahan yang ada di Kabupaten Tegal beserta Fasum Fasosnya yang merupakan upaya awal untuk proses serah terima PSU dari pengembang ke Pemerintah Daerah	Tersedianya database perumahan yang akurat, informatif dan up to date

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		SI JAMBLANG (SISTEM INFORMASI JALAN MANTAP BEBAS LUBANG)	Tercapainya target monitoring prosentase kerusakan jalan tiap tahunnya	A. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah : 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi SOP pelayanan &nbsp;bidang pekerjaan umum; 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemeliharaan dan peningkatan infrastuktur jalan; 3) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan UPTD bidang pekerjaan umum; 4) Meningkatkan ketepatan penggunaan anggaran pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan; 5) Meningkatkan capaian Renja Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Tegal. B. Bagi masyarakat adalah : 1. Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengadakan jalan yang rusak; 2. Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses jadwal pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan, 3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum; 4. Memperlancar moda transportasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan ekonomi rakyat. C. Bagi pemangku kepentingan/stakeholders pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal adalah

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				sebagai data atau bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dalam penanganan kerusakan infrastruktur jalan berbasis Geografic Information System (GIS) E. Bagi Pemerintah Daerah Turut berperan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
3	Lingkungan Hidup			
		TITIR_CETAR (Cepat Tanggap dan Responsif)	Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan alat bantu bagi pengambilan keputusan dalam kebencanaan Kabupaten Tegal serta memberikan informasi yang ditujukan bagi masyarakat luas khususnya terkait kondisi kebencanaan.	Penyediaan sistem informasi kebencanaan di Kabupaten Tegal yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang meliputi, peta dasar dan peta kebencanaan Kabupaten Tegal, informasi terkait sebaran kebencanaan untuk kebutuhan mengambil kebijakan seperti informasi titik lokasi evakuasi bencana, informasi sebaran dan luasan tiap kebencanaan dan data base kebutuhan data terkait kebencanaan di Kabupaten Tegal.
		BANK SAMPAH ANKSA	MEMENUHI TARGET JAKSTRADA KABUPATEN TEGAL	Mengetahui pengurangan sampah dengan mengetahui volume timbulan sampah yang terangkut ke TPA penujuh
		BERLIMPAH (BERKAH MELALUI SAMPAH) RSUD dr.	1. Meningkatnya pengelolaan sampah di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 2. Meningkatkan	1. Lingkungan menjadi lebih bersih nyaman dan sehat di lingkungan kerja 2. Hasil sampah menjadi barang ekonomis

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		SOESELO KABUPATEN TEGAL	kepedulian petugas/karyawan terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar 3. Meningkatkan lingkungan yang bersih, rapi sehat dan nyaman di tempat kerja 4. Dapat pengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna 5. Menjadikan bank sampah Berlimpah sebagai percontohan bagi bank sampah daerah lain yang telah terbentuk maupun akan terbentuk 6. Mengembangkan manajemen pengelolaan bank sampah	3. Berkurangnya volume dan jenis sampah yang dibuang ke TPA 4. Meningkatnya perekonomian pegawai Rumah SakiT 5. Mudah di replikasi
		DESA MERDEKA SAMPAH	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah Meningkatkannya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah Meningkatnya teknologi, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah	
		E-JUKNIS PERTEK (E-book Petunjuk Teknis Permohonan Persetujuan Teknis)	Dalam rangka menjalankan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam Restra yaitu Meningkatkan nilai indeks kualitas udara dan Indeks Kualitas Air maka perlu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait regulasi baru yaitu terkait permohonan persetujuan teknis	Adanya keseragaman dokumen teknis Memudahkan penilai dalam memeriksa dokumen Memudahkan pelaku usaha dalam menyusun dokumen teknis dan memahami alur permohonan persetujuan teknis Meningkatkan kualitas dokumen teknis
		Kabupaten Tegal Tersenyum	Pemberdayaan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup agar fungsi lingkungan hidup dapat terjaga, mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (Go Green), masyarakat dapat hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tegal Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa melakukan sedekah semudah kita tersenyum. Meningkatkan kegiatan sosial di masyarakat desa.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			sehat (Go Health), dan hidup berkah (Go Berkah) dalam pendekatan gerakan sedekah minyak jelantah	
		PantauKu (Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup)	1.Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat . 2.Memudahkan masyarakat/OPD dalam mengakses data kualitas lingkungan	Data menjadi lebih mudah diakses & dan terdokumentasi dengan baik.
		SIMONTIR GOCAR (Sistem Monitoring Tindak Lanjut Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup melalui Google Classroom)	Memudahkan pelaku usaha dan pengawas lingkungan hidup dalam memonitor tenggat waktu pelaksanaan kewajiban/perintah dalam sanksi administrasi. Memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan bukti tindak lanjut sanksi administrasi. Memudahkan koordinasi antar pengawas lingkungan hidup terkait tindak lanjut sanksi administrasi	Mengurangi mobilitas pelaku usaha ke Dinas Lingkungan Hidup (efisiensi waktu) dalam memberikan tindak lanjut kewajiban/perintah dalam sanksi administrasi
		SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN (SIDUL)	Memudahkan masyarakat dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan Hidup	Mengurangi mobilitas masyarakat ke Dinas Lingkungan Hidup & dalam mengurus Persetujuan Lingkungan
		SISTEM INFORMASI PENGUJIAN KENDARAAN	Memberikan pelayanan prima pada masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih	Manfaat dari inovasi SINGKEREN diantaranya Peningkatan perolehan pendapatan asli daerah

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		BERMOTOR NEW GENERATION	bersih dan nyaman bebas dari pungli serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga masyarakat tidak ragu melakukan uji berkala kendaraannya guna menjamin keselamatan berlalu lintas dan laik jalan kendaraan.	retribusi pengujian kendaraan bermotor; Peningkatan pelayanan yang lebih prima, akuntabel, efektif, dan efisien; Tidak adanya lagi potensi pungli dalam pelayanan; masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
		Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tegal (SIRUNTAH BANTAL)	Memudahkan masyarakat maupun stakeholder terkait yang membutuhkan data RTH Publik Kawasan Perkotaan Slawi	Memberikan informasi data secara spasial berbentuk peta maupun data tabular terkait lokasi RTH Publik Kawasan Perkotaan Slawi yang dapat lebih mudah dipahami dan diakses secara digital oleh masyarakat maupun stakeholder terkait yang membutuhkan
		TESTA (Taman Edukasi Sampah Terpadu dan Agrowisata)	Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah Melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah Melaksanakan pengelolaan sampah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah Meningkatkannya kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah Meningkatnya teknologi, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah.	
4	Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan			
		BATIR TEGAL	Mewadahi kolaborasi government-to-government (G2G), Government to Society (G2S), dan Society to Society (S2S) sebagai penanganan dan pemulihan multisektor akibat COVID-19 yang terintegrasi	Mempercepat pemulihan pasca pandemi khusus nya pada sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat
		KENALI SEJARAH TEGAL	Tujuan dari inovasi Kenali Sejarah Tegal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melalui Bidang Kebudayaan telah melakukan kegiatan	Inovasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang luar biasa dalam keberhasilan pembelajaran sejarah kepada generasi muda dan masyarakat, antara lain : 1. meningkatnya sumber

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			untuk mengenalkan sejarah Tegal kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.	sejarah yang tadinya sangat terbatas jumlahnya dan sulit untuk ditemukan, maka dengan inovasi ini mampu meningkatkan jumlah sumber sejarah melalui kenali sejarah Tegal 2. menambah media pembelajaran yang semula pengenalan atau pembelajaran sejarah hanya tekstual atau hafalan maka dengan inovasi ini akan dapat menambah media pembelajaran melalui pengenalan lapangan dan digitalisasi 3. Ketertarikan siswa terhadap pelajaran sejarah lebih meningkat dibandingkan mereka hanya mendengarkan guru bercerita 4. Sebagai salah satu metode pembelajaran sejarah dengan mengedepankan aspek afektif dan psikomotorik Kenali sejarah melalui digitalisasi mampu mempercepat peningkatan dan efisiensi dalam penyaluran informasi Sejarah Tegal
		Akselerasi pemBANGunan melalui Kolaborasi UMKM-WirausahaA Kabupaten	Mengakselerasi pemulihan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan jiwa wirausaha dan pembangkitan UMKM sekaligus dalam rangka	Meningkatkan ekonomi pemuda Kabupaten Tegal

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		Tegal (ABANG KUWAT)	menekan angka kemiskinan dan pengangguran	
		Wirausaha Pemuda	Pengentasan pengangguran Usia Pemuda melalui kemudahan akses Aplikasi dan partisipasi di Program Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal	Pemuda Kabupaten Tegal lebih mudah (efektif dan efisien) dalam merencanakan dan merealisasikan ide gagasan bisnisnya melalui Aplikasi Wirausaha Pemuda (lebih mudah mengakses dan berpartisipasi di Program Wirausaha Pemuda). Pemuda Kabupaten Tegal lebih mudah memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usahanya
		DOLAN (dodolan Online) V2	Mempromosikan produk UMKM asli Kabupaten Tegal, melalui pemasaran virtual.	Produk Asli Kabupaten Tegal dapat lebih dikenal secara luas ; Pelaku Usaha Lokal mampu memasarkan Produknya secara mobile; Meningkatkan volume pemasaran produk asli Tegal oleh Pelaku Usaha Lokal; Memudahkan Konsumen untuk berbelanja Produk Asli Tegal;
		Kandang komunal sebagai usaha pengembangan peternakan sapi potong masyarakat Desa Dukuh Tengah	Mengoptimalkan peternakan sapi potong rakyat dengan konsep kandang komunal	Keuntungan yang diperoleh peternak dan masyarakat sekitar dengan adanya kandang komunal, yaitu adanya peningkatan derajat kesehatan ternak dan lingkungan sekitar, keamanan ternak lebih terjamin, dan dapat mengefisienkan waktu pemeliharaan dan tenaga kerja. Selain itu, manfaat sistem kandang komunal adalah memudahkan transfer inovasi teknologi, karena komunikasi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				tidak perlu dilakukan dengan cara menemui petani satu persatu, melainkan cukup dilakukan di kandang kelompok maupun dalam pertemuan rutin setiap bulan. Menurut Edwina et al. (2010), kelompok mempunyai fungsi sebagai tempat pembinaan yang memudahkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dikarenakan kelompok memiliki kegiatan budidaya yang sama, terjadi proses belajar bersama, dan adanya tanggung jawab bersama atas program bantuan yang diberikan. Penyuluhan melalui pembinaan kelompok telah menumbuhkan penerapan zooteknik beternak sapi potong pada tingkat yang cukup tinggi dan tinggi (Isbani 2002).
		Klinik Industri	Klinik Industri dibentuk dengan tujuan: Menjadi wadah bagi pelaku IKM untuk berkonsultasi mengenai pengembangan usahanya; Mendekatkan layanan dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal kepada pelaku IKM yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Tegal;	Manfaat dari Klinik Industri antara lain sebagai berikut: Memberikan solusi bagi Pelaku usaha Industri Kecil Menengah ketika dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan usahanya; Mendekatkan dan menipiskan "gap informasi" terkait dengan semua aspek yang berkaitan dengan dunia industri antara pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Pemerintah; Bentuk nyata pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			Memperluas jangkauan pelayanan dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal; Memberi layanan dengan lebih efektif dan efisien kepada pelaku IKM; Meningkatkan daya saing industri; Mendukung inovasi dan pengembangan produk pelaku IKM; Memperluas Jaringan Bisnis IKM Meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri. 	khususnya pelaku usaha Industri Kecil Menengah.
		KREDIT BERKAH (BERTAMBAH KEBAIKAN HIDUP) MELAWAN RENTENIR SECARA ONLINE	Tujuan dengan dilaunchingnya produk Kredit Berkah adalah sebagai berikut : Memajukan dan Mengembangkan Pelaku Usaha UMK di Kabupaten Tegal. Mengurangi ketergantungan/Pengaruh entitas kredit informal/Legal (Pelepas Uang luar/rentenir)	Bagi Masyarakat dengan adanya kredit Berkah mendapatkan manfaat dari dalam hal pendanaan tanpa agunan dengan bunga yang rendah. Bagi Perangkat Daerah dapat Kemudahan dan kecepatan proses penyusunan dokumen perencanaan. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Tercapainya visi dan misi Bupati Tegal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peran serta perempuan.
		KURDA (KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH)	Maksud dari pelaksanaan program KURDa kepada usaha mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku	Program KURDa kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam menanggulangi dampak covid-

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional. Adapun tujuan dari program ini adalah untuk : a. Pembelajaran kepada usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan b. Membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan pelepas uang c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan d. Untuk dapat membantu likuiditas dan permodalan pelaku usaha mikro agar dapat bertahan di masa pandemi covid-19 dengan suku bunga yang lebih kompetitif. e. Turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Tegal.	19 dan untuk meningkatkan kemampuan permodalan usaha mikro di Kabupaten Tegal. Program ini sangat strategis karena dapat menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha mikro. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan pemulihan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Tegal. Persetujuan Bupati Tegal atas usulan pinjaman tanpa bunga kepada PT BPR Bank TGR untuk disalurkan kepada pelaku usaha mikro dengan bunga murah dapat direalisasikan disamping dukungan dan peran serta semua pihak sangat membantu suksesnya program ini.
		PENDAMPINGAN NASABAH KURDA UMKM	Secara umum, berlangsungnya pertumbuhan kegiatan UMKM cenderung organik dan umumnya digerakkan oleh individu atau anggota	Bagi pelaku usaha (UMKM) penerima kredit setelah mendapatkan pendampingan usaha dapat mengelola usahanya dengan baik, dan memaksimalkan modal dan mengurangi biaya produksi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			keluarga, membuat keahlian&nbsp; dalam hal pengelolaan usaha cenderung lemah. Sedikitnya anggota penggerak dalam suatu unit UMKM membuat fokus pekerjaan hanyalah pada produksi produk. Walaupun saat ini terdapat kemudahan berusaha bagi UMKM secara online seperti pemasaran e-commerce atau seri pembelajaran manajemen pengelolaan usaha, dan lain lain , rupanya upaya ini masih dirasa cukup sulit terutama bagi umkm yang kurang menguasai teknologi. Adapun tujuan Pendampingan Usaha bagi UMKM penerima kredit KURDa, adalah : Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha UMKM tersebut Mampu merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dalam pengembangan usahanya. Mampu menguasai manajemen usaha mulai dari rantai pasok bahan baku hingga pemasaran hasil akhir	yang tidak perlu, yang pada akhirnya bisa mengembalikan pinjaman secara tepat waktu.Dari sisi Bank, adalah terjaganya NPL pada tingkat yang wajar dan terkendali

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			produksinya Adapun tujuan Pendampingan Usaha dari sisi Bank adalah, bisa menjaga tingkat kelancaran pinjaman dari UMKM penerima kredit, karena bisa mengantisipasi secara dini bila terjadi kredit macet.	
		Pengembangan Biopestisida Dalam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan	Mencakup target capaian penyelenggaraan inovasi (apa yang ingin diubah inovasi) Tujuan inovasi ini adalah untuk menyediakan beragam produk formulasi biopestisida yang telah teruji efektifitasnya, mudah aplikasinya dan murah didapat sehingga dapat mendukung terwujudnya pertanian yang ramah lingkungan, meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi biaya produksi. Kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat atau menjadi target inovasi adalah para pelaku usaha di sektor pertanian (petani). Produk inovasinya adalah ragam formulasi biopestisida yang dikemas dalam	Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi pengembangan biopestisida memberikan kontribusi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman, membantu menjaga ekosistem dan memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Penurunan penggunaan pestisida kimia dan peningkatan penggunaan biopestisida akan berdampak positif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu beberapa produk biopestisida yang dikembangkan memiliki fungsi sebagai biofertilizer yang terbukti dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman sehingga inovasi ini memberikan kontribusi dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			kemasan siap pakai dan isolat murni agens hayati yang bisa diperbanyak sendiri oleh petani.	
		Pengembangan Padi Organik Kabupaten Tegal Dengan Teknologi Mikroba-intensif	Meningkatkan kesejahteraan petani organik Meningkatkan luasan lahan pertanian organik	Meningkatnya produktivitas padi organik
		SIMPASAR (Sistem Informasi Manajemen Pedagang, Stok dan Harga Pasar Rakyat Kab. Tegal)	Inovasi SIMPASAR bertujuan untuk menyampaikan Informasi kepada Masyarakat untuk mengetahui Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting	Bagi Masyarakat, manfaatnya adalah Masyarakat akan semakin mudah mengakses Informasi Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting yang tersedia di Pasar melalui Gadget (Smartphone, Laptop) tanpa harus menuju Pasar; Bagi OPD, manfaatnya adalah OPD dapat mengetahui Informasi Harga dan Stok Ketersediaan Barang Pokok Penting dengan lebih cepat, sehingga dapat melakukan kebijakan yang dianggap perlu dengan lebih cepat pula apabila terjadi kenaikan Harga secara signifikan maupun kekurangan stok barang tertentu.
		TEGAL VIRTUAL TOURISM	Untuk memperkenalkan beberapa tempat wisata di Kabupaten Tegal secara luas melalui Virtual Tour sebagai strategi promosi yang interaktif.	Meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada DTW yang ditawarkan dan Meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata.
		Tegalan Batik Festival	Mewujudkan kolaborasi antara usaha pariwisata	Meningkatkan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi pengrajin batik

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		Kabupaten Tegal (TELIK)	dan UMKM dari industri batik lokal	
5	Kualitas Sumber Daya Manusia			
		aPLIKASI E LITERASI	untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya degradasi terhadap minat berliterasi. memunculkan generasi penerus bangsa yang inovatif dan kreatif.	MENINGKATKAN LITERASI PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z
		GENIT BAE (Gerakan Monitoring Bayi ASI Eksklusif)	Tujuan Umum : Meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan menurunkan angka stunting. Tujuan Khusus : 1. Ibu bayi mengetahui pentingnya ASI Eksklusif 2. Ibu bayi memahami cara pemberian ASI yang baik dan benar 3. Menaikan cakupan ASI Eksklusif 4. Menurunkan angka Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Danasari	Dapat meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan menurunkan angka stunting. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat : Menambah wawasan, pengetahuan dan cara menyusui yang baik dan benar.
		KEREN MOBILE - (KELUARGA TERENCANA) MOBILE	Tersosialisasinya materi yang berkaitan dengan kespro remaja dan PKBR(Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja)sehingga semakin banyak remaja yang bisa meng akses kesehatan reproduksi remaja. Dengan semakin banyaknya	Semakin banyak remaja yang menerima materi semakin banyak pendidik sebaya dan konselor sebaya dan semakin banyak peluang tersebarnya materi sosialisasi pada kelompok remaja sebaya melalui organisasi kepemudaan, kelompok kegiatan remaja dll. Tak hanya terbatas pada tersebarnya

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			remaja yang mmeng akses informasi tentang kesehatan reproduksi remaka akan makin banyak remaja yang meng eestafetkan informasi kesehatan reproduksi remaja kepada teman sebayanya	informasi secara langsung, remaja juga akan makin kreatif membuat konten tentang materi kespro melalui medsos yang mereka punyai. Di era digital ini penyampaian infromasi lewat medsos cukup efektif.
		MELATI PAGIKU (Melayani Sepenuh hati Penderita Gangguan Jiwa dan Keluarga)	Melakukan deteksi dini orang dengan ODMK/ODGJ Meningkatkan peran serta kader kesehatan jiwa Mensosialisasikan melalui media massa baik online maupun offline Membantu pengobatan pasien ODGJ semaksimal mungkin baik di puskesmas ataupun rujuk ke Rumah Sakit	Meningkatkan akses layanan Kesehatan Jiwa kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Pangkah melalui pendekatan keluarga, pemberdayaan dan kemitraan Lintas sektoral serta kerjasama Lintas Program sehingga tercapai derajat Kesehatan yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat.
		PAGUYUBAN MOTIVATOR KESEHATAN IBU DAN ANAK PUSKESMAS ADIWERNA (PAMORINA)	Tujuan Umum : Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak secara menyeluruh Tujuan Khusus a.Menurunkan AKI dan AKB b.Meningkatkan Cakupan K1 c.Meningkatkan Cakupan K4 d.Meningkatkan Cakupan Persalinan Nakes e.Meningkatkan Kun	Kegiatan kader Motivator kesehatan ibu dan Anak dalam mengawasi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir sangatlah bermanfaat karena ibu hamil yang berada di suatu wilayah akan terdaftar, selanjutnya akan mendapatkan pelayanan dari Tenaga kesehatan , ibu bisa mengerti kondisi kehamilan yg sedang dilalui, bisa lebih waspada terhadap kehamilannya terutam bila terjadi tanda tanda kegawatdaruratan, ibu yg

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			j. Meningkatkan Kunjungan Ibu Nifas g. Meningkatkan Cakupan Penanganan Komplikasi Maternal dan Neonatal h. Meningkatkan Cakupan KB aktif i. Meningkatkan Cakupan UCI j. Meningkatkan Cakupan ASI Eksklusif k. Meningkatkan Cakupan MTBSM	bersalin merasa nyaman karena ada kader yg bisa mendampingi sampai ketempat pelayanan , setelah masa nifas ibu merasa lebih diperhatikan karena kader sudah mempunyai bekal dalam mengenali kesehatan ibu dan bayi . Ibu hamil dengan resiko tinggi akan mendapatkan pengawasan yang lebih insentif baik dari kader motivator maupun tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya.
		PENINGKATAN LAYANAN RAWAT JALAN DENGAN SIPUT PERKASA TERINTEGRASI DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL	meningkatnya pendapatan rumah sakit yang di tandai kondisi- kondisi. Tingkat kunjungan pasien rawat jalan meningkat. Angka kepuasan masyarakat meningkat	Dengan adanya inovasi ini maka diharapkan tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat termasuk juga kepercayaan masyarakat terhadap stakeholder lainnya. Disamping itu juga dengan adanya inovasi ini maka diharapkan angka harapan hidup masyarakat kabupaten tegal semakin tinggi dan tentunya sesuai dengan tujuan RPJMD dan sasaran RPJMD kabupaten tegal
		SIGAP TANGI (akSI tangGAP TANGani masalah gizi)	Tujuan Umum : Tersedianya pedoman bagi Programmer Gizi dalam melaksanakan Inovasi Penanganan masalah Gizi SIGAP TANGI. Tujuan Khusus : 1. Terlaksananya pelayanan perawatan TFC rawat inap bagi gizi buruk dan stunting.	Stunting dan gizi buruk dapat terjaring lebih cepat dan dapat ditangani secara dini dan komprehensif Balita Gizi buruk dengan komplikasi atau tanpa komplikasi dilaksanakan upaya pemulihan dengan tatalaksana gizi buruk rawat inap TFC Balita stunting, Gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			2. Terlaksananya kegiatan Posyandu Terpadu(POSGITER) di Tingkat Puskesmas secara optimal. 3. Terlaksananya tata laksana rawat jalan bagi gizi buruk dan stunting. 4. Terlaksananya Pendampingan Gizi buruk sesuai kriteria yang ditetapkan. 5. Terlaksananya EDZI MOBILE(Edukasi Gizi Mobile) bagi gizi buruk pasca pemulihan. 6. Terbentuknya Desa Peduli Gizi Buruk /CFC. 7. Terlaksananya kegiatan Pos Gizi /CFC8. Terlaksananya Kelas CFC sesuai sasaran. 9. Terlaksananya Penelitian dan pengembangan (LITBANG) berkaitan pemulihan masalah Gizi dan Stunting.	dapat terpantau baik klinis maupun status gizinya dengan rawat jalan TFC Keluarga Gizi buruk pasca rawat inap maupun dengan kriteria tertentu mendapatkan pendampingan gizi secara komprehensif Keluarga Balita gizi buruk dan stunting dengan kriteria yg ditentukan mendapatkan edukasi gizi Terbentuknya Desa Peduli Gizi Buruk (CFC) Terlaksananya pos Gizi CFC di Desa CFC Terlaksananya kelas balita CFC di wilayah Puskesmas Bumijawa Menjadikan masyarakat tertarik untuk Menyusui secara ASI Eksklusif sebagai upaya pencegahan stunting dan gizi buruk lewat kegiatan Garang ASI desa dan Garang Asi tk. Kecamatan Terbentuknya Kelompok peduli Asi dari Unsur ORMAS sebagai upaya pencegahan stunting dan Gizi buruk Terlibatnya masyarakat , lintas program, lintas sektor maupun lintas OPD dalam upaya pencegahan dan pemulihan gizi buruk dan stunting di wilayah kerja Puskesmas Bumijawa
		Asesmen Berbasis Gamifikasi (ABG)	Tersedia inovasi Asesmen Berbasis Gamifikasi yan dapat diakses oleh guru dan siswa kapanpun dan	Siswa lebih mudah mengakses asesmen/ penilaian pembelajaran menggunakan gawai mereka dan menumbuhkan motivasi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			dimanapun melalui smarphone.	belajar. Adapun manfaat bagi guru, guru dapat memanfaatkan ABG ini agar pekerjaan terkait evaluasi terhadap siswa lebih efektif dan efisien. Selain berhemat waktu dalam menganalisis soal-soal asesmen, juga menghemat penggunaan kertas.
		BALAKURAWA (BERI ASUHAN LANGSUNG KUNJUNGAN KELUARGA RAWAN)	Meningkatkan kemandirian individu, keluarga, kelompok atau masyarakat (rawan kesehatan) untuk mengatasi masalah kesehatan dengan pelayanan keperawatan sesuai kewenangannya sehingga tercapai peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal	Individu dan keluarga mampu mandiri dalam merawat diri sendiri atau keluarga sebagai upaya meningkatkan kesehatannya. Terintegrasinya semua program yang ada di puskesmas Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
		GEMASTING (Gerakan Masyarakat Sadar Stunting)	Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan bagi Balita Stunting berdasarkan Hak Azasi Manusia Untuk mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting pada bayi dan balita dan evaluasi perkembangan status gizi balita	Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi1. Pemberdayakan keluarga yang mempunyai Balita Stunting2. Keterlibatan Lintas sektoral dalam penanganan dan penurunan Balita Stunting di wilayah kerja Puskesmas Kupu
		GENIT BAE (GERakan moNIToring Bayi Asi Eksklusif)	Tujuan Umum : Meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan menurunkan angka stunting. Tujuan Khusus :	Dapat meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan menurunkan angka stunting. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat : Menambah wawasan, pengetahuan dan

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			1. Ibu bayi mengetahui pentingnya ASI Eksklusif 2. Ibu bayi memahami cara pemberian ASI yang baik dan benar 3. Menaikan cakupan ASI Eksklusif 4. Menurunkan angka Stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Danasari	cara menyusui yang baik dan benar.
		GEPENG TAFEMIA (Gerakan Pengawasan Minum Tablet Fe Cegah Anemia)	Meningkatkan kepatuhan ibu hamil minum tablet Fe Menambah pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya minum Fe Memudahkan dalam melakukan evaluasi kepada pasien hamil Menurunkan Kejadian Anemia Menurunkan AKI dan AKB Menurunkan bayi lahir premature	Mempermudah mengevaluasi ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe Meningkatkan kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet Fe Meningkatkan kualitas pelayanan di poli KIA Mempercepat penurunan kejadian anemia Menurunkan stunting Menurunkan AKI dan AKB
		KAFETA (Kafe Bayi dan Balita)	Tujuan umum Kafeta adalah menyediakan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebagai pemenuhan nutrisi bayi & balita yang dikelola oleh desa melalui kader kesehatan yang sudah dibekali pengetahuan mengenai PMBA (Pemberian Makan Bayi & Anak) dengan menggunakan anggaran Dana Desa.	Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi Lebih jauh lagi, Kafeta diharapkan mempunyai dampak positif: (1) peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi & kesehatan melalui konsultasi gizi atau melalui media sosial, (2) pemberdayaan serta peningkatan kemampuan & peran serta kader dalam upaya mencegah kekurangan gizi pada bayi balita,

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			Makanan yang disediakan di Kafeta diberikan secara gratis bagi sasaran dengan masalah gizi dan dijual dengan harga terjangkau kepada sasaran lain.	(3) peningkatan peran serta desa sektor lain dalam pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting, (4) peningkatan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting.
		KURMAPATI (KUNJUNGAN RUMAH PASIEN TB)	Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Penderita TBC bagi PENDERITA TBC berdasarkan hak asasi manusia.	Dampak (outcomes) terhadap penerapan inovasi : 1. Pemberdayagunakan keluarga yang mempunyai PENDERITA TBC untuk pengawasan, perawatan dan pemberian obat. 2. Keterlibatan Lintas sectoral dalam penanganan dan pengawasan PENDERITA TBC di wilayah kerja Puskesmas Jatinegara.
		Pelayanan Responsif GEDSI (Gender Equality and Social Inclusion)	Pelayanan responsif GEDSI yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Tirta Ayu bertujuan untuk memastikan agar tidak ada kelompok masyarakat maupun pelanggan yang diabaikan atau ditinggalkan oleh perusahaan dalam seluruh aspek layanannya (no one left behind), sesuai dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mulai dari diseminasi informasi, administrasi pemasangan baru, penyediaan air dengan	Inovasi pelayanan ramah GEDSI dapat menjadi terobosan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Pelayanan inklusif diberikan langsung kepada pelanggan yang datang dan diwujudkan dengan adanya bangunan dan gedung yang aksesibel bagi seluruh kelompok termasuk kelompok rentan. Peningkatan aksesibilitas mengakomodir kebutuhan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas maupun berkebutuhan khusus yang diwujudkan dengan penyediaan jalan landai, kursi roda, toilet khusus penyandang disabilitas, rambu dan tempat parkir khusus bagi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			kualitas yang sesuai dengan standard kesehatan, sampai dengan pelayanan pengaduan. Tujuan akhir dari pelayanan responsif GEDSI adalah agar semua anggota masyarakat di Tegal dapat menikmati manfaat air bersih air minum dengan akses yang mudah dan terjangkau, sebagaimana pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6.	penyandang disabilitas dan ruang laktasi. Pembangunan aksesibilitas ini sesuai dengan Pedoman Pengarusutamaan GESI Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Peningkatan aksesibilitas juga berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat dilihat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat Perumda Air Minum Tirta Ayu tahun 2022 secara global dengan hasil 81,233 (Baik). Peningkatan juga ditunjukkan dalam unsur sarana dan prasarana dari skor 2,983 (kategori kurang baik) di tahun 2021 menjadi 3,340 (kategori baik). Sosialisasi inklusif adalah sosialisasi yang menjangkau dan dapat diakses seluruh anggota masyarakat tanpa terkendala oleh gender, umur, keterbatasan fisik, maupun faktor penghalang lainnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh audiens yang berpartisipasi tanpa terkecuali, dan audiens dapat memberikan umpan balik. Sosialisasi inklusif dilaksanakan dengan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat pada umumnya dan pelanggan pada khususnya yang merata kepada seluruh kelompok. Sosialisasi inklusif dipedomani dengan Panduan Sosialisasi

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				Inklusif Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal. Penerapan sosialisasi inklusif sudah diterapkan di tahun 2022, meskipun baru terlaksana satu kali karena terkendala pandemi Covid-19, kedepannya akan dijadikan pedoman untuk pelaksanaan sosialisasi. Selain dengan sosialisasi, keterbukaan akses informasi bagi semua kelompok juga didapatkan melalui adanya akses media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube), layanan Call Center 24 jam serta kerjasama dengan beberapa organisasi non pemerintah yang ramah disabilitas seperti Difabel Slawi Mandiri (DSM). Informasi yang aksesibel dan sosialisasi inklusif juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam Survey Kepuasan Masyarakat dalam unsur prosedur dengan skor 3,130 (baik) serta unsur prosedur online, yang memiliki skor 3,283 (Baik). Dengan adanya kedua inovasi tersebut juga berpengaruh dalam peningkatan jumlah pelanggan ditengah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Sesuai Laporan Tahun 2021 jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal mencapai 52.000 SR, meningkat sebesar 6,63% dari tahun 2020 dengan total

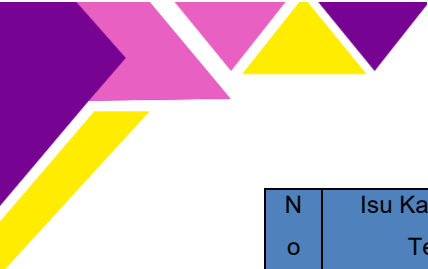
No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				pelanggan 45.648 SR. Eksistensi pelaksanaan inovasi juga diawasi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Monev dilakukan secara internal dengan manajemen dibantu dengan pihak ketiga, dalam hal ini Konsultan.
		PORTAL JAWA (POJOK LITERASI BUMIJAWA)	Tujuan utama inovasi ini adalah untuk meminimalisir kebosanan dan kejenuhan masyarakat ketika menunggu proses administrasi; Menciptakan kenyamanan masyarakat ketika menunggu proses administrasi dengan membaca; Menambah pengetahuan masyarakat dengan menambah literatur	Meminimalisir kejenuhan masyarakat ketika menunggu proses administrasi Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya baca masyarakat dengan literatur
		Rumah Paten Ramah Anak (MANTEN MANAK)	Menyediakan ruang paten yang memberi kenyamanan pada anak	Masyarakat merasa nyaman ketika datang ke rumah paten walaupun dengan membawa anak
		RUMAH PELITA (Rumah Pemulihan Gizi Balita)	Tujuan utama pelaksanaan Rumah Pelita adalah untuk membantu memulihkan kondisi gizi balita yang mengalami kekurangan gizi atau malnutrisi. Namun, selain itu, ada beberapa tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan Rumah Pelita antara lain:	Rumah Pelita memiliki banyak manfaat yang dapat memberikan dampak positif bagi balita yang mengalami stunting dan kekurangan gizi akut dan keluarganya diantaranya: Meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, balita yang mengalami stunting/kekurangan gizi akut akan diperiksa kesehatannya

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			1.Mencegah timbulnya masalah gizi pada balita di masa depan dengan memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pola hidup sehat kepada keluarga dan masyarakat. 2.Memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terpadu kepada balita yang mengalami kekurangan gizi, termasuk pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi. 3.Meningkatkan kualitas hidup balita dan membantu memperbaiki kondisi kesehatannya. 4.Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan keluarga dalam merawat dan mengasuh balita dengan baik. 5.Mendorong partisipasi masyarakat dan keluarga dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk pada balita. 6.Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi balita yang membutuhkan	oleh dokter Puskesmas dan dirujuk ke rumah Sakit sesuai prosedur, memberikan PMT yang berbasis pangan lokal yang padat gizi secara gratis untuk meningkatkan nafsu makan sehingga membantu balita yang mengalami malnutrisi untuk meningkatkan BB, TB, dan memperbaiki kondisi kesehatannya, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, memberikan dukungan psikososial bagi balita dan keluarga selama masa penanganan di rumah Pelita, dan dapat membantu meningkatkan motivasi balita dan keluarga untuk terus mematuhi program, serta mencapai target penurunan angka balita stunting. Dengan adanya rumah pemulihan gizi balita, balita yang mengalami masalah gizi buruk memiliki kesempatan untuk pulih secara optimal dan mengalami perbaikan dalam kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup mereka.

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			perawatan khusus. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan program Rumah Pemulihan Gizi (RPG) Balita dapat membantu mengurangi angka kekurangan gizi pada balita dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masa depan.	
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Trengginas	Percepatan penanganan masalah sosial yang ada di Kabupaten Tegal	Permasalahan sosial dan layanan sosial dapat terselesaikan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
		VISUALISASI DATA MELALUI PEMETAAN BALITA STUNTING DI DESA BUMIJAWA, KECAMATAN BUMIJAWA, KABUPATEN TEGAL	memberikan gambaran atau visualisasi penyebaran kasus stunting di Kabupaten Tegal secara digital dan mempermudah proses intervensi yang dilakukan pihak-pihak terkait	1. Data bersifat dinamis sehingga dapat diperbarui secara berkala, 2. Menunjukkan sebaran data balita stunting 3. Mengetahui lokasi serta rute menuju rumah balita stunting dengan akurat.
6	Menekan Laju Kemiskinan			
		Aplikasi New Order Sembako (SINOke) Dinas Sosial	Tujuan Aplikasi New Order Sembako (SINOke) adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Masyarakat khususnya penerima Program Bantuan Sosial Sembako Mempermudah Penerima Program	Meningkatkan peran aktif penerima program bantuan sosial sembako akan hak dan kewajibannya Meningkatkan kinerja OPD dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan program Memfasilitasi pedagang kecil dan petani lokal agar dapat berperan serta dalam program bantuan sosial sembako

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
			Bantuan Sosial Sembako dalam memilih dan memesan komoditi sembako yang dibutuhkan Menggerakkan roda perekonomian dengan pemberdayaan komoditi lokal dengan melibatkan pedagang kecil dan petani lokal. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pengentasan kemiskinan Mempermudah monitoring, evaluasi dan pelaporan program Meningkatkan kredibilitas Dinas Sosial selaku pelaksana program bantuan sosial sembako Memperbaiki pola pikir penerima program bantuan sosial sembako Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi	
		Biaya Hidup Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu/Keluarg	Melindungi hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.	Biaya hidup diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi penunggu pasien tidak mampu selama menjalani rawat inap di rumah

No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
		a Miskin (Living Cost)	Mendapat jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/ duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial di bidang kesehatan, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	sakit rujukan sehingga bisa mengurangi beban pengeluaran.
7	Menekan Laju Pengangguran			
		AVOCADO (Aplikasi Lacak Data Pelaku Usaha Kabupaten Tegal)	Menyediakan database pelaku usaha di Kabupaten Tegal	Manfaat dari ide gagasan pembuatan sistem informasi atau aplikasi lacak data pelaku usaha Kabupaten Tegal 'Avocado' ini antara lain sebagai berikut: 1. Menyediakan database pelaku usaha, utamanya yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.



No	Isu Kabupaten Tegal	Inovasi		
		Nama Inovasi	Tujuan Inovasi	Manfaat Inovasi
				2. Memudahkan pelacakan dan pencarian data pelaku usaha. 3. Memudahkan updatting atau pembaharuan data pelaku usaha.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan pada kebijakan umum serta arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2026 dapat ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah pada tahun 2026 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai berikut :

**Tabel 5. 1 Kerangka Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2026**

KODE	URAIAN	2026
1	PENDAPATAN DAERAH	3.028.586.747.600
1.1	Pendapatan Asli Daerah	742.004.972.600
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	364.441.592.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	352.395.276.600
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.161.104.000
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	6.007.000.000
1.2	Pendapatan Transfer	2.286.581.775.000
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.129.710.423.000
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39.442.862.000
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.269.645.138.000
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	510.436.651.000
1.2.1.6	Dana Desa	310.185.772.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	156.871.352.000
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	156.871.352.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0
2	BELANJA	3.143.586.747.600
2.1	Belanja Operasi	2.334.590.098.745
2.1.1	Belanja Pegawai	1.266.483.795.152
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	937.351.196.093
2.1.3	Belanja Hibah	87.257.595.500
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	43.497.512.500
2.2	Belanja Modal	299.172.023.855
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	499.824.625.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	39.459.958.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	460.364.667.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(115.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	121.000.000.000
3.1.1	SiLPA	120.000.000.000
3.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.000.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000

KODE	URAIAN	2026
3.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan	0

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III disebutkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tegal kedepan diproyeksikan akan terus meningkat.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu belanja daerah yang bersifat mandatory juga menjadikan proyeksi belanja daerah semakin meningkat. Dengan adanya mandatory terkait pendanaan yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya, belanja diprioritaskan untuk pencapaian SPM dan pelayanan publik.

Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Penurunan angka stunting juga merupakan prioritas dalam kebijakan belanja daerah.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum / kewilayahan.

5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum
Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *soft skill*.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.
- e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
Program ini diarahkan pada pengendalian penggunaan bahasa daerah dalam pembelajaran di Sekolah. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di sekolah.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; pembinaan dan dukungan dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan kabupaten; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.

- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase melalui peningkatan prasarana sarana drainase, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan jaringan drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten.
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis kabupaten; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah melalui pemeriksaan keandalan bangunan dan pendataan teknis bangunan gedung milik daerah. Indikator kinerja program ini adalah Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten meliputi peningkatan jalan menuju standart, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan rehabilitasi / penggantian jembatan pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru, peningkatan kualitas rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin, serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah kabupaten.
 - b. Program Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.
 - c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sebelumnya rehabilitasi RTLH berupa bantuan keuangan kepada desa. Program ini diarahkan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase penanganan perumahan tidak layak huni.
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).
 - b. Program Penanggulangan Bencana
Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan system peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas, penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran dan upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang dalam kabupaten.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial dan bantuan kelompok usaha bersama.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan.

5.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri, pelatihan kerja di bidang pertanian, pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja, pelayanan berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga

kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum Kabupaten (UMK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa *stunting* dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.
4. Pertanahan
Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten/kota
 - b. Program Penatagunaan Tanah
Program ini diarahkan pada kegiatan penataan tanah yang tertata di daerah kabupaten, serta untuk mencapai indikator kinerja program ini yaitu Persentase Tanah yang tertata.
5. Lingkungan Hidup
Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten.
 - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH.
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait Pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara,

- serta fasilitasi penilaian / pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan /AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/ UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup / DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak.
 - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat peduli lingkungan dengan indikator kinerja yaitu Persentase kenaikan Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan untuk masyarakat.
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
 - j. Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dan pengelolaan persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST).
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten melalui bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil dalam kabupaten, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten.
 - b. Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi serta pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.
 - c. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten, dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi

kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di dalam kabupaten.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe C berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan kabupaten.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di kabupaten.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas

produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Kabupaten dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data, dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan *jamming*.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan Kabupaten sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum kabupaten.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten dan perangkat daerah.

5.3. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan dan kenelayanan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan fasilitasi perizinan kapal perikanan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di

- perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).
 - d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di kabupaten melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.
2. Pariwisata
- Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya Tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten; perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; penerbitan tanda usaha pariwisata dalam kabupaten; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta

pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian, pembentukan korporasi, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi BPP dan TPP, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian, peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani, pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyak benih padi, serta perbanyak/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh, pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalaya, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, dan Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi kabupaten serta bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).
 - c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam kabupaten yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.
 - d. Program Pengembangan Ekspor
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan pada satu daerah kabupaten/kota dan penguatan ekspor Kabupaten dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).
 - e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di daerah kabupaten melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di daerah kabupaten melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.
 - f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM Kabupaten.
5. Perindustrian
- Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline*

dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan pelatihan transmigrasi lokal.

5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama pemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

Kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah, kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, serta kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi

bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD); pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan system informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

5.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan system informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan system merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah Program Riset dan Inovasi Daerah, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

5.7. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

5.8. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana



Pelayanan Umum, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan, dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. TEGAL
TAHUN 2026

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional			Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						1.092.726.101.900,00						1.000.174.665.500,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.090.378.361.900,00						997.659.665.500,00			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.090.378.361.900,00						997.659.665.500,00			
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-			100 %	763.923.030.400,00						716.466.280.500,00			
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	105.000.000,00		
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	761.003.197.400,00			-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	713.382.752.000,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6939 Orang/bulan	760.832.757.400,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN KHUSUS GURU	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	713.082.752.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	170.440.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana	-			100 %	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	15.000.000,00		
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	-				100 %	2.329.819.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	2.200.000.000,00		
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					48 Laporan	396.343.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					18 Laporan	1.933.476.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		3.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana					100 %	277.964.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	347.000.000,00		
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	45.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					85 Unit	77.964.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		97.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Beralatan dan Mesin lainnya																

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					60 Unit	40.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	115.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD), Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (tahun) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar, Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Indeks Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebinekaan SD, Indeks Iklim Kebinekaan SMP	-				100%, 100%, 100 % 49 % 52 % 55,4 % 55,9 % 67,26 % 67,5 % 70 % 70%, 68 % 71,9 % 74 % 81 % 83 %	295.319.380.500,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	249.558.385.000,00		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	-				100 %	172.030.336.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	138.255.756.000,00		
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																	
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		250.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		80.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembiayaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					180 Orang	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															
						Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					108 Konten Digital	105.213.900,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan															
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					180 Orang	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					2 Dokumen	321.990.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
						Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
						Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					8 Komunitas	45.250.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					1 Kegiatan	56.116.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															

						Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik					76874 Buku	6.050.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		165.853.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					29500 Paket	9.400.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		263.157.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					12 Ruang	3.611.906.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		1.694.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					10 Unit	913.975.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik															
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					9 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					26 Ruang	9.599.115.600,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		6.730.605.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															
						Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0053	Pembangunan Ruane Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus															

						Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun					3 Ruang	588.454.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					5022 Peserta Didik	5.763.597.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		4.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					49 Paket	1.932.504.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana					100 %	83.888.412.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	71.842.806.000,00	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		425.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal			

						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir															
						Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah															
						Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					3 Unit	1.060.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		438.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					18 Ruang	2.720.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		2.043.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah															
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	378.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium															

						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	400.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula															
						Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat					0 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					24 Unit	555.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah															
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					1 Paket	6.972.557.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah															
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					1 Paket	3.358.549.900,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		322.619.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama															
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					1500 Peserta Didik	1.396.626.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		6.005.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa															
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					1000 Peserta Didik	700.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah															

							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan					117 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		225.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					117 Satuan Pendidikan	53.851.855.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		54.871.500.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																	
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					117 Orang	150.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		436.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																	
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama																	
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi					117 Orang	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					117 Orang	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																	
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					117 Konten Digital	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																	

						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					242 Orang	794.715.700,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan															
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan						1 Dokumen	43.059.400,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi						11 Komunitas	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar						117 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah						20 Ruang	5.960.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		2.140.687.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	0061	Perlenekapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik															

[illegible]

						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					3 Paket	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD															
						Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					1 Paket	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD															
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					26766 Peserta Didik	569.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		396.219.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD															
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					848 Satuan Pendidikan	377.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					848 Satuan Pendidikan	23.197.752.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		23.491.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD															
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					848 Orang	60.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					36 Orang	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan															

[illegible]

							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					690 Peserta Didik	2.060.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					50 Satuan Pendidikan	71.190.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					25 Satuan Pendidikan	8.171.880.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		7.312.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					50 Orang	60.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					50 Orang	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan					5 Konten Digital	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan					50 Orang	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidane Pendidikan																

1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan					1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi					1 Komunitas	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca																
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata					1 Ruang	40.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik					250 Peserta Didik	60.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang/Guru/Kepala Sekolah/TU																
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalispapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruangan Kelas Baru																

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					1 Ruang	205.670.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		126.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					5000 Peserta Didik	250.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah																
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					1 Paket	52.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun					1 unit	350.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					1 Paket	256.140.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		294.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	-					100 %	162.000.000,00						-	135.000.000,00	
	1	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Terlaksana	-					100 %	162.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	90.000.000,00	

1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar															
						0					0 0	0,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar															
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia					0 Buku	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar															
						Jumlah model-model pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya					180 Orang	125.460.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar															
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun					1 Dokumen	36.540.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Terlaksana	-				100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	45.000.000,00	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					0 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal															
						Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun					0 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	-				52 % 73,5 % 76 %	30.897.951.000,00						-	31.400.000.000,00	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	-				100 %	30.897.951.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	31.400.000.000,00	

	1		01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	10 Laporan	30.897.951.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	31.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1		01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	-	-	-	100 %	43.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	50.000.000,00	
	1		01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlaksana	-	-	-	100 %	23.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	20.000.000,00	
	1		01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	1 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1		01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terlaksana	-	-	-	100 %	20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	30.000.000,00	
	1		01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1		01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	-	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	1		01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	-	-	-	100 %	33.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	50.000.000,00	
	1		01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	-	-	-	100 %	33.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	-	50.000.000,00	
	1		01	06	2.01	0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah		-	-	-					-			-		

							Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan				0 Buku	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		14.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	06	2.01	0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota															
							Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota				70 Orang	33.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal		36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.347.740.000,00							2.515.000.000,00	
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2.347.740.000,00							2.515.000.000,00	
7	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Tradisi yang Dikembangkan	-			91,71 %	2.004.714.000,00						-	1.045.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	-			100 %	681.049.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-	455.000.000,00	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan															
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan					9 Objek	681.049.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	-			100 %	1.323.665.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-	590.000.000,00	
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional															
						Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					4 Laporan	1.323.665.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal		590.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelaku Seni dan Kesenian yang Dibina	-			92,23 %	50.000.000,00						-	300.000.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-	300.000.000,00	
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional															
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	-			84,35 %	40.000.000,00						-	75.000.000,00	

2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana	-				100 %	40.000.000,00				Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		75.000.000,00	
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		-				90 Orang	40.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
10	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	-				64,6 %	232.026.000,00						-		1.075.000.000,00		
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang terlaksana	-				100 %	232.026.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		1.075.000.000,00		
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya																	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		-				3 Objek	232.026.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
11	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang Terkelola	-				100 %	21.000.000,00						-		20.000.000,00		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang Terlaksana	-				100 %	21.000.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		20.000.000,00		
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		-				1 Unit	21.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal Kab. Tegal	-		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
					Dinas Kesehatan							198.895.801.900,00								227.776.317.400,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							198.895.801.900,00								227.776.317.400,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							198.895.801.900,00								227.776.317.400,00		
12	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	-				100 %	112.760.101.000,00						-		91.733.034.000,00		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	-				100 %	25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan	-		347.000.000,00		
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-				2 Dokumen	21.700.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan	-		247.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	1.768.898.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		544.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya															
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		5.311.989.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 %	2.851.622.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan	-	1.338.800.000,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	900.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.951.622.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		428.800.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	-				100 %	844.052.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan	-	1.752.000.000,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					13 Unit	534.052.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					23 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		705.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					77 Unit	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Dinas Kesehatan		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase puskesmas melakukan pengukuran dan pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)	-				100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Puskesmas	-	79.500.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					29 Unit Kerja	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DAN NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Puskesmas		79.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				141 Unit	798.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		3.131.437.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi															
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				29 Unit	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		283.995.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	19.256.495.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		12.119.955.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga															
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				18735 Keluarga	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan															
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	219.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		322.536.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		57.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		60.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	327.720.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		6.196.730.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		100.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		1.287.040.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	516.350.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		503.683.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					1 Dokumen	459.732.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		1.200.000.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	152.586.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		800.005.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					3945 Orang	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	265.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		7.939.826.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					1 Dokumen	38.448.163.900,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAIAK ROKOK, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		37.800.695.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah					1740 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		58.437.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	32.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		202.578.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																

							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		228.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	4.200.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		9.656.062.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Dokumen	290.978.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		359.487.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota					30 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		128.530.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1 Unit	172.532.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																

1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3625 Orang	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		856.084.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				550 Orang	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		174.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				15 Orang	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok															
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		136.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota															
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	899.871.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		2.856.300.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas dengan Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	-				100 %	70.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		682.550.000,00	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-				1 Dokumen	70.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		682.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasyankes yang memenuhi persyaratan perizinan	-				100 %	40.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		120.000.000,00	
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	-				13 Unit	40.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																	
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-				40 Unit	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	-				100 % 91,3 %	1.541.688.000,00							-		7.440.635.500,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	-				100 %	30.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		400.000.000,00	
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	-				1 Dokumen	30.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				262 Dokumen	181.505.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Fasilitas pelayanan kesehatan	-	263.730.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan persyaratan perjanjian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				65 %	60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	112.000.000,00		
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				245 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		112.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				84 %	409.975.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	250.000.000,00		
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				270 Dokumen	409.975.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				23,7 %	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	-	35.000.000,00		
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				31 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Cakupan Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				23,6 %	5.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Produsen jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-		35.584.000,00	
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					28 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Produsen jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-		35.584.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan dilakukan pemeriksaan Post Market dalam rangka tindak lanjut Pengawasan	-				78 %	216.690.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	pangan industri rumah tangga	-		200.000.000,00	
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	-				195 Unit	216.690.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	pangan industri rumah tangga	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
16	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	-				87 %	634.622.000,00							-		2.101.329.500,00	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	-				87 %	232.822.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		455.174.500,00	
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-				1 Dokumen	232.822.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		455.174.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	-				87 %	330.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		766.000.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-				1 Dokumen	232.822.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal	-		766.000.000,00	

							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	330.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat															
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat					353064 keluarga	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kab. Tegal		316.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Aktif	-			83 %	71.800.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	880.155.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	71.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		880.155.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Danasari															
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
						2.238.083.719,00															
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
						2.238.083.719,00															
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.684.382.000,00						-	-	1.684.382.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.684.382.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	1.684.382.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	1.684.382.000,00	Kab. Tegal, Bojong- Danasari	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	1.684.382.000,00	PUSKESMAS DANASARI
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	539.143.719,00						-	-	539.143.719,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	539.143.719,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	539.143.719,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															

[illegible]

						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	151.802.719,00	Kab. Tegal, Bojong, Danasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			151.802.719,00	PUSKESMAS DANASARI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	8.776.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Danasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			8.776.000,00	PUSKESMAS DANASARI
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	690.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Danasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			690.000,00	PUSKESMAS DANASARI
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	8.640.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			8.640.000,00	PUSKESMAS DANASARI
19	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	14.558.000,00						-	14.558.000,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.558.000,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	14.558.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	14.558.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Danasari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		14.558.000,00	PUSKESMAS DANASARI
					Puskesmas Kesamiran						2.051.369.174,00							1.638.000.000,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.051.369.174,00							1.638.000.000,00	
3	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.051.369.174,00							1.638.000.000,00	
20	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.638.000.000,00						-	1.638.000.000,00	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.638.000.000,00			-			-	1.638.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1.638.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-				1.638.000.000,00	PUSKESMAS KESAMIRAN
21	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	405.705.674,00						-	0,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	405.705.674,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

[illegible]

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	108.117.858,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS KESAMIRAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	3.620.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS KESAMIRAN	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS KESAMIRAN	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	8.640.000,00		DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS KESAMIRAN	
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	7.663.500,00						-	-	0,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	7.663.500,00			-			-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	7.663.500,00		DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS						0,00	PUSKESMAS KESAMIRAN
						Puskesmas Margasari					4.502.820.814,00								3.800.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.502.820.814,00								3.800.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					4.502.820.814,00								3.800.000.000,00	
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	3.800.000.000,00						-		3.800.000.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	3.800.000.000,00			-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender		-	3.800.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	3.800.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			3.800.000.000,00	PUSKESMAS MARGASARI	
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-		-	691.617.000,00						-		0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	691.617.000,00			-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender		-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Penyelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		16.800.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	11.032.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		11.032.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	1.305.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		1.305.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	60.994.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		60.994.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	129.887.263,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		129.887.263,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	1.260.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		1.260.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	2.717.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.717.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	6.480.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		6.480.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
28	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	4.422.000,00					-		4.422.000,00	

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	4.422.000,00	-	-	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	4.422.000,00	-
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	0 Dokumen	4.422.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	4.422.000,00	PUSKESMAS KESAMBI
					Puskesmas Bumi Jawa		-	-	-	-	8.044.597.572,00							0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		-	-	-	-	8.044.597.572,00							0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		-	-	-	-	8.044.597.572,00							0,00	
29	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	6.498.880.000,00						-	0,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	6.498.880.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	0 Unit Kerja	6.498.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	PUSKESMAS BUMI JAWA
30	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	1.545.717.572,00						-	0,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1.545.717.572,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	0 Orang	230.040.000,00	Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	PUSKESMAS BUMI JAWA
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	0 Orang	26.055.000,00	Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	PUSKESMAS BUMI JAWA
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	0 Orang	8.100.000,00	Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	PUSKESMAS BUMI JAWA
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		-	-	-	-	-	-	-	-				-	

						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	30.420.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	660.240.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	15.300.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	8.411.450,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	3.600.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	225.625.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	313.281.122,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	9.225.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BUMIJAWA
1	02	02	2.02	0047	Penelolaan Pelayanan Kelanjutan														

[illegible]

[illegible]

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	9.720.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS BOJONG
33	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			4.934.500,00					-		0,00	
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			4.934.500,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	4.934.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS BOJONG
							Puskesmas Balapulang					5.168.070.999,00							0,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.168.070.999,00							0,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					5.168.070.999,00							0,00	
34	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			4.492.000.000,00					-		0,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			4.492.000.000,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							0				0 0	4.492.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
35	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			672.110.999,00					-		0,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			672.110.999,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	83.299.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.729.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	14.400.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	5.925.900,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	180.390.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	2.233.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	12.420.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	7.629.750,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	2.439.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	126.544.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	188.685.349,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS BALAPULANG
1	02	02	2.02	0044	Penelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															

[illegible]

[illegible]

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					650.540.822,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			650.540.822,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				807 Orang	77.220.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			77.220.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8287 Orang	24.030.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			24.030.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				169 Orang	7.200.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			7.200.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1304 Orang	11.025.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			11.025.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				183 Dokumen	145.247.875,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			145.247.875,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				85 Dokumen	12.325.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			12.325.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				195 Dokumen	14.850.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			14.850.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0				0 0	10.123.250,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS			Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-			10.123.250,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0021	Peneelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denean Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-				

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				13 Orang	4.680.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			4.680.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							0				0 0	142.365.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			142.365.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	185.364.697,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			185.364.697,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				13 Dokumen	1.170.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			1.170.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				10 Dokumen	900.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			900.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				7067 Dokumen	14.040.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			14.040.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
41	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	3.630.000,00						-	3.630.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	3.630.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	3.630.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				60 Dokumen	3.630.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			3.630.000,00	PUSKESMAS PAGERBARANG
					Puskesmas Lebaksiu							3.245.739.272,00							0,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							730.187.272,00							0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							730.187.272,00							0,00	
42	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				-	728.207.272,00						-	0,00	

1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	728.207.272,00						Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					0 Orang	126.270.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	126.270.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					0 Orang	27.450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	27.450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					0 Orang	5.760.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	5.760.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					0 Orang	10.835.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang	10.835.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	153.514.375,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	153.514.375,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	9.990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	9.855.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	9.855.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0 Dokumen	20.526.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0 Dokumen	20.526.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					0 Dokumen		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	0,00		PUSKESMAS LEBAKSIU

							Jumlah Orang dengan Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	1.620.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	154.786.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	188.280.197,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	5.430.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	12.840.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
43	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	1.980.000,00						-	0,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.980.000,00						-	0,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU	
X					NON URUSAN						2.515.552.000,00							0,00		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.515.552.000,00							0,00		
44	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.515.552.000,00						-	0,00		
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.515.552.000,00						-	0,00		
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	2.515.552.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	PUSKESMAS LEBAKSIU
							Puskesmas Kambangan						2.686.245.268,00							2.063.455.000,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.686.245.268,00							2.063.455.000,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.686.245.268,00							2.063.455.000,00	
45	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.063.455.000,00						-	2.063.455.000,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.063.455.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	-	2.063.455.000,00	
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	2.063.455.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	2.063.455.000,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
46	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	616.656.668,00						-	0,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	-	-			-	616.656.668,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	-	0,00	
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					550 Orang	83.300.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4728 Orang	35.400.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	02	2.02	0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					118 Orang	2.520.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					892 Orang	12.580.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				
	1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	138.641.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN
																	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender				

1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	19.563.250,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					118 Orang	1.710.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					12 Dokumen	122.595.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	165.877.418,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	4.010.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	720.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					12 Dokumen	18.760.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS KAMBANGAN	

[illegible]

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					100% Orang	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				13.680.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				177.133.484,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				5.940.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				6.165.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				11.617.500,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					100% Orang	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				2.430.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				263.259.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				273.321.247,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					100% Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender	-				4.820.000,00	PUSKESMAS JATINEGARA
1	02	02	2.02	0046	Peneelolaan upawa kesehatan Ibu dan Anak																			

[illegible]

						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.620.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakarater 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		27.620.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	1.800.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berakaracter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		1.800.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang	10.170.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		10.170.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	94.850.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		94.850.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	5.571.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		5.571.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	5.355.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		5.355.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0 Dokumen	12.559.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		12.559.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	3.600.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		3.600.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
					-					-	121.623.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	121.623.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	226.888.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			226.888.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	2.268.924,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			2.268.924,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	900.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			900.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	34.730.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			34.730.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	0,00			-	-	-	-	3.196.586.924,00		
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		3.196.586.924,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
53	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	180.000,00						-	180.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	180.000,00			-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	180.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	180.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			180.000,00	PUSKESMAS KEDUNGBANTENG	
					Puskesmas Pangkah							3.942.079.586,00							3.942.099.586,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.942.079.586,00							3.942.099.586,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.942.079.586,00							3.942.099.586,00		
54	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	2.846.865.000,00						-	2.846.865.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				-	2.846.865.000,00			-		-	-	2.846.865.000,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 % Unit Kerja	2.846.865.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-	-	2.846.865.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
55	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				-	1.088.794.586,00						-	1.088.814.586,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	1.088.794.586,00			-		-	-	1.088.814.586,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																

										Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						100 % Orang	166.600.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				166.600.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
										Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						100 % Orang	60.360.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				60.360.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																						
										Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						100 % Orang	5.133.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				5.133.500,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
										Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						100 % Orang	18.650.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				18.650.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						100 % Dokumen	331.590.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				331.590.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						100 % Dokumen	2.670.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				2.670.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						100 % Dokumen	8.460.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				8.460.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						100 % Dokumen	25.013.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				25.013.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																						
										Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						100 % Orang	3.420.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				3.420.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																						
										Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						100 % Dokumen	192.972.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				192.972.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
										Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						100 % Dokumen	211.560.386,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				211.560.386,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																						
										Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi						100 % Dokumen	3.695.700,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				3.695.700,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																						
										Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						100 % Dokumen	720.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				720.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																						
										Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan						100 % Dokumen	57.970.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				57.970.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
56	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-									-	6.420.000,00								6.420.000,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-									-	6.420.000,00								6.420.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																						
										Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						100 % Dokumen	6.420.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-				6.420.000,00	PUSKESMAS PANGKAH	
	1				Puskesmas Penusupan													2.585.596.487,00								2.683.366.487,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													2.585.596.487,00								2.683.366.487,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2.585.596.487,00								2.683.366.487,00	
57	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-									-	1.955.400.000,00								2.053.170.000,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-									-	1.955.400.000,00						Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender		2.053.170.000,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penuhiane Pelayanan BLUD																						

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		4.500.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12.523.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		12.523.500,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	1.080.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		1.080.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	129.262.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		129.262.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	126.380.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		126.380.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	2.322.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.322.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	900.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		900.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				12 Dokumen	450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		450.000,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
59	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	6.268.500,00					-	-	6.268.500,00	

1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	6.268.500,00	-	-	-	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	6.268.500,00	-
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	12 Dokumen	6.268.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	6.268.500,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	-	12 Dokumen	6.268.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	6.268.500,00	PUSKESMAS PENUSUPAN
					Puskesmas Slawi	-	-	-	-		3.320.576.516,00			-		-	-	-	3.320.576.516,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-		3.320.576.516,00			-		-	-	-	3.320.576.516,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-		3.320.576.516,00			-		-	-	-	3.320.576.516,00	
60	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-		2.636.000.000,00			-		-	-	-	2.636.000.000,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-		2.636.000.000,00			-		-	-	-	2.636.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	-		2.636.000.000,00			-		-	-	-	2.636.000.000,00	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	-	0 Unit Kerja	2.636.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-		-	-	-	2.636.000.000,00	PUSKESMAS SLAWI
61	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-		671.660.516,00			-		-	-	-	671.660.516,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-		671.660.516,00			-		-	-	-	671.660.516,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	-		58.080.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	58.080.000,00	PUSKESMAS SLAWI
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	0 Orang	58.080.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	58.080.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	-		22.460.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	22.460.000,00	PUSKESMAS SLAWI
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	-	0 Orang	22.460.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	22.460.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	-		6.480.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	6.480.000,00	PUSKESMAS SLAWI
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	-	0 Orang	6.480.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	6.480.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	-		11.450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	11.450.000,00	PUSKESMAS SLAWI
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	-	-	0 Orang	11.450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	11.450.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	-					-		-	-	-		

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	129.690.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			129.690.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			9.900.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			10.800.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0 Dokumen	16.874.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			16.874.500,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	1.440.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			1.440.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	237.556.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			237.556.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	139.601.016,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			139.601.016,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Dokumen	15.960.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			15.960.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					0 Dokumen	2.660.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			2.660.000,00	PUSKESMAS SLAWI
1	02	02	2.02	0046	Penelolaan uogava kesehatan Ibu dan Anak																	

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					0 Dokumen	609.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			609.000,00	PUSKESMAS SLAWI	
	1	02		2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					0 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			8.100.000,00	PUSKESMAS SLAWI	
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	12.916.000,00					-			12.916.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	12.916.000,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-		12.916.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						0 Dokumen	12.916.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			12.916.000,00	PUSKESMAS SLAWI	
						Puskesmas Adiwerna							3.446.688.173,00							2.683.996.000,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.446.688.173,00								2.683.996.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.446.688.173,00								2.683.996.000,00	
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	2.683.996.000,00					-			2.683.996.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-				-	2.683.996.000,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-		2.683.996.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						0 Unit Kerja	2.683.996.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			2.683.996.000,00	PUSKESMAS ADIWERNA	
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				-	755.046.820,00					-			0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	755.046.820,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-		0,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						2250 Orang	110.400.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS ADIWERNA	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																

[illegible]

[illegible]

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					0 Unit Kerja	2.421.900.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Adiwerna, Pagiyanten	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.421.900.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
67	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	637.112.877,00					-	-	637.112.877,00	
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	637.112.877,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	637.112.877,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	98.494.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		98.494.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	7.389.750,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		7.389.750,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					0 Orang	2.700.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.700.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					0 Orang	3.915.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		3.915.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					0 Dokumen	130.871.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		130.871.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0 Dokumen	720.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		720.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Linjokunean															

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	4.680.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		4.680.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	15.112.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		15.112.800,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	2.520.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.520.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	102.048.827,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		102.048.827,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	250.981.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		250.981.500,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	3.010.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		3.010.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	1.890.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		1.890.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	12.780.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		12.780.000,00	PUSKESMAS PAGIYANTEN
68	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	6.403.500,00					-	-	6.403.500,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				100 Dokumen	5.760.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			5.760.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				200 Dokumen	11.070.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			11.070.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	13.773.250,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			13.773.250,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
						0					50 0	1.260.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			1.260.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						0					70 0	122.063.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			122.063.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1000 Dokumen	167.561.265,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			167.561.265,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
						0					60 0	2.660.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			2.660.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				50 Dokumen	450.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			450.000,00	PUSKESMAS TALANG
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
						0					60 0	23.280.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			23.280.000,00	PUSKESMAS TALANG

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	9.450.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			9.450.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
						0					0 0	1.935.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			0,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
						0					0 0	9.768.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		-	-		9.768.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	810.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			810.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					0 Dokumen	121.166.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		-	-		121.166.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	154.267.018,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			154.267.018,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					0 Dokumen	6.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		-	-		6.300.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
						0					0 0	678.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		-	-		678.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan															
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					0 Dokumen	9.720.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			9.720.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	3.683.000,00						-	3.683.000,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/kota	-	-			-	3.683.000,00		-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	3.683.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0 Dokumen	3.683.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			3.683.000,00	PUSKESMAS KALADAWA
						Puskesmas Dukuhturi						2.843.640.302,00							2.843.910.302,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.843.640.302,00							2.843.910.302,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.843.640.302,00							2.843.910.302,00	

75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	2.216.363.000,00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.216.363.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	2.216.363.000,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	2.216.363.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		2.216.363.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	621.547.302,00						-	621.817.302,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	621.547.302,00						-	621.817.302,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1230 Orang	41.580.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	41.850.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				430 Orang	16.530.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	16.530.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	4.500.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	4.500.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				112 Orang	10.490.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	10.490.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				503 Dokumen	150.538.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	150.538.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				16 Dokumen	1.665.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	1.665.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				114 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	10.800.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	2.733.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	2.733.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				48 Orang	2.250.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	2.250.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				265 Dokumen	176.069.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	176.069.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				53 Dokumen	187.412.302,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	187.412.302,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	1.770.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	1.770.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				5 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	1.350.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				34 Dokumen	13.860.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-		-	-	13.860.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI	
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	5.730.000,00						-	5.730.000,00		

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	5.730.000,00	-	-	-	-	-	5.730.000,00	
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen			5.730.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	5.730.000,00	PUSKESMAS DUKUHTURI
						Puskesmas Kupu				2.202.440.152,00							2.202.440.152,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.202.440.152,00							2.202.440.152,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.202.440.152,00							2.202.440.152,00	
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	1.629.118.000,00						1.629.118.000,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	1.629.118.000,00						1.629.118.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja			1.629.118.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1.629.118.000,00	PUSKESMAS KUPU
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	566.620.952,00						566.620.952,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	566.620.952,00						566.620.952,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	202 Orang			83.904.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	83.904.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	476 Orang			17.595.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	17.595.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang			8.100.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	8.100.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59 Orang			5.670.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	5.670.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen			111.452.484,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	111.452.484,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen			7.650.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	7.650.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			9.045.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	9.045.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen			13.857.900,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	13.857.900,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15 Orang			1.260.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	1.260.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen			120.322.200,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	120.322.200,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen			167.827.268,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	167.827.268,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	9 Dokumen			10.752.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	10.752.000,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	6 Dokumen			545.100,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	545.100,00	PUSKESMAS KUPU
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12 Dokumen			8.640.000,00	Kab. Tegal, Dukuhturi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-	-	8.640.000,00	PUSKESMAS KUPU
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	6.701.200,00						6.701.200,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	6.701.200,00						6.701.200,00	

1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	6.701.200,00	Kab. Tegal, Dukuhwari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	6.701.200,00	PUSKESMAS KUPU
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
					Puskesmas Dukuhwaru						4.203.618.272,00						3.495.705.500,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						707.912.772,00						0,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						707.912.772,00						0,00	
81	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					688.288.772,00						0,00	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					688.288.772,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	-	0,00
															4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					862 Orang	127.440.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					12960 Orang	23.580.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					164 Orang	8.100.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar													
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					266 Orang	9.810.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	197.056.372,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	2.115.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
															Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	-	-	
															4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender			

1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	8.907.900,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				164 Orang	4.500.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	137.968.500,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	144.900.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	4.255.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	756.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				30 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Tegal, Dukuhwaru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	PUSKESMAS DUKUHWARU
82	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	19.624.000,00					-		0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.624.000,00					-		0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-		0,00	

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					65 Orang	23.400.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			25.740.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					20 Orang	4.750.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			5.225.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					6 Dokumen	178.770.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			196.647.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			5.940.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4 Dokumen	14.130.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			15.543.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6 Dokumen	17.711.600,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			19.482.760,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					36 Orang	5.400.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			5.940.000,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					29 Dokumen	102.155.700,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			112.371.270,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					6 Dokumen	179.113.623,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			197.024.985,00	PUSKESMAS TARUB
1	02	02	2.02	0044	Penyelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	15.570.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	7.052.250,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	1.260.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	147.956.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	188.520.865,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	2.890.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	834.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	3.240.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-	-	-	0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
92	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	4.940.000,00							-	-	0,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4.940.000,00			-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-	-	0,00	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	4.940.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			0,00	PUSKESMAS BANGUNGALIH
						Puskesmas Suradadi					2.753.236.139,00									2.753.236.139,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.753.236.139,00									2.753.236.139,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.753.236.139,00									2.753.236.139,00	
93	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	2.086.000.000,00							-	-	2.086.000.000,00	

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-							2.086.000.000,00				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			2.086.000.000,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	2.086.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-				Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			2.086.000.000,00	PUSKESMAS SURADADI
94	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-				663.471.139,00								-	-			663.471.139,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				663.471.139,00			-					-	-			663.471.139,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0				0 0	89.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-		-			-	-			89.500.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	28.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			28.500.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	2.250.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			2.250.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	15.450.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			15.450.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	169.415.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			169.415.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				0 Dokumen	5.205.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			5.205.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-	-			11.250.000,00	PUSKESMAS SURADADI
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														-	-				

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					100 Dokumen	155.364.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			155.364.000,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					42 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			1.440.000,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					50 Dokumen	9.720.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			9.720.000,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					100 Dokumen	10.368.600,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			10.368.600,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
							0					6 0	720.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			720.000,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					100 Dokumen	146.612.300,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			146.612.300,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
							0					75 0	123.260.012,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			123.260.012,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
							0					27 0	8.315.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			8.315.000,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
							0					7 0	681.600,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK - BOK PUSKESMAS		Pengutan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Pengutan Pembangunan Gender			681.600,00	PUSKESMAS JATIBOGOR
1	02	02	2.02	0047	Penelolaan Pelayanan Kelanlutan																

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	5.580.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0020			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	16.843.050,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0021			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				0 Orang	3.060.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
							Jumlah Orang dengan Masalah Keluahan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Dokumen	172.548.815,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0025			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	149.230.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0033			Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	4.255.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0044			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				0 Dokumen	600.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	15.120.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0046			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				0 Dokumen	8.584.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	8.584.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
1	02	02	2.02	0047			Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				0 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				0 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
101	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	8.584.000,00						-	0,00	
1	02	05	2.03				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	8.584.000,00						-	0,00	
1	02	05	2.03	0001			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	8.584.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	PUSKESMAS WARUREJO
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 Dokumen	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
							Laboratorium Kesehatan					85.000.000,00						-	85.000.000,00	
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					85.000.000,00						-	85.000.000,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					85.000.000,00						-	85.000.000,00	
102	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
1	02	01	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	85.000.000,00						-	85.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	85.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			85.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	85.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			85.000.000,00	LABORATORIUM KESEHATAN
							Wisata Kesehatan Jamu					100.000.000,00						-	110.000.000,00	
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.000.000,00						-	110.000.000,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					100.000.000,00						-	110.000.000,00	
103	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
1	02	01	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-		-	100.000.000,00						-	110.000.000,00	
1	02	01	2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					100.000.000,00						-	110.000.000,00	

								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			110.000.000,00	WISATA KESEHATAN JAMU
								RSUD dr. Soeselo					246.570.710.100,00								0,00	
1								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					246.570.710.100,00								0,00	
1	02							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					246.570.710.100,00								0,00	
104	1	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	245.670.710.100,00						-		0,00	
	1	02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	-			100 Persen	33.095.810.100,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pegawai ASN	-	0,00	
1	02	01	2.02	0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				429 Orang/bulan	33.095.810.100,00	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pegawai ASN		0,00	RSUD DR. SOESELO
	1	02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase honor PTT yang terpenuhi	-			100 Persen	74.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	PTT	-	0,00	
1	02	01	2.08	0004				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	74.900.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon	PAJAK REKLAME	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	PTT		0,00	RSUD DR. SOESELO
	1	02	01	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD	-			86,15 Nilai Bobot	212.500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Unit Kerja BLUD RSUD dr. Soeselo	-	0,00	
1	02	01	2.10	0001				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				6 Unit Kerja	212.500.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Slawi Kulon	PENDAPATAN DARI BLUD, PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Unit Kerja BLUD RSUD dr. Soeselo		0,00	RSUD DR. SOESELO
105	1	02	02					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		-			-	900.000.000,00					-		0,00	

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat		0,00	RSUD SURADADI
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Suradadi	-			100 Persen	958.960.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat	-	1.060.000.000,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	933.960.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja	RETRIBUSI JASA USAHA, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat		1.000.000.000,00	RSUD SURADADI
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat		60.000.000,00	RSUD SURADADI
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Suradadi	-			100 Persen	350.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat	-	0,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat		0,00	RSUD SURADADI
1	02	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah															
							Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	150.000.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Sidaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	karyawan dan masyarakat		0,00	RSUD SURADADI

[illegible]

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan	-		100 %	12.121.171.401,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	12.250.000.000,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				181 Orang/bulan	11.896.171.401,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan	-		100 %	65.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	175.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Baranz Milik Daerah pada SKPD														

							Jumlah Laporan Penetausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase manajemen administrasi-pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan			100 %	37.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		40.000.000,00	
	1	03	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Ketetapan Retribusi Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen administrasi-pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan			100 %	25.000.000,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		200.000.000,00	
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							0				12 Dokumen 0	5.000.000,00	-	BAGIAN LABA YANG DIPERUNTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIPERUNTUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase manajemen administrasi-pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan			100 %	320.000.000,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		510.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

							0					12 Dokumen	0	25.000.000,00		BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							0					2 paket	0	50.000.000,00	-	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2 Paket		50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						2 Paket		150.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12 Paket		15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						36 Dokumen		20.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan		10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan	-					100 %		0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		150.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						10 Unit		0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

[illegible]

									7 Unit	492.063.999,00	Kab. Tegal, Balapulang, Balapulang Wetan Kab. Tegal, Lebaksiu, Yamansari Kab. Tegal, Pangkah, Kendalserut Kab. Tegal, Slawi, Kudatle Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu Kab. Tegal, Adiwerna, Adiwerna Kab. Tegal, Kramat, Kemantran	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
109	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	-		65,62 %	1.792.290.000,00						-	6.440.000.000,00	
	1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	-		65,62 %	1.792.290.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	6.440.000.000,00	
	1	03	02	2.02	0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			2,06 KM	660.500.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			92,36 KM	748.790.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0045 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air													
						Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi			1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Tegal, Bumi Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Jatinegara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa													
						Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun			20 Dokumen	233.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		245.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
110	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	-		100 % 35,73 %	250.000.000,00						-	5.000.000.000,00	

[illegible]

							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					500 Rumah Tangga	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					300 Orang	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	-				70,00 %	8.970.000.000,00			-			-			550.000.000,00	
	1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase ketersediaan jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	-				70,00 %	8.970.000.000,00			-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		550.000.000,00	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun					3 Sistem Drainase Perkotaan	8.970.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
114	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	-				85,00 %	1.350.000.000,00			-			-			2.100.000.000,00	
	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	-				29,50 % 85,00 %	1.350.000.000,00			-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		2.100.000.000,00	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					5 Bantuan Teknis	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					3 Dokumen	1.225.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					500 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
115	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	-				100 %	10.150.000.000,00			-			-			6.450.000.000,00	
	1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	-				100 %	10.150.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-		6.450.000.000,00	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan					3 Kawasan	10.100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
116	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	-					89,00 %	136.416.250.000,00						-	84.450.000.000,00	
	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap Proporsi panjang jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	-					93,50 % 89,00 %	136.416.250.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	84.450.000.000,00	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun						350 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya						847,27 KM	900.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan																
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin						715,15 KM	20.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		22.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan																
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi						3 KM	6.800.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan																
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala						847,27 KM	95.377.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan																
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi						5 KM	9.163.750.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	1.775.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
						Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	350.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan													
						Panjang jembatan yang dibangun				45 Meter	1.550.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
117	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	500.000.000,00			-		-	1.260.000.000,00	
	1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	125.000.000,00			-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	465.000.000,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis													
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				10 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
						Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	350.000.000,00			-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	450.000.000,00	
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				6 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	25.000.000,00			-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	345.000.000,00	
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
						Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				300 Bangunan Konstruksi	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi													
						Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
118	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	-			95 %	250.000.000,00			-		-	1.245.000.000,00	
	1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	-			95,00 %	100.000.000,00			-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	150.000.000,00	
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota													
						dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	-					95,00 %	90.000.000,00					2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-				650.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																			
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-					9 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-				650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	-					95,00 %	45.000.000,00					2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-				345.000.000,00	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																			
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-					12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	-				345.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	15.000.000,00				-	-	-	-	-		100.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	-					600 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan							13.371.204.400,00										20.104.012.615,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.932.727.200,00										15.636.000.000,00	
	1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							6.932.727.200,00										15.636.000.000,00	
119	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-					-	150.000.000,00							-			616.000.000,00	
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota undefined	-					10 Unit undefined	60.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Penerima Bantuan Korban Bencana	-			506.000.000,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-					28 Unit Rumah	60.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Penerima Bantuan Korban Bencana	-			506.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah pembangunan dan pengembangan perumahan yang memi undefined	-					3 Laporan undefined	90.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Dinas Perkim Kab Tegal	-			110.000.000,00	
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-					3 Laporan	90.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Dinas Perkim Kab Tegal	-			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
120	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-					-	61.235.800,00							-			2.070.000.000,00	

	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Dokumen Kebijakan PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi	-					undefined 1 Dokumen	0,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		110.000.000,00		
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi						2 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha yang tertangani undefined	-					53,86 Persen undefined undefined	61.235.800,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		1.960.000.000,00		
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						25 Unit Rumah	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	03	2.03	0004	Koordniasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																			
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						2 Laporan	61.235.800,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100 Unit	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal			750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																			
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar						2,5 Ha	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	
121	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-				-	3.723.707.400,00							-	-			12.000.000.000,00	

	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni undefined	-				27,23 Persen undefined	3.723.707.400,00			-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	12.000.000.000,00			
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-				177 Unit Rumah	3.540.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		11.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-				2 Laporan	183.707.400,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
122	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-				-	2.997.784.000,00							-	950.000.000,00			
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase ketersediaan PSU perumahan undefined	-				36,50 Persen undefined	2.997.784.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	950.000.000,00			
	1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-				6 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN			
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-				9 Lokasi	2.897.784.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN			
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-				6 Lokasi	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	-		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Perkim Kab Tegal		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																1.039.500.000,00		
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	1.039.500.000,00	
123	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-				-	82.414.800,00							-	907.500.000,00			

	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotaed	-	-	-	97,50 Persen	82.414.800,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		907.500.000,00	
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	82.414.800,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		907.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
124	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAH TANAH	-	-	-	-	-	35.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		132.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dan terpetanya bidang tanah serta berdasarkan penggunaannya Tersedianya dan terpetanya bidang tanah serta berdasarkan penggunaannya	-	-	-	100 Persen 1 Laporan	35.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		132.000.000,00	
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Laporan	35.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X					NON URUSAN						6.321.062.400,00									3.428.512.615,00	
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.321.062.400,00									3.428.512.615,00	
125	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	6.321.062.400,00							-		3.428.512.615,00	
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100 Persen	20.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		42.350.000,00	
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	8 Dokumen	20.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		42.350.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	100 Persen	4.146.506.400,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-		114.950.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaii dan Tunjangan ASN										Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					70 Orang/bulan	4.068.986.400,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	77.520.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Dinas Perkim Kab Tegal		114.950.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 Persen	15.000.000,00			-	-	Dinas Perkim Kab Tegal	-	60.500.000,00	
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					100 Orang	15.000.000,00	-	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-	Dinas Perkim Kab Tegal		60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 Persen	185.579.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	468.973.615,00	
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		2.420.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		54.450.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	19.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		30.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	19.599.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
Y	XY	01	2.06	0005	Bemediaan Bagan Cetakan dan Bemegandaan															

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	19.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		30.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		18.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	88.480.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		272.953.615,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	90.750.000,00	
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		90.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	1.765.977.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	2.266.814.000,00	
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		2.420.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	230.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		302.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.534.877.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		1.961.894.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah undefined	-			100 Persen undefined	188.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal	-	384.175.000,00	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	154.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		302.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		3.025.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	16.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		18.150.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dinas Perkim Kab Tegal		60.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
						Satuan Polisi Pamong Praja						10.005.095.200,00							11.371.225.130,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.005.095.200,00							11.371.225.130,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.005.095.200,00							11.371.225.130,00	
126	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Satpol PP	-			100 %	8.381.622.600,00						-	9.108.679.400,00	

	1		05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-					100 %	25.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		28.150.000,00		
	1		05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-					6 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-					4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		3.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan honor perangkat daerah Satpol PP Kab. Tegal	-					100 %	5.871.972.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	ASN Perangkat Daerah	-		6.397.772.000,00			
	1		05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					135 Orang/bulan	5.817.052.600,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	ASN Perangkat Daerah	-		6.337.772.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-					12 Dokumen	54.920.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	ASN Perangkat Daerah	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-					100 %	132.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	-		154.757.400,00			
	1		05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-					2 Paket	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-					145 Orang	82.350.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	-		102.257.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-					200 Orang	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal	-		52.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1		05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi umum OPD	-					100 %	265.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		278.250.000,00			
	1		05	01	2.06	0001	Pemediaan Komponen Instalasi		-													-				

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	135.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			141.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			78.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelaksananya pengadaan barang milik daerah	-				100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		50.000.000,00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 %	1.802.300.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		1.890.000.000,00	
1	05	01	2.08	0001	Penediaan Jasa Surat Menurart																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		190.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.622.300.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		1.700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya pemeliharaan barang milik daerah	-			100 %	285.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-	309.750.000,00		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	240.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		262.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	35.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		36.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
127	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 persen	1.409.662.600,00						-	1.780.045.730,00		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan tranribum yang tertangani	-			100 %	472.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	793.000.000,00		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	387.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang Diselesaikan	-				100 %	937.662.600,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		987.045.730,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP					12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					12 Laporan	877.662.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			921.545.730,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
128	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PEMANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-				100 %	213.810.000,00							-		482.500.000,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Tegal	-				100 %	183.810.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		450.000.000,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					12 Laporan	183.810.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					5 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	-				100 %	10.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		10.500.000,00	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian					12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				100 %	20.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		22.000.000,00	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					100 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

						Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5.628.259.600,00									6.427.780.000,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.628.259.600,00									6.427.780.000,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.628.259.600,00									6.427.780.000,00				
129	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan BPBD	-				100 Persen	4.423.627.600,00				-	4.912.780.000,00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-				100 Persen	22.800.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-	38.000.000,00		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	17.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	-				100 Persen	3.065.343.600,00		-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-	3.270.000.000,00		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					45 Orang/bulan	3.045.043.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		3.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	20.300.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-				100 Persen	5.260.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-	65.000.000,00		
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					1 Orang	5.260.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur		65.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-				100 Persen	440.150.000,00		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-	311.500.000,00		

1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	25.400.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	4.400.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	37.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	6.850.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	303.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				100 Persen	660.874.000,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-		670.280.000,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	141.204.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			115.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	519.670.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			555.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	-				100 Persen	229.200.000,00				Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur	-		558.000.000,00		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				24 Unit	182.200.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			325.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				40 Unit	32.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				1 Unit	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
130	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	-				100 Persen	1.204.632.000,00							-		1.515.000.000,00		
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-				100 Persen	20.000.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana	-		110.000.000,00			
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-				40 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana	-		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				100 Persen	323.632.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana	-		560.000.000,00			
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	-				10 Unit	20.860.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	-				750 Orang	83.035.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana	-		85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	03	2.02	0021	Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		

												2 Orang	8.210.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																	
												12 laporan	2.893.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
												23 Kawasan	208.632.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03									100 Persen	721.000.000,00			Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		735.000.000,00		
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
												1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
												4000 Orang	130.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
												500 Orang	500.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
												1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04									100 Persen	140.000.000,00			Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		110.000.000,00		
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
												1 Kegiatan	140.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD, RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Memperkuat penyiarsalan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saling, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Aparatur dan masyarakat di kawasan rawan bencana		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
													11.283.789.200,00								31.524.906.000,00	

1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.283.789.200,00							31.524.906.000,00		
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				11.283.789.200,00							31.524.906.000,00		
131	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		4.344.406.200,00						-	11.336.241.300,00		
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		25.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	82.750.000,00	
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	82.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		2.801.133.200,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	9.120.899.300,00	
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/bulan	2.756.013.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	8.839.462.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45.120.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	281.437.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		397.620.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	755.000.000,00	
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	120.000.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142.600.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	878.785.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN		67.592.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	92.068.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN	-	1.010.000.000,00	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	81.138.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN		360.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	5.890.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.040.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	ASN		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
132	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	-				100 %	350.261.330,00						-	1.005.300.000,00	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				100 %	7.843.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-	26.000.000,00	
1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				30 Dokumen	7.843.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat		26.000.000,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					42 Orang	106.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat, PPKS		257.946.700,00	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			100 %	432.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat, PPKS	-	0,00	
1	06	04	2.02	0007			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				391 Orang	432.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat, PPKS		0,00	DINAS SOSIAL
134	1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	-			100 %	4.501.356.800,00						-	4.606.500.000,00	
1	06	05	2.01				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-			100 %	7.359.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-	181.500.000,00	
1	06	05	2.01	0001			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	7.359.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat		181.500.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			100 %	4.493.997.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-	4.425.000.000,00	
1	06	05	2.02	0001			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				900.049 Orang	18.909.300,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat		2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0004			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1010 Orang	225.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat		525.000.000,00	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				1010 Orang	225.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat		525.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					5004 Orang	4.226.776.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir-Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Usulan Penindaktayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan					34440/34440/5801 Usulan	23.312.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			1.050.000.000,00	DINAS SOSIAL
135	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	-				100 %	47.926.200,00						-		1.200.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-				100 %	29.412.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-		600.000.000,00	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					1010 Orang	21.664.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					30 Orang	7.748.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-				100 %	18.514.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-		600.000.000,00	
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					9 Kampung	7.520.900,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					24 Orang	10.993.100,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			300.000.000,00	DINAS SOSIAL

136	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	-					100 %	244.838.670,00							-		605.000.000,00		
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		-					100 %	244.838.670,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat	-		605.000.000,00			
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-					7 Makam	244.838.670,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Masyarakat			605.000.000,00	DINAS SOSIAL		
						Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								19.340.167.400,00									22.478.106.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								19.340.167.400,00										22.478.106.000,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								4.690.667.400,00										5.262.410.000,00	
137	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah DP3AP2 dan KB	-					100 Persen	4.015.971.400,00							-		4.416.750.000,00		
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD	-					95 Persen	18.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		25.000.000,00			
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan PD	-					100 Persen	2.465.627.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		2.585.000.000,00			
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						29 Orang/bulan	2.436.467.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5 Dokumen	29.160.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	499.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	163.175.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	875.453.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		975.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	262.353.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-	270.000.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				10 Unit	167.237.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	28.420.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	66.696.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN		55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
138	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase ARG pada belanja operasi APBD	-			10,00 Persen	40.047.000,00						-	40.000.000,00	

	2		08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang melakukan PPRG	-					60,00 Persen	40.047.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		40.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-					30 Lembaga	40.047.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
139	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-					7,00 Rasio	205.876.000,00								-		240.876.000,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan	-					4 Kegiatan	40.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat	-		75.000.000,00		
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/kota	-					20 Lembaga	40.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-					-	96.856.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender		-		96.856.000,00		
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-					30 orang	96.856.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			96.856.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	69.020.000,00				-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender		-		69.020.000,00		
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	-					240 orang	69.020.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	-			69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
140	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	-					7,50 Persen	25.000.000,00							-		60.000.000,00		

	2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga mendapat pelatihan peningkatan kualitas keluarga	-					25 Keluarga	25.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat	-		60.000.000,00		
	2	08	04	2.01	0006 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.																			
						Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-					30 Orang	25.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
141	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	-					55 Persen	25.489.000,00								-		80.000.000,00	
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki Data Gender dan Anak	-					15 OPD	25.489.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		80.000.000,00		
	2	08	05	2.01	0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-					2 Dokumen	25.489.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
142	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	-					75 Persen	20.000.000,00								-		70.000.000,00	
	2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang terbentuk	-					5 Lembaga	20.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat	-		70.000.000,00		
	2	08	06	2.01	0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisai Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-					15 Lembaga	20.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
143	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-					-	358.284.000,00								-		354.784.000,00	
	2	08	07	2.01			-					-	101.500.000,00								-		101.500.000,00	
	2	08	07	2.01	0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																			

[illegible]

						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					2 Laporan	56.944.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					12 Laporan	255.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					12 Dokumen	216.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga																
						Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga					12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
145	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR				11,55 Persen 69,75 Persen	5.368.596.000,00						-	8.295.736.000,00		
2	14	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB				18 kali	1.511.118.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat	-	1.506.618.000,00		
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					216 Laporan	774.618.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		774.618.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					216 Laporan	378.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		378.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Broomam Bangsa Kencana Melalui Media Massa/Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																

							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					2 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					8 Organisasi	258.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS, DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		247.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-				100 Persen	589.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat	-	3.405.690.000,00	
2	14	03	2.02	0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
							Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					287 Orang	574.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		861.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					8 Organisasi	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					0 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB- PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Masyarakat		2.524.690.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

								Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)					18 Laporan / Dokumen	168.960.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			168.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					12 Laporan	574.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			287.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia					15 Unit	195.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			195.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																			
								Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)					1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.02				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			2 Organisasi	7.749.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat	-		7.749.000.000,00			
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
								Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					180 laporan	3.690.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			3.690.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
								Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan					180 laporan	4.059.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat			4.059.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian												24.296.064.600,00						6.406.668.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												1.180.000.000,00						370.000.000,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												1.180.000.000,00						370.000.000,00	
147	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Pasokan Pangan	-				60 Persen	150.000.000,00							-		50.000.000,00			

	2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pembinaan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	-				3 Unit	125.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	25.000.000,00		
	2	09	03	2.01	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																	
						Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan					3 Unit	125.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	-				1 Kegiatan	25.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	25.000.000,00		
	2	09	03	2.04	0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
148	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	-				47 Persen	1.010.000.000,00							-	310.000.000,00		
	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/Kota (CBPK) Penyusunan Peta SKPG dan FSVA	-				25 Ton 2 Peta	1.010.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	310.000.000,00		
	2	09	04	2.02	0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	2	09	04	2.02	0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Masyarakat Kab.tegal		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
149	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-				93 Persen	20.000.000,00							-	10.000.000,00		
	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi PSAT Pengawasan keamanan pangan	-				3 Rekomendasi 10 Sample	20.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	10.000.000,00		
	2	09	05	2.01	0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							23.116.064.600,00								6.036.668.000,00		
	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							23.116.064.600,00									6.036.668.000,00	
150	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 Persen	12.312.340.600,00							-	2.446.668.000,00		

3		27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-					3 Dokumen	15.722.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		50.500.000,00		
3		27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-					3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		38.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					3 Laporan	8.222.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		12.500.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					12 bulan	10.050.350.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		77.000.000,00			
3		27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					166 Orang/bulan	10.018.190.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		0,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-					1 Dokumen	32.160.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		77.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-					100 orang	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		35.000.000,00			
3		27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-					100 Orang	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		35.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					12 bulan	268.495.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		315.976.000,00			
3		27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-		5.000.000,00		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3		27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-									Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-					

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	125.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		140.976.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	2.995.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-				1 Unit	55.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	20.000.000,00	
3	27	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		0,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGKAN DAN PERTANIAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				12 bulan	1.572.773.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	1.508.192.000,00	
3	27	01	2.08	0001	Penediaaan Jasa Surat Menvurat																

[illegible]

[illegible]

							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	-				0 Unit	1.585.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.Tegal	-	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
153	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH Jumlah Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	-				75 Persen	655.000.000,00						-	430.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan obat-obatan Pengadaan pakan ternak	-				1 Paket 1 Paket	95.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	55.000.000,00	
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	-				18 Laporan	95.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemeriksaan sampel pangan asal hewan Pengawasan NIKV	-				18 Sample 10 Unit Usaha	560.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	375.000.000,00	
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	-				10 Unit Usaha	560.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	375.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
154	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	-				<2,5 Persen 2,5 Persen	20.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Pembuatan Agens Pengendali Hayati	-				8000 Ha 1000 Liter	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	15.000.000,00	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-				1550 Ha	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-				8000 Ha	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
155	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah penyuluh pertanian swadaya yang terlatih Persentase jumlah kelas kelompok tani yang meningkat kelasnya	-				18,29 Persen 6,64 Persen	216.224.000,00						-	245.000.000,00	

	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan PPS Pendampingan Wirausaha Pemuda Penilaian kelas kelompok Penyusunan Program Penyuluhan Penyusunan RD/KK Sekolah Lapang Pertanian berkelanjutan	-				38 Orang 1 Paket 1 Paket 19 Dokumen 1 Paket 1 Paket	216.224.000,00			-	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	245.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-				28 Unit	46.224.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-				38 Unit	170.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab.tegal	-	190.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Dinas Lingkungan Hidup						43.162.694.500,00							52.790.840.500,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.162.694.500,00							52.790.840.500,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						43.162.694.500,00							52.790.840.500,00	
156	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 Persen	20.609.375.600,00						-	20.532.663.000,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-				1 Dokumen 3 Dokumen	23.085.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	45.000.000,00	
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-				3 Dokumen	14.025.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-				1 Laporan	9.060.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-													
						Penyusunan DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan CALK Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-				4 Dokumen 78 Orang	4.972.351.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	4.997.125.000,00	
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				62 Orang/bulan	4.892.816.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	4.897.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				4 Dokumen	79.535.400,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	6.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	29.160.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			87.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	8.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	302.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			26.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					125 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			225.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				40 Unit	0,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD	-		80.000.000,00	
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

[illegible]

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	39.740.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		OPD			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
157	2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Pengendalian dan Perencanaan Lingkungan Hidup	-			100 %	164.320.000,00						-		245.000.000,00	
	2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Tegal	-			2 Dokumen	164.320.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-		245.000.000,00	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	164.320.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			245.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota															
						Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				2 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH															
						Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD	-		0,00	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD															
						Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	OPD			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang															

[illegible]

							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				1 Unit	49.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			49.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				2 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			28.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																
							Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				80 Paket	150.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			360.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim				2 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	134.640.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			136.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Ha Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah m2 Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-			1 Ha 11 Kegiatan 1000 m2 2 Kegiatan	20.000.000,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD	-		90.000.000,00	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				2 Titik	20.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

												1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD				112.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat																		
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-				28 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
164	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh masyarakat	-				28,00 %	54.319.900,00							-			163.682.000,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	-				10 Entitas	54.319.900,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD		-		163.682.000,00		
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-				10 Entitas	54.319.900,00	Kab. Tegal, Slawi, Kudaile	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD				163.682.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
165	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	-				90 %	15.000.000,00							-			19.990.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan Jumlah panerapan sanksi administratif	-				14 Kegiatan	15.000.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD		-		19.990.000,00		
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-				7 Pengaduan	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD				15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-				7 Sanksi	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD				4.990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
166	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	-				30,00 % 67,00 %	20.468.049.000,00							-			26.614.564.700,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola dalam wilayah Kabupaten/Kota	-				204120 Ton	20.468.049.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	OPD		-		26.614.564.700,00		
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						80 Orang	17.708.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						150 Orang	39.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhihnya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-					1 tahun	1.458.905.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		745.000.000,00	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	17.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	1.386.400.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	12.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	18.750.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	22.455.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercukupinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-					1 tahun	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		1.005.000.000,00	
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					112500 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
169	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk ber-Akta Kematian Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	-				100 Persen 97,50 Persen	105.000.000,00							-		215.000.000,00	
	2	12	03		2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya penerbitan dokumen pencatatan sipil	-				100 %	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat		-		215.000.000,00	
	2	12	03		2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					1850 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03		2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					30000 Layanan	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
170	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan OPD/Badan Hukum Persentase Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-				12 OPD 9 Persen	135.790.000,00							-		285.000.000,00	
	2	12	04		2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan dan penyajian data kependudukan	-				100 %	75.790.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat dan OPD/Badan Hukum		-		175.000.000,00	
	2	12	04		2.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					150 Dokumen	30.790.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat dan OPD/Badan Hukum			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04		2.01	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat dan OPD/Badan Hukum			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04		2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan berkala dan berkesinambungan	-				100 persen	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat dan OPD/Badan Hukum		-		110.000.000,00	

2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan					12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat dan OPD/Badan Hukum		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X				NON URUSAN							1.093.646.000,00							1.310.000.000,00	
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.093.646.000,00							1.310.000.000,00	
171	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Umum Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	-				100 persen	1.093.646.000,00						-	1.310.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	-				1 tahun	75.107.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	230.000.000,00	
	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30 Laporan	75.107.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				1 tahun	773.010.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	830.000.000,00	
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	773.010.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		830.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				1 tahun	245.529.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	250.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					40 Unit	245.529.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						11.955.509.400,00							21.300.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.955.509.400,00							21.300.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.955.509.400,00							21.300.500.000,00	
172	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Pemasdes	-				100 Persen	3.713.509.400,00						-	2.580.500.000,00	
	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				6 dokumen	39.450.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	60.000.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	39.450.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	65.320.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	12.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					12 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				10 unit	0,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		810.000.000,00	
2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-				12 Laporan	373.924.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		563.000.000,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	282.934.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Alat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			54 unit	140.701.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		515.000.000,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.701.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
173	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	-			100 persen	4.000.000.000,00						-		6.300.000.000,00	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa		Terwujudnya Penataan Desa	-			8 desa	4.000.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Desa	-		6.300.000.000,00	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Desa			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				8 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Desa			6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
174	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		Persentase Desa yang melakukan kerjasama	-			82,11 Persen	70.000.000,00						-		300.000.000,00	

2	2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Antar Desa	-				7 dokumen	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Desa	-		300.000.000,00	
2	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					3 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
175	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	-			74 Persen	3.272.000.000,00							-	10.970.000.000,00	
2	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			281 desa	3.272.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa	-	10.970.000.000,00	
2	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					281 Dokumen	187.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					281 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					281 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa															
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					281 Orang	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa															
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					281 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa															
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					109 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa															

								Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					281 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																							
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					281 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																							
								Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					281 Orang	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																							
								Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa					20 Desa	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa																							
								Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					281 Dokumen	3.055.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Desa			5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
176	2	13	05					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	-	900.000.000,00									-		1.150.000.000,00				
2	13	05	2.01					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	900.000.000,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-	-	-	1.150.000.000,00					
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																							
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					40 Lembaga	35.085.500,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																							
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					80 Unit	51.147.350,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																							
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					40 Dokumen	13.767.150,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																							
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					1 Dokumen	800.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
								Dinas Perhubungan											108.052.299.300,00								92.574.900.000,00	
2								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											108.052.299.300,00								92.574.900.000,00	
2	15							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											108.052.299.300,00								92.574.900.000,00	
177	2	15	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	nilai kepuasan masyarakat	-			100 %	12.427.436.300,00							-			75.314.600.000,00				

	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-				4 dok	12.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dinas perhubungan	-		33.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dinas perhubungan			33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keu skpd jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-				5 dok 49 orang	4.059.552.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Perhubungan	-		4.440.000.000,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					49 Orang/bulan	3.987.552.300,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Dinas Perhubungan			4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan			240.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai berdasarkan tugas dna fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-				145 orang	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	karyawan Dishub	-		200.000.000,00	
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					5 Orang	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	karyawan Dishub			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

2		15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi skpd jumlah paket bahan logistik yang kantor yang disediakan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan jumlah paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-				12 dok 12 laporan 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt	247.253.000,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	dishub	-	857.000.000,00		
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	dishub		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	dishub		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dishub		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	69.753.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	dishub		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	35.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dishub		77.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dishub		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	277.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dishub			60.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	7.599.131.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	dishub			8.069.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perzinannya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-				4 unit 30 unit 40 unit	215.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dishub	-		800.000.000,00	
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perzinannya					30 Unit	180.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dishub			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					30 Unit	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dishub			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Dishub			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
178	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Rasio konektivitas Rasio Keselamatan	-				0,45 rasio 0,79 rasio 1,96 rasio	95.624.863.000,00						-			17.260.300.000,00	
	2	15	02	2.01		Pemetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan lalu lintas	-				4 dokumen	125.000.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	-		350.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		440.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia jumlah perlengkapan jalan yang terelihara jumlah prasarana di jalan kabupaten/kota yang terbangun	-				500 unit 500 unit 300 unit	93.241.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	14.144.300.000,00	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					300 Unit	80.766.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA USTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		11.894.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					500 Unit	105.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					500 Unit	12.070.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		1.430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					500 Unit	300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					9 Unit	443.863.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota jumlah laporan pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas	-			1 laporan 2 laporan 2 dokumen	710.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	550.000.000,00	
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																
							Jumlah laporan Pelaksanaan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi					2 Laporan	670.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	-			12 laporan	30.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	55.000.000,00	
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin					1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
								Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				495.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				10.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	930.164.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-			718.300.000,00	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				3.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	140.781.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				330.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					3 Paket	45.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			115.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	69.995.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	6.003.354,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			80.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	73.595.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD	-				1 Tahun	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal	-		116.000.000,00	
	2	17	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan					12 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			16.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	-				1 Tahun	3.194.009.158,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal	-		3.501.000.000,00	
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			1.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	444.061.158,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	2.748.958.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Tegal			3.000.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	-				1 Tahun	395.108.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	BMD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	-		350.000.000,00	
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					30 Unit	83.874.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	BMD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

							0						0 0	30.157.800,00	-		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	BMD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							0 Unit	281.076.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	BMD Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
185	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-					19 %	10.000.000,00								-	60.000.000,00				
	2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-					1 Tahun	10.000.000,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Koperasi se-Kab. Tegal	-	60.000.000,00				
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan							150 Unit Usaha	10.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Koperasi se-Kab. Tegal		60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
186	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	-					20 %	100.000.000,00								-	280.000.000,00				
	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Perkoperasian	-					1 Tahun	100.000.000,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	SDM Koperasi se-Kabupaten Tegal	-	280.000.000,00				
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																					
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian							240 Orang	100.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	SDM Koperasi se-Kabupaten Tegal		280.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
187	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-					12 %	0,00								-	50.000.000,00				
	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pemberdayaan Koperasi	-					1 Tahun	0,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Koperasi se-Kab. Tegal	-	50.000.000,00				
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																					
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota							50 Unit Usaha	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Koperasi se-Kab. Tegal		50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
188	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	-					24 %	100.255.500,00								-	410.000.000,00				
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan UMKM	-					1 Tahun	100.255.500,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Usaha Mikro binaan	-	410.000.000,00				
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																					
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro							100 Unit Usaha	100.255.500,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Usaha Mikro binaan		230.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																					
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan							120 Orang	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Usaha Mikro binaan		180.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
189	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi Usaha Mikro yang menjalin kemitraan	-					30 %	99.321.800,00								-	150.000.000,00				
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan UMKM	-					1 Tahun	99.321.800,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Usaha Mikro binaan	-	150.000.000,00				
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																					
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi							1000 Unit Usaha	99.321.800,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Usaha Mikro binaan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											4.437.785.388,00								5.920.000.000,00		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											4.437.785.388,00									5.920.000.000,00	
190	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	-					100 %	51.005.000,00								-	100.000.000,00				

	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				1 Tahun	51.005.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pelaku Usaha	-		100.000.000,00		
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-				12 Dokumen	51.005.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pelaku Usaha	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
191	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				64 %	4.151.780.388,00						-		5.000.000.000,00		
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				1 Tahun	4.151.780.388,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pasar Rakyat yang dikelola	-		5.000.000.000,00		
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-											-				
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-				25 Unit	4.151.780.388,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pasar Rakyat yang dikelola	-		5.000.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
192	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				90 %	105.000.000,00						-		300.000.000,00		
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				undefined undefined	105.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Barang Pokok dan Penting	-		300.000.000,00		
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Barang Pokok dan Penting	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-				12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Barang Pokok dan Penting	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
193	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN ESSECEB	-				-	0,00						-		100.000.000,00		
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	0,00						-		100.000.000,00		
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-											-				
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-				10 Produk	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
194	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				65 %	60.000.000,00						-		120.000.000,00		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				1 Tahun	60.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Alat UTTP dan BDKT	-		120.000.000,00		
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-											-				
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	-				12000 Unit	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Alat UTTP dan BDKT	-		100.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-											-				
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-				10000 Orang	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Alat UTTP dan BDKT	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
195	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				50 %	70.000.000,00						-		300.000.000,00		
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				1 Tahun	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Produk Dalam Negeri	-		300.000.000,00		
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-											-				

[illegible]

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	48.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	84.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket yang disediakan	-				0 Paket	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur	-		100.000.000,00	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan	-				41 Laporan	1.390.781.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur	-		1.496.400.000,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.400.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	588.291.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	781.590.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			829.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dipelihara	-			42 Unit	278.816.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur	-		460.000.000,00	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	156.796.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			210.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	92.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.020.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
197	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap Target Investasi	-			92 Persen	115.000.000,00				5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Investor	-	150.000.000,00		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase peta investasi yang valid	-			20 Persen	115.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Investor	-	150.000.000,00		
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Investor			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Investor			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
198	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	-			92 Persen	175.000.000,00				5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja		-	130.000.000,00		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah calon yang berkomitmen	-			90 Persen	175.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	130.000.000,00		
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja					

							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
199	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dan 2. Persentase Perizinan Non Berusaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan	-				85 Persen	95.000.000,00						-	160.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis layanan perizinan	-				73 Jenis Izin	95.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	160.000.000,00	
2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																					
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-				14000 Pelaku Usaha	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																					
							Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	-				1200 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																					
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-				12 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
200	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	-				93 Persen	225.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha yang telah mematuhi ketentuan Penanaman Modal	-				19,83 Persen	225.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	600.000.000,00	
2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																					
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-				20 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	86.065.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																					
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-				120 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	334.856.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal																					
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-				110 Kegiatan Usaha	75.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pelaku Usaha	-	179.079.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
201	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-				53,77 Persen	8.749.000,00						-	15.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis data yang dimanfaatkan	-				12 Jenis data	8.749.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparatur	-	15.000.000,00	
2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																					

							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	8.749.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Procot	RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	Aparatur			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					27.217.669.000,00									28.700.397.300,00	
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					7.600.000.000,00									3.900.000.000,00	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					7.600.000.000,00									3.900.000.000,00	
202	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-			0,082 Persen 0,204 Persen	1.550.000.000,00							-	2.700.000.000,00	
	2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-			100 Orang	1.050.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal	-		1.700.000.000,00	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota					0 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					100 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					0 Kegiatan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi					312 Orang	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Pemuda umur 16 s/d 30 tahun di Kabupaten Tegal			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				1 Dokumen	500.000.000,00					Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Organisasi Kepemudaan, Pemuda 16 - 30 Tahun	-		1.000.000.000,00	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-				1 Orang	500.000.000,00			RETRIBUSI JASA USAHA	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Organisasi Kepemudaan, Pemuda 16 - 30 Tahun	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
203	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibentuk Peningkatan prestasi olahraga	-				81 Persen 87 Persen	6.050.000.000,00							-		3.200.000.000,00	
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				2 Paket	3.850.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		1.000.000.000,00	
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																	
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-				7 Unit	3.850.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				2 Dokumen	300.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		400.000.000,00	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-				1 Kegiatan	200.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																	
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	-				0 Orang	100.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlit Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				2 Dokumen	250.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa	-		800.000.000,00	
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memasuki Olahraga																	
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga					0 Orang	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																	
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan					0 Orang	250.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Umum, Atlet Olahraga, Pelajar dan Mahasiswa			600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA	
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				1 Dokumen	1.650.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Organisasi Keolahragaan	-		1.000.000.000,00	
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																	
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota					6 Dokumen	1.650.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Organisasi Keolahragaan			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
													19.567.164.000,00									22.700.397.300,00	
204	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	-				100 persen	9.222.618.000,00						-			13.090.397.300,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				11 Dokumen	25.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum	-		54.000.000,00	
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen	23.020.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBUT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum		2.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	990.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum		2.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			65 Orang/bulan	4.109.645.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS disporapar	-	4.472.971.850,00	
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.002.125.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS disporapar		4.322.971.850,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	107.520.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS disporapar		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	10.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar	-	180.000.000,00	
3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				9 Dokumen	347.899.906,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar	-	795.000.000,00	
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.857.900,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	38.035.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	42.720.330,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	30.730.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	95.233.176,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		170.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	98.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					15 Laporan	40.323.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBBT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				6 Dokumen	41.500.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar	-		300.000.000,00	
3	26	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	41.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Porapar			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				4 Dokumen	4.495.103.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Masyarakat dan Swasta	-		6.188.425.450,00		
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					49 Laporan	495.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Masyarakat dan Swasta			4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	339.232.044,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konestifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemerintah, Masyarakat dan Swasta			584.425.450,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	4.155.376.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Pemerintah, Masyarakat dan Swasta			5.600.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	

[illegible]

								Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Pengunjung Wisata			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	02	2.02				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah unit Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			5 Unit	7.984.546.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Pengunjung Wisata	-		7.000.000.000,00	
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpilihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	7.984.546.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Pengunjung Wisata			7.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
206	3	26	03					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	-			97,33 Persen	2.210.000.000,00						-		910.000.000,00	
	3	26	03	2.01				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-			1 kegiatan	2.210.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum	-		910.000.000,00	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Kegiatan	2.210.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Pemerintah, Swasta, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum			910.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
207	3	26	05					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	-			75,57 Orang	150.000.000,00						-		1.400.000.000,00	
	3	26	05	2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dan Masyarakat yang memperoleh Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-			120 Orang	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata	-		1.200.000.000,00	
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																	
								Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				0 Orang	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
								Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				0 Orang	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																	
								Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				0 Orang	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	3	26	05	2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang memperoleh Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-			100 Orang	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata	-		200.000.000,00	

3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Umum, Pokdarwis dan Usaha Pariwisata		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X				NON URUSAN						50.505.000,00							100.000.000,00	
	X	XX			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						50.505.000,00							100.000.000,00	
208	X	XX	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Disporapar	-			100 persen	50.505.000,00						-	100.000.000,00	
	X	XX	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			6 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	0,00	
	X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA USTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X	XX	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			7 Dokumen	50.505.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	100.000.000,00	
	X	XX	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	50.505.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBIT-KONSUMSI TENAGA USTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
											4.490.258.400,00							5.972.000.000,00	
	2					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					4.490.258.400,00							5.972.000.000,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.812.220.400,00							5.657.000.000,00	
209	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	3.684.220.400,00						-	5.395.000.000,00	
	2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 persen	20.895.000,00			-	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	41.000.000,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15.895.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	22.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					5 Paket	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	49.106.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		107.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-					100 persen	212.510.000,00			-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal	-	750.000.000,00	
2	23	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	200.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	12.510.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-					100 persen	477.192.400,00			-		4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal	-	499.000.000,00	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	219.132.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal			265.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	258.060.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal			234.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-					100 persen	176.026.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal	-		482.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Unit	128.716.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal			297.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					47 Unit	7.310.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tegal			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
210	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-					30,94 Angka/Nilai 70,28	628.000.000,00						-		262.000.000,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-					0,596491 persen 1,183356 persen 0,001661 persen	595.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		162.000.000,00	
	2	23	02	2.01	0011	Peneimbangan Peroustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					25 Perpustakaan	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					50 Orang	15.300.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					500 Eksemplar	550.200.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat Kabupaten Tegal			47.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	-				3 kegiatan 0.022 persen	32.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		100.000.000,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan					25 Perpustakaan	32.500.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
211	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	178.038.000,00								-	315.000.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.620.500,00				-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	-	45.000.000,00	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					10 Laporan	38.620.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	-				100 persen	89.902.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		210.000.000,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																

							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					2500 Arsip	89.902.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal		210.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				100 persen	49.514.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	60.000.000,00			
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						51 Laporan	49.514.700,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					51 Laporan	49.514.700,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Masyarakat Kabupaten Tegal		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						Dinas Perikanan						4.523.347.500,00							11.821.000.000,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						4.523.347.500,00							11.821.000.000,00				
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						4.523.347.500,00							11.821.000.000,00				
212	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perikanan	-				100 Persen	3.625.517.100,00						-	5.976.000.000,00			
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-				6 Dokumen	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	OPD	-	260.000.000,00			
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	OPD		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				1 Dokumen	2.269.695.100,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	OPD	-	2.820.000.000,00			
																	1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan						
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25 Orang/bulan	2.232.750.100,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	OPD		2.560.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
																	1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan						
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	36.945.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	OPD		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
																	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan						

[illegible]

[illegible]

								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					48 Unit	120.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	OPD			190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					25 Unit	24.320.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	OPD			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	56.330.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	OPD			375.000.000,00	DINAS PERIKANAN
213	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000) Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	-					14.445.360 Rupiah 2,085.225 Kg/Tahun	529.038.400,00								-	1.165.000.000,00	
	3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	-					1 Dokumen 50 Unit	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		380.000.000,00		
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia						1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			170.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						50 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	-					6 Kelompok 80 Orang	529.038.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		525.000.000,00		
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya						80 Orang	529.038.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			315.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya						6 Kelompok	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

	3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				2 Layanan	0,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		260.000.000,00	
	3	25	03	2.03	0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-				2 Layanan	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
214	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000) Produksi Perikanan Budidaya (kg)	-				156.719.364 Rupiah 2.893.865 Kg/Tahun	275.000.000,00							-		2.845.000.000,00	
	3	25	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-				1 Rekomendasi	0,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		95.000.000,00	
	3	25	04	2.01	0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	-				1 Rekomendasi	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-				5 Kelompok 5 Kelompok 2 Kelompok	0,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		625.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	-				5 Kelompok	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	-				5 Kelompok	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-				2 Kelompok	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN

[illegible]

						Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				10 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		315.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0012		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
215	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUOD) yang bebas dari destructive fishing	-		100 Persen	43.792.000,00						-	210.000.000,00	
3	25	05	2.01			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		1 Unit Usaha	43.792.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-	210.000.000,00	
3	25	05	2.01	0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		1 Pelaku Usaha	43.792.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		210.000.000,00	DINAS PERIKANAN
216	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000) Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	-		132.797.662 Rupiah 5.545.813 kg/Tahun	50.000.000,00						-	1.625.000.000,00	
3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	-		1 Dokumen	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-	105.000.000,00	
3	25	06	2.01	0005		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	-		1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		1 Unit Usaha	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-	680.000.000,00	
3	25	06	2.02	0002		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		1 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		680.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		50 Pelaku Usaha 80 Ton	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal	-	840.000.000,00	
3	25	06	2.03	0001		Peninekatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Peneolaahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	-		10 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal		315.000.000,00	DINAS PERIKANAN

									Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					80 Ton	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			315.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																								
									Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi					50 Pelaku Usaha	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Masyarakat Kab. Tegal			525.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
					Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja										11.842.919.700,00												14.085.000.000,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										1.050.803.800,00													2.165.000.000,00	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										1.050.803.800,00													2.165.000.000,00	
217	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-					100 Persen	5.000.000,00									-			50.000.000,00				
	2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-					100 Persen	5.000.000,00						-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-		50.000.000,00					
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																								
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro					1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-				50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
218	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	-					6,7 Persen	935.541.800,00									-			1.170.000.000,00				
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	-					93 Persen 6,70 Persen	925.541.800,00						-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-		900.000.000,00					
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																								
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					390 Orang	525.541.800,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-				600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																								
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n					120 Orang	400.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-				300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi Persentase LPK yang terakreditasi	-					10 Persen 10 Persen	10.000.000,00						-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-		120.000.000,00					
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																								
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					22 Lembaga	10.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-				120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	07	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	0,00							-			-	-		150.000.000,00				
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																								

							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
219	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	55.000.000,00				-	-	-	-	645.000.000,00			
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00				-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	50.000.000,00		
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																	
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan					50 Orang	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam suatu wilayah kabupaten/kota	-			30 Lembaga	15.000.000,00				-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	120.000.000,00	
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																	
						Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku					30 Lembaga	15.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui informasi pasarkerja (IPK online (SIGNAKER))	-			9000 Orang	10.000.000,00				-	-			-	400.000.000,00		
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																	
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																	
						Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)					19020 Orang	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Migran (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan diklat kerja	-			50 Orang	20.000.000,00				-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	75.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																	
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					50 Orang	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
220	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, UKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-			8,48 Persen	55.262.000,00				-	-			-	300.000.000,00		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	-			54,01 Persen	10.000.000,00				-	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	100.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	

							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2	07	05	2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih			1,29 Persen	45.262.000,00				-		-			200.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaikan				15 Perkara	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekonsiliasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	45.262.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10.792.115.900,00									11.470.000.000,00	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						10.787.115.900,00									11.405.000.000,00	
221	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.839.615.900,00						-			7.130.000.000,00	
3	31	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	17.900.000,00				-	-	-			175.000.000,00	
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9.900.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercukupinya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	-			12 Dokumen	4.839.372.901,00				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-		110.000.000,00	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	4.784.152.901,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	55.220.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelaksananya Peningkatan Kompetensi Pegawai	-			70 Orang	14.000.000,00				-	-	-			200.000.000,00	
3	31	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	14.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercukupinya Layanan Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	441.006.999,00				-	-	-			550.000.000,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.292.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			95.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.058.999,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undaanan yang Disediakan				1 Dokumen	304.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	37.656.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	135.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas	-				1 Paket	0,00	Kel/Desa		-	-	-	-	3.050.000.000,00	
3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	0,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan yang Berkualitas	-				12 Bulan	1.022.736.000,00			-	-	-	-	1.325.000.000,00	
3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	246.000.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	425.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	776.736.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	504.600.000,00			-	-	-	-	1.720.000.000,00	
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya					20 Unit	200.000.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	0,00	Kab. Teggal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	57.600.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	247.000.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
222	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPP	-				80 Persen	3.877.500.000,00			-	-	-	-	3.375.000.000,00	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan industri dalam RPIK	-				66 Persen	3.877.500.000,00			-	-	-	-	3.375.000.000,00	
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					2 Dokumen	3.106.500.000,00	Kab. Teggal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										-	-	-	-		

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					4 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					3 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					8 Dokumen	320.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	750.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
223	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-				100 Persen	20.000.000,00			-		-	-	125.000.000,00	
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rekomendasi Teknis Ijin Usaha Industri yang diterbitkan terhadap pemohon rekomendasi teknis	-				100 Persen	20.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	125.000.000,00	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
224	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SI Nas)	-				49.39 Persen	50.000.000,00			-		-	-	775.000.000,00	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase data IKM yang masuk dalam SI Nas terhadap total populasi IKM	-				0,6 Persen	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	775.000.000,00	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		-								-		-	-		

							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-			600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SII Nas				10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-			125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							5.000.000,00								65.000.000,00		
225	3	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	-			100 Persen	5.000.000,00					-		65.000.000,00		
3	32	03	2.01				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	-			3 Kepala Keluarga	5.000.000,00		-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-	-		65.000.000,00		
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				3 Kepala Keluarga	5.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	-			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
X					NON URUSAN							0,00								450.000.000,00		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							0,00								450.000.000,00		
226	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	0,00						-		450.000.000,00		
X	XX	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Jasa dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Berkualitas	-			1 Paket	0,00		-	-	-	-		450.000.000,00		
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		-			450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
							Sekretariat Daerah					88.837.425.900,00								95.829.778.296,00		
4							UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					88.837.425.900,00								95.829.778.296,00		
4	01						SEKRETARIAT DAERAH					88.837.425.900,00								95.829.778.296,00		
227	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	-			100 persen	35.631.679.900,00					-		20.533.198.500,00		
4	01	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan	-			100 Persen	25.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		119.025.000,00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			119.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan perencanaan dan keuangan	-			100 Persen	12.550.443.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		714.150.000,00	

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			174.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	552.812.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			433.251.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.891.236.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			872.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			122.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			96.013.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			1.090.596.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Layanan Umum	-					100 Persen	1.734.549.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		158.700.000,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan																	

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.330.356.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			6.261.467.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Layanan Umum	-				100 Persen	3.415.715.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		3.097.290.000,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					96 Unit	937.200.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			2.383.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			79.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8 Unit	178.515.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			634.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan perencanaan dan keuangan terpenuhi	-				100 Persen	1.380.118.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		93.633.000,00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2/14 Orang/Bulan	1.280.118.700,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			93.633.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Peningkatan Layanan Umum	-				100 Porsi	2.325.340.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	1.491.356.300,00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah															
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	1.355.654.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		1.063.467.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah															
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					1 Paket	881.531.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		217.746.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah															
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan					1 Paket	88.155.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		210.142.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai SAKIP dan IKM Komponen yang terpenuhi	-				75,67 Porsi	435.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	826.509.600,00	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		396.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					6 Laporan	160.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		207.579.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi															
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					3 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		222.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					3 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			234.717.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Peningkatan kerjasama daerah yang terealisasi					100 Persen	130.622.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		182.505.000,00		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					24 Dokumen	130.622.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			182.505.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
229	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kinerja Perangkat daerah rumpun koordinasi perekonomian pembangunan nilai SAKIP B	-				100 persen	915.806.000,00							-		1.621.291.896,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP	-				4 Dokumen	95.806.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	OPD	-		158.700.000,00		
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					4 Dokumen	95.806.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	OPD			158.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Peningkatan lingkup koordinasi Perekonomian dan Pembangunan menyusun LKJIP	-				100 Persen	110.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	OPD	-		272.964.000,00		
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	OPD			272.964.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang jasa meningkat	-				100 Dokumen	500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		820.479.000,00		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					3 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH, PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			215.832.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

[illegible]

[illegible]

									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					33 Paket	160.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			121.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
									Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					30 Paket	200.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
									Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					7 Paket	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
									Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			44.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							100 Prosen	670.087.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		500.000.000,00		
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			

										Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	200.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1041 Unit	120.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			77.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	2.020.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			242.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-					100 Prosen	39.085.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		39.800.000.000,00	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD					50 Orang/Bulan	38.300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			39.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					250 Paket	595.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					50 Orang	190.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
231	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	-					100 Persen	34.026.800.000,00						-		23.262.125.700,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Perda dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	-					4 Dokumen	4.582.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		4.247.525.700,00	
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					4 Dokumen	2.380.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			2.530.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 Dokumen	530.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			522.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah dokumen dan jumlah orang pada Peningkatan Kapasitas DPRD				12 Dokumen	6.735.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		3.391.300.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	3.342.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			2.034.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					6 Orang	233.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			257.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD					30 Dokumen	3.160.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen / laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-			12 Laporan	4.739.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		2.906.200.000,00	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					2 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			156.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					153 Dokumen	4.564.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				2 Laporan	250.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	275.000.000,00	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-				2 Laporan	250.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil Terfasilitasinya tugas DPRD	-				12 Laporan	13.125.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	7.904.600.000,00	
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-				24 Dokumen	6.300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		3.850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-				16 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		94.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-				3 Dokumen	725.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		660.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-				46 Dokumen	6.000.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan						7.683.805.500,00								8.410.610.600,00	
	5					LINSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.683.805.500,00								8.410.610.600,00	
	5	01				PERENCANAAN						6.034.805.500,00								6.380.610.600,00	
232	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Bappeda Litbang	-				100 Persen	4.992.896.500,00						-	5.119.610.600,00	

5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	-				100 Persen	25.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		48.000.000,00	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	20.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	5.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 Persen	3.779.551.500,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN	-		3.434.947.600,00	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					52 Orang/bulan	3.722.776.500,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			3.309.947.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					5 Dokumen	56.775.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 Persen	25.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		50.000.000,00	
5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					10 Orang	25.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

[illegible]

								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 Persen	590.239.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah	-		558.023.000,00	
	5	01	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PB8NKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	190.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PB8KB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			188.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	399.239.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PB8KB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			368.023.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 Persen	367.064.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah	-		540.000.000,00	
	5	01	01	2.09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	230.063.500,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PB8KB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0005			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4.800.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PB8KB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	41.701.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Perangkat Daerah		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
233	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	-			100 Persen 95,8 Persen	491.909.000,00							-	615.000.000,00	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan sesuai tahapan	-			100 Persen	362.409.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN	-	390.000.000,00		
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik															
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	33.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota															
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	58.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	02	2.01	0007	Koordniasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	271.409.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	-			99 Persen	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN	-	75.000.000,00		
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota															

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			27.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras	-			95,02 Persen 95,02 Persen	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN	-		220.000.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	6.500.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kewilayahan yang selaras	-			95,02 Persen 95,02 Persen	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN	-		174.000.000,00	
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																						85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	70.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN									
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																						7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					1 Laporan	5.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN									
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						2.030.000.000,00	
235	5	05	03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil Kelitbangan yang memanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	-				87,85 Persen	1.649.000.000,00									-		2.030.000.000,00					
5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase artikel hasil penelitian dan pengembangan yang tersubmit untuk dipublikasikan di jurnal terindeks minimal nasional	-				82 Persen	1.049.000.000,00					Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat	-		1.200.000.000,00						
5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset																						950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset					5 Naskah	855.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat										
5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																						100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan					1 Laporan	194.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat										
5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah																						150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah					0 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat										

	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	-					83,82 Persen	600.000.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat	-		830.000.000,00			
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi																				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						1 Laporan	75.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual																				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)						1 Laporan	25.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah																				
							Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah						2 Kegiatan	150.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi																				
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						1 Laporan	350.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
						Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah										644.646.624.250,00								515.155.158.200,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										644.646.624.250,00									515.155.158.200,00	
	5	02				KEUANGAN										644.646.624.250,00									515.155.158.200,00	
236	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah BPKAD	-				100 Persen	132.088.406.750,00									-		3.028.918.200,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi, dan kinerja	-				100 %	25.000.000,00				-	-		OPD BPKAD	-		53.710.000,00			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3 Dokumen	25.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD BPKAD			45.210.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						48 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD BPKAD			1.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD BPKAD			1.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						1 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD BPKAD			1.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD BPKAD			1.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD BPKAD	2.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan keuangan perangkat daerah	-			100 %	130.012.424.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD	303.981.000,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2344 Orang/bulan	129.824.744.750,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	187.680.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD	498.981.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD													
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD				4 Dokumen	0,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Pelayanan Kepegawaian PD	-			100 %	150.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	75.495.000,00	
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	150.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	75.495.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	486.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	592.732.200,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	5.066.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	60.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	67.666.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	40.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	124.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	35.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	17.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	290.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan BMD	-				100 %	100.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	-		200.000.000,00	
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						4 Unit	100.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		0,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		200.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	-				100 %	862.394.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	-	1.083.000.000,00		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		5.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	270.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		400.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	592.394.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		678.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan pemeliharaan BMD	-				100 %	452.588.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD	-	520.000.000,00		
	5	02	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Periznannya						18 Unit	213.250.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		300.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
						Jumlah Mebel yang Dipelihara						5 Unit	5.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		5.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						140 Unit	42.018.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		45.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	192.320.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	OPD BPKAD		170.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
237	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	-				100 %	510.969.770.600,00						-		509.251.240.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Daerah	-				100 %	819.405.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD	-	1.400.000.000,00		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD		35.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						2 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	seluruh OPD		35.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																

							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD															
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD															
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD															
							Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi				48 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD															
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	337.947.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD															
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	289.587.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				144 Orang	191.871.950,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		375.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	-			100 %	510.432.750,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD	-	910.000.000,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	121.959.750,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait															
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4 Dokumen	298.524.125,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	28.340.625,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				144 Orang	61.608.250,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-			100 %	315.306.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD	-	734.000.000,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				48 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban															
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	seluruh OPD		44.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran															

							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					3 Laporan	265.306.900,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD			550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					14 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				100 %	509.324.625.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD	-		506.207.240.000,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					1 Laporan	459.864.667.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD			456.015.091.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					1 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD			10.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					1 Laporan	39.459.958.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		seluruh OPD			40.192.149.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
238	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan BMD Persentase Pembinaan, pengendalian & pengawasan BMD Persentase Perencanaan kebutuhan, Penetapan status, dan pemanfaatan BMD	-				100 % 80 % 85 %	1.588.446.900,00					-		-		2.875.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan BMD	-				100 %	1.588.446.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-	-		2.875.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	
							Jumlah Standar Harga yang Disusun					3 Dokumen	125.250.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah					1 Laporan	680.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			370.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah					1 Laporan	117.950.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			230.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					1 Laporan	157.350.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					1 Laporan	111.480.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	370.801.900,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun					1 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwiringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		-			1.410.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barane Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					144 Orang	25.615.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	-		175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Badan Pendapatan Daerah						19.618.064.000,00							28.798.361.000,00	
	5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.618.064.000,00							28.798.361.000,00	
	5	02					KEUANGAN						19.618.064.000,00							28.798.361.000,00	
239	5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	-			100 %	17.327.719.000,00						-	21.301.210.000,00	
	5	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			100 %	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	70.000.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							0					6 0	20.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	15.755.564.000,00			-	-	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	14.741.687.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							0					0 0	15.675.164.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		14.590.847.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	80.400.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		150.840.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	142.362.000,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
							0					7 0	50.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		142.362.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	155.320.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	530.000.000,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	0				0 0	5.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0				0 0	40.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0				0 0	7.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0				0 0	32.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0				0 0	10.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0				0 0	1.320.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0				0 0	60.000.000,00	-	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	200.000.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	4.442.161.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						0					0 0	0,00	-		OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		3.942.161.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						0					20 0	200.000.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	967.200.000,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	1.085.000.000,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1.750.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						0					0 0	265.500.000,00	-		OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		325.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	699.950.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Meningkatnya Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah		750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah subkegiatan terlaksana	-			3 Person	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM	-		351.750.000,00	
	5		03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			304.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			31.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang terbayar	-			100 Persen	473.373.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM	-		262.500.000,00	
5		03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN BKPSDM			157.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5		03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

[illegible]

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN					1 Laporan	409.562.900,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat & PNS Kab. Tegal		903.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					674 Dokumen	67.800.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat & PNS Kab. Tegal		57.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					3 Dokumen	173.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat & PNS Kab. Tegal		215.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian					1 Dokumen	342.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat & PNS Kab. Tegal		63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	persentase formasi JPT Pratama dan Jabatan Administrator (kepala SKPD) yang terisi	-					98,15 Persen	758.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS	-	666.503.000,00	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS		63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					1500 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS		136.253.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN					5 Dokumen	640.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	PNS		467.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Kab. Tegal			10.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5		04		02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase CPNS mengikuti pelatihan dasar	-				100 Persen	1.200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN kab. Tegal	-		3.902.062.000,00		
5		04		02	02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Kab. Tegal			7.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5		04		02	02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-				5 Laporan	1.180.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN kab. Tegal			3.878.962.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5		04		02	02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	-				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN Kab. Tegal			15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
6						INSPEKTORAT						19.910.468.500,00									13.622.030.200,00		
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						19.910.468.500,00									13.622.030.200,00		
6		01				INSPEKTORAT DAERAH						19.910.468.500,00									13.622.030.200,00		
244	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Inspektorat	-				100 Persen	15.820.573.900,00							-		9.967.030.200,00	
6	01	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evauasi Kinerja PD	-				100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat	-		90.000.000,00		
6		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-				11 Dokumen	9.353.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			75.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-				15 Laporan	5.646.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			15.000.000,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	4.978.868.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat	-		4.585.000.000,00		
6		01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-								Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.							

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					60 Laporan	400.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			400.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	5.333.689.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat	-		1.105.000.000,00	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					15 Unit	2.114.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			705.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	1.778.724.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			200.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1.440.965.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			200.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	786.847.558,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat	-		810.000.000,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			10.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	328.207.558,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			350.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	448.640.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			450.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.058.952.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat	-		900.000.000,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					29 Unit	558.952.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			400.000.000,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					90 Unit	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			100.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	400.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Inspektorat			400.000.000,00	INSPEKTORAT	
245	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase desa menyajikan laporan keuangan secara akuntabel Persentase pengawasan kinerja pemerintah daerah Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	-				20 Persen 80 % 90 Persen 93 Persen	2.585.405.000,00							-		2.560.000.000,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				213 lapoan	1.850.000.000,00			-	-		OPD	-		1.860.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					59 Laporan	55.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					50 Laporan	300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD			135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Revisi Laporan Kinerja																	
							Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja					16 Laporan	95.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					50 (P3D) 34 (AKD) Laporan	1.300.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD			1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-		OPD			125.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				85 Persen	735.405.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		700.000.000,00		
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					28 Laporan	735.405.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			700.000.000,00	INSPEKTORAT	
246	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase meningkatnya kualitas pendampingan pengawasan dan asistensi	-				100 Persen 80 Persen	1.504.489.600,00							-		1.095.000.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				100 Persen	188.885.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-		195.000.000,00		
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																	
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					2 Rekomendasi	76.704.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD			75.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	

							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	-				1 Rekomendasi	112.180.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	-			100 Persen	1.315.604.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD	-	900.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				48 perangkat daerah	362.322.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				13 perangkat daerah	292.715.200,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		290.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				29 Kegiatan	606.044.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				48 perangkat daerah	54.523.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	OPD		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	7						Kecamatan Adiwerna					2.712.211.300,00								2.722.000.000,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					2.712.211.300,00								2.722.000.000,00	
	7	01					KECAMATAN					2.712.211.300,00								2.722.000.000,00	
247	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Adiwerna	-			100 persentase	2.423.117.300,00						-	2.399.000.000,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	-			12 Dokumen	3.022.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	4.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	1.610.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		2.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.412.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		2.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	-			12 Dokumen	1.660.495.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	1.745.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.642.205.300,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		1.700.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.290.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		45.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA

7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan	-	-	-	1 Dokumen	55.277.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	56.000.000,00	-
7	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	24 Orang	55.277.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	56.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	100 persentase	105.512.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	119.000.000,00	-
7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	7.573.500,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	8.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	16.685.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	20.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	7.299.500,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	10.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	28.040.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	30.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	7.294.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	8.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	12 Dokumen	2.930.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	3.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	600 Laporan	35.690.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-	-	-	100 persentase	132.666.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	-
7	01	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	18 Unit	132.666.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	Perangkat Daerah	-	150.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	-	100 persentase	150.745.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	160.000.000,00	-
7	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	53.366.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	60.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	97.379.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	100.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jumlah BMD dalam kondisi baik	-				100 persentase	315.400.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		165.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-				8 Unit	94.470.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			100.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				14 Unit	8.900.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			15.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				1 Unit	37.030.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			50.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				1 Unit	175.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Perangkat Daerah			0,00	KECAMATAN ADIWERNA
248	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna Persentase Nilai IKM Kecamatan	-				80.57 Nilai 83,00 persentase	49.827.000,00							-		59.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-				100 persentase	45.505.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		55.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				1 Dokumen	45.505.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			55.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	-				100 persentase	4.322.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		4.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-				12 Laporan	4.322.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			4.500.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
249	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakatan yang terbina	-				100 prosentase	63.790.000,00							-		70.000.000,00	

	7		01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data lembaga kemasyarakatan desa	-				100 persentase	63.790.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		70.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					21 Lembaga Kemasyarakatan	32.309.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			40.000.000,00		KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					12 Dokumen	4.161.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			5.000.000,00		KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	27.320.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			25.000.000,00		KECAMATAN ADIWERNA
250	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	-					100 prosentase	4.360.000,00							-		5.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	-					100 prosentase	1.910.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		2.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
								Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	1.910.000,00		Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah			2.000.000,00		KECAMATAN ADIWERNA
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	-					1 Paket	2.450.000,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-		3.000.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinerigi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undeangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					12 Laporan	2.450.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		3.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
251	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	-			100 persentase	114.749.000,00					-		123.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-			100 persentase	114.749.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	123.500.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					200 Orang	63.421.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		70.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					21 Orang	3.038.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		3.500.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	48.290.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		50.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
252	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase rata-rata tertib administrasi desa Kecamatan Adiwerna	-			100 persentase	56.368.000,00					-		65.000.000,00	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen tertib administrasi desa	-			12 Dokumen	56.368.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah	-	65.000.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					12 Dokumen	20.754.000,00	Kab. Tegal, Adiwerna, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Perangkat Daerah		25.000.000,00	KECAMATAN ADIWERNA
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Penyelesaian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			12 Bulan	136.783.600,00			-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	111.747.900,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	3.695.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		4.678.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	27.348.700,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		28.326.100,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	5.776.400,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		6.674.800,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	25.992.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		26.992.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	5.794.500,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		8.726.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	52.400.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		3.400.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	15.777.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		32.951.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-		100 %	82.860.000,00			-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	114.287.500,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	33.000.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		35.287.500,00	KECAMATAN BALAPULANG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	49.860.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		79.000.000,00	KECAMATAN BALAPULANG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	-					12 Bulan	182.521.000,00				-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				236.408.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-					1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				2.100.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-					12 Laporan	43.508.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				46.728.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-					12 Laporan	137.913.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				187.580.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined	-					undefined undefined	126.512.000,00			-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		-		67.629.850,00		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-					7 Unit	85.606.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				60.499.850,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-					8 Unit	9.580.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				7.130.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-					1 Unit	31.326.000,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				0,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	-					100 %	38.518.600,00			-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		-		34.826.000,00		
	7	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																				
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-					1 Dokumen	38.518.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-				34.826.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
254	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	-					85,79 %	52.390.800,00						-					58.512.310,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-					100 %	40.757.200,00			-		1. Penyajian Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		-		42.622.310,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				

								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	8.063.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			9.217.810,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						1 Dokumen	32.693.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			33.404.500,00	KECAMATAN BALAPULANG	
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan	-				100 %	11.633.600,00				-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		15.890.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1 Laporan	11.633.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			15.890.000,00	KECAMATAN BALAPULANG	
255	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Terbina	-				100 %	93.523.000,00					-					95.055.072,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data Lembaga Kemasyarakatan Desa	-				20 Desa	93.523.000,00				-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		95.055.072,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20 Lembaga Kemasyarakatan	22.583.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			23.860.000,00	KECAMATAN BALAPULANG		
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Dokumen	8.063.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			9.140.000,00	KECAMATAN BALAPULANG		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	62.875.800,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			62.055.072,00	KECAMATAN BALAPULANG		
256	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Tramtibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	-				100 %	22.852.100,00					-					27.364.900,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	-				20 Desa	10.488.500,00				-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		12.444.900,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	10.488.500,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			12.444.900,00	KECAMATAN BALAPULANG		
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	-				1 Laporan	12.363.600,00				-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		14.920.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-				1 Laporan	12.363.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			14.920.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
257	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	-			100 %	106.973.800,00				-		-			120.071.500,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-			100 %	106.973.800,00			-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		120.071.500,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	63.238.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			57.727.500,00	KECAMATAN BALAPULANG
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	43.735.200,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			62.344.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
258	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa	-			60 &	65.958.000,00				-		-			69.800.000,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	-			20 Desa	65.958.000,00			-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		69.800.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	15.563.600,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			16.740.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					1 Dokumen	33.877.200,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			35.210.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	16.517.200,00	Kab. Tegal, Balapulang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			17.850.000,00	KECAMATAN BALAPULANG
							Kecamatan Bojone						2.620.385.000,00								1.997.576.000,00		
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.617.525.000,00								1.994.076.000,00		
	7	01					KECAMATAN						2.617.525.000,00								1.994.076.000,00		
259	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Bojone	-			100 Persen	2.276.700.200,00						-			1.641.666.000,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	-			10 Dokumen	3.535.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-		5.000.000,00		

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	22.834.000,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		23.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	6.149.500,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		4.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	11.363.000,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		10.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.569.200,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		2.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	54.320.000,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		4.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	29.815.500,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		40.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah (Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-					100 Persen	84.816.600,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-	102.000.000,00		
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0,00		Kab. Tegal, Bojong-Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		30.000.000,00		KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

[illegible]

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.140.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		5.000.000,00	KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.092.200,00	Kab. Tegal, Bojong, Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		20.000.000,00	KECAMATAN BOJONG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Bojong, Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		20.000.000,00	KECAMATAN BOJONG
260	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	-			90,93 Persen	54.777.800,00						-	68.840.000,00	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-			100 Persen	44.907.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-	57.840.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	44.907.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		57.840.000,00	KECAMATAN BOJONG
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	3.063.600,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	1.000.000,00	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	3.063.600,00	Kab. Tegal, Bojong, Bojong	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		1.000.000,00	KECAMATAN BOJONG
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yg terlaksanakan	-			100 Persen	6.807.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-	10.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	6.807.200,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong		10.000.000,00	KECAMATAN BOJONG
261	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong	-			80 Persen	89.434.800,00						-	94.800.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan Data lembaga Kemasyarakatan Desa	-				17 Desa	89.434.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		94.800.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10 Lembaga Kemasyarakatan	27.474.000,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		28.000.000,00	KECAMATAN BOJONG	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						1 Dokumen	3.723.600,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		4.500.000,00	KECAMATAN BOJONG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7 Laporan	58.237.200,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		62.300.000,00	KECAMATAN BOJONG	
262	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	-				100 Persen	9.408.400,00								-		13.900.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	-				17 Desa	5.434.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		9.900.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2 Laporan	5.434.800,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		9.900.000,00	KECAMATAN BOJONG	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	-				1 Laporan	3.973.600,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		4.000.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1 Laporan	3.973.600,00		Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		4.000.000,00	KECAMATAN BOJONG	

263	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	-				100 Persen	141.337.800,00											125.220.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-				100 persen	141.337.800,00					Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		125.220.000,00		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	100.623.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong			66.220.000,00		KECAMATAN BOJONG			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					20 Orang	2.434.800,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong			4.000.000,00		KECAMATAN BOJONG			
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	38.280.000,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong			55.000.000,00		KECAMATAN BOJONG			
264	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	-				76 Persen	45.866.000,00										-	49.650.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen tertib administrasi desa	-				27 Dokumen	45.866.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong	-		49.650.000,00			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					1 Dokumen	5.293.600,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong			10.000.000,00		KECAMATAN BOJONG			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					2 Dokumen	16.229.200,00	Kab. Tegal, Bojong, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Bojong			23.000.000,00		KECAMATAN BOJONG			
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			

[illegible]

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	PALAK BARANG DAN JASA TERENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	1.500.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	-				12 Dokumen	1.812.790.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	1.804.581.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	1.784.781.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				24 Orang/bulan	1.792.990.400,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	1.784.781.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	19.800.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				12 Dokumen	19.800.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	PALAK BARANG DAN JASA TERENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	19.800.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				12 Bulan	135.645.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	135.645.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	3.388.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-				1 Paket	3.388.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	PALAK BARANG DAN JASA TERENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	3.388.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	25.103.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-				1 Paket	25.103.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	PALAK BARANG DAN JASA TERENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	25.103.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	4.546.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-				1 Paket	4.546.000,00	Kab. Tegal, BumiJawa, Semua Kel/Desa	PALAK BARANG DAN JASA TERENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	4.546.000,00	KECAMATAN BUMIJAWA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Loestik Kantor										Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		KECAMATAN BUMIJAWA

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.384.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		76.384.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.830.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		4.830.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		3.600.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17.794.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		17.794.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-				100 Persen	88.479.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	89.479.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	28.000.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		29.000.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	13.200.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		13.200.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	47.279.000,00	Kab. Tegal, Bumiawa, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		47.279.000,00	KECAMATAN BUMIUAWA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.225.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		5.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.258.100,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		18.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.240.900,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		10.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.030.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		49.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.027.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		8.500.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	32.140.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		48.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI
7		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan	-			100 %	36.270.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi	-	70.000.000,00	
7		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	36.270.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Aparatur Kecamatan Dukuhturi		70.000.000,00	KECAMATAN DUKUHTURI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				10 Desa	12.344.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		20.000.000,00			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-				1 Laporan	12.344.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		20.000.000,00		KECAMATAN DUKUHWARU		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undang	-				1 Kegiatan	4.100.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		5.000.000,00			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-				1 Laporan	4.100.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		5.000.000,00		KECAMATAN DUKUHWARU		
282	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	-				100 PERSEN	122.760.000,00								-		137.000.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	-				100 Persen	122.760.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		137.000.000,00			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-				100 Orang	73.660.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		80.000.000,00		KECAMATAN DUKUHWARU		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-				30 Orang	4.100.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD KEC. DUKUHWARU	-		5.000.000,00		KECAMATAN DUKUHWARU	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		-													-				

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	17.350.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		20.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	3.425.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		3.500.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		4.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	26.558.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		40.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 Persen	102.284.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara	-	170.000.000,00		
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		65.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	29.010.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		35.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					25 Unit	24.549.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		40.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	48.725.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		30.000.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 Persen	174.659.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara	-	183.500.000,00		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1.177.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		3.500.000,00		KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.332.100,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		30.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	145.150.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		150.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	134.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara	-	211.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	97.880.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		55.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.840.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		6.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.698.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		75.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.642.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		75.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
286	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		IKM Kecamatan Jatinegara	-			86.70 Nilai	70.039.800,00						-	89.000.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Ketersediaan data penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-			100 Persen	56.007.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara	-	63.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	56.007.600,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		63.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		-	-			-	2.447.400,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	3.000.000,00	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.447.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		3.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					17 Orang	97.876.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		100.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					17 Orang	1.894.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		3.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	39.240.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		52.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
290	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	-				85 Persen	54.654.400,00						-	184.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	-				17 Persen	54.654.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara	-	184.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3 Dokumen	6.184.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		20.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	22.074.800,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		30.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	20.707.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		60.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		60.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		7.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	3.557.400,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Jatinegara		7.000.000,00	KECAMATAN JATINEGARA	
							Kecamatan Kedungbanteng						2.399.628.100,00								2.913.550.000,00	
7							UNSUR KEWILAYAHAN						2.399.628.100,00								2.913.550.000,00	
7	01						KECAMATAN						2.399.628.100,00								2.913.550.000,00	

[illegible]

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.201.700,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	-	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		17.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.127.200,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		9.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.733.000,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		32.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.372.700,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		3.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	32.999.000,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		40.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-				100 persen	71.575.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	95.000.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		35.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	25.000.000,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		25.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	46.575.000,00	Kab. Tegay, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		35.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan PD	-				100 persen	310.121.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-		318.550.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	550.000,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			550.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	44.971.800,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			45.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	264.600.000,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			273.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan PD	-				100 persen	92.597.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-		125.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					9 Unit	68.800.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			90.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	8.650.000,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			15.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	15.147.000,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG			20.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
292	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan	-			88 %	42.646.600,00								-		58.000.000,00	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik Terkoordinasikan	-				100 persen	36.314.800,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-		50.000.000,00			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				5 Dokumen	36.314.800,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PALJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-		50.000.000,00		KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-				-	3.091.800,00				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	0,00				
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-				2 Laporan	3.091.800,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PALJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		0,00		KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Terselenggarakan	-				100 persen	3.240.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	8.000.000,00				
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkai dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-				2 Laporan	3.240.000,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PALJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	8.000.000,00		KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
293	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase LKD yang terfasilitasi kedungbanteng	-				66.67 Persen	57.653.000,00							-	78.000.000,00				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan Data Perkembangan Desa	-				10 kegiatan	57.653.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	78.000.000,00				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-				10 Lembaga Kemasyarakatan	19.066.800,00		Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PALJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	32.000.000,00		KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																			

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4 Dokumen	1.956.800,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		6.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	36.629.400,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		40.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
294	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	-			100 Persen	3.244.800,00				Pemerintahan		-	10.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	-			10 desa	1.622.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1.622.400,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		6.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-				1.622.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	4.000.000,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	1.622.400,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		4.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
295	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	-			88 Persen	74.128.000,00						-	108.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	-			88 persen	74.128.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	108.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					200 Orang	34.225.600,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		45.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					100 Orang	1.622.400,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		8.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	38.280.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		55.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
296	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	-				56.44 Persen	15.000.000,00				Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan		-	46.500.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	-				10 desa	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	-	46.500.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					10 Dokumen	2.588.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		7.500.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	5.453.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		20.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	3.278.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		6.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Peneanekatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																

								Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	1.275.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		7.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	2.406.000,00	Kab. Tegal, Kedungbanteng, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		6.000.000,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG		
						Kecamatan Kramat								3.891.669.200,00								5.026.862.000,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN								3.891.669.200,00									5.026.862.000,00	
	7	01				KECAMATAN								3.891.669.200,00									5.026.862.000,00	
297	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	2.919.149.700,00					-		3.191.562.000,00				
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	-					6 Dokumen	10.404.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat	-	17.050.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	8.828.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		13.200.000,00	KECAMATAN KRAMAT		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan																		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	1.576.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		3.850.000,00	KECAMATAN KRAMAT		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan disusun tertib administrasi dan tepat waktu	-					14 Dokumen	2.002.773.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat	-	2.239.842.000,00			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					27 Orang/bulan	1.978.933.200,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		2.144.142.000,00	KECAMATAN KRAMAT		
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		

[illegible]

								Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan					20 Paket	24.830.500,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		19.800.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	51.989.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		55.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12 Paket	17.419.800,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		16.500.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	52.880.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		4.840.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	43.872.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		45.100.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-					100 Persen	31.250.000,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat	-	346.500.000,00	
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		38.500.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73.561.500,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		66.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	110.055.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		159.500.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD dalam kondisi baik	-			28 Unit	445.898.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat	-	119.900.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	96.330.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		81.400.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.800.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		16.500.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	133.768.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		22.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		0,00	KECAMATAN KRAMAT
298	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		-	-			-	69.091.600,00						-	52.200.000,00	

[illegible]

								0					0 0	19.749.600,00			PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Krama		33.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT			
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																					
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Dokumen	3.591.800,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Krama		3.300.000,00	KECAMATAN KRAMAT				
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7 Laporan	71.096.600,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Krama		99.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Ketersediaan data perkembangan Kelurahan	-					1 Kelurahan	610.429.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat	-	1.501.500.000,00					
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					8 Lembaga Kemasyarakatan	10.520.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		16.500.000,00	KECAMATAN KRAMAT				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	500.000.000,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 2. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		1.375.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					4 Pokmas / Ormas	99.909.600,00	Kab. Tegal, Kramat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Kramat		110.000.000,00	KECAMATAN KRAMAT				
300	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		-	-					-	10.213.600,00						-	9.900.000,00					

[illegible]

303	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Lebaksiu	-				100 Persen	1.887.427.200,00												2.074.962.400,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	-				7 Dokumen	16.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		-			20.000.000,00		
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					10.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3 Laporan	8.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					10.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhnya pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan tepat waktu	-				12 Dokumen	1.426.196.200,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		-			1.582.962.400,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						19 Orang/bulan	1.408.916.200,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					1.533.092.400,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					49.870.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan kepegawaian sesuai ketentuan	-				2 Kegiatan	15.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		-			20.000.000,00		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						5 Orang	15.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					20.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhnya administrasi umum perangkat daerah	-				12 Bulan	132.810.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		-			90.500.000,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	4.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					4.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	20.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD					20.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU		
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		4.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.800.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		22.500.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		6.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	54.010.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		4.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	OPD		30.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Daerah	-				100 Persen	33.865.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	90.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	33.865.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		90.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	-				12 Bulan	144.613.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	140.400.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				695 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		1.500.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	43.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		45.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.113.000,00	Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		93.900.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jumlah BMD dalam kondisi baik	-				25 Unit	118.943.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	130.200.000,00	

[illegible]

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		8.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	62.000.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		75.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
306	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksu	-			100 Persen	16.960.000,00						-	22.000.000,00	
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya desa dalam penanggulangan bencana	-			15 Desa	12.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN	-	17.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	12.200.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		17.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terfasilitasinya desa dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			15 Desa	4.760.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN	-	5.000.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	4.760.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		5.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
307	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksu	-			100 Persen	107.250.000,00						-	143.100.000,00	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-			100 Persen	107.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN	-	143.100.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				180 Orang	60.350.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		83.100.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	46.900.000,00	Kab. Tegal, Lebaksu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		60.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU
308	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksu	-			74 Persen	102.000.000,00						-	171.500.000,00	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpenuhinya desa tertib administrasi desa	-			12 Desa	102.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN	-	171.500.000,00	

7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					15 Dokumen	25.000.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		30.500.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					15 Dokumen	25.600.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		39.500.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					15 Dokumen	9.000.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		63.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	11.900.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		0,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	6.400.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		10.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	7.000.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		7.500.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1 Dokumen	5.000.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN		6.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
7		01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	12.100.000,00		Kab. Tegal, Lebaksiu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat, ASN dan Non ASN		15.000.000,00	KECAMATAN LEBAKSIU	
						Kecamatan Margasari						2.604.238.500,00									3.035.900.000,00	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						2.598.365.700,00									3.024.900.000,00	
7		01				KECAMATAN						2.598.365.700,00									3.024.900.000,00	
309	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Kecamatan Margasari	-			100 Persen	2.281.285.500,00							-		2.411.200.000,00	
7		01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	-			9 Dokumen	8.517.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	11.500.000,00		
7		01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6.217.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		7.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI	

	7			01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-				3 Laporan	2.300.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEUTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	4.500.000,00		KECAMATAN MARGASARI
	7			01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Disusun Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	-				12 Dokumen	1.787.168.500,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	1.865.000.000,00		
	7			01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	1.800.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						25 Orang/bulan	1.769.888.500,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)							
	7			01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	65.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	17.280.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEUTU (PBJT)							
	7			01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Kepegawaian Sesuai Ketentuan	-				1 Kegiatan	3.500.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	65.000.000,00		
	7			01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		65.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						25 Orang	3.500.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEUTU (PBJT)							
	7			01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-				12 Bulan	133.688.600,00				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	112.200.000,00		
	7			01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	5.200.000,00		KECAMATAN MARGASARI
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	3.471.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEUTU (PBJT)	-						
	7			01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	18.500.000,00		KECAMATAN MARGASARI
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	18.846.400,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEUTU (PBJT)	-						
	7			01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

[illegible]

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2.200.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		2.500.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	52.848.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		51.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	67.752.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		61.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD dalam kondisi baik	-					25 Unit	133.842.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	122.000.000,00			
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	94.322.400,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		80.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					21 Unit	12.340.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		16.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	27.180.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		26.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
310	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	-					83.24 Nilai	68.366.600,00						-	94.000.000,00			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-					100 Persen	58.019.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	75.000.000,00			
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5 Dokumen	58.019.200,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBjT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		75.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-					-	3.392.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	5.000.000,00			
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

									Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-				1 Laporan	3.392.400,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			5.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
	7	01	02	2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Terlaksananakan	-				100 Persen	6.955.000,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		14.000.000,00		
	7	01	02	2.04	0003				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-				2 Laporan	6.955.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		14.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
311	7	01	03						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				71.33 Persen	85.137.800,00								-		147.200.000,00		
	7	01	03	2.01					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				100 Persen	85.137.800,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		147.200.000,00		
	7	01	03	2.01	0001				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-				10 Lembaga Kemasyarakatan	23.001.000,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		32.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
	7	01	03	2.01	0002				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-				1 Dokumen	3.149.200,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		5.200.000,00		KECAMATAN MARGASARI
	7	01	03	2.01	0003				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-				2 Laporan	58.987.600,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		110.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
312	7	01	04						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				100 Persen	13.229.800,00								-		31.000.000,00		
	7	01	04	2.01					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				13 Desa	9.762.400,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		25.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-				3 Laporan	9.762.400,00		Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		25.000.000,00		KECAMATAN MARGASARI
	7	01	04	2.02					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	3.467.400,00					Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-		6.000.000,00		
	7	01	04	2.02	0001				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-				-									-				

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1 Laporan	3.467.400,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	6.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
313	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	-			100 Persen	100.273.000,00						-	186.000.000,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 Persen	100.273.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	186.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					200 Orang	58.240.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		120.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					30 Orang	3.228.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		6.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	38.805.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		60.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
314	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	-			78.90 Persen	50.073.000,00						-	155.500.000,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen tertib administrasi desa	-			13 Dokumen	50.073.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari	-	155.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					2 Dokumen	6.933.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		12.500.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					6 Dokumen	21.412.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		26.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	14.870.000,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		50.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Margasari, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Margasari		55.000.000,00	KECAMATAN MARGASARI
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.670.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			26.670.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.549.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			4.090.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			3.000.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.569.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			32.110.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-				100 Persen	87.710.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		58.180.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	87.710.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			58.180.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-				12 Bulan	116.531.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-		122.791.500,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			1.100.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.721.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD			39.721.500,00	KECAMATAN PAGERBARANG

7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	76.810.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		81.970.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Dalam Kondisi Baik	-				25 Unit	126.060.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD	-	121.748.000,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					8 Unit	77.810.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		68.708.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					16 Unit	16.240.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		16.240.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	32.010.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	OPD		36.800.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG	
317	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang KKM Kecamatan Pagerbarang	-				100 Persen 84,3 Persen	59.732.000,00						-	61.620.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-				100 Persen	49.387.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	50.675.000,00		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					3 Dokumen	49.387.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang		50.675.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG	

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan terlaksanakan	-				100 Persen	4.865.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	5.065.000,00		
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	4.865.000,00		Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	5.065.000,00		KECAMATAN PAGERBARANG	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat yang Terlaksanakan	-				100 Persen	5.480.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	5.880.000,00		
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2 Laporan	5.480.000,00		Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	5.880.000,00		KECAMATAN PAGERBARANG	
318	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pagerbarang	-				100 Persen	81.819.000,00							-	81.055.000,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Terbina	-				100 Persen	81.819.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	81.055.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6 Lembaga Kemasyarakatan	17.080.000,00		Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	20.075.000,00		KECAMATAN PAGERBARANG	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Dokumen	6.620.000,00		Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	5.620.000,00		KECAMATAN PAGERBARANG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					6 Laporan	58.119.000,00		Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-	55.360.000,00		KECAMATAN PAGERBARANG	

[illegible]

										Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	39.360.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang		37.800.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG			
321	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Rata-Rata Tertib Administrasi Desa Kecamatan Pagerbarang	-					61.44 Persen	49.749.800,00							-		47.834.000,00				
	7	01	06		2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Tertib Administrasi Desa Kecamatan Pagerbarang	-					16 Dokumen	49.749.800,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang	-		47.834.000,00				
	7	01	06		2.01	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3 Dokumen	5.425.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang			5.625.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG				
	7	01	06		2.01	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																					
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4 Dokumen	13.350.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang			13.550.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG				
	7	01	06		2.01	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																					
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						1 Dokumen	14.022.400,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang			13.450.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG				
	7	01	06		2.01	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																					
							Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						1 Dokumen	13.442.400,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang			11.699.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG				
	7	01	06		2.01	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																					
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						1 Dokumen	3.510.000,00	Kab. Tegal, Pagerbarang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan Pagerbarang			3.510.000,00	KECAMATAN PAGERBARANG				
						Kecamatan Pangkah										2.402.175.300,00									0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN										2.402.175.300,00										0,00	
	7	01				KECAMATAN										2.402.175.300,00										0,00	
322	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	1.919.418.600,00								-		0,00				
	7	01	01		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	11.940.000,00							-	-		0,00				
	7	01	01		2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								6 Dokumen	5.970.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-			-		0,00	KECAMATAN PANGKAH			
	7	01	01		2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	5.970.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
7	01	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.435.872.300,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					22 Orang/bulan	1.418.592.300,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
7	01	01	2.02	0003			Pelaksanaan Penatausahaan dan									-	-	-	-		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
7	01	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.05	0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					22 Orang	45.000.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	103.940.194,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi					1 Paket	2.167.800,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	17.271.400,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	8.230.800,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	31.143.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	3.626.194,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	38.701.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-	-	-	-		
7	01	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.037.500,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.07	0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	30.500.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0005			Pengadaan Mebel					50 Unit	17.500.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.07	0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6 Unit	27.037.500,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	138.627.606,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat									-	-	-	-		
7	01	01	2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	49.003.606,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	88.524.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan									-	-	-	-		
7	01	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	109.001.000,00			-	-	-	-	0,00	
7	01	01	2.09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					12 Unit	70.000.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									-	-	-	-		
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12 Unit	9.340.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									-	-	-	-		
7	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					4 Unit	29.661.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKAH
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi									-	-	-	-		

323	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-						91.887.900,00						-		0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-						77.577.900,00						-		0,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5 Dokumen	77.577.900,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-						14.310.000,00						-		0,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							1 Laporan	14.310.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
324	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-						127.786.900,00						-		0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-						127.786.900,00						-		0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							23 Lembaga Kemasyarakatan	35.502.300,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							1 Dokumen	5.890.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							6 Laporan	86.394.600,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
325	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-						16.760.000,00						-		0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-						13.660.000,00						-		0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							2 Laporan	13.660.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-						3.100.000,00						-		0,00	
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							1 Laporan	3.100.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
326	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-						182.959.900,00						-		0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-						182.959.900,00						-		0,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun							500 Orang	128.229.900,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							50 Orang	4.450.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							12 Dokumen	50.280.000,00	Kab. Tegal, Pangkah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-		0,00	KECAMATAN PANGKAH

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	28.975.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			91.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-					12 Bulan	272.038.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN	-		273.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						6 Paket	20.427.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN			20.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						6 Paket	79.892.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			65.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						6 Paket	24.663.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			25.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						6 Paket	57.714.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			60.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						6 Paket	47.342.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			60.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			18.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN			25.000.000,00	KECAMATAN SLAWI

[illegible]

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					40 Unit	213.230.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan NON ASN		196.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara					6 Unit	14.960.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan NON ASN		5.500.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					40 Unit	41.995.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan NON ASN		40.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	35.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan NON ASN		75.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
329	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	-				86.17 Nilai	90.340.000,00						-	113.000.000,00	
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase ketersediaan data penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	-				100 Persen	83.440.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-	98.000.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	83.440.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		98.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	-				100 Persen	6.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-	15.000.000,00	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2 Laporan	6.900.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN SLAWI

330	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi	-				100 Persen	3.885.857.000,00					-	3.989.189.900,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	-				5 Desa	98.787.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-	169.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10 Lembaga Kemasyarakatan	26.335.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		31.500.000,00	KECAMATAN SLAWI
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						4 Dokumen	4.880.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		22.500.000,00	KECAMATAN SLAWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						9 Laporan	67.572.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		115.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Ketersediaan data perkembangan kelurahan	-				5 Kelurahan	3.787.070.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-	3.820.189.900,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						10 Lembaga Kemasyarakatan	39.330.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		60.000.000,00	KECAMATAN SLAWI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun						15 Unit	3.316.615.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		2.920.189.900,00	KECAMATAN SLAWI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						5 Pokmas / Ormas	431.125.000,00		Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		840.000.000,00	KECAMATAN SLAWI

331	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	-				100 Persen	31.487.000,00									38.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kel yang difasilitasi penanggulangan bencana	-				10 Desa/Kelurahan	31.487.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-		38.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-				4 Laporan	31.487.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-		38.000.000,00	KECAMATAN SLAWI	
332	7	01	05			PROGRAM PENYELenggaraan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	-				100 Persen	67.000.000,00								-	78.500.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-				100 Persen	67.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-	78.500.000,00		
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-				100 Orang	28.720.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-		28.000.000,00	KECAMATAN SLAWI	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				12 Dokumen	38.280.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Masyarakat	-		50.500.000,00	KECAMATAN SLAWI	
333	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	-				100 Persen	79.132.000,00							-	95.000.000,00		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen tertib administrasi desa daerah sesuai ketentuan	-				5 Dokumen	79.132.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat	-	95.000.000,00		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-				5 Dokumen	51.782.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evoluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat	-		67.000.000,00	KECAMATAN SLAWI	
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	-				1 Dokumen	12.350.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat	-		28.000.000,00	KECAMATAN SLAWI	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	

										Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Tegal, Slawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat			0,00	KECAMATAN SLAWI		
										Kecamatan Suradadi						1.867.238.500,00									7.912.700.000,00			
	7									UNSUR KEWILAYAHAN						364.096.800,00									420.800.000,00			
	7	01								KECAMATAN						364.096.800,00										420.800.000,00		
334	7	01	01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	37.500.000,00							-		45.000.000,00			
	7	01	01	2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	37.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		-	45.000.000,00				
	7	01	01	2.07	0005					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				23 Unit	37.500.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-			45.000.000,00	KECAMATAN SURADADI			
335	7	01	02							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	62.829.800,00							-		71.100.000,00			
	7	01	02	2.01						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	51.112.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-		49.500.000,00				
	7	01	02	2.01	0002					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	51.112.600,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			49.500.000,00	KECAMATAN SURADADI			
	7	01	02	2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	3.142.400,00			-	-	-	-	-	4.000.000,00				
	7	01	02	2.02	0002					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.142.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	-	-	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN SURADADI			
	7	01	02	2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	8.574.800,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-		17.600.000,00				
	7	01	02	2.04	0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	8.574.800,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			17.600.000,00	KECAMATAN SURADADI			
336	7	01	03							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	81.318.600,00							-		71.500.000,00			
	7	01	03	2.01						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	81.318.600,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-		71.500.000,00				

7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					10 Lembaga Kemasyarakatan	21.811.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		31.900.000,00	KECAMATAN SURADADI
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					8 Laporan	59.507.600,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		39.600.000,00	KECAMATAN SURADADI
337	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	17.022.800,00					-		22.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	-	-			-	14.390.400,00				1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-	17.600.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	14.390.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		17.600.000,00	KECAMATAN SURADADI
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	2.632.400,00				1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-	-	4.400.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					2 Laporan	2.632.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	-		4.400.000,00	KECAMATAN SURADADI
338	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	-			100 Persen	116.653.600,00						-	128.700.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	116.653.600,00				1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-	128.700.000,00	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					100 Orang	78.373.600,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		71.500.000,00	KECAMATAN SURADADI
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	38.280.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		57.200.000,00	KECAMATAN SURADADI
339	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	48.772.000,00					-		82.500.000,00	

	7		01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-									1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			82.500.000,00	
	7		01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3 Dokumen	7.187.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			22.000.000,00	KECAMATAN SURADADI
	7		01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	18.434.800,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			16.500.000,00	KECAMATAN SURADADI
	7		01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					1 Dokumen	19.502.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			11.000.000,00	KECAMATAN SURADADI
	7		01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa															
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					1 Dokumen	0,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			27.500.000,00	KECAMATAN SURADADI
	7		01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					1 Dokumen	3.647.400,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			5.500.000,00	KECAMATAN SURADADI
	X						NON URUSAN						1.503.141.700,00									7.491.900.000,00
	X	XX					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.503.141.700,00									7.491.900.000,00
340	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.503.141.700,00							-		7.491.900.000,00
	X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.150.000,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-		11.550.000,00	
	X	XX	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	2.875.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			4.950.000,00	KECAMATAN SURADADI
	X	XX	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	3.275.000,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			6.600.000,00	KECAMATAN SURADADI
	X	XX	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.099.805.500,00			-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-		51.000.000,00	
	X	XX	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Orang/bulan	1.081.515.500,00	Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI			0,00	KECAMATAN SURADADI

X		XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	18.290.000,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		51.000.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	0,00							-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-	13.750.000,00	
X		XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
														1 Paket	0,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		7.150.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
														1 Orang	0,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		6.600.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	81.474.956,00						-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI	-	109.450.000,00		
X		XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
														1 Paket	3.163.500,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		4.400.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
														1 Paket	12.115.100,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		17.600.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
														1 Paket	11.477.000,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		3.850.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
														1 Paket	15.721.000,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		27.500.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
														1 Paket	9.105.356,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		14.300.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
														12 Dokumen	2.800.000,00		Kab. Tegal, Suradadi, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	KECAMATAN SURADADI		3.300.000,00	KECAMATAN SURADADI	
X		XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.140.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		25.746.000,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.944.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		12.186.500,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	kecamatan talang		3.600.000,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	29.651.500,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		38.333.000,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-				100 Persen	65.195.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	40.000.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	31.010.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		10.000.000,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	34.185.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		30.000.000,00	KECAMATAN TALANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	-				12 Bulan	135.328.483,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	122.070.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															

[illegible]

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	57.984.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		65.000.000,00	KECAMATAN TALANG
	7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-		-	4.266.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	13.557.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	4.266.000,00	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		13.557.000,00	KECAMATAN TALANG
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.266.000,00	-	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		13.557.000,00	KECAMATAN TALANG
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	-		100 Persen	7.532.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	kecamatan talang	-	10.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5 Laporan	7.532.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	kecamatan talang		10.000.000,00	KECAMATAN TALANG
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	7.532.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	kecamatan talang		10.000.000,00	KECAMATAN TALANG
343	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		6 Lembaga Kemasyarakatan	59.884.000,00						-	121.947.400,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data lembaga kemasyarakatan desa	-		19 Desa	59.884.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	121.947.400,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					6 Lembaga Kemasyarakatan	33.182.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		61.947.400,00	KECAMATAN TALANG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Lembaga Kemasyarakatan	33.182.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		61.947.400,00	KECAMATAN TALANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7 Laporan	26.702.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		60.000.000,00	KECAMATAN TALANG
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	26.702.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang		60.000.000,00	KECAMATAN TALANG
344	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-		100 Persen	27.035.000,00						-	15.000.000,00	

7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	27.035.000,00	-	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	15.000.000,00	-	-
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	-	1 Laporan	27.035.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	15.000.000,00	-	KECAMATAN TALANG	
345	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase terselenggaranya fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek,sosialisasi,konsultasi) Kecamatan Talang	-	-	-	100 Persen	124.465.200,00	-	-	-	-	-	-	115.000.000,00	-	-	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-	-	-	100 Persen	124.465.200,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	115.000.000,00	-	-	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kautuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	136 Orang	86.185.200,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	60.000.000,00	-	KECAMATAN TALANG	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	12 Dokumen	38.280.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	55.000.000,00	-	KECAMATAN TALANG	
346	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rata - rata desa tertib administrasi	-	-	-	39.56 Persen	18.364.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00	-	-	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	-	-	-	19 Desa	18.364.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	90.000.000,00	-	-	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	5 Dokumen	3.566.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	10.000.000,00	-	KECAMATAN TALANG	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	5 Dokumen	3.566.000,00	Kab. Tegal, Talang, Semua Kel/Desa	PAIAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PB/IT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	kecamatan talang	-	10.000.000,00	-	KECAMATAN TALANG	

[illegible]

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					23x14 Orang/bulan	1.429.000.300,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		1.650.000.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	17.280.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		61.740.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian sesuai ketentuan	-					1 Kegiatan	7.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub	-	76.000.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						1 Orang	7.520.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		76.000.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-					12 Bulan	99.134.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub	-	113.725.500,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	4.765.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		6.849.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	22.124.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		25.000.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	8.760.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		9.760.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Loestik Kantor																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	13.152.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJ/T)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		20.330.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1.742.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJ/T)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		0,00	KECAMATAN TARUB
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	56.335.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJ/T)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		71.456.000,00	KECAMATAN TARUB
350	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	-				100 Persen	6.684.000,00						-	18.100.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	-				20 Desa	4.942.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub	-	14.270.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	4.942.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJ/T)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		14.270.000,00	KECAMATAN TARUB
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terkoordinasikan	-				100 %	1.742.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub	-	3.830.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1 Laporan	1.742.000,00	Kab. Tegal, Tarub, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJ/T)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Kecamatan Tarub		3.830.000,00	KECAMATAN TARUB
351	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	-				100 Persen	117.560.000,00						-	149.941.500,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	18.622.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		10.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (jumlah tersedia/jumlah kebutuhan)	-					100 Persen	104.566.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-	96.500.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit	31.160.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		45.000.000,00	KECAMATAN WARUREJO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						14 Unit	73.406.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		51.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	-					100 Persen	132.585.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-	133.212.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						25 Laporan	0,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		0,00	KECAMATAN WARUREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	32.100.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		32.560.000,00	KECAMATAN WARUREJO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						13 Laporan	100.485.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		100.652.000,00	KECAMATAN WARUREJO

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah BMD dalam kondisi baik	-				100 Persen	135.854.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		130.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				9 Unit	88.750.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		88.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				15 Unit	10.210.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		12.000.000,00	KECAMATAN WARUREJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				2 Unit	36.894.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		30.000.000,00	KECAMATAN WARUREJO
354	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	-				82 Persen	55.000.000,00							-		59.500.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	-				100 Persen	49.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		51.500.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				4 Dokumen	49.000.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		51.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				100 Persen	3.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan warureja	-		3.500.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-				2 Laporan	3.000.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di lingkungan Kecamatan warureja	-		3.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	-				100 Persen	3.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		4.500.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2 Laporan	3.000.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		4.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO	
355	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Yang Terfungsionalisasi	-				75 Persen	70.000.000,00							-		71.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ketersediaan data perkembangan desa	-				12 Desa	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		71.000.000,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					20 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		33.000.000,00	KECAMATAN WARUREJO	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Dokumen	1.500.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		3.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					16 Laporan	38.500.000,00		Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		34.500.000,00	KECAMATAN WARUREJO	
356	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	-				86 Persen	4.500.000,00							-		8.335.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan warureja	-				86 persen	3.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-		5.335.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas denean Kenolisian Neezara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		5.335.000,00		KECAMATAN WARUREJO	
	7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penegakan peraturan perundang-undangan	-				12 Desa	1.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja	-	3.000.000,00		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		3.000.000,00		KECAMATAN WARUREJO	
357	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	-				100 Persen	139.486.000,00							-	161.000.000,00		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	-				100 Persen	139.486.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		161.000.000,00			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					520 Orang	86.506.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		97.500.000,00		KECAMATAN WARUREJO	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					56 Orang	1.500.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		3.000.000,00		KECAMATAN WARUREJO	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	51.480.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		60.500.000,00		KECAMATAN WARUREJO	
358	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan warureja	-				81 Persen	30.000.000,00							-	34.900.000,00		

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa terbit administrasi	-				12 Desa	30.000.000,00				Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		34.900.000,00				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		3.500.000,00		KECAMATAN WARUREJO			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					5 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		12.500.000,00		KECAMATAN WARUREJO			
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		9.100.000,00		KECAMATAN WARUREJO			
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Penganekatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		6.800.000,00		KECAMATAN WARUREJO			
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tegal, Warureja, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 1. Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Masyarakat, ASN dan Non ASN di Lingkungan Kecamatan Warureja		3.000.000,00		KECAMATAN WARUREJO			
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik												8.007.134.850,00						7.230.565.800,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												7.984.934.850,00						7.163.465.800,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												7.984.934.850,00						7.163.465.800,00	
359	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-				100 Persen	2.289.245.000,00							-	2.004.422.300,00				
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi, dan kinerja	-				100 Persen	12.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	15.950.000,00					
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17 Dokumen	10.500.000,00	-	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		14.300.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

[illegible]

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		8.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketercapaian pengadaan BMD	-			100 Persen	444.496.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	136.000.000,00	
8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	444.496.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	-			100 Persen	295.605.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-	322.584.800,00	
8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	244.505.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal		266.384.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD	-					100 Persen	136.888.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		100.677.500,00	
	8		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-				6 Unit	105.400.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		74.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8		01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-				15 Unit	1.200.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		3.877.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8		01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-				10 Unit	10.000.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8		01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-				1 Unit	20.288.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
360	8		01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	-				95,00 Persen	1.069.816.350,00						-			1.045.000.000,00		
	8		01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				100 persen	1.069.816.350,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-			1.045.000.000,00		
	8		01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kepengsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-				700 Orang	602.624.000,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		605.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8		01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-				35 Orang	467.192.350,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		440.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
361	8		01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-			-	3.148.543.500,00							-			2.959.043.500,00		
	8		01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	3.148.543.500,00					Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif		-			2.959.043.500,00		
	8		01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-				7 PARTAI POLITIK Orang	2.766.543.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif		-			2.766.543.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8		01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-				7 PARTAI POLITIK Orang	2.766.543.500,00	Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif		-			2.766.543.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

											Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						100 Orang	382.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	-			192.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
362	8	01	04								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Terbina	-				100 Persen	707.000.000,00							-		110.000.000,00	
	8	01	04	2.01							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				100 persen	707.000.000,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		110.000.000,00	
	8	01	04	2.01	0002						Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
											Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun						12 Dokumen	707.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
363	8	01	05								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	-				100 Persen	148.330.000,00							-		110.000.000,00	
	8	01	05	2.01							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				100 persen	148.330.000,00				Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		110.000.000,00	
	8	01	05	2.01	0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
											Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						100 Orang	148.330.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
364	8	01	06								PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-				-	622.000.000,00						-		935.000.000,00		
	8	01	06	2.01							Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasio dan Penanganan Konflik Sosial	-				100 persen	622.000.000,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal	-		935.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0004						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
											Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						200 Orang	157.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
											Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						12 Dokumen	465.000.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Masyarakat Kabupaten Tegal			825.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X										NON URUSAN																	
	X	XX									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
365	X	XX	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	22.200.000,00						-		67.100.000,00		
	X	XX	01	2.02							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	22.200.000,00				-		6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	-	-	67.100.000,00	
	X	XX	01	2.02	0003						Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
											Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300 Dokumen	22.200.000,00		Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-		6. Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	-		67.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											J U M L A H																	
																		3.143.586.747.600,00									2.662.487.449.025,00	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2026

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2026	Satuan; Sifat Data;Referensi	Perangkat Daerah Koordinator
1	Laju pertumbuhan ekonomi	5,33	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,06	Poin; Tahunan	Sekretariat Daerah
3	Persentase Kemiskinan	6,40	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Tabel 6.2 merupakan aspek dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran(*dampak/impact*) Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026

NO.	Indikator	SATUAN	2026
I	GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,71
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	9,90
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,48
4	Cakupan Akses Sanitasi Aman	%	3,00
5	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	18,33
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO ₂ eq	57.736,27
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	125,00
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,85
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,00
10	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55,75
11	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Angka	6,31
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	5,25
13	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Angka	10,32
14	Jumlah Kasus Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	17,00
15	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,49
II	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,33
17	Tingkat Kemiskinan	%	6,40
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,51
19	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,06
20	Prevalensi Stunting	%	17,00
21	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90,07

NO.	Indikator	SATUAN	2026
22	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,39
23	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	88,00
24	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	51,53
25	Rata-Rata Lama Sekolah	Nilai	7,38
26	Harapan Lama Sekolah	Nilai	12,98
27	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	%	76,25
28	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	%	77,85
29	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	%	65,25
30	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	%	72,50
31	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)	%	
32	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	62,23
33	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	71,05
34	c) Numerasi SD/Sederajat	%	50,07
35	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	62,95
36	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	6,31
37	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,16
38	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	20,43-20,58
39	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Angka	1,13
40	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Angka	31,02-34,48
41	Persentase Desa Mandiri	%	12,59
42	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,06
43	Disparitas Harga (%)	Angka	± 10
44	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB		0,62
45	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	83,66
46	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,63
47	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,31
48	Indeks Pembangunan Gender	Angka	89,95

NO.	Indikator	SATUAN	2026
49	Predikat kabupaten Layak Pemuda	Angka	utama
50	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	23,63
51	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	99987,00
52	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan"	%	64,04
53	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,87
54	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	23,34
III	DAYA SAING DAERAH		
55	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	37,52
56	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	6,41
57	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	
58	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,98
59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,13
60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,57
61	Return on Asset (ROA) BUMD	Angka	4,75
62	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp.	23,79
63	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Angka	27,92
64	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Angka	67,09
65	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	79,66
66	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,70
67	Tingkat Inflasi	%	
68	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	20,00
69	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB (%)	%	0,58
70	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	78,75
71	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	85,25
72	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota"	%	43,73
IV	PELAYANAN UMUM		
73	Indeks Reformasi Hukum	Angka	59,48

NO.	Indikator	SATUAN	2026
74	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	2,20
75	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,29
76	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,64
78	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kejadian	0,00
79	Persentase Penegakan Perda	%	
80	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	93,98
82	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,10
83	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,54
V	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH		
	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar		
	Pendidikan		
	RLS (Rata-Rata Lama Sekolah)	Angka	7,38
	HLS (Harapan Lama Sekolah)	Angka	12,98
	Persentase kinerja akses layanan pendidikan	Persen	100,00
	Persentase kinerja mutu layanan pendidikan	Persen	74,81
	KESEHATAN		
	Angka Harapan Hidup	Angka	74,49
	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	75,00
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 KH;	7,60
	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	10,20
	prevalensi stunting	Persenl	17,00
	Nilai IKM RSUD RSUD dr Soeselo	Angka	100,00
	Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD dr. Soeselo	Angka	84 (AA)
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Suradadi	Angka	100,00
	Nilai Kesehatan kinerja BLUD RSUD Suradadi	Angka	78,36 (A)
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Indeks Infrastruktur publik dan penataan wilayah	Persen	61,26
	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Mantap	Persen	64,35
	Persentase Infrastruktur Kebinamargaan yang Mantap	Persen	71,95
	Persentase Infrastruktur Keciptakarya yang Mantap	Persen	50,99
	Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang Terlatih	Persen	90,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Persentase Kepatuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan	Persen	89,00
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Indeks sarana dan prasarana hunian yang berkualitas	Persen	63,53
	Presentase Infrastruktur Perumahan yang Layak	Persen	52,50
	Presentase Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persen	45,88
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	100,00
	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100,00
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,88
	Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Angka	0,81
	SOSIAL		
	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,40
	Index Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Angka	81,00
	Indeks Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	57,47
	Indeks Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial	Persen	81,00
	URUSAN WAJIB yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar		
	TENAGA KERJA		
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	92,49
	laju peningkatan penempatan pencari kerja	Persen	2,50
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,31
	Skor Pencapaian PPE (Penghargaan Parahita Ekapraya)	Angka	913,3
	Skor Pencapaian KLA (Kabupaten Layak Anak)	Angka	905,00
	Pangan		
	Indek Produksi Tanaman Pangan	Angka	104,38
	angka kecukupan energi	kcal/kapita/hari	2483,00
	PERTANAHAN		
	Presentase Penataan Tanah yang digunakan untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Persen	98,75
	Lingkungan Hidup		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	75,48

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Indeks Kualitas Air	Angka	58,85
	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,03
	Indeks Kualitas Lahan	Angka	40,71
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capil	Angka	81,00
	Indeks Administrasi Kependudukan	Angka	84,56
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	NILAI IDM KABUPATEN BERDASAR RILIS RESMI TIAP TAHUNNYA (BERDASARKAN DATA IDM)		
	Mandiri	Nilai	3,00
	Maju	Nilai	90,00
	Berkembang	Nilai	176,00
	Tertinggal	Nilai	12,00
	Persentase Desa Tertib Lppd	Persen	100,00
	Jumlah Peningkatan Desa Mandiri Di Kab. Tegal (Berdasarkan Data Idm)	Jumlah	2
	Persentase Aparatur Pemerintah Desa Yang Kompeten	Persen	100,00
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	Angka	64,85
	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Angka	64,85
	PERHUBUNGAN		
	Indeks Kinerja Perhubungan	Persen	59,00
	Rasio Konektivitas	Angka	0,79
	Rasio V/C	Angka	0,37
	Rasio Keselamatan	Angka	3,37
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Secara Elektronik dengan aman	OPD	48,00
	Nilai KIP Badan Publik Pemkab Tegal	Nilai	89,50
	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses	Angka	1,52
	Tingkat Kematangan Kepuasan Pengguna	Angka	0,38
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Persentase Koperasi Modern	Persen	0,08
	Persentase koperasi berpredikat minimal cukup sehat	Persen	0,14
	Rasio kewirausahaan di Kabupaten Tegal	Angka	0,01
	persentase UMKM naik kelas	Persen	0,08
	PENANAMAN MODAL		
	persentase nilai investasi PMA	Persen	17,00
	persentase kenaikan nilai investasi PMDN	Persen	89,00
	nilai minat investasi PMA	Rp	1.742 t
	nilai minat investasi PMDN	Rp	1.558 T
	nilai IKM DPMPTSP	Nilai	91,00
	persentase kepatuhan perusahaan	Persen	74,50
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	0,32
	Kabupaten /Kota Layak Pemuda (level)	Level	utama
	Persentase Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis (%/Tahun)	Persen	30,80
	Rasio Atlet Berprestasi (% / Tahun)	Angka	27,48
	Rasio Atlet Berprestasi (% / Tahun)	Persen	27,48
	STATISTIK		
	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	2,75
	PERSANDIAN		
	Indeks Keamanan Informasi	Angka	500,00
	KEBUDAYAAN		
	Persentase Kesenian yang dimanfaatkan	Persen	40,63
	Persentase Kesenian yang dikembangkan	Persen	49,28
	PERPUSTAKAAN		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	48,10
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Angka	70,20
	KEARSIPAN		
	Status hasil pengawasan kearsipan ANRI	Angka	76,00
	Nilai pengawasan (Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI))	Angka	76,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Urusan Pemerintahan Pilihan		
	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	indeks produksi perikanan	Angka	100,00
	prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	1,36
	prosentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan budidaya	Persen	0,25
	prosentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan budidaya	Persen	0,27
	PARIWISATA		
	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	Persen	1,40
	Laju PAD Sektor Pariwisata (% / Tahun)	Persen	1,10
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)	Persen	
	PERTANIAN		
	Indeks Gabungan Produksi Pertanian	Angka	102,44
	Indeks Produksi Tanaman Perkebunan	Angka	98,28
	Indeks Produksi Tanaman Hortikultura	Angka	101,61
	Indeks Produksi Peternakan	Angka	104,10
	PERDAGANGAN		
	nilai sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil pada PDRB	Angka	0,16
	laju pertumbuhan PAD sektor perdagangan	Angka	0,03
	PERINDUSTRIAN		
	persentase penyelesaian hubungan industrial	Persen	64,29
	Rasio nilai industri terhadap tenaga kerja	Angka	
	Prosentase komoditas industri unggulan yang berdaya saing	Persen	50,00
	TRANSMIGRASI		
	persentase transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari provinsi	KK	100,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	SEKRETARIAT DAERAH		
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,06
	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	2,20

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	86,26
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	4,39
	Sekretariat DPRD		
	persentase implementasi RKT	Persen	90,00
	persentase implementasi renja DPRD dalam Renja Sekretariat DPRD	Persen	90,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PERENCANAAN		
	Indeks Perencanaan dan Riset Inovasi	Angka	91,04
	Indeks Perencanaan	Angka	96,17
	Indeks Riset Inovasi	Angka	83,34
	KEUANGAN		
	Persentase Pengelolaan Keuangan dan BMD yg sesuai ketentuan & tepat waktu	Persen	73,03
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi Dokumen Penganggaran	Persen	84,62
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi informasi Dokumen Perbendaharaan	Persen	66,67
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan & Publikasi laporan	Persen	75,00
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan Rekonsiliasi BMD	Persen	75,00
	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan penatausahaan BMD	Persen	78,57
	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	23,00
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	PERSEN;tahunan	53,00
	KEPEGAWAIAN		
	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Angka	83,45
	Persentase ASN mengikuti pengembangan kompetensi	Persen	87,68
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	70,75
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH		
	indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Persen	2,85
	presentase tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan	Persen	93,00
	level kapabilitas APIP	Persen	3,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	KEWILAYAHAN		
	IKM Kecamatan Adiwerna	Angka	80,57
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Adiwerna	Persen	85,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Balapulang	Angka	84,20
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Balapulang	Persen	60,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Bojong	Angka	90,93
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bojong	Persen	80,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Bumijawa	Angka	88,50
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan bumijawa	Persen	66,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Dukuhturi	Angka	81,11
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhturi	Persen	85,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhturi	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Dukuhwaru	Angka	85,00
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan dukuhwaru	Persen	100,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Jatinegara	Angka	86,70
	Persentase LKD yang terfasilitasi jatinegara	Persen	80,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Angka	86,00
	Persentase LKD yang terfasilitasi kedungbanteng	Persen	83,33
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	IKM Kecamatan Kramat	Angka	84,35
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan kramat	Persen	85,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Lebaksiu	Angka	82,25
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan lebaksiu	Persen	80,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Margasari	Angka	83,24
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Margasari	Persen	71,33
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Pagerbarang	Angka	84,30
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pagerbarang	Persen	83,33
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Pangkah	Angka	90,01
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Pangkah	Persen	83,33
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Slawi	Angka	86,17
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Slawi	Persen	100,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Suradadi	Angka	81,98
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Suradadi	Persen	100,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Talang	Angka	90,50
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Talang	Persen	100,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Tarub	Angka	87,05

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Tarub	Persen	83,33
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	Persen	100,00
	IKM Kecamatan Warureja	Angka	82,00
	Persentase jumlah LKD yang terfasilitasi kecamatan Warureja	Persen	75,00
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	Persen	86,00
	Unsur Pemerintahan Umum		
	Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Indeks wawasan kebangsaan	Angka	
	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	95,00
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
	PENDIDIKAN		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	Persen	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	Persen	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Kesetaraan	Persen	100,00
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Nilai	79,20
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Nilai	84,00
	Kemampuan literasi SD	Persen	77,55
	Kemampuan literasi SMP	Persen	78,14
	Kemampuan numerasi SD	Persen	65,79
	Kemampuan numerasi SMP	Persen	72,98
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	74,99
	Iklim Keamanan SD	Persen	71,83
	Iklim Kebinekaan SD	Persen	73,09
	Iklim Inklusivitas SD	Persen	55,02
	Iklim Keamanan SMP	Persen	69,94
	Iklim Kebinekaan SMP	Persen	74,15
	Iklim Inklusivitas SMP	Persen	58,34

NO.	Indikator	SATUAN	2026
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen	100,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	83,37
	Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Dasar	Persen	37,93
	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Persen	65,04
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen	100,00
	KESEHATAN		
PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Nilai	0,90
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,25
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100,00
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100,00
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen	100,00
	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen	93,10
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan pada sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan minuman	Persen	69,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen	87,00
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten dengan mantap	Persen	64,35
Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	Persen	72,50
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	72,50
Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Sistem Penyediaan Air Minum			
	Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen	36,16
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen	100,00
	Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen	2,95
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terlatih	Persen	90,00
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen	89,00
	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	Nilai	49,25
	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen	70,85
	Rasio PBG yang diterbitkan pada tahun berjalan	Persen	57,50
	Rasio Bangunan Gedung (Kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Persen	32,50
	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persen	24,66
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,90
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	93,09
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persen	0,37
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persen	100,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Ketersediaan PSU Perumahan	Persen	36,50
Program Kawasan Permukiman	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Persen	64,52

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase penanganan perumahan tidak layak huni	Persen	27,23
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN		
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	Persen	100,00
	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang diselesaikan	Persen	100,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	100,00
	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen	100,00
	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00
	Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen	100,00
	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Persen	100,00
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00
	SOSIAL		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	87,34
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / Kabupaten	Persen	100,00
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti.	Persen	76,54

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS perseorangan, Keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan.	Persen	20,86
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100,00
Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Cakupan Fasilitasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan / perdagangan orang	Persen	100,00
	TENAGA KERJA		
program perencanaan tenaga kerja	persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100,00
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan	Persen	4,40
program penempatan tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen	45,00
program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	9,19
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen	4,75
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai bulanan	3,21

NO.	Indikator	SATUAN	2026
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Persen	0,03
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki Data Gender dan Anak	Persen	35,42
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen	90,50
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait tingkat kabupaten	Persen	0,01
	PANGAN		
program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	skor pola pangan harapan	Persen	94,00
program penanganan kerawanan pangan	persentase desa rawan pangan	Persen	12,20
program pengawasan keamanan pangan	persentase PSAT yang memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan	Persen	114,40
	PERTANAHAN	Persen	
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah yang tertata	Persen	100,00
Program Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat		0,98
	LINGKUNGAN HIDUP		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen	19,94
	Persentase Peningkatan Status Mutu Air Sungai	Nilai	18,70
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan ruang terbuka yang dilakukan penghijauan	Hektar	3,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persen	60,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen	72,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	70,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diperoleh Masyarakat	Persen	38,89
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	Persen	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	Persen	33,00
	Persentase Sampah Terkelola	Persen	29,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	98,00
	Presentase Perekaman KTP el	Persen	99,00
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen	50,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,00
	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen	75,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Presentase Aktifasi IKD Penduduk ber KTP El	Persen	15,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Program penataan desa	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persen	100,00
Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa tertib Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100,00
Program Pengembangan Desa	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	Persen	100,00
	Persentase Pengembangan Desa	Persen	100,00
	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persen	100,00
program pemberdayaan lembaga, kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	persentase lembaga kemasyarakatan yang berdaya	Persen	76,48
	prosentase ekonomi masyarakat yang berdaya	Persen	64,58
Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen	82,81
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka kelahiran Total)	Poin	2,14
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	7,67
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN	Persentase Keluarga yang mendapat pelayanan di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan	Persen	0,52

NO.	Indikator	SATUAN	2026
KELUARGA SEJAHTERA			
	PERHUBUNGAN		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase trayek aktif	Persen	77,00
	Persentase kinerja lalu lintas	Persen	0,33
	Persentase sarana dan prasarana keselamatan yang berfungsi	Persen	1,00
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai Website dan Medsos PPID	Nilai	88,00
	Nilai Rata-rata SAQ, Visitasi dan Uji Publik	Nilai	89,93
Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen	66,67
	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen	100,00
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	persentase pengawasan pemeriksaan koperasi	Persen	84,78
Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian	persentase SDM koperasi yang berkualitas	Persen	75,60
Program pemberdayaan perlindungan koperasi	persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	80,00
	Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Persen	100,00
	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Persen	58,00
	Persentase Koperasi bermitra	Persen	6,23

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program pemberdayaan UMKM	persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	46,52
program pengembangan UMKM	proporsi usaha mikro yang menjalin kemitraan	Persen	46,52
	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen	12,10
	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen	12,10
	PENANAMAN MODAL		
program pengembangan iklim penanaman modal	persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi	Persen	90,00
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	92,00
program promosi penanaman modal	persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	92,00
program pelayanan penanaman modal	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	85,00
	persentase perizinan non berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan	Persen	85,00
program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	53,52
program pengendalian penanaman modal	persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	93,00
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Persen	0,05
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	0,22

NO.	Indikator	SATUAN	2026
program pengembangan daya saing keolahragaan	persentase atlet berprestasi yang masuk provinsi atau nasional	Persen	28,00
	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Persen	81,00
	STATISTIK		
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00
	PERSANDIAN		
program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan Informasi	Persen	70,96
	KEBUDAYAAN	Persen	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah tradisi yang dikembangkan terhadap jumlah tradisi yang ada	Persen	87,21
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian yang dilestarikan	Persen	55,57
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen	87,98
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	71,43

NO.	Indikator	SATUAN	2026
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	Persen	100,00
	PERPUSTAKAAN		
Program Pembinaan Perpustakaan	KETERSEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN PER KAPITA	Nilai	0,02
	PEMUSTAKA PER KAPITA	Nilai	0,01
	KEARSIPAN		
Program pengelolaan arsip	PERSENTASE KETERSEDIAAN ARSIP	Persen	0,18
Program perlindungan dan penyelamatan arsip	PERSENTASE PERLINDUNGAN ARSIP	Persen	0,18
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Program pengelolaan perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Rupiah	64.238.576,00
	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram	2.267.744,00
Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	prosentase wilayah perairan umum daratan (PUD) yang terjaga kelestarian sumberdaya ikannya	Persen	33,33
Program pengelolaan perikanan budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Rupiah	124905744,00
	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram	2875877,00
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Rupiah	151181640,00
	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kilogram	5851776,00
	PARIWISATA		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang / Tahun)	Orang/Tahunan	1110328,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
program pemasaran pariwisata	Persentase DTW yang dipromosikan	Kegiatan/tahunan	59,65
program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata yang dibina	Orang/Tahunan	33,33
	PERTANIAN		
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen	93.00
	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Nilai	67,63
	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen	20,24
	Luas Lahan Pertanian Organik	Persen	10.00
program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Luas Lahan LP2B yang dipertahankan	Persen	100.00
	Cakupan Jaringan Irigasi	Ha	500.00
	Cakupan Jaringan Jalan Usaha Tani	Ha	150.00
program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	persen	94.00
	Populasi Ternak Besar	jumlah	6926,00
	Populasi Ternak Kecil	jumlah	247671,00
program penyuluhan pertanian	persentase SDM pertanian yang ditingkatkan	Persen	6,00
	peningkatan kelas kelompok tani	Persen	5,34
program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	rasio serangan hama penyakit tanaman	Nilai	4.50

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	PERDAGANGAN	Persen	
Program perijinan pendaftaran perusahaan	persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	100,00
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	64,00
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting	persentase stabilisasi harga bapokting	Persen	90,00
Program standarisasi perlindungan konsumen	indeks tertib ukur	Nilai	60,00
program pengembangan ekspor	persentase pertumbuhan pelaku usaha ekspor	Persen	9,00
program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	Persen	50,00
	Persentase Pasar dalam kondisi tidak rusak berat	Persen	35,28
	Persentase pasar e-ritribusi	Persen	95,00
	Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik	Persen	100,00
	Persentase harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting stabil tahunan	Persen	90,00
	Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen	15,00
	Persentase alat UTTP sesuai standar	Persen	85,69
	Persentase Laju Penggunaan PDN	Persen	65,95
	PERINDUSTRIAN		
Program perencanaan dan	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan sentra industri unggulan daerah	Persen	40,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
pembangunan industri			
program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100,00
program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase Industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SIINas)	Persen	55,00
	TRANSMIGRASI		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan sesuai kuota dari Provinsi	Persen	100,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
	SEKRETARIAT DAERAH		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN	Rata-rata kinerja OPD Rumpun Pemerintahan Tercapai LKJIP	Persen	51,58
	Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Pemerintahan Yang Sesuai Standard (IKM)	Persen	85,85
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rata-rata Nilai kinerja OPD Rumpun Kesra Tercapai LKJIP	Persen	87,56
	Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Kesra Yang Sesuai Standard (IKM)	Persen	85,40

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat - BAGIAN HUKUM	Persentase Pembentukan Perda Yang terselesaikan	Persen	100,00
	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi	Persen	100,00
Program Perekonomian dan Pembangunan- BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD rumpun Perekonomian dan Pembangunan tercapai LKJIP	Persen	55,61
	Persentase Pelayanan Publik OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan yang sesuai dengan standar (IKM)	Persen	87,67
Program Perekonomian dan Pembangunan- BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen	100,00
	Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	Level	3,00
	Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Tingkat	17,00
	SEKRETARIAT DPRD		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Persen	90,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PERENCANAAN		
program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	NA	96,60

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Pembangunan Daerah			
	Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD	NA	100,00
program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	95,52
	Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA	NA	95,52
	Presentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	95,52
	KEUANGAN		
Program pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan	Persen	100,00
	2. Persentase Tersusunya Dokumen Perbendaharaan sesuai ketentuan	Persen	100,00
	3. Persentase Tersusunya Laporan laporan keuangan sesuai ketentuan	Persen	100,00
	Persentase Tersusunya Dokumen Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase Tersusunya Laporan Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00
	2. Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00
	3. Persentase Tersusunya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00
Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio Target PAD Terhadap Potensi PAD (BIDANG RENBANG)	PERSEN	50,00
	Rasio Realisasi Ketetapan Terhadap Ketetapan Pajak Daerah (BIDANG PP)	Persen	100,00
	Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD (BIDANG DALEV)	Persen	100,00
	KEPEGAWAIAN		

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program Kepegawaian	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	Persen	68,27
	% jabatan manajerial terisi	Persen	86,50
	% pegawai pendidikan tinggi dan mernegah dasar (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen	93,00
	% rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen	97,50
	% JF bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen	51,50
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN mengikuti seminar/workshop/sejenisnya sesuai tupoksi jabatan	Persen	89,20
	RISET DAN INOVASI		
program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Riset Inovasi yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	88,05
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH		
Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah	Persen	100,00
	Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan desa	Persen	20,00
	Persentase perangkat daerah berkinerja tinggi dan sangat tinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persen	66,67
	Persentase Perangkat Daerah berakuntabilitas kinerja minimal Baik	Persen	66,67
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	85,00
	Persentase pemantauan TPTGR	Persen	95,00
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi pembangunan ZI	Persen	100,00
	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penerapan Manajemen Risiko	Persen	100,00
	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penilaian mandiri maturitas SPIP	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen	90,60
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen	88,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen	100,00

NO.	Indikator	SATUAN	2026
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen	100,00
	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen	76,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen	70,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen	76,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen	66,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen	74,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen	85,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen	92,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	Persen	70,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen	74,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	Persen	78,90
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen	61,44
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	Persen	94,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	Persen	100,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	Persen	71,00
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	Persen	39,40
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	Persen	62,26
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	Persen	81,00
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

NO.	Indikator	SATUAN	2026
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	95,00
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik	Persen	100,00
	Persentase lembaga pendidikan sma/smk dan PT yang menyelenggarakan pendidikan politik	Persen	74,00
program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100,00
program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase konflik yang tertangani	Persen	100,00
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	persentase gangguan KAMTIBMAS yang tertangani	Persen	100,00

Sumber : Bappedalitbang, 2025

BAB VII PENUTUP

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026 sebagai turunan penjelasan dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 ini memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029. Serangkaian program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 harus dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 dalam rangka mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal.

Sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2026 akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal, sehingga dengan demikian diharapkan akan tercapai tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H